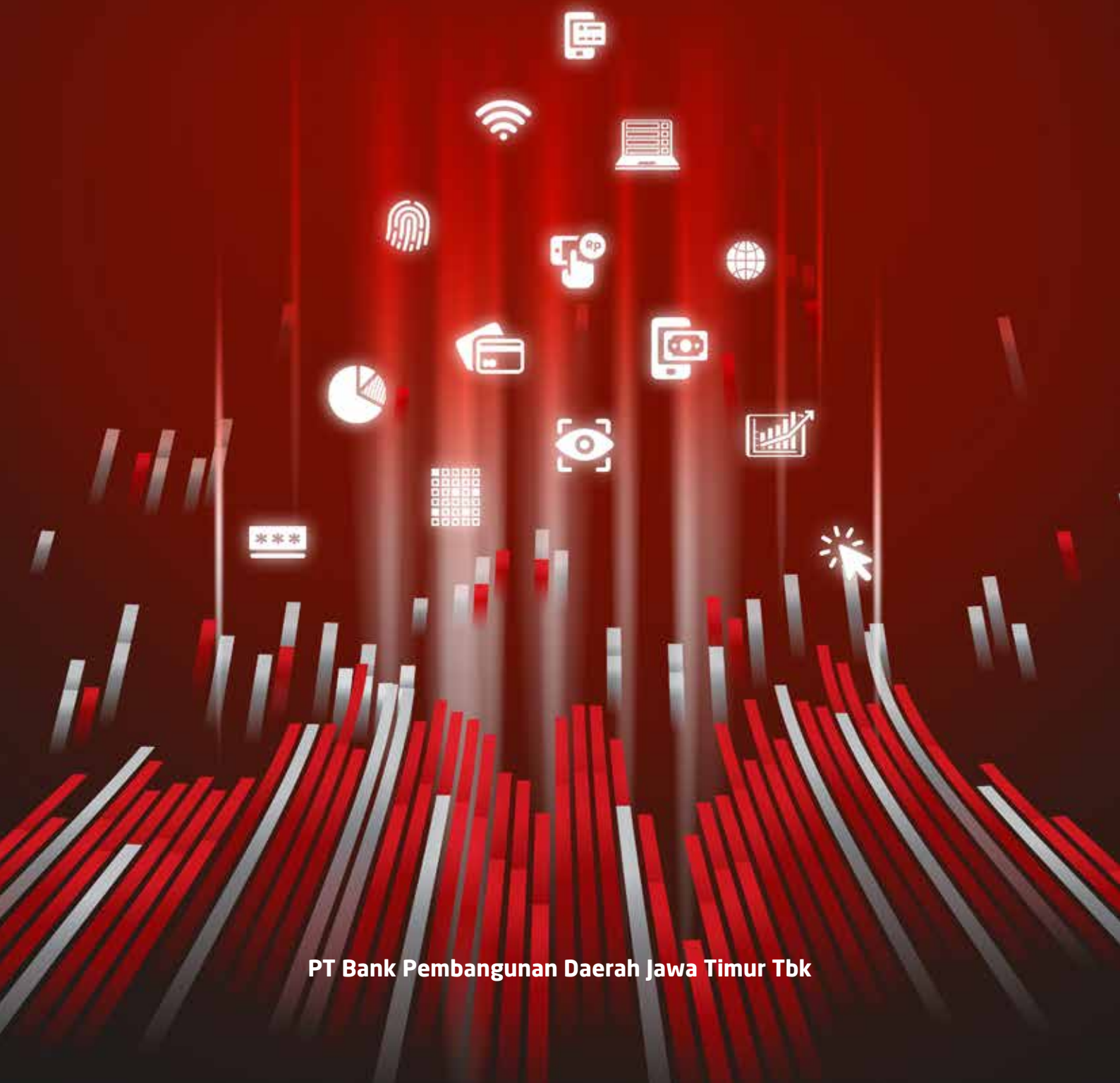




Laporan Tahunan 2022

# Modernisasi Layanan untuk Peningkatan Pertumbuhan Bisnis



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



# Modernisasi Layanan untuk Peningkatan Pertumbuhan Bisnis

Laporan Tahunan

**2022**



Inovasi dan investasi yang telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan mengembangkan JConnect yang merupakan sebuah *Branding Digital Banking* di tahun 2021 telah terimplementasi di tahun 2022. Aplikasi JConnect yang telah dikembangkan meliputi JConnect Sipandai, JConnect EKMKG, JConnect Eloan, JConnect Mobile Banking dan Jconnect Internet Banking. Berbagai aplikasi tersebut telah memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang selanjutnya memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis secara signifikan di tahun 2022.

# Kesinambungan

## Tema



2021

### Pengembangan Bisnis yang Konsisten

#### Melalui Sinergi dan Konektivitas Digital

Perubahan pada *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Hingga tahun 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 dan *new normal* hingga saat ini. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan layanan kepada nasabah, *optimize* proses bisnis serta penguatan IT *Security*. Sebagai wujud komitmen Bank Jatim untuk memberikan ketersediaan layanan perbankan, inovasi, dan kemudahan aksesnya bagi nasabah dan masyarakat, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan "JConnect", sebuah *Branding Digital Banking* yang mencerminkan transformasi digital Bank Jatim dengan semangat mengkoneksikan semua kebutuhan dan kemudahan akan akses layanan perbankan.

JConnect juga mampu meningkatkan efektivitas sinergi Bank Jatim dengan berbagai mitra melalui aplikasi berbasis digital yaitu dengan berbagai *merchant* Bank Jatim yang dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan daerah, bantuan sosial dan Rumah Sakit serta dengan berbagai ekosistem digital di Indonesia.

Sinergi dan konektivitas digital tersebut telah mendorong terlaksananya pengembangan bisnis yang konsisten. Pada masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini, transaksi digital perbankan mengalami kenaikan cukup signifikan. Masyarakat lebih memilih melakukan transaksi perbankan melalui *gadget* mereka masing-masing, tanpa harus datang ke kantor layanan Bank dan dapat dilakukan kapan saja serta dimana saja secara *realtime online*.



2019

### Menjaring Peluang untuk Memberikan Nilai Tambah

#### Menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan

Setelah Bank Jatim mampu memaksimalkan kinerja dan meningkatkan Sinergi Berkelanjutan menuju Transformasi Digital pada 2018, kini Bank Jatim mengangkat tema "Menjaring Peluang untuk Memberikan Nilai Tambah Menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan" Tema tersebut dianalogikan dengan garis yang saling terhubung, hal ini menggambarkan proses digitalisasi bank di setiap operasionalisasi perbankan.

Sementara blok merah berbentuk panah merepresentasikan komitmen Bank Jatim mewujudkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.



2017

### Meraih Peluang,

#### Meningkatkan Nilai Menuju Kinerja Prima yang Berkelanjutan

Dilatar belakangi oleh berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal, Bank Jatim sebagai bank kepercayaan masyarakat Jawa Timur telah melakukan strategi yang presisi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat melalui peningkatan keunggulan kompetitif dan operasional. Berbagai pengembangan yang berkelanjutan dan meraih berbagai peluang baru serta nilai tambah, akan terus dilakukan oleh Perseroan. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, Perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi melalui efektifitas dan efisiensi kinerja. Diharapkan dengan kemampuan Perseroan untuk mengatur strategi dalam meraih berbagai peluang yang mampu meningkatkan nilai Perseroan di segala aspek untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan Perekonomian Jawa Timur.

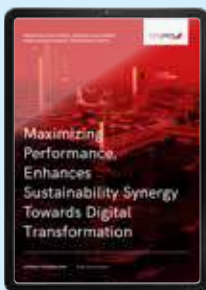


2020

### Menghadapi Tantangan, Menciptakan Peluang

Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun DPK tumbuh signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut telah menjadi tantangan bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi serta kepemilikan *captive market* dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah mampu menangkap berbagai peluang yang ada. Berbagai peluang tersebut di antaranya besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS, tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan *e-commerce*, serta pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki Perseroan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan. Pada tahun 2020, Perseroan telah mampu meningkatkan laba dan aset di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang tahun 2020.



2018

### Memaksimalkan Kinerja, Meningkatkan Sinergi Berkelanjutan Menuju Transformasi Digital

Bank Jatim sebagai bank terpercaya dan kebanggaan Jawa Timur telah mampu melanjutkan estafet prestasi dan pertumbuhan melalui fokus penguatan strategi, efisiensi, serta penyaluran kredit yang baik. Pertumbuhan tersebut semakin menunjukkan bahwa Bank Jatim merupakan mitra strategis bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan usaha. Untuk itu Perseroan akan selalu menguatkan sinergi yang berkelanjutan dengan semua pihak demi meraih pertumbuhan bersama yang berkelanjutan di masa yang akan datang bagi perkembangan Masyarakat Jawa Timur. Selain itu untuk mendukung setiap usaha menggali peluang, Perseroan telah memperkuat daya dukung organisasi dengan memaksimalkan kinerja dengan sumber daya yang ada dan mempersiapkan diri menuju Transformasi Digital di segala aspek.



2016

### Mendukung Pertumbuhan di Lintas Pasar Kami & Memberdayakan Bisnis Potensial Baru

Berbagai program strategis telah direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut yakni peningkatan dan optimalisasi layanan baik yang bersinggungan langsung dengan nasabah melalui diversifikasi produk yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan tingkat kebutuhan perbankan yang beragam, maupun peningkatan layanan elektronik untuk meningkatkan *Level of Service* (LoS), Bank Jatim juga melakukan pengembangan bisnis dan peningkatan pengelolaan SDM menjadi personil yang handal dan profesional.

# Daftar Isi

- **1** **Tema dan Arti Tema**
- **2** **Kesinambungan Tema**
- **4** **Daftar Isi**
- **8** **Sekilas Tentang Bank Jatim**
- **10** **Jejak Langkah**

## 12

### Kilas Kinerja

Capaian Penting 2022	14
Ikhtisar Data Keuangan Penting	16
Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan	16
Ikhtisar Operasional	20
Informasi Saham	21
Aksi Korporasi	23
Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham ( <i>Suspension</i> ) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham ( <i>Delisting</i> )	23
Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi	23
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya	23
Laporan Analisis Perusahaan	24
Peristiwa Penting Tahun 2022	24

## 28

### Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Laporan Direksi	30
Laporan Dewan Komisaris	46
Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2022	54

Kilas Kinerja

12

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

28

## 56

### Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan	58
Nama dan Alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah	59
<i>Brand</i> Perusahaan	61
Riwayat Singkat Perusahaan	62
Keterangan Perubahan Nama	63
Visi, Misi & Budaya Perusahaan	64
Visi	64
Misi	65
Reviu Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	64
Budaya Perusahaan	66
Kegiatan Usaha	69
Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan	69
Produk dan Jasa	70
Wilayah Operasional	82
Struktur Organisasi	84
Profil Direksi	86
Profil Dewan Komisaris	97
Profil Dewan Pengawas Syariah	103
Profil Pemimpin Divisi (Pejabat Eksekutif)	106
Profil Pegawai	116
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	116
Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan	116
Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	117
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	117
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	117



Komposisi Pemegang Saham	118
Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar	119
Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih	120
Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%	121
Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris	122
Klasifikasi Pemegang Saham	123
Pemegang Saham Utama dan Pengendali	123
Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama	123
Struktur Grup Perusahaan	124
Daftar Keanggotaan Asosiasi	124
Kronologi Penerbitan Saham	125
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi	126
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya	126
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)	127
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	127
Penghargaan dan Sertifikasi	129
Informasi yang Tersedia di <i>Website</i>	135

### Profil Perusahaan

56

### Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Bank

136

## 136

### Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

Tinjauan Perekonomian	138
Analisis Perekonomian Global	138
Analisis Perekonomian Nasional	139
Analisis Industri Perbankan	140
Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan	141
Tinjauan Operasional	142
Strategi Bank	142
Aspek Pemasaran	143
Strategi Pemasaran Tahun 2022	143
Pangsa Pasar	143
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	146
Segmen Operasi	147
Segmen Geografis	174
Tinjauan Keuangan	176
Kinerja Keuangan	176
Laporan Posisi Keuangan	176
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	191
Laporan Arus Kas	198
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	201
Suku Bunga Dana	204
Suku Bunga Dasar Kredit	207
Analisis Kualitas Aset Produktif	208
Struktur Permodalan Bank	214
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan	216
Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal	230
Investasi Barang Modal	230
Komitmen dan Kontinjensi	231



Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan	232
Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2023	232
Pencapaian Target dan Target Ke Depan	234
Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen	238
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	239
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/ Modal	239
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	239
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank	242
Perubahan Kebijakan Akuntansi	244
Tingkat Kesehatan Bank	244
Informasi Kelangsungan Usaha	245
Aspek Perpajakan	245
Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter	246
Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar	246
Transaksi <i>Spot</i> dan Transaksi Derivatif	249

## 250

### Human Capital

Strategi Manajemen <i>Human Capital</i>	252
Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen <i>Human Capital</i>	253
Rekrutmen	253
Pengembangan Kompetensi	253
Pengembangan Karir	256
Penilaian Kinerja	257
Remunerasi	258
Program Pensiun	259
Survei Kepuasan Pegawai	260
<i>Human Capital Information System</i>	261
Internalisasi Budaya	262
Struktur Pengelola <i>Human Capital</i>	263
Rencana Kerja <i>Human Capital</i> 2023	264

### Human Capital

250

### Teknologi Informasi

266

## 266

### Teknologi Informasi

Strategi Teknologi Informasi	268
Inovasi Teknologi Informasi	271
Infrastruktur Teknologi Informasi	273
Tata Kelola Teknologi Informasi	274
Struktur Pengelola Teknologi Informasi	279
Rencana Kerja Teknologi Informasi 2023	281

## 282

### Tata Kelola Perusahaan

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	284
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	285
Struktur Organ Perusahaan	285
<i>Governance Soft Structure</i>	286
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	287
Pemegang Saham	287
Rapat Umum Pemegang Saham	287
Direksi	295
Dewan Komisaris	308
Dewan Pengawas Syariah	335
Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	338
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	340
Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris	343
Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	344
Organ dan Komite di Bawah Direksi	368
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015	402
Akuntan Publik	405
Sistem Pengendalian Internal	406
Manajemen Risiko	410
Fungsi Kepatuhan	418
Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	420



Perkara Hukum	420
Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya	422
Akses Informasi dan Data Perusahaan	422
Kode Etik	427
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	434
<i>Whistleblowing System</i>	435
Program Anti Korupsi	437
Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) dan Upaya Penyelesaian	440
Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik	441
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	441
Rencana Strategis Bank	441
<i>Buyback Saham dan Buyback Obligasi</i>	441
Perselisihan Internal	441
Pencegahan Transaksi Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> )	441
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	441
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	442

<i>Governance Principles for Banks</i> yang Diterbitkan oleh <i>Basel Committee in Banking Supervision</i>	450
<i>Good Corporate Governance Assessment</i>	452
Praktik <i>Bad Corporate Governance</i>	453

Tata Kelola  
Perusahaan

282

Tanggung Jawab  
Sosial Perusahaan

454

456

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

457

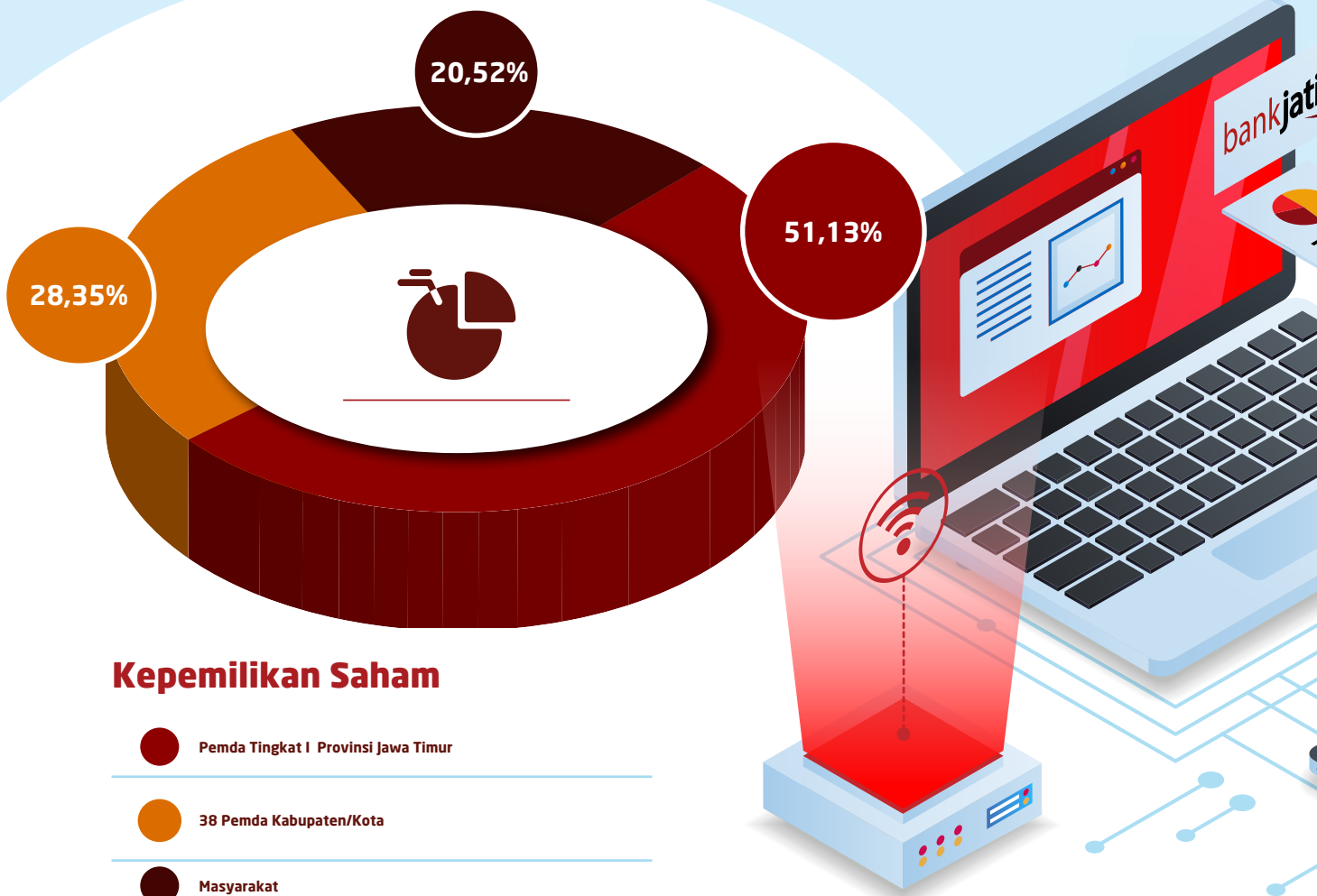
Kriteria OJK dan SK-16

480


Laporan Keuangan



# Sekilas Tentang Bank Jatim



## Kepemilikan Saham

-  Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur
-  38 Pemda Kabupaten/Kota
-  Masyarakat

## Produk & Jasa



Simpanan



Kredit Konsumer



Kredit Menengah dan Korporasi



Total Aset  
**Rp103,03**  
Triliun

**bankjatim**

**ALAMAT KANTOR PUSAT**

JALAN BASUKI RACHMAD 98 – 104, SURABAYA 60271



**Tanggal Berdiri**  
17 Agustus 1961



**Bidang Usaha**  
Jasa Perbankan



**Jumlah Kantor**  
1 Kantor Pusat &  
1.783 Jaringan Kantor



**Jumlah Karyawan**  
4.368 Orang



**Produk Tresuri**



**Jasa Bisnis**



**Jasa Kelembagaan**



**Produk Pembiayaan  
Syariah**



**Produk Dana &  
Jasa Syariah**



**E-Channel dan  
Jasa Lainnya**

# Jejak Langkah

1961 Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur.

1961

1990 Peningkatan Status Ke Bank Devisa.

1990

1976

Perubahan Status Ke Badan Usaha Milik Daerah.

1999

Perubahan Status dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi Perseroan Terbatas.

- Meluncurkan Produk Jatim Prioritas (Layanan Prima Bagi Nasabah Priority), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), Tabungan & Kredit Siumi (Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK), Tabungan Siklus Nelayan; dan
- Bank Jatim dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia (Perbamida) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pemberian Fasilitas Kredit *Linkage Program* Kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2015

- Pembukaan Bank Jatim Cabang Batam;
- Meluncurkan Produk Baru, di antaranya:
  - Yuan *Remittance*;
  - Giro Plus;
  - Jatim Indag Card;
  - *Smile Premium Link*; dan
  - Jempol Link (*Bancassurance* kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life).

2017

2016

- *Launching Program Loan Agreement*;
- *Launching Mobile Bank Jatim*; dan
- *Launching Produk Sipandai*;

2018

- *Launching Program Smart ID Card* bagi Aparatur;
- Sipil Negara (ASN) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- *Launching Kredit Dana Bergulir* (Kredit Hulu Hilir Agromaritim Sektor Kelautan dan Perikanan);
- *Launching Transaksi Remittance*;
- *Launching Virtual Account*.

Pembentukan Unit Usaha Bank Jatim Syariah.

2007

Pembentukan 44 Unit Usaha Mikro.

2014

2012

Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim pada 12 Juli 2012.

- Peresmian dan *Launching* BJTM Connect;
- *Launching* jatimcode (fitur pembayaran Bank Jatim *mobile banking* melalui *scan QR code*);
- *Launching* Portal e-form Kredit;
- Bankjatim dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening efek 5000 civitas akademika bersama);
- Kerja sama dengan GoPay dan Grab; dan
- Tim Bola Voli Putri mencetak *hat-trick* Juara Livoli Divisi Utama.

2019

- *Launching* E-Jatim Prioritas.
- Pengembangan *digital banking* yang berkelanjutan melalui J-Connect.



- Perluasan Layanan Pembayaran Pajak melalui *marketplace*.

2021

2022

- *Launching* Jatim Code QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai pengembangan fitur pembayaran *Mobile Banking*;
- *Launching* produk pemberian kredit kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan satu kesatuan dengan Kredit Jatim Mikro;
- Bank Jatim raih berbagai penghargaan, di antaranya Top of The Top BUMD 2020 dan *The Most Profitable Regional Bank*.

2020

- Peluncuran aplikasi JConnect Invest dengan penawaran perdana produk SBR011 dengan total penawaran 4 seri SBN Ritel sepanjang tahun 2022.
- *Launching* JConnect Remittance yaitu transaksi pengiriman uang dari Malaysia melalui *channel* (Agen atau aplikasi) milik mitra Bank Jatim yaitu MTA – Merchante Asia.

# Kilas Kinerja











## Capaian Penting 2022



**KREDIT KOMERSIAL,  
KORPORASI DAN SINDIKASI  
TAHUN 2022**

**Rp10,32**  
triliun

Meningkat Sebesar



**6,49%**

dibandingkan 2021



**KREDIT KONSUMER  
TAHUN 2022**

**Rp27,70**  
triliun

Meningkat Sebesar



**5,25%**

dibandingkan 2021



**JUMLAH ASET  
TAHUN 2022**

**Rp103,03**  
triliun

Meningkat Sebesar



**2,29%**

dibandingkan 2021





**KREDIT MIKRO, RITEL  
DAN PROGRAM  
TAHUN 2022**

**Rp6,27**  
triliun

Meningkat Sebesar

**25,91%**

dibandingkan 2021



**PEMBIAYAAN SYARIAH  
TAHUN 2022**

**Rp1,90**  
triliun

Meningkat Sebesar

**8,01%**

dibandingkan 2021



**LABA TAHUN BERJALAN  
TAHUN 2022**

**Rp1,54**  
triliun

Meningkat Sebesar

**1,30%**

dibandingkan 2021



**PENDAPATAN BUNGA  
SYARIAH TAHUN 2022**

**Rp4,92**  
triliun

Meningkat Sebesar

**5,12%**

dibandingkan 2021

# Ikhtisar Data

## Keuangan Penting

### Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>					
<b>ASET</b>					
Kas	1.988.262	2.023.077	2.511.548	2.729.776	1.913.960
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	8.805.300	3.659.968	5.734.527	4.075.938
Giro pada bank lain	303.129	211.681	237.715	111.479	97.287
Cadangan kerugian penurunan nilai	(441)	(238)	(53)	(25)	(15)
Giro pada bank lain - neto	302.688	211.443	237.662	111.454	97.272
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	9.917.695	6.884.658	11.989.584	13.349.542
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	(1.763)	(795)	(2.357)	(2.302)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	6.913.175	9.915.932	6.883.863	11.987.227	13.347.240
Tagihan spot dan derivatif	361	-	-	-	-
Surat berharga	23.217.671	32.388.966	14.666.737	9.568.245	7.791.958
Cadangan kerugian penurunan nilai	(400)	(5.943)	(8.118)	(5.174)	(513)
Surat-surat berharga - neto	23.217.271	32.383.023	14.658.619	9.563.071	7.791.445
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	1.038.432	566.891
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	3.420.685	12.573.044	5.837.520	-
Tagihan lainnya	286.147	230.019	131.932	81.265	34.069
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					
Pihak berelasi	134.871	182.889	285.595	320.896	240.632
Pihak ketiga	46.061.786	42.566.670	41.195.171	38.031.404	33.652.605
Jumlah kredit yang diberikan	46.196.657	42.749.559	41.480.766	38.352.300	33.893.237
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(1.831.417)	(1.454.721)	(980.134)	(1.198.550)
Kredit yang diberikan - neto	44.878.045	40.918.142	40.026.045	37.372.166	32.694.687
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	793.900	555.020	416.420	373.341
Biaya dibayar dimuka	166.661	134.200	227.932	285.522	308.418
Aset tetap					
Biaya perolehan	2.109.260	1.906.263	1.882.572	1.595.455	1.501.050
Akumulasi penyusutan	(825.010)	(762.052)	(676.592)	(572.026)	(528.993)
Nilai buku	1.284.250	1.144.211	1.205.980	1.023.429	972.057
Aset pajak tangguhan, neto	502.238	627.211	591.676	522.638	467.788
Piutang pajak	493	412	65	-	-
Aset lain-lain, neto	140.998	115.775	356.098	52.866	46.012
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>103.031.367</b>	<b>100.723.330</b>	<b>83.619.452</b>	<b>76.756.313</b>	<b>62.689.118</b>
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
Liabilitas segera	872.514	593.875	484.834	357.565	514.585
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	15.295.405	17.719.735	14.373.446	14.940.917	14.947.056

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Pihak ketiga	<b>64.630.285</b>	63.668.950	52.412.975	45.604.955	35.968.875
Jumlah simpanan dari nasabah	<b>79.925.690</b>	81.388.685	66.786.421	60.545.872	50.915.931
Simpanan dari bank lain					
Pihak berelasi	<b>141.996</b>	360.169	238.860	137.819	100.108
Pihak ketiga	<b>3.168.842</b>	3.775.548	2.576.134	2.750.611	635.000
Jumlah simpanan dari bank lain	<b>3.310.838</b>	4.135.717	2.814.994	2.888.430	735.108
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	<b>3.891.346</b>	-	-	1.037.094	566.699
Pinjaman yang diterima	<b>631.464</b>	655.288	631.355	1.870.246	725.563
Utang pajak	<b>90.783</b>	165.476	93.135	63.766	149.441
Beban yang masih harus dibayar	<b>520.840</b>	478.647	484.666	433.507	398.536
Liabilitas lain-lain	<b>472.054</b>	529.738	596.630	538.275	211.319
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>89.715.529</b>	<b>87.947.426</b>	<b>71.892.035</b>	<b>67.734.755</b>	<b>54.217.182</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>					
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	<b>2.302</b>	3.021	1.686	-	-
Pihak ketiga	<b>1.839.390</b>	1.810.161	1.680.173	-	-
Jumlah simpanan dari nasabah	<b>1.841.692</b>	1.813.182	1.681.859	-	-
Simpanan dari bank lain					
Pihak ketiga	<b>28.285</b>	52.183	40.610	-	-
Jumlah simpanan dari bank lain	<b>28.285</b>	52.183	40.610	-	-
<b>TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.869.977</b>	<b>1.865.365</b>	<b>1.722.469</b>	-	-
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham:					
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Modal dasar:					
Seri A: 24.000.000.000 saham					
Seri B: 12.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
Seri A: 11.934.147.982 saham	<b>3.753.875</b>	3.753.875	3.753.875	3.750.593	3.744.534
Seri B: 3.081.350.100 saham					
Tambahan modal disetor - neto	<b>532.734</b>	532.734	532.734	528.753	520.603
Surplus revaluasi aset tetap	<b>789.998</b>	749.717	754.382	748.183	673.944
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	<b>(100.912)</b>	(163.811)	(197.081)	(276.061)	(44.575)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	<b>(115.048)</b>	213.177	125.753	20	-
Saldo laba					
Cadangan umum	<b>5.042.390</b>	4.301.777	3.546.323	2.893.565	2.317.122
Belum ditentukan penggunaannya	<b>1.542.824</b>	1.523.070	1.488.962	1.376.505	1.260.308
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.445.861</b>	<b>10.910.539</b>	<b>10.004.948</b>	<b>9.021.558</b>	<b>8.471.936</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>103.031.367</b>	<b>100.723.330</b>	<b>83.619.452</b>	<b>76.756.313</b>	<b>62.689.118</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pendapatan bunga dan syariah	<b>6.882.651</b>	6.655.168	6.088.742	5.839.016	5.200.739
Beban bunga dan syariah	<b>(1.965.595)</b>	(1.977.487)	(2.031.472)	(1.839.415)	(1.512.632)
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO</b>	<b>4.917.056</b>	<b>4.677.681</b>	<b>4.057.270</b>	<b>3.999.601</b>	<b>3.688.107</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>					
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	-	361.666	-	-	-

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Administrasi giro, tabungan dan deposito	184.480	172.779	162.607	155.360	137.745
Penerimaan kembali kredit hapus buku	56.653	55.003	55.055	77.973	77.254
Administrasi kredit	42.511	34.055	41.357	45.993	40.096
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	11.105	5.225	5.613	14.795	7.089
Lainnya	238.820	177.629	153.239	179.859	151.137
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>533.569</b>	<b>806.357</b>	<b>417.871</b>	<b>473.980</b>	<b>413.321</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>					
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.674.698)	(1.644.897)	(1.544.532)	(1.459.394)	(1.411.911)
Umum dan administrasi	(1.229.388)	(1.078.820)	(684.216)	(683.957)	(706.474)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(404.659)	(819.201)	(567.751)	(370.265)	(133.793)
Beban lainnya	(201.054)	(150.020)	(162.365)	(163.386)	(143.329)
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>(3.509.799)</b>	<b>(3.692.938)</b>	<b>(2.958.864)</b>	<b>(2.677.002)</b>	<b>(2.395.507)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>1.940.826</b>	<b>1.791.100</b>	<b>1.516.277</b>	<b>1.796.579</b>	<b>1.705.921</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL</b>					
Fee jasa pelayanan pajak	6.084	4.684	10.063	12.796	13.089
Keuntungan atas penjualan aset tetap	5.274	3.952	2.670	393	-
Keuntungan penjualan efek-efek neto	2.757	131	-	-	-
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	-	3.497	2.255	2.440	3.013
Pendapatan non-operasional lainnya	158.513	404.119	16.688	58.490	39.635
Beban non-operasional	(83.405)	(269.509)	(40.586)	(6.565)	(7.960)
<b>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL / TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)</b>	<b>89.223</b>	<b>146.874</b>	<b>(8.910)</b>	<b>67.554</b>	<b>47.777</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>2.030.049</b>	<b>1.937.974</b>	<b>1.507.367</b>	<b>1.864.133</b>	<b>1.753.698</b>
<b>BEBAN PAJAK - NETO</b>	<b>(487.225)</b>	<b>(414.904)</b>	<b>(18.405)</b>	<b>(487.628)</b>	<b>(493.390)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.542.824</b>	<b>1.523.070</b>	<b>1.488.962</b>	<b>1.376.505</b>	<b>1.260.308</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>					
Surplus revaluasi aset tetap	40.281	(4.665)	6.199	74.239	44.713
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	100.163	41.074	100.536	(289.357)	12.535
Penyesuaian Saldo Awal	(19.678)	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	(17.586)	(7.804)	(21.556)	57.871	(3.134)
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>					
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(400.611)	103.326	155.226	25	-
Penyesuaian Saldo Awal	(3.730)	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	76.116	(15.902)	(29.493)	(5)	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK</b>	<b>(225.045)</b>	<b>116.029</b>	<b>240.405</b>	<b>(157.222)</b>	<b>54.114</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.317.779</b>	<b>1.639.099</b>	<b>1.729.367</b>	<b>1.219.283</b>	<b>1.314.422</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)</b>	<b>102,75</b>	<b>101,43</b>	<b>99,16</b>	<b>91,80</b>	<b>84,15</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>					
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi	7.030.426	6.421.514	5.950.142	5.793.913	5.126.743
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	476.364	384.463	153.239	396.007	336.066
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	56.653	55.003	55.055	77.973	77.254
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	172.136	416.380	29.007	74.120	55.739
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(82.913)	(269.509)	(40.586)	(6.565)	(7.960)
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	(1.931.344)	(1.983.506)	(1.799.442)	(1.832.032)	(1.501.446)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.659.597)	(1.644.897)	(1.490.765)	(1.427.754)	(1.360.329)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.296.665)	(1.211.045)	(544.941)	(777.253)	(785.200)
Pembayaran pajak	(389.372)	(378.098)	(378.774)	(581.512)	(544.875)
<b>Kas neto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi</b>	<b>2.375.688</b>	<b>1.790.305</b>	<b>1.932.935</b>	<b>1.716.897</b>	<b>1.395.992</b>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(7.000)	-	112.000	(112.000)	-
Kredit yang diberikan	(4.347.656)	(1.268.793)	(3.128.466)	(5.038.885)	(2.464.765)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(4.095.066)	-	1.038.432	(471.540)	(566.891)
Tagihan reverse repo	(4.402.162)	9.152.359	(6.735.524)	(5.837.520)	-
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(117.044)	235.620	(282.585)	(53.071)	9.831
Liabilitas segera	278.638	109.040	127.269	(146.873)	93.811
Simpanan dari nasabah	(1.434.484)	14.733.587	7.922.408	9.629.941	11.070.824
Simpanan dari bank lain	(848.777)	1.332.296	(32.826)	2.153.322	(713.853)
Liabilitas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.891.346	-	(1.037.094)	470.394	566.699
Liabilitas lain-lain	(39.476)	77.535	(146.658)	27.092	35.672
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>(8.745.993)</b>	<b>26.161.949</b>	<b>(230.109)</b>	<b>2.337.757</b>	<b>9.427.320</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
Pembelian surat berharga	8.846.760	(17.722.229)	(4.943.265)	(1.774.238)	(3.032.249)
Perolehan aset tetap	(248.269)	(70.838)	(32.487)	(22.126)	(31.236)
Penjualan aset tetap	5.274	4.556	2.671	393	-
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>8.603.765</b>	<b>(17.788.511)</b>	<b>(4.973.081)</b>	<b>(1.795.971)</b>	<b>(3.063.485)</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	(23.824)	23.933	(1.238.891)	1.144.682	(571.314)
Penerimaan dari penambahan modal saham	-	-	7.263	14.209	1.826
Pembayaran liabilitas sewa	(21.111)	-	(886)	-	-
Pembayaran dividen kas	(782.458)	(733.508)	(723.747)	(683.865)	(660.386)
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(827.393)</b>	<b>(709.575)</b>	<b>(1.956.261)</b>	<b>475.026</b>	<b>(1.229.874)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas</b>	<b>(969.621)</b>	<b>7.663.863</b>	<b>(7.159.451)</b>	<b>1.016.812</b>	<b>5.133.961</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>20.957.752</b>	<b>13.293.890</b>	<b>20.453.366</b>	<b>19.437.785</b>	<b>14.304.019</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	-	(25)	(1.231)	(195)
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>19.988.131</b>	<b>20.957.753</b>	<b>13.293.890</b>	<b>20.453.366</b>	<b>19.437.785</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>					
Kas	1.988.262	2.023.077	2.511.548	2.729.776	1.913.960
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	8.805.300	3.659.969	5.734.527	4.075.938
Giro pada bank lain	303.129	211.681	237.715	111.479	97.287
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.910.000	9.917.695	6.884.658	11.877.584	13.350.600
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>19.988.131</b>	<b>20.957.753</b>	<b>13.293.890</b>	<b>20.453.366</b>	<b>19.437.785</b>
<b>RASIO KEUANGAN</b>					
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) (KPM)	24,74%	23,52%	21,64%	21,23%	24,21%
Kualitas Aset Produktif	2,55%	3,31%	3,48%	2,83%	2,79%
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	2,83%	4,48%	4,00%	2,77%	3,75%
CKPN Terhadap Aset Produktif	1,62%	2,10%	1,93%	1,50%	2,18%
Pemenuhan PPAP/CKPN	73,04%	67,93%	59,48%	52,84%	68,37%
Laba Terhadap Pendapatan	18,92%	20,40%	21,70%	21,76%	22,39%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	800,16%	823,17%	735,78%	750,81%	639,96%
Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	88,89%	89,17%	88,04%	88,25%	86,49%



Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Rasio <i>Fee Based Income</i> Terhadap Total Pendapatan Operasional	6,32%	5,50%	12,37%	8,86%	8,72%
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	76,15%	75,95%	77,76%	71,40%	69,45%
<i>Return on Asset</i> (ROA)	1,95%	2,05%	1,95%	2,73%	2,96%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	16,24%	17,26%	18,77%	18,00%	17,75%
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	38,41%	38,83%	36,91%	33,52%	-
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	5,11%	5,11%	5,55%	6,11%	6,37%
Rasio Efisiensi Biaya	50,64%	52,82%	50,93%	52,65%	56,01%
Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	56,50%	51,38%	60,58%	63,34%	66,57%
BMPK	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	4,75%	5,73%	0,00%	9,63%	7,99%
Giro Wajib Minimum (Valuta Asing)	7,39%	7,36%	8,22%	9,21%	11,84%
Posisi Devisa Netto (PDN)	3,26%	0,84%	0,90%	1,37%	2,35%

## Ikhtisar Operasional

Tabel Ikhtisar Operasional Bank Jatim

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019
<b>KONVENSIONAL</b>				
<b>KREDIT/PINJAMAN</b>				
Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi	10.320.231	9.691.297	9.748.903	8.711.965
Kredit Konsumer	27.694.313	26.313.613	25.951.351	24.659.762
Kredit Mikro Ritel dan Program	6.272.869	4.981.888	4.173.152	3.578.740
<b>DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN</b>				
Giro	23.477.047	25.862.874	21.039.158	23.721.437
Tabungan	23.118.307	24.264.622	22.285.619	21.669.322
Deposito	30.543.334	31.088.576	23.316.556	13.509.606
<b>JASA LAINNYA</b>				
Tresuri	43.251.010	45.281.074	33.911.368	29.707.332
<b>SYARIAH</b>				
<i>Funding</i>	2.065.118	1.985.795	1.826.436	1.645.508
Pembiayaan Syariah	1.903.471	1.762.368	1.607.359	1.401.833
Jasa Lainnya Syariah	998.163	1.964.752	1.378.999	875.545



# Informasi

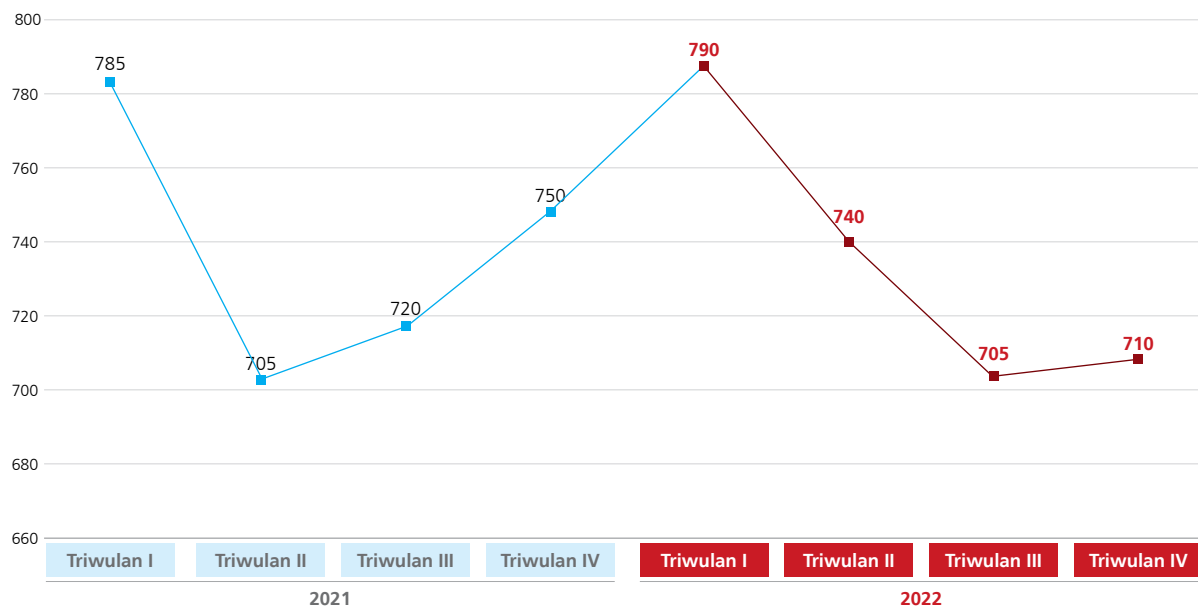
## Saham

Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank Jatim 2021-2022

Tahun	Harga per lembar saham				Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Volume Perdagangan (Jutaan lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
<b>2022</b>							
Triwulan I	750	830	735	790	15.015.498.082	250.952	11.862
Triwulan II	785	800	735	740	15.015.498.082	230.962	11.111
Triwulan III	740	740	705	705	15.015.498.082	114.949	10.586
Triwulan IV	710	730	675	710	15.015.498.082	78.922	10.661
<b>2021</b>							
Triwulan I	695	970	680	785	15.015.498.082	243.022	11.787
Triwulan II	790	825	700	705	15.015.498.082	38.071	10.586
Triwulan III	705	750	680	720	15.015.498.082	75.986	10.811
Triwulan IV	720	795	715	750	15.015.498.082	57.030	11.262

Grafik Harga Penutupan Saham Bank Jatim Tahun 2021-2022

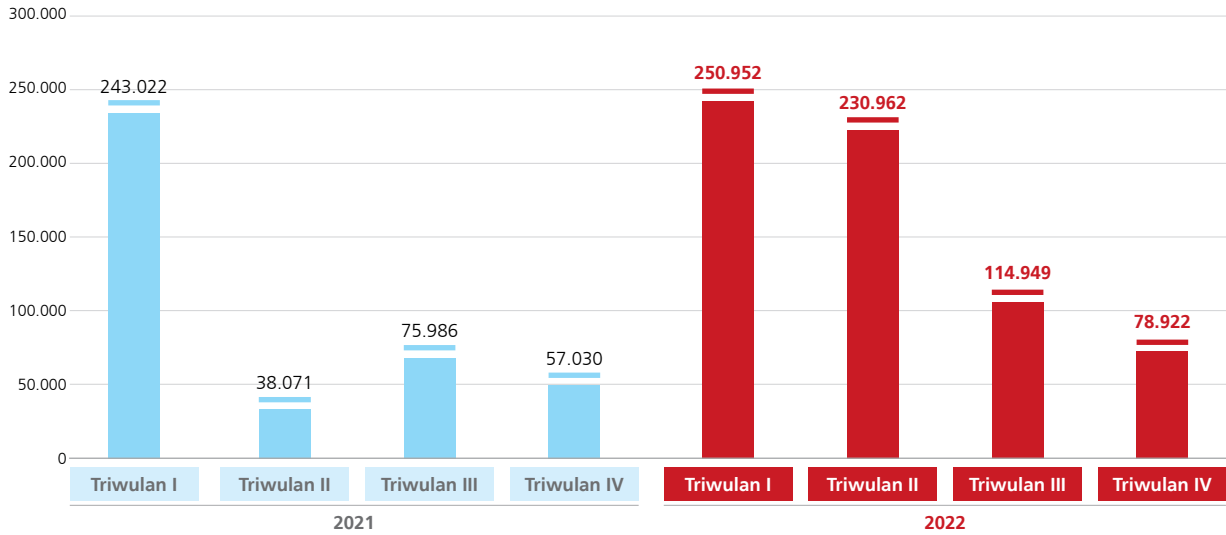
Harga Penutupan Saham (Rp)





### Grafik Volume Perdagangan Saham Bank Jatim Tahun 2021-2022

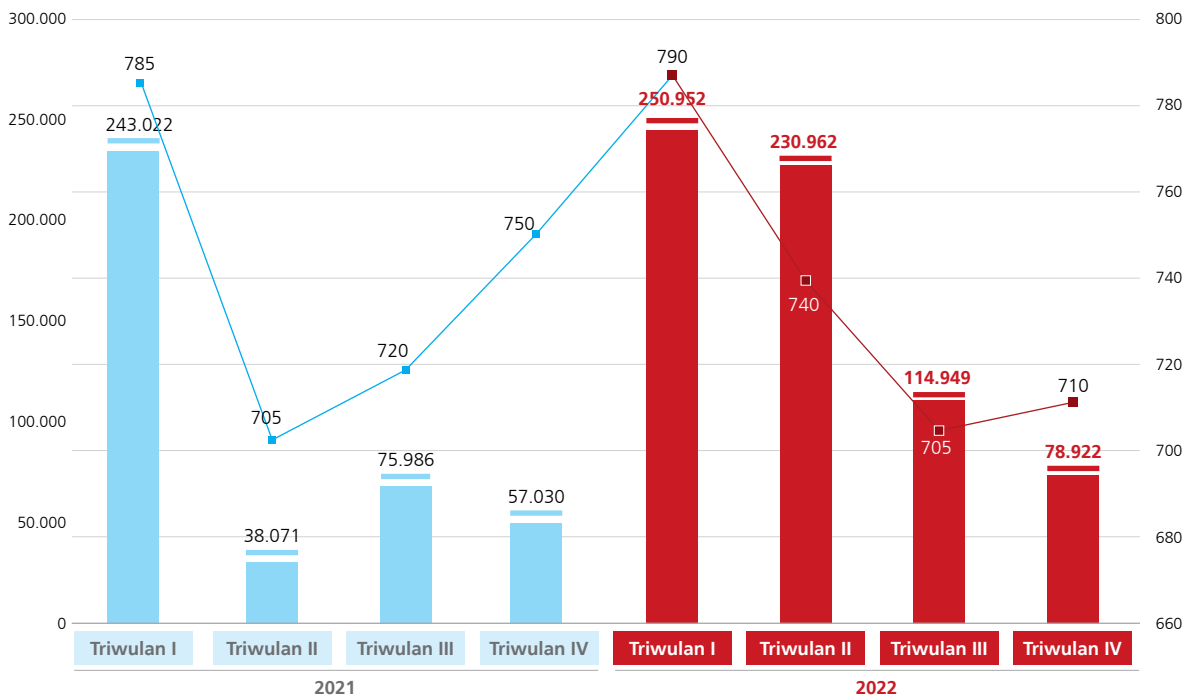
#### Lembar saham



### Grafik Pergerakan Harga dan Volume Perdagangan Bank Jatim Tahun 2021 – 2022

#### Volume Perdagangan (saham)

#### Harga Penutupan (Rp)



■ ■ Volume Perdagangan (saham)    
 —●— —■— Harga Penutupan (Rp)

## Aksi Korporasi

Pada tahun 2022 Bank Jatim tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

## Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank Jatim tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

## Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi Konversi. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi Konversi.

## Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank Jatim belum menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

# Laporan

## Analisis Perusahaan

No	Nama	Rekomendasi	Target Price	Tanggal
1.	PT BRI Danareksa	Buy	900	7 Desember 2022
2.	RHB Research	Buy	1.000	9 Desember 2022
3.	Binaartha Sekuritas	Buy	880	23 Desember 2022

### RESUME

- Per Desember 2022, Bank Jatim terus menunjukkan pertumbuhan baik dari aset yang tumbuh 2,29 % yoy dan aset produktif yang tumbuh 8,06 % yoy. Untuk *Income Statement* pada *Net Interest Income* mengalami pertumbuhan walaupun tidak sejalan dengan pertumbuhan kreditnya yaitu 2,94 % yoy, PPOP naik sebesar 4,65% yoy dan pencadangan -10,54% yoy serta rasio *Non Performing Loan* (NPL) turun dari 4,48% menjadi 2,83% karena penanganan kredit bermasalah serta adanya kredit hapus buku. Sedangkan untuk laba bersih tumbuh sebesar 1,30% yoy.
- Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan -1,72% yoy. Penurunan DPK terjadi pada Deposito -1,66% dan giro -9,01% sedangkan tabungan naik 5,80% yang merupakan refleksi dari tumbuhnya pengguna aplikasi *mobile banking* JConnect yang telah diunduh sebanyak 508 ribu dengan 28,9 triliun transaksi di tahun 2022.
- Posisi rasio Bank Jatim untuk *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tahun 2022 naik dari 51,38% menjadi 56,50% karena sejalan dengan pertumbuhan kredit dan berkurangnya DPK. Untuk RoA posisinya turun menjadi 1,95%, RoE turun menjadi 16,24%. Hal tersebut dikarenakan pada sisi aset naik cukup signifikan dengan tidak diiringi oleh pertumbuhan laba yang tinggi. Sedangkan *Net Interest Margin* (NIM) terjaga di posisi 5,11%. Rasio BOPO terdapat kenaikan menjadi 76,15% karena ada penambahan pegawai baru.
- Target Bank Jatim tahun 2023 yaitu, aset tumbuh 1-2% dan DPK tumbuh 8-9%. Hal ini dioptimalkan dengan melakukan pergeseran dari *treasury placement* ke kredit sehingga kredit ditargetkan tumbuh 12-13%, karena didukung dengan penambahan jumlah *Account Officer* (AO). Dengan demikian, LDR akan naik sekitar 58-60%, dan NIM juga akan meningkat sekitar 5,3-5,4% karena *loan yield* yang lebih tinggi daripada *treasury yield* menjadikan laba dapat kami diproyeksikan tumbuh 5-6%.

# Peristiwa Penting

## Tahun 2022



28 Januari

Bank Jatim melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Diknas Provinsi Jawa Timur.



22 Februari

Paparkan Kinerja Keuangan 2021 Total Aset Tembus Rp100 Triliun, Bank Jatim Cetak Sejarah.



17 Maret

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2021.



**20 April**

Bank Jatim terus menunjukkan pertumbuhan positif di triwulan I.



**19 Mei**

Bank Jatim meraih TOP BUMD 2022.



**30 Mei**

Bank Jatim meraih Penghargaan Bank Terbaik 2022.



**09 Juni**

Permudah Pembayaran Pajak, Bank Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan *Launching* E-BPHTB dan E-SPTPD.



**14 Juni**

Kerja sama dengan Bank Jatim, Pemerintah Kota Surabaya *Launching* KatePay.



**01 Juli**

Bank Jatim memborong Penghargaan di Pengujung Triwulan II 2022.



**25 Juli**

Bank Jatim terus menunjukkan pertumbuhan positif di triwulan II.



**29 Juli**

Bank Jatim meraih Penghargaan Corporate Reputation Awards 2022.



**20 Agustus**

61 Tahun Bank Jatim Sat Set Wat Wet.



**29 Agustus**

Sinergi Bank Jatim dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mensukseskan Program GN Lingkaran.



**29 Agustus**

Bank Jatim mendukung Kementerian Pertanian melalui Program TANI AKUR



**06 September**

Bank Jatim meraih dua Penghargaan Top GRC Awards 2022.





**08 September**

Bank Jatim meraih Indonesia Top Bank Awards 2022.



**13 September**

Bank Jatim menggelar *Public Expose*, dan terus menunjukkan kinerja yang positif pasca pandemi.



**25 September**

Manjakan Nasabah, Bank Jatim menggelar Konser Westlife.



**25 September**

Memperingati 2 Dekade Gerakan APUPPT, Bank Jatim menanam pohon bersama Pemerintah Kota Surabaya.



**06 Oktober**

Bank Jatim menyerahkan bantuan kepada keluarga korban Kanjuruhan.



**09 Oktober**

Bank Jatim meraih Juara Umum Turnamen Olahraga antar BUMD Jawa Timur.



**26 Oktober**

Bank Jatim meraih Penghargaan Inews Indonesia Awards 2022.



**27 Oktober**

Bank Jatim meraih penghargaan Paritran Award.



**28 Oktober**

Kinerja Moncer, Bank Jatim mencatatkan Laba Bersih Rp1,2 triliun di Triwulan III.



**01 November**

Bank Jatim memperkuat sinergi dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Timur.



**05 November**

Gemerlap Hadiah Undian SIMPEDA 2022.



**06 November**

Gelar Festival Budaya, Bank Jatim mengajak masyarakat mengenang indahny Djaman Doeloe.



**10 November**

Bank Jatim meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional melalui ISO 27001.



**11 November**

Bank Jatim meraih Penghargaan CNBC Indonesia Awards 2022.



**21 November**

Bank Jatim menjalin kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara.



**27 November**

Bank Jatim berkolaborasi dengan BNI untuk meningkatkan layanan perbankan digital.



**01 Desember**

Bank Jatim menerima penghargaan ASEAN Asset Class PLCs (Indonesia) dalam ajang 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard Award di Manila.



**07 Desember**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2022.



**09 Desember**

Bank Jatim menyalurkan bantuan kepada pengungsi dan relawan erupsi Semeru.



**15 Desember**

Suksesan Hari Anti Korupsi Sedunia, Bank Jatim Raih Penghargaan LHKPN 2022.



**15 Desember**

Sukses dalam transformasi digital, Bank Jatim meraih Top Digital Awards 2022.



**15 Desember**

Bank Jatim dinobatkan sebagai Peringkat I Penyalur KUR Terbaik.



**19 Desember**

Bank Jatim mendukung misi dagang Provinsi Jawa Timur hingga ke Negeri Jiran.



**27 Desember**

Bank Jatim meraih Paritrana Award 2022 Provinsi Jawa Timur.





# Laporan Direksi dan Dewan Komisaris





03



# Laporan Direksi



## Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya, Bank Jatim mampu melalui tantangan besar di tahun 2022 dan mencatatkan kinerja yang baik meskipun perekonomian masih mengalami ketidakpastian.



## Busrul Iman

Direktur Utama

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian ini, Bank Jatim berupaya untuk terus tumbuh dan turut mendukung serta menjalankan program Transformasi BPD melalui inisiatif *tactical* dan *strategic*. Bank Jatim juga terlibat secara aktif dalam transformasi BPD serta dipercaya menjadi *leader workstream human capital*.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Bank selama tahun 2022 yang meliputi kinerja Bank, analisis prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

### Analisis Atas Kinerja Bank

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, maksud dan tujuan Bank Jatim adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan visi dan misi, Bank Jatim melakukan pengembangan produk dan jasa yang kompetitif serta dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Bank memiliki produk dan jasa baik konvensional maupun syariah sebagai berikut:

1. Produk simpanan meliputi, Rekening Giro Rupiah, Rekening Giro Valas, Deposito Rupiah, Deposito Valas, Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus, Tabungan Haji, TabunganKu, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Simpanan Laku Pandai (SiPandai) dan Tabungan Siklus Pensiun.
2. Produk Kredit Konsumer meliputi, Kredit Multiguna, Kredit Pegawai & Personal *Loan Car Allowance* Program Kredit Kendaraan Bermotor, *Cash Collateral Credit*, Kredit Jaminan Emas dan Kredit Properti.

3. Produk Komersial, Korporasi dan Sindikasi meliputi, Kredit Kontraktor Pola Transaksional, Kredit Kontraktor Pola Standby Loan, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, Kredit Pemerintah Daerah serta Kredit Trade Finance.
4. Produk Kredit Mikro, Ritel dan Program meliputi, Kredit Jatim Ritel, Kredit Mikro Laguna, Kredit Linkage BPR, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Jatim Mikro, Kredit Linkage Fintech, Kredit SiUMI, dan Kredit BPR RC (Rekening Koran).
5. Produk Tresuri meliputi, Devisa Umum (*Telegraphic Transfer*), *Bank Notes* dan *Deposit on Call*.
6. Produk *Trade Finance* meliputi, Ekspor, Impor dan Transaksi Domestik (SKBDN).
7. Jasa bisnis meliputi Referensi Bank, Kliring Nasional, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Inkaso Rupiah, Inkaso Valas, Giralisasi, BPD Net Online, Jatim Electronic Transfer System (JETS), Jconnect Invest, *Western Union* dan Transaksi *Remittance*.
8. Jasa Kelembagaan meliputi Layanan Pajak, Pembayaran Tagihan, *Payroll* Gaji dan Pelayanan Transaksi Perdagangan.
9. Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan umum, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Emas iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas, Linkage Program, Umroh iB Maqbullah, Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Properti iB Barokah, Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah, Pembiayaan Modal Kerja Pola Keppres iB Barokah,

Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB), Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan Pegawai dan Personal, Bank Garansi serta Pembiayaan Kawasan Industri Halal.

10. Produk dana dan jasa syariah meliputi, Giro iB Barokah, Tabungan Simpel iB, Tabunganku iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan Sipandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan iB Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah, Deposito Barokah, *Virtual Account*, *Payment Point*, *E-Channel* (SMS Banking, J-Connect Mobile dan JConnect Internet Banking) serta Wakaf iB Barokah.
11. *E-channel* dan jasa lainnya meliputi, SMS Banking (3366), JConnect Internet Banking, JConnect Mobile Banking, JConnect E-Kmg, JConnect E-Loan, Layanan Laku Pandai (Sipandai Bank Jatim), Info Bank Jatim (14044), Kartu ATM Debit Bank Jatim, Kartu Bank Jatim Flazz (*Co-Branding*), *Safe Deposit Box*, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), *Virtual Account*, E-Samsat Jatim, Samsat Digital Nasional (Signal), Jatim Code QRIS dan BJTM *Connect*.

Sebagai perusahaan bidang perbankan tentunya tidak terlepas dengan nasabah atau pasar yang dilayani. Dalam upaya untuk melayani dan menjalin hubungan dengan pasar yang begitu luas dan beragam serta berdimensi jangka panjang, maka Bank Jatim harus dapat menciptakan akses yang lebih mudah kepada nasabahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas jaringan kantor sampai di pelosok kecamatan, karena kemudahan akses ke perbankan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas. Di samping itu, diharapkan nantinya dapat memberikan edukasi kepada nasabah tentang produk-produk perbankan yang dapat mendukung perkembangan usahanya.

Bank Jatim menyadari arti pentingnya pelayanan pada pasar, oleh karena itu distribusi pelayanan Bank Jatim menjadi fokus pengembangan jaringan kantor sampai ke titik wilayah terkecil yaitu kecamatan. Hal ini sesuai dengan visi transformasi BPD yaitu menjadi Bank Regional yang berdaya saing tinggi, kuat dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selain itu, hal tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mencari calon nasabah potensial yang belum dapat dilayani oleh Bank Jatim. Dengan demikian, diiharapkan akan mempermudah akses perbankan bagi para pelaku usaha di sektor ritel serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Per Desember 2022, Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.783 jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Bank Jatim juga memiliki jaringan usaha di wilayah kota besar seperti Jakarta dan Batam.

Pelaksanaan jalannya kepengurusan Bank terlihat pada struktur organisasi Bank Jatim yang terbagi menjadi 6 (enam) Direktorat di bawah Direktur Utama yaitu Direktorat Mikro, Ritel dan Menengah, Direktorat Keuangan, Treasury dan Global Services, Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat IT dan Digital, Direktorat Operasi serta Direktorat Kepatuhan. Tiap-tiap Direktorat terbagi menjadi beberapa Divisi yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi terkait. Direktur Utama didukung oleh Corporate Secretary, Divisi Audit Internal dan Divisi Human Capital. Direktorat Mikro, Ritel dan Menengah didukung oleh Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Menengah,

Divisi Kredit Konsumer, Divisi Bisnis Syariah serta Unit Pendukung Bisnis Syariah. Direktorat Keuangan, Treasury dan Global Services didukung oleh Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Tresuri, Divisi Dana dan Jasa, Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja serta Unit Hubungan Kelembagaan. Direktorat Manajemen Risiko didukung oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Risiko Kredit, serta Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit. Direktorat IT dan Digital didukung oleh Divisi Teknologi Informasi serta Unit Digital Banking dan Unit Security IT. Direktorat Operasi didukung oleh Divisi Operasi dan Divisi Umum serta Unit Administrasi Kredit dan Unit Kantor Cabang Konvensional/Syariah. Direktorat Kepatuhan didukung oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola serta Divisi Hukum Seluruh Divisi telah memberikan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Direktorat masing-masing dan kinerja Bank secara keseluruhan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim memiliki sebanyak 4.368 orang pegawai dengan rincian tingkat pendidikan yaitu 410 orang berjenjang pendidikan non strata, 3.656 orang berjenjang pendidikan S1, 299 orang berjenjang pendidikan S2 serta 3 (tiga) orang berjenjang pendidikan S3. Pada tahun 2022, Bank Jatim telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi untuk para pegawainya. Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim didasarkan pada kriteria prioritas yaitu program yang hasilnya akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Selama tahun 2022, Bank telah mengikutkan pegawai dalam pendidikan yang sesuai dengan jabatannya dan kebutuhannya dengan jumlah peserta sebanyak 3.428 orang .

Keseluruhan infrastruktur yang dimiliki Bank Jatim berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi khususnya pada kondisi perekonomian di tahun 2022 yang masih mengalami ketidakpastian. Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi telah mampu menjalankan bisnis Bank dengan baik. Kinerja Bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kondisi perekonomian makro.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,0% pada 2022 dan menurun menjadi 2,6% pada 2023. Demikian pula dalam World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF) memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global di angka 3,0% pada tahun 2022 dan 2,6% pada tahun 2023. Pada kuartal kedua tahun 2022, PDB global sedikit menurun (lebih -0,1 poin persentase secara triwulanan) dengan pertumbuhan negatif di berbagai negara besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat serta penurunan tajam di negara-negara Eropa Timur yang paling terpengaruh secara langsung oleh perang di Ukraina dan sanksi internasional yang ditargetkan untuk memberi tekanan pada Rusia untuk mengakhiri perseteruan.

Sementara itu, tekanan inflasi masih tinggi, meskipun mulai melandai, yang dipengaruhi berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Inflasi yang masih tinggi mendorong kebijakan moneter global tetap ketat. The Fed diperkirakan akan menaikkan *Funds Rate* hingga awal 2023 dengan siklus



pengetatan kebijakan moneter yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah. Perkembangan ini mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian berdampak pada belum kuatnya aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tangguh dan memiliki prospek yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 tercatat tinggi sebesar 5,01% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy). Hal tersebut mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat antara 4,5% hingga 5,3% pada tahun 2023 dan selanjutnya meningkat menjadi 4,7% hingga 5,5% pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan konsumsi swasta, investasi, dan ekspor yang positif di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi pada sebagian besar lapangan usaha kecuali Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang berkontraksi sebesar 1,74%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,81%; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,83%; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,42%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 4,83%.

Dari sisi perbankan, kenaikan suku bunga perbankan baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit, lebih terbatas. Berdasarkan laporan BI, suku bunga deposito 1 (satu) bulan pada November 2022 tercatat 3,72% atau meningkat 83 bps

dibandingkan dengan level Juli 2022, sementara suku bunga kredit November 2022 tercatat 9,11% atau meningkat 17 bps dibandingkan dengan level Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas tersebut dipengaruhi likuiditas yang masih longgar. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif yang dapat mendukung pemulihan ekonomi.

Dari sisi Intermediasi Perbankan terlihat *trend* membaik. Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 11,16% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan positif di seluruh jenis kredit dan mayoritas sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 23,5% (yoy). Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM tercatat cukup tinggi. Likuiditas perbankan tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,80% (yoy). Hasil simulasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan masih terjaga. Hal ini dapat dilihat dari permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio /CAR*) tetap tinggi sebesar 25,08%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan /NPL*) yang tercatat 3,70% (bruto) dan 1,01% (neto).

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Bank Jatim menetapkan target pasar berupa peningkatan DPK dan Kredit. Target DPK dan Penyaluran Kredit di tahun 2022 masing-masing sebesar Rp85,80 triliun dan Rp45,49 triliun. Peningkatan ini dilakukan antara lain dengan dilakukannya pembukaan rekening pada sekolah dan satu rekening satu pelajar, kerja sama dengan Rumah Sakit, Sekolah/Universitas dan Pondok Pesantren di Jawa Timur, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam pembayaran premi BPJS dan penempatan dana di Bank Jatim.

Untuk mencapai target pasar tersebut, telah ditetapkan suku bunga dasar kredit tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel Suku Bunga Dasar Kredit**

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2022				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
6,11%	7,17%	12,14%	7,36%	9,06%



Selain itu, Bank Jatim juga telah menetapkan suku bunga untuk tabungan deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2022

Tier	Suku Bunga
<b>SIMPEDA</b>	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta - < Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
<b>SIKLUS</b>	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta - < Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%
<b>SIKLUS MIKRO KECIL (SIUMI)</b>	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
<b>SIKLUS NELAYAN (SINYAL)</b>	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
<b>HAJI</b>	
Seluruh Nominal	1,00%
<b>TABUNGANKU</b>	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
<b>Catatan:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan <i>tiering</i> yang berlaku</li> <li>• Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran</li> </ul>	
<b>SIKLUS PRIORITAS</b>	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%
<b>SIMPANAN LAKU PANDAI</b>	
Seluruh Nominal	0,50%
<b>SIKLUS PENSIUN</b>	
0 - < Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu - < Rp7,5 juta	1,25%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,50%
≥ Rp100 juta	1,75%



Tier	Suku Bunga
<b>SIKLUS VALAS</b>	
<b>USD</b>	
< USD100	<b>0,00%</b>
> USD100 - ≤ USD10.000	<b>0,05%</b>
> USD10.000 - ≤ USD100.000	<b>0,15%</b>
> USD100.000	<b>0,25%</b>
<b>SGD</b>	
< USD100	<b>0,00%</b>
> USD100 - ≤ USD10.000	<b>0,05%</b>
> USD10.000 - ≤ USD100.000	<b>0,15%</b>
> USD100.000	<b>0,25%</b>
<b>EUR</b>	
0 - EUR300	<b>0,00%</b>
> EUR300	<b>0,10%</b>
<b>JPY</b>	
Seluruh Nominal	<b>0,00%</b>
<b>HKD</b>	
Seluruh Nominal	<b>0,00%</b>

**Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2022**

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	2,60% pa	2,65% pa	2,75% pa	2,90% pa	2,95% pa	3,00% pa	3,00% pa
>Rp1 miliar	2,65% pa	2,75% pa	2,80% pa	2,90% pa	2,95% pa	3,00% pa	3,00% pa

**Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2022**

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
<b>USD</b>				
≥ USD1000 – Tak Terbatas	0,25% pa			
<b>SGD</b>				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
<b>EUR</b>				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
<b>JPY</b>				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
<b>HKD</b>				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			

**Keterangan:** Di atas *counter rate*, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito *On Call* Desember 2022

Tier	Suku Bunga
Deposito <i>On Call</i> (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau Reuters

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2022

Tier	Suku Bunga
<b>RUPIAH</b>	
<b>PERHITUNGAN JASA GIRO HARIAN PROGRESIF</b>	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
<b>Rekening Giro Escrow Account</b>	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerja sama (PKS)
<b>VALUTA ASING</b>	
<b>GIRO VALAS USD</b>	
≤ USD1.000	0,00%
> USD1.000 - ≤ USD10.000	0,05%
> USD10.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,25%
<b>GIRO VALAS SGD</b>	
≤ SGD1.000	0,00%
> SGD1.000 - ≤ SGD10.000	0,05%
> SGD10.000 - ≤ SGD100.000	0,15%
> SGD100.000	0,20%
<b>GIRO VALAS EUR</b>	
EUR	0,10%
<b>GIRO VALAS JPY</b>	
JPY	0,00%

Tabel *Nisbah* Bagi Hasil

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Giro Wadiah Perorangan	-	0,09%
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	-	0,10%
Giro Wadiah Umum Swasta	-	0,09%
Giro Mudharabah Umum Pemerintah	<b>5,00%</b>	0,47%
TabunganKu iB	-	0,09%
Tabungan Laku Pandai	-	0,13%
Tabungan Simpel	-	0,09%
Tabungan Santri	-	0,19%
Tabungan Umroh iB Amanah	-	0,09%

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Tabungan Haji Amanah	10,00%	0,95%
Tabungan Barokah	12,50%	1,19%
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,38%
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	2,37%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,42%
Deposit 1 Bulan	36,00%	3,42%
Deposit 3 Bulan	38,00%	3,61%
Deposit 6 Bulan	41,00%	3,89%
Deposit 12 Bulan	42,50%	4,03%

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dalam menangkap peluang Bank berfokus pada penerapan strategi sebagai berikut:

1. Standar layanan mencapai posisi ke-2 (dua) *Best Overall Performance Service Excellent* dari penilaian Marketing Research Indonesia (MRI) untuk Kategori Bank Pembangunan Daerah.
2. Sistem dengan *enhancement digital banking, modernized core banking system* dan *infrastructure* serta *enhancement IT security* menuju *Digital Banking 4.0* (layanan Omni Channel).
3. Penguatan struktur serta fungsi tresuri sebagai pengelola likuiditas.
4. Implementasi dan penggunaan produk Bank Jatim yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan keuangan non tunai dan aplikasi informasi keuangan daerah dalam bentuk e-KD tercapai 80%.
5. Memperbaiki kualitas aset, kredit, dana pihak ketiga, laba dengan *balancing* yang lebih baik.

Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah merumuskan fokus strategi bisnis tahun 2022 yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Peringkat 2 (Pencapaian Kredit) di tahun 2022.
2. Memperkecil *gap* dengan aset Bank bjb.
3. Tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan aset Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI). Aksi Korporasi penyertaan modal kepada lembaga keuangan sebesar ±Rp56 miliar dan mendirikan perusahaan efek daerah ±Rp5 miliar
4. Memperkecil *gap* dengan penyaluran kredit Bank Jateng.
5. Memperkecil *gap* dengan penghimpunan DPK Bank bjb.
6. Percepatan proses perkreditan serta kerja sama dengan Pemerintah pusat maupun daerah melalui Sinergitas dengan Nawa Bhakti Satya.
7. Meningkatkan pertumbuhan DPK khususnya pada giro dan tabungan.
8. Menjaga Rasio *Current Account Saving Account* (CASA) di ≥61,60%, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) ±37,25%
9. Optimalisasi ekspansi kredit.
10. Optimalisasi peran Tresuri.
11. Peningkatan perolehan *fee based income*.

Selain fokus strategi bisnis, bank juga berfokus pada strategi pendukung bisnis sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja divisi agar lebih efektif dan efisien.
2. Perbaikan *Service Level Agreement* (SLA).
3. Evaluasi implementasi Struktur Organisasi baru.
4. Peningkatan kualitas SDM melalui aktivitas pelatihan.
5. Perbaikan remunerasi.
6. Evaluasi dan implementasi *reward and punishment*.
7. Memperbaiki sistem *recruitment* pegawai baru.
8. Penguatan budaya kerja perusahaan melalui *training change agent*.
9. Menetapkan budaya kerja dalam KPI di tahun 2022.
10. *Roadmap* perbaikan GCG agar berada di peringkat 2 di tahun 2022.
11. Menjaga rata-rata peringkat profil risiko agar berada pada skor 2.
12. Perbaikan kualitas standar layanan menjadi peringkat ke 2 di antara BPD se-Indonesia di tahun 2022.

Sedangkan strategi segmen Syariah dilakukan melalui strategi *funding* yaitu peningkatan CASA dan *fee based income* serta strategi pembiayaan yaitu:

1. Mengoptimalkan rencana pencairan pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan lain yang sudah disetujui yang belum terealisasi di Triwulan kedua.
2. Percepatan proses untuk usulan pembiayaan yang sudah masuk proses di Kantor Pusat UUS Bank Jatim.
3. Optimalisasi Tenaga Analis.
4. Kerja sama dengan PT Makmur Berkas Amanda (MBA) dalam mensukseskan program Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Jatim untuk menciptakan Jatim Bangkit tahun 2021, yang merupakan potensi pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian gudang untuk investasi.
5. Pendekatan Ke *Developer*/Pengembang.
6. Pendekatan dengan Komunitas UMKM.
7. Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Linkage BMT/BPRS.

Direksi memimpin langsung perumusan strategi Bank melalui berbagai rapat antara Direksi dengan pada manajemen kunci dan tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Direksi senantiasa memastikan bahwa strategi telah dilaksanakan dengan efektif melalui berbagai Rapat Koordinasi, pemberian arahan dan mekanisme pelaporan.

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada tahun 2022 Bank Jatim telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Dari sisi operasional, Total Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi tahun 2022 sebesar Rp10,32 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,49% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp9,69 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari realisasi kredit sindikasi sebesar Rp1,39 triliun atau mengalami kenaikan 36,34% dari perolehan kredit sindikasi tahun sebelumnya. Total Kredit Konsumer tahun 2022 mencapai Rp27,69 triliun, meningkat 5,25% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp26,31 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Kredit Multiguna sebesar Rp6,73% atau Rp1,50 triliun. Bank Jatim pada tahun 2022 untuk skim Kredit Mikro, Ritel dan Program telah menyalurkan kredit sebesar Rp6,27 triliun, meningkat sebesar Rp1,29 triliun atau sebesar 25,91% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,98 triliun. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,85 triliun dan Kredit Kepada Koperasi (KKOP) sebesar Rp1,01 miliar.

Pada segmen Syariah, realisasi DPK Syariah tahun 2022 adalah sebesar Rp2,06 triliun, meningkat sebesar Rp79,32 miliar atau 3,99% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,98 triliun. Pertumbuhan jumlah DPK diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah. Tahun 2022, Jumlah nasabah DPK UUS Bank Jatim sebesar 264.670 nasabah meningkat sebesar 25.471 nasabah atau 10,65% dibandingkan tahun 2021. Jumlah Pembiayaan Syariah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1,90 triliun naik sebesar Rp141,10 miliar atau 8,01% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,76 triliun.

Pencapaian yang baik juga terlihat dari sisi keuangan. Pada tahun 2022 jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp4.917.056 juta, meningkat sebesar 5,12% dari tahun 2021 yang sebesar Rp4.677.681 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan dari pihak ketiga. Laba tahun berjalan di tahun 2022 mencapai Rp1.542.824 juta, meningkat sebesar 1,30% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1.523.070 juta. Peningkatan laba tahun berjalan bank berpengaruh pada peningkatan aset dan ekuitas bank. Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp103.031.367 juta, meningkat sebesar 2,29% dari tahun lalu sebesar Rp100.723.330 juta. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya giro pada bank lain - neto, kredit yang diberikan - neto, surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali (*reverse repo*) dan aset lain - neto. Ekuitas di tahun 2022 mencapai Rp11.445.861 juta, meningkat sebesar 4,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.910.539 juta. Peningkatan tersebut berasal dari surplus revaluasi aset tetap, cadangan umum dan belum ditentukan penggunaannya.

Secara umum Bank Jatim telah memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi di tahun 2022. Total aset berhasil melampaui target sebesar 101,51% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp103,03 triliun, demikian pula dengan kredit yang diberikan mencapai 101,56% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar

Rp46,20 triliun. Dana Pihak Ketiga tahun 2022 terealisasi sebesar Rp81,77 triliun dengan pencapaian 95,30%, sedikit berada di bawah target. Meskipun demikian jika dilihat dari sisi tabungan berhasil melampaui target yang mencapai 102,58% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp26,34 triliun. Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga juga di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,66% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp6,88 triliun. Laba tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 100,78% dengan realisasi Rp1,54 triliun di tahun 2022.

Bank Jatim menyadari bahwa kebutuhan akan layanan digitalisasi semakin meningkat. Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam perkembangan teknologi digital perbankan. Pencapaian kinerja operasional dan keuangan merupakan hasil dari berbagai inovasi aplikasi digital. Saat ini, beberapa pengembangan aplikasi telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat yaitu:

- Untuk memudahkan layanan kepada nasabah Bank Jatim telah meluncurkan JConnect Sipandai, JConnect EKMKG, JConnect Eloan, JConnect Mobile Banking, Jconnect Internet Banking, SMS Banking, Jatim Kilat, *Peer to Peer Lending Host To Host With* Amarnya Fintech, ATM-CRM, EDC, QRIS, QRIS-Tanpa Tatap Muka, *Virtual Account, Digital Lounge* serta *Apps for Government* (Aplikasi *Monitoring* Elektronifikasi Keuangan Daerah (eKD), *e-Marketplace, e-Tourism, e-Retribusi*, dan *e-Bansos*).
- Untuk *optimize* proses bisnis Bank Jatim telah melakukan *upgrade* mesin *Core Banking System* Bank Jatim, melaksanakan *ATM Monitoring, Virtualisasi server, Core Switch DC – DRC*, serta *Credit Scoring*.
- Untuk Penguatan IT *Security* Bank Jatim telah melakukan *Application Security Testing, End Point Security Management, Email Security Gateway, Log Management System, Load Balancer, Two Factor Authentication* dan *VPN Concentrator* serta *Web Application Firewall*.

Meskipun menunjukkan kinerja yang baik, namun Bank juga menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain, Digitalisasi proses bisnis yang belum optimal serta keamanan sistem teknologi informasi yang harus ditingkatkan terus menerus. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank memiliki strategi yaitu menerapkan sistem dengan *enhancement digital banking, modernized core banking system* dan *infrastructure* serta *enhancement IT security* menuju *Digital Banking 4.0* (layanan Omni Channel).

Kendala lainnya yaitu aktivitas pemasaran yang kurang optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank memiliki strategi untuk percepatan proses perkreditan serta kerja sama dengan Pemerintah pusat maupun daerah melalui Sinergitas dengan Nawa Bhakti Satya serta melakukan optimalisasi ekspansi kredit.

Selain itu, kualitas SDM Bank juga masih belum memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank melakukan peningkatan kualitas SDM melalui aktivitas pelatihan. Bank juga melakukan penguatan budaya kerja perusahaan melalui *training change agent*.

## Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi Pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Prospek ekonomi global mengalami penurunan yang dipengaruhi terutama oleh adanya inflasi yang semakin persisten, pengetatan kebijakan moneter dan perang di Ukraina. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) rilis Oktober 2022 memproyeksi *outlook* pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7% di tahun 2023. Sementara proyeksi inflasi global sebesar 6,5% di tahun 2023. Perkembangan risiko ekonomi global telah mengganggu aktivitas manufaktur global yang digambarkan oleh PMI Manufaktur global berada pada level kontraksi pada September 2022 setelah lebih 2 (dua) tahun terakhir berada pada level ekspansi. Perkembangan sektor keuangan global juga mengalami tekanan yang diperlihatkan adanya kenaikan imbal hasil dan penguatan dolar Amerika Serikat akibat pengetatan kebijakan moneter. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional, namun masih tetap terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan *peer countries*. Pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.

Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (*gini ratio*) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Ke depan, arah pengembangan digitalisasi industri perbankan diperkirakan akan semakin pesat seiring dengan dikeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum yang mengakomodir Bank Digital. Dalam POJK tersebut, Bank Digital diartikan sebagai bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Dalam lingkup global, dinamika industri keuangan dan perbankan digital direpson dengan mulai bermunculannya *neobank*. Neobank terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *full stack neobank* (memiliki izin usaha dan beroperasi *fully digital* tanpa jaringan fisik, contoh neobank yang beroperasi di Amerika seperti Monzo dan Revolut) dan *front-end focused neobank* (tidak memiliki izin usaha mandiri sehingga harus beroperasi dalam kemitraan dengan perbankan untuk menyediakan layanan perbankan, salah satu contoh *front*

*end focused* neobank yang telah beroperasi di Indonesia adalah Jenius).

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan dan langkah strategis Bank Jatim diarahkan pada peningkatan pertumbuhan bisnis pasca pemulihan pandemi COVID-19, perbaikan dan optimalisasi bidang teknologi informasi yang berfokus pada keunggulan internal berikut:

1. Infrastruktur teknologi perbankan digital yang cukup memadai dalam bersaing dengan industri keuangan saat ini yang semakin maju.
2. Kolaborasi dengan berbagai pihak *stakeholder* seperti *marketplace, fintech*, serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan bisnis.
3. Cakupan jaringan kantor Bank Jatim yang menjangkau hingga wilayah kepulauan di Jawa Timur, serta wilayah kota besar seperti Jakarta dan Batam.
4. Tingkat permodalan Bank yang relatif tinggi.
5. Hubungan dan sinergi yang baik dengan *shareholders*, terutama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Bank Jatim optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Adapun peluang Bank Jatim di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pola perilaku masyarakat akibat disrupsi teknologi khususnya dalam pemanfaatan teknologi perbankan.
2. Jumlah penduduk usia milenial dan Generasi Z yang notabene merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce* serta potensi ekonomi dan keuangan digital semakin mendominasi.
3. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan.
4. Masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UMKM yang semakin berkembang.
5. Adanya program pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan di Provinsi Jawa Timur.

Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023, arah kebijakan dan langkah strategis Bank tetap meningkatkan pertumbuhan bisnis, inovasi teknologi dan efisiensi. Fokus pengembangan bisnis meliputi:

1. Melakukan penyesuaian pertumbuhan kredit dan jaringan kantor dengan pertimbangan *variable mapping* potensi wilayah.
2. Memberikan layanan berkualitas tinggi (High Quality Service).
3. Pengembangan digitalisasi bisnis dan supporting serta menargetkan kinerja diatas industri BPD.
4. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja (efektifitas KPI).
5. Pengembangan aliansi *fintech/e-commerce* dan bisnis berbasis ekosistem Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan komunitas di wilayah Jawa Timur.

6. Transformasi struktur organisasi, sumber daya manusia (human capital transformation) dan digital banking.
7. Konektivitas dan menjalin ekosistem (Connectivity and Building Ecosystem).
8. Meningkatkan Security Teknologi Informasi.
9. Pengelolaan alokasi dana Pemerintah Daerah agar tetap terjaga.

## Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) dapat mendorong kinerja yang baik dalam kegiatan bisnis Bank. Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan mengimplementasikannya dengan baik, dan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola Bank Jatim secara berkelanjutan, Bank Jatim senantiasa menerapkan kelima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. Kelima asas tersebut diimplementasikan melalui pemenuhan kepentingan pemegang saham dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham; pemenuhan kepentingan *stakeholders* lainnya; melaksanakan pengungkapan dan transparansi; serta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kepentingan pemegang saham, Bank telah memenuhi hak-hak pemegang saham di antaranya membayar dividen secara adil dan tepat waktu. Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Bank, termasuk hak untuk menerima dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Bank pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Bank dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Bank untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Selain pembagian dividen, Bank juga telah memenuhi hak-hak pemegang saham sebagai berikut:

1. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS untuk:
  - a. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
  - b. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
  - c. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
  - d. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.
2. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Bank telah menyelenggarakan RUPS Tahunan secara tepat waktu. RUPS Tahun Buku 2021 dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022. RUPS Tahunan telah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Bank Jatim telah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank Jatim. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Dalam pemenuhan kepentingan *stakeholder*, Bank Jatim mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa Perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Bank dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan usaha Bank dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis.

Proses pelibatan pemangku kepentingan mencakup upaya Bank Jatim untuk memenuhi harapan dari setiap pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan cara yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah. Nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi Bank Jatim. Keberadaan mereka turut menentukan kemajuan dan keberlangsungan Bank. Bank Jatim berupaya agar jumlah nasabah terus meningkat, begitupun dengan kepercayaan mereka. Opsi terbaik yang bisa dilakukan Bank Jatim adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan serta melakukan berbagai inovasi agar bisa memenuhi harapan nasabah. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, upaya tersebut bukan hal yang mudah, namun Bank Jatim optimistis bisa mewujudkannya.

Upaya Bank Jatim untuk memberikan layanan produk dan jasa terbaik, sekaligus untuk memenuhi harapan nasabah sehingga mereka mendapatkan kepuasan maksimal, menyediakan saluran pengaduan, sekaligus memberikan solusi terbaik secepatnya. Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Jatim mengumpulkan data lengkap dari setiap nasabah, baik individu maupun korporat, yang wajib dijaga kerahasiaannya. Keberhasilan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan pertaruhan bagi Bank Jatim. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk menjaga kepercayaan tersebut agar loyalitas nasabah tetap terjaga.

Bank Jatim tidak bisa memenuhi semua kebutuhan barang dan jasanya secara mandiri dalam menjalankan operasional sehari-hari. Oleh karena itu, Bank menjalin kerja sama dengan pemasok/*vendor*/mitra kerja untuk memenuhi barang dan jasa sesuai kebutuhan. Selaras dengan spirit untuk memajukan pemasok lokal, yaitu pemasok yang berdomisili dan menjalankan usaha di Indonesia, maka Bank mengutamakan untuk menjalin kerja sama dengan mereka. Pelibatan pemasok lokal dalam pengadaan barang dan jasa menjadi bentuk manfaat ekonomi tidak langsung yang dirasakan masyarakat di sekitar unit kerja Bank Jatim. Apabila kebutuhan barang dan jasa tidak bisa dipenuhi oleh pemasok lokal, atau karena pertimbangan tertentu, maka Bank Jatim akan menjalin kerja sama dengan pemasok-pemasok luar negeri/*internasional*, yaitu pemasok yang berdomisili dan menjalankan usaha di luar Indonesia.

Bank berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan ini hanya bisa diwujudkan melalui proses-proses pembangunan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keselarasan menjadi kunci penting karena karena penyelenggaraan pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan segala implikasinya.

Bank Jatim melanjutkan pemberian kredit ke sektor-sektor usaha yang memenuhi prinsip Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), antara lain dalam prosesnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, Bank memastikan seluruh kegiatan yang relevan memiliki izin lingkungan sesuai ketentuan. Tak hanya itu, Bank Jatim juga memiliki kebijakan perkreditan untuk menghindari pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan.

Selain memiliki kebijakan pembiayaan yang pro-lingkungan, kontribusi Bank Jatim terhadap kelestarian lingkungan juga diwujudkan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan. Upaya konkret dan sederhana dalam mewujudkan operasional kantor yang ramah lingkungan adalah mengukuhkan komitmen Insan Bank untuk menjalankan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dalam memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana kerja. Bank Jatim meyakini, sekecil apapun kontribusi yang bisa diberikan melalui gerakan 3R, hal itu akan berdampak positif bagi lingkungan.

Pegawai yang bekerja di Bank Jatim, merupakan aset strategis dalam menciptakan nilai bagi Bank, mewujudkan kepuasan konsumen/nasabah, sekaligus kunci untuk menghadapi persaingan. Dalam posisinya yang sangat strategis tersebut, pegawai juga merupakan mesin pendorong kemajuan, bahkan menjadi pengendali sumber daya yang lain, termasuk modal dan teknologi. Lebih dari itu, pegawai juga merupakan garda

terdepan pelayanan sehingga sangat berperan dalam membentuk citra Bank Jatim sebagai lembaga jasa keuangan tepercaya dan memberikan layanan secara paripurna sehingga layak menjadi pilihan bagi nasabah. Bank Jatim berkomitmen untuk memperlakukan semua pegawai secara setara (non diskriminatif) tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, pandangan politik, dan sebagainya. Bank Jatim berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Komitmen Bank Jatim untuk menghadirkan pegawai dengan kualitas terbaik dilakukan dengan menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan. Selain memberikan pelatihan kepada pegawai yang masih aktif, Bank Jatim juga memberikan perhatian khusus kepada pegawai yang hendak pensiun dengan memberikan pelatihan menjelang pensiun.

Bank telah memberikan rincian kontak melalui situs *web* Bank atau Laporan Tahunan yang mana para pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk menyampaikan keluhan, saran maupun kemungkinan adanya pelanggaran atas hak-hak mereka. Dalam meningkatkan implementasi penerapan GCG di Bank Jatim, manajemen Bank berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik, manajemen telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola secara transparan dan adil melalui sarana *Whistleblowing System*.

Bank senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan. Terkait kepemilikan saham, Bank telah mengungkapkan informasi antara lain pemegang saham 5% atau lebih, kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar, serta kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris baik langsung dan tidak langsung. Bank juga melaksanakan pengungkapan informasi melalui laporan tahunan. Laporan tahunan Bank Jatim telah memuat antara lain, visi, misi, tujuan dan sasaran Bank, kinerja keuangan dan non keuangan, kebijakan dividen, detail biografi dari semua Direksi dan Dewan Komisaris, rincian kehadiran masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam semua rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun, jumlah remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, transaksi pihak terkait, serta kantor Akuntan Publik beserta biaya audit dan non auditnya.

Selain melalui laporan tahunan, Bank juga telah mengungkapkan informasi perusahaan melalui laporan triwulanan, laporan keuangan yang dapat dilihat pada *website* Bank. Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Pengungkapan informasi Bank dilakukan melalui komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi internal antar manajemen Bank dan pegawai



serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id) yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan, maka tim Investor Relation Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidental kepada regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

Terkait tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Bank yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain, Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Terkait komposisi Dewan Komisaris, saat ini Bank memiliki 60% Komisaris Independen dari jumlah Dewan Komisaris yang ada di Bank. Komposisi Komisaris Independen pada posisi tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang Komposisi Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Terkait perkembangan penerapan tata kelola perusahaan di tahun 2022, Bank melaksanakan GCG *Assessment* secara periodik sesuai ketentuan SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pada tahun 2022, Bank melaksanakan *assessment* pada semester I dan II. Skor yang di peroleh pada semester I dan II yaitu 2,47 dan 2,51. Hasil *assessment* ditindaklanjuti guna peningkatan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

## Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

### Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut Asset Liabilities Committee (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerja sama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2022 berjalan ALCO telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat.

### Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2022 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat.

### Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritical di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2022 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat.



## Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi merupakan bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite IT Steering dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2022 berjalan Komite TI telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

## Komite Kredit

Komite Kredit terdiri dari Komite Kredit Konvensional dan Komite Pembiayaan. Komite Kredit Konvensional adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Komite Pembiayaan adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

- Komite Implementasi Kredit  
Selama tahun 2022 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kali rapat.
- Komite Penyelamatan Kredit  
Selama tahun 2022 berjalan komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat.
- Komite Penyelesaian Kredit  
Selama tahun 2022 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.
- Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan  
Selama tahun 2022 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat.
- Komite Implementasi Pembiayaan  
Selama tahun 2022 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat.

## Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama

tahun 2022 berjalan komite Kebijakan Perkreditan Konvensional dan Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

## Komite Produk, Jaringan dan Prosedur

### Komite PJP Bidang Produk

Komite Bidang Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam bersaing dan berkembang pada dunia perbankan. Selama tahun 2022 berjalan komite PJP Bidang Produk telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

### Komite PJP Bidang Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2022 berjalan komite PJP Bidang Jaringan telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.

### Komite PJP Bidang Prosedur

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau *update* Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan. Selama tahun 2022 berjalan komite PJP Bidang Prosedur telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat.

## Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

## Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur sebagai berikut:

<b>Busrul Iman</b>	: Direktur Utama
<b>Rizyana Mirda</b>	: Direktur Risiko Bisnis
<b>Tonny Prasetyo</b>	: Direktur TI dan Operasi
<b>Ferdian Timur Satyagraha</b>	: Direktur Keuangan
<b>Erdianto Sigit Cahyono</b>	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko



## Komposisi Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Pada tanggal 17 Maret 2022, RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 memutuskan perubahan susunan pengurus Bank sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengangkat:
  - a. Direktur Komersial dan Korporasi: Edi Masrianto;
  - b. Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah: R. Arief Wicaksono.
2. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yaitu:
  - a. Direktur Risiko Bisnis: Rizyana Mirza;
  - b. Direktur Keuangan: Ferdian Timur Satyagraha.

Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur sebagai berikut:

<b>Busrul Iman</b>	: Direktur Utama
<b>Tonny Prasetyo</b>	: Direktur TI dan Operasi
<b>Erdianto Sigit Cahyono</b>	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
<b>Edi Masrianto</b>	: Direktur Komersial dan Korporasi
<b>R. Arief Wicaksono</b>	: Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah

## Komposisi Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Pada tanggal 7 Desember 2022, RUPS Luar Biasa Tahun 2022 memutuskan perubahan susunan pengurus Bank sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengangkat:
  - a. Direktur IT dan Digital: Zulhelfi Abidin;
  - b. Direktur Manajemen Risiko: Eko Susetyono.
2. Memberhentikan dengan hormat Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2022 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

<b>Busrul Iman</b>	: Direktur Utama
<b>Tonny Prasetyo *)</b>	: Direktur Operasi
<b>Edi Masrianto</b>	: Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services
<b>R. Arief Wicaksono</b>	: Direktur Mikro, Ritel & Menengah
<b>Zulhelfi Abidin **)</b>	: Direktur IT dan Digital
<b>Eko Susetyono</b>	: Direktur Manajemen Risiko

\*) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

\*\*) ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022.

## Penutup

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kegiatan usaha Bank Jatim pada Tahun Buku 2022. Pengawasan dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris ikut memberikan arah kebijakan yang diambil oleh manajemen. Direksi juga menyampaikan terima kasih kepada *stakeholder* dan *shareholder*.

Bank Jatim terus melakukan pembenahan di segala lini sebagai komitmen untuk memperbesar kontribusi dalam membangun perekonomian daerah, yang pada akhirnya akan berimbas pada geliat perekonomian nasional. Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi-strategi yang telah ditetapkan, serta berkomitmen untuk dapat berperan aktif dalam program transformasi BPD yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan tetap berperan sebagai *agent of development* di daerah melalui pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Surabaya, 21 Maret 2023  
Atas Nama Direksi



**Busrul Iman**  
Direktur Utama



# Laporan

## Dewan Komisaris



### **Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Bank Jatim dapat mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2022. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu memberikan kinerja yang baik di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami ketidakpastian.



## Suprajarto

### Komisaris Utama

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2022. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola Bank, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Bank untuk tahun buku 2022.

### Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi tidak terlepas dari efektivitas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat Gabungan serta kunjungan kerja (*on site visit*). Pemberian nasihat secara formal dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Sedangkan pemberian nasihat secara informal dilakukan melalui kunjungan kerja (*on site visit*). Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 18 (delapan belas) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 13 (tiga belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait.
2. Persetujuan Rencana Pelaksanaan (*Audit Plan*) Divisi Audit Internal Periode 2022.

3. Penyediaan Fasilitas Kredit Investasi kepada Yayasan TPS-NU Khadijah.
4. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2022.
5. Persetujuan Usulan Perubahan Remunerasi Anggota Komite (Pihak Independen).
6. Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2022.
7. Persetujuan usulan Kebijakan Produk Aktivitas APU PPT.
8. Persetujuan Dewan Pengawas Syariah Mengikuti Perpanjangan Sertifikasi Pengawas Syariah.
9. Penggantian Sementara Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
10. Persetujuan dan Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Jatim Tahun Buku 2022.
11. Persetujuan terkait Aksi Korporasi Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sehat.
12. Persetujuan Dewan Pengawas Syariah Dalam Ijtima' Sanawi DPS Tahun 2022.
13. Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2023.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perumusan strategi dan implementasi strategi Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Pengawasan terhadap perumusan strategi Bank dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta memberikan persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis. Sedangkan pengawasan terhadap implementasi strategi dilakukan melalui pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank.

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut

antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Dalam World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF) memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global di angka 3,0% pada tahun 2022 dan 2,6% pada tahun 2023. Pada tahun 2022, PDB global sedikit menurun (lebih -0,1 poin persentase secara triwulanan) dengan pertumbuhan negatif di berbagai negara besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat serta penurunan tajam di negara-negara Eropa Timur yang paling terpengaruh secara langsung oleh perang di Ukraina dan sanksi internasional yang ditargetkan untuk memberi tekanan pada Rusia untuk mengakhiri perseteruan.

Beberapa ekonomi utama tidak mengalami kontraksi pertumbuhan, namun kawasan eropa secara mengejutkan naik pada kuartal kedua, dipimpin oleh pertumbuhan ekonomi Eropa selatan yang bergantung pada sektor pariwisata. Perlambatan yang terjadi di paruh pertama tahun 2022 disebabkan oleh penghapusan cepat akomodasi moneter karena banyak bank sentral yang berusaha menahan inflasi secara terus-menerus. Suku bunga yang lebih tinggi dan kenaikan terkait dalam biaya pinjaman, termasuk tingkat hipotek, memiliki efek yang diinginkan dalam menghilangkan panas dari permintaan domestik, dengan pasar perumahan menunjukkan tanda-tanda paling awal dan paling jelas dari perlambatan ekonomi seperti AS yang dapat dibelanjakan. Di Afrika sub-Sahara lebih dari dua pertiga obligasi pemerintah memiliki *spread* lebih dari 700 basis poin pada Agustus 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di Eropa Timur dan Tengah, akibat perang di Ukraina mendorong perubahan selera risiko global. Selain kebijakan moneter, epidemi COVID-19 China yang masih belum 100% usai serta invasi Rusia ke Ukraina turut melemahkan aktivitas ekonomi. China memberlakukan pembatasan yang signifikan di dalam negeri dan mengikat rantai pasokan global yang sudah tegang. Perang di Ukraina dan pengetatan pasokan gas ke Eropa menambah tekanan yang sudah ada di pasar komoditas global, mendorong harga gas alam lebih tinggi lagi.

Di sisi perekonomian nasional, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,72% (*year on year/yoy*) sedikit di atas proyeksi Pemerintah sebesar 5,7%. Hal tersebut mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat antara 4,5% hingga 5,3% pada tahun 2023 dan selanjutnya meningkat menjadi 4,7% hingga 5,5% pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan konsumsi swasta, investasi, dan ekspor yang positif di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara yoy terjadi pada sebagian besar lapangan usaha kecuali Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang berkontraksi sebesar 1,74%. Sementara dari sisi inflasi, BPS menyebutkan bahwa pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 5,51% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Pada sisi ekspor

impor, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia 2022 mencapai USD268,18 miliar atau naik 28,16% dibanding tahun 2021.

Di sisi Intermediasi Perbankan terlihat *trend* membaik. Pertumbuhan kredit pada November 2022 tercatat sebesar 11,16% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan positif di seluruh jenis kredit dan mayoritas sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 23,5% (yoy).

Sementara itu Bank Indonesia terus mendorong peningkatan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya *digital banking*. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada November 2022 tumbuh 12,84% (yoy) mencapai Rp35,3 triliun sedangkan nilai transaksi *digital banking* meningkat 13,88% (yoy) menjadi Rp4.561,2 triliun sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Selain itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga meningkat 16,85% (yoy) menjadi Rp664,9 triliun. Sementara itu, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada November 2022 meningkat 7,77% (yoy) mencapai Rp935,2 triliun.

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan menangkap peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2022. Dari sisi operasional, Total Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi tahun 2022 sebesar Rp10,32 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,49% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp9,69 triliun. Total Kredit Konsumen tahun 2022 mencapai Rp27,69 triliun, meningkat 5,25% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp26,31 triliun. Dari Kredit Mikro, Ritel dan Program, pada tahun 2022 telah menyalurkan kredit sebesar Rp6,27 triliun, meningkat sebesar Rp1,29 triliun atau sebesar 25,91% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,98 triliun.

Pada segmen Syariah, realisasi DPK Syariah tahun 2022 adalah sebesar Rp2,06 triliun, meningkat sebesar Rp79,32 miliar atau 3,99% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,98 triliun. Jumlah nasabah DPK UUS Bank Jatim pada tahun 2022 sebesar 264.670 nasabah meningkat sebesar 25.471 nasabah atau 10,65% dibandingkan tahun 2021. Jumlah Pembiayaan Syariah pada tahun 2022 sebesar Rp1,90 triliun naik sebesar Rp141,10 miliar atau 8,01% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,76 triliun.

Pencapaian yang baik juga terlihat dari sisi keuangan. Pada tahun 2022 jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp4.917.056 juta, meningkat sebesar 5,12% dari tahun 2021 yang sebesar Rp4.677.681 juta. Laba tahun berjalan di tahun 2022 mencapai Rp1.542.824 juta, meningkat sebesar 1,30% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1.523.070 juta. Peningkatan laba tahun berjalan mendorong peningkatan total aset dan total ekuitas. Pada tahun 2022, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp103.031.367 juta, meningkat sebesar

2,29% dari tahun 2021 yang sebesar Rp100.723.330 juta. Ekuitas di tahun 2022 mencapai Rp11.445.861 juta, meningkat sebesar 4,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.910.539 juta.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Tingkat kesehatan Bank dinilai berdasarkan POJK. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko. Faktor tersebut yaitu, Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*). Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank Jatim posisi 31 Desember 2021 berada pada PK 2 (Sehat).

## Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Prospek ekonomi global mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh adanya inflasi yang semakin persisten, pengetatan kebijakan moneter dan perang di Ukraina. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) rilis Oktober 2022 memproyeksi outlook pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7% di tahun 2023. Sementara proyeksi inflasi global sebesar 6,5% di tahun 2023. Perkembangan risiko ekonomi global telah mengganggu aktivitas manufaktur global yang digambarkan oleh PMI Manufaktur global berada pada level kontraksi pada September 2022 setelah lebih 2 (dua) tahun terakhir berada pada level ekspansi. Perkembangan sektor keuangan global juga mengalami tekanan yang diperlihatkan adanya kenaikan imbal hasil dan penguatan dolar Amerika Serikat akibat pengetatan kebijakan moneter.

Pada perekonomian nasional, dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan terakselerasi dibandingkan tahun 2022, sejalan dengan tren perbaikan ekonomi global dan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 3,45%-5,15% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan didorong oleh faktor semakin terkendalinya Pandemi Covid-19 sehingga mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi juga kembali normal sehingga menjadikan perekonomian beranjak pulih kembali seperti sediakala.

Arah pengembangan digitalisasi industri perbankan diperkirakan akan semakin pesat seiring dengan dikeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum yang mengakomodir Bank Digital. Dalam POJK tersebut, Bank Digital diartikan sebagai bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Dalam lingkup global, dinamika industri keuangan dan perbankan digital direspon dengan mulai bermunculannya neobank.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Bank Jatim akan dapat memanfaatkan peluang yang ada yaitu, perubahan pola perilaku masyarakat akibat disrupsi teknologi khususnya dalam pemanfaatan teknologi perbankan. Hal ini didukung juga dengan jumlah penduduk usia millennial dan Generasi Z yang notabene merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce* serta potensi ekonomi dan keuangan digital semakin mendominasi. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan serta masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UMKM yang semakin berkembang juga merupakan peluang bagi Bank Jatim.

## Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Bank

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan dan senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Implementasi *good corporate governance* (GCG) pada Bank juga didasarkan pada pedoman-pedoman implementasi yang sesuai dengan *best practices*/standar internasional. Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG di Bank telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen GCG sebagai berikut.



## Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Rerangka Manajemen Risiko tertuang dalam Bank Jatim *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight, Risk Policy and Management, dan Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Bank menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Bank juga membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan). Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2022 adalah peringkat 2 (PK-2) dengan peringkat risiko *inherent low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Satisfactory*.

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko yang efektif yang memuat antara lain:
  - a. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko.
  - b. Penentuan dan penetapan limit Risiko.
  - c. Penetapan penilaian peringkat Risiko.
  - d. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*).
  - e. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.

## Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian internal untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian internal secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

2. Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank. Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
5. Pihak-pihak ekstern. Pihak-pihak ekstern bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*).

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas kecukupan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris menilai bahwa kecukupan sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

## Whistleblowing System

Keberhasilan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi *Anti Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank. Terkait implementasi

WBS, Dewan Komisaris memiliki peran dalam menelaah hasil laporan audit khusus dari laporan WBS yang telah diaudit oleh Sub Divisi Special & Assurance. Laporan Audit Khusus selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Semesteran Penerapan Strategi *Anti Fraud* oleh Sub Divisi Operational & Financial Audit.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi *anti fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal seperti, pemecatan, demosi, diskriminatif, intimidasi serta perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi *Anti Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Bank Jatim telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2022, terdapat 10 (sepuluh) laporan melalui sarana *whistleblower*. Dari 10 (sepuluh) laporan tersebut 8 (delapan) pengaduan telah selesai diproses.

## Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Aktif, Pengawasan Pasif dan Pengembangan Kompetensi. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

## Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

### Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

**Candra Fajri Ananda** : Komisaris Independen

**Muhammad Mas'ud** : Komisaris Independen

**Heru Tjahjono** : Komisaris

### Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Pada tanggal 17 Maret 2022, RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 menyetujui dan mengangkat anggota Dewan Komisaris, yaitu Suprajarto sebagai Komisaris Utama dan Sumaryono sebagai Komisaris Independen. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

**Suprajarto** : Komisaris Utama

**Candra Fajri Ananda** : Komisaris Independen

**Muhammad Mas'ud** : Komisaris Independen

**Heru Tjahjono** : Komisaris

**Sumaryono** : Komisaris Independen

## Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh Pegawai. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2022. Dewan Komisaris juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha Bank Jatim. Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Bank dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Bank menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Surabaya, 21 Maret 2023  
Atas Nama Dewan Komisaris



**Suprajarto**  
Komisaris Utama

# Tanggung Jawab

## Laporan Tahunan 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Maret 2023

### Direksi



**Busrul Iman**  
Direktur Utama



**Tonny Prasetyo** \*)  
Direktur Operasi



**Edi Masrianto**  
Direktur Keuangan, Treasury  
& Global Services



**R. Arief Wicaksono**  
Direktur Mikro, Ritel & Menengah



**Zulhelfi Abidin** \*\*)  
Direktur IT & Digital



**Eko Susetyono**  
Direktur Manajemen Risiko

\*) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

\*\*) ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022.

Dewan Komisaris



**Suprajarto**  
Komisaris Utama



**Heru Tjahjono**  
Komisaris



**Candra Fajri Ananda**  
Komisaris Independen



**Muhammad Mas'ud**  
Komisaris Independen



**Sumaryono**  
Komisaris Independen



# Profil Perusahaan





03





# Identitas Perusahaan

## Nama Perusahaan

PT Bank Pembangunan  
Daerah Jawa Timur Tbk.



## Bidang Usaha

Jasa Perbankan



## Nama Panggilan

Bank Jatim

## Contact Address

**Call Center** : 14044  
**SMS Banking** : 3366  
**Telp** : (031) 5310090-5310099  
**Faks.** : (031) 5310838  
**Email** : info@bankjatim.co.id  
**Situs Web** : www.bankjatim.co.id,  
www.bankjatim.id



## Tanggal Pendirian

17 Agustus 1961



## Dasar Hukum Pendirian

Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.



## Kode Saham

BJTM



## Data Jaringan Kantor

- 1 Kantor Pusat
- 41 Kantor Cabang Konvensional
- 7 Kantor Cabang Syariah
- 172 Kantor Cabang Pembantu Konvensional
- 10 Kantor Cabang Pembantu Syariah
- 215 Kantor Kas Konvensional
- 2 Kantor Kas Syariah
- 204 *Payment Point* Konvensional
- 8 *Payment Point* Syariah
- 841 ATM
- 25 ATM Syariah
- 0 CDM
- 65 CRM
- 7 CRM Syariah
- 97 *Car Cash* ATM
- 43 Kas Mobil/Kas Mobil ATM
- 7 *Car Cash* Syariah
- 195 Kantor Layanan Syariah/  
*Office Channeling*



## Modal Dasar

**Rp9.000.000.000.000**



## Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

12 Juli 2012



## SMS Banking

3366



## Call Center

14044



## Situs Web

www.bankjatim.co.id  
www.bankjatim.id



## Jumlah Pegawai

Per Desember 2022 sebanyak 6.550 Orang (termasuk Tenaga Alih Daya)

## Alamat Perusahaan



### Kantor Pusat

Jalan Basuki Rachmad  
98 – 104, Surabaya 60271  
PO.BOX 917



### Sekretaris Perusahaan

Budi Sumarsono  
Corporate Secretary  
Kantor Pusat Bank Jatim  
Jl. Basuki Rachmat  
no. 98-104 Surabaya  
Email: corsec@bankjatim.co.id



## Kepemilikan

Pemda Tingkat I  
Provinsi Jawa Timur **(51,13%)**  
38 Pemda Kabupaten/Kota  
**(28,35%)**  
Masyarakat **(20,52%)**



### Investor Relation

Derry Widya Ariyanta  
Corporate Secretary  
Kantor Pusat Bank Jatim  
Jl. Basuki Rachmat  
no. 98-104 Surabaya  
Email: iru@bankjatim.co.id



## Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Sebanyak 15.015.498.082 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.753.874.520.500



@bankjatim



bankjatim



@bank\_jatim



bank jatim

## Nama dan Alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah

KANTOR CABANG				
Nama	Alamat	Telepon	Faksimili	Email dan Web
Cabang Utama Surabaya	Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Surabaya	(031) 5310090-99	(031) 5470159	Bankjatim.cabut@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Banyuwangi	Jl. Basuki Rahmat no. 156 Banyuwangi	(0333) 421755/ 426755	(0333) 421555	umumsdbanyuwangi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jember	Jl. A. Yani no. 3A RT 01 RW 03 Patrang Jember 68137	(0331) 484605-07	(0331) 428376/ 481502	akuntansi.bpdjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Malang	Jl. Jaksa Agung Suprpto 26-28 Malang	(0341) 321961	(0341) 325085/ 365212	bankjatim_malang@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Madiun	Jl. Jawa No. 43 Madiun	(0351) 464432/ 459202/476328/ 476315	(0351) 463665/ 491499	bankjatim_madiun@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kediri	Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kediri	(0354) 680270	(0354) 682924	bankjatimkediri@gmail.com umum.bjkediri@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pamekasan	Jl. Panglima Sudirman No. 5 Pamekasan	(0324) 322451/ 322923	(0324) 322932	bankjatim.pamekasan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bojonegoro	Jl. Mastrip 70 Bojonegoro	(0353) 882137/ 889753	(0353) 881028/ 891772	bankjatim_bojonegoro2004@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lumajang	Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang	(0334) 881683/ 882111	(0334) 882830	bankjatimlmj@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Ngawi	Jl. Yos Sudarso 32 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.ngawi@gmail.com umum.bankjatimngawi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jombang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36, Kec. Jombang, Kab. Jombang	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.jombang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kraksaan	Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kraksaan	(0335) 841382/ 843184	(0335) 841124/ 842451	bankjatim_kraksaan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Probolinggo	Jl. Soekarno-Hatta 311 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	(0335) 422552/ 421879	(0335) 422314	bjprob@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Blitar	Jl. HOS Cokroaminoto 36-38, Blitar	(0342) 801462/ 806089/807333	(0342) 802262/ 801353	bankjatimblitar@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tulungagung	Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Tulungagung	(0355) 321105/ 321106/327581	(0355) 321104/ 320407	bankjatim.tulungagung@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tuban	Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban	(0356) 322725	(0356) 321169	bankjatimtuban017@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Mojokerto	Jl. A. Yani No. 20, Mojokerto	(0321) 321261/ 323002	(0321) 396112/ 395950/ 395501	umum.mojokerto@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sumenep	Jl. Trunojoyo 49 Sumenep	(0328) 662557/ 662487	(0328) 665780	bjsumenep018@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sampang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111, Sampang	(0323) 321226/ 323400/325004	(0323) 321493/ 325006	bankjatim_sampang@yahoo.com bjtmsampang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bangkalan	Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Demangan Bangkalan	(031) 3095502/ 3093416/3099085	(031) 3095722	bankjatim_bangkalan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 18 Pasuruan	(0343)421061/ 411609/426086/ 431957	(0343) 426085/ 432797	bankjatim_pasuruan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Nganjuk	Jl. Gatot Subroto 8 Nganjuk	(0358) 325100/ 325101/323910	(0358) 324420	bankjatim_nganjuk@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman No. 145 Trenggalek	(0355) 791676/ 791675	(0355) 792945	bankjatim_trenggalek@yahoo.com www.bankjatim.co.id



### KANTOR CABANG

Nama	Alamat	Telepon	Faksimili	Email dan Web
Cabang Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 42-44 Ponorogo	(0352) 461157/ 461158/ 484222	(0352) 484260/ 485485	bankjatim020@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pacitan	Jl. A. Yani No. 82 Pacitan	(0357) 881320/ 881321	(0357) 882889/ 886456	cabang_pacitan@bankjatim.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Gresik	Jl. Dr. Sutomo 181, Gresik	(031) 3982311/3982313/ 3980580	(031) 3973976/ 3990937	bankjatim_gresik@yahoo.com bankjatim.gresik@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sidoarjo	Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo	(031) 8956108/ 8956109	(031) 8921631	bankjatim_sidoarjo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lamongan	Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No 72 Lamongan	(0322) 321810/ 322769/311633/ 318508	(0322) 321494	bankjatimlamongan28@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Situbondo	Jl. Basuki Rahmat 235 Situbondo	(0338) 674982/ 672123/ 674983	(0338) 672017	bankjatim_situbondo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bondowoso	Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso	(0332) 427456/ 427447	(0332) 423524	bankjatim_bondowoso@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Magetan	Jl. Pahlawan No. 2 Magetan	(0351) 895378/ 891441/ 895333	(0351) 894715/ 895384	bankjatim.magetan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Dr. Soetomo Surabaya	Jl. Airlangga No. 1-9 Surabaya	(031) 99453111/ 5012107	(031) 5020121	bj.sutomo@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Perak Surabaya	Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya	(031) 3282635-37	(031) 3282508/ 3299063	bankjatim_perak@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kangean	Jl. Sriwijaya No. 431 Kec. Arjasa Kep. Kangean Sumenep	(0327) 312200/ 312030/ 312161	(0327) 312040	bankjatim034@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Jakarta	Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta Pusat	(021) 29625615-17	(021) 29625618	cabangjakarta.umum@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Batu	Jl. Panglima Sudirman No. 88 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Batu	(0341) 511205/ 511206	(0341) 590522 /598550	bankjatimbatu@gmail.com umumbankjatimbatu@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bawean	Jl. Kawedanan No. 3, Sangkapura Bawean	(0325) 422470/ 422770/423801/ 421558	(0325) 422471	bpdjatim.bawean@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pare	Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare	(0354) 397850/ 397851	(0354) 392799	bankjatimpare042@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang HR. Muhammad Surabaya	Jl. HR. Muhammad No. 29 Surabaya	(031) 99147557/ 99141887	(031) 99147868/ 99147763	bjtm.hrm@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kepanjen	Jl. Kawi No. 28, Kepanjen	(0341) 398140	(0341) 398141	bankjatim_kepanjen@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Batam	Jl. Pembangunan Komplek Ruko Citra Mas Penuin Blok A-05 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam	(0778) 8071030	(0778) 7602059	bankjatimcabangbatam@gmail.com www.bankjatim.co.id
KANTOR CABANG SYARIAH				
Syariah Surabaya	Jl. Dr. Soetomo No. 37 Surabaya	(031) 99543971	(031) 99543971	umum.kccsurabaya@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Kediri	Jl. Diponegoro No. 50B Kediri	(0354) 7418278/7418279	7418277/7418424	bankjatimsyariah_kediri@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Malang	Jl. Soekarno Hatta Grand Ruko Kav. 13-14 Malang	(0341) 491333/492333	(0341) 2996502/ 2996503	bankjatimsyariahmalang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Gresik	Jl. R.A. Kartini No. 220 – 222 Gresik	(031) 3982011	(031) 3982027	bankjatimsyariah_gresik@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Madiun	Jl. Hos Cokroaminoto No. 128 Kota Madiun	(0351) 476677	(0351) 476666	jatimsyariahmadiun@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Jember	Jl. Gajah Mada 278 Jember	(0331) 410614	(0331) 410613	bjsyariahjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Sidoarjo	Jl. Sunanjar Priyo Sudarmo No. 138-148 Blok A-B Sidokare Sidoarjo	(031) 8924148/8925898	(031) 99704074/ 99704084	bankjatimsyariah.cabangsidoarjo@gmail.com www.bankjatim.co.id

# Brand

## Perusahaan

### MAKNA LOGO:



Inspirasi bentuk dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah "Bird of Life" atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju *goal* yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berasaskan kerakyatan.

*The First* merupakan *Brand Personality* Bank Jatim yang tercermin dalam 5 (lima) Helai Sayap pada logo Bank Jatim. Lima Helai Sayap menggambarkan 3 (tiga) Pilar serta 2 (dua) landasan utama perbankan. Tiga Pilar perbankan antara lain adalah *Agent of Development*, *Institutional Endurance* dan *Services*. Dua landasan utama perbankan antara lain adalah *good Corporate Governance* dan *Risk Management*.



#### 5 Semangat Baru Bank Jatim

PRO **F** ESIONAL  
 PARTNERSH **I** P  
 CA **R** E  
**S** ERVICE  
 TRUS **T** WORTHY



#### 3 Pilar Serta 2 Landasan Utama Perbankan

##### 3 PILAR

- *Agent of Development*
- *Institutional Endurance*
- *Services*

##### 2 LANDASAN UTAMA PERBANKAN

- *Good Corporate Governance*
- *Risk Management*





## Riwayat Singkat Perusahaan



**Perjalanan bisnis Bank Jatim dimulai pada tahun 1961, saat ini Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.783 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Payment Point, Kas Mobil/Counter dan ATM/CRM.**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan landasan hukum pendirian berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961, yang dilengkapi landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, status Bank Pembangunan Daerah dari Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tanggal 29 Desember 1994 dilakukan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 26 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan mengubah struktur permodalan/kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang pada tanggal 19 Agustus 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No.

1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999, maka selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk

memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No. 89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No. AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan, melalui akta No. 23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0927645 tanggal 27 April 2015.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 43 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan perubahan dan kodifikasi terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

Bank Jatim telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 47 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi PT Bank Jatim untuk melakukan penyesuaian pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar PT Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 99 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan sehubungan dengan pelaksanaan Program *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian permodalan terkait dengan pelaksanaan Program *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) Bank Jatim berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat No. 55 Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 67 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Bank Jatim untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan mengubah pasal 3 sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank Jatim.

Bank Jatim melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 16 Juni 2020.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 01 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto SH, telah diperoleh persetujuan untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan kodifikasi terhadap Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank Jatim melakukan penyesuaian dan kodifikasi terhadap Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 95 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0387989 Tanggal 21 Juni 2021.

## Keterangan Perubahan Nama

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, Bank Jatim pernah melakukan pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 1976 atas dasar Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Kemudian berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8827.HT.01.01. Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan Berita Negara RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara RI Nomor 3008/1999. Terakhir berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan 20% saham di Bursa Efek Indonesia dengan *Ticker Code* atau Kode Saham BJTM.



## Visi, Misi & Budaya Perusahaan



### VISI

Menjadi  
"BPD No. 1" di Indonesia



### Penjelasan Visi

Menjadi Bank BPD yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan serta menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga mampu bersaing dan bahkan mengungguli bank-bank lain khususnya Bank Pembangunan Daerah.

### Reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi Bank Jatim yang selama ini berjalan, Bank Jatim senantiasa melakukan reviu terhadap Visi dan Misi secara berkala. Pada tahun 2022, Visi dan Misi Bank masih Jatim telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat presentasi akhir penyusunan *Corporate Plan 2022-2026*.

# bankjatim



## MISI

- Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju *digital bank* dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
- Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;
- Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.



### Penjelasan Misi

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya difokuskan meningkatkan percepatan pertumbuhan kinerja dan Bank terus bertransformasi agar tetap relevan dalam upayanya untuk tumbuh di atas rata-rata industri perbankan. Dalam upaya percepatan pertumbuhan kinerja didukung Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki Bank secara terus menerus untuk dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam bersaing khususnya terhadap Bank Pembangunan Daerah.

Bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan digital yang lebih beragam sehingga produk-produknya mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya di regional Jawa Timur.

Guna memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Bank mempunyai tugas untuk terus berupaya berperan serta mengembangkan UMKM dan berkontribusi pada proyek-proyek strategis pemerintah maupun kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

Dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berusaha mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan dan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan.

Adapun keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.



## BUDAYA PERUSAHAAN

### EXCELLENCE

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. Perilaku utama:

#### **Fast & Simplicity**

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh *customer*. Panduan perilaku:

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah.
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan *customer*.
- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi *customer*.

#### **Agile & Business Savvy**

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, *responsive* dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan. Panduan perilaku:

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada.
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas.
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan.
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan *customer*.

### PROFESSIONAL

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal. Perilaku utama:

#### **Execution & Risk Taker**

Melaksanakan keputusan Manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan. Panduan perilaku:

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, akurat dan tepat waktu.
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemantauan secara berkesinambungan.
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan.
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada.

#### **Proactive & Accountable**

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Panduan perilaku:

- Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan.
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja.
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat.
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim.

## INTEGRITY

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika. Perilaku utama:

### Honesty

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Panduan perilaku:

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi.
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat.
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi.
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan.
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan.
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar.
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku.
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit.
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Menghindari peluang yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten.
- Menggunakan aset perusahaan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun.
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara obyektif dan terbuka.

### Trust

Sikap saling menghargai dan terbuka di antara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan. Panduan perilaku:

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun.
- Menjaga komunikasi yang penuh empati di antara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonal kerja.
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman.
- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Menjalin kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama.
- Menghormati perbedaan di antara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi.



## SYNERGY

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Perilaku utama:

### Respect

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Panduan perilaku:

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain.
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain.
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain.
- Menghindari perilaku yang merusak diri.
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan.

### Collaboration

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Panduan perilaku:

- Berorientasi pada hasil yang positif.
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau Kesepakatan.
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya.
- Rasa memiliki yang tinggi.
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi.

## INNOVATION

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan *customer*. Perilaku utama:

### Eager To Learn

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Panduan perilaku:

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi.
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi.
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati.
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik.
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan.

### Creativity

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik. Panduan perilaku:

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi.
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik.
- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan.
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan cepat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah.
- Teguh dalam pendirian dan intuitif.
- Fleksibel, elaboratif, imajinatif, inisiatif, percaya diri.
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan.



## Kegiatan

### Usaha



### Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 95 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0387989 Tanggal 21 Juni 2021. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan Bank Jatim, Bank melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. Surat-surat Wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri.



## Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
- Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh kegiatan usaha utama maupun penunjang menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

## Produk dan Jasa

Kegiatan usaha Bank Jatim meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan konvensional dan syariah yang dijelaskan sebagai berikut:

### Produk Simpanan



#### Rekening Giro Rupiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan di manapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Rupiah.

#### Rekening Giro Valas

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank

Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan di manapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Valas (USD).

#### Deposito Rupiah

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

#### Deposito Valas

Deposito valas hanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing, seperti USD sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito valas umumnya lebih rendah daripada deposito rupiah.

## Tabungan Simpeda

Simpeda adalah Simpanan Pembangunan Daerah yang sudah *online* di seluruh Cabang Bank Jatim. Tabungan yang bunganya dihitung harian memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan. Nilai total hadiah Rp12,5 miliar Rupiah per tahun yang diundi tiga kali dalam setahun, yaitu dua kali untuk tingkat nasional dan satu kali untuk tingkat regional.

## Tabungan Siklus

Dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuhkan kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan ini disediakan bagi nasabah yang tidak menginginkan hadiah namun mengharapkan bunga yang kompetitif.

### Tabungan Siklus Usaha Mikro Kecil (SiUMI)

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan *bundling* dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI.

### Tabungan Siklus Nelayan (SINYAL)

Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada dunia kemaritiman. Sejalan dengan peran Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, maka diperlukan pengembangan produk yang ada untuk merealisasikan terwujudnya simpanan (tabungan) bagi para pelaku dunia kemaritiman khususnya nelayan.

### Tabungan Siklus Prioritas

Tabungan Siklus Prioritas ditujukan bagi nasabah Jatim Prioritas atau bagi nasabah yang memiliki dana minimal Rp250 juta rupiah dengan bunga yang relatif tinggi. Berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan eksklusif bagi pemegang kartu debit Jatim Prioritas antara lain layanan kesehatan, diskon di berbagai *merchant*, majalah Jatim Prioritas, undangan *event* eksklusif dan lain-lain.

### Siklus Valas

Salah satu strategi yang ditempuh Bank Jatim adalah menciptakan Tabungan Siklus Valas dengan mata uang asing yang berlaku (USD dan SGD). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga dan/atau *outstanding* dana pihak ketiga secara keseluruhan.

### Siklus Bunga Plus

Program *Marketing* Tabungan Siklus yang memberikan *benefit* berupa barang (tanpa diundi) dimana Nasabah masih tetap dapat menikmati bunga tabungan di akhir periode *lock up*. Cukup dengan menempatkan dana sebesar nominal tertentu Nasabah bisa langsung memilih barang yang diinginkan tanpa diundi. Untuk jangka waktu penempatan (*lock up/holding period*) dimulai dari 1 sampai dengan 60 bulan (sesuai pilihan nasabah).

## Tabungan Haji

Tabungan Haji Bank Jatim adalah salah satu jenis produk tabungan Bank Jatim yang merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima.

## Tabunganku

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.

## Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Tabungan khusus bagi Pelajar/ Siswa Sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dengan nama Simpanan Pelajar (SIMPEL). Dengan setoran awal yang murah dan setoran selanjutnya yang ringan, SIMPEL dikemas untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SIMPEL merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong budaya menabung sejak dini.

## Simpanan Laku Pandai (SiPANDAI)

Simpanan Laku Pandai merupakan produk tabungan Bank Jatim yang memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke Bank, cukup melalui agen SiPandai Bank Jatim. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan Bank untuk memperoleh Layanan Keuangan.

## Tabungan Siklus Pensiun

Tabungan Siklus Pensiun merupakan tabungan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang Rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun (PT Taspen, PT Asabri, Perusahaan Dana Pensiun dan Lembaga Pensiun lainnya yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim) yang dapat dibuka di seluruh Jaringan Kantor Bank Jatim yaitu Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Kantor Kas.



## Produk Kredit Konsumer



### Kredit Multiguna

Fasilitas kredit sektor konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya, yang dapat digunakan untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memberikan fasilitas Kredit Multiguna bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite Bank Jatim dengan prosedur sesuai ketentuan regulator dan suku bunga di atas *cost of fund* (COF). Adapun fitur produk kredit multiguna antara lain:

- Kredit Multiguna – Pegawai
- Kredit Multiguna – Pensiunan
- Kredit Multiguna – Pra Pensiun Pegawai
- Kredit Multiguna – Pra Pensiun THT
- Kredit Multiguna – Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honoror dan Perangkat Desa
- Kredit Multiguna – Pensiun Janda/Duda
- Kredit Multiguna – Pendidikan
- Kredit Multiguna – Tunjangan Profesi Pegawai/Tunjangan Kinerja/Remunerasi
- Kredit Multiguna – Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite Bank Jatim
- Kredit Multiguna – Pensiunan Pegawai Bank Jatim

### Kredit Pegawai & Personal Loan Car Allowance Program

#### Kredit Pegawai

Fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai Bank untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Personal Loan Car Allowance Program (CAP)

Fasilitas kredit yang penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas bagi pegawai Bank dengan jabatan tertentu, diberikan sesuai dengan ketentuan *Car Allowance Program* Bank.

### Kredit Kendaraan Bermotor

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas yang digunakan baik untuk tujuan konsumtif maupun menunjang operasional usaha ataupun *refinancing*.

### Cash Collateral Credit

*Cash Collateral Credit* (CCC) adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/Giro/Tabungan Bank.

### Kredit Jaminan Emas

Kredit Jaminan Emas (KJE) adalah kredit yang dijamin dengan agunan tunai berupa emas batangan/lantakan, emas perhiasan, uang emas dan koin emas atau dalam bentuk lain yang dapat dijadikan sebagai agunan.

### Kredit Properti

Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur untuk pembelian atau pemilikan properti termasuk kredit konsumsi beragun properti (Rumah Tapak/Rumah Susun/Apartemen/Rumah Toko/Rumah Kantor) baik pembelian baru dan bekas dari pengembang ataupun non pengembang. Fasilitas Kredit Properti antara lain:

- Pembelian atau pemilikan properti.
- Renovasi ataupun pembangunan properti di atas tanah sendiri.
- Untuk konsumsi lainnya, merupakan fasilitas kredit dana tunai untuk keperluan konsumtif lainnya seperti pembelian kendaraan, biaya pendidikan, dan lainnya.
- Take Over, Take Over plus Top Up*.
- Pembelian atau pemilikan properti lelang Bank, merupakan fasilitas kredit untuk pembelian atau pemilikan properti hasil lelang di Bank.
- Pembelian atau pemilikan properti keluarga, fasilitas kredit yang mengakomodir pembelian atau pemilikan properti yang dipersembahkan untuk keluarga tercinta.

## Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi



### Kredit Kontraktor Pola Transaksional

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola transaksional adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan *plafond* tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

### Kredit Kontraktor Pola Standby Loan

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola *Standby Loan* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan *plafond* tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* per proyek atau kontrak kerja dan pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* Proyek yang bersangkutan.

### Kredit Modal Kerja Umum Angsuran

Kredit Modal Kerja Angsuran fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana pencairannya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

### Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

### Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

### Kredit Konstruksi Properti

Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/*Developer*) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti.

### Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/lembaga keuangan Non-Bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, diperjanjikan dalam dokumentasi, dan diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen.

### Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

### Kredit Pembiayaan Piutang

Kredit Pembayaran Piutang adalah kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Fasilitas Kredit Pembayaran Piutang diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/tagihannya masih belum waktunya untuk ditagih/dicairkan. Keunggulan: Proses cepat.

### Kredit Pemerintah Daerah

Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemda di Wilayah Jawa Timur maupun di luar Wilayah Jawa Timur yang berupa kredit investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan/atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan *cash flow* daerah dalam anggaran tahun yang sama dengan *plafond* tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Keunggulan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

### Kredit Trade Finance

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang ekspor dan impor dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat.



## Kredit Mikro, Ritel dan Program



### Kredit Jatim Ritel

Kredit Jatim Ritel merupakan salah satu skem kredit produktif yang dimiliki Bank Jatim untuk menunjang calon debitur dalam mendapatkan bantuan permodalan khususnya debitur UMKM dengan *plafond* kredit maksimal Rp1 Miliar.

### Kredit Mikro Laguna

Kredit yang diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha.

### Kredit Linkage BPR

Fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbamide dan Perbarindo, baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX.

### Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* kredit sampai dengan Rp500 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan dan kriteria calon debitur penerima KUR sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

### Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA)

Kredit modal kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk disalurkan kepada anggotanya. Selain itu, Bank Jatim juga bekerja sama dengan PTPN X dan PTPN XI terkait penyaluran kredit KKPA Sektor Tebu.

### Kredit Kepada Koperasi (KKOP)

Kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga.

### KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)

Kredit/pembiayaan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian produksi yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil.

### Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah. Yang dimaksud Pelaku Usaha Pembibitan Sapi adalah perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi.

### Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Energi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan dan perikanan yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

### Kredit Jatim Mikro

Kredit modal kerja dan/atau investasi disektor produktif yang diberikan untuk pembinaan usaha kepada pengusaha mikro dan kecil.

### Kredit Linkage Fintech

Kredit modal kerja yang diberikan kepada suatu kelompok Ibu-Ibu pengusaha mikro untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktifitas usaha.

### Kredit SiUMI

Kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan oleh Bank untuk pelaku usaha produktif skala mikro dan kecil yang memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan kartu ATM tabungan SIKLUS yang didalamnya terdapat data-data calon debitur.

### Kredit BPR RC (Rekening Koran)

Fasilitas kredit kepada BPR yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga *plafond* tertentu dengan menggunakan cek/bilyet giro.



## Produk Tresuri



### Devisa Umum (*Telegraphic Transfer*)

*Telegraphic Transfer* merupakan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk devisa umum (*non tunai*). Bank Jatim melayani transaksi *Telegraphic Transfer* untuk mata uang asing USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR, CNY dan AUD. Jenis instrumen transaksi *Telegraphic Transfer* yang menjadi layanan Bank Jatim di antaranya:

### FX TODAY (*FOREIGN EXCHANGE TODAY*)

Transaksi FX Today yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada tanggal transaksi.

### FX TOM (*FOREIGN EXCHANGE TOMORROW*)

Transaksi FX Tom yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

### FX SPOT (*FOREIGN EXCHANGE SPOT*)

Transaksi FX Spot yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

### FX FORWARD (*FOREIGN EXCHANGE FORWARD*)

Transaksi FX Forward yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu

penyerahan dana dilakukan pada lebih dari 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

### Bank Notes

*Bank Notes* adalah layanan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas. Mata uang asing yang dapat ditransaksikan yaitu:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

### Deposit On Call

*Deposit on Call* adalah simpanan dana nasabah kepada Bank dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

## Produk Trade Finance



### Ekspor

Bank Jatim dapat memberikan pembiayaan atas transaksi ekspor nasabah baik dari sebelum pengiriman barang (*Pre Shipment Financing*) sampai dengan setelah pengiriman barang (*Post Shipment Financing*).

### BANK TO CUSTOMER TRANSACTION EKSPOR

1. *Documentary Collection*
  - a. D/A: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Ekspertir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank Importir/Pembeli melalui akseptasi sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - b. D/P: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Ekspertir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank Importir/Pembeli secara atas unjuk.
2. *Letter of Credit Advising*  
Penerusan penerimaan LC *Master* atau *Amendment* LC kepada penerima LC Ekspor/penjual.
3. Pengambilalihan Wesel Ekspor (Diskonto).

Layanan pembiayaan *post shipment financing* yang diberikan Bank Jatim atas dasar dokumen ekspor yang dipresentasikan dan telah memenuhi ketentuan LC (*Complete and Comply with*).

### BANK TO BANK TRANSACTION EKSPOR

1. *Forfaiting*  
Yaitu layanan transaksi penjualan piutang ekspor antara Bank Jatim dengan Bank Lain.

### Impor

Bank Jatim memberikan solusi atas transaksi impor kepada nasabah agar dapat melakukan pembelian barang dengan lebih aman, karena pembayaran akan dilakukan setelah barang tiba dipelabuhan atau dokumen penagihan atas pembelian barang tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.





### BANK TO CUSTOMER TRANSACTION IMPOR

1. *Letter of Credit Issuing*  
Penerbitan LC *Master* atau *Amendment* LC untuk kepentingan Importir/Pembeli kepada *Advising Bank*/Bank Eksportir.
2. *Shipping Guarantee*  
Layanan impor dalam percepatan proses pengeluaran barang/*cargo release* di pelabuhan sehingga barang yang diimpor dapat segera digunakan, berdasarkan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Jatim. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi Importir yaitu mengurangi atau menekan beban biaya sewa gudang/*demurrage* yang harus ditanggung.

### BANK TO BANK TRANSACTION IMPOR

1. *UPAS Financing*  
Yaitu layanan transaksi pembelian Hutang impor oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

### Transaksi Domestik (SKBDN)

Dalam transaksi perdagangan barang dan jasa domestik tentunya juga membutuhkan kepastian penerimaan pembayaran bahkan ataupun percepatan penerimaan pembayaran. Seluruh solusi ekspor dan impor di atas dapat diterapkan untuk transaksi domestik (dalam negeri).

## Jasa Bisnis



### Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/*online* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

### Inkaso Rupiah

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik di luar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Rupiah.

### Inkaso Valas

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Valas (USD).

### Giralisasi

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditandatangani oleh nasabah.

### BPD Net Online

Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara *Real Time*.

### Jatim Electronic Transfer System (JETS)

Dengan adanya Jatim Elektronik Transfer Sistem (JETS) maka semuanya akan terhubung secara *online*, misalnya transfer antar BPR atau ke bank umum.

### JConnect Invest

JConnect Invest adalah *platform* investasi surat berharga *online* berbasis *mobile* yang dapat diunduh pada Playstore dan Appstore dan terintegrasi dengan mitra distribusi dan Kementerian Keuangan. Aplikasi JConnect Invest terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menyediakan produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan penawaran di pasar perdana. Produk yang bisa dipesan melalui aplikasi Jconnect Invest, antara lain:

1. ORI (Obligasi Ritel Indonesia)  
Salah satu instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana dengan volume minimum yang telah ditentukan.
2. SBR (*Saving Bond* Ritel)  
Salah satu jenis Surat Utang Negara (SUN) atau SBN yang khusus ditawarkan untuk individu atau perseorangan yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.

### Referensi Bank

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

### Kliring Nasional

Transfer dana kredit antar Bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

3. Sukuk Ritel (SR)  
Produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
4. Sukuk Tabungan (ST)  
Produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.

### Western Union

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time online*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.

### Transaksi Remittance

*Remittance* merupakan salah satu jasa pelayanan bank terhadap masyarakat berupa transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik itu penerimaan (*incoming*) maupun pengiriman (*outgoing*). Transaksi masuk (*incoming transfer*) yaitu kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama yang akan diteruskan kepada

pihak nasabah penerima (*beneficiary*) sedangkan *outgoing transfer* (transfer keluar) yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama atau kepada Bank lain. Transaksi *Remittance* memberikan kemudahan dan kelancaran transaksi usaha anda dalam bentuk layanan transfer valas ke luar negeri, Bank Jatim melayani transfer valas dalam mata uang USD, SGD, JPY, HKD, GBP, EUR dan CNY.

## Jasa Kelembagaan



### Layanan Pajak

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah Lain (PDL)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan (PPH)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

### Pembayaran Tagihan

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui Teller Bank Jatim maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jatim dan sudah *online* di seluruh Cabang Bank Jatim. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pembayaran Tagihan Internet
- Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- Pembayaran Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS)
- Pembayaran Tagihan *Multi Finance*
- Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- Pembayaran Tiket Pesawat/Tiket Kereta Api
- Pembayaran Transaksi *E-Commerce*

### Payroll Gaji

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

### Pelayanan Transaksi Perdagangan

#### SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank Jatim dapat melayani kebutuhan, baik dari sisi pemohon maupun penerima SKBDN.

#### LETTER OF CREDIT (L/C)

Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.



## TRANSFER VALAS (REMITANCE)

Bank Jatim menyediakan Jasa transfer Valuta Asing untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. Transfer Valuta Asing merupakan perintah bayar tak bersyarat yang dikirim dari Bank pengirim di dalam atau di luar negeri kepada Bank penerima dalam bentuk Valuta Asing atas permintaan dan untuk kepentingan pengamanan dengan menggunakan sarana yang *authenticated* (SWIFT, *Tested Telex* dan *Tested Facsimile*).

## PENERIMAAN PAJAK EKSPOR/IMPOR (EDI SYSTEM)

EDI System akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*.

## Produk Pembiayaan Syariah



Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan akad *murabahah*.

### Multiguna Syariah

Pemberian pembiayaan di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*. Fitur produk pembiayaan multiguna antara lain:

- Pembiayaan Multiguna - Pegawai
- Pembiayaan Multiguna - Pensiunan
- Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun Pegawai
- Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun THT
- Pembiayaan Multiguna - Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honoror dan Perangkat Desa
- Pembiayaan Multiguna - Pensiun Janda/Duda
- Pembiayaan Multiguna - Pendidikan
- Pembiayaan Multiguna - Tunjangan Profesi Pegawai/Tunjangan Kinerja/Remunerasi
- Pembiayaan Multiguna - Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite BankJatim
- Pembiayaan Multiguna - Pensiunan Pegawai Bank Jatim

### Emas iB Barokah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan) selanjutnya bank akan memberikan surat gadai sebagai jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank.

### Kepemilikan Logam Emas

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu nasabah dalam memiliki Emas Lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan prinsip *Murabahah* (jual beli).

### Linkage Program

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)/Pembiayaan Koperasi (PKOP) adalah Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan untuk pola *channeling* menggunakan akad *murabahah*.

### Umroh iB Maqulla

Produk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan umroh dengan angsuran tetap sampai jangka waktu pembiayaan berakhir dengan akad *ijarah*.

### Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Properti iB Barokah

Fasilitas Pembiayaan modal kerja yang disediakan untuk nasabah yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti berdasarkan prinsip syariah.

### Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah

Fasilitas pembiayaan untuk membeli tanah perumahan sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Pembiayaan Konstruksi Properti berdasarkan prinsip syariah.

## Pembiayaan Umum

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha. Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lainnya.

### KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah, ruko, rukan dan apartemen, baik baru maupun bekas, serta konsumsi beragun *property* dengan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah*.

### KPR Sejahtera

KPR Sejahtera adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan

### Pembiayaan Modal Kerja Pola Keppres iB Barokah

Fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan *plafond* tertentu yang pelunasan pembiayaan bersumber dari pembayaran termin Proyek yang bersangkutan berdasarkan prinsip syariah.

### Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB)

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.

### Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah

Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat/*seller* (nasabah) kepada Bank yang kemudian

menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (Mitra Korporasi/*Buyer*) yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat/*Seller* (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat/*seller* (nasabah) senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

### Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, dimana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai *Lead Manager (Imamus Syarik)* dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.

### Pembiayaan Pegawai dan Personal

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Non Karir, MLE, Calon Pegawai, Anggota Komite,

Pensiunan Pegawai dan Personal *Loan Car Allowance Program (CAP)* yang penggunaannya untuk konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip syariah.

### Bank Garansi

Jasa Penjaminan yang diberikan kepada pihak terjamin (nasabah) yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila nasabah cidera janji berdasarkan akad *kafalah*.

### Pembiayaan Kawasan Industri Halal

Pembiayaan kawasan industri halal merupakan pembiayaan dalam rangka pembelian aset gudang baru atau pabrik baru bagi nasabah perorangan dan/atau UMKM yang berada di Kawasan Industri Halal (KIH).

## Syariah



### Giro iB Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, Giro iB Barokah ditatausahakan oleh Bank Jatim Syariah dalam suatu rekening yang lazim disebut Rekening Koran.

### Tabungan Sempel iB

"Simpanan Pelajar" atau SIMPEL merupakan produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang dipertukarkan bagi siswa dengan usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia. Persyaratan pembukaan

rekening yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, sebagai upaya mengedukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Adapun penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.

### Tabunganku iB

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Adapun penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.



### Tabungan Umroh iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### Tabungan Sipandai iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya khususnya di Jawa Timur.

### Tabungan Santri

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada santri/pengurus di lingkungan pondok pesantren yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### Tabungan Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### Tabungan iB Barokah Sejahtera

Program yang digabungkan dengan produk Tabungan Barokah dengan *benefit* barang sebagai bentuk *reward* dan/atau *souvenir* atas pembukaan rekening Tabungan iB Barokah Sejahtera dengan tetap mendapatkan bagi hasil tabungan di akhir periode.

### Tabungan Haji iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### Tabungan Rencana iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menyimpan dananya dalam rangka mewujudkan segala rencana masa depan dan penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### Tabungan Pensiun iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang Rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun.

### Deposito Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyimpan dengan Bank berdasarkan prinsip *mudharabah*.

### Virtual Account

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.

### Payment Point

Aktivitas kerja sama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun *non* tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pendidikan.

### E-Channel (SMS Banking, JConnect Mobile dan J Connect Internet Banking)

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler atau jaringan internet.

### Wakaf iB Barokah

Layanan wakaf yang diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin berwakaf melalui *project* yang telah disediakan oleh mitra nazhir Bank Jatim Syariah. Layanan tersebut dapat diakses oleh nasabah melalui aplikasi android maupun iOS yang pembayaran wakaf dilakukan melalui *virtual account* yang terhubung ke rekening Giro iB Barokah mitra nazhir Bank Jatim Syariah.

## E-Channel & Jasa Lainnya

### SMS Banking (3366)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

### JConnect Internet Banking

Merupakan salah satu layanan *electronic channel* (*e-channel*) yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui media internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dengan nyaman dan aman karena menggunakan teknologi Token PIN yang dinamis (selalu berganti untuk setiap transaksi).

## JConnect Mobile Banking

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *mobile application* pada *platform* android dan iOS yang menggunakan paket data internet dalam bertransaksi.

## JConnect E-KMG

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit multiguna/konsumtif secara *online* untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan yang *payroll*-nya ada di Bank Jatim. Pengajuan kredit multiguna dilakukan secara *online* melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

## JConnect E-Loan

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit produktif secara *online* untuk masyarakat umum. Pengajuan kredit produktif dilakukan secara *online* melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

## Layanan Laku Pandai (SiPandai Bank Jatim)

Merupakan Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jatim bekerjasama dengan para agen SiPandai untuk melayani nasabah/masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dan lainnya. Agen SiPandai menggunakan aplikasi berbasis android untuk melayani nasabah/masyarakat tersebut.

## Info Bank Jatim (14044)

Merupakan *Call Center* Bank Jatim dengan nomor/*shortcode* 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan *handphone*, bias memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun layanan informasi lainnya.

## Kartu ATM Debit Bank Jatim

Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di *merchant-merchant* yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

## Kartu Bank Jatim Flazz (Co-Branding)

Uang Elektronik *Card Based/Chip Based* multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman. Hasil kerjasama *Co-Branding* Bank Jatim dengan BCA.

## Safe Deposit Box

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta/Surat Berharga dengan tipe ukuran kecil, sedang, dan besar.

## Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan. KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Jatim yang memiliki layanan yang sama dengan nasabah Bank Jatim.

## Virtual Account

Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuka ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening Virtual.

## E-Samsat Jatim

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) wilayah propinsi Jawa Timur melalui *e-Channel* Bank Jatim yaitu: ATM, Teller, PPOB, Agen SiPandai, SAMSAT OPOP, SAMSAT KAMPUS, JConnect Mobile dan JConnect Internet Banking, serta di *channel collecting agent* lainnya seperti *marketplace Tokopedia*, aplikasi *online transportation* GoJEK, serta *retail modern channel* Indomaret.

## Samsat Digital Nasional (SIGNAL)

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) seluruh wilayah Indonesia melalui *e-Channel* Bank Jatim dan bank lainnya yang tergabung dalam SIGNAL yaitu: ATM, Teller, *Mobile Banking* dan *Internet Banking* dengan terlebih dahulu mengakses aplikasi SIGNAL terlebih dahulu yang berbasis android maupun iOS.

## Jatim Code QRIS

Aplikasi JConnect Mobile dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian/pembayaran dengan melakukan *scanning* QRIS yang terpasang di *merchant-merchant* atau toko yang telah terpasang QRIS, baik Jatim Code QRIS maupun QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya. Jatim Code QRIS juga dapat di *scan* oleh aplikasi dari PJSP lainnya juga seperti OVO, Shopee Pay, Dana, Gopay, dan lainnya.

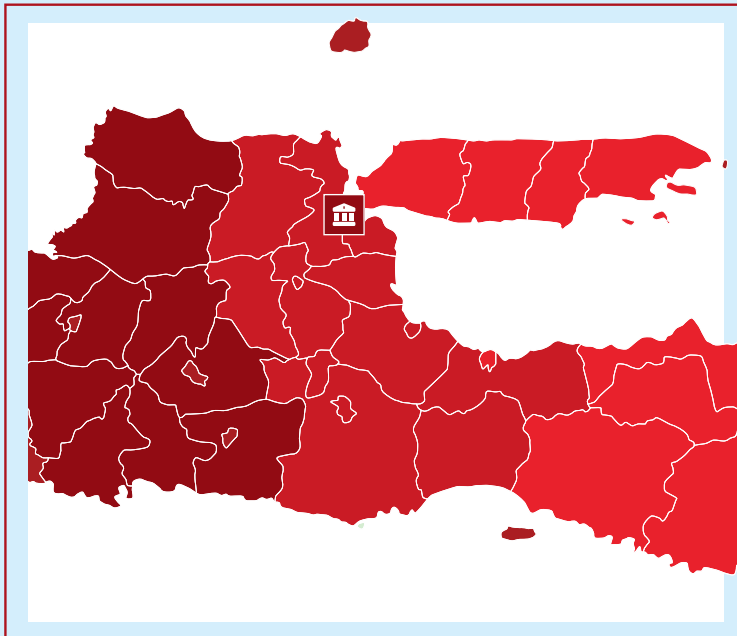
## BJTM Connect

Teknologi terdepan yang memudahkan Nasabah dalam setiap transaksi perbankan dengan lokasi strategis, waktu operasional yang panjang dan lebih fleksibel dengan adanya layanan di hari libur.





## Wilayah Operasional



Per 31 Desember 2022, Bank Jatim memiliki **1** Kantor Pusat dan **1.783** jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Kas Mobil/Counter dan ATM/CRM.

### JAWA TIMUR



Tabel Kantor Bank Jatim per Wilayah Tahun 2022

Wilayah	KC	KCP	KK	PP	KM	KCS	KCPS	KKS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Surabaya	4	24	27	15	2	1	3	1	40	2	1	105	6	10	1
Banyuwangi	1	6	11	5	2	-	1	-	-	-	-	28	-	2	-
Jember	1	6	6	5	-	1	-	-	26	-	1	24	2	1	1
Malang	1	5	9	15	2	1	-	-	28	1	1	31	4	3	1
Madiun	1	5	9	7	3	1	-	-	29	-	1	34	1	2	1
Kediri	1	7	9	8	2	1	-	1	31	1	1	30	4	1	1
Pamekasan	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-
Bojonegoro	1	4	7	9	-	-	-	-	-	-	-	25	-	3	-
Lumajang	1	4	6	3	1	-	-	-	-	-	-	22	-	k-	-
Ngawi	1	8	4	3	2	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-
Jombang	1	3	7	7	1	-	1	-	-	-	-	16	-	2	-
Kraksaan	1	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-
Probolinggo	1	3	3	2	2	-	1	-	-	-	-	20	-	1	-
Blitar	1	5	7	14	1	-	1	1	-	-	-	23	-	1	-
Tulungagung	1	4	5	4	1	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-
Tuban	1	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	24	-	1	-
Mojokerto	1	3	4	5	1	-	1	-	-	-	-	20	-	1	-
Sumenep	1	1	5	4	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-
Sampang	1	1	4	3	-	-	1	-	-	-	-	13	-	1	-
Bangkalan	1	3	4	6	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-



**Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 tahun terakhir**

Jenis Kantor	2022	2021	2020	2019	2018
Kantor Pusat (KP)	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Konvensional (KC)	41	41	41	41	41
Kantor Cabang Syariah (KCS)	7	7	7	7	7
Kantor Cabang Pembantu Konvensional (KCP)	162	182	162	162	160
Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)	10	10	10	10	9
Kantor Kas (KK)	212	211	209	209	207
Kantor Kas Syariah (KKS)	3	2	-	-	-
Kantor Layanan Syariah (KLS)	195	195	195	191	191
Payment Point (PP)	196	248	247	249	203
Payment Point Syariah (PPS)	8	8	9	10	8
Kas mobil (KM)	36	97	92	92	92
Kas Mobil Syariah (KMS)	7	7	6	6	6
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*	815	780	753	742	735
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah	26	25	24	23	22
Cash Recycle Machine (CRM)	58	51	25	-	-
Cash Recycle Machine (CRM) Syariah	7	7	2	-	-
Cash Deposit Machine (CDM)	-	-	-	2	2
<b>Total</b>	<b>1.784</b>	<b>1.852</b>	<b>1.783</b>	<b>1.745</b>	<b>1.684</b>

\* Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Jatim tergabung dengan 81.569 terminal jaringan ATM BERSAMA, 101.313 terminal ATM PRIMA, 695.971 *Electronic Data Capture*

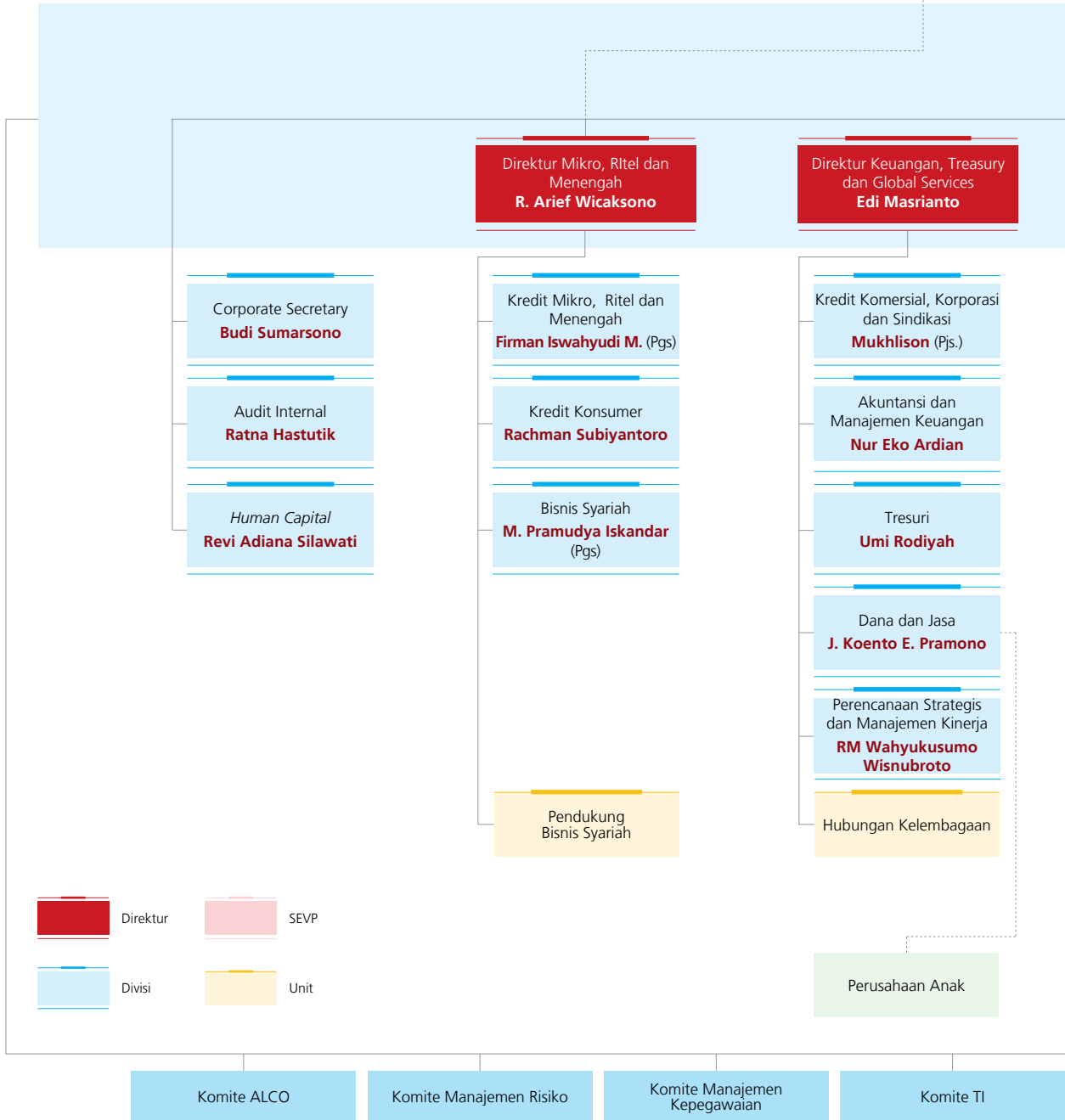
Wilayah	KC	KCP	KK	PP	KM	KCS	KCPS	KKS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Pasuruan	1	7	5	7	1	-	-	-	-	-	-	28	-	1	-
Nganjuk	1	4	5	14	1	-	-	-	-	-	-	19	-	2	-
Trenggalek	1	3	6	3	1	-	-	-	-	-	-	19	-	1	-
Ponorogo	1	4	6	4	1	-	-	-	-	-	-	21	-	2	-
Pacitan	1	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-
Gresik	1	5	6	3	1	1	-	-	24	2	1	22	4	1	1
Sidoarjo	1	8	12	7	3	1	-	-	17	2	1	43	5	1	1
Lamongan	1	5	5	7	1	-	1	-	-	-	-	24	-	1	-
Situbondo	1	2	4	4	2	-	-	-	-	-	-	16	-	2	-
Bondowoso	1	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-
Magetan	1	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	19	-	1	-
Kangean	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-
Jakarta	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-
Batu	1	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-
Bawean	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-
Pare	1	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	13	-	2	-
Kepanjen	1	4	8	6	1	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-
Batam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
<b>Grand Total</b>	<b>41</b>	<b>162</b>	<b>212</b>	<b>196</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>195</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>815</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	



# Struktur Organisasi

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022, berikut adalah struktur organisasi Bank Jatim per 31 Desember 2022.

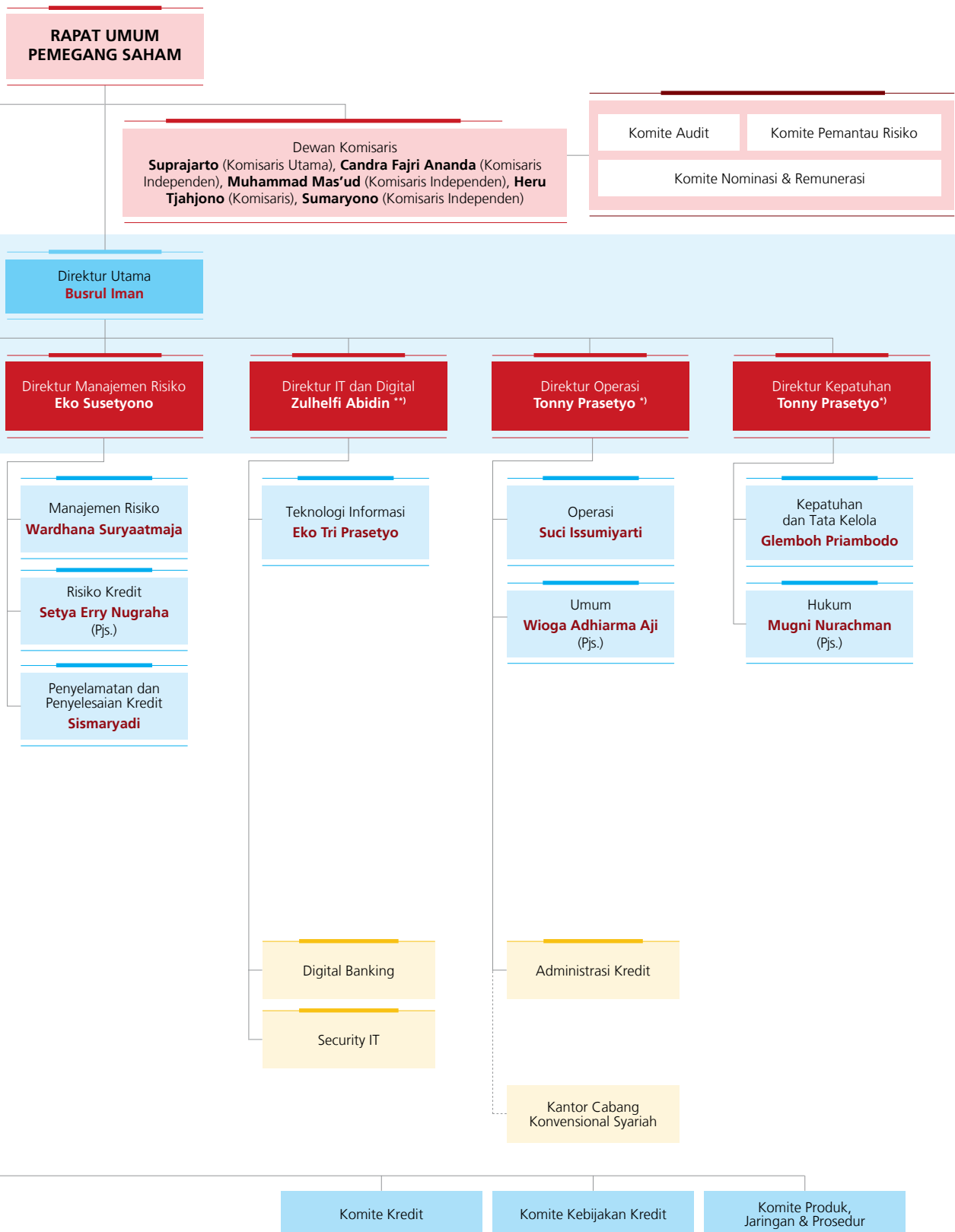
Dewan Pengawas Syariah  
**Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag**  
(Ketua), **Dr. M. Saad IH, MA**  
(**Muhammad Sa'ad Ibrahim**) (Anggota)



Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit: Sumaryono (Ketua), Muhammad Mas'ud (Anggota), Candra Fajri Ananda (Anggota) dan Kusnadi (Anggota).
2. Komite Remunerasi dan Nominasi: Muhammad Mas'ud (Ketua), Suprajarto (Anggota), Candra Fajri Ananda (Anggota), Sumaryono (Anggota), Haru Tjahjono (Anggota), dan Revi Adiana, S (Anggota).
3. Komite Pemantau Risiko: Candra Fajri Ananda (Ketua), Muhammad Mas'ud (Anggota), Sumaryono (Anggota), Sulam Andjar Rochim (Anggota) dan Moch. Arifin (Anggota).

Nama Anggota Komite di Bawah Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.



\*) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

\*\*\*) ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022.



# Profil Direksi

## Busrul Iman

Direktur Utama



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Surabaya pada tahun 1964, usia 58 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Surabaya

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari STIE Indonesia (1986).
- Master bidang Manajemen Strategi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2005).
- Profesi Akuntan dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2007).

### Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2012).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Profesi (2015).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).

### Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Meulaboh, Kantor Wilayah Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1995-1998).
- Kepala Cabang Rantau Prapat, Kantor Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1998-2001).
- Kepala Cabang Tuban Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2001-2004).
- Kepala Cabang Banjarnegara, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2004-2007).
- Kepala Cabang Solo, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2009).
- Kepala Cabang Madiun Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010).
- Kepala Cabang Malang Kawi, Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2013).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Lampung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bidang Pengendalian Risiko Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- Kepala Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018).
- Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Kepala Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019).
- Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2020).
- Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020-sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk pertama kalinya pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 19 Juni 2019. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-191/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

Diangkat sebagai Direktur Utama Pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Juli 2020. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-44/D.03/2020 Tanggal 30 April 2020.

### Periode Jabatan

2019 - sampai dengan penutupan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 (Periode Pertama).  
2020 – sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua).

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

1.946.500 lembar saham

## Tonny Prasetyo

Direktur Operasi \*)



	<b>Kewarganegaraan</b> :	Warga Negara Indonesia
	<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b> :	Lahir di Malang pada tahun 1969, usia 53 tahun per Desember 2022.
	<b>Domisili</b> :	Mojokerto

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Pertanian dari Universitas Darul Ulum, Jombang (1995).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2019).

### Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).
- General Banking Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Workshop IT Risk Management Strategy in Banking oleh Risk Corner Consulting (RCC) (2019).
- Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 4 Foundation oleh PT Duta Kuningan (2019).
- Workshop Human Capital Plan 2020 oleh PT Duta Kuningan (2019).
- Cobit 5 Foundation Withcase Study Exam oleh PT Duta Kuningan (2019).
- General Banking Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2022).
- Refreshment General Banking Level III oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2022).

### Pengalaman Kerja

- Pjs Pemimpin Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012).
- Pemimpin Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012–2013).
- Pemimpin Cabang Blitar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013–2014).
- Pemimpin Cabang Kediri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014).
- Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014–2015).
- Pemimpin Bidang Kredit Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015–2016).
- Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019–2022).
- Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022).
- Pgs Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 - Sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur TI dan Operasi untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-190/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019. Kemudian terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur Operasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 7 Desember 2022.

### Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama).

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

628.500 lembar saham

\*) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.



## Edi Masrianto

Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Lumajang pada tahun 1964, usia 58 tahun per Desember 2022



**Domisili** : Surabaya

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Jember (1989).
- Magister bidang Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada (2004).

### Sertifikasi

- Advance Methods for Managing Interest Rate & Liquidity Risk oleh Euromoney Training (2004).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2013).
- Sertifikasi Assesor Manajemen Risiko oleh BARA (2014).
- Sertifikasi Dasar Pembiayaan oleh SPPI (2015).
- E-Learning RBB oleh BRI Corporate University (2016).
- Sertifikasi Treasury Advance oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2017).
- Studi Banding: Recovery Plan oleh HSBC HK, Bank of Asia HK (2017).
- Leading the Organization in Transforming Industry oleh BRI Corporate University (2017).
- High Impact Leadership oleh Colombia University, Palisade USA (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2020).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh GARP (Global Association of Risk Professionals) Jakarta (2021).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2021).

### Pengalaman Kerja

- Kepala Bagian Pengembangan Produk & Pemasaran Trade Finance - Divisi Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010).
- Kepala Bagian Divisi Treasury (Chief Global Market) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- Wakil Kepala Divisi Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014).
- Kepala Divisi Bisnis Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018).
- Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020).
- Direktur Keuangan dan SDM PT Garam Persero (2020-2021).
- Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko PT Garam Persero (2021-2022).
- Plt. Direktur Utama PT Garam Persero (2021-2022).
- Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022).
- Direktur Keuangan, Treasury & Global Services PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 - Sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2022, Lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-4/D.03/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 7 Desember 2022 terdapat perubahan menjadi Direktur Keuangan, Treasury & Global Services.

### Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

## R. Arief Wicaksono

Direktur Mikro, Ritel dan Menengah



	<b>Kewarganegaraan</b> :	Warga Negara Indonesia
	<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b> :	Lahir di Banyuwangi pada tahun 1970, usia 52 tahun per Desember 2022.
	<b>Domisili</b> :	Surabaya

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1996).
- Magister bidang Manajemen Universitas Dr. Soetomo Surabaya (2020).

### Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2012).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2021).
- Sertifikasi Kompetensi Treasury Dealer (Basic) oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018)
- Sertifikasi Kompetensi Treasury Dealer (Intermediate) oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018)
- Sertifikasi Kompetensi Treasury Dealer (Advance) oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018).

### Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Bondowoso PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015–2017).
- Pemimpin Cabang Banyuwangi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017–2018).
- Pemimpin Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018).
- Pemimpin Divisi Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018–Februari 2021).
- Pemimpin Divisi Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021–2022).
- Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022).
- Direktur Mikro, Ritel & Menengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022–Sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2022, Lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-3/D.03/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur Mikro, Ritel & Menengah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 7 Desember 2022.

### Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

126.300 lembar saham





## Eko Susetyono

Direktur Manajemen Risiko



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Jakarta pada tahun 1965, usia 57 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Surabaya

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknologi Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (1985).
- Corporate Finance and Investment dari Washington University (2000).
- S3 Program Doktor Manajemen dan Bisnis IPB (Institut Pertanian Bogor) (2019 - Sekarang).

### Sertifikasi

- Certified in Enterprise Risk Governance (CERG), ERMA Professional Provisions Program (2016).
- Advanced Banking & Risk Management Program, Nan Yan Technological University, Singapore (2002).
- Financial Risk Management Summit, IQPC, Singapore (2003).
- Disaster Recovery and Business Continuity, FIK International, Kuala Lumpur (2004).
- GARP Annual Risk Management Summit, Hongkong (2005).
- Business Continuity Management, DRI, Singapore (2006).
- Operational Risk Management and Key Risk Indicator - TrueeventUS Bangkok (2012).
- Enterprise Risk Management and Value Creation - Euromoney Paris (2013).
- Assesor, Banking Risk Management Proficiency, BNSP (2014).
- Benchmarking and Workshop: ERM Program - CRM Indonesia London and Cambridge, Inggris (2016).
- Workshop Manajemen Permodalan dan Likuiditas Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, OJK (2017).
- Intl CWM Program: In-house BRI Batch 1 (2019).
- Penyertaan Modal Negara : Antara Kepentingan sosial dan Financial -LPPI (2021).
- Most Trusted Company, Majalah SWA (2021).
- Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan - IRMAPA (2022).
- RiskHub Internasional Webinar: The Rise of Modern Cyber Risk - RiskHub (2022).
- Hybrid Banking Ecosystem: The Key to Future Value Creation in Banking - Infobank Intitude (2022).
- GRC Summit Seminar - CRMS Indonesia (2022).

### Pengalaman Kerja

- AVP Project Office Base II - Credit Risk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2009).
- AVP Operasional Risk Management Dept, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- AVP Market, Liquidity and Enterprise Risks PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2017).
- VP Operational, Market and Liquidity Risk Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2019).
- SEVP Direktorat Management Risks PT Pegadaian (Persero) (2019-2022).
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-Sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 Desember 2022, lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-185/D.03/2022) Tanggal 30 November 2022.

### Periode Jabatan

2022 - sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama)

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

## Zulhelfi Abidin

Direktur IT dan Digital (\*\*)



	<b>Kewarganegaraan</b> :	Warga Negara Indonesia
	<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b> :	Lahir di Bukittinggi pada tahun 1962, usia 60 tahun per Desember 2022.
	<b>Domisili</b> :	Surabaya

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (1987).
- Master bidang Computer Science dari University of Wollongong Australia (1996).

### Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Executive Overview of Islamic Banking oleh LPPi (2011)
- Banking Risk Management Certification 4<sup>th</sup> level oleh LSPP (2012).
- Banking Risk Management Certification 5<sup>th</sup> level oleh LSPP (2015).
- Swift International Banking Operation Seminar oleh Swift International Banking Operation Seminar (2016).
- Executive Leadership Program oleh Kementerian BUMN (2017).
- Executive Education C-Level Data Analytic - Kellogg School Of Management (2019).

### Pengalaman Kerja

- Asisten Dosen dan Peneliti pada laboratorium Computer Assisted Instruction Pusat Ilmu Universitas Indonesia (1987–1990).
- Kepala Bagian Pengembangan IT PT Bank Bukopin (1990–1992).
- System Analyst Bank Pembangunan Indonesia (1992–1997).
- Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi PT Bank Bukopin (1997–2007).
- Komisaris Utama PT Bringin Gigantara (2006 –2012).
- Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 –2014).
- Komisaris BRI Syariah (2012– 2015).
- Senior Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014–2015).
- Direktur IT & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015 –2017).
- Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (2017–2020).
- Komisaris Utama PT Sigma Cipta Caraka (2018 –2019).
- Komisaris Utama PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (2019–2020).
- Senior IT System Advisor PT R17 (2021–2022).
- Komisaris Utama PT Digital Prima Sejahtera (2022).
- Direktur IT & Digital PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022–Sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur IT & Digital untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 Desember 2022, Lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur IT & Digital berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-185/D.03/2022 Tanggal 30 November 2022.

### Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

\*\*\*) ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.



## Erdianto Sigit Cahyono

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

(Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022).



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Pasuruan pada tahun 1962, usia 60 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Surabaya

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Brawijaya, Malang (1985).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993).

### Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).

### Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Pagaram Kantor Wilayah Palembang Bank Rakyat Indonesia (1995-1998).
- Kepala Cabang Muara Enim Kantor Wilayah Palembang Bank Rakyat Indonesia (1998-2001).
- Kepala Cabang Probolinggo Kantor Wilayah Surabaya Bank Rakyat Indonesia (2001-2003).
- Kepala Cabang Jakarta Pasar Minggu Kantor Wilayah Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2006).
- Kepala Cabang Surabaya Kaliasin Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2009).
- Wakil Kepala Divisi Layanan Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010).
- Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2011).
- Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2013).
- Inspektur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin (2013-2014).
- Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Pemimpin Wilayah Kantor Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016).
- Direktur PT Bank BRI Syariah (2016-2017).
- Inspektur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta (2017-2018).
- Kepala Audit Internal Wilayah Jakarta I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2022).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-189/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

### Periode Jabatan

2019 - Sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 Desember 2022.

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

588.100 lembar saham per 30 November 2022

## Rizyana Mirda

Direktur Risiko Bisnis

(Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022)



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Surabaya pada tahun 1969, usia 53 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Surabaya



### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Manajemen Keuangan dari STESIA, Surabaya (1996).
- Sarjana bidang Bisnis Administrasi dari IBMT, Surabaya (1997).
- Master bidang Keuangan dari STIE ABI, Surabaya (2002).
- Doktor bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2021).

### Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).

### Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Pembantu Juanda PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (2002-2004).
- Pemimpin Bidang Operasional Cabang Malang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2004-2006).
- Pemimpin Cabang Batu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2006-2009).
- Pemimpin Cabang Perak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2009-2010).
- Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2010-2013).
- Pemimpin Cabang Gresik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013-2015).
- Pemimpin Cabang Madiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2016).
- Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016-2017).
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017 – 2019).
- Direktur Risiko Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2022).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 15 Juni 2017. Lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-188/D.03/2017 Tanggal 29 September 2017 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019 terdapat perubahan menjadi Direktur Risiko Bisnis nomenklatur jabatan direksi yang semula Direktur Manajemen Risiko Menjadi Direktur Risiko Bisnis.

### Periode Jabatan

2017 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

3.699.333 lembar saham per 28 Februari 2022



## Ferdian Timur Satyagraha

Direktur Keuangan

(Mengundurkan diri sejak 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak 17 Maret 2022)



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Surabaya pada tahun 1982, usia 40 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Surabaya

### Riwayat Pendidikan

- Foundation Degree English Language and Literature/Letters dari Taylor University, Melbourne Australia (2001).
- Sarjana bidang Keuangan dari Deakin University, Australia (2003).
- Master of Business/Commerce Deakin University, Australia (2006).

### Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2016).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2018).

### Pengalaman Kerja

- Pengelola IRU sub divisi IRU dan Komunikasi Eksternal Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012–2013).
- Analyst Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013-2014).
- Pjs Senior Analyst IRU Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014–2015).
- Pemimpin Sub Divisi Investor Relation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pemimpin Cabang Kepanjen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2017).
- Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017-2022).
- Pgs Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019 –2020)
- Pgs Direktur Operasional dan Berubah Nomenklatur Jabatan Direksi menjadi Pgs. Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019 – 2019)
- Pgs Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020–2021).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Keuangan Untuk Pertama kalinya Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 15 Juni 2017. Lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-232/D.03/2017 Tanggal 22 Desember 2017.

Ditunjuk sebagai Pgs Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sejak diterbitkan Surat Keputusan pada tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris No.059/008/DK/KEP/2020.

### Periode Jabatan

2017 - penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

### Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

2.981.833 lembar saham per 28 Februari 2022

## Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali <sup>*)</sup>		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Busrul Iman	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Tonny Prasetyo	Direktur Operasi		√		√		√		√		√		√		√
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services		√		√		√		√		√		√		√
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah		√		√		√		√		√		√		√
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko		√		√		√		√		√		√		√
Zulhelfi Abidin	Direktur IT dan Digital		√		√		√		√		√		√		√
Erdianto Sigit Cahyono****)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko		√		√		√		√		√		√		√
Rizyana Mirda***)	Direktur Risiko Bisnis		√		√		√		√		√		√		√
Ferdian Timur Satyagraha**)	Direktur Keuangan		√		√		√		√		√		√		√

\*) Langsung dan Tidak Langsung

\*\*\*) Mengundurkan diri sejak 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak 17 Maret 2022

\*\*\*\*) Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*\*\*) Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022

## Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

### Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	30 April 2020
Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	29 September 2017
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Juni 2017	22 Desember 2017
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019



## Komposisi Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Pada tanggal 17 Maret 2022, RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 memutuskan perubahan susunan pengurus Bank sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengangkat:
  - a. Direktur Komersial dan Korporasi: Edi Masrianto;
  - b. Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah: R. Arief Wicaksono.
2. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yaitu:
  - a. Direktur Risiko Bisnis: Rizyana Mirza;
  - b. Direktur Keuangan: Ferdian Timur Satyagraha.

Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021**

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Edi Masrianto	Direktur Komersial dan Korporasi	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	17 Maret 2022
R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	17 Maret 2022

## Komposisi Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Pada tanggal 7 Desember 2022, RUPS Luar Biasa Tahun 2022 memutuskan perubahan susunan pengurus Bank sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengangkat:
  - a. Direktur IT dan Digital: Zulhelfi Abidin;
  - b. Direktur Manajemen Risiko: Eko Susetyono.
2. Memberhentikan dengan hormat Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2022 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan perubahan tersebut, maka susunan Direksi disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Direksi pada Struktur Organisasi Bank, yaitu menjadi sebagai berikut:

**Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2022**

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Tonny Prasetyo <sup>*)</sup>	Direktur Operasi	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019	11 Oktober 2019
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	17 Maret 2022
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022	17 Maret 2022
Zulhelfi Abidin <sup>**)</sup>	Direktur IT dan Digital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	7 Desember 2022
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	7 Desember 2022

<sup>\*)</sup> ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

<sup>\*\*)</sup> ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022.



# Profil

## Dewan Komisaris

### Suprajarto

Komisaris Utama



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Yogyakarta pada tahun 1956, usia 66 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Jakarta

#### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1982).
- Magister bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Padjadjaran (2001).
- Doktor bidang Ilmu Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2014).

#### Sertifikasi

Program penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).

#### Pengalaman Kerja

- Branch Manager Bank Rakyat Indonesia (1999-2001).
- Vice Regional Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2001-2005).
- Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2006).
- Regional Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2007).
- Network and Service Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2015).
- Vice President Director PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- President Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2019).
- Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-sekarang).

#### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Utama untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tahun buku 2021 tanggal 17 Maret 2022. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/D.03/2022 tanggal 19 Januari 2022.

#### Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2025 (Periode Pertama).

#### Rangkap Jabatan

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).

#### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



## Heru Tjahjono

Komisaris



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Yogyakarta pada tahun 1961, usia 61 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Malang

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1988).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Merdeka, Malang (1999).
- Doktor bidang Lingkungan dan Pembangunan dari Universitas Brawijaya, Malang (2014).

### Sertifikasi

- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 1 (2019).
- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 2 (2019).

### Pengalaman Kerja

- Pj. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung (1997).
- Pj. Kepala DPUD Kabupaten Tulungagung (1997–2001).
- Pj. Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum PPW Kabupaten Tulungagung (2001–2003).
- Bupati Kabupaten Tulungagung (2003–2013).
- Staf Gubernur Provinsi Jawa Timur (2013–2014).
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2014–2016).
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (2016–2018).
- Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur (2018-sekarang).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-186/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.

### Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun Buku 2022 (Periode Pertama).

### Rangkap Jabatan

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

274.200 lembar saham

## Candra Fajri Ananda

Komisaris Independen



	<b>Kewarganegaraan</b> :	Warga Negara Indonesia
	<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b> :	Lahir di Lumajang pada tahun 1964, usia 58 tahun per Desember 2022.
	<b>Domisili</b> :	Batu, Malang

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1988).
- Master (MSc.) Institute of Rural Development dari University of Gottingen, Jerman (1994).
- Doctor (Ph.D) Institute of Rural Development dari University of Göttingen, Jerman (1998).

### Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko pada tanggal (2018).
- Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).

### Pengalaman Kerja

- Konsultan Pengembangan Sektor Publik di Area Pasca Konflik, Bank Dunia (2003-2004).
- Dewan Penasehat Perencanaan Regional, Provinsi Jawa Timur (2003-2012).
- Anggota TADF (Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kemenkeu), Kementerian Keuangan (2008-2014).
- Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Malang (2010-sekarang).
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2013–2017).
- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-153/D.03/2018 tanggal 18 September 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Diangkat untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada Tanggal 03 Mei 2021 (Periode Kedua).

### Periode Jabatan

2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama).  
2021 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua).

### Rangkap Jabatan

- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).
- Ketua Komite Pemantau Risiko (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023)
- Anggota Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023)
- Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



## Muhammad Mas'ud

Komisaris Independen



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Sidoarjo pada tahun 1964, usia 58 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Malang

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya, Malang (1989).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Muhammadiyah, Malang (1997).
- Doktor bidang Politik Internasional dari Flinders University, Adelaide Australia (2005).

### Sertifikasi

- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 1 (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 2 (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).

### Pengalaman Kerja

- Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2011–2014).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (2013-2016).
- Anggota Tim Ahli Walikota Batu (2015-2016).
- Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (2015–2018).
- Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016-sekarang).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang)
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2022).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-187/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.

### Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama).

### Rangkap Jabatan

- Dosen Kopertis Wil VII, DPK Universitas Islam Malang (2018 - sekarang).
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).
- Ketua Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).
- Anggota Komite Pemantau Risiko (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).
- Anggota Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

## Sumaryono

Komisaris Independen



	<b>Kewarganegaraan</b> :	Warga Negara Indonesia
	<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b> :	Lahir di Blitar pada tahun 1960, usia 62 tahun per Desember 2022.
	<b>Domisili</b> :	Surabaya

### Riwayat Pendidikan

### Sertifikasi

### Pengalaman Kerja

### Dasar Hukum Pengangkatan

### Periode Jabatan

### Rangkap Jabatan

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

- Sarjana bidang Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas Brawijaya (1979).
- Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).
- Pemimpin Cabang BRI Gunungsitoli (2005-2007).
- Pemimpin Cabang BRI Kelapa Gading (2007-2009).
- Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2009-2012).
- Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran (2012-2013).
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 1 (2013-2016).
- Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Pekanbaru (2016).
- Direktur Utama PT BSM Broker Asuransi (2018-2019).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tahun buku 2021 tanggal 17 Maret 2022. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-6/D.03/2022 tanggal 19 Januari 2022.

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2025 (Periode Pertama).

- Ketua Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023)
- Anggota Komite Pemantau Risiko (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023)
- Anggota Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023)

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



## Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Suprajarto	Komisaris Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Heru Tjahjono	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Sumaryono	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	

\* Langsung maupun tidak langsung

## Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

### Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2018	18 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019
Heru Tjahjono	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019

### Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Pada tanggal 17 Maret 2022, RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 menyetujui dan mengangkat anggota Dewan Komisaris, yaitu Suprajarto sebagai Komisaris Utama dan Sumaryono sebagai Komisaris Independen. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Suprajarto	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	17 Maret 2022
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2018	18 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019
Sumaryono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	17 Maret 2022
Heru Tjahjono	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019

# Profil

## Dewan Pengawas Syariah

**Dr (HC) KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag**

**Ketua Dewan Pengawas Syariah**



	<b>Kewarganegaraan</b> :	Warga Negara Indonesia
	<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b> :	Lahir di Sampang pada tahun 1955, usia 67 tahun per Desember 2022.
	<b>Domisili</b> :	Situbondo

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Tafsir Hadits Universitas Ibrahimy (UNIB) (1980).
- Magister bidang Ilmu Hukum Islam UNISMA Malang (2001).
- Doctor Honoris Causa (Dr HC) bidang Fiqh/Ushul Fiqh UIN Walisongo Semarang (2021).

### Sertifikasi

- Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).

### Pengalaman Kerja

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).
- Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016-2021).
- Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018-2022).
- Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019-2020).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).
- Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022 – sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019.

### Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun Buku 2022 (Periode Pertama)

### Rangkap Jabatan

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim





## Dr. M. Saad IH, MA (Muhammad Sa'ad Ibrahim)

Anggota Dewan  
Pengawas Syariah



**Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia



**Tempat dan  
Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Mojokerto pada tahun 1954,  
usia 68 tahun per Desember 2022.



**Domisili** : Malang

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana Jurusan Qadla' IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983).
- Magister Pendidikan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990).
- Doktor Ulumul Qur'an IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997).

### Sertifikasi

Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).

### Pengalaman Kerja

- Ketua Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF) (1994-1999).
- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya (1998-1999).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang).
- Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Ketua Program Pembelajaran Bahasa Arab UIN Malang (2000-2003).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2001-2003), Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).
- Direktur Pasca Sarjana UIN Malang (2005-2007), Wakil Rektor IV UIN Malang (2007-2009).
- Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2015-2020).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022 – sekarang).

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tanggal 27 Juni 2019.

### Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun Buku 2022 (Periode Pertama).

### Rangkap Jabatan

- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang), Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).

### Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

## Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	<b>Ketua Dewan Pengawas Syariah</b>		√		√		√		√		√		√		√
Dr. M. Saad IH, MA (Muhammad Sa'ad Ibrahim)	<b>Anggota Dewan Pengawas Syariah</b>		√		√		√		√		√		√		√

\* Langsung maupun tidak langsung

## Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	<b>Ketua</b>	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	<b>Anggota</b>	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020



## Profil Pemimpin Divisi (Pejabat Eksekutif)



### Budi Sumarsono

Pemimpin  
Corporate Secretary

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Madiun pada tahun 1966. Usia 56 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Keuangan dari Universitas Muhammadiyah (1992).</li> <li>• Magister Ilmu Hukum dari Universitas Merdeka (1999).</li> <li>• Magister Manajemen dari Universitas Widya Jayakarta (2000).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin cabang Probolinggo (2014), Pemimpin Cabang Gresik (2015), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2017), Pjs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi International Banking (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2019), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja (2021).



### J. Koento E. Pramono

Pemimpin  
Divisi Dana dan Jasa

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Surabaya pada tahun 1967. Usia 55 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Hukum UNTAG 45 (2000).</li> <li>• Magister Hukum UNTAG 45 (2020).</li> <li>• Magister Manajemen Univ Narotama (2020).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2015), Pemimpin Cabang Utama (2018), Pemimpin Divisi Hukum (2021).



## Umi Rodiyah

**Pemimpin  
Divisi Tresuri**

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Probolinggo pada tahun 1966. Usia 56 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya (1991).
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Probolinggo (2009), Pemimpin Cabang Perak (2010), Pemimpin Sub Divisi LN Divisi Dana Jasa Dan LN (2015), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama (2016), Pemimpin Bid Operasional Cabang Utama (2017), Corporate Secretary (2018), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2018), Pemimpin Divisi Dana dan Jasa (2020), Pemimpin Corporate Secretary (2021).



## Rachman Subiyantoro

**Pemimpin  
Divisi Kredit Konsumer**

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Sumenep pada tahun 1969. Usia 53 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Wiraraja Sumenep (1997).</li> <li>• Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Blitar (2011), Pemimpin Cabang Sumenep (2013), Pemimpin Divisi Trinisat (2018), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan E-Banking (2019), Pemimpin Divisi Operasi (2020), Pemimpin Dana dan Jasa (2021).



## Nur Eko Ardian

Pemimpin  
Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Surabaya pada tahun 1980. Usia 42 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Administrasi Publik dari Universitas Wijaya Putra (2003).</li> <li>• Magister Administrasi Publik dari Universitas Wijaya Putra (2005).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021.</li> <li>• Perubahan Struktur Organisasi dari Divisi Pengendalian Keuangan menjadi Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan sesuai Keputusan Direksi no. 061/218/DIR/PRS/KEP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 07 Desember 2022.</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analis pada Corporate Secretary (2015), Pemimpin Bid Operasional Cab Tuban (2015), Pemimpin Cab Kepanjen (2015), Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2018), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2019).



## Eko Tri Prasetyo

Pemimpin  
Divisi Teknologi Informasi

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Surabaya pada tahun 1981. Usia 41 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Tinggi Telkom jurusan Sarjana Teknik Informatika (2003).</li> <li>• Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia (2006).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2012. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Audit Intern (2012), Pemimpin Divisi Audit Internal (2018).



## Suci Isumiyarti

Pemimpin  
Divisi Operasi

---

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Semarang pada tahun 1966. Usia 56 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: Sarjana Bahasa Prancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2011), Pemimpin Cabang Kepanjen (2012), Pemimpin Cabang Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cabang Malang (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2020), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2021).



## Glembuh Priambodo

Pemimpin  
Divisi Kepatuhan & Tata Kelola

---

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Malang pada tahun 1970. Usia 52 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Surabaya (1997).</li> <li>• Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (2001).</li> <li>• Magister Manajemen dari STIE ABI Surabaya (2003).</li> <li>• Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (2022).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015), Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015), Pjs. Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2016), Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017), Pemimpin Corporate Secretary (2018), Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama (2021).



## Wardhana Suryaatmaja

Pemimpin  
Divisi Manajemen Risiko

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Surabaya pada tahun 1967. Usia 55 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995).</li> <li>• Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.</li> <li>• Perubahan Struktur Organisasi dari Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menjadi Divisi Manajemen Risiko sesuai Keputusan Direksi no. 061/218/DIR/PRS/KEP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 07 Desember 2022.</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Cabang Syariah Madiun (2015), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2015), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2017), Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2018), Pemimpin Divisi Umum (2019).



## Sismaryadi

Pemimpin  
Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Boyolali pada tahun 1966. Usia 56 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Boedi Iswara Surabaya (2001).</li> <li>• Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Imni Jakarta (2005).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Gresik (2013), Pemimpin Cabang Trenggalek (2015), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2017), Pemimpin Divisi Kredit Konsumer (2018).





## Ratna Hastutik

Pemimpin  
Divisi Audit Internal

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Sidoarjo
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Bojonegoro pada tahun 1965. Usia 57 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Psikologi dari UPB (1990).</li> <li>• Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/319/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2021.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sampang (2010), Pemimpin Cabang Ngawi (2014), Pemimpin Cabang Madiun (2017).



## RM Wahyukusumo Wisnubroto

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis  
dan Manajemen Kinerja

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Sidoarjo
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Yogyakarta pada tahun 1972. Usia 50 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1998).</li> <li>• Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2001).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2013), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014), Pemimpin Sub Divisi Dealingroom Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi International Banking (2017), Pemimpin Divisi Tresuri (2018).



### Revi Adiana Silawati

Pemimpin  
Divisi Human Capital

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Solo pada tahun 1966. Usia 56 tahun per 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi Universitas Wijaya Putra (1996).</li> <li>• Master in Management Program Universitas Airlangga (Beasiswa Bank Jatim) (1998).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak Februari 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang DR. Soetomo (2001), Pemimpin Cabang Perak (2003), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2006), Pemimpin Cabang Kediri (2009), Pemimpin Cabang Malang (2011), Pemimpin Corporate Secretary (2012), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan LN (2013), Pemimpin Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja (2018).



### Wioga Adhiarma Aji

Pjs. Pemimpin  
Divisi Umum

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Surabaya pada tahun 1978 Usia 44 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Studi Ilmu Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2002).</li> <li>• Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Divisi Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Bojonegoro (2012), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2018), Pemimpin Cabang Kediri (2020).



## Setya Erry Nugraha

Pjs. Pemimpin  
Divisi Risiko Kredit

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Malang
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Serang pada tahun 1978. Usia 44 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta (2001).
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/088/DIR/HCP/KEP tanggal 2 Juni 2022.</li> <li>Perubahan Struktur Organisasi dari Divisi Risiko Bisnis menjadi Divisi Risiko Kredit sesuai Keputusan Direksi No. 061/218/DIR/PRS/KEP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 07 Desember 2022.</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2015. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Perak (2015), Pemimpin Cabang HR. Muhammad (2015), Pemimpin Cabang Pare (2017), Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi Sindikasi (2019), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2020).



## Mukhlison

Pjs. Pemimpin  
Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Jombang pada tahun 1974. Usia 48 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: Sarjana Ekonomi dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (2001).
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pjs Pemimpin Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1995. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Pacitan (2012), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jombang (2013), Pemimpin Cabang Probolinggo (2015), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Kredit Menengah Korporasi Dan Sindikasi (2018), Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi (2021).



### Firman Iswahyudi M

Pgs. Pemimpin  
Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Menengah

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Sidoarjo
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Purworejo pada tahun 1968. Usia 54 tahun per 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi dari Universitas Putra Bangsa Surabaya (1996).</li> <li>• Magister Manajemen dari Universitas STIESIA Surabaya (2002).</li> <li>• Doktor Ilmu Ekonomi – Manajemen Strategik dari Universitas STIESIA Surabaya (2018).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel Dan Menengah berdasarkan Surat No. 061/1716/HCP/OHC/PGS tanggal 29 Juni 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi Divisi Kredit Korporasi (2014), Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi Divisi Kredit Korporasi (2015), Pemimpin Sub Divisi Trinisat (2015), Pemimpin Sub Divisi Kredit Properti Divisi Kredit Konsumer (2017), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2019), Pemimpin Cabang Pamekasan (2020), Pemimpin Cabang Gresik (2021).



### Mugni Nurachman

Pjs. Pemimpin  
Divisi Hukum

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Nganjuk
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Jakarta pada tahun 1971 Usia 51 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1995).</li> <li>• Magister Manajemen Program Universitas Wijaya Putra (2006).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pjs Pemimpin Divisi Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Merican Cabang Kediri (2014), Senior Analist Grup Legal Litigasi Divisi Hukum (2016), Pjs. Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Cabang Jombang (2020), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2021).



## M. Pramudya Iskandar

Pgs. Pemimpin  
Divisi Bisnis Syariah

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Sukabumi pada tahun 1968 Usia 54 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung (1992).</li> <li>• Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (1999).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Bisnis Syariah berdasarkan Surat No. 061/757/HCP/OHC/PGS tanggal 17 Maret 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2009. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Syariah Surabaya (2009) dan Pemimpin Sub Divisi Pembiayaan Unit Usaha Syariah (2016).



# Profil

## Pegawai

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2022	2021
Pria	2.436	2.482
Wanita	1.932	1.933
<b>Jumlah</b>	<b>4.368</b>	<b>4.415</b>

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
NO	260	3	263	284	3	287
S, C & T	1.491	1.332	2.823	1.529	1.327	2.856
Pll, Pngl, PK, Au, ARM dan An	445	433	878	435	438	873
PBO, PCP, S.Au & RM	150	128	278	146	131	277
PSD, PC & PB	74	32	106	74	29	103
PD & PCU	16	4	20	15	4	19
<b>Jumlah</b>	<b>2.370</b>	<b>1.896</b>	<b>4.368</b>	<b>2.483</b>	<b>1.932</b>	<b>4.415</b>

## Keterangan:

<b>NO</b>	Non Administrasi	<b>PCP</b>	Pemimpin Cabang Pembantu
<b>S, C, &amp; T</b>	Staf, Calon Pegawai & Tenaga Kontrak Ikatan Kerja	<b>S.Au</b>	Senior Auditor
<b>Pll</b>	Penyelia	<b>RM</b>	Relationship Manager
<b>PK</b>	Pemimpin Kantor Kas	<b>PSD</b>	Pemimpin Sub Divisi
<b>Au</b>	Auditor	<b>PC</b>	Pemimpin Cabang
<b>ARM</b>	Assistant Relation Manager	<b>PB</b>	Pemimpin Bidang
<b>An</b>	Analisis	<b>PD</b>	Pemimpin Divisi
<b>PBO</b>	Pemimpin Bidang Operasional	<b>PCU</b>	Pemimpin Cabang Utama
<b>Pngl</b>	Pengelola		

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
< 30 Tahun	215	300	515	285	400	677
30-54 Tahun	2.119	1.578	3.697	2.044	1.456	3.500
> 54 Tahun	102	54	156	153	77	175
<b>Jumlah</b>	<b>2.436</b>	<b>1.932</b>	<b>4.368</b>	<b>2.482</b>	<b>1.933</b>	<b>4.415</b>

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Non Strata	266	144	410	363	237	600
S1	1.984	1.672	3.656	1.995	1.611	3.606
S2	183	116	299	122	85	207
S3	3	0	3	2	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>2.436</b>	<b>1.932</b>	<b>4.368</b>	<b>2.482</b>	<b>1.933</b>	<b>4.415</b>

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	2.370	1.896	4.266	2.315	1.692	4.007
Pegawai Tidak Tetap	66	36	102	168	240	408
<i>Outsourcing</i>	1.808	374	2.182	1.707	346	2.053
<b>Jumlah</b>	<b>4.244</b>	<b>2.306</b>	<b>6.550</b>	<b>4.190</b>	<b>2.278</b>	<b>6.468</b>





# Komposisi

## Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank Jatim per 1 Januari 2022

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
<b>SAHAM SERI A</b>			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,13%
Kota Surabaya	319.243.457	79.810.864.250	2,13%
Kota Malang	108.635.999	27.158.999.750	0,72%
Kota Madiun	134.064.427	33.516.106.750	0,89%
Kota Mojokerto	72.091.751	18.022.937.750	0,48%v
Kota Kediri	14.208.273	3.552.068.250	0,09%
Kota Probolinggo	17.397.927	4.349.481.750	0,12%
Kota Blitar	16.987.084	4.246.771.000	0,11%
Kota Pasuruan	100.075.767	25.018.941.750	0,67%
Kota Batu	38.236.741	9.559.185.250	0,25%
Kabupaten Gresik	220.213.170	55.053.292.500	1,47%
Kabupaten Malang	253.635.445	63.408.861.250	1,69%
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	19.593.450.250	0,52%
Kabupaten Madiun	32.660.478	8.165.119.500	0,22%
Kabupaten Kediri	144.925.510	36.231.377.500	0,97%
Kabupaten Probolinggo	125.931.454	31.482.863.500	0,84%
Kabupaten Blitar	39.496.395	9.874.098.750	0,26%
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	11.152.625.000	0,30%
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	75.072.158.000	2,00%
Kabupaten Magetan	19.594.792	4.898.698.000	0,13%
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	17.674.493.750	0,47%
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	21.160.133.000	0,56%
Kabupaten Pacitan	53.520.271	13.380.067.750	0,36%
Kabupaten Lamongan	101.318.315	25.329.578.750	0,67%
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	5.888.899.000	0,16%
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	67.509.029.250	1,80%
Kabupaten Tuban	217.418.404	54.354.601.000	1,45%
Kabupaten Jember	111.866.875	27.966.718.750	0,75%
Kabupaten Ngawi	215.763.995	53.940.998.750	1,44%
Kabupaten Jombang	26.792.899	6.698.224.750	0,18%
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	21.801.839.250	0,58%
Kabupaten Lumajang	67.206.045	16.801.511.250	0,45%
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	92.538.962.500	2,47%
Kabupaten Situbondo	76.374.593	19.093.648.250	0,51%

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	19.304.463.500	0,51%
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	10.148.232.000	0,27%
Kabupaten Sumenep	144.228.431	36.057.107.750	0,96%
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	9.198.364.750	0,25%
Kabupaten Sampang	101.175.235	25.293.808.750	0,67%
<b>SAHAM SERI B</b>			
Masyarakat	3.081.350.100	770.337.525.000	20,52%
<b>TOTAL</b>	<b>15.015.498.082</b>	<b>3.753.874.520.500</b>	<b>100%</b>

Untuk komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2022.

## Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 1 Januari 2022

No.	Pemegang Saham	Status	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
1	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	Institution - Foreign	205.711.100	6,68%
2	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	Institution - Foreign	200.000.000	6,49%
3	PT MNC SEKURITAS	Individual Indonesia	130.154.300	4,22%
4	THE NT TST CO S/A CIM INVESTMENT FUND ICAV	Institution - Foreign	93.000.000	3,02%
5	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-INDONESIA FD	Institution - Foreign	70.599.700	2,29%
6	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	Institution - Foreign	63.786.500	2,07%
7	STATE STREET BANK-BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	Institution - Foreign	59.838.000	1,94%
8	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	Individual Indonesia	57.977.100	1,88%
9	PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK	Perseroan Terbatas	48.114.226	1,56%
10	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC-2039925167	Individual Indonesia	44.778.490	1,45%
11	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	Individual Indonesia	41.028.300	1,33%
12	BNYM RE GOLDMAN SACHS TRUST-GS EM MAR EQ INS FD-2039927833	Institution - Foreign	39.513.600	1,28%
13	PT INDO PREMIER SEKURITAS	Individual Indonesia	36.010.000	1,17%
14	STATE STREET BANK-WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	Institution - Foreign	33.822.000	1,10%
15	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP	Institution - Foreign	32.559.100	1,06%
16	SSB ZVY5 S/A ST ST EMG MKT SML CAP AC N-L QIB CTF-2157564053	Institution - Foreign	31.326.100	1,02%
17	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Insurance	30.739.000	1,00%
18	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	Institution - Foreign	29.374.500	0,95%
19	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	Institution - Foreign	28.898.900	0,94%
20	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.-2039925380	Institution - Foreign	26.737.100	0,87%
<b>Total</b>			<b>973.959.416</b>	<b>31,61%</b>



Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 31 Desember 2022

No.	Pemegang Saham	Status	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
1	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	Limited Company	305.061.900	9,90%
2	PT MNC SEKURITAS	Individual Indonesia	134.810.700	4,38%
3	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	Institution - Foreign	130.000.000	4,22%
4	PT TASPEN	Limited Company	109.442.800	3,55%
5	PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK	Limited Company	103.283.026	3,35%
6	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FUNDS, SICAV-INDONESIA FD	Institution - Foreign	73.442.300	2,38%
7	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	Institution - Foreign	63.786.500	2,07%
8	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	Individual Indonesia	57.573.900	1,87%
9	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	Institution - Foreign	49.000.000	1,59%
10	STATE STREET BANK-BERNSTEIN FUND,INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	Institution - Foreign	47.991.500	1,56%
11	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC-2039925167	Institution - Foreign	44.014.890	1,43%
12	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	Individual Indonesia	42.574.100	1,38%
13	BNYM RE GOLDMAN SACHS TRUST-GS EM MAR EQ INS FD-2039927833	Institution - Foreign	39.513.600	1,28%
14	PT INDO PREMIER SEKURITAS	Individual Indonesia	35.881.800	1,16%
15	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	Institution - Foreign	31.858.200	1,03%
16	STATE STREET BANK-ISHARES MSCI INDONESIA ETF	Institution - Foreign	30.746.400	1,00%
17	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	Institution - Foreign	28.898.900	0,94%
18	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.-2039925380	Institution - Foreign	26.737.100	0,87%
19	STATE STREET BANK-CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Institution - Foreign	24.239.300	0,79%
20	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC LIMITED-SIERRA DORADA FUND SP	Institution - Foreign	23.523.900	0,76%
<b>Total</b>			<b>1.402.380.816</b>	<b>45,51%</b>

## Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Bank Jatim per 1 Januari 2022

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%

Untuk komposisi pemegang saham 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2022.

## Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim Per 1 Januari 2022

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
<b>LOKAL</b>			
Perorangan	57.937	1.398.258.018	9,31210%
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887%
Karyawan	1	9.197.213	0,06125%
Koperasi	1	134.500	0,00090%
Yayasan	3	165.000	0,00110%
Dana Pensiun	13	8.513.400	0,05670%
Asuransi	6	42.917.300	0,28582%
Perseroan Terbatas	1	836.000	0,00557%
Lembaga Keuangan	58	118.871.196	0,79043%
Reksadana	17	27.871.875	0,18562%
<b>Sub Total</b>	<b>58.076</b>	<b>13.540.912.484</b>	<b>90,17836%</b>
<b>ASING</b>			
Perorangan	17	1.224.300	0,00815%
Badan Usaha Asing	176	1.473.545.298	9,81350%
<b>Sub Total</b>	<b>193</b>	<b>1.474.769.598</b>	<b>9,82165%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.269</b>	<b>15.015.498.082</b>	<b>100%</b>

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim per 31 Desember 2022

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
<b>LOKAL</b>			
Perorangan	54.693	1.404.961.407	9,35674%
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,47887%
Yayasan	2	1.257.900	0,00838%
Dana Pensiun	13	422.439.100	2,81335%
Asuransi	3	16.139.100	0,10748%
Karyawan*	1	727.500	0,00484%
Perseroan Terbatas	53	186.270.109	1,24052%
Reksadana	6	16.125.996	0,10740%
<b>Sub Total</b>	<b>54.810</b>	<b>13.982.069.094</b>	<b>93,11758%</b>
<b>ASING</b>			
Perorangan	14	1.051.100	0,00700
Badan Usaha Asing	161	1.032.377.888	6,87542
<b>Sub Total</b>	<b>175</b>	<b>1.033.428.988</b>	<b>6,88242</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.985</b>	<b>15.015.498.082</b>	<b>100%</b>

\*Sampai dengan 31 Desember 2022, Karyawan Bank Jatim tidak memiliki saham tidak langsung.



## Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 1 Januari 2022

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
<b>DIREKSI</b>				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	1.556.400	0,0103653%
2.	Rizyana Mirda**)	Direktur Risiko Bisnis	3.699.333	0,0246368%
3.	Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	346.000	0,0023043%
4.	Ferdian Timur S.)	Direktur Keuangan	2.581.833	0,0171945%
5.	Erdianto Sigit Cahyono***)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	305.600	0,0020352%
<b>DEWAN KOMISARIS</b>				
1.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
3.	Heru Tjahjono	Komisaris	141.400	0,0009417%
<b>TOTAL</b>			<b>8.630.566</b>	<b>0,0574778%</b>

\*) Mengundurkan diri sejak 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak 17 Maret 2022

\*\*\*) Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*\*) Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 31 Desember 2022

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
<b>DIREKSI</b>				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	1.946.500	0,0129633%
2.	Tonny Prasetyo*)	Direktur Operasi	628.500	0,0041857%
4.	Edi Masrianto**)	Direktur Keuangan, Treasury Global Services	-	-
5.	R. Arief Wicaksono***)	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	126.300	0,0008411%
6.	Zulhelfi Abidin****)	Direktur IT & Digital	-	-
7.	Eko Susetyono****)	Direktur Manajemen Risiko	-	-
<b>DEWAN KOMISARIS</b>				
1.	Suprajarto**)	Komisaris Utama	-	-
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-
4.	Sumaryono**)	Komisaris Independen	-	-
5.	Heru Tjahjono	Komisaris	274.200	0,0018261%
<b>TOTAL</b>			<b>2.975.500</b>	<b>0,0198162 %</b>

\*) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

\*\*\*) diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022.

\*\*\*\*) diangkat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022 dan ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.

\*\*\*\*\*) diangkat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank tidak langsung.

## Klasifikasi Pemegang Saham

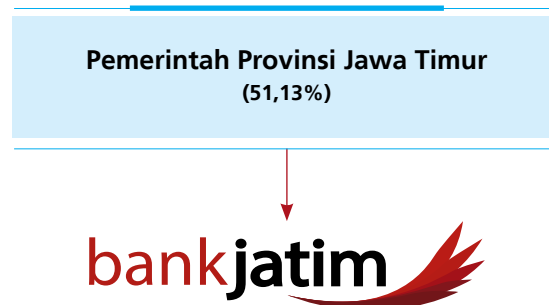
Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Bank Jatim Per 31 Desember 2022

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Institusi Lokal	117	12.577.107.687	83,76084%
Institusi Asing	161	1.032.377.888	6,87542%
Individu Lokal	54.693	1.404.961.407	9,35674%
Individu Asing	14	1.051.100	0,00700%
<b>Total</b>	<b>54.985</b>	<b>15.015.498.082</b>	<b>100%</b>

## Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Kepemilikan saham mayoritas Bank Jatim dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 51,13%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak

terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.



## Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

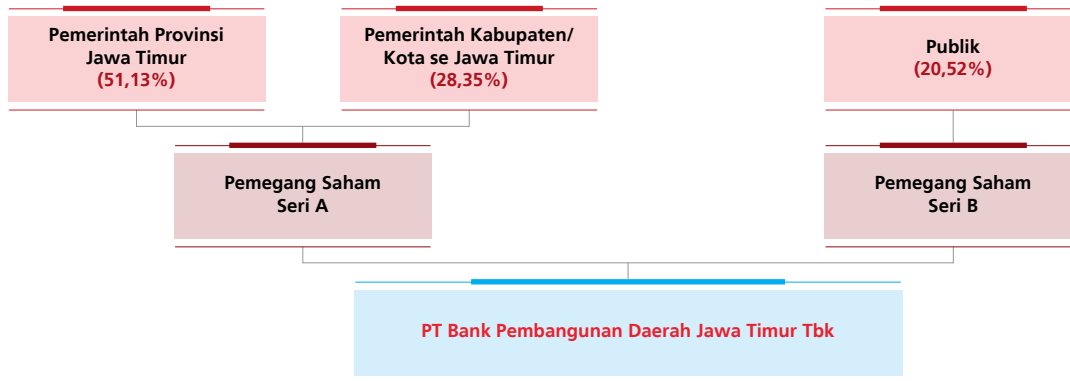
Per 31 Desember 2022, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta Perusahaan Ventura Bersama sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak, asosiasi serta Perusahaan Ventura Bersama, Persentase kepemilikan saham;

Keterangan tentang bidang usaha dan Keterangan status operasi Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta Perusahaan Ventura Bersama (telah beroperasi atau belum beroperasi).



## Struktur

### Grup Perusahaan



Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

## Daftar

### Keanggotaan Asosiasi

Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Jatim bergabung dan aktif di berbagai asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama Bank. Dengan demikian, Bank bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2022, Bank Jatim bergabung di asosiasi/perhimpunan/lembaga nasional berikut:

Nama Asosiasi	Tahun Bergabung	Status Keanggotaan
AEI (Asosiasi Emiten Indonesia)	2012	Anggota
FCSR Social Ministry	2016	Anggota
Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	1993	Anggota
FKDK-BPDSI (Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Se-Indonesia)	2002	Anggota
FK-LJKD (Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah)	2016	Anggota

Keanggotaan Bank Jatim pada organisasi/asosiasi mempunyai arti strategis. Bank menyelaraskan perkembangan dunia perbankan terkini serta turut berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota organisasi/ asosiasi. Bank Jatim tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi.



# Kronologi

## Penerbitan Saham

Bank Jatim mengeluarkan saham yang terdiri dari Saham Seri A yang mana dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Saham Seri B yang ditawarkan kepada publik.

### PENAWARAN UMUM PERDANA

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank Jatim melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dengan menawarkan saham baru sebanyak 2.983.537.000 lembar saham biasa (Seri B) dengan harga penawaran Rp430 per lembar saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan juta ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Bank Jatim telah melaksanakan program MESOP (*Management Employee Stock Option Plans*) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan penambahan saham baru (Seri B) sebesar 13.127.500 lembar saham. Sehingga total Modal Disetor pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA)

dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 September 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

### NAMA BURSA TEMPAT SAHAM PERUSAHAAN DICATATKAN

Seluruh saham Bank Jatim telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel Kronologi Penerbitan Saham Bank Jatim

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar saham)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
							Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
1.	Sebelum IPO	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	2012	Penawaran Umum Perdana	Saham Seri B	250	430	2.983.537.000	14.917.684.982	3.729.421.245.500	1.282.920.910.000
3.	2016	MESOP Windows Exercise II Tahun 2016	Saham Seri B	250	450	27.372.600	14.945.057.582	3.736.264.395.500	12.317.670.000
4.	2017	MESOP Windows Exercise I Tahun 2017	Saham Seri B	250	450	1.241.600	14.946.299.182	3.736.574.795.500	558.720.000



No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar saham)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
							Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
5.	2017	MESOP Windows Exercise II Tahun 2017	Saham Seri B	250	450	1.800.500	14.974.591.382	3.743.647.845.500	810.225.000
					409	26.491.700			10.835.105.300
6.	2018	MESOP Windows Exercise I Tahun 2018	Saham Seri B	250	450	297.700	14.975.852.582	3.743.963.145.500	133.965.000
					409	963.500			394.071.500
7.	2018	MESOP Windows Exercise II Tahun 2018	Saham Seri B	250	409	365.400	14.978.134.982	3.744.533.745.500	149.448.600
					599	1.917.000			1.148.283.000
8.	2019	MESOP Windows Exercise I Tahun 2019	Saham Seri B	250	409	48.500	14.993.772.982	3.748.443.245.500	19.836.500
					599	15.589.500			9.338.110.500
9.	2019	MESOP Windows Exercise II Tahun 2019	Saham Seri B	250	450	1.062.100	15.002.370.582	3.750.592.645.500	477.945.000
					409	741.500			303.273.500
10.	2020	MESOP Windows Exercise I Tahun 2020	Saham Seri B	250	409	3.163.900	15.015.498.082	3.753.874.520.500	1.294.035.100
					599	9.963.600			5.968.196.400

## Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

## Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank Jatim belum menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

## Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

<b>Nama KAP</b>	KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN
<b>Jaringan Asosiasi</b>	PKF International
<b>Alamat KAP</b>	UOB Plaza Lantai 30 & 42, JL. M.H. Thamrin Lot 8 -10, Jakarta Pusat
<b>Nama AP</b>	Ary Daniel Hartanto
<b>Periode Penugasan KAP</b>	Periode ke - 1
<b>Periode Penugasan AP</b>	Periode ke - 1
<b>Jasa Audit</b>	Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Unit Usaha Syariah. Meliputi Audit Umum atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, dan Review atas Laporan.
<b>Jasa Non - Audit</b>	Tidak terdapat jasa non audit
<b>Fee Audit</b>	Rp1.121.100.000 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
<b>Fee Non Audit</b>	-

## Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

<b>PEMERINGKAT EFEK</b>	<b>PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)</b> Panin Tower-Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170 Telp : (021) 727 82380 Fax : (021) 727 82370 Web : www.pefindo.com  Jasa yang diberikan: Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang  Periode Penugasan: Tahun Buku 2022
	<b>KJPP SUSAN WIDJOJO &amp; REKAN</b> Menara Batavia, lantai 28 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 120, Jakarta 10220 Telp : (021) 5795 0155  Jasa yang diberikan: Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang  Periode Penugasan: Tahun Buku 2022



**BIRO ADMINISTRASI  
EFEK**

**PT DATINDO ENTRYCOM**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120  
Telp : (021) 3508077  
Fax : (021) 3508078

Jasa yang diberikan: Mencatat kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek

Periode Penugasan: Tahun Buku 2022

**PENJAMIN  
PELAKSANA EFEK**

**PT BAHANA SEKURITAS**

Graha Niaga, Lantai 19,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telp : (021) 250 5678  
Fax : (021) 250 5087

Jasa yang diberikan: Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten

Periode Penugasan: Tahun Buku 2012

**PT MANDIRI SEKURITAS**

Plaza Mandiri, Lantai 28-29  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Indonesia  
Telp : (021) 526 5678  
Fax : (021) 526 505

Jasa yang diberikan: Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten

Periode Penugasan: Tahun Buku 2012

**KUSTODIAN**

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190  
Telp : (021) 515 2855  
Fax : (021) 5299 1199  
Web : www.ksei.co.id

Jasa yang diberikan: Tempat penitipan kolektif aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi kliennya

Periode Penugasan: Tahun Buku 2022

**NOTARIS**

**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.**

Jl. Kebon rojo No. 2 CC, Surabaya 60175, Indonesia  
Telp: (031) 351 1282, 352 1285, 353 2822  
Fax: (031) 352 2311

Jasa yang diberikan: Membuat Akta Ringkasan Risalah RUPS dan Akta Risalah RUPS.

Periode Penugasan: Tahun Buku 2022

# Penghargaan dan Sertifikasi

## Penghargaan



**27 Januari 2022**

**Nama Penghargaan:**

The Best Public Relation in Company Strategy on Developing The Regional Economy Through Improving Banking Services, Category: Regional Bank

**Acara:**

Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2022

**Penyelenggara:**

Warta Ekonomi



**24 Februari 2022**

**Nama Penghargaan:**

Indonesia Best BUMD Awards 2022 on Developing Comprehensive Banking Services, Kategori: BPD

**Acara:**

Indonesia Best BUMD Awards 2022

**Penyelenggara:**

Warta Ekonomi



**25 Maret 2022**

**Nama Penghargaan:**

PR Indonesia Award Kategori: Aplikasi & Terpopuler di Media Cetak Kategori BUMD & Perusahaan Daerah

**Acara:**

PR Indonesia Awards 2022

**Penyelenggara:**

PR Indonesia



**30 Maret 2022**

**Nama Penghargaan:**

TOP CSR Star 5 & Top Leader on CSR Commitment 2022: Busrul Iman

**Acara:**

TOP CSR Awards

**Penyelenggara:**

Top Business



**31 Maret 2022**

**Nama Penghargaan:**

Media Sosial dan Website Terbaik BUMD  
Acara:

**Acara:**

Bank Jatim Digital Award

**Penyelenggara:**

Beritajatim.com



**31 Maret 2022**

**Nama Penghargaan:**

The Best HR Management For Outstanding Exceptional and Comprehensive Development Program To Elevate The Quality of HR

**Acara:**

Indonesia Human Resources

**Penyelenggara:**

Warta Ekonomi



**31 Maret 2022**

**Nama Penghargaan:**

Best Syariah Unit in Indonesia Syariah Award

**Acara:**

The Economics Syariah Award 2022

**Penyelenggara:**

The Economics



**31 Maret 2022**

**Nama Penghargaan:**

Digital Innovation For Sustainable Business JConnect Mobile

**Acara:**

Digital Innovation Award 2022

**Penyelenggara:**

MNC Group



**07 April 2022**

**Nama Penghargaan:**

1. Kategori: Bank Umum Konvensional (KBMI 2-Modal Inti di atas Rp6T-14T): Corporate Brand: Peringkat II
2. Kategori: Tabungan Bank Umum Konvensional: Tabungan Siklus: Peringkat II
3. Kategori: Mobile Banking Bank Umum Konvensional: Bank Jatim Mobile Banking: Peringkat II
4. Kategori: Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional: Corporate Brand: Peringkat III

**Acara:**

Infobank Digital Brand 2022

**Penyelenggara:**

Infobank



**20 April 2022**

**Nama Penghargaan:**

1. Golden Star Trophy
2. TOP BUMD 2022 #star 5
3. TOP CEO BUMD 2022

**Acara:**

TOP BUMD Award 2022

**Penyelenggara:**

Top Business



**19 Mei 2022**

**Nama Penghargaan:**

BPD KBMI 2 Modal inti Rp6T-14T beraset >Rp 100T

**Acara:**

TOP BUMD Awards 2022

**Penyelenggara:**

Infobank



**27 Mei 2022**

**Nama Penghargaan:**

1. TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah) Mid Cap PLCs) dengan praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik
2. Best Disclosure and Transparency

**Acara:**

The 13<sup>th</sup> IICD Award

**Penyelenggara:**

IICD



**30 Mei 2022**

**Nama Penghargaan:**

Bank Terbaik kategori BPD KBMI 2 (Modal Inti Rp6 T-14 T)

**Acara:**

Penghargaan Bank Terbaik 2022

**Penyelenggara:**

Majalah Investor



**31 Mei 2022**

**Nama Penghargaan:**

Busrul Iman – Best Leader for Business Sustainability Through Development Innovative Banking Product and Service kategori KBMI 2, BPD

**Acara:**

Indonesia Financial Top Leader 2022

**Penyelenggara:**

Warta Ekonomi



**20 Juni 2022**

**Nama Penghargaan:**

Top TEN CSR Awards 2022

**Acara:**

Top TEN CSR Awards 2022

**Penyelenggara:**

Pemkot Mojokerto



**29 Juni 2022**

**Nama Penghargaan:**

“As One Among The Winning Brands in Financial Industry”

**Acara:**

Indonesia Innovation Awards 2022

**Penyelenggara:**

The Iconomics



**30 Juni 2022**

**Nama Penghargaan:**

Peringkat I Media Sosial, Peringkat II Call Center, Peringkat III Mobile Banking, Peringkat III Best Overall Performance

**Acara:**

19<sup>th</sup> Banking Service Excellence Awards 2022

**Penyelenggara:**

Infobank



**30 Juni 2022**

**Nama Penghargaan:**

Peringkat III Best Overall Performance Regional Development Bank

**Acara:**

19<sup>th</sup> Banking Service Excellence Awards 2022

**Penyelenggara:**

Infobank





**29 Juli 2022**

**Nama Penghargaan:**

Corporate Reputation Awards 2022  
Category: Regional Development Bank

**Acara:**

Corporate Reputation Awards

**Penyelenggara:**

The Iconomics



**25 Agustus 2022**

**Nama Penghargaan:**

Indonesia Best Bank 2022 For The  
Appropriate Business Strategy Through  
Banking Protects and Services (Category:  
KBMI 2, BPD)

**Acara:**

Indonesia Best Bank Award

**Penyelenggara:**

Warta Ekonomi



**30 Agustus 2022**

**Nama Penghargaan:**

Busrul Iman as Jawa Timur Marketing  
Champion 2022

**Acara:**

Industry Marketing Champion

**Penyelenggara:**

Markplus.Inc



**06 September 2022**

**Nama Penghargaan:**

TOP GRC Award Stars 4 & The Most  
Committed GRC Leader 2022

**Acara:**

TOP GRC Award

**Penyelenggara:**

To Business



**09 September 2022**

**Nama Penghargaan:**

TOP Bank in KBMI 2 Category 2022

**Acara:**

3<sup>rd</sup> Indonesia TOP Bank Award 2022

**Penyelenggara:**

The Iconomics



**20 Oktober 2022**

**Nama Penghargaan:**

The Best Finance Public Company  
Regional Development Asset Rp>100T

**Acara:**

Indonesia Finance Awards 2022

**Penyelenggara:**

Economic Review



**26 Oktober 2022**

**Nama Penghargaan:**

Synergetic Stakeholder Partnership  
"Excellent Innovation in Public Relation &  
Corporate Communication"

**Acara:**

iNews Awards 2022

**Penyelenggara:**

iNews



**27 Oktober 2022**

**Nama Penghargaan:**

Juara 2 kategori Badan Usaha Skala Besar

**Acara:**

Paritrana Awards 2022

**Penyelenggara:**

BPJS ketenagakerjaan



**27 Oktober 2022**

**Nama Penghargaan:**

Best BPD 2022 with Top Financial  
Performance and Development of Innovative  
Financial Solutions Category BPD KBMI 2

**Acara:**

Best BPD Awards 2022

**Penyelenggara:**

Warta Ekonomi



**09 November 2022**

**Nama Penghargaan:**

The Most Efficient in Banking Operation  
for Big Regional Bank Category

**Acara:**

CNBC Indonesia Awards 2022

**Penyelenggara:**

CNBC Indonesia



**24 November 2022**

**Nama Penghargaan:**

Silver Rank

**Acara:**

Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT)  
2022

**Penyelenggara:**

Nation Center for Sustainability Reporting  
(NSCR)



**01 Desember 2022**

**Nama Penghargaan:**

Best Digital Finance Category Conventional  
Bank for Provision of Real Time  
Transaction System Category KBMI 2 BPD

**Acara:**

Indonesia Best Digital Finance Awards  
2022

**Penyelenggara:**

Warta Ekonomi



**09 Desember 2022**

**Nama Penghargaan:**

Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) 2022

**Acara:**

Awards Kepatuhan LHKPN

**Penyelenggara:**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



**07 Desember 2022**

**Nama Penghargaan:**

Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) terbaik

**Acara:**

Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (Rakornas BWI) Se Indonesia

**Penyelenggara:**

Badan Wakaf Indonesia



**01 Desember 2022**

**Nama Penghargaan:**

ASEAN Asset Class

**Acara:**

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Awards 2021

**Penyelenggara:**

ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)



**15 Desember 2022**

**Nama Penghargaan:**

Peringkat I Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbaik

**Acara:**

Lembaga Keuangan Terbaik Kinerja Penyaluran KUR

**Penyelenggara:**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur



**15 Desember 2022**

**Nama Penghargaan:**

1. Top Digital Implementation 2022 Level Star 5
2. Top Leader on Digital Implementation "Busrul Iman"

**Acara:**

TOP Digital Awards 2022

**Penyelenggara:**

IT Works



**27 Desember 2022**

**Nama Penghargaan:**

Peringkat Pertama Paritrana Awards 2022 kategori Perusahaan Skala Besar Sektor Keuangan, Perdagangan dan Jasa

**Acara:**

Paritrana Awards 2022 Provinsi Jawa Timur

**Penyelenggara:**

BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur

## Sertifikasi



**Jenis Sertifikasi:**

Sertifikat ISO 27001:2013 (Standar Internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

**Validasi:**

21 Oktober 2022 - NA

**Penerima Sertifikasi:**

Bank Jatim

**Dikeluarkan Oleh:**

Lembaga Sertifikasi Bureau Veritas Indonesia

# Informasi yang Tersedia di Website



Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut;

**Profil**

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.

**Kebutuhan Anda**

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi.

**Daftar Online**

Berisi tentang pilihan *e-form* kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.

**Karir**

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir dan Info Rekrutmen Bank Jatim.

**Internet Banking**

Berisi panduan penggunaan *internet banking* Bank Jatim dan Portal *Internet Banking*.

**Mitra UMKM**

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat dan nasabah Bank Jatim.

Informasi Penting Lainnya	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Telah Tersedia
Isi Kode Etik	Telah Tersedia
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	Telah Tersedia
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Telah Tersedia
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Telah Tersedia
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Telah Tersedia



# Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Bank







05



06

# Tinjauan

## Perekonomian



### Analisis Perekonomian Global

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,0% pada 2022 dan menurun menjadi 2,6% pada 2023. Sedangkan dalam *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan pada Oktober 2022, *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global di angka 3,2% pada tahun 2022 dan 2,7% pada tahun 2023. Pada kuartal kedua tahun 2022, PDB global sedikit menurun (lebih -0,1

point persentase secara triwulanan) dengan pertumbuhan negatif di berbagai negara besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat serta penurunan tajam di negara-negara Eropa Timur yang paling terpengaruh secara langsung oleh perang di Ukraina dan sanksi internasional yang ditargetkan untuk memberi tekanan pada Rusia untuk mengakhiri perseteruan.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Negara	2023	2022	2021	2020	2019
Dunia	2,6	3,0	6,0	(3,0)	2,8
Negara Maju	1,1	2,4	5,2	(4,4)	1,7
Amerika Serikat	1,0	1,9	5,7	(3,1)	2,3
Kawasan Eropa	0,7	3,1	5,2	(6,1)	1,5
Jepang	1,5	1,7	1,7	(1,6)	0,0



Negara	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Negara Berkembang</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>6,6</b>	<b>(1,9)</b>	<b>3,7</b>
Tiongkok	1,5	3,2	8,1	2,2	6,0
India	6,0	6,6	8,3	(6,6)	1,8
ASEAN-5	5,0	5,0	3,1	(3,1)	1,9
Amerika Latin	1,3	3,0	6,9	(7,0)	0,1

Sumber: Bank Indonesia, *International Monetary Fund (IMF)*, 2022

Sementara itu, tekanan inflasi masih tinggi, meskipun mulai melandai, dipengaruhi berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Inflasi yang masih tinggi mendorong kebijakan moneter global tetap ketat. The Fed diperkirakan akan menaikkan *Fed Funds Rate* hingga awal 2023 dengan siklus pengetatan kebijakan moneter yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah. Perkembangan ini mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian berdampak pada belum kuatnya aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pada saat yang sama, beberapa ekonomi utama tidak mengalami kontraksi pertumbuhan namun kawasan eropa secara mengejutkan naik pada kuartal kedua, dipimpin oleh pertumbuhan ekonomi Eropa selatan yang bergantung pada sektor pariwisata. Perlambatan yang terjadi di paruh pertama tahun 2022 disebabkan oleh penghapusan cepat akomodasi moneter karena banyak bank sentral yang berusaha menahan inflasi secara terus-menerus. Suku bunga yang lebih tinggi dan kenaikan terkait dalam biaya pinjaman, termasuk tingkat hipotek, memiliki efek yang diinginkan dalam menghilangkan panas dari permintaan

domestik, dengan pasar perumahan menunjukkan tanda-tanda paling awal dan paling jelas dari perlambatan ekonomi seperti AS. yang dapat dibelanjakan. Pada Laporan Stabilitas Keuangan Global Oktober 2022 tercermin jelas dari apresiasi yang kuat terhadap dolar AS. Hal ini juga memperlebar selisih imbal hasil antara imbal hasil obligasi pemerintah berdenominasi dolar AS atau euro dan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau Jerman di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang terlilit utang. Di Afrika sub-Sahara lebih dari dua pertiga obligasi pemerintah memiliki *spread* lebih dari 700 basis poin pada Agustus 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di Eropa Timur dan Tengah, akibat perang di Ukraina mendorong perubahan selera risiko global. Selain kebijakan moneter, epidemi Covid-19 China yang masih belum 100% usai serta invasi Rusia ke Ukraina turut melemahkan aktivitas ekonomi. China memberlakukan pembatasan yang signifikan di dalam negeri dan mengikat rantai pasokan global yang sudah tegang. Perang di Ukraina dan pengetatan pasokan gas ke Eropa menambah tekanan yang sudah ada di pasar komoditas global, mendorong harga gas alam lebih tinggi lagi.

Sumber: Bank Indonesia, *International Monetary Fund (IMF)*, 2022

## Analisis Perekonomian Nasional

Di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tangguh dan memiliki prospek yang baik. Ekonomi Indonesia Triwulan III-2022 terhadap Triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72% (*year on year/ yoy*) sedikit di atas proyeksi Pemerintah sebesar 5,7%. Hal tersebut mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat antara 4,5% hingga 5,3% pada tahun 2023 dan selanjutnya meningkat menjadi 4,7% hingga 5,5% pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan konsumsi swasta, investasi, dan ekspor yang positif di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III secara yoy terjadi pada sebagian besar lapangan usaha kecuali Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang berkontraksi sebesar 1,74%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,81%; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,83%; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,42%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 4,83%.

Sementara dari sisi inflasi, BPS menyebutkan bahwa Pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 5,51% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu yang terbesar dari kelompok transportasi sebesar 15,26%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91%, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,83%, dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,86%. Pada sisi ekspor impor, Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–November 2022 mencapai USD268,18 miliar atau naik 28,16% dibanding periode yang sama tahun 2021. Ekspor non migas November 2022 terbesar adalah ke

Tiongkok yaitu USD6,28 miliar, disusul Amerika Serikat USD2,10 miliar dan Jepang USD1,90 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 44,73%. Sedangkan nilai impor Januari–November 2022 mengalami peningkatan USD42.746,0 juta (24,45%). Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–November 2022 adalah Tiongkok USD61,39 miliar (34,03%), Jepang USD15,58 miliar (8,64%), dan Thailand USD10,09 miliar (5,60%). Selain itu Bank Indonesia juga menginformasikan bahwa Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah (30 Desember 2022) Rupiah ditutup pada level (*bid*) Rp15.655 per dolar AS. Selama tahun 2022 Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS fluktuatif, terkadang menguat terkadang melemah. Pada awal 2022, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS berada di Rp14.381. Memasuki semester pertama Juli, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian melemah mencapai Rp14.958 atau hampir Rp15.000. Penguatan nilai tukar dolar AS ini dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya ancaman resesi hingga kenaikan suku bunga acuan AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap mengalami pelemahan. Per Oktober, nilai tukar Rupiah menyentuh Rp15.616 dan pada November menembus Rp15.742 hingga saat desember ditutup dengan Rp15.655.

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, 2022

## Analisis Industri Perbankan

Kenaikan suku bunga perbankan, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit, lebih terbatas. Berdasarkan laporan BI, suku bunga deposito 1 (satu) bulan pada November 2022 tercatat 3,72% atau meningkat 83 bps dibandingkan dengan level Juli 2022, sementara suku bunga kredit November 2022 tercatat 9,11% atau meningkat 17 bps dibandingkan dengan level Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas tersebut dipengaruhi likuiditas yang masih longgar. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif yang dapat mendukung pemulihan ekonomi. Dari sisi Intermediasi Perbankan terlihat *trend* membaik. Pertumbuhan kredit pada November 2022 tercatat sebesar 11,16% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan positif di seluruh jenis kredit dan mayoritas sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 23,5% (yoy). Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM pada November 2022 tercatat cukup tinggi. Likuiditas perbankan pada November 2022 tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,80% (yoy). Hasil simulasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan masih terjaga. Hal ini dapat dilihat dari Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio /CAR*) Oktober 2022

tetap tinggi sebesar 25,08%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan /NPL*) pada Oktober 2022 yang tercatat 3,70% (bruto) dan 1,01% (neto).

Sementara itu Bank Indonesia terus mendorong peningkatan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya *digital banking*. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada November 2022 tumbuh 12,84% (yoy) mencapai Rp35,3 triliun sedangkan nilai transaksi *digital banking* meningkat 13,88% (yoy) menjadi Rp4.561,2 triliun sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Selain itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga meningkat 16,85% (yoy) menjadi Rp664,9 triliun. Sementara itu, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada November 2022 meningkat 7,77% (yoy) mencapai Rp935,2 triliun.

## Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan

Sebagai perbandingan kinerja Bank Jatim terhadap Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) dan industri Perbankan, berikut ini merupakan rincian kinerja pertumbuhan Bank dan perbandingan rasio Bank dengan rata-rata BPD SI dan industri Perbankan.

**Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Jatim Dibanding Rata-Rata KBMI dan Industri Perbankan**

(dalam miliar Rupiah)

Kinerja	Bank Jatim			Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI)			Industri Perbankan		
	November 2022	November 2021	Pertumbuhan (yoy)	November 2022	November 2021	Pertumbuhan (yoy)	November 2022	November 2021	Pertumbuhan (yoy)
Aset	107.235	102.961	4,15%	944.056	867.904	8,77%	10.874.853	9.913.669	9,70%
Kredit	46.497	42.871	8,46%	557.970	511.758	9,03%	6.347.472	5.705.128	11,26%
Dana Pihak Ketiga (DPK)	89.553	88.449	1,25%	750.471	701.153	7,03%	7.974.132	7.323.356	8,89%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2022; Data Internal Bank Jatim

Secara umum, komponen kinerja utama Bank Jatim periode November (% yoy) mengalami beberapa pembenahan khususnya pada komponen deposito namun juga diimbangi dengan kenaikan komponen tabungan sehingga dana pihak ketiga dan aset tetap tumbuh masing-masing sebesar 4,15% dan 1,25%.

Pada komponen kredit tumbuh positif sebesar 8,46% walaupun tidak lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan sebesar 11,26% yang disebabkan akselerasi penyaluran kredit masih tertahan dipengaruhi oleh kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap *trend* konsumsi masyarakat.

**Tabel Perbandingan Rasio Bank Dibanding Rata-Rata Industri**

(dalam %)

Rasio	November 2022			November 2021		
	Bank Jatim	Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI)	Industri Perbankan	Bank Jatim	Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI)	Industri Perbankan
Net Interest Margin (NIM)	5,22	5,77	4,79	5,08	5,71	4,62
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,60	2,34	2,65	4,52	2,78	3,19
Return on Assets (RoA)	2,00	2,13	2,49	2,09	2,03	1,93
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,99	23,40	25,55	23,56	22,81	25,59
Loan to Deposit Ratio (LDR)	51,92	74,46	79,73	48,47	73,20	78,26
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	74,30	75,91	77,54	72,60	79,05	82,94

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2022; Data Internal Bank Jatim

Rasio kinerja Bank Jatim periode November ada komponen yang tergolong lebih baik dibandingkan rasio kinerja industri perbankan maupun kelompok BPD SI, yaitu pada kinerja BOPO sebesar 74,30% yang menunjukkan bahwa aktivitas operasional Bank Jatim tergolong lebih efisien dibandingkan industri perbankan maupun BPD SI. Sedangkan pada rasio yang lainnya yaitu NIM sebesar 5,22% lebih baik dibandingkan industri perbankan yang sebesar 5,77%. Rasio BOPO dan NIM Bank

Jatim periode november 2022 masing-masing mencapai 74,30% dan 5,22%. Dari sisi NPL *gross*, dibandingkan dengan kelompok industri perbankan maupun BPD SI, NPL *gross* Bank Jatim periode november merupakan yang tertinggi mencapai 3,60%. Sementara itu, sejalan dengan rasio NPL dan LDR Bank Jatim juga merupakan yang terendah di antara BPD SI dan Industri Perbankan yaitu di angka 51,92%.

# Tinjauan

## Operasional

### Strategi Bank

#### Fokus Strategi Bisnis Tahun 2022

Uraian fokus strategi bisnis Bank Jatim tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Peringkat 2 (Pencapaian Kredit) di tahun 2022.
2. Memperkecil *gap* dengan aset Bank bjb.
3. Tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan aset Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI). Aksi Korporasi penyertaan modal kepada lembaga keuangan sebesar ±Rp56 miliar dan mendirikan perusahaan efek daerah ±Rp5 miliar
4. Memperkecil *gap* dengan penyaluran kredit Bank Jateng.
5. Memperkecil *gap* dengan penghimpunan DPK Bank bjb.
6. Percepatan proses perkreditan serta kerjasama dengan Pemerintah pusat maupun daerah melalui Sinergitas dengan Nawa Bhakti Satya.
7. Meningkatkan pertumbuhan DPK khususnya pada giro dan tabungan.
8. Menjaga Rasio *Current Account Saving Account* (CASA) di  $\geq 61,60\%$ , Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)  $\pm 37,25\%$
9. Optimalisasi ekspansi kredit.
10. Optimalisasi peran Tresuri.
11. Peningkatan perolehan *fee based income*.

#### Fokus Strategi Pendukung Bisnis Tahun 2022

Uraian fokus strategi pendukung bisnis Bank Jatim tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja divisi agar lebih efektif dan efisien.
2. Perbaikan *Service Level Agreement* (SLA).
3. Evaluasi implementasi Struktur Organisasi baru.
4. Peningkatan kualitas SDM melalui aktivitas pelatihan.
5. Perbaikan remunerasi.
6. Evaluasi dan implementasi *reward and punishment*.
7. Memperbaiki sistem *recruitment* pegawai baru.
8. Penguatan budaya kerja perusahaan melalui *training change agent*.
9. Menetapkan budaya kerja dalam KPI di tahun 2022.
10. *Roadmap* Perbaikan GCG agar berada di Peringkat 2 di tahun 2022.
11. Menjaga rata-rata peringkat profil risiko agar berada pada skor 2.
12. Perbaikan kualitas standar layanan menjadi peringkat ke 2 di antara BPD se Indonesia di tahun 2022.

#### Strategi Jangka Pendek

Uraian strategi jangka pendek Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Standar layanan mencapai posisi ke-2 (dua) *Best Overall Performance Service Excellent* dari penilaian *Marketing Research Indonesia* (MRI) untuk Kategori Bank Pembangunan Daerah.
2. Sistem dengan *enhancement digital banking, modernized core banking system* dan *infrastructure* serta *enhancement IT security* menuju *Digital Banking 4.0* (layanan *Omni Channel*).
3. Penguatan struktur serta fungsi tresuri sebagai pengelola likuiditas.
4. Implementasi dan penggunaan produk Bank Jatim yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan keuangan non tunai dan aplikasi informasi keuangan daerah dalam bentuk e-KD tercapai 80%.
5. Memperbaiki kualitas aset, kredit, dana pihak ketiga, laba dengan *balancing* yang lebih baik.

#### Strategi Jangka Menengah

Uraian strategi jangka menengah Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Memperkecil *gap* kredit dengan Bank bjb dan Bank Jateng.
2. Berkontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Timur.
3. Perbaikan *business process*.
4. Manajemen produk yang baik.
5. Tumbuh di atas rata-rata industri perbankan nasional.
6. Strategi pertumbuhan bisnis organik yang seimbang dan berkelanjutan, serta pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan.
7. Optimalisasi peran Tresuri.
8. Peningkatan *fee based income*.

#### Strategi Jangka Panjang

Uraian strategi jangka panjang Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Obligasi berupa Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).
2. Pertumbuhan bisnis organik yang seimbang dan berkelanjutan.
3. Pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan.

## Aspek Pemasaran

### Strategi Pemasaran Tahun 2022

Sejalan dengan pengembangan bisnis, Bank Jatim senantiasa meningkatkan strategi pemasarannya dengan melakukan promo, kerjasama maupun kolaborasi dengan pihak lain serta melakukan pengembangan dari segi produk maupun pelayanan dengan berusaha mengakomodir segala kebutuhan nasabah.

Bank Jatim melakukan kerjasama pada pelayanan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam hal penyaluran bantuan sosial, penyaluran dana BOS, penerimaan Pajak dan Retribusi daerah melalui *modern channel* (Indomaret/alfamart) dan *Marketplace* (Tokopedia, Shopee, OVO) dan lain-lain serta bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

### Pangsa Pasar

Bank Jatim sebagai Bank Konvensional, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) dan industri perbankan di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara

lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	November 2022	November 2021	Kenaikan/Penurunan
Jumlah Aset	BPD SI	944.056	867.904	76.152
	Bank Jatim	107.235	102.961	4.274
	<b>Pangsa Pasar (%)</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,86%</b>	<b>(0,50%)</b>
Jumlah Dana Pihak Ketiga	BPD SI	750.471	701.153	49.318
	Bank Jatim	89.553	88.449	1.104
	<b>Pangsa Pasar (%)</b>	<b>11,93%</b>	<b>12,61%</b>	<b>(0,68%)</b>
Jumlah Kredit Yang Diberikan	BPD SI	557.970	511.758	46.212
	Bank Jatim	46.497	42.871	3.626
	<b>Pangsa Pasar (%)</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,38%</b>	<b>(0,05%)</b>

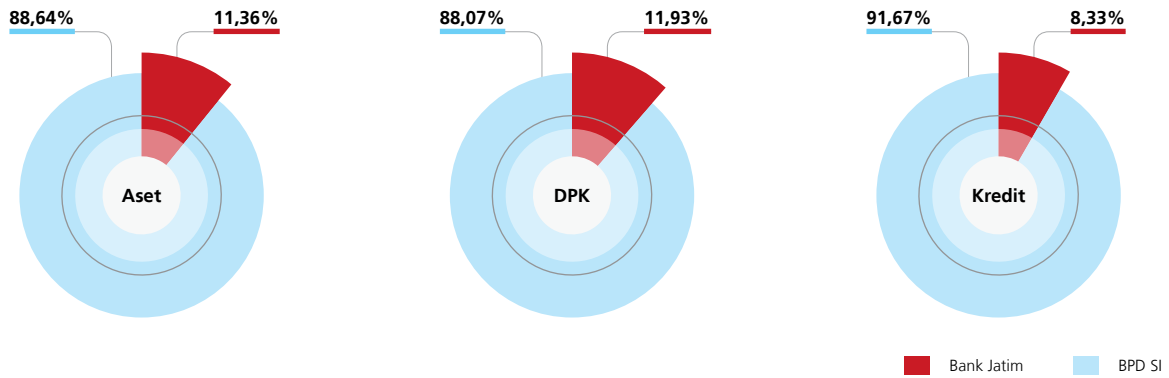
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2022; Data Internal Bank Jatim

Pangsa pasar Bank Jatim dibandingkan dengan BPD SI baik dari segi aset, total DPK dan kredit yang diberikan secara keseluruhan sedikit mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,50%, 0,68% dan 0,05%. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya penurunan tersebut dikarenakan adanya kebijakan perubahan struktur DPK khususnya dana mahal yaitu deposito. Penurunan deposito tersebut mengakibatkan kenaikan DPK kurang signifikan dan masih di bawah kenaikan BPD SI. Sedangkan penurunan

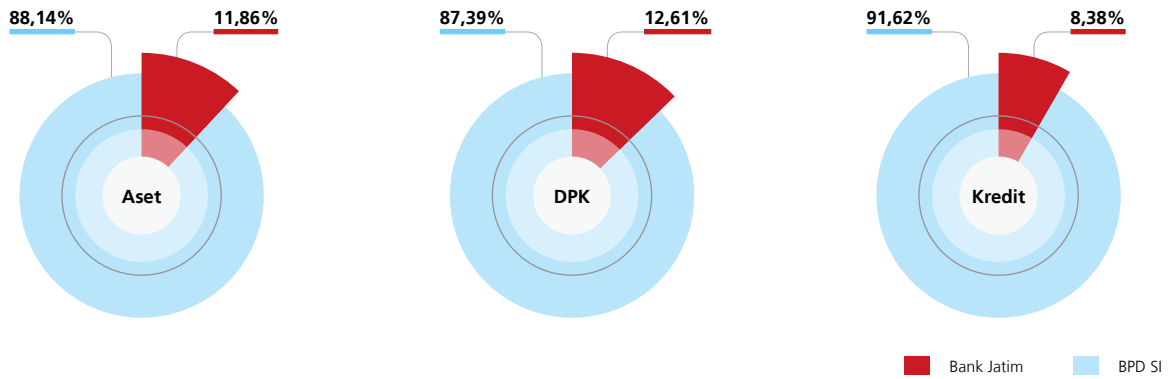
pangsa pasar dari kredit yang diberikan akibat akselerasi penyaluran kredit masih tertahan dipengaruhi oleh kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap *trend* konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelum pandemi. Walaupun semua komponen naik tetapi kenaikannya tidak signifikan dan masih jauh di bawah kenaikan BPD SI.



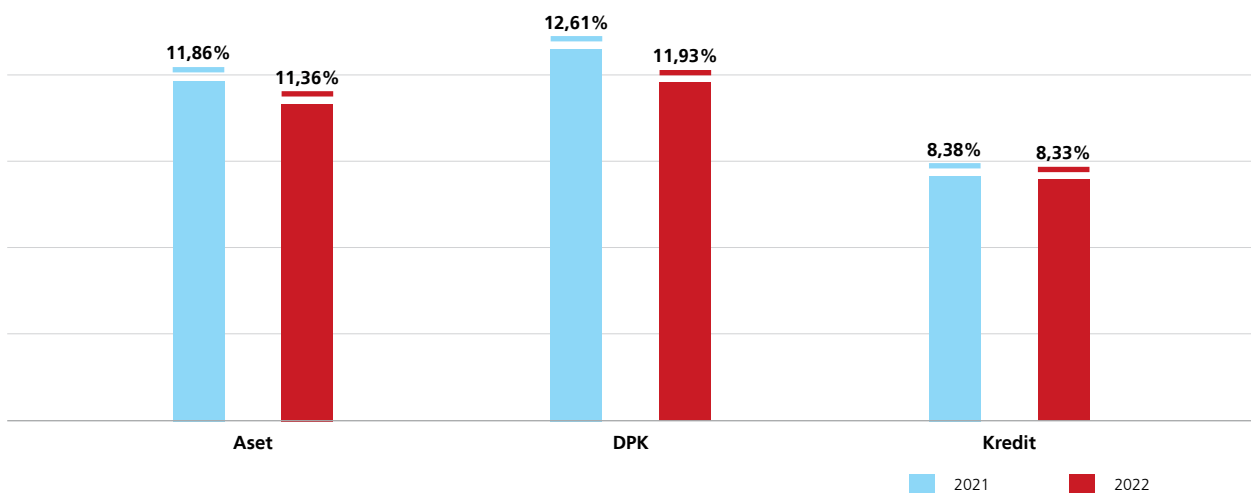
### Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI November Tahun 2022



### Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI November Tahun 2021



### Grafik Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI November Tahun 2021-2022



**Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia**

(dalam miliar Rupiah)

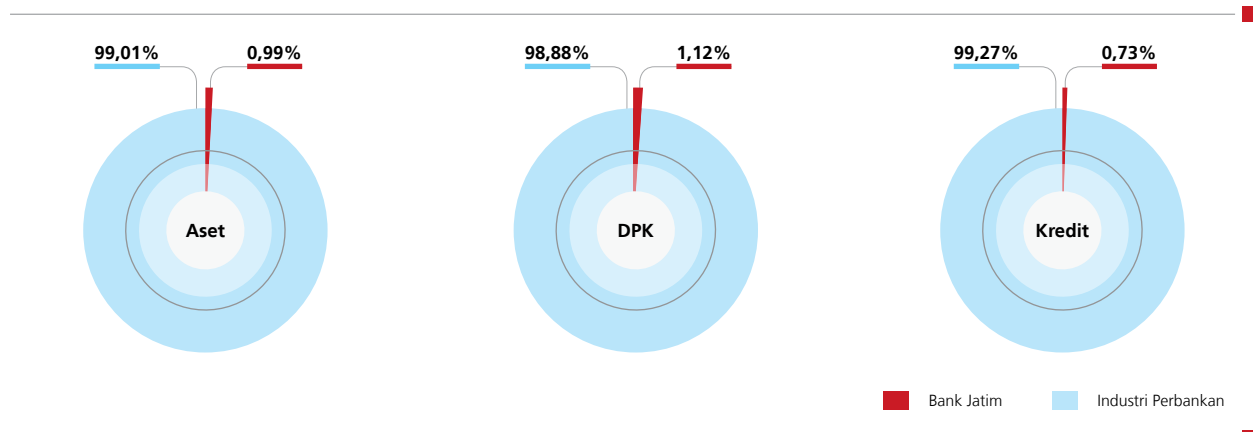
Uraian	Keterangan	November 2022	November 2021	Kenaikan/Penurunan
Jumlah Aset	Industri Perbankan	<b>10.874.853</b>	9.913.669	961.184
	Bank Jatim	<b>107.235</b>	102.961	4.274
	<b>Pangsa Pasar (%)</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,04%</b>	<b>(0,05%)</b>
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	<b>7.974.1321</b>	7.323.356	72.417.965
	Bank Jatim	<b>89.553</b>	88.449	1.104
	<b>Pangsa Pasar (%)</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,21%</b>	<b>(0,09%)</b>
Jumlah Kredit Yang Diberikan	Industri Perbankan	<b>6.347.472</b>	5.705.128	642.344
	Bank Jatim	<b>46.497</b>	42.871	3.626
	<b>Pangsa Pasar (%)</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,75%</b>	<b>(0,02%)</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan November 2022; Data Internal Bank Jatim

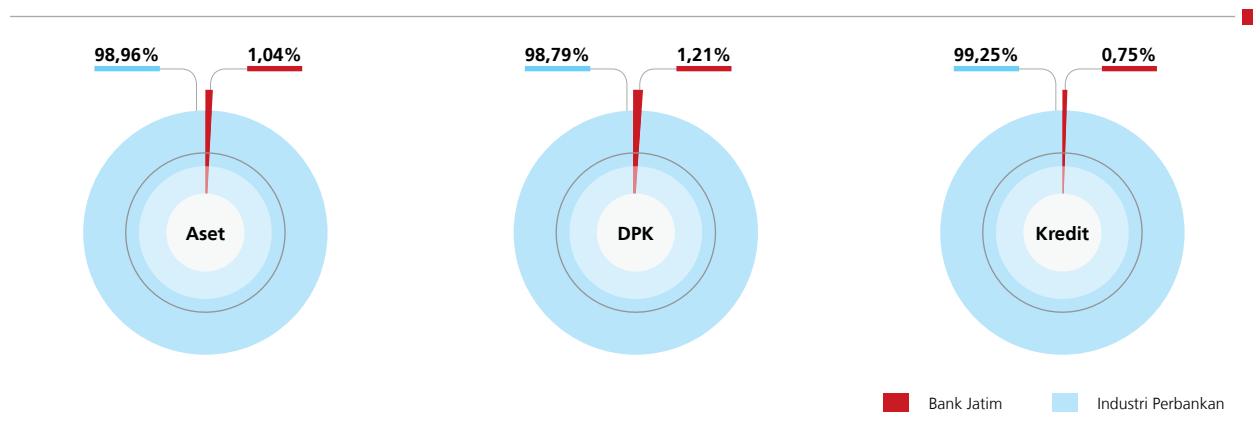
Selaras dengan pangsa pasar BPD SI, pangsa pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia baik dari segi aset, total DPK dan kredit yang diberikan semuanya mengalami penurunan masing-masing 0,05%, 0,09% dan 0,02%. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya walaupun terjadi kenaikan pada semua komponen tetapi kenaikan tersebut kurang signifikan

dan masih di bawah kenaikan industri perbankan. Sedangkan penurunan pangsa pasar dari kredit yang diberikan akibat akselerasi penyaluran kredit masih tertahan dipengaruhi oleh kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap *trend* konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelum pandemi.

**Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan November Tahun 2022**



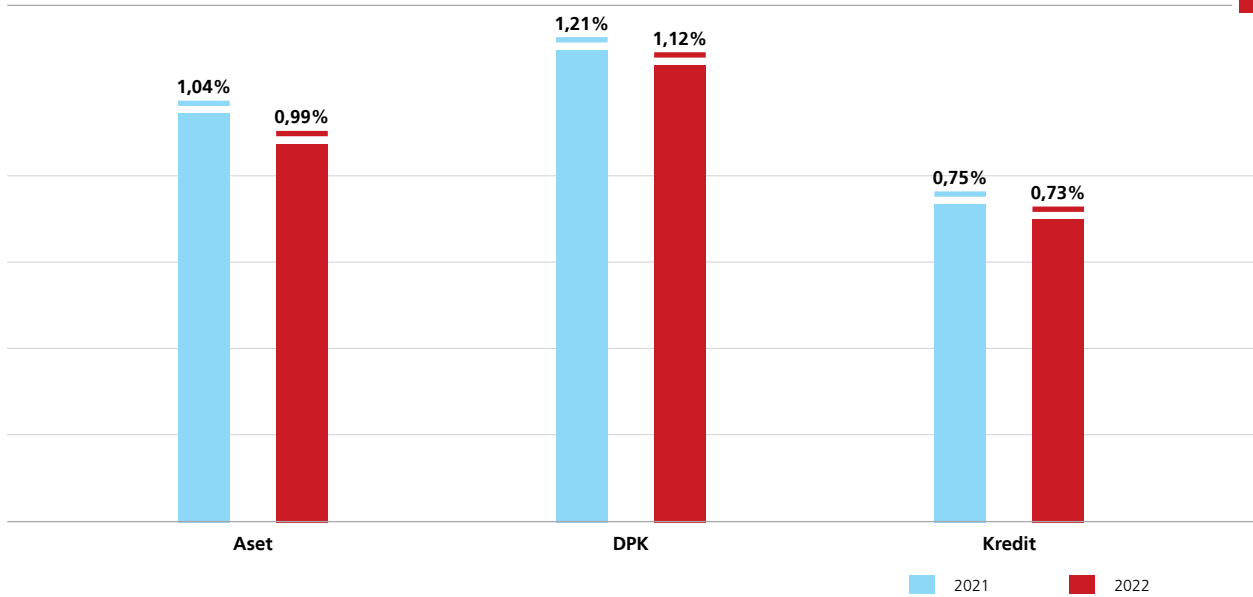
**Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan November Tahun 2021**



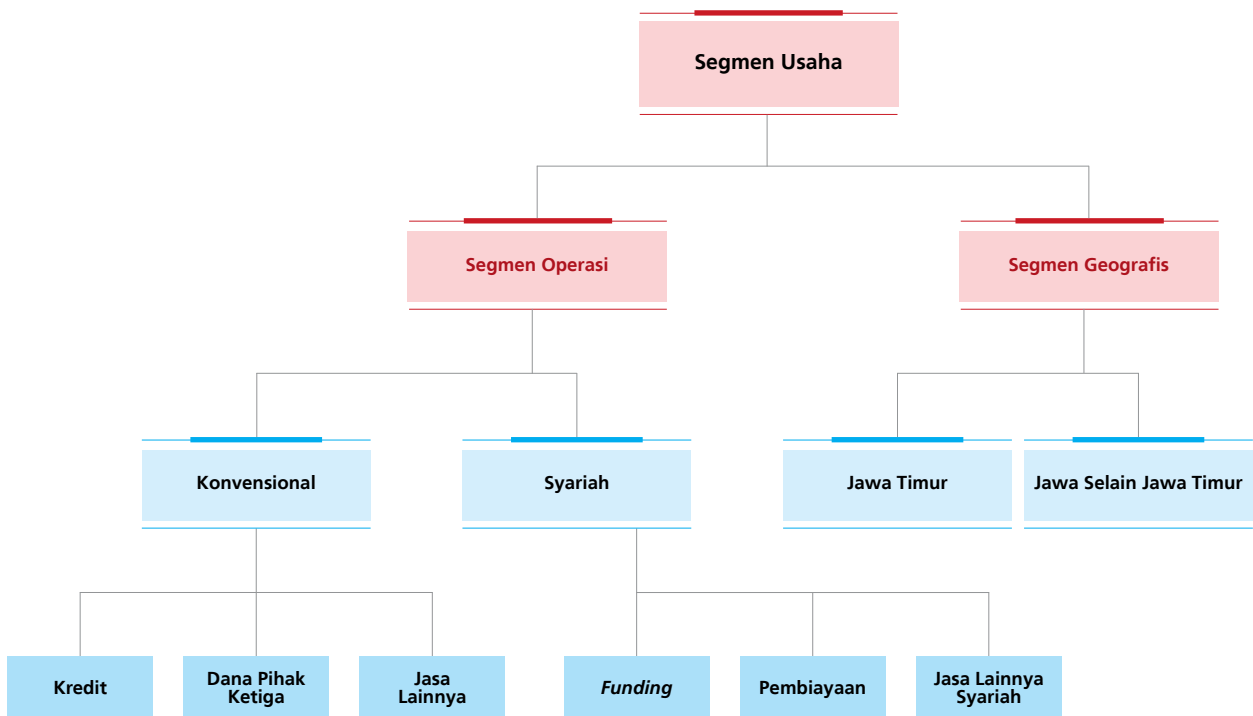




Grafik Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan November Tahun 2021-2022



### Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha



## Segmen Operasi

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

- b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

## Segmen Konvensional

Segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas produk kredit/pinjaman, dana pihak ketiga/simpanan dan jasa layanan.

## Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional

Uraian penjelasan dan produktivitas segmen konvensional Bank Jatim disajikan sebagai berikut.

### KREDIT/PINJAMAN

Kredit Bank Jatim terdiri atas Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Kredit Konsumer, Kredit Mikro Ritel dan Program.

### Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi terdiri dari Kredit Modal Kerja Kontraktor pola Transaksional, Kredit Modal Kerja Kontraktor pola *Standby Loan*, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, Kredit Pemerintah Daerah, Kredit *Trade Finance*. Penjelasan masing-masing produk Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Produktivitas Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Penyaluran Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi**

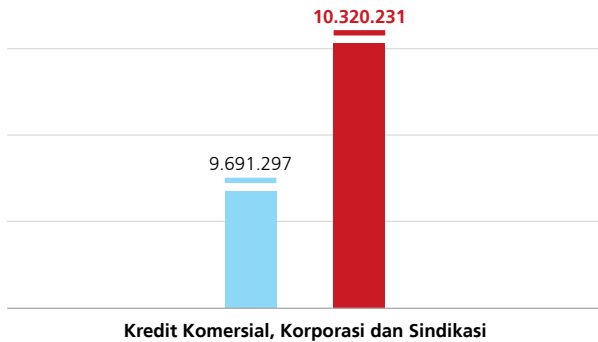
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sindikasi	5.198.185	3.812.670	1.385.515	36,34%
Konstruksi Properti	195.227	209.770	(14.543)	(6,93%)
Kredit Pemda	174.195	-	174.195	100,00%
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	34.840	(34.840)	(100,00%)
Investasi Umum	715.479	773.319	(57.840)	(7,48%)
Modal Kerja Umum	753.487	662.153	91.334	13,79%
Pola Rekening Koran (PRK)	2.639.565	2.941.197	(301.633)	(10,26%)
Kredit Kontraktor Transaksional	356.554	636.107	(279.553)	(43,95%)
Kredit Kontraktor/ <i>Standby Loan</i>	276.288	514.590	(238.302)	(46,31%)
Restrukturisasi	8.253	106.650	(98.396)	(92,26%)
<i>Trade Finance</i>	-	-	-	-
Pembiayaan Piutang	2.999	-	2.999	100,00%
<b>Total</b>	<b>10.320.231</b>	<b>9.691.297</b>	<b>628.935</b>	<b>6,49%</b>

Total Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi tahun 2022 sebesar Rp10,32 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,49% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp9,69 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari realisasi kredit sindikasi sebesar Rp1,39 triliun atau mengalami kenaikan 36,34% dari perolehan kredit sindikasi tahun sebelumnya.

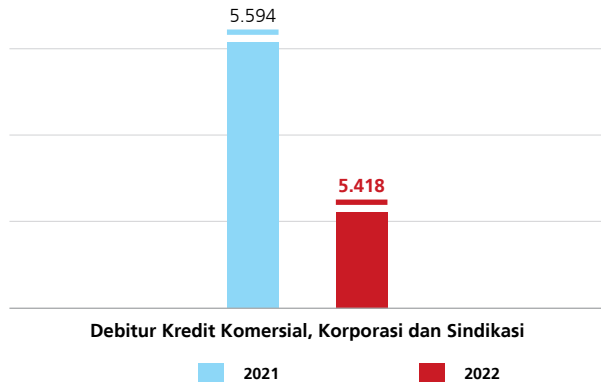
### Grafik Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

(dalam jutaan Rupiah)



### Grafik Debitur Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

(dalam orang)



Jumlah debitur Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi tahun 2022 sebanyak 5.418 debitur, menurun 3,15% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 5.594 debitur.

**Tabel Jumlah Debitur Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi**

(dalam orang)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Noa	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sindikasi	40	25	15	60,00%
Konstruksi Properti	168	216	(48)	(22,22%)
Kredit Pemda	2	-	2	100,00%
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	(100,00%)
Investasi Umum	242	233	9	3,86%
Modal Kerja Umum	605	516	89	17,25%
Pola Rekening Koran (PRK)	2.300	2.613	(313)	(11,98%)
Kredit Kontraktor Transaksional	1421	1.347	74	5,49%
Kredit Kontraktor/Standby Loan	575	599	(24)	(4,01%)
Restrukturisasi	59	44	15	34,09%
Trade Finance	-	-	-	-
Pembiayaan Piutang	6	-	6	100,00%
<b>Total Jumlah Debitur</b>	<b>5.418</b>	<b>5.594</b>	<b>(176)</b>	<b>(3,15%)</b>

Uraian masing-masing produktivitas kredit Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi dijabarkan sebagai berikut:

- **Sindikasi**  
Kredit Sindikasi tahun 2022 sebesar Rp5,19 triliun, naik sebesar Rp1,38 triliun atau 36,34% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,81 triliun. Jumlah debitur Kredit Sindikasi mengalami penurunan kenaikan 60,00% dari 25 debitur pada 2021 menjadi 40 debitur pada 2022.
- **Konstruksi Properti**  
Kredit Konstruksi Properti tahun 2022 sebesar Rp195,23 miliar, turun sebesar Rp14,54 miliar atau 6,93% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp209,70 miliar. Jumlah debitur Kredit Konstruksi Properti mengalami penurunan debitur 22,22% dari 216 debitur pada 2021 menjadi 168 debitur pada 2022.
- **Kredit Pemda**  
Pada tahun 2020-2021, tidak terdapat penyaluran Kredit Pemda namun pada tahun 2022 telah terdapat realisasi sebesar Rp174,19 miliar dengan jumlah 2 (dua) debitur.
- **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**  
Kredit BLUD pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi, mengalami penurunan sebesar Rp34,84 miliar dikarenakan adanya pelunasan.
- **Investasi Umum**  
Kredit Investasi Umum tahun 2022 sebesar Rp715,47 miliar, turun sebesar Rp57,84 miliar atau 7,48% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp773,31 miliar. Jumlah debitur Kredit Investasi Umum mengalami kenaikan debitur 3,86% dari 2.332 debitur pada 2021 menjadi 242 debitur pada 2022.
- **Modal Kerja Umum**  
Kredit Modal Kerja Umum tahun 2022 sebesar Rp753,48 miliar, naik sebesar Rp91,33 miliar atau 13,79% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp662,15 miliar. Jumlah debitur Kredit Modal Kerja Umum mengalami kenaikan debitur 17,25% dari 516 debitur pada 2021 menjadi 605 debitur pada 2022.
- **Pola Rekening Koran (PRK)**  
Kredit PRK tahun 2022 sebesar Rp2,63 triliun, turun sebesar Rp301,63 miliar atau 10,26% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,94 triliun. Jumlah debitur Kredit PRK mengalami penurunan debitur 11,98% dari 2.613 debitur pada 2021 menjadi 2.300 debitur pada 2022.
- **Kredit Kontraktor pola Transaksional**  
Kredit Kontraktor pola Transaksional tahun 2022 sebesar Rp356,55 miliar, turun sebesar Rp279,55 miliar atau 43,95% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp636,11 miliar. Jumlah debitur Kredit Kontraktor pola Transaksional mengalami kenaikan debitur 5,49% dari 1.347 debitur pada 2021 menjadi 1.421 debitur pada 2022.
- **Kredit Kontraktor pola Standby Loan**  
Kredit Kontraktor pola *Standby Loan* tahun 2022 sebesar Rp276,28 miliar, turun sebesar Rp238,30 miliar atau 46,31% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp514,59 miliar. Jumlah debitur Kredit Kontraktor pola *Standby Loan* mengalami penurunan debitur 4,01% dari 599 debitur pada 2021 menjadi 575 debitur pada 2022.

- **Restrukturisasi**

Kredit Restrukturisasi tahun 2022 sebesar Rp8,25 miliar, turun sebesar Rp98,39 miliar atau 92,26% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp106,65 miliar. Jumlah debitur Kredit Restrukturisasi mengalami kenaikan debitur 34,09% dari 44 debitur pada 2021 menjadi 59 debitur pada 2022.

- **Trade Finance**

Pada tahun 2021-2022, tidak terdapat penyaluran Kredit *Trade Finance*.

- **Pembiayaan Piutang**

Pada tahun pada tahun 2022 terdapat penyaluran Kredit Pembiayaan Piutang dengan realisasi sebesar Rp2,99 miliar dengan jumlah 6 (enam) debitur.

### Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Purinusa Eka Persada (Sinarmas Group) terkait kredit piutang dengan mekanisme *Supply Chain Finance* (SCF) kepada para vendor atau *supplier* dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan lainnya.

### Prospek Usaha Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi Tahun 2023

Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi pada tahun 2023 fokus melakukan *prospecting* pada BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Jawa Timur atas *pipeline* yang telah dibangun pada akhir tahun 2022.

### Strategi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi Tahun 2023

Uraian mengenai strategi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi yang akan dilakukan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Membangun *pipeline sales* secara terorganisir dan tervisualisasi.
2. Pemberian stimulus restrukturisasi kredit dan *monitoring* debitur atas debitur yang terganggu perputaran usahanya.
3. Berkolaborasi dengan bank lain untuk memberikan pembiayaan sindikasi terhadap proyek Pemerintah maupun usaha prospektif swasta.
4. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau (berbasis ramah lingkungan)
5. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
  - a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
  - b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
  - c. Penawaran kepada BUMN/BUMD dan perusahaan Swasta.
6. Melakukan sosialisasi tentang *update* SOP Divisi KKS dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas yang membidangi.

### Kredit Konsumer

Kredit Konsumer terdiri dari Kredit Multiguna, Kredit Pegawai, Kredit CCC (*Cash Collateral Credit*), Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Properti dan Kredit Beragun Emas. Penjelasan masing-

masing produk Kredit Konsumer telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Produktivitas Kredit Konsumer diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Kredit Konsumer**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	23.801.592	22.301.540	1.500.052	6,73%
Kredit Pegawai	2.077.126	2.124.320	(47.194)	(2,22%)
Kredit CCC ( <i>Cash Collateral Credit</i> )	75.728	55.097	20.631	37,45%
Kredit Kendaraan Bermotor	64.774	9.473	55.301	583,77%
Kredit Properti (KPR Umum, Kredit Konsumsi Beragun Properti/KKBP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP)	1.666.269	1.818.334	(152.066)	(8,36%)
Kredit Jaminan Emas	8.825	4.850	3.975	81,96%
<b>Total</b>	<b>27.694.313</b>	<b>26.313.613</b>	<b>1.380.700</b>	<b>5,25%</b>

Total Kredit Konsumer tahun 2022 mencapai Rp27,69 triliun, meningkat 5,25% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp26,31 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Kredit Multiguna sebesar Rp6,73% atau Rp1,50 triliun.

Berdasarkan pertumbuhan, Kredit Kendaraan Bermotor mencatatkan pertumbuhan terbesar hingga mencapai 583,77% diikuti dengan Kredit Jaminan Emas sebesar 81,96%, Kredit CCC sebesar 37,45%, Kredit Multiguna sebesar 6,73%, sedangkan

Kredit Pegawai mengalami penurunan sebesar 2,22% dan Kredit Properti sebesar juga menurun sebesar 8,36%.

Per 31 Desember 2021 jumlah debitur Kredit Konsumtif Bank Jatim tercatat sebanyak 244.877 debitur, naik 16.564 debitur atau 6,76% dibanding dengan tahun 2022 sebanyak 261.441 debitur. Dari kesimpulan di atas Skim Kredit Multiguna memberikan kontribusi terbesar, hal ini disebabkan karena adanya moment promo Kredit Multiguna.

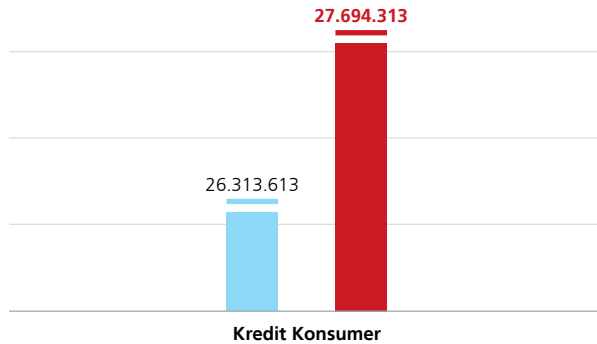
**Tabel Jumlah Debitur Kredit Konsumer**

(dalam orang)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	245.870	230.468	15.402	6,68%
Kredit Pegawai	5.653	4.994	659	13,20%
Kredit Deposito ( <i>Cash Collateral Credit</i> )	274	163	111	68,10%
Kredit Kendaraan Bermotor	991	298	693	232,55%
Kredit Properti (KPR Umum, Kredit Konsumsi Beragun Properti/KKBP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP)	8.373	8.806	(433)	(4,92%)
Kredit Jaminan Emas	279	148	131	88,51%
<b>Total Jumlah Debitur</b>	<b>261.440</b>	<b>244.877</b>	<b>16.563</b>	<b>6,76%</b>

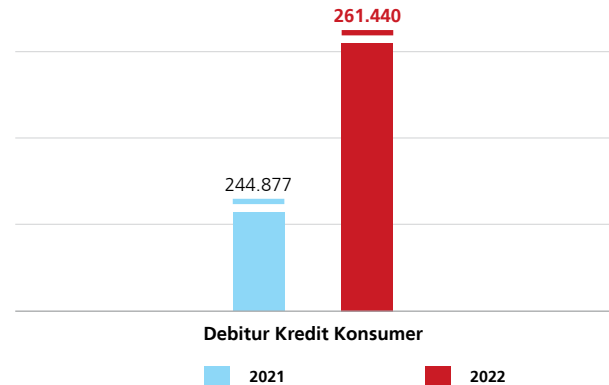
## Grafik Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)



## Grafik Debitur Kredit Konsumer

(dalam orang)



Uraian masing-masing produktivitas kredit konsumen dijabarkan sebagai berikut:

- **Kredit Multiguna**

Kredit Multiguna tahun 2021 sebesar Rp22.301 miliar, naik sebesar Rp1,50 miliar atau 6,73% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp23.801 miliar. Jumlah debitur Kredit Multiguna mengalami kenaikan debitur atau 6,68% dari 230.468 debitur pada 2021 menjadi 245.870 debitur pada 2022.

- **Kredit Pegawai**

Kredit Pegawai tahun 2021 sebesar Rp2.124 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp47,19 miliar atau 2,22% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.077 miliar. Jumlah debitur Kredit Pegawai bertambah sebesar 659 debitur atau 13,20% dari 4.994 debitur pada tahun 2021 menjadi 5.653 debitur pada tahun 2022.

- **Kredit CCC (Cash Collateral Credit)**

Cash Collateral Credit tahun 2021 sebesar Rp55,09 miliar, naik sebesar Rp20,63 miliar atau 37,45% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp75,73 miliar. Jumlah debitur Cash Collateral Credit bertambah sebesar 111 debitur atau 68,10% dari 163 debitur pada tahun 2021 menjadi 274 debitur pada tahun 2022.

- **Kredit Kendaraan Bermotor**

Kredit Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp9 miliar, naik sebesar Rp55 miliar atau 583,77% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp64 miliar. Jumlah debitur Kredit Kendaraan Bermotor bertambah sebesar 82 debitur atau 37,96% dari 298 debitur pada tahun 2021 menjadi 991 debitur pada tahun 2022.

- **Kredit Properti**

Kredit Properti tahun 2021 sebesar Rp1.818 Miliar, mengalami penurunan sebesar Rp152,07 miliar atau 8,36% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.666 miliar. Jumlah debitur Kredit Properti mengalami penurunan debitur atau 4,92% dari 8.806 debitur pada tahun 2021 menjadi 8.373 debitur pada tahun 2022.

- **Kredit Jaminan Emas**

Kredit Jaminan Emas tahun 2021 sebesar Rp4,85 miliar, naik sebesar Rp3,98 miliar atau 82,63% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8,83 miliar. Jumlah debitur Kredit Jaminan Emas bertambah sebesar 131 debitur atau 88,51% dari 148 debitur pada tahun 2021 menjadi 279 debitur pada tahun 2022.

## Strategi Kredit Konsumer Tahun 2022

Uraian mengenai strategi Kredit Konsumer tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan program pemasaran insentif *marketing*.
2. Promo suku bunga dan biaya.
3. Program undian berhadiah.
4. Pengembangan dan *launching* E-KMG Versi ke 2
5. Evaluasi ketentuan pemberian upah penagihan/pemasaran melalui Kasda.
6. Menyusun database ASN dan melakukan analisis sebagai data referensi bagi tenaga pemasaran.
7. Upaya penurunan premi asuransi atau metode lainnya (misal subsidi premi atau premi asuransi dibayar dalam angsuran).
8. Melakukan kerjasama dengan Bank Lain untuk *take over* Kredit Multiguna.
9. Melakukan kajian pengembangan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
10. *Monitoring* pencapaian target tenaga pemasaran kredit (pengembangan aplikasi *marketing* kredit).
11. Memperbaharui kerjasama dengan Taspen dan melaksanakan *refreshment* pelaksanaan *flagging* Taspen.
12. *Monitoring* pelaksanaan asuransi berkoordinasi dengan Divisi Operasi.
13. *Monitoring* pelaksanaan program pemasaran Cabang.
14. Melakukan *monitoring* pencapaian target tenaga pemasaran untuk KKB.
15. Program Undian Berhadiah atau program lainnya (contoh: pemberian *voucher* belanja untuk 50 pengajuan kredit).
16. Melakukan program pemasaran produk melalui media sosial Bank, membuat media atau sarana pemasaran, pemantauan target *marketing*, *cross selling*.
17. Menambah PKS dengan para pengembang dan Agen Properti.

18. Melakukan *gathering* dengan Anggota Asosiasi dan Pengembang Perumahan di Jawa Timur.
19. Melakukan *monitoring* realisasi KPR FLPP di Kantor Cabang dan memberikan target KPR FLPP pada Cabang yang berpotensi.
20. Mempersiapkan rencana kerjasama penyaluran KPR Tapera dengan BP Tapera dan Divisi terkait
21. Mengadakan kerjasama dengan Developer rumah FLPP/ Tapera
22. Melakukan evaluasi SOP Produk sesuai dengan pasar dan pesaing.

### Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Konsumer

Keunggulan produk-produk Kredit Konsumer antara lain sebagai berikut:

1. Kredit Multiguna
  - a. *Market share* luas meliputi perorangan yang berpenghasilan tetap.
  - b. Suku bunga kompetitif, suku bunga hingga *single rate*.
  - c. Persyaratan mudah, sederhana.
  - d. Mayoritas *payroll* penerima kredit di Bank Jatim.
  - e. Proses cepat dan tepat sesuai kebutuhan calon debitur.
2. Kredit Kendaraan Bermotor
  - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
  - b. Uang Muka mulai 0%.
  - c. Suku bunga murah, menarik, kompetitif.
  - d. Biaya kredit murah, untuk kendaraan bermotor roda dua *free biaya*.
  - e. Persyaratan mudah.
  - f. Proses cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan kendaraan calon debitur.
  - g. Kerjasama dengan banyak *dealer*.
3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
  - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
  - b. Uang muka mulai 5%.
  - c. Suku bunga bervariasi sesuai kebutuhan calon debitur.
  - d. Persyaratan mudah dan kompetitif.
  - e. Kerjasama dengan banyak *developer*.
  - f. Terdapat insentif untuk *developer*.
  - g. Kredit dapat dilunasi sebelum jatuh tempo maupun pelunasan sebagian.
4. Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP)
  - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
  - b. Tujuan untuk segala kebutuhan konsumtif calon debitur.
  - c. Uang muka mulai 5%.
  - d. Suku bunga kompetitif.
  - e. Persyaratan mudah dan kompetitif.
  - f. Kredit dapat dilunasi sebelum jatuh tempo maupun pelunasan sebagian.
5. *Cash Collateral Credit*
  - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
  - b. Nilai kredit besar.
  - c. Suku bunga murah dan kompetitif.
  - d. Persyaratan sederhana.
  - e. Proses cepat.
  - f. Biaya murah.
  - g. Agunan tunai dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
6. KPR Sejahtera dengan dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
  - a. Penerima kredit dapat memiliki rumah idaman dengan suku bunga sangat murah dan bersifat tetap selama jangka waktu kredit.
  - b. Dapat mengajukan subsidi uang muka.
  - c. Uang muka minimal 1%.
  - d. Persyaratan mudah.
  - e. Proses kredit cepat.
  - f. Biaya murah.

Inovasi kredit konsumer yang dilakukan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Promo suku bunga Kredit Properti (KPR dan KKBP) dengan *single rate* (mulai 3%).
2. Peningkatan manfaat aplikasi E-KMG lebih lengkap, digunakan untuk target yang lebih luas sehingga mempermudah proses permohonan Kredit Multiguna.
3. Promo Suku bunga Kredit Multiguna baik untuk calon debitur baru, *take over* maupun debitur *top up*.
4. Program *Referral* "OMG" bagi nasabah yang dapat mereferensikan calon debitur realisasi di Bank Jatim.
5. *Gathering* KPR dengan Kemenpupera dan developer.
6. Pemasaran bersama Divisi Kredit Konsumer dengan Cabang.
7. Pendekatan dan melakukan perjanjian kerjasama dengan developer.
8. Kerjasama dengan banyak *dealer* termasuk *dealer* yang menjual kendaraan berwawasan lingkungan.
9. Pemberian insentif bagi kendaraan berwawasan lingkungan.
10. Mengadakan pameran kendaraan baik di Kantor Bank Jatim maupun di Instansi/Dinas.
11. Kerjasama dengan BP Tapera dalam pelaksanaan penyaluran KPRS FLPP.

### Prospek Usaha dan Strategi Kredit Konsumer Tahun 2023

Uraian mengenai prospek usaha dan strategi Kredit Konsumer tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. *Mapping* dan pengolahan data potensi nasabah  
Melakukan *mapping* data potensi berdasarkan data internal maupun eksternal sebagai *database* bagi *Account Officer* (AO) untuk memasarkan kredit disertai penyempurnaan aplikasi *Marketing Application* (MAP) sebagai alat *monitoring* kinerja pemasaran.
2. Program *Referral* untuk *Member Get Member*  
Merupakan program pemberian insentif bagi nasabah yang dapat me-*referral* calon debitur di Bank.



3. Penyempurnaan aplikasi E-KMG Versi 2 dan aplikasi *Marketing (Marketing Application/ MAP)* bagi AO Kredit Konsumer dan Properti.
4. Promosi Kredit Multiguna  
Program promosi suku bunga atau biaya untuk penyaluran KMG Prapensiun, Pensiunan, *take over*, penambahan NoA baru dan *top up* (segmen debitur loyal).
5. Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  
Bank melakukan kerjasama dengan PTN/PTS dalam penyaluran kredit multiguna pendidikan.
6. Penyaluran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)  
Pengembangan dari KKPD Virtual yang sudah menjadi target dari Bank Indonesia untuk memaksimalkan transaksi anggaran dan belanja Pemerintah Daerah.
7. Optimalisasi pemasaran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)  
Melaksanakan pemasaran melalui KKB *Expo* di seluruh cabang.
8. Optimalisasi pemasaran *Cash Collateral Credit*  
Pemasaran Bersama yang dilakukan seluruh cabang untuk *cash collateral credit* dengan menargetkan Deposan/ penabung > Rp500 juta.
9. Optimalisasi pemasaran Kredit Jaminan Emas  
Pemasaran bersama yang dilakukan seluruh cabang untuk Kredit Jaminan Emas.

### Kredit Mikro Ritel dan Program

Divisi Kredit Mikro Ritel dan Program adalah Divisi Kredit yang menaungi skim Kredit Jatim Ritel, Kredit Mikro Laguna, Kredit *Linkage* BPR, Kredit BPR RC (Rekening Koran), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit *Linkage Fintech*, Kredit Resi Gudang, Kredit Kepada

Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), KUMK SU-005/KIP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Jatim Mikro dan Kredit Si UMI.

Produktivitas Kredit Mikro Ritel dan Program diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Kredit Mikro Ritel dan Program**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kredit Jatim Ritel	1.623.616	1.665.202	(41.587)	(2,50%)
Kredit Mikro Laguna	399	1.524	(1.125)	(73,82%)
Kredit <i>Linkage</i> Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	217.961	270.329	(52.368)	(19,37%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	2.435.507	576.604	1.858.903	322,39%
Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA)	527.374	575.444	(48.069)	(8,35%)
Kredit Kepada Koperasi (KKOP)	20.063	19.055	1.009	5,29%
Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	1.585	2.989	(1.403)	(46,96%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	2.142	4.036	(1.893)	(46,91%)
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	317	770	(453)	(58,79%)
Kredit Jatim Mikro	797.268	1.040.174	(242.905)	(23,35%)
Kredit <i>Linkage Fintech</i>	469.889	583.556	(113.667)	(19,48%)
Kredit SiUMI	77.846	127.264	(49.417)	(38,83%)
Kredit BPR RC (Rekening Koran)	98.899	114.942	(16.043)	(13,96%)
<b>Total</b>	<b>6.272.869</b>	<b>4.981.888</b>	<b>1.290.980</b>	<b>25,91%</b>

Bank Jatim pada tahun 2022 untuk skim Kredit Mikro, Ritel dan Program telah menyalurkan kredit sebesar Rp6,27 triliun, meningkat sebesar Rp1,29 triliun atau sebesar 25,91% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,98 triliun. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,85 triliun dan Kredit Kepada Koperasi (KKOP) sebesar Rp1,01 miliar. Berdasarkan komposisi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan kontribusi terbesar hingga mencapai

322,39% diikuti dengan Kredit Kepada Koperasi (KKOP) sebesar 5,29% dari jumlah kredit periode 31 Desember 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah debitur kredit Mikro, Ritel, dan Program Bank Jatim tercatat sebanyak 191.725 debitur, turun sebanyak 76.752 debitur atau 28,59% dari 268.477 debitur pada 2021.

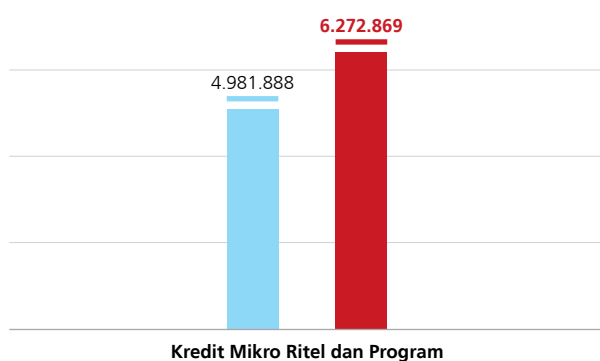
**Tabel Debitur Kredit Mikro Ritel dan Program**

(dalam orang)

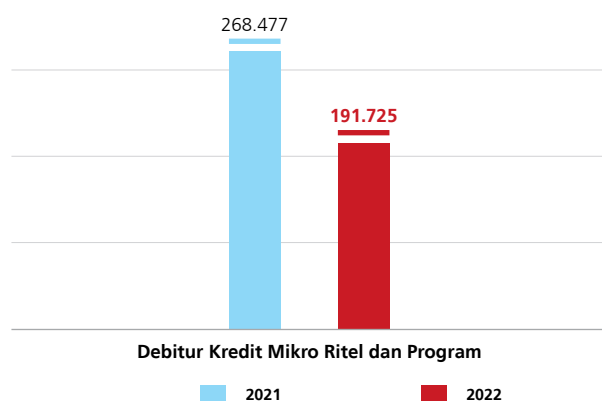
Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit Jatim Ritel	18.190	20.417	(2.227)	(10,91%)
Kredit Mikro Laguna	108	158	(50)	(31,65%)
Kredit <i>Linkage</i> Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	61	72	(11)	(15,28%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	23.269	4.932	18.337	371,80%
Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA)	14.585	16.641	(2.056)	(12,36%)
Kredit Kepada Koperasi (KKOP)	43	49	(6)	(12,24%)
Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	17	28	(11)	(39,29%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	3	5	(2)	(40,00%)
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	60	65	(5)	(7,69%)
Kredit Jatim Mikro	8.864	9.906	(1.042)	(10,52%)
Kredit <i>Linkage Fintech</i>	125.440	214.906	(89.466)	(41,63%)
Kredit SiUMI	1.061	1.217	(210)	(16,52%)
Kredit BPR RC (Rekening Koran)	16	19	(3)	(15,79%)
<b>Total Debitur</b>	<b>191.725</b>	<b>268.477</b>	<b>(76.752)</b>	<b>(28,59%)</b>

**Grafik Kredit Mikro Ritel dan Program**

(dalam jutaan Rupiah)


**Grafik Debitur Kredit Mikro Ritel dan Program**

(dalam orang)



Uraian masing-masing kinerja kredit Mikro Ritel dan Program disajikan sebagai berikut:

- Kredit Jatim Ritel**  
 Kredit Jatim Ritel tahun 2022 sebesar Rp1,62 triliun, turun sebesar Rp41,58 miliar atau 2,50% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,66 triliun. Jumlah debitur Kredit Jatim Ritel berkurang sebanyak 2.227 debitur atau 10,91% dari 20.417 debitur pada 2021 menjadi 18.190 debitur pada 2022.
- Kredit Mikro Laguna**  
 Kredit Mikro Laguna tahun 2022 sebesar Rp399 juta, turun sebesar Rp1,13 miliar atau 73,82% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,52 miliar. Jumlah debitur Kredit Mikro Laguna berkurang sebanyak 50 debitur atau 31,65% dari 158 debitur pada 2021 menjadi 108 debitur pada 2022.
- Kredit *Linkage* Program BPR**  
 Kredit *Linkage* Program BPR tahun 2022 sebesar Rp217,96 miliar, turun sebesar Rp52,37 miliar atau 19,37% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp270,33 miliar. Jumlah debitur Kredit *Linkage* Program BPR berkurang sebanyak 11 debitur atau (15,28%) dari 72 debitur pada 2021 menjadi 61 debitur pada 2022.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)**  
 Kredit Usaha Rakyat tahun 2022 sebesar Rp2,44 triliun, naik sebesar Rp1,86 triliun atau 322,39% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp576,60 miliar. Jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertambah sebanyak 18.337 debitur atau 371,80% dari 4.932 debitur pada 2021 menjadi 23.269 pada 2022.
- Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA)**  
 Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA) tahun 2022 sebesar Rp527,37 miliar, turun sebesar Rp48,07 miliar atau 8,35% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp575,44 miliar. Jumlah debitur Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA) berkurang sebanyak 2.056 debitur atau 12,36% dari 16.641 debitur pada 2021 menjadi 14.585 debitur pada 2022.

- **Kredit Kepada Koperasi (KKOP)**

Kredit Kepada Koperasi (KKOP) tahun 2022 sebesar Rp20,06 miliar, naik sebesar Rp1,01 miliar atau 5,29% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp19,06 miliar. Jumlah debitur Kredit Kepada Koperasi (KKOP) berkurang sebanyak 6 debitur atau 12,24% dari 49 debitur pada 2021 menjadi 43 debitur pada 2022.

- **KUMK SU-005/KIP**

KUMK SU-005/KIP tahun 2022 sebesar Rp1,58 miliar, turun sebesar Rp1,40 miliar atau 46,96% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,98 miliar. Jumlah debitur KUMK SU-005/KIP berkurang sebanyak 11 debitur atau 39,29% dari 28 debitur pada 2021 menjadi 17 debitur pada 2022. Hal ini disebabkan karena Bank Jatim sejak tahun 2019 sudah tidak menyalurkan kredit tersebut.

- **Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)**

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tahun 2022 sebesar Rp2,14 miliar, turun sebesar Rp1,89 miliar atau 46,91% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,04 miliar. Jumlah debitur Kredit Usaha Pembibitan Sapi berkurang sebanyak 2 debitur atau 40% dari 5 debitur pada 2021 menjadi 3 debitur pada 2022. Hal ini disebabkan karena Bank Jatim sejak tahun 2015 sudah tidak menyalurkan kredit tersebut.

- **Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)**

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tahun 2022 sebesar Rp317 juta, turun sebesar Rp453 juta atau 58,79% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp770 juta. Jumlah debitur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi berkurang sebanyak 5 debitur dari 65 debitur pada 2021 menjadi 60 debitur pada 2022. Hal ini disebabkan karena Bank Jatim sejak tahun 2016 sudah tidak menyalurkan kredit tersebut.

- **Kredit Jatim Mikro**

Kredit Jatim Mikro tahun 2022 sebesar Rp797,27 miliar, turun sebesar Rp242,91 miliar atau 23,35% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,04 triliun. Jumlah debitur Kredit Jatim Mikro berkurang sebanyak 1.042 debitur atau 10,52% dari 9.906 debitur pada 2021 menjadi 8.864 debitur pada 2022.

- **Kredit Linkage Fintech**

Kredit *Linkage Fintech* tahun 2022 sebesar Rp469,89 miliar, turun sebesar Rp113,67 miliar atau 19,48% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp583,56 miliar. Jumlah debitur Kredit *Linkage Fintech* berkurang sebanyak 89.466 debitur atau 41,63% dari 214.906 debitur pada 2021 menjadi 125.440 debitur pada 2022. Hal ini disebabkan karena pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022 oleh OJK sementara di *stop* untuk penyaluran kredit tersebut.

- **Kredit SiUMI**

Kredit SiUMI tahun 2022 sebesar Rp77,85 miliar, turun sebesar Rp49,41 miliar atau 38,83% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp127,26 miliar. Jumlah debitur Kredit SiUMI berkurang sebanyak 210 debitur atau 16,52% dari 1.271 debitur pada 2021 menjadi 1.061 debitur pada 2022.

- **Kredit BPR RC (Rekening Koran)**

Kredit BPR Rekening Koran tahun 2022 sebesar Rp98,90 miliar, turun sebesar Rp16,04 miliar atau 13,96% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp114,94 miliar. Jumlah debitur Kredit BPR Rekening Koran berkurang sebanyak 3 debitur atau 15,79% dari 19 debitur pada 2021 menjadi 16 debitur pada 2022.

## Strategi Kredit Mikro Ritel dan Program Tahun 2022

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro, Ritel dan Program yang akan dilakukan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan ketentuan (SOP) untuk mendukung pencapaian target Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program.
2. Melakukan pengembangan pada Aplikasi *E-Loan* dan Jatim Kilat secara *mobile* sebagai salah satu cara untuk percepatan dalam proses permohonan kredit.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk membuka peluang ekspansi kredit lebih besar khususnya di Jawa Timur.
4. Melakukan penetrasi pasar guna memaksimalkan penyaluran kredit kepada UMKM.
5. Meningkatkan penyaluran Kredit Mikro, Ritel dan Program melalui kerjasama dengan perusahaan *Fintech*.
6. Melakukan perluasan target pasar UMKM dengan bekerjasama dengan asosiasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh BUMDES di Jawa Timur.
7. Memberikan promosi produk kredit melalui media cetak/elektronik/sosial dan membuat video produk.
8. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan ekspansi kredit agar tetap terjaga kolektibilitas kredit lancar.
9. Meningkatkan *brand image* dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi atau pameran baik yang diadakan oleh Bank, Pemerintah Daerah setempat, maupun kerjasama dengan berbagai instansi terkait.
10. Melakukan perluasan kerjasama pembiayaan dan dana dengan BPR Perbamide dan Perbarindo.

## Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Mikro Ritel dan Program

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Mikro Ritel dan Program adalah sebagai berikut:

1. Untuk skim kredit kepada koperasi untuk anggotanya (KKPA) jangka waktu kredit bisa sampai 15 tahun.
2. Untuk skim *linkage* BPR jangka waktu kreditnya bisa sampai 15 tahun.
3. Percepatan proses kredit melalui pengembangan aplikasi.
4. Suku bunga bersaing dengan bank kompetitor.
5. Skema angsuran kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

## Prospek Usaha Kredit Mikro Ritel dan Program Tahun 2023

Prospek usaha Kredit Mikro Ritel dan Program khususnya untuk produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2023 mendatang akan sangat baik. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan produk Bank Jatim yang disalurkan untuk memberikan permodalan khususnya kepada debitur UMKM dengan *plafond* kredit maksimal Rp500 juta. Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi andalan Bank Jatim dalam menyalurkan Kredit Produktif (UMKM). Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan sampai dengan akhir Desember 2022 telah mencapai Rp2,44 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 23.269 debitur. Nilai tersebut tumbuh melesat dibandingkan posisi yang sama tahun lalu hanya Rp576,60 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.932 debitur di Desember 2021.

### Strategi Kredit Mikro Ritel dan Program Tahun 2023

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro, Ritel dan Program yang akan dilakukan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

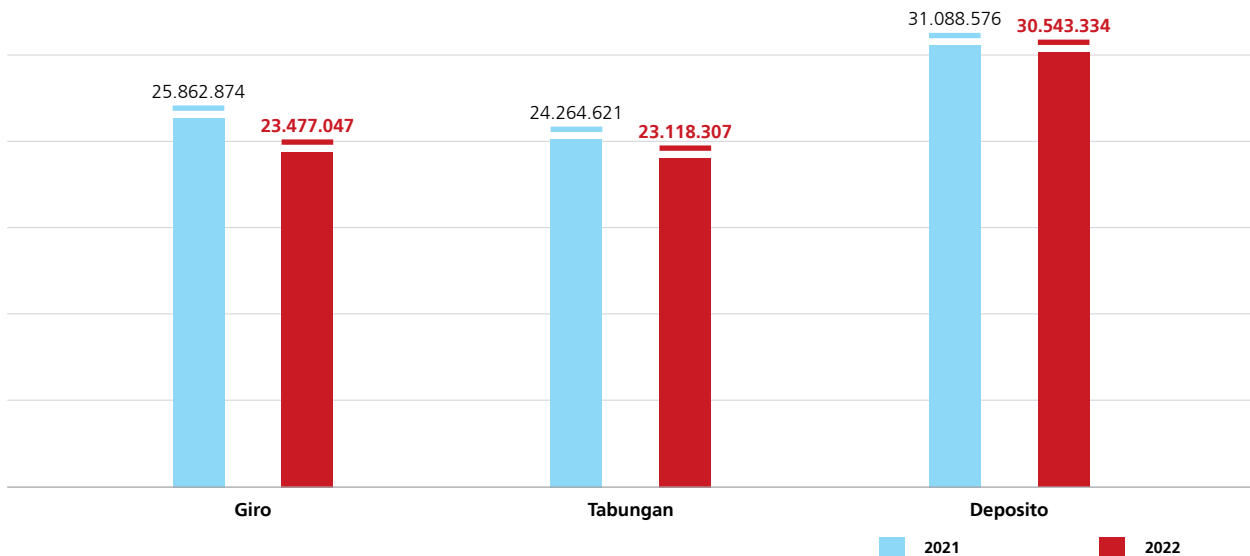
1. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan ekspansi kredit agar tetap terjaga kolektibilitas kredit lancar;
2. Melakukan penetrasi pasar guna memaksimalkan penyaluran kredit kepada UMKM;
3. Melakukan pengembangan pada Aplikasi *Jconnect E-Loan* dan *Jatim Kilat* secara *mobile* sebagai salah satu cara untuk percepatan dalam proses permohonan kredit calon debitur UMKM;
4. Melakukan perbaikan ketentuan (SOP) untuk mendukung pencapaian target Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program;
5. Meningkatkan kerjasama dengan Kementan terkait akses permodalan Petani Akur di beberapa Kabupaten;
6. Meningkatkan penyaluran Kredit Mikro, Ritel dan Program melalui kerjasama dengan perusahaan *Fintech* lain;
7. Melakukan perluasan target pasar UMKM dengan bekerjasama dengan asosiasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh BUMDES di Jawa Timur;
8. Melakukan perluasan kerjasama pembiayaan dan dana dengan BPR Perbamida dan Perbarindo;
9. Memberikan promosi produk kredit melalui media cetak/elektronik/sosial dan membuat video produk;
10. Meningkatkan *brand image* dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi atau pameran baik yang diadakan oleh Bank, Pemerintah daerah setempat, maupun kerjasama dengan berbagai instansi terkait.

### DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN

Dana pihak ketiga segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas giro, tabungan, dan deposito.

#### Grafik Produktivitas Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)



#### Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang

Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity* Kliring). Giro Bank Jatim juga dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (EUR, JPY, SGD, dan USD). Giro Bank Jatim tersedia untuk Umum (perorangan dan perusahaan), serta untuk Pemerintah Daerah.

Produktivitas Giro Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Produktivitas Giro**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro Pemda	17.766.614	16.440.199	1.326.415	8,07%
Giro Umum	5.710.433	9.422.675	(3.712.242)	(39,40%)
<b>Total</b>	<b>23.477.047</b>	<b>25.862.874</b>	<b>(2.385.827)</b>	<b>(9,22%)</b>

Giro tahun 2022 mencapai Rp23,48 triliun, turun 9,22% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp25,86 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari Giro Umum sebesar Rp3,71 triliun.

Giro Pemda adalah giro milik Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II. Giro Pemda tahun 2022 sebesar Rp17,77 triliun, meningkat 8,07% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp16,44 triliun. Sedangkan dengan Giro Umum menurun sebesar 39,40%, dari Rp9,42 triliun di tahun 2021 menjadi Rp5,71 triliun di tahun 2021.

### Tabungan

Tabungan Bank Jatim terdiri dari Tabungan Simpeda, Tabungan Haji, Tabungan Siklus, Tabunganku, Simpanan Pelajar (SIMPEL) dan Simpanan Laku Pandai (SiPandai).

Produktivitas Tabungan Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Produktivitas Tabungan**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpeda	16.468.555	16.010.311	458.244	2,86%
Siklus	2.655.680	4.702.025	(2.046.345)	(43,52%)
Tabungan Haji	18.428	20.942	(2.514)	(12,00%)
Tabunganku	3.904.028	3.469.603	434.425	12,52%
Tabungan Simpel	71.322	61.275	10.047	16,40%
Tabungan Sinyal	294	467	(173)	(37,04%)
<b>TOTAL</b>	<b>23.118.307</b>	<b>24.264.622</b>	<b>(1.146.315)</b>	<b>(4,72%)</b>

Total Tabungan tahun 2022 mencapai Rp23,12 triliun, menurun 4,72% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp24,26

triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya pertumbuhan Tabungan Siklus yang mencapai Rp2,05 triliun.

Uraian kinerja tabungan disajikan sebagai berikut:

- **Simpeda**  
Pada tahun 2022, jumlah Tabungan Simpeda sebesar Rp16,47 triliun, meningkat Rp458,24 miliar atau 2,86% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp16,01 triliun. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpeda juga mengalami peningkatan 2,86% dikarenakan pertumbuhan literasi keuangan di lingkungan daerah-daerah.
- **Siklus**  
Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus pada 2022 sebesar Rp2,66 triliun menurun Rp2,65 triliun atau 43,52% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,70 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan turunnya jumlah nasabah Tabungan Siklus mengingatnya menurunnya aktivitas keuangan masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.
- **Tabungan Haji**  
Jumlah Tabungan Haji pada 2022 sebesar Rp18,43 miliar turun Rp2,05 miliar atau 12,00% dibanding tahun 2021 sebesar Rp20,94 miliar. Selanjutnya, jumlah nasabah Tabungan Haji mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya kuota haji di tahun 2022.

- **Tabunganku**  
Jumlah penghimpunan dana dari produk TabunganKu pada tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun, meningkat Rp434,43 miliar atau 12,52% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,47 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah produk TabunganKu dikarenakan banyak peminat literasi keuangan di lingkungan sekolah.
- **Simpanan Pelajar (Simple)**  
Jumlah Simpanan Pelajar (Simple) pada tahun 2021 sebesar Rp71,32 miliar, meningkat Rp10,05 miliar atau 16,40% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp61,28 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) dikarenakan meningkatnya program promosi di lingkungan pelajar.
- **Simpanan Nelayan (Sinyal)**  
Jumlah Simpanan Nelayan (Sinyal) pada tahun 2022 sebesar Rp294 juta, menurun Rp173 juta atau 37,04% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp467 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan jumlah nasabah Tabungan Sinyal mengingat populasi nelayan lebih sedikit dan masyarakat lebih tertarik pada Tabungan Simpeda dikarenakan adanya program promo hadiah maupun undian.

### Deposito

Deposito berjangka merupakan pilihan terbaik bagi perorangan maupun perusahaan yang ingin menginvestasikan dana di tempat yang aman dan terpercaya. Dana dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito Berjangka dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (USD dan SGD).

Produktivitas Deposito Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Produktivitas Deposito**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito	30.543.334	31.088.576	(545.242)	(1,75%)

Deposito Bank Jatim dapat dijadikan jaminan kredit dengan suku bunga yang diberikan kompetitif dan dapat dilakukan negosiasi. Deposito tahun 2022 mencapai Rp30,54 triliun, menurun 1,75% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp31,09 triliun.

Hal tersebut seiring dengan penurunan nasabah dikarenakan di tahun 2022 banyak nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk modal kerja.

### Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2022

Uraian strategi dana pihak ketiga yang dilakukan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Program Bantuan dengan Sistem Non Tunai.
2. Pembukaan Rekening Bank Jatim bagi rekanan Sekolah pada aplikasi SiBOS.
3. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Kerjasama Layanan Keuangan dengan Rumah Sakit di wilayah Jawa Timur.
5. Kerjasama dengan Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren Jawa Timur.
6. Implementasi kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
7. Pembukaan Rekening Tabungan bagi setiap siswa di Jawa timur (KEJAR).
8. Optimalisasi Implementasi QRIS.
9. Program Promo *Event* (Inklusi Keuangan) seperti Siklus Suka – suka, *member get member*, dan lain-lain.
10. Program Undian Simpeda dan Undian Siklus.
11. Implementasi kerjasama dengan Grab.

## Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Dana Pihak Ketiga

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan keuangan non tunai dengan Pemerintah Daerah
2. *Supply chain*/ekosistem digital atau mempermudah layanan transaksi keuangan Pemerintah Daerah dalam ekosistem pembayaran digital.
3. Pelayanan edukasi dan literasi keuangan dalam lingkup pendidikan Jawa Timur.
4. Program promo transaksi pada *merchant* QRIS Bank Jatim.
5. Memberikan *addict value* kepada nasabah dengan pemberian undian dan promo kepada seluruh jenis nasabah.

## Prospek Usaha Dana Pihak Ketiga Tahun 2023

Uraian prospek usaha dana pihak ketiga yang adalah sebagai berikut:

1. KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).
2. Optimalisasi Laku Pandai.
3. Optimalisasi implementasi QRIS.
4. Pendekatan kerjasama baru dan *maintenance* kerjasama *existing* lembaga korporasi.
5. Kerjasama dengan Asosiasi Ekspor Impor.

## Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2023

Uraian strategi dana pihak ketiga yang akan dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Pembukaan Rekening Tabungan bagi setiap siswa di Jawa Timur dengan stimulasi setoran awal target kurang lebih 50.000 rekening, Simpel Day (4 Cabang: Kepanjen pada bulan Maret, bulan April sampai dengan Juli di 3 Cabang di antaranya Cabang Tuban, Mojokerto, Dr. Soetomo), Edukasi literasi *offline* dan *online*, Kolaborasi dengan program Pemerintah dan OJK (beasiswa pelajar), kolaborasi dengan program sekolah antara lain Bank Mini dan Agen Laku Pandai;
2. Peningkatan jumlah agen laku pandai, peningkatan volume transaksi agen laku pandai melalui perbaikan/penyederhanaan proses pendaftaran calon agen laku pandai, program promo dan *reward*, melakukan *gathering*, melakukan *monitoring* dan evaluasi secara *online/offline*, melakukan sosialisasi dan literasi bekerjasama dengan dinas setempat, mengoptimalkan program satu desa satu laku pandai.
3. Program akuisisi *merchant* QRIS, dengan cara menargetkan pedagang pasar *modern*, mall serta pedagang eceran.
4. Kerjasama penempatan dana dan *maintenance* dan menggali potensi nasabah korporasi eksisting minimal 5 nasabah di setiap Cabang.
5. Kerjasama pelatihan kepada 100 UMKM potensi Ekspor binaan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI).
6. Kerjasama seminar dan pelatihan Impor bersama Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia.(GINSI)

## JASA LAINNYA

Jasa lainnya terdiri atas Tresuri dan Bank Jatim Kustodian.

### Tresuri

Sejalan dengan peran Tresuri sebagai salah satu pilar pertumbuhan laba Bank Jatim yang didukung oleh tenaga profesional dan handal, Divisi Tresuri senantiasa terus meningkatkan aktivitas bisnis Tresuri. Peran utama Tresuri dalam perbankan adalah menjaga kecukupan likuiditas bank dan bertanggung jawab untuk mengelola aset dan liabilitas bank serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap laba Bank Jatim baik berupa pendapatan bunga maupun non bunga (*fee base income*). Di dalam pengelolaannya, bank menghadapi pasar global maupun domestik yang bergerak sangat dinamis sehingga harus senantiasa berjalan beriringan dengan perkembangan pasar terbaru terutama dari segi regulasi maupun dari segi bisnis.

Bisnis Tresuri, pada dasarnya sebagai pelengkap dan penyeimbang bisnis utama bank di bidang penghimpunan dana dan penyaluran kredit sebagai lembaga *intermediary*. Tresuri berfungsi untuk

mengoptimalkan *excess* dana yang ada pada berbagai instrumen Tresuri baik pada pasar uang maupun pasar modal dengan motif *yield enhancement*. Sebaliknya jika dibutuhkan dana diluar dana pihak ketiga, maka Tresuri berperan untuk mencari dana ke pasar baik melalui pinjaman antar bank, *repo* maupun penerbitan surat hutang. Bisnis *treasury* Bank Jatim mencakup transaksi pasar uang (*money market*), transaksi surat berharga (*fixed income*) dan transaksi valuta asing (*foreign exchange*) yang dilaksanakan oleh unit *dealing room* di bawah Divisi Tresuri. Transaksi tersebut bersifat *interbank* yang dilakukan dengan *counterpart* Bank maupun non bank (sekuritas).

Bisnis Tresuri Bank Jatim terdiri dari pengelolaan portofolio penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Lain, surat berharga dan *reverse repo*. Pada 2022, terdapat penurunan pengelolaan portofolio sebesar 4,48% dari Rp45.281 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp43.251 miliar pada tahun 2022. Porsi terbesar dari pengelolaan aset Tresuri terletak pada portofolio surat berharga. Selanjutnya penjabaran masing-masing portofolio adalah sebagai berikut:



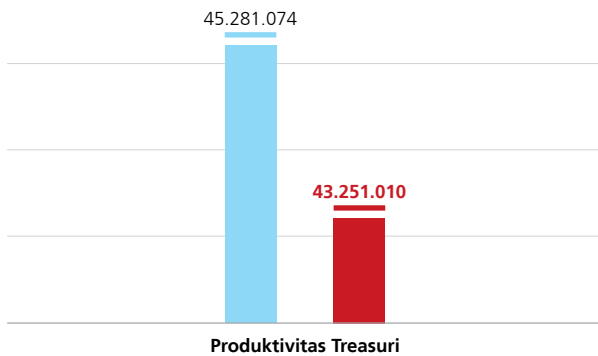
**Tabel Portofolio Tresuri Per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

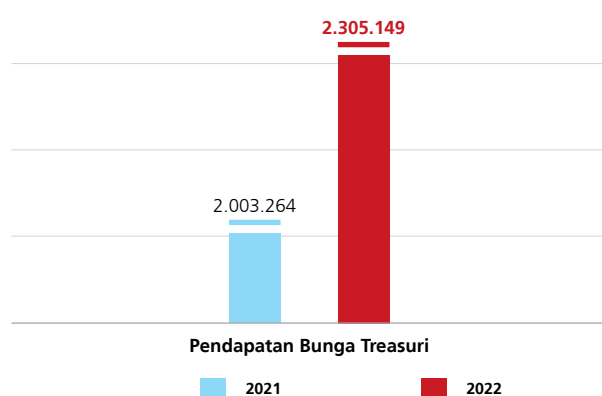
Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	2.600.000	6.900.000	(4.300.000)	(62,32%)
Penempatan pada Bank Lain	4.165.000	1.889.000	2.276.000	120,49%
Surat Berharga	22.227.550	31.016.389	(8.788.839)	(28,34%)
Tagihan <i>Reverse Repo</i>	7.813.460	3.420.685	4.392.775	128,42%
Kewajiban <i>Repo</i>	4.050.000	-	4.050.000	100,00%
Pinjaman pada Bank Lain	2.395.000	2.055.000	340.000	16,55%
<b>Total</b>	<b>43.251.010</b>	<b>45.281.074</b>	<b>(2.030.064)</b>	<b>(4,48%)</b>

**Grafik Produktivitas Tresuri**

(dalam jutaan Rupiah)


**Grafik Pendapatan Bunga Tresuri**

(dalam jutaan Rupiah)



Dari sisi pendapatan bunga atas hasil investasi seluruh portofolio yang dikelola oleh Tresuri juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tren kenaikan suku bunga yang terjadi selama tahun

2022, dimanfaatkan dengan baik meskipun dana kelolaan Tresuri mengalami penurunan. Selanjutnya rincian pendapatan bunga dari bisnis Tresuri adalah sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan Bunga Tresuri**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	64.104	131.523	(67.419)	(51,26%)
Penempatan pada Bank Lain	87.834	72.370	15.464	21,37%
Surat Berharga	1.693.450	1.420.594	272.856	19,21%
Tagihan <i>Reverse Repo</i>	459.760	378.777	80.983	21,38%
<b>Total</b>	<b>2.305.149</b>	<b>2.003.264</b>	<b>301.885</b>	<b>15,07%</b>

Sepanjang tahun 2022, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga *BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* sebanyak 200 bps dari 3,50% menjadi 5,50%. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali sejak Agustus 2022 hingga Desember 2022. Pada tahun 2022, ketegangan geopolitik yang disebabkan oleh berlanjutnya perang antara Rusia - Ukraina serta pengenaan sanksi terhadap Rusia telah mengakibatkan terbatasnya pasokan energi dan pangan dunia sehingga harga energi dan beberapa bahan pangan melonjak sangat tinggi. Sementara itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan Cina serta pembatasan mobilitas terkait Covid-19 di Cina semakin memperburuk gangguan mata rantai pasokan global dan perjalanan wisata Cina ke berbagai belahan dunia. Pada waktu bersamaan, sangat tingginya harga energi dan pangan telah menyebabkan melambungnya inflasi global dan mendorong bank-bank sentral di negara maju khususnya AS untuk meningkatkan suku bunganya secara agresif dalam rangka mengetatkan kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga The Fed AS juga mendorong menguatnya nilai tukar dolar AS dan memberikan tekanan depresiasi terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk nilai tukar Rupiah.

Kondisi likuiditas Bank Jatim selama tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun dinilai masih cukup *ample*, karena pertumbuhan kredit dan pembiayaan bank mulai tumbuh cukup signifikan. Dalam rangka optimalisasi pendapatan atas *idle fund*, bank masih memberikan porsi terbesar pada pengelolaan surat berharga di pasar modal pada tahun 2022, mengingat portofolio ini yang memberikan *return* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan instrumen lainnya. Pembelian surat berharga utamanya dimaksudkan dalam rangka pemenuhan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga digunakan sebagai instrumen investasi yang dapat menambah pendapatan bunga bagi Bank. Atas pelaksanaan strategi-strategi tersebut, maka Bank dapat mempertahankan kinerja atas bisnis Tresuri dengan pendapatan bunga atas surat berharga yang tumbuh sebesar 19,21% dari Rp1.420 miliar di tahun 2021 menjadi Rp1.693 miliar di tahun 2022.

Bank Jatim juga mampu mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap menerapkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dan Posisi Devisa Neto (PDN) sepanjang tahun 2022. Realisasi GWM Rupiah pada 31 Desember 2022 adalah sebesar 12,15% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 9%. Sedangkan realisasi GWM Valas

pada 31 Desember 2022 adalah 7,39% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 4%. Untuk PDN Bank, realisasi pada 31 Desember 2022 adalah sebesar 3,48% masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%. Selama tahun 2022, Tresuri secara keseluruhan membukukan total pendapatan bunga sebesar Rp2.305 miliar, tumbuh 15% dari tahun 2021 sebesar Rp2.003 miliar. Pendapatan tersebut juga masih ditambah *fee based income* yang berasal dari transaksi valas dan *trade finance* sebesar Rp14 miliar naik 154% dari tahun 2021 sehingga total pendapatan yang dibukukan oleh Tresuri sebesar Rp2.319 miliar.

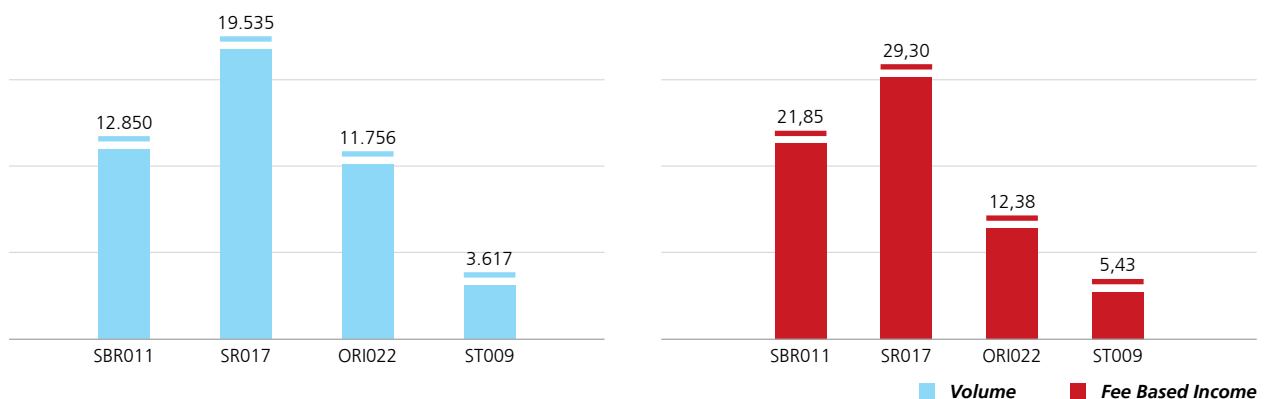
### Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Tresuri

Perkembangan bisnis Tresuri terutama untuk segmen ritel, ditopang melalui jaringan Bank Jatim yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur ditambah dengan kantor cabang yang ada di wilayah Jakarta dan Batam. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kontribusi yang berkelanjutan bagi kinerja Bank secara umum, selama tahun 2022 Tresuri melakukan *development* fitur konversi valas pada aplikasi *mobile banking* Bank. Selain itu, Tresuri juga melakukan pengembangan instrumen transaksi jual beli valuta asing dengan nasabah dalam hal ini disebut *Instrument FX Forward*. *FX Forward* merupakan salah satu instrumen *hedging* (lindung nilai) yang dapat dinikmati oleh nasabah dengan tujuan nasabah dapat terhindar dari risiko selisih kurs atas pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Di samping itu nasabah mendapatkan kepastian kurs sesuai kontrak yang disepakati sehingga nasabah mendapatkan kepastian *cash flow* baik yang akan diterima maupun yang akan dikeluarkan.

Untuk segmen transaksi surat berharga dengan nasabah, Tresuri juga menginisiasi pengembangan aplikasi *JConnect Invest* yang merupakan platform investasi surat berharga *online* berbasis *mobile* yang dapat diunduh pada *playstore* dan *Appstore* serta terintegrasi dengan mitra distribusi dan Kementerian Keuangan. *JConnect Invest* dihadirkan dalam rangka *added value* bagi nasabah sebagai strategi Bank Jatim dalam kompetisi perbankan di era digitalisasi. Aplikasi ini menyediakan produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan penawaran di pasar perdana yang dapat digunakan oleh nasabah bank untuk melakukan investasi surat berharga. Aplikasi *JConnect Invest launching* pada bulan Maret 2022 dengan penawaran perdana produk SBR011 dengan total penawaran 4 seri SBN Ritel sepanjang tahun 2022. Berikut ini aktivitas penjualan SBN Ritel melalui *JConnect Invest* selama tahun 2022:

### Grafik Aktivitas Penjualan SBN Ritel Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)



### Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Tresuri Tahun 2023

Tahun 2023, Bank Jatim masih akan menghadapi tahun yang menantang bagi bisnis Tresuri akibat ketidakpastian yang disebabkan meningkatnya risiko resesi di berbagai negara terutama yang ada di Kawasan AS, Eropa dan Amerika Latin. Tresuri akan terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis bank baik dari sisi pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana, peningkatan laba maupun peningkatan transaksi. Tresuri masih akan melakukan optimalisasi *idle fund* melalui investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pada instrumen-instrumen yang menghasilkan imbal hasil yang cukup tinggi bagi Bank terutama dengan mempertahankan besaran portfolio surat berharga yang ada.

Dalam rangka peningkatan transaksi dan memperoleh *fee based income* serta memperluas *market share* bank, Tresuri akan mengembangkan digitalisasi yang telah menjadi *trend* serta mengubah gaya hidup masyarakat disegala lapisan dimana salah satu segmen yang secara masif bertransformasi berbasis digital adalah dunia perbankan. Untuk dapat bersaing di tengah gempuran kompetitor serta sebagai bentuk keseriusan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, di tahun 2023 dikembangkan layanan perbankan berbasis digital yaitu *Mobile Cross Currency*. *Mobile Cross Currency* merupakan aplikasi berupa *mobile banking* untuk transaksi jual beli valuta asing terhadap mata uang Rupiah. Layanan ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan

Produktivitas Bank Jatim Kustodian diuraikan sebagai berikut:

nasabah terkait jual beli valuta asing dimanapun dan kapanpun secara mudah tanpa harus datang ke kantor layanan. Diharapkan hal tersebut dapat mempermudah nasabah Bank Jatim khususnya untuk dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja.

### Bank Jatim Kustodian

Jasa Kustodian Bank Jatim mendapatkan ijin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK nomor: S4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Jatim Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana dan Jasa, Sub Divisi *Priority Banking* dan Kustodian, adapun jasa-jasa yang diberikan di antaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas efek (*corporate bond, medium term notes, negotiable certificate of deposit, sukuk, dan lain-lain*) berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*)
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli efek.
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*).
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi efek.
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan efek yang disimpan dan di administrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

**Tabel Produktivitas Bank Jatim Kustodian**

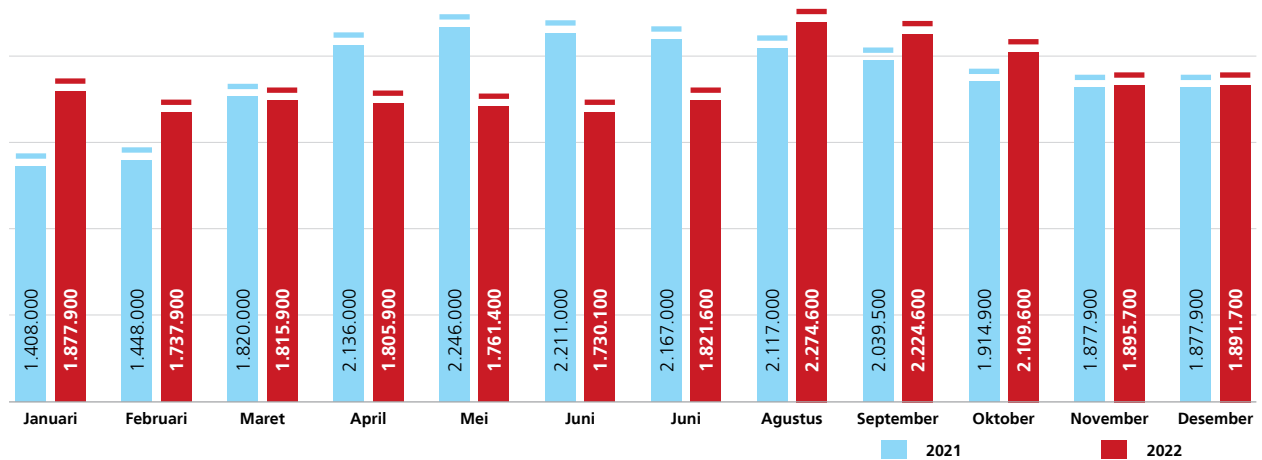
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
<i>Asset Under Custody</i>				
Januari	1.877.900	1.408.000	469.900	33,37%
Februari	1.737.900	1.448.000	289.900	20,02%
Maret	1.815.900	1.820.000	(4.100)	(0,23%)
April	1.805.900	2.136.000	(330.100)	(15,45%)
Mei	1.761.400	2.246.000	(484.600)	(21,58%)
Juni	1.730.100	2.211.000	(480.900)	(21,75%)
Juli	1.821.600	2.167.000	(345.400)	(15,94%)
Agustus	2.274.600	2.117.000	157.600	7,44%
September	2.224.600	2.039.500	185.100	9,08%
Oktober	2.109.600	1.914.900	194.700	10,17%
November	1.895.700	1.877.900	17.800	0,95%
Desember	1.891.700	1.877.900	13.800	0,73%
Efek Mature	1.291.900	614.100	677.800	110,37%

Jumlah *asset under custody* tahun 2022 mencapai Rp1,89 triliun, meningkat sebesar 0,73% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1,88 triliun.

## Grafik Dana Kelolaan Efek Bank Jatim Kustodian

(dalam jutaan Rupiah)



Nasabah jasa kustodian berasal dari internal Bank Jatim, sehingga tidak terdapat pendapatan dan *profit* atas aktivitas ini. Namun terdapat efisiensi biaya atas Efek yang sebelumnya oleh Divisi Tresuri disimpan di bank kustodian lain. Dan besar penghematan untuk pengelolaan efek di tahun 2022 mencapai Rp789,932,111.11.

### Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2022

Strategi yang telah dilakukan oleh Bank Jatim kustodian sepanjang tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
2. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
3. Melakukan kerja sama Layanan Jasa Kustodian dengan Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Timur.
4. Memasarkan jasa kustodian ke sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan biaya penyimpanan lebih kompetitif.

### Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bank Jatim Kustodian

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki oleh Bank Jatim Kustodian adalah sebagai berikut:

1. Biaya *safe keeping* kompetitif.
2. Memberikan layanan tambahan terkait pelaporan secara *free*.

### Prospek Usaha Bank Jatim Kustodian Tahun 2023

Prospek usaha Bank Jatim Kustodian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun Bank Jatim.
2. Kerjasama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
3. Kerjasama Layanan Jasa Kustodian dengan perusahaan BUMD dan Perusahaan Swasta di wilayah Jawa Timur.
4. Kerjasama Layanan Jasa Kustodian dengan BPD di Indonesia.

### Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2023

Strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim kustodian untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembuatan sistem membentuk SID dan SRE melalui J-Invest yang tersinkronisasi dengan CBEST.
2. *Update system core* kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi, penyampaian *proxy* secara elektronik dan penyesuaian dengan C-Best Next G.
3. Pengembangan *system core* kustodian terkait fasilitas *menu inquiry* portofolio nasabah kustodian.
4. Memasarkan jasa kustodian ke sesama Bank BPD dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.

## Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

Pendapatan operasional segmen konvensional tahun 2022 mencapai Rp5.975.236 juta, meningkat sebesar 12,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.292.316 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga.

Laba operasional segmen konvensional tahun 2022 mencapai Rp190.203.035 juta, meningkat sebesar 7,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.777.161 juta. Hal tersebut berasal dari menurunnya pembentukan CKPN kredit.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset	99.959.909	96.886.535	3.073.374	3,17%
Liabilitas	88.554.718	85.990.345	2.564.373	2,98%
Pendapatan operasional	5.975.236	5.292.316	682.920	12,90%
Laba operasional	1.902.035	1.777.161	124.874	7,03%

## Segmen Syariah

Segmen Syariah Bank Jatim, terdiri atas dana pihak ketiga/ simpanan, pembiayaan dan jasa layanan. Perluasan jaringan menjadi faktor pendukung berkembangnya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui jaringan UUS yang meliputi 7 (tujuh)

Kantor Cabang Syariah, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 3 (tiga) Kantor Fungsional Syariah, 8 (delapan) *Payment Point* Syariah, 105 Agen Laku Pandai Syariah, 195 Kantor Layanan Syariah (KLS), 26 (dua puluh enam) Mesin ATM, 7 (tujuh) Mesin ATM CRM dan 7 (tujuh) Mobil Kas Keliling.

## Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

### FUNDING

Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah terdiri dari Giro iB Barokah (Wadi'ah), Giro iB Barokah (Mudharabah), Tabungan Sempel iB, TabunganKu iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan SiPandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan iB Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana

iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah serta Deposito Barokah. Penjelasan masing-masing produk *funding* syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian jumlah *Funding* Segmen Syariah disajikan sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Funding**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (Wadi'ah)	156.090	110.616	45.474	41,11%
Giro iB Barokah (Mudharabah)	1.636	2.920	(1.284)	(43,97%)
Tabungan Sempel iB	7.083	5.076	2.007	39,54%
TabunganKu iB	56.222	52.767	3.455	6,55%
Tabungan Umroh iB Amanah	4.004	4.153	(149)	(3,59%)
Tabungan SiPandai iB Barokah	15	-	15	100,00%
Tabungan Santri	13	-	13	100,00%
Tabungan Barokah	297.416	293.916	3.500	1,19%
Tabungan iB Barokah Sejahtera	7.374	1.522	5.852	384,49%
Tabungan Haji iB Amanah	288.567	275.510	13.057	4,74%
Tabungan Rencana iB Barokah	1.217	1.190	27	2,27%
Tabungan Pensiun iB Barokah	23	20	3	15,00%
Deposito Barokah	1.245.458	1.238.104	7.354	0,59%
<b>Total</b>	<b>2.065.118</b>	<b>1.985.794</b>	<b>79.324</b>	<b>3,99%</b>

Realisasi DPK Syariah tahun 2022 adalah sebesar Rp2,06 triliun, meningkat sebesar Rp79,32 miliar atau 3,99% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,98 triliun. Sedangkan CASA meningkat sebesar Rp71,9 miliar atau 9,63% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp747,69 miliar.

Berdasarkan pencapaian DPK tahun 2022, terdapat tiga produk yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan komposisi DPK tahun

2021 yaitu Tabungan iB Barokah Sejahtera sebesar Rp5,85 miliar atau 384,49%, Giro iB Barokah (Wadi'ah) sebesar Rp45,4 miliar atau 41,11% serta Tabungan Simpel iB sebesar Rp2,01 miliar atau 39,54%.

Sedangkan produk DPK yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 adalah Giro iB Barokah (Mudharabah) sebesar Rp1,28 miliar atau 43,97% serta Tabungan Umroh iB Amanah sebesar Rp149 juta atau 3,59%.

Uraian jumlah nasabah *Funding* Segmen Syariah disajikan sebagai berikut:

**Tabel Nasabah *Funding***

(dalam jumlah nasabah)

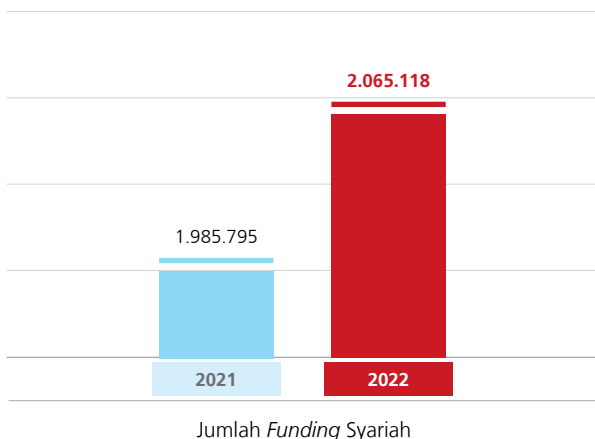
Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (Wadi'ah)	1.467	1.332	135	10,14%
Giro iB Barokah (Mudharabah)	6	4	2	50,00%
Tabungan Simpel iB	45.989	33.563	12.426	37,02%
TabunganKu iB	36.918	32.841	4.077	12,41%
Tabungan Umroh iB Amanah	1.693	1.547	146	9,44%
Tabungan SiPandai iB Barokah	388	-	388	100,00%
Tabungan Santri	1.338	-	1.338	100,00%
Tabungan Barokah	46.057	42.190	3.867	9,17%
Tabungan iB Barokah Sejahtera	77	15	62	413,33%
Tabungan Haji iB Amanah	127.671	124.674	2.997	2,40%
Tabungan Rencana iB Barokah	305	257	48	18,68%
Tabungan Pensiun iB Barokah	9	8	1	12,50%
Deposito Barokah	2.752	2.768	(16)	(0,58%)
<b>Total</b>	<b>264.670</b>	<b>239.199</b>	<b>25.471</b>	<b>10,65%</b>

Pertumbuhan jumlah DPK diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah. Tahun 2022, Jumlah nasabah DPK UUS Bank Jatim sebesar 264.670 nasabah meningkat sebesar 25.471 nasabah atau 10,65% dibandingkan tahun 2021.

Secara umum, jumlah nasabah di sebagian produk DPK UUS Bank Jatim mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 namun hanya satu produk yang mengalami penurunan yaitu Deposito Barokah sebesar 16 nasabah atau 0,58%.

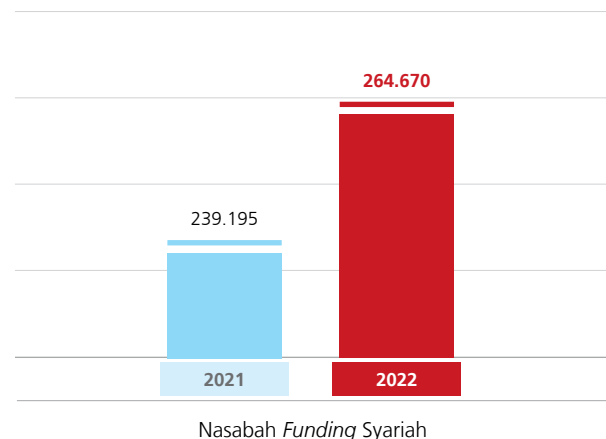
**Grafik Pertumbuhan Jumlah *Funding* Syariah**

(dalam Jutaan Rupiah)



**Grafik Pertumbuhan Jumlah Nasabah *Funding* Syariah**

(dalam Jutaan Rupiah)



Uraian kinerja masing-masing produk *funding* disajikan sebagai berikut:

- **Giro iB Barokah (Wadi'ah)**  
Giro iB Barokah (Wadi'ah) mengalami peningkatan sebesar Rp45,47 miliar atau 41,11% dari tahun 2021 sebesar Rp110,62 miliar menjadi Rp156,09 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (Wadi'ah) tumbuh sebanyak 135 nasabah atau 10,14% dibanding tahun 2021.
- **Giro iB Barokah (Mudharabah)**  
Giro iB Barokah (Mudharabah) mengalami penurunan sebesar Rp1,28 miliar atau 43,97% dari tahun 2021 sebesar Rp2,92 miliar menjadi Rp1,64 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (Mudharabah) mengalami kenaikan sebanyak 2 nasabah atau 50,00%, dari 4 Nasabah di tahun 2021 menjadi 6 nasabah di tahun 2022.
- **Tabungan Sempel iB**  
Tabungan Sempel iB mengalami peningkatan sebesar Rp2,01 miliar atau 39,54% dari sebesar Rp5,08 miliar menjadi Rp7,08 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Sempel iB mengalami kenaikan sebanyak 12.426 nasabah atau 37,02% dibanding tahun 2021.
- **TabunganKu iB**  
TabunganKu iB mengalami peningkatan sebesar Rp3,46 miliar atau 6,55% dari sebesar Rp52,77 miliar menjadi Rp56,22 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, TabunganKu iB mengalami kenaikan sebanyak 4.077 nasabah atau 12,41% dibanding tahun 2021.
- **Tabungan Umroh iB Amanah**  
Tabungan Umroh iB Amanah mengalami penurunan sebesar Rp149 juta atau 3,59% dari sebesar Rp4,15 miliar menjadi Rp4,00 miliar pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan sebagian besar nasabah menarik dananya untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh, karena mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama perjalanan umroh dibuka setelah ditutup lama pasca pandemi Covid-19. Namun dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami kenaikan sebanyak 146 atau 9,44% nasabah di tahun 2022.
- **Tabungan SiPandai iB Barokah**  
Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp15 juta dari belum ada realisasi menjadi Rp15 juta pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami kenaikan sebanyak 388 nasabah dibanding tahun 2021.

## PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan Syariah terdiri atas Pembiayaan Konsumer, Ritel dan Komersial. Pembiayaan Konsumer meliputi Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas iB Barokah, Umroh iB Maqbullah, Talangan Haji Al Mabruur. Pembiayaan Ritel meliputi

- **Tabungan Santri**  
Tabungan Santri mengalami peningkatan sebesar Rp13 juta dari belum ada realisasi menjadi Rp12 juta pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Santri mengalami peningkatan sebanyak 1.388 nasabah dibanding tahun 2021.
- **Tabungan Barokah**  
Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp3,50 miliar atau 1,19% dari sebesar Rp293,92 miliar menjadi Rp297,42 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebanyak 3.867 nasabah atau 9,17% dibanding tahun 2021.
- **Tabungan iB Barokah Sejahtera**  
Tabungan iB Barokah Sejahtera mengalami peningkatan sebesar Rp5,85 miliar atau 384,49% dari sebesar Rp1,52 miliar menjadi Rp7,37 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan iB Barokah Sejahtera mengalami peningkatan sebanyak 62 nasabah atau 413,33% dibanding tahun 2021.
- **Tabungan Haji iB Amanah**  
Tabungan Haji iB Amanah mengalami peningkatan sebesar Rp13,06 miliar atau 4,74% dari sebesar Rp275,51 miliar menjadi Rp288,57 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, mengalami peningkatan sebanyak 2.997 nasabah atau 2,40% dibanding tahun 2021.
- **Tabungan Rencana iB Barokah**  
Tabungan Rencana iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp27 juta atau 2,27% dari sebesar Rp1,1 miliar menjadi Rp1,2 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Rencana iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 48 nasabah atau 18,68% dibanding tahun 2021.
- **Tabungan Pensiun iB Barokah**  
Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp3 juta atau 15,00% dari sebesar Rp20 juta menjadi Rp23 juta pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 1 nasabah atau 12,50% dibanding tahun 2021.
- **Deposito Barokah**  
Deposito Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp7,35 miliar atau 0,59% dari sebesar Rp1,24 miliar menjadi Rp1,25 miliar pada tahun 2022. Dari sisi jumlah nasabah, Deposito Barokah mengalami penurunan sebanyak 16 nasabah dibanding tahun 2021, dikarenakan pada tahun 2022 nasabah diarahkan untuk berinvestasi melalui giro dan tabungan agar CASA meningkat

*Linkage* Program serta Pembiayaan Komersial meliputi Pembiayaan Umum dan Pembiayaan Modal Kerja Keppres Penjelasan masing-masing produk Pembiayaan Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.



Uraian jumlah Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Pembiayaan Syariah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
<b>Konsumer</b>				
Gadai	22.568	22.359	209	0,94%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	726.913	704.325	22.588	3,21%
KPR Umum	269.441	290.026	(20.585)	(7,10%)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	457.473	414.299	43.174	10,42%
Pembiayaan Pegawai	144.281	152.692	(8.411)	(5,51%)
Multiguna	65.248	67.100	(1.852)	(2,76%)
Kepemilikan Logam Emas (KLE)	1.443	0	1.443	100,00%
Talangan Umroh	276	18	258	1.436%
Talangan haji	90	113	(23)	(20,35%)
Sub Total Konsumer	960.819	946.607	14.212	1,50%
<b>Linkage</b>	<b>69.233</b>	<b>43.196</b>	<b>26.037</b>	<b>60,27%</b>
a. Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	49.796	33.213	16.583	49,93%
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	19.437	9.984	9.453	94,69%
<b>Umum</b>	<b>794.949</b>	<b>710.282</b>	<b>84.667</b>	<b>11,92%</b>
a. Investasi	484.098	458.175	25.923	5,66%
b. Modal Kerja	297.087	249.606	47.481	19,02%
c. Anjak Piutang	13.765	2.500	11.265	450,59%
Keppres	78.470	62.283	16.187	25,99%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0	0	0	0%
Mikro Kecil	0	0	0	0%
Sub Total Menengah Korporasi	942.652	815.761	126.891	15,55%
<b>Total</b>	<b>1.903.471</b>	<b>1.762.368</b>	<b>141.103</b>	<b>8,01%</b>

Jumlah Pembiayaan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1,90 triliun naik sebesar Rp141,10 miliar atau 8,01% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,76 triliun yang terdiri dari Gadai Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas (KLE), Talangan Haji Al Mabruur, Umroh iB Maqbulah, Pembiayaan *Linkage*

Program, Pembiayaan Umum, dan Pembiayaan KEPPRES. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa Skim Pembiayaan di antaranya Pembiayaan Umum Modal Kerja sebesar Rp47,48 miliar atau 19,02%, pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp43,17 miliar atau 10,42% dan Pembiayaan Investasi sebesar Rp25,92 miliar atau 5,66%.

Komposisi Pembiayaan tahun 2022 dikontribusikan terbesar oleh pembiayaan umum modal kerja dimana bank Jatim syariah turut serta dalam pembiayaan sindikasi modal kerja PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) dimana penyaluran pembiayaan adalah membantu usaha UMKM dan pembiayaan investasi sindikasi PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PT PPSD) dimana penyaluran pembiayaan adalah untuk pembangunan jalan tol Semarang Demak. Kenaikan Pembiayaan Umum adalah sebesar 11,92% dengan kenaikan *outstanding* pembiayaan mencapai Rp84,667 miliar. Pembiayaan terbesar kedua adalah Pembiayaan KPR Sejahtera (FLPP) yang masih menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan kepada para MBR karena UUS Bank Jatim turut serta dalam mendukung program Pemerintah dalam penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, yang pada

tahun 2022 pencapaiannya pun sangat memuaskan. Adapun kenaikan *outstanding* KPR Sejahtera (FLPP) yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar Rp43,17 miliar dengan persentase kenaikan sebesar 10,42% dari tahun 2021, sedangkan komposisi KPR-FLPP terhadap total *outstanding* KPR adalah sebesar 62,93%

Pertumbuhan jumlah pembiayaan diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah, sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah nasabah Bank Jatim tercatat sebanyak 8.508 nasabah, mengalami kenaikan sebanyak 406 nasabah atau 5,01% dibanding dengan tahun 2021 sebanyak 8.102 nasabah. Kenaikan jumlah nasabah pada tahun 2022 dikarenakan adanya produk pembiayaan KPR Sejahtera sebesar 341 nasabah.

Uraian jumlah nasabah Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan Syariah**

(dalam jumlah nasabah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
<b>Konsumer</b>				
Gadai	1.195	1.214	(19)	(1,57%)
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	5.135	4.882	253	5,18%
KPR Umum	1.346	1.434	(88)	(6,14%)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	3.789	3.448	341	9,89%
Pembiayaan Pegawai	406	358	48	13,4%
Multiguna	858	932	(74)	(7,94%)
Kepemilikan Logam Emas (KLE)	113	-	113	100,00%
Talangan Umroh	7	2	5	250,00%
Talangan Haji	4	5	(1)	20,00%
<b>Sub Total Konsumer</b>	<b>7.718</b>	<b>7.393</b>	<b>325</b>	<b>4,40%</b>
<b>Linkage</b>				
a. Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	216	207	9	4,35%
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	7	5	2	40,00%
Umum	504	452	52	11,50%
a. Investasi	183	174	9	5,17%
b. Modal Kerja	312	277	35	12,64%
c. Anjak Piutang	9	1	8	800,00%

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Keppres	63	45	18	40,00%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	-	-	-	-
Mikro Kecil	-	-	-	-
Sub Total Menengah Korporasi	790	709	81	11,42%
<b>Total</b>	<b>8.508</b>	<b>8.102</b>	<b>406</b>	<b>5,01%</b>

Uraian kinerja masing-masing produk pembiayaan syariah disajikan sebagai berikut:

### 1. Segmen Konsumer

#### a. Emas iB Barokah (Gadai)

Selama tahun 2022, terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan melalui Emas iB Barokah mencapai Rp209 juta atau 0,94% dari sebesar Rp22,359 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp22,568 miliar pada tahun 2022. Meskipun terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan, namun jumlah nasabah mengalami penurunan sebanyak 19 nasabah pada tahun 2022 dari semula 1.214 nasabah menjadi 1.195 pada tahun 2022.

#### b. KPR iB Griya Barokah

Komposisi KPR Bank Jatim UUS adalah KPR Komersil dan KPR FLPP. Total *outstanding* KPR pada tahun 2022 adalah Rp726,913 miliar mengalami peningkatan sebesar 3,21% dari pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp704,325 miliar. Pada tahun 2022, penyaluran KPR umum mengalami penurunan sebesar 7,10%, namun penyaluran KPR FLPP mengalami peningkatan sebesar 10,42% dengan penyaluran pada tahun 2022 sebesar Rp43,174 miliar yang disalurkan kepada 341 nasabah baru KPR FLPP.

#### c. Multiguna iB Barokah

Selama tahun 2022, UUS Bank Jatim telah mencatatkan penurunan penyaluran pembiayaan Multiguna iB Barokah sebesar Rp1,85 miliar atau 2,76% dari sebesar Rp67,1 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp65,29 miliar pada tahun 2022. Penurunan tersebut juga diiringi oleh penurunan jumlah nasabah sebanyak 74 nasabah atau 7,94% dari 932 nasabah menjadi sebanyak 858 nasabah pada tahun 2022.

#### d. Kepemilikan Logam Emas iB Barokah

Selama tahun 2022, terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan melalui Kepemilikan Logam Emas sebesar Rp1,44 miliar atau 100,00% dari sebesar Rp0 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,443 miliar pada tahun 2022. Hal tersebut juga diiringi oleh kenaikan jumlah nasabah sebanyak 113 nasabah pada tahun 2022 dari semula tidak ada nasabah pada tahun 2021.

#### e. Umroh iB Maqbullah

Penyaluran produk Talangan Umroh iB Maqbullah mengalami peningkatan sebesar 1.436% dari sebesar Rp18 juta pada tahun 2021 menjadi Rp276 juta tahun 2022. Hal tersebut juga diikuti oleh kenaikan nasabah dari 2 nasabah menjadi 7 nasabah pada tahun 2022.

#### f. Talangan Haji

Penyaluran produk Talangan Haji mengalami penurunan sebesar 20,00% dari sebesar Rp113 juta pada tahun 2021 menjadi Rp90 juta tahun 2022. Hal tersebut juga diikuti oleh turunnya nasabah dari 5 nasabah menjadi 4 nasabah pada tahun 2022.

### 2. Segmen Ritel

#### a. Linkage Program

Selama tahun 2022, UUS Bank Jatim telah mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan dengan pola *Linkage Program* mencapai Rp26,04 miliar atau 60,27% dari sebesar Rp43,20 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp69,23 miliar pada tahun 2022. Peningkatan tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah nasabah sebanyak 11 nasabah atau 5,19% dari 212 nasabah menjadi sebanyak 223 nasabah pada tahun 2022.

### 3. Segmen Komersial

#### a. Pembiayaan Umum

Pembiayaan Umum adalah pembiayaan bagi usaha baik individu maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi. Selama tahun 2022, UUS Bank Jatim telah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan umum sebesar Rp84,67 miliar atau 11,92% dari sebesar Rp710,28 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp794,95 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut juga diiringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah, jumlah nasabah pembiayaan umum mengalami peningkatan sebanyak 52 nasabah atau 11,50% menjadi sebanyak 504 nasabah pada tahun 2022.

#### b. Pembiayaan Modal Kerja Keppres

Selama tahun 2022, UUS Bank Jatim mengalami kenaikan penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Kepres mencapai Rp16,19 miliar atau 25,99% dari sebesar Rp62,28 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp78,47 miliar pada tahun 2022. Kenaikan tersebut diiringi juga dengan kenaikan jumlah nasabah, jumlah nasabah Pembiayaan Modal Kerja Keppres mengalami kenaikan sebanyak 18 nasabah atau 40,00% menjadi sebanyak 63 nasabah pada tahun 2022.

## JASA LAINNYA - SYARIAH

Bisnis Tresuri Syariah mencakup transaksi pasar uang dan surat berharga yang dilaksanakan oleh Grup Tresuri Syariah di bawah Divisi Bisnis Syariah. Portofolio Tresuri Syariah meliputi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sukuk Bank Indonesia

(SukBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), Reksa Dana Pasar Uang (RDSPU), Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Uraian Produktivitas Tresuri Syariah disajikan sebagai berikut:

**Tabel Produktivitas Tresuri Syariah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	145.000	1.127.000	(982.000)	(87,13%)
Deposito Antar Bank	228	3.000	(2.772)	(92,40%)
Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	400.000	541.392	(141.392)	(26,12%)
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA)	325.000	139.000	186.000	133,81%
Reksa Dana Pasar Uang (RDSPU)	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT)	25.000	44.000	(19.000)	(43,18%)
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	102.935	110.360	(7.425)	(6,73%)
<b>Jumlah</b>	<b>998.163</b>	<b>1.964.752</b>	<b>(966.589)</b>	<b>(49,20%)</b>

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah instrumen operasi moneter syariah melalui *standing facilities* di mana Bank melakukan penempatan dana Rupiah di Bank Indonesia yang bertujuan untuk penyerapan likuiditas Bank. Pada tahun 2022, FASBIS Unit Usaha Bank Jatim tercatat sebesar Rp145,00 miliar, turun sebesar Rp982,00 miliar atau 87,13% dari Desember 2021. Penurunan tersebut sebagai akibat perubahan strategi penempatan investasi dengan optimalisasi pengelolaan kepada instrumen dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari FASBIS, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah salah satu instrumen Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia lainnya yang berfungsi sebagai alat kontraksi untuk menyerap likuiditas berlebih (*absorb*). Instrumen ini memiliki pilihan tenor 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, 28 (dua puluh delapan) hari, dan 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2022, Unit Usaha Syariah Bank Jatim aktif dalam keikutsertaan lelang SUKBI dan menjadi alternatif penempatan untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek. Pada Bulan Desember 2022, SUKBI Unit Usaha Syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp400,00 miliar yaitu turun Rp141,39 miliar dibanding bulan Desember 2021. Hal tersebut dikarenakan preferensi aktivitas penempatan *idle fund* yang dikelola Unit Usaha Bank Jatim beralih sebagian ke instrumen dengan jangka waktu yang lebih pendek yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dengan pertimbangan kesiapan likuiditas.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Posisi penempatan SIMA Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2022 sebesar Rp325,00 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp186,00 miliar atau 133,81% dibanding Desember 2021.

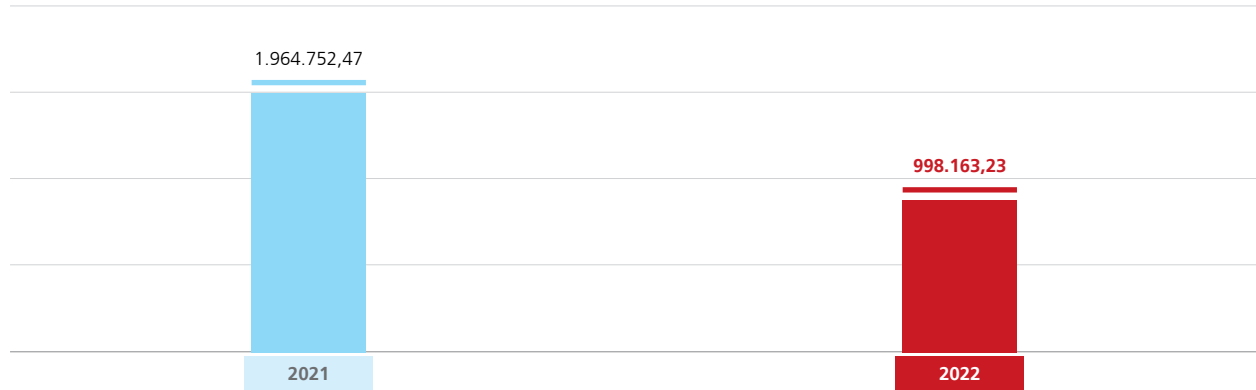
Sertifikat Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim pada Desember 2022 adalah total sebesar Rp25,00 miliar. Nominal portofolio tersebut turun 43,18% dibanding dengan Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan adanya sertifikat Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas yang jatuh tempo selama tahun 2022.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atas bagian penyertaan terhadap aset dengan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pada posisi Desember 2022, jenis SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah Sukuk Ritel dengan akad *ljarah Asset to be Leased* dan *Project Based Sukuk* dengan akad *ljarah Asset to be Leased*. Secara keseluruhan, SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim mengalami penurunan sebesar Rp7,43 miliar atau 6,73% dari Rp110,36 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp102,94 miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya amortisasi premium dan diskon surat berharga serta preferensi aktivitas penempatan *idle fund* yang dikelola Unit Usaha Bank Jatim beralih ke instrumen berjangka waktu pendek untuk kebutuhan likuiditas.

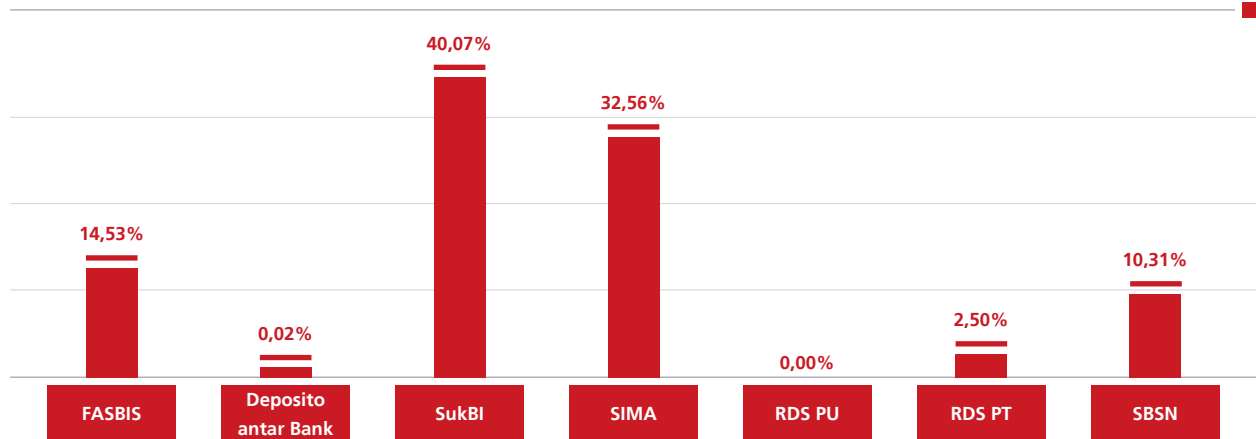
Secara keseluruhan pada bulan Desember 2022, dana kelolaan Tresuri Unit Usaha Syariah Bank Jatim mencapai Rp998,16 miliar atau turun 49,20% dari Desember 2021. Dari jumlah pencapaian tersebut, 87,18% merupakan penempatan dengan jangka waktu pendek, dan hanya 12,82% penempatan berjangka waktu panjang.

### Grafik Portofolio Dana Kelolaan *Idle* Tresuri Syariah

(dalam Jutaan Rupiah)



### Grafik Komposisi Pengelolaan Dana *Idle Treasury* Syariah



Adapun 3 (tiga) komposisi terbesar yaitu 40,07% penempatan pada SUKBI dengan portofolio Rp400,00 miliar, 32,56% pada investasi SIMA dengan portofolio sebesar Rp325,00 miliar, dan 14,52% FASBIS dengan portofolio Rp145,00 miliar.

#### Strategi Segmen Syariah Tahun 2022

Strategi *funding* dan pembiayaan Segmen Syariah yang dilakukan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- **Strategi *Funding* Tahun 2022**

Strategi *funding* Segmen Syariah yaitu melalui peningkatan CASA dan *fee based income* yang diuraikan sebagai berikut

1. Program Tebar Barokah Periode 3

Pemberian hadiah kepada nasabah dengan sistem *redeem point* dimana nasabah yang berhak mendapatkan poin adalah nasabah dengan saldo rata-rata di akhir bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. Sedangkan yang berhak melakukan *redeem point* adalah nasabah yang telah memperoleh 500 poin.

2. Program Haji Barokah *Batch 4*

Pemberian souvenir khusus berupa alat sholat dan lain-lain untuk nasabah yang mendaftar setoran awal haji baik di cabang syariah maupun konvensional diharapkan dapat meningkatkan NOA dan DPK Tabungan Haji iB Amanah mengingat di masa Pandemi terjadi penurunan nasabah yang mendaftar porsi haji.

3. Pemberian *Reward* untuk Kantor Layanan Syariah (KLS)

dengan perolehan Tabungan Haji iB Amanah terbanyak. Pemberian *reward* kepada KLS dengan perolehan Tabungan Haji iB Barokah terbanyak diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah NoA dan Nominal DPK Tabungan Haji iB Amanah.

4. Program Tabungan iB Barokah Sejahtera (TBS) Batch 6. Program TBS Batch 6 merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah DPK khususnya CASA dimana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan mengendapkan saldo sampai dengan jangka waktu tertentu.
  5. *Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (Deposito, Tabungan, Giro)
 

Aktifitas tambahan bagi petugas pemasaran untuk menghubungi nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo merupakan upaya Bank Jatim Syariah untuk meningkatkan saldo DPK. Hal ini lebih mudah dilakukan dikarenakan nasabah *dormant* sebelumnya sudah mengenal Bank Jatim Syariah sehingga diharapkan aktivitas ini menimbulkan minat nasabah untuk menggunakan produk dan layanan Bank Jatim Syariah.
  6. *Webinar* Secara Berkala
 

*Webinar* akan dilakukan secara berkala dengan mitra Bank Jatim Syariah dengan tema yang berbeda setiap bulannya diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat akan posisi Bank Jatim Syariah di Jawa Timur serta produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank Jatim Syariah.
  7. *Gathering* dengan Mitra dan Nasabah secara berkala
 

*Gathering* akan dilakukan secara berkala dengan mitra dan Nasabah Bank Jatim Syariah sebagai upaya dalam mempertahankan pelayanan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan jumlah transaksi nasabah di Bank Jatim Syariah.
  8. Kerjasama dengan Ekosistem Keuangan Syariah
 

Peningkatan Kerjasama yang telah berjalan dengan Ekosistem Keuangan Syariah seperti: OPOP Jatim, Dewan Masjid Indonesia (DMI), LazisNu, LazisMu, LP-Maarif, *Halal Value Chain*, *Halal Industrial Park* Sidoarjo.
  9. Pemberian *Cashcading* ke Cabang Syariah *Database* Calon Nasabah
 

Pemberian *Cashcading* ke Cabang Syariah berupa *database* calon nasabah/komunitas yang telah menjalin kerjasama dengan Bank Jatim Syariah untuk dibuat agenda bulanan.
  10. Peningkatan *Brand Awareness* Syariah
 

Kerjasama dengan lembaga berbasis Islam untuk penyaluran manfaat wakaf atau bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Jawa Timur, penyaluran bantuan sosial fakir dhuafa, bantuan pendidikan pelajar yatim, dan bantuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
- **Strategi Pembiayaan Tahun 2022**

Langkah-langkah strategis pembiayaan yang merupakan agenda prioritas yang ditempuh pada periode tahun 2022, meliputi:

    1. Mengoptimalkan rencana pencairan pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan lain yang sudah disetujui yang belum terealisasi di Triwulan kedua.
    2. Percepatan proses untuk usulan pembiayaan yang sudah masuk proses di Kantor Pusat UUS Bank Jatim.
    3. Optimalisasi Tenaga Analis
      - a. Target ekspansi pembiayaan masing-masing analis di setiap cabang adalah sebesar Rp650 juta *nett* setiap bulan.
      - b. Pemberian *reward*/insentif didasarkan atas pencapaian kinerja masing-masing analis.
  - 4. Kerjasama dengan PT Makmur Berkas Amanda (MBA) dalam mensukseskan program Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Jatim untuk menciptakan Jatim Bangkit tahun 2021, yang merupakan potensi pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian gudang untuk investasi.
  - 5. Pendekatan Ke *Developer*/Pengembang
    - a. Target closing pembiayaan KPR minimal 3 (tiga) *user* per bulan untuk masing-masing *developer* yang sudah PKS dengan cabang syariah.
    - b. Kerjasama dengan Komunitas-komunitas *developer* seperti Himpera, Apersi, Apernas, REI, dan lain-lain.
  - 6. Pendekatan dengan Komunitas UMKM
    - a. Kerjasama dengan Muslimat NU seluruh Jawa Timur untuk penyaluran pembiayaan mikro.
    - b. Kerjasama dengan Kopontren di seluruh Jawa Timur dalam program Program *One Pesantren One Product* (OPOP).
  - 7. Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan *Linkage* BMT/BPRS
    - a. Penyaluran kepada BPRS milik pemda ataupun swasta yang memiliki bonafiditas dan kredibilitas yang tinggi.
    - b. Mengaktifkan kembali penyaluran pembiayaan kepada koperasi, baik penyaluran dengan Pola Eksekuting maupun Pola *Chanelling*.

#### Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Syariah

Keunggulan kompetitif diperoleh melalui akad syariah yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara syariah dan terhindar dari transaksi ribawi. Namun demikian inovasi perlu diciptakan untuk menjaga kenyamanan nasabah yang memilih transaksi secara syariah, di antaranya adalah inovasi digital syariah. Melalui produk dan akad yang berbeda, produk syariah dapat menjadi alternatif untuk nasabah dalam rangka meningkatkan investasi yang berkeadilan dengan bagi hasil yang menarik melalui akad bagi hasil ataupun akad murabahah dengan produk pembelian logam mulia. Serta dapat juga membantu meringankan beban likuiditas nasabah sementara waktu melalui produk Emas iB Barokah (gadai emas). Diharapkan dengan keunggulan dan inovasi ini, segmen syariah dapat meningkatkan pangsa pasar Bank Jatim secara keseluruhan dan *entry barrier* bagi kompetitor bank syariah lain nya.

#### Prospek dan Strategi Segmen Syariah Tahun 2023

Prospek dan strategi *funding* dan pembiayaan Segmen Syariah yang akan dilakukan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

##### • Prospek dan Strategi *Funding* Tahun 2023

Strategi *funding* Segmen Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* dimana menggunakan dua pendekatan strategi yaitu *maintenance* nasabah *existing* serta akuisisi nasabah baru yang diuraikan sebagai berikut:

##### 1. *Maintenance* Nasabah *Existing*

- a. *Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (Giro/Tabungan/Deposito)
 

Kegiatan yang wajib dilakukan oleh *funding officer* untuk melakukan komunikasi kembali dengan

nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan saldo DPK sekaligus *crosselling*.

- b. Pelaksanaan Program Tebar Barokah Periode 1 tahun 2023

Program Tebar Barokah ini bertujuan agar nasabah pemilik rekening Tabungan Barokah dapat meningkatkan saldo di rekeningnya. Pemberian hadiah dilakukan melalui sistem *redeem point* dimana nasabah yang berhak mendapatkan poin adalah nasabah dengan saldo rata-rata di akhir bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. Sedangkan yang berhak melakukan *redeem point* adalah nasabah yang telah memperoleh 500 poin.

- c. *Gathering* dengan Mitra dan Nasabah potensial secara berkala

*Gathering* akan dilakukan secara berkala dengan mitra dan Nasabah Bank Jatim Syariah dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pelayanan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan jumlah transaksi nasabah di Bank Jatim Syariah. Salah satu *gathering* yang akan dilakukan di triwulan pertama tahun 2023 adalah *campaign* haji muda kepada seluruh Pondok Pesantren (Ponpes) anggota *One Pesantren One Product* (OPOP) Jatim bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan OPOP Jatim yang diharapkan dapat meningkatkan Noa dan Nominal Tabungan Haji iB Amanah.

## 2. Akuisisi Nasabah Baru

- a. Pelaksanaan Program Haji Barokah

Program Haji Barokah ini dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2023, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret 2023. Hadiah diberikan bagi nasabah yang melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji iB Amanah sekaligus melakukan pendaftaran porsi haji. Adapun hadiah yang diberikan kepada nasabah berupa logam emas seberat 0,05 gram serta hadiah menarik lainnya (*cluth/sajadah/tumbler*).

- b. Program Tabungan iB Barokah Sejahtera (TBS) *Batch* 6 Program TBS *Batch* 6 merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah Tabungan Barokah dimana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan pengendapan saldo dalam jangka waktu tertentu. Program ini berlaku sejak tanggal 1 September 2022 hingga 1 Maret 2023 dan akan dilanjutkan ke *Batch* 7 yang berlaku sejak 2 Maret hingga 2 September 2023. Program tersebut juga dapat diimplementasikan di Kantor Layanan Syariah.

- c. Berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam peningkatan pendaftaran Haji Sebagai upaya dalam peningkatan pendaftaran haji melalui Tabungan Haji iB Amanah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan BPKH untuk memberikan *referral fee* sebesar 100 ribu bagi KBIH yang membawa jemaahnya untuk membuka rekening Tabungan Haji iB Amanah sekaligus melakukan pendaftaran setoran awal haji di Bank

Jatim Syariah. Mekanisme pemberian *referral* tersebut menggunakan mekanisme reimburs ke BPKH.

- d. Berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) dalam meningkatkan jumlah nazhir dan wakif

Untuk meningkatkan penghimpunan dana di rekening Giro iB Barokah melalui layanan Wakaf iB Barokah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan BWI dan GWI untuk melakukan sosialisasi kepada nazhir yang ada di Jawa Timur terkait pengembangan wakaf uang produktif. Kegiatan tersebut dilakukan setiap triwulan ke beberapa daerah dengan potensi wakaf yang besar.

- e. Pelaksanaan Lomba Santri Sholawat Virtual serta lomba Adzan

Berkolaborasi dengan Rumah Sedekah NU Jatim, Bank Jatim Syariah mengadakan lomba Santri sholawat virtual serta lomba adzan. Adapun peserta berasal dari Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan NoA dan Nominal Tabungan Santri dimana peserta lomba wajib membuka rekening Tabungan Santri sebagai syarat administrasi serta menampilkan produk atau layanan Bank Jatim Syariah di video yang dikirimkan ke panitia lomba.

Pemenang akan diberikan uang pembinaan yang akan di-*transfer* ke rekening Tabungan Santri.

- f. Pemberian *Sponsorship* dalam *Podcast* Rumah Sedekah NU Jatim

Kolaborasi dengan Rumah Sedekah NU Jatim dalam program *podcast* tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang perolehan Deposito Barokah dikarenakan sebagian besar narasumber *podcast* yang diadakan oleh Rumah Sedekah NU Jatim berasal dari wirausaha di Jawa Timur.

## • Prospek dan Strategi Pembiayaan Tahun 2023

1. Mengoptimalkan rencana pencairan pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan lain yang sudah disetujui yang belum terealisasi di tahun 2022.
2. Percepatan proses untuk usulan pembiayaan yang sudah masuk proses di Kantor Pusat UUS Bank Jatim.
3. Fokus penyaluran pembiayaan di Kantor Cabang Syariah sesuai dengan segmentasi pembiayaan, yakni: segmen mikro, segmen ritel, segmen menengah, dan segmen Konsumtif dan Properti. Untuk Segmen Korporasi dikelola oleh Kantor Pusat.
4. Optimalisasi Tenaga Analis
  - a. Target ekspansi pembiayaan *gross* masing-masing analis di setiap cabang adalah sebesar Rp2 miliar untuk segmen mikro dan ritel, sedangkan untuk segmen konsumtif dan properti sebesar Rp3 miliar setiap bulan.
  - b. Pemberian *reward/insentif* didasarkan atas pencapaian kinerja masing-masing analis.
5. Kerjasama dengan PT Makmur Berkas Amanda (MBA) dalam mensukseskan program Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) yang merupakan program Pemprov Jatim untuk menciptakan Jatim Bangkit sejak tahun 2021, yang merupakan potensi pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian gudang untuk investasi.



6. Pendekatan Ke *Developer*/Pengembang
  - a. Target *closing* pembiayaan KPR minimal 3 (tiga) *user* per bulan untuk masing-masing *developer* yang sudah PKS dengan cabang syariah.
  - b. Kerjasama dengan komunitas-komunitas *developer* seperti Himpera, Apersi, Apernas, REI, dan lain-lain.
7. Rencana kerjasama dengan Pemerintah untuk mendapatkan kuota penyaluran pembiayaan KUR dan mendukung program kerja Bank Jatim pada tahun 2023 sebagai Bank yang memiliki *background* pembiayaan berbasis UMKM.
8. Pendekatan dengan Komunitas UMKM
  - a. Kerjasama dengan Muslimat NU seluruh Jawa Timur untuk penyaluran pembiayaan mikro.
  - b. Kerjasama dengan Kopontren di seluruh Jawa Timur dalam Program *One Pesantren One Product* (OPOP).
9. Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan *Linkage* BMT/BPRS
  - a. Penyaluran kepada BPRS milik pemda ataupun swasta yang memiliki bonafiditas dan kredibilitas yang tinggi.
  - b. Mengaktifkan kembali penyaluran pembiayaan kepada koperasi, baik penyaluran dengan Pola Eksekuting maupun Pola *Chanelling*

### Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

Pendapatan operasional segmen syariah tahun 2022 sebesar Rp196.878 juta, naik sebesar 2,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp191.722 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga.

Laba operasional segmen syariah tahun 2022 sebesar Rp38.791 juta, meningkat sebesar 178,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp13.939 juta. Hal tersebut berasal dari menurunnya pembentukan CKPN kredit.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset	<b>3.071.458</b>	3.836.795	(765.337)	(19,95%)
Liabilitas	<b>3.030.788</b>	3.822.446	(791.658)	(20,71%)
Pendapatan operasional	<b>196.878</b>	191.722	5.156	2,69%
Laba operasional	<b>38.791</b>	13.939	24.852	178,29%

### Segmen Geografis

Selain dari segmen operasi, dalam menjalankan kegiatannya Bank Jatim dapat ditinjau dari segmen geografis.

#### Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan Jawa selain Jawa Timur.

#### Produktivitas Geografis

Informasi mengenai produktivitas segmen geografis Jawa Timur telah disajikan dalam bagian penjelasan dan produktivitas segmen konvensional.

### Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

Pendapatan operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp5.292.622 juta, meningkat sebesar 12,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.645.401 juta. Laba operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp1.956.365 juta, meningkat sebesar 11,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.752.248 juta. Kenaikan tersebut berasal dari penurunan CKPN Kredit.

Sedangkan untuk pendapatan operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp879.492 juta, meningkat sebesar 4,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp838.637 juta. Rugi operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp15.539 juta, menurun sebesar 140,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan laba mencapai Rp38.852 juta. Penurunan tersebut berasal dari Penurunan CKPN Kredit.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jawa Timur	Jawa Selain Jawa Timur	Eliminasi	Total
<b>2022</b>				
Aset	<b>81.433.044</b>	<b>22.109.020</b>	<b>510.697</b>	<b>103.031.367</b>
Liabilitas	<b>69.971.645</b>	<b>22.124.559</b>	<b>510.697</b>	<b>91.585.507</b>
Pendapatan operasional	<b>5.292.622</b>	<b>879.492</b>	-	<b>6.172.114</b>
Laba operasional	<b>1.956.365</b>	<b>(15.539)</b>	-	<b>1.940.826</b>
<b>2021</b>				
Aset	79.660.459	21.579.940	517.069	100.723.330
Liabilitas	68.788.772	21.541.087	517.069	89.812.790
Pendapatan operasional	4.645.401	838.637	-	5.484.038
Laba operasional	1.752.248	38.852	-	1.791.100
<b>Pertumbuhan 2021-2022 (%)</b>				
Aset	2,23%	2,45%	(1,23%)	2,29%
Liabilitas	1,72%	2,71%	(1,23%)	1,97%
Pendapatan operasional	13,93%	4,87%	-	12,55%
Laba operasional	11,65%	(140,00%)	-	8,36%



# Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Bank Jatim terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

### Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
<b>ASET</b>				
Kas	1.988.262	2.023.077	(34.815)	(1,72%)
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	8.805.300	1.981.440	22,50%
Giro pada bank lain	303.129	211.681	91.448	43,20%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(441)	(238)	(203)	85,29%
<b>Giro pada bank lain - neto</b>	<b>302.688</b>	<b>211.443</b>	<b>91.245</b>	<b>43,15%</b>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	9.917.695	(3.001.366)	(30,26%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	(1.763)	(1.391)	78,90%
<b>Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto</b>	<b>6.913.175</b>	<b>9.915.932</b>	<b>(3.002.757)</b>	<b>(30,28%)</b>
Tagihan spot dan derivatif	361	-	361	100,00%
Surat berharga	23.217.671	32.388.966	(9.171.295)	(28,32%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(400)	(5.943)	5.543	(93,27%)
<b>Surat-surat berharga - neto</b>	<b>23.217.271</b>	<b>32.383.023</b>	<b>(9.165.752)</b>	<b>(28,30%)</b>
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	4.095.066	100,00%
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	3.420.685	4.402.162	128,69%
Tagihan lainnya	286.147	230.019	56.128	24,40%
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah				
- Pihak berelasi	134.871	182.889	(48.018)	(26,26%)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
- Pihak ketiga	46.061.786	42.566.670	3.495.116	8,21%
<b>Jumlah kredit yang diberikan</b>	<b>46.196.657</b>	<b>42.749.559</b>	<b>3.447.098</b>	<b>8,06%</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(1.831.417)	512.805	(28,00%)
<b>Kredit yang diberikan - neto</b>	<b>44.878.045</b>	<b>40.918.142</b>	<b>3.959.903</b>	<b>9,68%</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	793.900	(147.775)	(18,61%)
Biaya dibayar dimuka	166.661	134.200	32.461	24,19%
Aset tetap				
Biaya perolehan	2.109.260	1.906.263	202.997	10,65%
Akumulasi penyusutan	(825.010)	(762.052)	(62.958)	8,26%
<b>Nilai buku</b>	<b>1.284.250</b>	<b>1.144.211</b>	<b>140.039</b>	<b>12,24%</b>
Aset pajak tangguhan, neto	502.238	627.211	(124.973)	(19,93%)
Piutang pajak	493	412	81	19,66%
Aset lain-lain, neto	140.998	115.775	25.223	21,79%
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>103.031.367</b>	<b>100.723.330</b>	<b>2.308.037</b>	<b>2,29%</b>

#### LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

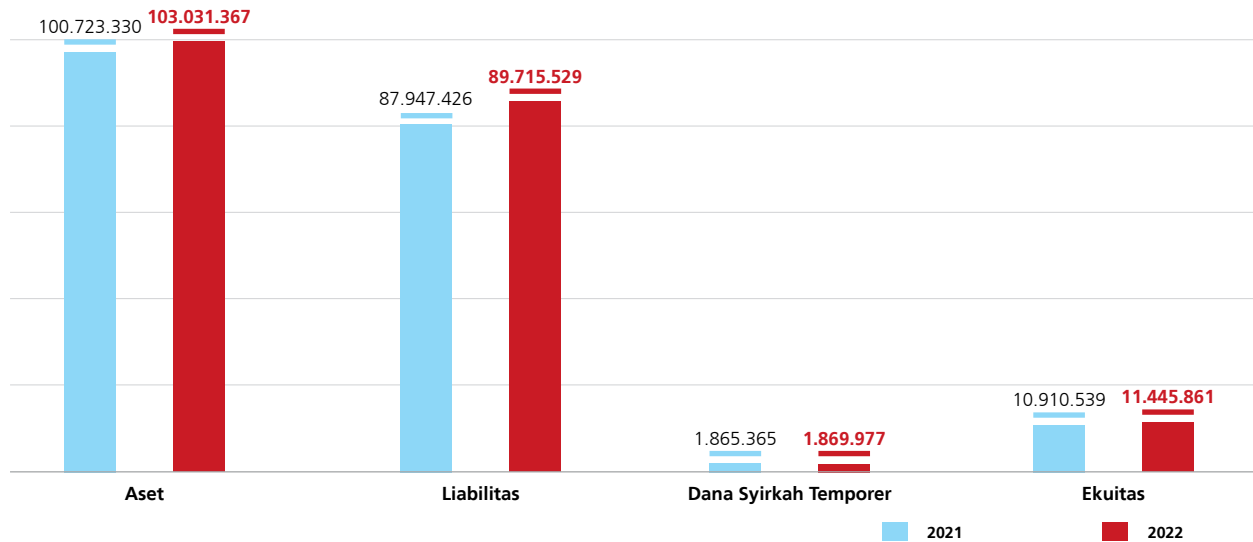
##### LIABILITAS

Liabilitas segera	872.514	593.875	278.639	46,92%
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	15.295.405	17.719.735	(2.424.330)	(13,68%)
- Pihak ketiga	64.630.285	63.668.950	961.335	1,51%
<b>Jumlah simpanan dari nasabah</b>	<b>79.925.690</b>	<b>81.388.685</b>	<b>(1.462.995)</b>	<b>(1,80%)</b>
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	141.996	360.169	(218.173,00)	(60,58%)
- Pihak ketiga	3.168.842	3.775.548	(606.706)	(16,07%)
<b>Jumlah simpanan dari bank lain</b>	<b>3.310.838</b>	<b>4.135.717</b>	<b>(824.879)</b>	<b>(19,95%)</b>
Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	-
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.891.346	-	3.891.346	100,00%
Pinjaman yang diterima	631.464	655.288	(23.824)	(3,64%)
Utang pajak	90.783	165.476	(74.693)	(45,14%)
Beban yang masih harus dibayar	520.840	478.647	42.193	8,82%
Liabilitas lain-lain	472.054	529.738	(57.684)	(10,89%)
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>89.715.529</b>	<b>87.947.426</b>	<b>1.768.103</b>	<b>2,01%</b>

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>				
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	2.302	3.021	(719)	(23,80%)
- Pihak ketiga	1.839.390	1.810.161	29.229	1,61%
<b>Jumlah simpanan dari nasabah</b>	<b>1.841.692</b>	<b>1.813.182</b>	<b>28.510</b>	<b>1,57%</b>
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	-	-	-	-
- Pihak ketiga	28.285	52.183	(23.898)	(45,80%)
<b>Jumlah simpanan dari bank lain</b>	<b>28.285</b>	<b>52.183</b>	<b>(23.898)</b>	<b>(45,80%)</b>
<b>TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.869.977</b>	<b>1.865.365</b>	<b>4.612</b>	<b>(0,77%)</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham:				
- Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
- Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
- Seri A: 24.000.000.000 saham				
- Seri B: 12.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
- Seri A - 11.934.147.982 saham				
- Seri B - 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	-	-
Tambahan modal disetor – neto	532.734	532.734	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	789.998	749.717	40.281	5,37%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(100.912)	(163.811)	62.899	(38,40%)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(115.048)	213.177	(328.225)	(153,97%)
Saldo laba				
Cadangan umum	5.042.390	4.301.777	740.613	17,22%
Belum ditentukan penggunaannya	1.542.824	1.523.070	19.754	1,30%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.445.861</b>	<b>10.910.539</b>	<b>535.322</b>	<b>(168,48%)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>103.031.367</b>	<b>100.723.330</b>	<b>2.308.037</b>	<b>2,29%</b>

## Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)



### Aset

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp103.031.367 juta, meningkat sebesar 2,29% dari tahun lalu sebesar Rp100.723.330 juta. Peningkatan

aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya giro pada bank lain - neto, kredit yang diberikan - neto, surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali (reverse repo) dan aset lain - neto.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kas	1.988.262	2.023.077	(34.815)	(1,72%)
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	8.805.300	1.981.440	22,50%
Giro pada bank lain	303.129	211.681	91.448	43,20%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(441)	(238)	(203)	85,29%
<b>Giro pada bank lain - neto</b>	<b>302.688</b>	<b>211.443</b>	<b>91.245</b>	<b>43,15%</b>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	9.917.695	(3.001.366)	(30,26%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	(1.763)	(1.391)	78,90%
<b>Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto</b>	<b>6.913.175</b>	<b>9.915.932</b>	<b>(3.002.757)</b>	<b>(30,28%)</b>
Tagihan spot dan derivatif	361	-	-	-
Surat berharga	23.217.671	32.388.966	(9.171.295)	(28,32%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(400)	(5.943)	5.543	(93,27%)
<b>Surat-surat berharga - neto</b>	<b>23.217.271</b>	<b>32.383.023</b>	<b>(9.165.752)</b>	<b>(28,30%)</b>
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	4.095.066	100,00%
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	3.420.685	4.402.162	128,69%

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Tagihan lainnya	286.147	230.019	56.128	24,40%
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah				
- Pihak berelasi	134.871	182.889	(48.018)	(26,26%)
- Pihak ketiga	46.061.786	42.566.670	3.495.116	8,21%
<b>Jumlah kredit yang diberikan</b>	<b>46.196.657</b>	<b>42.749.559</b>	<b>3.447.098</b>	<b>8,06%</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(1.831.417)	512.805	(28,00%)
<b>Kredit yang diberikan - neto</b>	<b>44.878.045</b>	<b>40.918.142</b>	<b>3.959.903</b>	<b>9,68%</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	793.900	(147.775)	(18,61%)
Biaya dibayar dimuka	166.661	134.200	32.461	24,19%
Aset tetap				
Biaya perolehan	2.109.260	1.906.263	202.997	10,65%
Akumulasi penyusutan	(825.010)	(762.052)	(62.958)	8,26%
<b>Nilai buku neto</b>	<b>1.284.250</b>	<b>1.144.211</b>	<b>140.039</b>	<b>12,24%</b>
Aset pajak tangguhan, neto	502.238	627.211	(124.973)	(19,93%)
Piutang pajak	493	412	81	19,66%
Aset lain-lain, neto	140.998	115.775	25.223	21,79%
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>103.031.367</b>	<b>100.723.330</b>	<b>2.307.676</b>	<b>2,29%</b>

## Kas

Kas yang tercatat pada tahun 2022 mencapai Rp1.988.262 juta, menurun sebesar 1,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.023.077 juta. Penurunan tersebut berasal

dari jumlah kas dengan mata uang rupiah yang jauh menurun jumlahnya dan penurunan ini disebabkan oleh naiknya penarikan uang tunai pada kas kasanah.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Rupiah	1.946.513	1.986.107	(39.594)	(1,99%)
Mata uang asing	41.749	36.970	4.779	12,93%
<b>Jumlah kas</b>	<b>1.988.262</b>	<b>2.023.077</b>	<b>(34.815)</b>	<b>(1,72%)</b>

## Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2022 mencapai Rp10.786.740 juta, meningkat sebesar 22,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp8.805.300 juta. Kenaikan tersebut

berasal dari jumlah giro pada Bank Indonesia di Indonesia sektor rupiah banyak mengalami kenaikan.



**Tabel Giro Pada Bank Indonesia**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	10.774.286	8.796.748	1.977.538	22,48%
Dolar Amerika Serikat	12.454	8.552	3.902	45,63%
<b>Jumlah giro pada Bank Indonesia</b>	<b>10.786.740</b>	<b>8.805.300</b>	<b>1.981.440</b>	<b>22,50%</b>

**Giro Pada Bank Lain - Neto**

Giro pada Bank lain tahun 2022 mencapai Rp302.688 juta, meningkat sebesar 43,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp211.443 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah giro pada bank lain meningkat.

**Tabel Giro Pada Bank Lain - Neto**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	190.457	148.822	41.635	27,98%
Mata Uang Asing	112.672	62.859	49.813	79,25%
<b>Jumlah</b>	<b>303.129</b>	<b>211.681</b>	<b>91.448</b>	<b>43,20%</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(441)	(238)	(203)	85,29%
<b>Neto</b>	<b>302.688</b>	<b>211.443</b>	<b>91.245</b>	<b>43,15%</b>

**Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Neto**

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tahun 2022 mencapai Rp6.913.175 juta, menurun sebesar 30,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9.915.932 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penempatan baik pada Bank Indonesia maupun Bank lain di jenis *interbank call money*.

**Tabel Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Neto**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Deposito berjangka:	7.000	410.000	(403.000)	(98,29%)
Pasar Uang Antar Bank:	4.165.000	1.482.000	2.683.000	181,04%
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Term Deposit Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	2.744.329	8.025.695	(5.281.366)	(65,81%)
<b>Jumlah</b>	<b>6.916.329</b>	<b>9.917.695</b>	<b>(3.001.366)</b>	<b>(30,26%)</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	(1.763)	(1.391)	78,90%
<b>Neto</b>	<b>6.913.175</b>	<b>9.915.932</b>	<b>(3.002.757)</b>	<b>(30,28%)</b>

## Surat-Surat Berharga - Neto

Surat - surat berharga yang dimiliki Perusahaan tahun 2022 mencapai Rp23.217.271 juta, menurun sebesar 28,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai

Rp32.383.023 juta. Penurunan ini disebabkan atas pembelian surat berharga kurang dari 1 (satu) tahun yang menurun dari tahun sebelumnya.

**Tabel Surat-Surat Berharga Berdasarkan Jangka Waktu dan Tingkat Bunga**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kurang dari 1 tahun	986.769	20.095.803	(19.109.034)	(95,09%)
1 - 5 tahun	22.230.902	12.293.164	9.937.738	80,84%
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(400)	(5.943)	5.543	(93,27%)
<b>Jumlah surat-surat berharga</b>	<b>23.217.271</b>	<b>32.383.023</b>	<b>(9.165.752)</b>	<b>(28,30%)</b>

## Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)

Surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan nilai bersih yang dimiliki Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp7.822.847 juta, meningkat sebesar 128,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.420.685 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh pembelian kembali surat berharga.

**Tabel Surat-Surat yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Reverse Repo) Berdasarkan Nilai Bersih**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian -1	2022 -2	2021 -3	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Surat Utang Negara				
FR0070	-	309.405	(309.405)	(100,00%)
VR0062	-	469.625	(469.625)	(100,00%)
FR0043	-	742.189	(742.189)	(100,00%)
FR0070	-	316.859	(316.859)	(100,00%)
FR0056	-	165.615	(165.615)	(100,00%)
FR0077	-	1.416.992	(1.416.992)	(100,00%)
FR0087	368.983	-	368.983	100,00%
FR0081	149.068	-	149.068	100,00%
FR0084	99.964	-	99.964	100,00%
FR0083	192.726	-	192.726	100,00%
FR0088	42.540	-	42.540	100,00%
FR0065	116.204	-	116.204	100,00%
VR0078	286.561	-	286.561	100,00%
VR0037	139.793	-	139.793	100,00%
VR0072	46.900	-	46.900	100,00%
VR0068	381.593	-	381.593	100,00%
VR0077	140.651	-	140.651	100,00%
FR0096	28.674	-	28.674	100,00%

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
-1	-2	-3	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
VR0053	116.820	-	116.820	100,00%
VR0037	931.787	-	931.787	100,00%
VR0046	192.171	-	192.171	100,00%
VR0050	1.004.871	-	1.004.871	100,00%
VR0062	906.872	-	906.872	100,00%
VR0075	234.413	-	234.413	100,00%
VR0045	924.708	-	924.708	100,00%
VR0034	382.733	-	382.733	100,00%
VR0036	574.107	-	574.107	100,00%
VR0065	370.747	-	370.747	100,00%
VR0044	189.961	-	189.961	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>7.822.847</b>	<b>3.420.685</b>	<b>4.402.162</b>	<b>128,69%</b>

### Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya tahun 2022 mencapai Rp286.147 juta, meningkat sebesar 24,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp230.019 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya tagihan *transfer* dan ATM.

Tabel Tagihan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan <i>transfer</i> dan ATM	194.150	116.119	78.031	67,20%
Lainnya	91.997	113.900	(21.903)	(19,23%)
<b>Jumlah tagihan lainnya - Neto</b>	<b>286.147</b>	<b>230.019</b>	<b>56.128</b>	<b>24,40%</b>

### Kredit Yang Diberikan - Neto

Kredit yang diberikan tahun 2022 mencapai Rp44.878.045 juta, meningkat sebesar 9,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp40.918.142 juta. Peningkatan ini didominasi oleh naiknya kredit pihak ketiga.

Tabel Kredit Yang Diberikan - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi (catatan 40)	134.871	182.889	(48.018)	(26,26%)
Pihak ketiga	46.061.786	42.566.670	3.495.116	8,21%
<b>Jumlah kredit yang diberikan</b>	<b>46.196.657</b>	<b>42.749.559</b>	<b>3.447.098</b>	<b>8,06%</b>

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<b>(1.318.612)</b>	(1.831.417)	512.805	(28,00%)
<b>Kredit yang diberikan - neto</b>	<b>44.878.045</b>	<b>40.918.142</b>	<b>3.959.903</b>	<b>9,68%</b>

### Pendapatan Bunga Yang Masih Akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih akan diterima tahun 2022 mencapai Rp646.125 juta, menurun sebesar 18,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp793.900 juta. Penurunan tersebut berasal dari pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan di sektor lain - lain.

**Tabel Pendapatan Bunga Yang Masih Akan Diterima**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Kredit yang diberikan	<b>340.021</b>	426.995	(86.974)	(20,37%)
Lain-lain	<b>306.091</b>	366.895	(60.804)	(16,57%)
Mata uang asing:				
Dolar Amerika Serikat	<b>13</b>	10	3	30,00%
<b>Jumlah Pendapatan bunga yang masih akan diterima</b>	<b>646.125</b>	<b>793.900</b>	<b>(147.775)</b>	<b>(18,61%)</b>

### Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka tahun 2022 mencapai Rp166.661 juta, meningkat sebesar 24,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp134.200 juta. Peningkatan tersebut berasal dari asuransi tunjangan hari tua, Asuransi lainnya dan sewa dibayar dimuka.

**Tabel Biaya Dibayar Dimuka**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asuransi tunjangan hari tua	<b>88.765</b>	82.296	6.469	7,86%
Sewa dibayar dimuka	<b>37.924</b>	10.816	27.108	250,63%
Asuransi lainnya	<b>6.216</b>	1.152	5.064	439,58%
Lainnya	<b>33.756</b>	39.936	(6.180)	(15,47%)
<b>Jumlah biaya dibayar dimuka</b>	<b>166.661</b>	<b>134.200</b>	<b>32.461</b>	<b>24,19%</b>

## Aset Tetap

Aset tetap di tahun 2022 mencapai Rp1.284.250 juta, meningkat sebesar 12,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

mencapai Rp1.144.211 juta. Peningkatan tersebut yang terbanyak berasal dari biaya perolehan tanah dan peralatan kantor.

**Tabel Aset Tetap**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Tanah	945.010	856.993	88.017	10,27%
Bangunan	203.402	203.366	36	0,02%
Peralatan kantor	678.419	546.324	132.095	24,18%
Kendaraan bermotor	50.516	33.754	16.762	49,66%
	<b>1.877.347</b>	1.640.437	236.910	14,44%
Aset dalam penyelesaian				
Aset Hak Guna	681	591	90	15,23%
Total biaya Perolehan	<b>2.109.260</b>	1.906.263	202.997	10,65%
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	116.296	107.086	9.210	8,60%
Peralatan kantor	574.638	492.081	82.557	16,78%
Kendaraan bermotor	24.616	33.090	(8.474)	(25,61%)
Aset Hak Guna	109.460	129.795	(20.335)	(15,67%)
<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>825.010</b>	<b>762.052</b>	<b>62.958</b>	<b>8,26%</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>1.284.250</b>	<b>1.144.211</b>	<b>140.039</b>	<b>12,24%</b>

## Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan di tahun 2022 mencapai Rp502.238 juta, menurun sebesar 19,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp627.211 juta. Penurunan tersebut rata - rata berasal dari penyisihan kerugian aset produktif, cadangan lainnya dan sewa.

**Tabel Aset Pajak Tangguhan**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	73.284	72.346	938	1,30%
Penyisihan kerugian aset produktif	340.736	523.599	(182.863)	(34,92%)
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	26.986	(45.400)	72.386	(159,44%)
Cadangan lainnya	13.381	14.502	(1.121)	(7,73%)
Sewa	(1.014)	1.777	(2.791)	(157,06%)
Cadangan imbalan kerja	48.865	60.387	(11.522)	(19,08%)
<b>Aset pajak tangguhan</b>	<b>502.238</b>	<b>627.211</b>	<b>(124.973)</b>	<b>(19,93%)</b>

## Aset Lain-Lain - Neto

Aset lain-lain di tahun 2022 mencapai Rp140.998 juta, meningkat sebesar 21,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

mencapai Rp115.775 juta. Peningkatan tersebut berasal dari beban yang ditangguhkan dan aset lainnya.

**Tabel Aset Lain-Lain - Neto**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban yang ditangguhkan	110.112	109.324	788	0,72%
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	19.812	21.891	(2.079)	(9,50%)
Surat ketetapan pajak lebih bayar	-	-	-	0,00%
Lainnya, neto	54.486	10.020	44.466	443,77%
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(43.412)	(25.460)	(17.952)	70,51%
<b>Jumlah aset lain-lain - Neto</b>	<b>140.998</b>	<b>115.775</b>	<b>25.223</b>	<b>21,79%</b>

## Liabilitas

Liabilitas di tahun 2022 mencapai Rp89.715.529 juta, naik sebesar 2,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp87.947.426 juta. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali di tahun 2022.

**Tabel Liabilitas**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas segera	872.514	593.875	278.639	46,92%
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	15.295.405	17.719.735	(2.424.330)	(13,68%)
Pihak ketiga	64.630.285	63.668.950	961.335	1,51%
Jumlah simpanan dari nasabah	79.925.690	81.388.685	(1.462.995)	(1,80%)
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	141.996	360.169	(218.173)	(60,58%)
Pihak ketiga	3.168.842	3.775.548	(587.525)	(15,64%)
Jumlah simpanan dari bank lain	3.310.838	4.135.717	(805.698)	(19,57%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.891.346	-	3.891.346	100,00%
Pinjaman yang diterima	631.464	655.288	(23.824)	(3,64%)
Utang pajak	90.783	165.476	(74.693)	(45,14%)
Beban yang masih harus dibayar	520.840	478.647	42.193	8,82%
Liabilitas lain-lain	472.054	529.738	(57.684)	(10,89%)
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>89.715.529</b>	<b>87.947.426</b>	<b>1.768.103</b>	<b>2,01%</b>

## Liabilitas Segera

Liabilitas di tahun 2022 mencapai Rp872.514 juta, meningkat sebesar 44,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp593.875 juta. Peningkatan tersebut rata - rata

berasal dari *transfer*, inkaso, kliring, penerimaan dana yang akan diperhitungkan dan lain - lain.

**Tabel Liabilitas Segera**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
<i>Transfer, inkaso dan kliring</i>	<b>319.871</b>	172.987	146.884	84,91%
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan	<b>122.431</b>	116.659	5.772	4,95%
Beban sudah efektif harus dibayar	<b>91.760</b>	103.364	(11.604)	(12,65%)
ATM Bersama	<b>12.779</b>	-	12.779	100,00%
Lain-lain	<b>325.673</b>	200.865	124.808	62,14%
<b>Liabilitas segera</b>	<b>872.514</b>	<b>593.875</b>	<b>265.860</b>	<b>44,77%</b>

## Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah di tahun 2022 mencapai Rp79.925.690 juta, menurun sebesar 1,80% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang mencapai Rp81.388.685 juta. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak berelasi.

**Tabel Simpanan Dari Nasabah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	<b>15.295.405</b>	17.719.735	(2.424.330)	(13,68%)
Pihak ketiga	<b>64.630.285</b>	63.668.950	961.335	1,51%
<b>Jumlah simpanan dari nasabah</b>	<b>79.925.690</b>	<b>81.388.685</b>	<b>(1.462.995)</b>	<b>(1,80%)</b>

## Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain di tahun 2022 mencapai Rp3.310.838 juta, menurun sebesar 19,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yang mencapai Rp4.135.717 juta. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari bank lain pihak ketiga dan pihak berelasi.

**Tabel Simpanan Dari Bank Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	<b>141.996</b>	360.169	(218.173)	(60,58%)
Pihak ketiga	<b>3.168.842</b>	3.775.548	(606.706)	(16,07%)
<b>Jumlah simpanan dari bank lain</b>	<b>3.310.838</b>	<b>4.135.717</b>	<b>(824.879)</b>	<b>(19,95%)</b>



## Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima di tahun 2022 mencapai Rp631.464 juta, menurun sebesar 3,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp655.288 juta. Penurunan tersebut berasal dari

turunnya pinjaman yang diterima dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi).

**Tabel Pinjaman yang Diterima**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	481.532	457.034	24.498	5,36%
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	76.698	120.394	(43.696)	(36,29%)
PT Sarana Multigriya Financial	71.867	76.493	(4.626)	(6,05%)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi)	1.367	1.367	-	0,00%
<b>Jumlah pinjaman yang diterima</b>	<b>631.464</b>	<b>655.288</b>	<b>(23.824)</b>	<b>(3,64%)</b>

## Utang Pajak

Utang pajak di tahun 2022 mencapai Rp90.783 juta, menurun sebesar 45,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai

Rp165.476 juta. Penurunan tersebut berasal dari pajak penghasilan pasal 29 (catatan 22f) dan pajak penghasilan pasal 23/4 (2).

**Tabel Utang Pajak**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pajak penghasilan pasal 25	43.577	-	43.577	100,00%
Pajak penghasilan pasal 21	30.453	20.291	10.162	50,08%
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	10.489	13.492	(3.003)	(22,26%)
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 22f)	5.803	131.299	(125.496)	(95,58%)
Lain-lain	461	394	67	17,01%
<b>Utang pajak</b>	<b>90.783</b>	<b>165.476</b>	<b>-74.693</b>	<b>(45,14%)</b>

## Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar di tahun 2022 mencapai Rp520.840 juta, meningkat sebesar 8,82% dibandingkan dengan

tahun sebelumnya yang mencapai Rp478.647 juta. Kenaikan tersebut berasal dari cadangan jasa produksi dan bunga.

**Tabel Beban Yang Masih Harus Dibayar**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	385.706	380.767	4.939	1,30%
Bunga	135.134	97.880	37.254	38,06%
<b>Jumlah beban yang masih harus dibayar</b>	<b>520.840</b>	<b>478.647</b>	<b>42.193</b>	<b>8,82%</b>

## Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain di tahun 2022 mencapai Rp472.054 juta, Menurun sebesar 10,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp529.738 juta. Penurunan tersebut

rata - rata berasal dari cadangan imbalan kerja, liabilitas sewa, pokok kredit penerusan yang diterima, provisi dan administrasi kredit dan lainnya.

**Tabel Liabilitas Lain-Lain Berdasarkan Ekuivalen Rupiah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
<b>Rupiah</b>				
Cadangan imbalan kerja	257.184	317.828	(60.644)	(19,08%)
Setoran jaminan	132.236	117.527	14.709	12,52%
Liabilitas sewa	23.322	44.433	(21.111)	(47,51%)
Pokok kredit penerusan yang diterima	7.683	8.643	(960)	(11,11%)
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.592	3.522	70	1,99%
Provisi dan administrasi kredit	-	8.971	(8.971)	(100,00%)
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	3.020	117	2.903	2481,20%
Lainnya	1.390	26.689	(25.299)	(94,79%)
	<b>428.427</b>	<b>527.730</b>	<b>-99.303</b>	<b>(18,82%)</b>
<b>Mata uang asing</b>				
Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	39.325	1.431	37.894	2648,08%
Dolar Singapore	3.538	546	2.992	547,99%
Dolar Hong Kong	20	19	1	5,26%
Yen Jepang	-	12	(12)	(100,00%)
Euro	744	-	744	100,00%
<b>Jumlah liabilitas lain-lain</b>	<b>43.627</b>	<b>2.008</b>	<b>41.619</b>	<b>2.072,66%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>472.054</b>	<b>529.738</b>	<b>(57.684)</b>	<b>(10,89%)</b>

## Ekuitas

Ekuitas di tahun 2022 mencapai Rp11.445.861 juta, meningkat sebesar 4,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.910.539 juta. Peningkatan tersebut berasal dari surplus revaluasi aset tetap, cadangan umum dan belum ditentukan penggunaannya.

**Tabel Ekuitas**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Modal saham:				
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
Seri A: 24.000.000.000 saham				
Seri: 12.000.00.000 saham				

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
Seri A - 11.934.147.982 saham				
Seri B - 3.081.350.100 saham	<b>3.753.875</b>	3.753.875	-	0,00%
Tambahan modal disetor - neto	<b>532.734</b>	532.734	-	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	<b>789.998</b>	749.717	40.281,00	5,37%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	<b>(100.912)</b>	(163.811)	62.899,00	(38,40%)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	<b>(115.048)</b>	213.177	(328.225,00)	(153,97%)
Saldo laba				
Cadangan umum	<b>5.042.390</b>	4.301.777	740.613,00	17,22%
Belum ditentukan penggunaannya	<b>1.542.824</b>	1.523.070	19.754,00	1,30%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.445.861</b>	<b>10.910.539</b>	<b>535.322,00</b>	<b>4,91%</b>

### Modal Saham

Modal saham di tahun 2022 mencapai Rp3.753.875 juta, stabil sebesar 0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.753.875 juta. Tidak berubah, hal ini karena berasal dari saham seri B.

### Tambahan Modal Disetor - Neto

Tambahan modal disetor pada tahun 2022 mencapai Rp532.734 juta, Stabil sebesar 0,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp532.734 juta. Tidak ada perubahan tersebut karena dari Opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)*.

Tabel Tambahan Modal Disetor - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	<b>509.369</b>	509.369	-	0,00%
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>	<b>23.365</b>	23.365	-	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>532.734</b>	<b>532.734</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

### Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap di tahun 2022 mencapai Rp789.998 juta, meningkat sebesar 5,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp749.717 juta. Peningkatan ini berasal dari revaluasi aset tetap.

### Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Pasti - Setelah Pajak Tangguhan

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan di tahun 2022 mencapai (Rp100.912) juta, turun sebesar 38,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp163.811) juta.

### Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Atas Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan di tahun 2022 mencapai (Rp115.048) juta, turun sebesar 153,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp213.177 juta.

## Saldo Laba

Saldo laba di tahun 2022 mencapai Rp1.542.824 juta, meningkat sebesar 1,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.523.070 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bunga kredit dan belum ditentukan penggunaannya.

Tabel Saldo Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Belum ditentukan penggunaannya	1.542.824	1.523.070	19.754	1,30%
Saldo Laba	1.542.824	1.523.070	19.754	1,30%

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

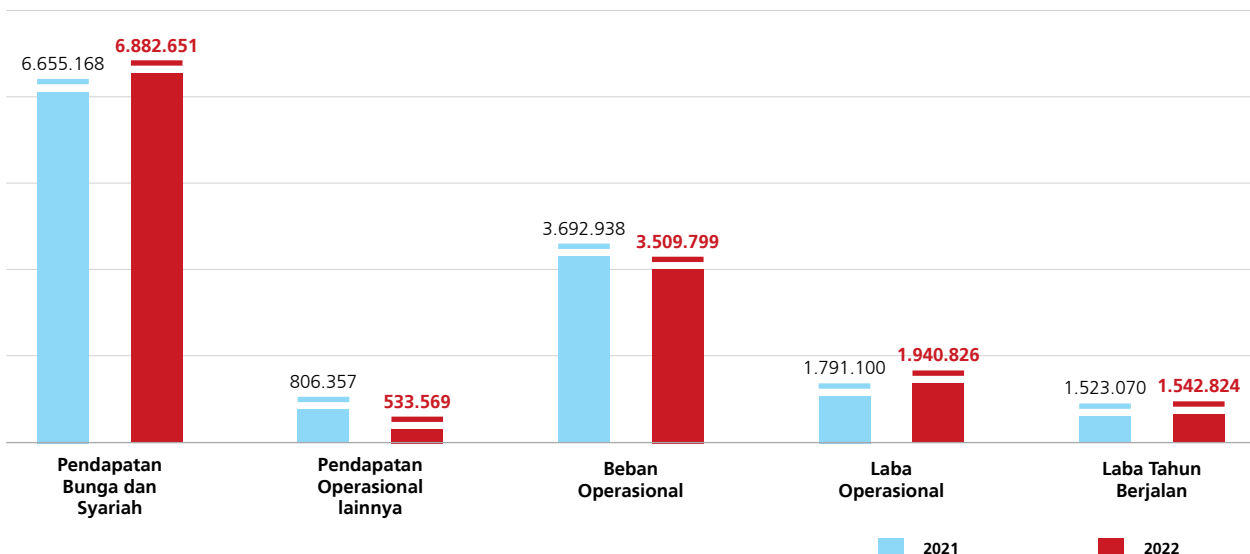
Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
<b>Pendapatan bunga dan syariah</b>	<b>6.882.651</b>	6.655.168	227.483	3,42%
<b>Beban bunga dan syariah</b>	<b>(1.965.595)</b>	(1.977.487)	11.892	(0,60%)
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO</b>	<b>4.917.056</b>	<b>4.677.681</b>	<b>239.375</b>	<b>5,12%</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	-	361.666	(361.666)	(100,00%)
Administrasi giro, tabungan dan deposito	184.480	172.779	11.701	6,77%
Penerimaan kembali kredit hapus buku	56.653	55.003	1.650	3,00%
Administrasi kredit	42.511	34.055	8.456	24,83%
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	11.105	5.225	5.880	112,54%
Lainnya	238.820	177.629	61.191	34,45%
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>533.569</b>	<b>806.357</b>	<b>(272.788)</b>	<b>(33,83%)</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.674.698)	(1.644.897)	(29.801)	1,81%
Umum dan administrasi	(1.229.388)	(1.078.820)	(150.568)	13,96%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(404.659)	(819.201)	414.542	(50,60%)
Beban lainnya	(201.054)	(150.020)	(51.034)	34,02%
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>(3.509.799)</b>	<b>(3.692.938)</b>	<b>183.139</b>	<b>(4,96%)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>1.940.826</b>	<b>1.791.100</b>	<b>149.726</b>	<b>8,36%</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL</b>				
Fee jasa pelayanan pajak	6.084	4.684	1.400	29,89%
Keuntungan atas penjualan aset tetap	5.274	3.952	1.322	33,45%
Keuntungan penjualan efek-efek neto	2.757	131	2.626	2.004,58%
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	-	3.497	(3.497)	(100,00%)
Pendapatan non-operasional lainnya	158.513	404.119	(245.606)	(60,78%)



Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Beban non-operasional	(83.405)	(269.509)	186.104	(69,05%)
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	<b>89.223</b>	<b>146.874</b>	<b>(57.651)</b>	<b>(39,25%)</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>2.030.049</b>	<b>1.937.974</b>	<b>92.075</b>	<b>4,75%</b>
<b>BEBAN PAJAK - NETO</b>	<b>(487.225)</b>	<b>(414.904)</b>	<b>(72.371)</b>	<b>17,43%</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.542.824</b>	<b>1.523.070</b>	<b>19.754</b>	<b>1,30%</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap	40.281	(4.665)	44.946	(963,47%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	100.163	41.074	59.089	143,86%
Penyesuaian saldo awal	(19.678)	-	(19.678)	-
Pajak penghasilan terkait	(17.586)	(7.804)	(9.782)	125,35%
	<b>103.180</b>	<b>28.605</b>	<b>74.575</b>	<b>260,71%</b>
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(400.611)	103.326	(503.937)	(487,72%)
Penyesuaian saldo awal	(3.730)	-	(3.730)	-
Pajak penghasilan terkait	76.116	(15.902)	92.018	(578,66%)
	<b>(328.225)</b>	<b>87.424</b>	<b>(415.649)</b>	<b>(475,44%)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK</b>	<b>(225.045)</b>	<b>116.029</b>	<b>(341.074)</b>	<b>(293,96%)</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.317.779</b>	<b>1.639.099</b>	<b>(663.903)</b>	<b>(40,50%)</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)</b>	<b>102,75</b>	<b>101,43</b>	<b>1,32</b>	<b>1,30%</b>

### Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)



## Pendapatan Bunga dan Syariah

Pada tahun 2022 jumlah pendapatan bunga dan syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp6.882.651 juta, meningkat sebesar 3,42% dari tahun lalu sebesar Rp6.655.168 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan dari pihak ketiga

yaitu penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga biaya perolehan diamortisasi, surat berharga *margin* dan pendapatan bagi hasil, surat berharga provisi dan surat berharga lainnya.

**Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
<b>Pihak berelasi (Catatan 40)</b>				
Kredit yang diberikan	7.926	11.501	(3.575)	(31,08%)
<i>Margin</i> dan pendapatan bagi hasil	126	439	(313)	(71,30%)
<b>Pihak ketiga</b>				
Kredit yang diberikan	4.261.412	4.429.281	(167.869)	(3,79%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	932.818	783.576	149.242	19,05%
Surat berharga				
Biaya perolehan diamortisasi	1.392.992	1.189.657	203.335	17,09%
<i>Margin</i> dan pendapatan bagi hasil	135.829	126.018	9.811	7,79%
Provisi	110.971	76.906	34.065	44,29%
Sertifikat Bank Indonesia	17.442	19.077	(1.635)	(8,57%)
Lainnya	23.135	18.713	4.422	23,63%
<b>Jumlah pendapatan bunga dan syariah</b>	<b>6.882.651</b>	<b>6.655.168</b>	<b>227.483</b>	<b>3,42%</b>

## Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah di tahun 2022 mencapai Rp1.965.595 juta, menurun sebesar 0,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.977.487 juta. Penurunan tersebut berasal dari deposito berjangka, pinjaman yang diterima dan premium surat berharga.

**Tabel Beban Bunga dan Syariah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Deposito berjangka	1.431.257	1.501.177	(69.920)	(4,66%)
Tabungan	264.782	260.600	4.182	1,60%
Giro	221.779	194.966	26.813	13,75%
Repo	30.291	-	30.291	0,00%
Pinjaman yang diterima	10.357	16.129	(5.772)	(35,79%)
Bagi hasil mudharabah	5.580	3.952	1.628	41,19%
Beban bunga kredit	1.549	181	1.368	755,80%
Premi penjaminan Pemerintah	-	-	-	0,00%
Premi asuransi lainnya	-	-	-	0,00%
Premium surat berharga	-	482	(482)	(100,00%)
<b>Jumlah beban bunga dan syariah</b>	<b>1.965.595</b>	<b>1.977.487</b>	<b>(11.892)</b>	<b>(0,60%)</b>

## Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto

Pendapatan bunga dan syariah, neto di tahun 2022 mencapai Rp4.917.056 juta, meningkat sebesar 5,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.677.681 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan.

**Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah	<b>6.882.651</b>	6.655.168	227.483	3,42%
Beban bunga dan syariah	<b>(1.965.595)</b>	(1.977.487)	11.892	(0,60%)
<b>Pendapatan bunga dan syariah - neto</b>	<b>4.917.056</b>	<b>4.677.681</b>	<b>239.375</b>	<b>5,12%</b>

## Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2022 mencapai Rp533.569 juta, menurun sebesar 33,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp806.357 juta. Penurunan

ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah Pemulihan kerugian penurunan nilai *reversal for impairment* atas aset keuangan.

**Tabel Pendapatan Operasional Lainnya**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	-	361.666	(361.666)	(100,00%)
Administrasi giro, tabungan dan deposito	<b>184.480</b>	172.779	11.701	6,77%
Penerimaan kembali kredit hapus buku	<b>56.653</b>	55.003	1.650	3,00%
Administrasi kredit	<b>42.511</b>	34.055	8.456	24,83%
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	<b>11.105</b>	5.225	5.880	112,54%
Lainnya	<b>238.820</b>	177.629	61.191	34,45%
<b>Jumlah pendapatan operasional lainnya</b>	<b>533.569</b>	<b>806.357</b>	<b>(272.788)</b>	<b>(33,83%)</b>

## Beban Operasional

Beban operasional di tahun 2022 mencapai Rp3.509.799 juta, menurun sebesar 4,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.692.938 juta. Penurunan ini terutama

disebabkan oleh naiknya penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, beban umum administrasi, tenaga kerja tunjangan karyawan dan beban lainnya.

**Tabel Beban Operasional**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	<b>(1.674.698)</b>	(1.644.897)	(29.801)	1,81%
Umum dan administrasi	<b>(1.229.388)</b>	(1.078.820)	(150.568)	13,96%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	<b>(404.659)</b>	(819.201)	414.542	(50,60%)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban lainnya	<b>(201.054)</b>	(150.020)	(51.034)	34,02%
<b>Jumlah beban operasional</b>	<b>(3.509.799)</b>	<b>(3.692.938)</b>	<b>183.139</b>	<b>(4,96%)</b>

## Labanya Operasional

Labanya operasional di tahun 2022 mencapai Rp1.940.826 juta, meningkat sebesar 8,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.791.100 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah pendapatan operasional lainnya dan pendapatan bunga dan syaria, neto.

**Tabel Labanya Operasional**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syaria - neto	<b>4.917.056</b>	4.677.681	239.375	5,12%
Jumlah Pendapatan operasional lainnya	<b>533.569</b>	806.357	(272.788)	(33,83%)
Jumlah Beban operasional	<b>(3.509.799)</b>	(3.692.938)	183.139	(4,96%)
<b>Labanya operasional</b>	<b>1.940.826</b>	<b>1.791.100</b>	<b>149.726</b>	<b>8,36%</b>

## Pendapatan (Beban) Non-Operasional

Pendapatan (beban) operasional di tahun 2022 mencapai Rp89.223 juta, menurun sebesar 39,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp146.874 juta. Penurunan ini disebabkan oleh keuntungan selisih kurs dan beban lainnya.

**Tabel Pendapatan (Beban) Non-Operasional**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Fee jasa pelayanan pajak	<b>6.084</b>	4.684	1.400	29,89%
Keuntungan atas penjualan aset tetap	<b>5.274</b>	3.952	1.322	33,45%
Keuntungan penjualan efek-efek neto	<b>2.757</b>	131	2.626	2.004,58%
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	-	3.497	(3.497)	(100,00%)
Pendapatan non-operasional lainnya	<b>158.513</b>	404.119	(245.606)	(60,78%)
Beban non-operasional	<b>(83.405)</b>	(269.509)	186.104	(69,05%)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>	<b>89.223</b>	<b>146.874</b>	<b>(57.651)</b>	<b>(39,25%)</b>



## Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak di tahun 2022 mencapai Rp2.030.049 juta, meningkat sebesar 4,75% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang mencapai Rp1.937.974 juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena peningkatan laba operasional.

**Tabel Laba Sebelum Beban Pajak**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Laba operasional	1.940.826	1.791.100	149.726	8,36%
Jumlah Pendapatan non-operasional - neto	89.223	146.874	(57.651)	(39,25%)
<b>Laba sebelum beban pajak</b>	<b>2.030.049</b>	<b>1.937.974</b>	<b>92.075</b>	<b>4,75%</b>

## Beban Pajak – Neto

Beban pajak neto di tahun 2022 mencapai Rp487.225 juta, meningkat sebesar 17,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp414.904 juta. Peningkatan beban pajak- neto tersebut dipengaruhi oleh restitusi pajak.

**Tabel Beban Pajak - Neto**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Beban pajak - neto	(487.225)	(414.904)	(72.321)	17,43%

## Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan di tahun 2022 mencapai Rp1.542.824 juta, meningkat sebesar 1,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.523.070 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya beban pajak neto.

**Tabel Laba Tahun Berjalan**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Laba sebelum beban pajak	2.030.049	1.937.974	92.075	4,75%
Beban pajak - neto	(487.225)	(414.904)	(72.321)	17,43%
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>1.542.824</b>	<b>1.523.070</b>	<b>19.754</b>	<b>1,30%</b>

## Penghasilan Komprehensif Lain Neto Setelah Pajak

Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak di tahun 2022 mencapai Rp225.045 juta, menurun sebesar 293,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai

Rp116.029 juta. Penurunan ini berasal dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**Tabel Penghasilan Komprehensif Lain Neto Setelah Pajak**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap	40.281	(4.665)	44.946	(963,47%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	100.163	41.074	59.089	143,86%
Penyesuaian saldo awal	(19.678)	-	(19.678)	0,00%
Pajak penghasilan terkait	(17.586)	(7.804)	(9.782)	125,35%
	103.180	28.605	74.575	260,71%
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(400.611)	103.326	(503.937)	(487,72%)
Penyesuaian saldo awal	(3.730)	-	(3.730)	0,00%
Pajak penghasilan terkait	76.116	(15.902)	92.018	(578,66%)
	(328.225)	87.424	(415.649)	(475,44%)
<b>Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak</b>	<b>(225.045)</b>	<b>116.029</b>	<b>(341.074)</b>	<b>(293,96%)</b>

## Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2022 mencapai Rp1.317.779 juta, menurun sebesar 19,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.639.099 juta. Penurunan ini dipicu oleh turunnya penghasilan komprehensif lain.

**Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan	1.542.824	1.523.070	19.754	1,30%
Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak	(225.045)	116.029	(341.074)	(293,96%)
<b>Laba komprehensif tahun berjalan</b>	<b>1.317.779</b>	<b>1.639.099</b>	<b>(321.320)</b>	<b>(19,60%)</b>

## Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar di tahun 2022 mencapai Rp102,75, meningkat sebesar 1,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai laba per saham dasar Rp101,43. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan laba untuk perhitungan laba per saham dasar.

**Tabel Laba Per Saham Dasar**

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.542.824	1.523.070	19.754	1,30%
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15.015.498.082	15.015.498.082	-	0,00%
<b>Laba per saham dasar</b>	<b>102,75</b>	<b>101,43</b>	<b>1,32</b>	<b>1,30%</b>

## Laporan Arus Kas

**Tabel Laporan Arus Kas**

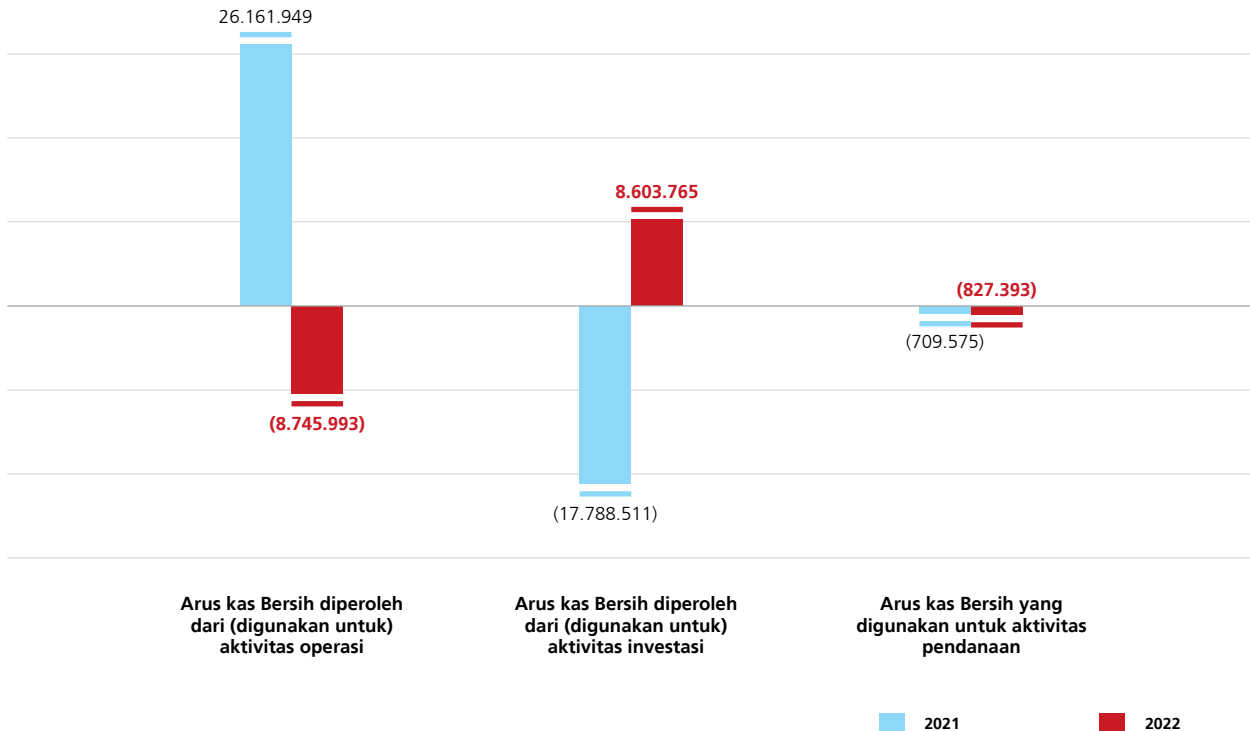
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2022 (2)	2021 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi	7.030.426	6.421.514	608.912	9,48%
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	(1.931.344)	(1.983.506)	52.162	(2,63%)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	476.364	384.463	91.901	23,90%
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	56.653	55.003	1.650	3,00%
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	172.136	416.380	(244.244)	(58,66%)
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(82.913)	(269.509)	186.596	(69,24%)
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.659.597)	(1.644.897)	(14.700)	0,89%
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.296.665)	(1.211.045)	(85.620)	7,07%
Pembayaran pajak	(389.372)	(378.098)	(11.274)	2,98%
<b>Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>	<b>2.375.688</b>	<b>1.790.305</b>	<b>585.383</b>	<b>32,70%</b>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(7.000)	-	(7.000)	0,00%
Kredit yang diberikan	(4.347.656)	(1.268.793)	(3.078.863)	242,66%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(4.095.066)	-	(4.095.066)	100,00%

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	<b>(4.402.162)</b>	9.152.359	(13.554.521)	(148,10%)
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	<b>(117.044)</b>	235.620		
Liabilitas segera	<b>278.638</b>	109.040	169.598	155,54%
Simpanan dari nasabah	<b>(1.434.484)</b>	14.733.587	(16.168.071)	(109,74%)
Simpanan dari bank lain	<b>(848.777)</b>	1.332.296	(2.181.073)	(163,71%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	<b>3.891.346</b>	-	3.891.346	100,00%
Liabilitas lain-lain	<b>(39.476)</b>	77.535	(117.011)	(150,91%)
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>(8.745.993)</b>	<b>26.161.949</b>	<b>(34.555.278)</b>	<b>(132,08%)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Penjualan (pembelian) surat berharga	<b>8.846.760</b>	(17.722.229)	26.568.989	(149,92%)
Perolehan aset tetap	<b>(248.269)</b>	(70.838)	(177.431)	250,47%
Penjualan aset tetap	<b>5.274</b>	4.556	718	15,76%
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>8.603.765</b>	<b>(17.788.511)</b>	<b>26.392.276</b>	<b>(148,37%)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	<b>(23.824)</b>	23.933	(47.757)	(199,54%)
Pembayaran dividen kas	<b>(782.458)</b>	(733.508)	(48.950)	6,67%
Pembayaran liabilitas sewa	<b>(21.111)</b>	-	(21.111)	0,00%
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(827.393)</b>	<b>(709.575)</b>	<b>(117.818)</b>	<b>16,60%</b>
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas</b>	<b>(969.621)</b>	<b>7.663.863</b>	<b>(8.633.484)</b>	<b>(112,65%)</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>20.957.752</b>	<b>13.293.890</b>	<b>7.663.862</b>	<b>57,65%</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	-	-	0,00%
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>19.988.131</b>	<b>20.957.753</b>	<b>(969.622)</b>	<b>(4,63%)</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	<b>1.988.262</b>	2.023.077	(34.815,00)	(1,72%)
Giro pada Bank Indonesia	<b>10.786.740</b>	8.805.300	1.981.440,00	22,50%
Giro pada bank lain	<b>303.129</b>	211.681	91.448,00	43,20%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan)	<b>6.910.000</b>	9.917.695	(3.007.695,00)	(30,33%)
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>19.988.131</b>	<b>20.957.753</b>	<b>(969.622)</b>	<b>(4,63%)</b>

## Grafik Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)



Pada akhir Tahun 2022, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp19.988.131 juta, menurun sebesar 4,63% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp20.957.753 juta. Penurunan saldo kas ini terutama akibat turunnya penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain dan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi.

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp8.745.993 juta, menurun sebesar 132,08% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatatkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp26.161.949 juta. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah di akui dan diperoleh.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp8.603.765 juta, meningkat sebesar 148,37% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp17.788.511 juta. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembelian obligasi pemerintah, pembelian efek-efek, serta pembelian aset tetap. Hal ini mengindikasikan Bank Jatim masih melakukan tambahan investasi namun belum mendapatkan imbal hasil dalam bentuk kas dari investasi yang dikeluarkan selama tahun 2021.

### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar Rp827.393 juta, meningkat sebesar 16,60% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp709.575 juta. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman yang diterima. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen dan penurunan efek-efek yang diterbitkan. Hal ini memiliki arti bahwa Bank Jatim masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

## Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

### Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar hutang Bank Jatim diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi bank dalam mengukur kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional bank.

#### Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan

kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya. LDR tahun 2022 sebesar 56,50%. meningkat 5,12% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 51,38%. Hal tersebut berarti likuiditas Bank Jatim mengalami perbaikan dan dalam kondisi baik sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Tabel Rasio Likiuditas

(dalam %)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	56,50%	51,38%	5,12%

#### Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tahun 2022 berada pada level yang aman sebesar 24,74% sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,21% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat pada level sebesar 23,52%. Level rasio CAR Bank Jatim tersebut menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas

untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI/OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI/OJK yang sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Tabel Rasio Solvabilitas

(dalam %)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
CAR-TIER I	23,73%	22,52%	1,22%
CAR-TIER II	1,00%	1,01%	0,00%
<b>CAR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)</b>	<b>24,74%</b>	<b>23,52%</b>	<b>1,21%</b>

### Rasio Keuangan Lain

Rasio keuangan lain Bank Jatim antara lain meliputi rasio rentabilitas, rasio efisiensi dan rasio kepatuhan disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio-Rasio Keuangan Lainnya

(dalam %)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
<b>RASIO RENTABILITAS</b>			
<i>Return on Assets (ROA)</i>	1,95%	2,05%	(0,10%)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Return on Equity (ROE)	16,24%	17,26%	(1,02%)
Net Interest Margin (NIM)	5,11%	5,11%	0,01%
<b>RASIO EFISIENSI</b>			
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	76,15%	75,95%	0,20%
<b>RASIO KEPATUHAN</b>			
Giro Wajib Minimum Rupiah	4,75%	5,73%	(0,98%)
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	7,39%	7,36%	0,03%

### Return On Assets (ROA)

ROA Tahun 2022 sebesar 1,95% atau mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,05%. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan peningkatan total aset.

### Return On Equity (ROE)

ROE Tahun 2022 sebesar 16,24% atau mengalami penurunan sebesar 1,02% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 17,26%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan laba.

### Net Interest Margin (NIM)

NIM mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari sebesar 5,11% pada tahun 2021 menjadi sebesar 5,11% pada akhir tahun 2022. Hal tersebut terutama dipengaruhi karena pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan pada tahun 2022.

### Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL, maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Rasio *Non Performing Loan*

(dalam %)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Non Performing Loan (NPL) Gross	2,83%	4,48%	(1,65%)
Non Performing Loan (NPL) Nett	1,01%	0,96%	0,05%

NPL *gross* tahun 2022 sebesar 2,83% atau mengalami penurunan 1,65% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 4,48%. Sedangkan untuk NPL *nett* tahun 2022 sebesar 1,01% atau meningkat 0,05% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,96%. Peningkatan nilai NPL *nett* dikarenakan dampak pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2022.

Kualitas kredit Bank dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, yaitu ke dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun, tujuan dari pengklasifikasian kredit tersebut adalah agar Bank dapat secara rutin melakukan *monitoring* terhadap kredit-kredit yang telah disalurkan.

**Tabel Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<b>2022</b>						
Modal kerja	10.968.010	9.802.144	457.228	20.906	37.479	650.253
Investasi	6.570.658	6.296.351	151.931	3.855	3.343	115.178
Konsumsi	28.657.989	27.883.864	295.970	26.323	37.043	414.789
<b>Jumlah</b>	<b>46.196.657</b>	<b>43.982.359</b>	<b>905.129</b>	<b>51.084</b>	<b>77.865</b>	<b>1.180.220</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)
<b>Jumlah kredit yang diberikan - neto</b>	<b>44.878.045</b>	<b>43.586.406</b>	<b>826.579</b>	<b>32.105</b>	<b>49.370</b>	<b>383.585</b>
<b>2021</b>						
Modal kerja	9.668.644	8.079.285	441.640	21.042	30.559	1.096.118
Investasi	5.825.776	5.523.597	61.653	6.491	1.614	232.421
Konsumsi	27.255.139	26.446.749	280.263	35.331	59.364	433.432
<b>Jumlah</b>	<b>42.749.559</b>	<b>40.049.631</b>	<b>783.556</b>	<b>62.864</b>	<b>91.537</b>	<b>1.761.971</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)
<b>Jumlah kredit yang diberikan - neto</b>	<b>40.918.142</b>	<b>39.787.241</b>	<b>721.953</b>	<b>38.271</b>	<b>54.641</b>	<b>316.036</b>
<b>Pertumbuhan 2021-2022 (%)</b>						
Modal kerja	1.299.366	1.722.859	15.588	(136)	6.920	(445.865)
Investasi	744.882	772.754	90.278	(2.636)	1.729	(117.243)
Konsumsi	1.402.850	1.437.115	15.707	(9.008)	(22.321)	(18.643)
<b>Jumlah</b>	<b>3.447.098</b>	<b>3.932.728</b>	<b>121.573</b>	<b>(11.780)</b>	<b>(13.672)</b>	<b>(581.751)</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	512.805	(133.563)	(16.947)	5.614	8.401	649.300
<b>Jumlah kredit yang diberikan - neto</b>	<b>3.959.903</b>	<b>3.799.165</b>	<b>104.626</b>	<b>(6.166)</b>	<b>(5.271)</b>	<b>67.549</b>

Kredit yang diberikan neto tahun 2022 sebesar Rp44.878.045 juta meningkat sebesar 9,68% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp40.918.142 juta dengan klasifikasi kredit lancar tahun

2022 sebesar Rp43.586.406 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp826.579 juta, kurang lancar sebesar Rp32.105 juta, diragukan sebesar Rp49.370 juta dan macet sebesar Rp383.585 juta.





## Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga tabungan, deposito dan giro Bank Jatim yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

**Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2022**

Tier	Suku Bunga
<b>SIMPEDA</b>	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta - < Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
<b>SIKLUS</b>	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta - < Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%
<b>SIKLUS MIKRO KECIL (SIUMI)</b>	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
<b>SIKLUS NELAYAN (SINYAL)</b>	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
<b>HAJI</b>	
Seluruh Nominal	1,00%
<b>TABUNGANKU</b>	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
<b>Catatan:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan <i>tiering</i> yang berlaku</li> <li>Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran</li> </ul>	
<b>SIKLUS PRIORITAS</b>	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%
<b>SIMPANAN LAKU PANDAI</b>	
Seluruh Nominal	0,50%

Tier	Suku Bunga
<b>SIKLUS PENSIUN</b>	
0 - < Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu - < Rp7,5 juta	1,25%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,50%
≥ Rp100 juta	1,75%
<b>SIKLUS VALAS</b>	
<b>USD</b>	
< USD100	0,00%
> USD100 - ≤ USD10.000	0,05%
> USD10.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,25%
<b>SGD</b>	
< USD100	0,00%
> USD100 - ≤ USD10.000	0,05%
> USD10.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,25%
<b>EUR</b>	
0 - EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
<b>JPY</b>	
Seluruh Nominal	0,00%
<b>HKD</b>	
Seluruh Nominal	0,00%

**Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2022**

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	2,60% pa	2,65% pa	2,75% pa	2,90% pa	2,95% pa	3,00% pa	3,00% pa
>Rp1 miliar	2,65% pa	2,75% pa	2,80% pa	2,90% pa	2,95% pa	3,00% pa	3,00% pa

**Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2022**

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
<b>USD</b>				
≥ USD1000 – Tak Terbatas	0,25% pa			
<b>SGD</b>				
≥ SGD1.000	0,10% pa			



Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
<b>EUR</b>				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
<b>JPY</b>				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
<b>HKD</b>				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			

\*) Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

**Tabel Suku Bunga Deposito On Call Desember 2022**

Tier	Suku Bunga
Deposito On Call (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau Reuters

**Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2022**

Tier	Suku Bunga
<b>RUPIAH</b>	
<b>Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif</b>	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
<b>Rekening Giro Escrow Account</b>	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)
<b>VALUTA ASING</b>	
<b>GIRO VALAS USD</b>	
≤ USD1.000	0,00%
> USD1.000 - ≤ USD10.000	0,05%
> USD10.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,25%
<b>GIRO VALAS SGD</b>	
≤ SGD1.000	0,00%
> SGD1.000 - ≤ SGD10.000	0,05%
> SGD10.000 - ≤ SGD100.000	0,15%
> SGD100.000	0,20%
<b>GIRO VALAS EUR</b>	
EUR	0,10%
<b>GIRO VALAS JPY</b>	
JPY	0,00%

**Tabel Nisbah Bagi Hasil**

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Giro Wadiah Perorangan	-	0,09%
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	-	0,10%
Giro Wadiah Umum Swasta	-	0,09%
Giro Mudharabah Umum Pemerintah	5,00%	0,47%
TabunganKu iB	-	0,09%
Tabungan Laku Pandai		0,13%
Tabungan Simpel	-	0,09%
Tabungan Santri		0,19%
Tabungan Umroh iB Amanah	-	0,09%
Tabungan Haji Amanah	10,00%	0,95%
Tabungan Barokah	12,50%	1,19%
Tabungan iB Barokah Sejahtera	4,00%	0,38%
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	2,37%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,42%
Deposit 1 Bulan	36,00%	3,42%
Deposit 3 Bulan	38,00%	3,61%
Deposit 6 Bulan	41,00%	3,89%
Deposit 12 Bulan	42,50%	4,03%

## Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

**Tabel Suku Bunga Dasar Kredit**

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2022				
Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
6,11%	7,17%	12,14%	7,36%	9,06%

Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank dalam hal bank memiliki *website* (dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).

## Analisis Kualitas Aset Produktif

Aset produktif tahun 2022 sebesar Rp94.164.611 juta, meningkat sebesar 6,63% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp88.307.346 juta. Kualitas aset produktif tahun 2022 kategori lancar sebesar Rp91.890.509 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp913.085 juta, kurang lancar sebesar Rp51.408 juta, diragukan sebesar Rp77.939 juta dan macet sebesar Rp1.231.670 juta.

**Tabel Kualitas Aset Produktif**

(dalam jutaan Rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2022					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<b>I PIHAK TERKAIT</b>							
1	Penempatan pada bank lain						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
3	Surat berharga yang dimiliki						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>Repo</i> )						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan						
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)						
	i. Rupiah	9.755	-	-	-	-	9.755
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-

INDIVIDUAL						
31 Desember 2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	30.268	-	-	-	-	30.268
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2022					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
b.	Bukan debitur UMKM						
	i. Rupiah	122.270	2.846	-	-	-	125.116
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
c.	Kredit yang direstrukturisasi (**)						
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
8	Penyertaan	-	-	-	-	-	-
9	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-
11	Komitmen dan kontinjensi						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
12	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>132.025</b>	<b>2.846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.871</b>
<b>II PIHAK TIDAK TERKAIT</b>							
1	Penempatan pada bank lain						
	a. Rupiah	4.362.457	-	-	-	-	4.362.457
	b. Valuta asing	112.672	-	-	-	-	112.672
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>						
	a. Rupiah	361	-	-	-	-	361
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
3	Surat berharga yang dimiliki						
	a. Rupiah	23.217.308	-	-	-	-	23.217.308
	b. Valuta asing	362	-	-	-	-	362
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>Repo</i> )						
	a. Rupiah	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-





No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2022					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )						
	a. Rupiah	7.822.847	-	-	-	-	7.822.847
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan						
	<b>a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>						
	i. Rupiah	1.124.305	44.226	3.299	2.312	30.025	1.204.167
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	<b>b. Bukan debitur UMKM</b>						
	i. Rupiah	42.726.029	858.057	47.785	75.553	1.150.195	44.857.619
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	<b>c. Kredit yang direstrukturisasi</b>						
	i. Rupiah	3.877.798	7.956	324	74	51.450	3.937.602
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	iii Kredit properti						
8	Penyertaan	-	-	-	-	-	-
9	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-
11	Komitmen dan kontinjensi						
	a. Rupiah	4.372.576	-	-	-	-	4.372.576
	b. Valuta asing	46.703	-	-	-	-	46.703
12	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>91.758.484</b>	<b>910.239</b>	<b>51.408</b>	<b>77.939</b>	<b>1.231.670</b>	<b>94.029.740</b>
		<b>91.890.509</b>	<b>913.085</b>	<b>51.408</b>	<b>77.939</b>	<b>1.231.670</b>	<b>94.164.611</b>
<b>III INFORMASI LAIN</b>							
1	Total aset bank yang dijaminan:						
	a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	b. Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-

INDIVIDUAL						
31 Desember 2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	9.021.347	511.880	30.926	33.031	960.521	10.557.705
	-	-	-	-	-	-
	30.848.043	269.028	31.938	58.506	801.450	32.008.965
	-	-	-	-	-	-
	3.151.684	26.157	547	-	122.576	3.300.964
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4.300.733	-	-	-	-	4.300.733
	42.758	-	-	-	-	42.758
	-	-	-	-	-	-
	<b>85.277.897</b>	<b>807.065</b>	<b>63.411</b>	<b>91.537</b>	<b>1.884.547</b>	<b>88.124.457</b>
	<b>85.458.138</b>	<b>809.713</b>	<b>63.411</b>	<b>91.537</b>	<b>1.884.547</b>	<b>88.307.346</b>
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2022						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
2	Total CKPN aset keuangan atas aset produktif	-	-	-	-	-	<b>1.366.019</b>	
3	Total PPA yang wajib dibentuk atas aset	-	-	-	-	-	<b>1.870.191</b>	
4	Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit	-	-	-	-	-	<b>2,63%</b>	
5	Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit	-	-	-	-	-	<b>17,61%</b>	
6	Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur	-	-	-	-	-	<b>43,49%</b>	
7	Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur	-	-	-	-	-	<b>40,90%</b>	
8	Lainnya							
a.	Penerusan kredit	-	-	-	-	-	<b>648.319</b>	
b.	Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah	-	-	-	-	-	-	
c.	Aset produktif yang dihapus buku	-	-	-	-	-	<b>3.728.649</b>	
d.	Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih	-	-	-	-	-	<b>1.059.644</b>	
e.	Aset produktif yang dihapus tagih	-	-	-	-	-	-	

## Struktur Permodalan Bank

### Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Modal Minimum/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Bank Jatim memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi

seluruh risiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Kebijakan manajemen modal Bank Jatim juga ditujukan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan.

INDIVIDUAL						
31 Desember 2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	1.864.822,00
	-	-	-	-	-	2.707.721,00
	-	-	-	-	-	24,77%
	-	-	-	-	-	16,13%
	-	-	-	-	-	53,48%
	-	-	-	-	-	50,77%
	-	-	-	-	-	662.168,00
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2.806.748,00
	-	-	-	-	-	948.783,00
	-	-	-	-	-	-

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia. Sepanjang 2022, Bank Jatim telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

## Rincian Struktur Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, modal bank terdiri atas:

### 1. Modal Inti

Modal bank yang terdiri dari modal saham yang disetor, cadangan yang diungkapkan sebagai modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), penurunan nilai atas instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara laporan keuangan kantor cabang internasional. Modal Inti Bank Jatim di tahun 2022 mencapai Rp10.346.392 juta, meningkat 11,29% atau Rp1.049.200 juta dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp9.297.192 juta karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan.

### 2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti)

Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari penyisihan penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman subordinasi, dan kenaikan nilai instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Total modal pelengkap Bank Jatim di tahun 2022 sebesar Rp437.563 juta meningkat 5,42% atau Rp22.492 juta dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp415.071 juta.

Tabel Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	2022	2021	2020	Pertumbuhan 2021-2022	
				Nominal	%
Modal Inti	10.346.392	9.297.192	8.411.757	1.049.200	11,29%
Modal Pelengkap	437.563	415.071	414.072	22.492	5,42%
<b>Total Modal Inti dan Modal Pelengkap</b>	<b>10.783.955</b>	<b>9.712.263</b>	<b>8.825.829</b>	<b>1.071.692</b>	<b>11,03%</b>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit	34.567.488	32.790.641	32.711.702	1.776.847	5,42%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional	8.917.841	8.397.351	7.978.478	520.490	6,20%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar	108.144	98.936	85.830	9.208	9,31%
<b>Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko</b>	<b>43.593.473</b>	<b>41.286.928</b>	<b>40.776.010</b>	<b>2.306.545</b>	<b>5,59%</b>
<b>RASIO KECUKUPAN MODAL (%)</b>					
Rasio CET 1	23,73%	22,52%	20,63%	1,22%	5,40%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	24,80%	23,58%	21,70%	1,22%	5,17%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	24,74%	23,52%	21,64%	1,21%	5,16%

## Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

## Pengungkapan Kuantitatif Eksposure Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan,

fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan yang disempurnakan secara berkala. dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

## Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
<b>POSISI KEUANGAN</b>						
Giro pada Bank Indonesia	-	10.786.740	-	-	-	10.786.740
Giro pada bank lain	-	302.688	-	-	-	302.688
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.000	2.702.379	538.000	449.000	2.071.796	6.913.175
Tagihan <i>spot</i> dan derivatif	361	-	-	-	-	361
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	14.740.662	-	-	-	14.740.662
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	8.476.609	-	-	-	8.476.609
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	4.095.066	-	-	-	4.095.066
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	7.822.847	-	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	8.483.137	1.014.245	677.316	-	-	10.174.698
Investasi	3.359.791	2.161.406	370.368	479.607	-	6.371.172
Konsumsi	28.151.362	143.306	37.289	70	148	28.332.175
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	629.389	13.694	2.288	752	2	646.125
<b>Total</b>	<b>42.062.187</b>	<b>52.259.642</b>	<b>1.625.261</b>	<b>929.429</b>	<b>2.071.946</b>	<b>98.948.465</b>
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.412.262	971.071	610	15.569	-	3.399.512
Bank garansi yang diterbitkan	1.019.766	-	-	-	-	1.019.766
<b>Total</b>	<b>3.432.028</b>	<b>971.071</b>	<b>610</b>	<b>15.569</b>	<b>-</b>	<b>4.419.278</b>



Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
<b>POSISI KEUANGAN</b>						
Giro pada Bank Indonesia	-	8.805.300	-	-	-	8.805.300
Giro pada bank lain	-	211.443	-	-	-	211.443
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.001	5.705.135	5380	4490	2.071.796	9.915.932
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	20.828.263	-	-	-	20.828.263
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	11.554.760	-	-	-	11.554.760
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3.420.685	-	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	-	230.019
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	7.404.378	987.389	71.261	996	12.400	8.476.424
Investasi	2.715.972	2.267.500	110.798	473.626	-	5.567.896
Konsumsi	26.695.730	145.689	32.238	-	165	26.873.822
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	771.149	20.119	1.128	744	760	793.900
<b>Total</b>	<b>38.969.249</b>	<b>53.946.283</b>	<b>753.425</b>	<b>924.366</b>	<b>2.085.121</b>	<b>96.678.444</b>
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.370.071	784.709	2.784	24.416	-	3.181.980
Bank garansi yang diterbitkan	1.161.510	-	-	-	-	1.161.510
<b>Total</b>	<b>3.531.581</b>	<b>784.709</b>	<b>2.784</b>	<b>24.416</b>	<b>-</b>	<b>4.343.490</b>

## Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
<b>POSISI KEUANGAN</b>						
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	-	10.786.740
Giro pada bank lain	-	-	302.688	-	-	302.688
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	-	6.913.175
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	361	-	-	361
Surat berharga	-	-	-	-	-	-
Biaya perolehan diamortisasi	12.425.335	-	327.018	1.988.309	-	14.740.662

Uraian	31 Desember 2022					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	7.822.847	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	-	-	-	-	286.147	286.147
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	177.813	327.211	315.826	2.937.209	6.416.639	10.174.698
Investasi	5.662	1.436	-	4.828.916	1.535.158	6.371.172
Konsumsi	-	1.000	3.897	14.773	28.312.505	28.332.175
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	433	2.025	535	41.024	602.108	646.125
<b>Total</b>	<b>42.880.833</b>	<b>331.672</b>	<b>8.773.172</b>	<b>9.810.231</b>	<b>37.152.557</b>	<b>98.948.465</b>
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	132.932	-	3.266.580	3.399.512
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.019.766	1.019.766
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.932</b>	<b>-</b>	<b>4.286.346</b>	<b>4.419.278</b>

**Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	Perseorangan	Total
<b>POSISI KEUANGAN</b>						
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300
Giro pada bank lain	-	-	211.443	-	-	211.443
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.931
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	16.071.667	-	139.804	4.616.792	-	20.828.263
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	-	-	-	-	11.554.760
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	3.420.685	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	-	-	-	-	230.019	230.019
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	29.929	169.092	384.779	2.726.787	5.165.837	8.476.424
Investasi	40.080	291	-	4.425.534	1.101.991	5.567.896
Konsumsi	-	-	-	10.593	26.863.229	26.873.822



Uraian	31 Desember 2021					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	Perseorangan	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	732	1.155	721	128.463	662.829	793.900
<b>Total</b>	<b>46.418.400</b>	<b>170.538</b>	<b>4.157.432</b>	<b>11.908.169</b>	<b>34.023.905</b>	<b>96.678.443</b>
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	271.800	-	2.910.180	3.181.980
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.161.510	1.161.510
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271.800</b>	<b>-</b>	<b>4.071.690</b>	<b>4.343.490</b>

### Pengukuran Risiko Kredit

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at*

*Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

### Evaluasi Penurunan Nilai

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

**Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Giro Pada Bank Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah	190.456	-	-	190.456	148.821	-	-	148.821
Mata uang asing	112.673	-	-	112.673	62.860	-	-	62.860
Total	303.129	-	-	303.129	211.681	-	-	211.681
Cadangan kerugian penurunan nilai	(441)	-	-	(441)	(238)	-	-	(238)
<b>Neto</b>	<b>302.688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302.688</b>	<b>211.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.443</b>

**Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Penempatan pada Bank Indonesia	2.744.329	-	-	2.744.329	8.025.695	-	-	8.025.695
<i>Interbank call money</i>	4.165.000	-	-	4.165.000	1.892.000	-	-	1.892.000
Deposito berjangka	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-
Total	6.916.329	-	-	6.916.329	9.917.695	-	-	9.917.695
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	-	-	(3.154)	(1.763)	-	-	(1.763)
<b>Neto</b>	<b>6.913.175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.913.175</b>	<b>9.915.932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.915.932</b>

**Tabel Evaluasi Penurunan Penurunan Nilai Surat Berharga**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Surat Utang Negara	20.501.941	-	-	20.501.941	27.085.033	-	-	27.085.033
Obligasi	1.851.074	-	-	1.851.074	2.071.699	-	-	2.071.699
Sukuk Bank Indonesia	400.000	-	-	400.000	541.392	-	-	541.392
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	-	-	325.000	139.000	-	-	139.000
Reksadana	90.000	-	-	90.000	2.339.000	-	-	2.339.000
Negotiable Certificate of Deposit	47.237	-	-	47.237	206.095	-	-	206.095
Surat Berharga Jangka Menengah	2.056	-	-	2.056	-	-	-	-
Mata uang asing:								
Wesel	362	-	-	362	6.747	-	-	6.747
Total	23.217.671	-	-	23.217.671	32.388.966	-	-	32.388.966
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(400)	-	-	(400)	(5.493)	-	-	(5.493)
<b>Neto</b>	<b>23.217.271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.217.271</b>	<b>32.383.023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.383.023</b>

**Tabel Evaluasi Penurunan Penurunan Nilai Kredit Yang Diberikan**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Kredit multiguna	23.578.636	37.542	181.718	23.797.896	22.065.382	44.080	189.543	22.299.005
Kredit modal kerja	2.400.068	104.398	293.573	2.798.039	2.335.341	100.375	628.283	3.063.999
Restrukturisasi Covid-19	3.160.896	33.974	337.404	3.532.274	2.440.353	80.778	160.161	2.681.292
Perdagangan besar dan eceran	1.654.813	91.337	200.612	1.946.762	1.809.681	127.280	257.577	2.194.538
Kredit pegawai	2.050.789	3.144	23.193	2.077.126	2.096.595	4.227	23.497	2.124.319
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	1.220.386	11.991	119.168	1.351.545	1.496.205	9.299	362.719	1.868.223
Kredit kepemilikan rumah	1.222.011	116.132	241.184	1.579.327	1.316.894	106.379	286.119	1.709.392
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	747.574	8.375	25.022	780.971	1.580.845	7.783	40.464	1.629.092
Pertanian, perburuan dan kehutanan	748.259	117.445	67.375	933.079	897.087	29.202	69.892	996.181
Industri pengolahan	1.614.145	20.003	51.057	1.685.205	818.883	19.370	54.050	892.303
Kredit usaha rakyat	2.393.551	29.099	12.857	2.435.507	576.342	262	-	576.604
Perantara keuangan	604.442	18.758	24.849	648.049	417.828	11.948	20.970	450.746
Linkage program	216.994	-	-	216.994	267.732	1	267	267.999
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	129.987	4.617	8.080	142.684	116.664	7.941	8.706	133.311
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	147.980	914	328	149.222	64.873	13	-	64.886
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	18.096	635	10.566	29.297	15.743	402	11.116	27.261
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	2.142	2.142	-	-	4.036	4.036



Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	8.773	294	499	9.566	2.398	382	93	2.873
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	317	317	-	-	770	770
Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.989	-	-	2.989				-
Lain-lain	174.194	-	-	174.194	361	-	-	361
	<b>42.094.583</b>	<b>598.658</b>	<b>1.599.944</b>	<b>44.293.185</b>	38.319.207	549.721	2.118.263	40.987.191
Cadangan kerugian penurunan nilai	(263.059)	(61.303)	(911.041)	(1.235.403)	(15.807)	(73.110)	(1.659.070)	(1.747.987)
<b>Konvensional - Neto</b>	<b>41.831.524</b>	<b>537.355</b>	<b>688.903</b>	<b>43.057.782</b>	<b>38.303.400</b>	<b>476.611</b>	<b>459.193</b>	<b>39.239.204</b>

Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021		
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai		Total	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
		Individu	Kolektif			Individu	Kolektif
Syariah	1.802.438	101.034	-	1.903.472	1.670.823	91.545	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(33.308)	(49.901)	-	(83.209)	(35.476)	(47.954)	-
<b>Syariah - Neto</b>	<b>1.769.130</b>	<b>51.133</b>	<b>-</b>	<b>1.820.263</b>	<b>1.635.347</b>	<b>43.591</b>	<b>-</b>
<b>Total - neto</b>	<b>43.600.654</b>	<b>588.488</b>	<b>688.903</b>	<b>44.878.045</b>	<b>39.938.747</b>	<b>520.202</b>	<b>459.193</b>

Tabel Mutasi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total
Saldo awal tahun	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417	960.358	239.533	254.830	1.454.721
Penyisihan tahun berjalan	267.676	52.363	67.715	387.754	261.450	22.153	149.514	433.117
Penghapusan tahun berjalan	(666.582)	(110.757)	(123.220)	(900.559)	(29.587)	(3.807)	(23.027)	(56.421)
Saldo 31 Desember	<b>793.315</b>	<b>199.485</b>	<b>325.812</b>	<b>1.318.612</b>	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	570.537	92.889	203.467	866.893	1.179.676	249.657	332.682	1.762.015
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	222.778	106.596	122.345	451.719	12.545	8.222	48.635	69.402
Saldo 31 Desember	<b>793.315</b>	<b>199.485</b>	<b>325.812</b>	<b>1.318.612</b>	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

**Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2022**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat Tinggi	Tingkat Standar			
<b>BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI</b>					
Surat Utang Negara	12.025.332	-	-	-	12.025.332
Reksadana	90.000	-	-	-	90.000
Obligasi	1.851.074	-	-	-	1.851.074
Sukuk Bank Indonesia	400.000	-	-	-	400.000
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	47.237	-	-	-	47.237
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	-	-	-	325.000
Wesel	2.418	-	-	-	2.418
	14.741.062	-	-	-	14.741.062
<b>NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Surat Utang Negara	8.476.609	-	-	-	8.476.609
<b>BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI</b>					
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	10.786.740
Giro pada Bank lain	303.129	-	-	-	303.129
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	-	-	-	6.916.329
Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivative</i>	361	-	-	-	361
Tagihan <i>reverse repo</i>	7.822.847	-	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan dan pembiayaan Syariah					
Modal kerja	-	10.259.372	-	708.638	10.968.010
Investasi	-	6.448.282	-	122.376	6.570.658
Konsumsi	-	28.179.834	-	478.155	28.657.989
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	646.125	-	-	646.125
<b>Total</b>	<b>49.333.224</b>	<b>45.533.613</b>	<b>-</b>	<b>1.309.169</b>	<b>96.176.006</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(499.126)	-	(823.481)	(1.322.607)
<b>Neto</b>	<b>49.333.224</b>	<b>45.034.487</b>	<b>-</b>	<b>485.688</b>	<b>94.853.399</b>

**Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat tinggi	Tingkat standar			
<b>BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI</b>					
Surat Utang Negara	15.530.273	-	-	-	15.530.273
Obligasi	2.071.699	-	-	-	2.071.699
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	541.392	-	-	-	541.392
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	139.000	-	-	-	139.000
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	206.095	-	-	-	206.095
Reksadana	2.339.000	-	-	-	2.339.000
Wesel	6.747	-	-	-	6.747
	20.834.206				20.834.206
<b>NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Surat Utang Negara	11.554.760	-	-	-	11.554.760
<b>BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI</b>					
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	8.805.300
Giro pada Bank lain	211.681	-	-	-	211.681
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	-	-	-	9.917.695
Tagihan <i>reverse repo</i>	3.420.685	-	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	230.019
Kredit yang diberikan					
Modal kerja	-	8.520.925	-	1.147.719	9.668.644
Investasi	-	5.585.250	-	240.526	5.825.776
Konsumsi	-	26.727.012	-	528.127	27.255.139
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	793.900	-	-	793.900
<b>Total</b>	<b>54.974.345</b>	<b>41.627.087</b>	-	<b>1.916.372</b>	<b>98.517.805</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(77.347)	-	(1.787.474)	(1.864.821)
<b>Neto</b>	<b>54.974.346</b>	<b>41.549.740</b>	-	<b>128.898</b>	<b>96.652.984</b>

## Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar, variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta

aktivitas *treasury* dan risiko yang melekat pada bisnis. Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga. Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

**Tabel Rata-Rata Tingkat Suku Bunga Kontraktual Per Tahun Untuk Aset dan Liabilitas Keuangan Yang Signifikan**

(dalam %)

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Dolar Amerika Serikat
<b>ASET</b>				
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro pada bank lain	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1,33%	0,47%	3,00%	0,03%
Surat-surat berharga	7,99%	0,00%	7,67%	0,00%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	5,38%	0,00%	0,00%	0,00%
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,80%	0,00%	3,50%	0,00%
Kredit yang diberikan	10,50%-12,75%	0,00%	10,50%-12,75%	0,00%
<b>LIABILITAS</b>				
Simpanan dari nasabah	0,00% - 2,74%	0,00% - 0,16%	0,00%-3,00%	0,00%-0,25%
Simpanan dari bank lain	0,00% - 2,27%	-	0,31%-3,22%	-

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

**Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (Gross) Tahun 2022**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
<b>ASET KEUANGAN</b>						
Kas	1.988.262	-	-	-	-	1.988.262
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	-	10.786.740
Giro pada bank lain	302.688	-	-	-	-	302.688
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	-	6.913.175
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	1.578.463	4.995.096	8.167.102	-	-	14.740.661
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	8.476.609	-	-	8.476.609
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	-	-	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						
Modal kerja	-	-	-	10.968.010	-	10.968.010
Investasi	-	-	-	6.570.658	-	6.570.658

Uraian	31 Desember 2022					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
Konsumsi	-	-	-	28.657.989	-	28.657.989
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74.213	14.396	557.516	-	-	646.125
<b>Total aset keuangan</b>	<b>33.847.601</b>	<b>5.009.492</b>	<b>17.201.227</b>	<b>46.196.657</b>	<b>-</b>	<b>102.254.977</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						
Liabilitas segera	872.514	-	-	-	-	872.514
Simpanan dari nasabah						
Giro	23.634.773	-	-	-	-	23.634.773
Tabungan	26.343.817	-	-	-	-	26.343.817
Deposito berjangka	-	-	-	31.788.793	-	31.788.793
Simpanan dari bank lain	3.334.563	4.560	-	-	-	3.339.123
Pinjaman yang diterima	-	481.532	-	-	71.867	553.399
Beban yang masih harus dibayar	520.840	-	-	-	-	520.840
Liabilitas lain-lain	550.119	-	-	-	-	550.119
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>55.256.626</b>	<b>486.092</b>	<b>-</b>	<b>31.788.793</b>	<b>71.867</b>	<b>87.603.378</b>
<b>Gap repricing suku bunga - Neto</b>	<b>(21.409.025)</b>	<b>4.523.400</b>	<b>17.201.227</b>	<b>14.407.864</b>	<b>(71.867)</b>	<b>14.651.599</b>

**Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (Gross) Tahun 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
<b>ASET KEUANGAN</b>						
Kas	2.023.077	-	-	-	-	2.023.077
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300
Giro pada bank lain	211.443	-	-	-	-	211.443
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.932
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	6.022.859	2.579.296	12.226.108	-	-	20.828.263
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	-	-	-	-	11.554.760
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali						
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685

Uraian	31 Desember 2021					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
Tagihan lainnya	230.019					230.019
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	-	-	-	9.668.644	-	9.668.644
Investasi	-	-	-	5.825.776	-	5.825.776
Konsumsi	-	-	-	27.255.139	-	27.255.139
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.497	35.352	744.051	-	-	793.900
<b>Total aset keuangan</b>	<b>42.198.572</b>	<b>2.614.648</b>	<b>12.970.159</b>	<b>42.749.559</b>	<b>-</b>	<b>100.532.938</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						
Liabilitas segera	593.875	-	-	-	-	593.875
Simpanan dari nasabah						
Giro	25.976.409	-	-	-	-	25.976.409
Tabungan	24.898.778	-	-	-	-	24.898.778
Deposito berjangka	-	-	-	32.326.680	-	32.326.680
Simpanan dari bank lain	4.186.840	1.060	-	-	-	4.187.900
Pinjaman yang diterima	-	578.795	-	-	76.493	655.288
Beban yang masih harus dibayar	478.647	-	-	-	-	478.647
Liabilitas lain-lain	529.738	-	-	-	-	529.738
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>56.664.287</b>	<b>579.855</b>	<b>-</b>	<b>32.326.680</b>	<b>76.493</b>	<b>89.647.315</b>
<b>Gap repricing suku bunga - neto</b>	<b>(14.465.715)</b>	<b>2.034.793</b>	<b>12.970.159</b>	<b>10.422.879</b>	<b>(76.493)</b>	<b>10.885.623</b>

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin prosentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi

komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

**Tabel Sensitivitas Terhadap Kemungkinan Perubahan**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	
	Kenaikan	Penurunan
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	23.798	(23.798)

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing. Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank

mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia). Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.



## Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk*

*Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

**Tabel Rasio dari Aset Likuid Neto Terhadap Simpanan Nasabah**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas dan setara kas	19.994.460	20.957.753
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-
Tagihan <i>reverse repo</i>	7.822.847	3.420.685
Simpanan dari bank lain	3.339.123	4.187.900
<b>Total</b>	<b>35.251.496</b>	<b>28.566.338</b>
Simpanan dari nasabah	81.767.383	83.201.867
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	43,11%	34,33%

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

**Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2022**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
<b>ASET KEUANGAN</b>						
Kas	1.988.262	1.988.262	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	230.541	-	-	-	10.556.199
Giro pada bank lain	302.688	302.688	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	6.306.518	606.657	-	-	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	14.740.661	725.515	852.948	2.367.794	2.627.302	8.167.102
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	4.095.066	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	7.440.160	-	-	192.726	189.961
Tagihan lainnya	286.147	286.147	-	-	-	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						
Modal kerja	10.174.698	474.092	591.709	1.027.046	1.904.233	6.177.618
Investasi	6.371.172	35.082	2.414	7.284	32.541	6.293.851
Konsumsi	28.332.175	16.380	25.106	68.179	320.447	27.902.063

Uraian	31 Desember 2022					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	25.795	48.418	9.901	4.495	557.516
<b>Total</b>	<b>100.936.365</b>	<b>21.926.246</b>	<b>2.127.252</b>	<b>3.480.204</b>	<b>5.081.744</b>	<b>68.320.919</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						
Liabilitas segera	916.091	916.091	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	81.767.383	11.214.472	16.200.878	1.699.788	10.878.340	41.773.905
Simpanan dari bank lain	3.339.123	3.287.933	46.630	60	4.500	-
Pinjaman yang diterima	553.399	150.517	-	-	-	402.882
Beban yang masih harus dibayar	520.840	520.840	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	550.119	550.119	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>87.646.955</b>	<b>16.639.972</b>	<b>16.247.508</b>	<b>1.699.848</b>	<b>10.882.840</b>	<b>42.176.787</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>13.289.410</b>	<b>5.286.274</b>	<b>(14.120.256)</b>	<b>1.780.356</b>	<b>(5.801.096)</b>	<b>26.144.132</b>

**Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
<b>ASET KEUANGAN</b>						
Kas	2.023.077	2.023.077	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	1.781.878	-	-	-	7.023.422
Giro pada bank lain	211.443	211.443	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	9.313.829	290.619	252.644	39.861	18.979
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	20.828.263	3.404.795	2.618.064	1.668.261	911.035	12.226.108
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	10.536.388	1.018.372	-	-	-
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	3.420.685	-	-	-	-
Tagihan lainnya	230.019	230.019	-	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	8.476.424	969.980	624.357	1.344.396	1.894.283	3.643.408
Investasi	5.567.896	115.976	3.395	7.582	23.170	5.417.773
Konsumsi	6.873.822	21.785	16.361	53.678	238.264	26.543.734
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	2.628	11.869	17.399	17.953	744.051
<b>Total</b>	<b>98.701.521</b>	<b>32.032.483</b>	<b>4.583.037</b>	<b>3.343.960</b>	<b>3.124.566</b>	<b>55.617.475</b>



Uraian	31 Desember 2021					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						
Liabilitas segera	593.875	593.875	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	83.201.867	12.511.223	19.267.011	4.511.689	3.899.151	43.012.793
Simpanan dari bank lain	4.187.900	4.043.920	142.920	60	1.000	-
Pinjaman yang diterima	655.288	257.993	-	7.410	-	389.885
Beban yang masih harus dibayar	478.647	478.647	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	529.738	529.738	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>89.647.315</b>	<b>18.415.396</b>	<b>19.409.931</b>	<b>4.519.159</b>	<b>3.900.151</b>	<b>43.402.678</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>9.054.206</b>	<b>13.617.087</b>	<b>(14.826.894)</b>	<b>(1.175.199)</b>	<b>(775.585)</b>	<b>12.214.797</b>

## Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Bank Jatim tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal di tahun 2022.

## Investasi Barang Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

## Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal**

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2021
Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap	1.124.105	1.037.910
Inventaris	621.891	471.237
Kendaraan Bermotor	45.543	33.419
<b>Total</b>	<b>1.791.539</b>	<b>1.542.566</b>

## Tujuan Investasi Barang Modal

Belanja barang modal Bank Jatim antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal

dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

## Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Komitmen dan Kontinjensi**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>KOMITMEN</b>		
<b>Tagihan komitmen</b>		
Rupiah:		
Pembelian <i>spot</i> dan derivatif	156.070	-
Lainnya	1.974.389	908.956
	2.130.459	908.956
Mata uang asing:		
Pembelian <i>spot</i> dan derivatif	-	-
	-	-
<b>Liabilitas komitmen</b>		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.399.512	3.181.980
<b>Total liabilitas komitmen, neto</b>	<b>1.269.053</b>	<b>2.273.024</b>
<b>KONTINJENSI</b>		
<b>Tagihan kontinjensi</b>		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	119.108	195.337
Lainnya	13	13
<b>Jumlah tagihan kontinjensi</b>	<b>119.121</b>	<b>195.350</b>
<b>Liabilitas kontinjensi</b>		
Rupiah:		
Bank garansi yang diberikan	973.063	1.118.753
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diberikan	46.703	42.758
<b>Jumlah liabilitas kontinjensi</b>	<b>1.019.766</b>	<b>1.161.511</b>
<b>Total liabilitas kontinjensi, neto</b>	<b>900.645</b>	<b>966.161</b>
<b>Total liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto</b>	<b>2.169.698</b>	<b>3.239.185</b>

## Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

## Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2023

Prospek ekonomi global mengalami penurunan yang dipengaruhi terutama oleh adanya inflasi yang semakin persisten, pengetatan kebijakan moneter dan perang di Ukraina. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) rilis Oktober 2022 memproyeksi *outlook* pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7% di tahun 2023. Sementara proyeksi inflasi global sebesar 6,5% di tahun 2023. Perkembangan risiko ekonomi global telah mengganggu aktivitas manufaktur global yang digambarkan oleh PMI Manufaktur global berada pada level kontraksi pada September 2022 setelah lebih 2 (dua) tahun terakhir berada pada level ekspansi. Perkembangan sektor keuangan global juga mengalami tekanan yang diperlihatkan adanya kenaikan imbal hasil dan penguatan dolar Amerika Serikat akibat pengetatan kebijakan moneter. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional, namun masih tetap terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan *peer countries*. Pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.

Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi

di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (*gini ratio*) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan terakselerasi dibandingkan tahun 2022, sejalan dengan tren perbaikan ekonomi global dan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 3,45%-5,15% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan didorong oleh faktor semakin terkendalinya Pandemi Covid-19 sehingga mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi juga kembali normal sehingga menjadikan perekonomian beranjak pulih kembali seperti sediakala.

Kapasitas dan perkembangan sektor jasa keuangan tahun 2023 masih dipengaruhi oleh sentiment pemulihan ekonomi. Perkiraan pertumbuhan kinerja sektor jasa keuangan dan perbankan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel Proyeksi Pertumbuhan Kinerja Sektor Jasa Keuangan dan Perbankan Tahun 2023**

Lembaga	Kredit	Total DPK
Otoritas Jasa Keuangan <sup>a</sup>	8,5%	-
Bank Indonesia <sup>b</sup>	10% - 12%	-

**Sumber:**

<sup>a</sup> Pernyataan Ketua Dewan Komisiner OJK finansial.bisnis.com Juni 2022;

<sup>b</sup> Pernyataan Gubernur Bank Indonesia dari keuangan.kontan.co.id November 2022

Ke depan, arah pengembangan digitalisasi industri perbankan diperkirakan akan semakin pesat seiring dengan dikeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum yang mengakomodir Bank Digital. Dalam POJK tersebut, Bank Digital diartikan sebagai bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Dalam lingkup global, dinamika industri keuangan dan perbankan digital direspon dengan

mulai bermunculannya neobank. Neobank terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *full stack neobank* (memiliki izin usaha dan beroperasi *fully digital* tanpa jaringan fisik, contoh *neobank* yang beroperasi di Amerika seperti Monzo dan Revolut) dan *front-end focused neobank* (tidak memiliki izin usaha mandiri sehingga harus beroperasi dalam kemitraan dengan perbankan untuk menyediakan layanan perbankan, salah satu contoh *front end focused neobank* yang telah beroperasi di Indonesia adalah Jenius).

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan dan langkah strategis Bank Jatim diarahkan pada peningkatan pertumbuhan bisnis pasca pemulihan pandemi Covid-19, perbaikan dan optimalisasi bidang teknologi informasi yang berfokus pada keunggulan internal berikut:

1. Infrastruktur teknologi perbankan digital yang cukup memadai dalam bersaing dengan industri keuangan saat ini yang semakin maju.
2. Kolaborasi dengan berbagai pihak *stakeholder* seperti *marketplace*, *fintech*, serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan bisnis.
3. Cakupan jaringan kantor Bank Jatim yang menjangkau hingga wilayah kepulauan di Jawa Timur, serta wilayah kota besar seperti Jakarta dan Batam.
4. Tingkat permodalan Bank yang relatif tinggi.
5. Hubungan dan sinergi yang baik dengan *shareholders*, terutama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Bank Jatim optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Adapun peluang Bank Jatim di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pola perilaku masyarakat akibat disrupsi teknologi khususnya dalam pemanfaatan teknologi perbankan.
2. Jumlah penduduk usia millennial dan Generasi Z yang notabene merupakan pengguna aktif *internet* dan *e-commerce* serta potensi ekonomi dan keuangan digital semakin mendominasi.
3. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan.
4. Masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UMKM yang semakin berkembang.
5. Adanya program pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan di Provinsi Jawa Timur.

Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023, arah kebijakan dan langkah strategis Bank tetap meningkatkan pertumbuhan bisnis, inovasi teknologi dan efisiensi. Fokus pengembangan bisnis meliputi:

1. Melakukan penyesuaian pertumbuhan kredit dan jaringan kantor dengan pertimbangan *variable mapping* potensi wilayah.
2. Memberikan layanan berkualitas tinggi (*High Quality Service*).
3. Pengembangan digitalisasi bisnis dan *supporting* serta menargetkan kinerja di atas industri BPD.
4. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja (efektifitas KPI).
5. Pengembangan aliansi *fintech/e-commerce* dan bisnis berbasis ekosistem Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan komunitas di wilayah Jawa Timur.
6. Transformasi struktur organisasi, sumber daya manusia (*human capital transformation*) dan *digital banking*.
7. Konektivitas dan menjalin ekosistem (*Connectivity and Building Ecosystem*).
8. Meningkatkan *Security* Teknologi Informasi.
9. Pengelolaan alokasi dana Pemerintah Daerah agar tetap terjaga.

Dalam upaya menetapkan target tahun 2023 didasarkan pada *environmental scanning analysis* yang diselaraskan dengan dinamika perkembangan industri perbankan pasca pemulihan

pandemi Covid-19 serta selaras dengan visi menjadi BPD nomor 1 di Indonesia dengan melakukan analisa kemampuan daya saing Bank untuk tumbuh dan berkembang dalam intensitas persaingan dan dinamika perekonomian yang makin meningkat.

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan dan langkah strategis Bank diarahkan pada strategi bisnis dan pendukung bisnis tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menjadi BPD peringkat 2 (Pencapaian Kredit) di tahun 2023.
2. Perubahan model bisnis dari per skim kredit menjadi segmentasi berdasarkan *plafond*
  - a. Kredit Konsumer
  - b. Kredit Mikro Ritel dan Menengah
  - c. Kredit Komersial dan Korporasi
3. Meningkatkan aset non organik dengan aksi korporasi melakukan penyertaan modal kepada lembaga keuangan yang memiliki modal kurang dari Rp3 triliun.
4. Meningkatkan *fee based income* dengan menambah fitur *e-channel* Bank Jatim
5. Menjaga Ratio CASA di  $\geq 61,51\%$ , Ratio RPIM  $\pm 42,66\%$ .
6. Memperkuat proses *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah antara lain mengevaluasi *key performance indicator* (KPI) satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.
7. Tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan aset BPD SI.
8. Aksi Korporasi penyertaan modal kepada lembaga keuangan milik daerah di Indonesia sebesar  $\pm$  Rp1,06 triliun.
9. Memperkecil *gap* dengan penyaluran kredit Bank Jateng dan Bank DKI.
10. Memperkecil *gap* dengan penghimpunan DPK Bank Bjb.
11. Percepatan proses perkreditan serta kerjasama dengan Pemerintah pusat maupun daerah melalui Sinergitas dengan Nawa Bhakti Satya.
12. Optimalisasi ekspansi kredit.
13. Optimalisasi peran Tresuri.

Untuk strategi pendukung bisnis tahun 2023 yaitu memperkuat ketahanan bisnis dengan fokus pada:

1. Reposisi jaringan khususnya wilayah Surabaya dan Cabang Kelas 1.
2. Perubahan struktur organisasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis tersebut.
3. Memperkuat proses *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah antara lain mengevaluasi *key performance indicator* (KPI) satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.
4. Evaluasi kinerja divisi agar lebih efektif dan efisien.
5. Perbaikan SLA.
6. Evaluasi implementasi struktur organisasi baru.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aktivitas pelatihan.
8. Perbaikan remunerasi.
9. Evaluasi dan implementasi *reward and punishment*.
10. Memperbaiki sistem *recruitment* pegawai baru.
11. Penguatan budaya kerja perusahaan melalui *training change agent*.
12. Menetapkan budaya kerja dalam KPI.
13. *Roadmap* perbaikan GCG agar berada di peringkat 2.

## Pencapaian Target dan Target Ke Depan

### Pencapaian Target

Secara umum, pencapaian target Bank Jatim di 2022 telah menunjukkan hasil yang baik. Uraian terkait perbandingan target dan realisasi keuangan, struktur modal, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

### Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Perbandingan target dan realisasi keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan 2022**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
<b>POSISI KEUANGAN</b>			
Aset	103.031.367	101.494.301	101,51%
Kredit Yang Diberikan	46.196.657	45.487.247	101,56%
Dana Pihak Ketiga	81.767.383	85.803.143	95,30%
Giro	23.634.774	27.173.520	86,98%
Tabungan	26.343.816	25.682.027	102,58%
Deposito berjangka	31.788.793	32.947.596	96,48%
<b>LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pendapatan bunga	6.882.651	6.452.945	106,66%
Pendapatan operasional lainnya	533.569	682.817	78,14%
Laba tahun berjalan	1.542.824	1.530.884	100,78%
<b>RASIO KEUANGAN (%)</b>			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	24,74	24,46	101,14%
Non Performing Loan (NPL) Gross	2,83	3,95	71,65%
Return on Assets (ROA)	1,95	1,90	102,63%
Return on Equity (ROE)	16,24	16,17	100,43%
Net Interest Margin (NIM)	5,11	5,14	99,42%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	76,15	73,70	103,32%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	56,50	53,01	106,58%

Total aset berhasil melampaui target sebesar 101,51% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp103,03 triliun, demikian pula dengan kredit yang diberikan mencapai 101,56% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp46,20 triliun. Dana Pihak Ketiga tahun 2022 terealisasi sebesar Rp81,77 triliun dengan pencapaian 95,30%, sedikit berada di bawah target. Meskipun demikian jika dilihat dari sisi tabungan berhasil melampaui target yang mencapai 102,58% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp26,34 triliun.

Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga juga di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,66% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp6,88 triliun. Namun, pendapatan operasional lainnya di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp553,57 miliar berada di bawah target yang yang mencapai 78,14%. Meskipun demikian, laba tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 100,78% dengan realisasi Rp1,54 triliun di tahun 2022.

Rasio CAR tercapai sebesar 101,14%, ROA dan ROE juga berhasil melampaui target masing-masing sebesar 102,63% dan 100,43%. Dengan melakukan penyaluran kredit yang berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) serta penguatan penguatan manajemen risiko dan penerapan strategi penurunan NPL di tahun 2022. NPL gross Bank Jatim dapat terjaga di level 2,83% atau lebih rendah dari target sebesar 3,95%.

Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi-strategi yang telah ditetapkan, serta berkomitmen untuk dapat berperan aktif dalam program transformasi BPD yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan tetap berperan sebagai *agent of development* di daerah melalui pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

## Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Permodalan Bak Jatim cukup memiliki daya tahan pada masa pandemi Covid-19 yang sudah mereda, hal ini ditandai dengan pencapaian target total modal inti dan modal pelengkap tercapai sebesar 105,84% dengan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp10,78 triliun.

Dalam rangka menjaga dan memperkuat permodalan, strategi pengelolaan permodalan bank yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

- Penambahan modal Bank melalui Laba Bank
- Peningkatan Modal melalui Cadangan Umum dari laba yang tidak dibagi.
- Penambahan modal melalui revaluasi aset
- Optimalisasi ATMR

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal 2022**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Modal inti utama (CET 1)	10.346.392	9.781.379	105,78%
Modal pelengkap (Tier 2)	437.563	407.375	107,41%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	10.783.955	10.188.754	105,84%

## Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran Tahun 2022**

Uraian Target	Realisasi Tahun 2022
Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar)	Telah dilakukan pembukaan rekening pada sekolah dan satu rekening satu pelajar.
Kerjasama dengan Rumah Sakit, Sekolah/ Universitas dan Pondok Pesantren di Jawa TImur	Telah dilakukan kerjasama dengan Rumah Sakit, Sekolah/Universitas dan Pondok Pesantren di Jawa Timur.
Implementasi kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Telah dilakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam pembayaran premi BPJS dan penempatan dana di Bank Jatim.
Siklus suka-suka, <i>member get member</i> dan Bulan Inklusi Keuangan (BIK)	Telah diadakan promo pembukaan rekening siklus suka-suka, <i>member get member</i> dan hadiah <i>cashback</i> bagi <i>top</i> saldo dan pembukaan rekening baru.
Undian Simpeda dan Siklus	Telah dilakukan undian simpeda dan siklus.

## Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat sebesar 56,72% dari Rp23,07 miliar di tahun 2021 menjadi Rp36,16 miliar di tahun 2022.

Peningkatan tersebut juga tercermin dari penyerapan anggaran yang mencapai 99,08% pada tahun 2022. Hal tersebut salah satunya didorong dengan meningkatnya pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara *online* maupun *offline* pasca penerapan *new normal* dan dilonggarkannya ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2022**

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat)	36.162.426.788	36.500.000.000	99,08%



## Target ke Depan (Proyeksi)

Manajemen Bank Jatim telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2023 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2023, baik dari segi makro maupun mikro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

(dalam Rupiah Penuh)

Indikator	RAPBN 2023	APBN 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3
Laju Inflasi (%)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.750	14.800
Tingkat Bunga SUN – 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	90	90
Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel/Hari)	660	660
Lifting Gas Bumi (Ribu Barel/Hari)	1.050	1.100

Sumber: Kementerian Keuangan

## Proyeksi Keuangan

Uraian proyeksi keuangan di tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Keuangan Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2023
1	2
<b>POSISI KEUANGAN</b>	
Aset	110.827.241
Kredit Yang Diberikan	54.738.950
Dana Pihak Ketiga	94.406.633
Giro	27.606.817
Tabungan	30.460.998
Deposito berjangka	36.338.818
Pinjaman Yang diterima	357.519
<b>LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
Pendapatan bunga	6.964.602
Pendapatan operasional lainnya	794.858
Laba Tahun berjalan	1.648.909
<b>RASIO KEUANGAN (%)</b>	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,50%
Non Performing Loan (NPL) Gross	2,75%
Return on Assets (ROA)	2,14%
Return on Equity (ROE)	16,63%
Net Interest Margin (NIM)	5,49%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	76,35%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	57,98%

## Proyeksi Struktur Modal

Uraian proyeksi struktur modal di tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**Tabel Proyeksi Struktur Modal Tahun 2023**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2023
1	2
Modal inti utama (CET 1)	10.124.996
Modal pelengkap ( <i>Tier 2</i> )	510.322
<b>Total Modal Inti dan Modal Pelengkap</b>	<b>10.635.318</b>

## Proyeksi Kebijakan Dividen

Uraian proyeksi kebijakan dividen Tahun Buku 2022 yang akan dibagikan di tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**Tabel Proyeksi Kebijakan Dividen**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi
1	2
Laba Bersih Tahun 2022	1.542.824
Estimasi Jumlah Dividen yang dibagi	797.170
Estimasi Dividen yang diperoleh Pemprov Jatim	407.500
<i>Dividen Payout Ratio</i> (DPR)	51,67%

\* **Catatan:**

Untuk estimasi pembagian dividen tahun buku 2022 yang dibagi tahun 2023, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP)

## Proyeksi Pemasaran

Di tahun 2023 bank menyusun proyeksi pemasaran sebagai berikut:

1. Kerjasama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun Bank Jatim.
2. Kerjasama Layanan Jasa Kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
3. Kerjasama Layanan Jasa Kustodian dengan Perusahaan BUMD dan Perusahaan Swasta di wilayah Jawa Timur.
4. Memasarkan Jasa Kustodian ke sesama Bank BPD dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.
5. Kerjasama dengan Dinas Disperindag Provinsi Jawa Timur dan Disperindag Kabupaten/Kota di 5 (lima) Bakorwil.
6. Kerjasama dengan Asosiasi Ekspor Impor dengan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).
7. Program Promosi untuk giro valas, tabungan valas, deposito valas dan *remittance*.
8. Program Promo Event (Jatim Prioritas *Community, Anniversary*).
9. Siklus Suka-suka, Suka-suka *exclusive*.
10. Promo Giro Plus.
11. Kejar (Satu Pelajar Satu Rekening).
12. Program Undian Simpeda dan Undian Siklus.

## Proyeksi Pengembangan SDM

Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya. Strategi pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan SDM yang direncanakan dengan matang. Sehingga diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Salah satu program pengembangan SDM adalah mengadakan program pelatihan kepada pegawai.

Bank Jatim akan mengembangkan SDM yang berkualitas di tahun 2023 melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan SDM yang dapat dilakukan, di antaranya adalah *skill training, retraining* atau pelatihan ulang, *team training, creativity training* dan lain-lain. Di tahun 2023 proyeksi pengembangan SDM untuk seluruh pegawai sebanyak 3.399 orang.

**Tabel Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2023**

(dalam Orang)

Uraian	Proyeksi 2023
1	2
Pelatihan untuk pegawai organik	3.399

## Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

### Kebijakan Dividen

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada

tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 40% dari laba bersih setiap tahunnya.

### Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Keputusan RUPST PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melaksanakan pengumuman dan pembayaran dividen sebagaimana tabel berikut.

**Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen**

Uraian	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018	Tahun Buku 2017
Laba Bersih (Rp)	1.523.069.838.418	1.488.961.630.120	1.376.505.140.913	1.260.308.411.500	1.159.369.505.449
Dividen Kas (Rp)	782.457.605.053,02	733.507.081.305,70	723.747.007.552,40	683.865.985.709,02	660.384.829.276,20
Dividen Non Kas <sup>*)</sup>	-	-	-	-	-
Jumlah Lembar Saham	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	14.978.134.982	14.974.591.382
Dividen Kas Per Saham (Rp)	52,11	48,85	48,20	45,61	44,10
Dividen Non Kas Per Saham <sup>*)</sup>	-	-	-	-	-
Dividen <i>Payout Ratio</i> (%)	51,37%	49,26%	52,58%	54,26%	56,96%
Tanggal Pengumuman Dividen Kas	21 Maret 2022	5 Mei 2021	28 April 2020	30 April 2019	22 Februari 2018
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	14 April 2022	28 Mei 2021	20 Mei 2020	29 Mei 2019	23 Maret 2018

<sup>\*)</sup>Bank Jatim Tidak memiliki Dividen Non Kas

### Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021

Pada tanggal 17 Maret 2022 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.523.069.838.418,00 sebagai berikut:

- Sebesar Rp782.457.605.053,02 atau 51,37% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2021 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Maret 2022 yang akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2022.
- Sebesar Rp740.612.233.364,98 jumlah 48,63% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2021 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

### Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020

Pada tanggal 3 Mei 2021 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.488.961.630.120,00 sebagai berikut:

- Sebesar Rp733.507.081.305,70 atau 49,26% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2020 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Mei 2021 yang akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2021.
- Sebesar Rp755.454.548.814,30 jumlah 50,74% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2020 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

## Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pada tahun 2022 Bank Jatim tidak melakukan penawaran umum saham maupun obligasi ke publik melalui pasar modal sehingga Bank Jatim tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

## Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2022, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi utang/modal.

## Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

### Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun

Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

### Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi risiko yaitu risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang dimungkinkan merugikan Bank. Oleh karena itu, Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

## Transaksi Pihak Berelasi

### Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Uraian nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan disajikan sebagai berikut:

Tabel Nama Pihak dan Sifat Hubungan Transaksi Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham	Penempatan dana



Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Kredit yang diberikan
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan Penempatan dana
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci	Simpanan nasabah Beban tenaga kerja

## Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama serta memenuhi prinsip transaksi yang adil dan wajar (*fair and at arms' length principle*). Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Bank Jatim.

### Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi**

(dalam Rupiah penuh)

Uraian	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 12)</b>		
Pinjaman manajemen kunci	104.192	112.529
PT BPR Jawa Timur	24.851	29.851
RSUD Dr. Soedono Madiun	-	34.840
Lain-lain	5.828	5.669
<b>Jumlah</b>	<b>134.871</b>	<b>182.889</b>
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,18%</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Simpanan dari nasabah (Catatan 18)</b>	<b>15.295.405</b>	<b>17.722.756</b>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	17,05%	19,73%
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)		
PT BPR Jawa Timur	141.996	360.169
<b>Total</b>	<b>141.996</b>	<b>360.169</b>
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,40%</b>
<b>LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>Pendapatan bunga (Catatan 30)</b>	<b>8.052</b>	<b>11.940</b>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,12%	0,18%
<b>Beban bunga dan syariah</b>	<b>471.882</b>	<b>143.778</b>
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	24,01%	7,27%
<b>KOMITMEN DAN KONTINJENSI</b>		
Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.		
<b>KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI</b>		
Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (diluar Komisaris dan Direksi)		
Gaji	22.995	20.820
Jasa produksi	12.053	11.492
Tunjangan	10.520	10.401
<b>Jumlah</b>	<b>45.569</b>	<b>42.713</b>

### Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Transaksi dengan pihak berelasi yang material atau signifikan terlebih dahulu harus di *review* Komite Pemantau Risiko dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Seluruh transaksi telah melalui mekanisme reviu sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

## Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Adapun perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2022 dan dampaknya bagi Bank Jatim diuraikan dalam tabel sebagai berikut

**Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan
1	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional <i>Quick Response Code</i> untuk Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Besaran nominal Transaksi QRIS yang sebelumnya diatur sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) disesuaikan menjadi paling banyak sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per transaksi.</li> <li>Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Bank menyesuaikan implementasi QRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam keputusan ALCO Bank.
2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Produk bank yang dapat disediakan oleh bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Tabungan dasar (<i>Basic Saving Account/BSA</i>);</li> <li>Kredit atau pembiayaan mikro; dan</li> <li>produk bank lainnya berdasarkan izin OJK.</li> </ol> </li> <li>Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, maka:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Batas maksimum saldo dan transaksi BSA;</li> <li>Batas kepemilikan rekening BSA; dan</li> <li>Batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan mikro, dapat dikecualikan</li> </ol> </li> <li>Persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dengan peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3, berdasarkan periode penilaian terakhir; dan</li> <li>Memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik.</li> </ol> </li> <li>Kerja Sama Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen Laku Pandai sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan perorangan atau badan hukum yang menjadi agen Laku Pandai;</li> <li>Agen Laku Pandai perorangan tidak dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama.</li> <li>Cakupan layanan agen Laku Pandai ditetapkan berdasarkan klasifikasi agen Laku Pandai, sebagai berikut:                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A memberikan layanan transaksi terkait BSA, dan dapat memberikan layanan:   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Transaksi terkait produk uang elektronik dan layanan keuangan <i>digital</i>; dan/atau</li> <li>b) Transaksi terkait produk asuransi mikro.</li> </ol> </li> <li>2) Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B memberikan layanan sebagaimana agen Laku Pandai dengan klasifikasi A, dan dapat memberikan layanan:   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Transaksi terkait kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau</li> <li>b) Transaksi terkait tabungan selain BSA, kecuali pembukaan dan penutupan rekening.</li> </ol> </li> <li>3) Agen dengan klasifikasi C memberikan layanan sebagaimana agen Laku Pandai dengan klasifikasi B, dan dapat memberikan layanan transaksi terkait produk keuangan lain.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Perubahan klasifikasi agen Laku Pandai dilakukan sesuai dengan kebijakan bank.</li> <li>Layanan transaksi terkait dengan produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain, pada agen Laku Pandai, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama dapat dilakukan antara agen Laku Pandai dan lembaga lain atau antara bank dan lembaga lain.</li> <li>Cakupan wilayah pelayanan oleh agen Laku Pandai.</li> <li>Kewajiban bank dalam melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai.</li> <li>Kedudukan agen Laku Pandai.</li> <li>Perangkat elektronik dalam menunjang layanan agen Laku Pandai.</li> </ol> <li>Penerapan Uji Tuntas Nasabah:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Uji tuntas nasabah dilakukan sesuai dengan POJK mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.</li> </ol> </li>	Berdasarkan terbitnya ketentuan tersebut, beberapa hal yang dilakukan terkait penyelenggaraan Laku Pandai adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian ketentuan internal yang mengatur implementasi Laku Pandai;</li> <li>Perubahan strategi pemasaran terhadap pelaksanaan optimalisasi agen Laku Pandai;</li> <li>Optimalisasi dan pengkajian pelayanan Laku Pandai sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.</li> </ol>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Proses verifikasi calon nasabah dengan menggunakan perangkat elektronik oleh bank umum dilakukan sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan layanan perbankan <i>digital</i> oleh bank umum.</li> <li>c. Relaksasi persyaratan izin penyelenggaraan layanan perbankan <i>digital</i> untuk verifikasi menggunakan perangkat elektronik dalam rangka Laku Pandai.</li> </ul> <p>6. Bank dapat menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan tertentu, namun bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.</p> <p>7. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban penerapan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi.</li> <li>b. Kewajiban penerapan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian untuk verifikasi transaksi.</li> </ul> <p>8. Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Laku Pandai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.</p> <p>9. Ketentuan lain-lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewenangan OJK untuk meminta informasi, keterangan, dan/atau data kepada Bank, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap agen Laku Pandai.</li> <li>b. OJK dapat memerintahkan bank untuk menghentikan kerja sama dengan agen Laku Pandai.</li> </ul> <p>10. Ketentuan Peralihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan Laku Pandai harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</li> <li>b. Bank melengkapi dokumen nasabah BSA yang telah menjadi debitur dari bank.</li> <li>c. Penyesuaian klasifikasi agen Laku Pandai</li> </ul>	
3	Penyampaian Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUK yang pada saat ini sebesar 6,0%, naik menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan 9,0% mulai 1 September 2022.</li> <li>2. Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUS dan UUS yang pada saat ini sebesar 4,5%, naik 6,0% mulai 1 Juli 2022 dan 7,5% mulai 1 September 2022.</li> <li>3. GWM dalam valuta asing bagi BUK ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2% (dua persen) dan secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).</li> <li>4. Pemberian remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).</li> </ul>	Penyesuaian pemenuhan giro wajib minimum sesuai dengan peraturan eksternal yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan Bank.
4	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/16/PADG/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio <i>Loan to Value</i> untuk Kredit Properti, Rasio <i>Financing to Value</i> untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG Perubahan Keempat LTV/FTV dan Uang Muka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan pelonggaran ketentuan Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB, dengan batasan Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/6/PADG/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio <i>Loan to Value</i> untuk Kredit Properti, Rasio <i>Financing to Value</i> untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.</li> <li>2. Jangka waktu penerapan atas batasan Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB tersebut di atas diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.</li> </ul>	<p>Bank telah melakukan <i>review</i> dan pengkajian ketentuan internal agar sesuai dan selaras dengan ketentuan eksternal dimaksud.</p> <p>Kebijakan strategis dan target pencapaian juga dilakukan memperhatikan ketentuan tersebut sehingga pencapaian kinerja Bank dapat lebih optimal baik secara nominal maupun dasar hukum pelaksanaannya.</p>
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	<p>Beberapa hal yang diatur dalam POJK ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola TI Bank</li> <li>2. Arsitektur TI Bank</li> <li>3. Penerapan Manajemen Risiko Penyelenggaraan TI Bank</li> <li>4. Ketahanan dan Keamanan Siber Bank</li> <li>5. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI Dalam Penyelenggaraan TI Bank</li> <li>6. Penempatan Sistem Elektronik dan Pemrosesan Transaksi Berbasis TI</li> <li>7. Pengelolaan Data dan Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan TI Bank</li> <li>8. Penyediaan Jasa TI oleh Bank</li> <li>9. Pengendalian dan Audit Intern Dalam Penyelenggaraan TI Bank</li> </ul>	<p>Bank telah melakukan <i>review</i> dan pengkajian atas berlakunya ketentuan tersebut pada seluruh ketentuan internal Bank terkait Teknologi Informasi.</p> <p>Penyesuaian rencana strategis teknologi informasi juga telah dilakukan oleh Bank sesuai dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.</p>



No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan
		10. Bank yang telah memiliki kebijakan, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan TI serta pedoman manajemen risiko penyelenggaraan TI harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 11. Bank yang telah menggunakan pihak penyedia jasa TI sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 12. Bank harus menyesuaikan rencana strategis TI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat akhir bulan November 2022.	

Perubahan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim.

## Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2022, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual". Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
2. Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
3. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian

pengakuan liabilitas keuangan". Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli;

4. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73, "Sewa". Penyesuaian ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya

## Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dinilai berdasarkan POJK. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko yaitu:

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Tabel Tingkat Kesehatan Bank Jatim Posisi 31 Desember 2021-2022 (*self assessment*)

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2022	Penilaian Per 31 Desember 2021
Profil Risiko	Peringkat 2	Peringkat 2
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Peringkat 3	Peringkat 3
Rentabilitas	Peringkat 2	Peringkat 2
Permodalan	Peringkat 2	Peringkat 2
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Peringkat 2 (Sehat)</b>	<b>Peringkat 2 (sehat)</b>

## Informasi Kelangsungan Usaha

### Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlanjut menjadi salah satu faktor mempengaruhi dinamika perekonomian secara global maupun nasional, juga berdampak terhadap kinerja usaha Bank, meskipun secara umum tidak terlalu signifikan. Namun demikian, keunggulan kompetitif, transformasi dan inovasi berkelanjutan, serta implementasi kebijakan strategis yang adaptif mampu mengurangi dampak pandemi lebih lanjut bagi kinerja usaha Bank. Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan yang masih mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2022.

### Assesment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Bank secara berkala melakukan evaluasi atas hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha Bank dimasa yang akan datang. Evaluasi tersebut di antaranya tercermin melalui skor komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang tergolong sehat bahkan dimasa pandemi. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun terdapat beberapa komponen kinerja yang belum tercapai secara optimal, namun dengan adanya kebijakan targetis akomodatif yang ditempuh

oleh manajemen, bank dapat memitigasi risiko yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sepanjang tahun 2022.

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan usahanya.

### Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Assesment

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan Bank dalam melakukan *assesment* terhadap kelangsungan usaha Bank antara lain adalah hal-hal berikut:

1. Tingkat kesehatan Bank yang meliputi penilaian terhadap profil risiko, kinerja rentabilitas/*earning*, kapitalisasi permodalan serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Analisis kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional.
3. Analisis daya saing yang meliputi matriks *Strenght, Weakness, Opportunities and Challenges* (SWOC), analisis *Segmentation, Targeting and Positioning* (STP), serta analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha.

## Aspek Perpajakan

### Publikasi Pembayaran Pajak

Bank Jatim dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Pembayaran Pajak

Total pembayaran pajak periode Januari sampai dengan Desember 2022, disajikan sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam Rupiah penuh)

Uraian Pajak	Tahun 2022
Pajak Penghasilan Pasal 21	136.726
Pajak Penghasilan Pasal 23	5.144
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan	494.250
Pajak Penghasilan Pasal 26	14.195
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final	142.884
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.352
Pajak Bea Meterai	7.082
<b>Total</b>	<b>802.634</b>

### Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Pajak

Pada periode 2022, tidak terdapat ketidakpatuhan Bank Jatim dalam kewajiban membayar pajak (NIHIL).

## Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Gejolak perekonomian di tahun 2022 dibayangi oleh isu resesi yang melanda di seluruh dunia. Masih berlanjutnya perang Rusia dan Ukraina, disrupsi rantai pasok global, tingginya volatilitas harga komoditas, lonjakan inflasi, hingga kenaikan suku bunga secara agresif masih akan menjadi faktor risiko bagi perekonomian global tahun depan. Ditandai dengan kenaikan tajam inflasi di suatu negara, risiko stagflasi akan dialami oleh banyak negara tidak terkecuali negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Kondisi tersebut menyebabkan bank sentral seperti *Federal Reserve* (The FED) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 450 bps sepanjang tahun 2022 sebagai langkah antisipasi gejala inflasi. Kenaikan suku bunga acuan diikuti oleh hampir semua bank sentral di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tidak lagi mengemban sebagai bank sentral dengan suku bunga rendah. Melihat pertumbuhan angka inflasi yang cukup tinggi memicu Bank Indonesia untuk memperketat kebijakan moneter dengan cara menaikkan suku bunga. Bank Indonesia melakukan kebijakan suku bunga yang cukup *agresive* mengikuti kenaikan suku bunga *Federal Reserve* dimana kenaikan BI7DRRR sebesar 200 bps dilakukan oleh BI sepanjang 2022.

Meski di tengah tren suku bunga tinggi, kenaikan suku bunga kredit industri bank masih bergerak lambat. Bahkan, suku bunga perbankan di tanah air cukup kompetitif dibandingkan luar negeri. Utamanya kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara. Tujuannya, agar dana asing kembali masuk ke tanah air sehingga rupiah tetap menguat. Sehingga BI memastikan likuiditas di perbankan tetap longgar dan memastikan likuiditas lebih dari memadai bagi perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa harus menaikkan suku bunga kredit.

Melihat tren inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2022, diproyeksikan Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga secara berlebihan di tahun 2023. Fokus Bank Indonesia pada tahun 2023 adalah meredam angka inflasi sehingga tetap memerlukan kenaikan suku bunga. Namun melihat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi akan lebih rendah dibanding tahun 2022 maka Bank Indonesia akan cenderung berhati-hati dalam menaikkan suku bunga.

Kondisi likuiditas perbankan selama tahun 2022 dinilai masih cukup *ample*. Komposisi DPK masih memadai untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan sebesar 8,06% secara yoy. Dampak pandemi Covid-19 masih berimbas pada ekspansi kredit maupun pembiayaan, namun demikian pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan dan stimulus bagi perbankan serta masyarakat luas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, beberapa di antaranya adalah stimulus suku bunga kredit, relaksasi pembayaran angsuran kredit, pemberian bantuan langsung tunai serta insentif pada aspek-aspek tertentu di perbankan sehingga menjadi bagian dari faktor-faktor penyebab likuiditas perbankan tetap terjaga. Indikator likuiditas lain berupa rasio LCR, NSFR termasuk pemenuhan GWM dan PLM terjaga di kisaran yang optimal dan sesuai dengan batasan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Sejalan dengan tren suku bunga acuan Bank Indonesia, Bank Jatim turut merespon kebijakan dengan melakukan penyesuaian suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang diputuskan dalam Rapat ALCO secara selektif dan tetap memperhatikan target kinerja Bank Jatim tahun 2022 serta didukung dengan optimalisasi peningkatan volume kredit, pemeliharaan komposisi dana dan *Cost of Fund* (CoF), peningkatan pendapatan yang bersumber dari transaksi *fee based income* serta efisiensi biaya *overhead*.

Penurunan Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah Bank masih berlanjut hingga Triwulan III-2022, namun mulai terjadi peningkatan di awal Triwulan IV-2022. Per Desember 2022, Suku Bunga Dasar Kredit Bank adalah 6,11% untuk Kredit Korporasi, Kredit Ritel 7,17%, Kredit Mikro 12,14%, Kredit Konsumer-KPR 7,36% dan Kredit Konsumer-Non KPR sebesar 9,06%. Bank terus mengoptimalkan kinerja bisnis dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan bisnis disertai penyesuaian kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas bisnis proses.

Pada 2023, arah bauran kebijakan Bank Indonesia menegaskan bahwa kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui penyesuaian struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan pergerakan suku bunga BI7DRR, Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama *imported inflation*, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi *spot*, *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

## Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar

Bank Jatim sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan memiliki *guidance* dalam menjalankan usahanya, salah satunya terkait pemberian dana kepada pihak terkait. Bank Jatim dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait

maupun terhadap modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

### Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Adapun porsi Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan sesuai aturan OJK ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank dimana yang dimaksud dengan pihak terkait adalah:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
2. Badan Hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
  - a. Dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - b. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/atau poin 3;
7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2 dan poin 3;
9. Perusahaan yang:
  - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
  - b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/atau poin 3 bertindak sebagai pengendali;
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 10;
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan Bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 kepada Bank lain tersebut; dan
15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara mandiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

Sesuai dengan penjabaran mengenai pihak terkait di atas, maka dari ini pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris juga termasuk kedalam penyediaan kepada Pihak Terkait dimana pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit Bank Jatim. Ketentuan

dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank Jatim pada umumnya dan diberikan secara wajar dan sesuai bunga pasar (*at arm's length basis and at market rates*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Diluar daripada itu, terdapat pula ketentuan tentang pihak lainnya yang diatur, yaitu:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
  - a. Pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau
  - b. Melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
  - a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
  - b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank; dan
  - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2 dan 3.

### Penyediaan Dana Kepada Selain Pihak Terkait

1. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) Kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.
2. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan,
3. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
  - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
  - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
  - c. 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
  - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
  - e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.

4. Penggolongan kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
  - a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
  - b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah Negara lain.
  - c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan;
  - d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma;
  - e. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyediaan Dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi. Adapun penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:

- a. Penempatan;
- b. Transaksi derivative;
- c. Surat berharga;
- d. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*);
- e. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
- f. Tagihan akseptasi;
- g. Kredit;
- h. Penyertaan modal;
- i. Penyertaan modal sementara;
- j. Transaksi rekening *administrative*; dan
- k. Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.

Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

## Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Bank Jatim telah menerapkan Teknik MRK (Mitigasi Risiko Kredit) yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank Jatim mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan,

atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud berlaku dalam hal Peminjam dan Penjamin atau penerbit agunan merupakan selain Pihak Terkait.

## Perlakuan BMPK Tertentu

Adakalanya perhitungan BMPK dapat dilakukan, di antaranya adalah:

1. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat;
2. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
3. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
4. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia;
5. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
6. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
7. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu;
8. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime* Bank sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan;
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum.

## Pelampauan BMPK

Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:

1. Penurunan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank;
2. Perubahan nilai tukar;
3. Perubahan nilai wajar;
4. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/atau
5. Perubahan ketentuan Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana dan dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

**Tabel Total Penyediaan Dana Pihak Terkait Tahun 2022**

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	155	107.944
2	Kepada 50 Debitur Inti		
	Individu	0	0
	Group	50	6.771.487
	<b>Total Debitur Inti</b>	<b>50</b>	<b>6.771.487</b>

**Tabel Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait Tahun 2022**

Uraian	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Modal Pada Tanggal Laporan	10.610.256
BMPK (10% dari Modal) Pada Tanggal Laporan	0
<i>Outstanding</i> Pihak Terkait	107.944
Kelonggaran BMPK	0
Pelampauan BMPK	0

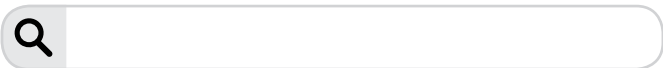
## Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) disajikan berdasarkan nilai wajarnya yang ditentukan berdasarkan harga pasar dengan

menggunakan kurs *Reuters* pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas dan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

**Tabel Laporan Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif**

No	Transaksi	BANK									
		2022					2021				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			<i>Trading</i>	<i>Hedging</i>	Tagihan	Kewajiban		<i>Trading</i>	<i>Hedging</i>	Tagihan	Kewajiban
<b>A. TERKAIT DENGAN NILAI TUKAR</b>											
1.	<i>Spot</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Forward</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<i>Option</i>										
	a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<i>Future</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Swap</i>	-	-	-	361.029.411,80	-	-	-	-	-	-
6.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TERKAIT DENGAN SUKU BUNGA</b>											
1.	<i>Forward</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Option</i>										
	a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<i>Future</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<i>Swap</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. LAINNYA</b>											
	Jumlah	-	-	-	361.029.411,80	-	-	-	-	-	-



# Human Capital











# Strategi Manajemen

## Human Capital



Adapun inisiatif strategi yang akan dikembangkan pada Divisi Human Capital Bank Jatim sebagai strategi di tahun 2022 adalah:

1. Perancangan Pembentukan *Learning Center* untuk meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan sarana dan infrastruktur teknologi *human capital* seperti mengembangkan *e-Human Capital* dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada setiap pegawai serta media pembelajaran digital yang bisa diakses oleh setiap pegawai.
3. Mempersiapkan *assessment center* sebagai salah satu sarana perusahaan untuk mengukur kompetensi dan profil dari pegawai.
4. Memberikan pelatihan (*public training* maupun *in house training*) untuk peningkatan kompetensi secara berkelanjutan di bidang digitalisasi, perkreditan, pendanaan, transaksi devisa ataupun kegiatan/jasa lainnya yang sesuai kebutuhan pegawai. Katalog pelatihan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Bank Jatim, pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 sesuai arahan pemerintah dan otoritas.

Agar bisnis dapat tumbuh dan bersaing di *industry Digital Banking 4.0*, baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, maka perlu ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang telah ditetapkan Bank dalam rangka memenangkan persaingan di era *Digital Banking 4.0*. Manajemen berkomitmen terhadap perkembangan struktur organisasi, *job description* maupun penilaian kinerja secara obyektif serta melakukan evaluasi terkait kebijakan promosi karyawan sehingga mampu meningkatkan kemampuan bersaing Bank. Manajemen terus menjaga komitmennya untuk memperlakukan seluruh karyawan sebagai aset berharga dengan melakukan perencanaan yang seksama terhadap kebutuhan karyawan yang selaras dengan pertumbuhan bisnis.

# Kebijakan dan Pelaksanaan

## Manajemen Human Capital

### Rekrutmen

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas adalah salah satu modal di dalam persaingan. Layaknya persaingan di bidang pengembangan, produksi dan pemasaran suatu produk, suatu bisnis juga bersaing dalam mengidentifikasi, memikat dan mendapatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi terbaik. Rangkaian kegiatan tersebut lazim disebut dengan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Manajemen Bank Jatim memberikan perhatian penuh dalam hal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja karena hal tersebut adalah langkah awal pengelolaan sumber daya manusia di Bank Jatim secara keseluruhan.

Pada tahun 2022, Bank Jatim merekrut pegawai baru secara selektif dengan prinsip *Recruit Right* guna mencari calon pegawai yang memiliki potensi dan prestasi untuk ditempatkan pada unit kerja yang tepat di Bank. Secara umum, Bank Jatim melakukan rekrutmen sebanyak 232 pegawai baru yang terdiri dari 86 tenaga Analis Kredit, 101 tenaga Admin Kredit dan Legal Bisnis, 23 tenaga Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, 13 tenaga Informasi Teknologi (IT), 1 (satu) tenaga Credit Property Officer, 2 (dua) tenaga Marketing Executive dan 6 (enam) tenaga Taksatur. Rekrutmen hanya dilakukan pada posisi kritikal yang dapat mendorong peningkatan bisnis dari tenaga ahli yang direkrut. Rekrutmen dilakukan secara selektif dengan berbagai tahapan *multiskill screening* sehingga hasil rekrutmen dapat membuat bisnis Bank semakin tangguh dan dapat meraih kinerja yang lebih cemerlang.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka perlu dilakukan *Work Load Analysis* (WLA). Hal tersebut sejalan dengan adanya kebutuhan analisa terhadap pemenuhan jumlah pegawai unit-unit kerja pada setiap cabang Bank Jatim. Tujuan pelaksanaan *Work Load Analysis* (WLA) adalah sebagai berikut:

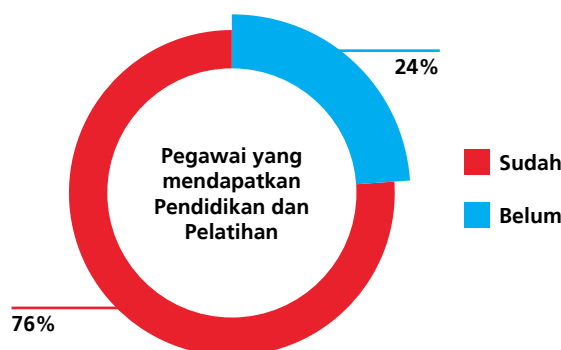
- a. Bank Jatim mampu melakukan rekrutmen pegawai baru berdasarkan hasil data WLA dan pengembangan kompetensi SDM;

- b. Divisi Human Capital dapat menganalisa beban kerja setiap jabatan pada unit yang ada serta mengoptimalkan kinerja pegawai yang tersedia;
- c. Divisi Human Capital menilai kebutuhan pegawai sesuai kriteria yang diharapkan sesuai dengan struktur organisasi Bank dan rencana bisnis bank.

Metode yang digunakan adalah *Interview method* yang dilakukan kepada para pemegang jabatan dan apabila jabatan tersebut kosong atau tidak terdapat personil, maka *interview* dilakukan pada personil yang merangkap tugas tersebut, hal ini dilakukan pada Cabang Induk dan Cabang Pembantu. Pada tahun 2022 terdapat 21 Pegawai yang mengundurkan diri. Sedangkan untuk perekrutan, sepanjang tahun 2022 Bank Jatim telah merekrut 232 (dua ratus tiga puluh dua) pegawai baru dengan kompetensi di bidang kredit, *marketing* eksekutif dan teknologi.

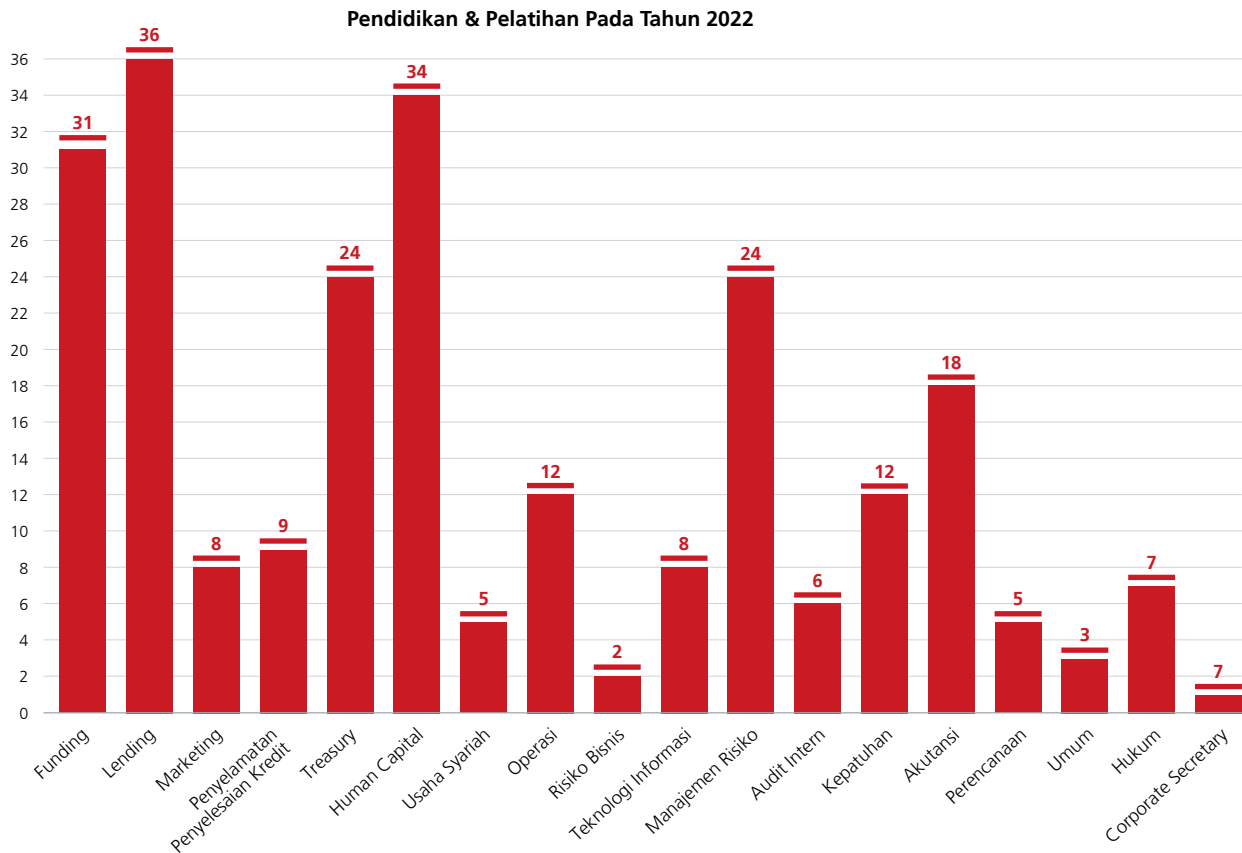
### Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim pada tahun 2022 didasarkan pada kriteria prioritas yaitu program yang hasilnya akan berdampak besar terhadap pencapaian kinerja bisnis Bank Jatim dan yang mutlak dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Pengembangan kompetensi di lingkungan Bank Jatim dilaksanakan secara *in-house training* yaitu pelatihan yang diadakan oleh pihak Bank Jatim yang pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak Eksternal (*training provider*) maupun yang diselenggarakan oleh pihak Internal Bank Jatim dan *public training* yaitu pelatihan yang diadakan oleh pihak Eksternal (*training provider*). Selama tahun 2022, Bank telah mengikutkan pegawai dalam pendidikan yang sesuai dengan jabatannya dan kebutuhannya dengan jumlah peserta sebanyak 3.428 orang dari 4.515 pegawai (76%).





### Data Kegiatan Berdasarkan Bidang Kompetensi Pegawai



Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Bank telah melakukan sebanyak 44 kegiatan sertifikasi profesi diantaranya Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 1 - tingkat 5, Sertifikasi *Credit Officer*, Sertifikasi Kepatuhan, Sertifikasi *Dealer Treasury* pada tingkat *Basic - Intermediate*, Sertifikasi Bidang Teknologi Informasi dan program-program pemeliharaan sertifikasi dengan total peserta sebanyak 1.157 Orang peserta.

### Kebijakan

Program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Bank Jatim dilaksanakan dengan komitmen penuh oleh Bank untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada seluruh Pkerjanya. Bank Jatim memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pegawai untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Bank tanpa memandang level jabatan maupun *gender* dari Pegawai.

## Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2022

No.	Level Jabatan	Jenis Pendidikan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Level Jabatan	Presentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan
1.	Staff, Junior dan Jabatan Setingkat	<i>Hard competency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan.</li> <li>- Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai.</li> <li>- Mengembangkan keahlian, ketrampilan atau <i>skill</i> sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan.</li> </ul>	3.218	2.238	70%	70%
2.	Penyelia, Pimkas, Officer dan Jabatan Setingkat	<i>Hard and soft competency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari.</li> <li>- Pembekalan pengetahuan bagi Penyelia yang baru diangkat.</li> </ul>	880	789	90%	90%
3.	Pimcapem, PBO, Senior dan Jabatan Setingkat	<i>Hard and soft competency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari.</li> <li>- Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai.</li> <li>- Pembekalan pengetahuan bagi Pemimpin Cabang Pembantu atau setingkat yang baru diangkat.</li> </ul>	274	263	96%	96%
4.	Pemimpin Cabang, PSD dan Pemimpin Bidang Cabang Utama	<i>Hard and soft competency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari.</li> <li>- Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai.</li> <li>- Pembekalan pengetahuan bagi Pemimpin Cabang Pembantu atau setingkat yang baru diangkat.</li> </ul>	107	105	98%	98%
5.	Pemimpin Divisi, Corporate Secretary dan Pemimpin Cabang Utama	<i>Hard and soft competency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari.</li> <li>- Pemeliharaan masa berlaku sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pegawai.</li> </ul>	20	19	95%	95%
6.	Direksi/ Komisaris	<i>Hard and soft competency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kompetensi kepemimpinan.</li> <li>- Pemeliharaan sertifikat kompetensi.</li> </ul>	12	12	100%	100%
<b>Jumlah Pegawai yang Telah mengikuti Pelatihan</b>				<b>4.515</b>	<b>3.428</b>	<b>76%</b>	

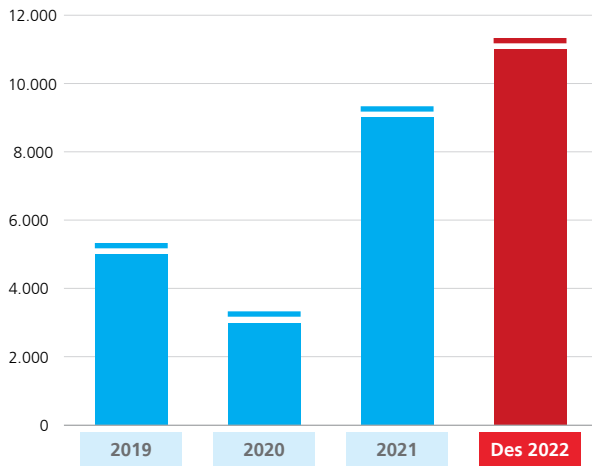


## Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

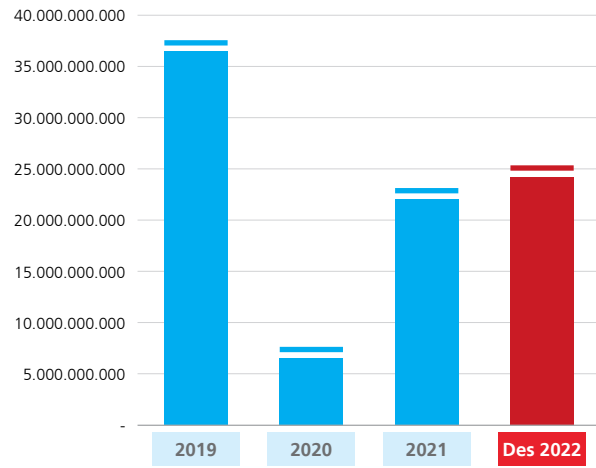
Kegiatan peningkatan kompetensi dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan telah dilakukan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah partisipan peserta

pendidikan pegawai dan komparasi dengan realisasi anggaran dari 4 (empat) tahun terakhir.

**Jumlah Partisipan Pelatihan**



**Realisasi Anggaran**



## Biaya Pengembangan Kompetensi

Sesuai dengan ketentuan perbankan, Bank wajib menganggarkan biaya dalam mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusianya sebanyak minimal 5% dari biaya belanja pegawai pada tahun sebelumnya, maka didapat tabel anggaran dan realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai sebagai berikut:

Pada tahun 2022, Bank Jatim telah melaksanakan pengembangan kompetensi untuk pegawai dengan mengikutsertakan 3.428 pegawai. Biaya yang telah dikeluarkan Bank Jatim pada tahun 2022 dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebesar Rp23.834.986.794, meningkat dari biaya yang dikeluarkan pada 2021 yang sebesar Rp22.649.068.859.

**Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2021-2022**

Keterangan	2022	2021
Total Biaya (Rp)	23.834.986.794	22.649.068.859

## Pengembangan Karir

Bank Jatim menyadari Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu aset bank yang berperan di dalam kemajuan dan pengembangan Bank Jatim sendiri. Di dalam persaingan bisnis antar Bank yang semakin ketat, dibutuhkan SDM yang profesional. Untuk mendapatkan SDM yang *professional* diperlukan suatu program pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja yang sistematis, konsisten dan bermutu. Bank Jatim mengembangkan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pematangan calon-calon pemimpin yang memiliki dampak pada jabatan (*civil effect*). Untuk itu, peserta wajib mempunyai motivasi, dedikasi dan integritas tinggi, berdaya kreasi dan inovasi serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap bidang tugasnya untuk mencapai posisi sebagai manajemen senior.

Program pengembangan karir di Bank Jatim terbagi menjadi 4 (empat) program yang mengikuti tingkat eselon yang ada, program tersebut antara lain:

- Jatimers Leadership Development Program 1 (JLDP 1) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan Eselon 1 dari pekerja potensial Eselon 2.
- Jatimers Leadership Development Program 2 (JLDP 2) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan Eselon 2 dari pekerja potensial Eselon 3.
- Jatimers Leadership Development Program 3 (JLDP 3) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan Eselon 3 dari pekerja potensial Eselon 4.
- Jatimers Leadership Development Program 4 (JLDP 4) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan Eselon 4 dari pekerja potensial pelaksana.

Untuk mengikuti program manajemen karir, pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif umum.
2. Mendapatkan rekomendasi positif dari Pemimpin Unit Kerja serta mengikuti *assessment* dan mendapatkan rekomendasi positif dari *assessor*.
3. Untuk promosi pejabat menuju eselon 1 dan 2, wajib mendapatkan rekomendasi positif dalam Komite Manajemen kepegawaian.

Program karir dibuka sesuai proyeksi kebutuhan atas suatu kekosongan jabatan dengan penetapan formasi yang telah diterbitkan oleh unit yang bertanggung jawab terkait Struktur Organisasi dan Jaringan.

## Talent Management

Pengelolaan *talent management* yang diterapkan Bank Jatim bertujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dasar dalam pengelolaan *talent management* terdiri dari dua aspek yaitu kompetensi yang diukur melalui proses asesmen dan kinerja pegawai. Pengukuran kompetensi dilakukan secara berkala guna memperbaharui kemampuan terbaru dari masing-masing pegawai pada seluruh jenjang jabatan. Selama tahun 2022, Bank Jatim membuka program pengembangan karir pegawai di antaranya sebagai berikut:

1. Program *Assessment* Pejabat Eksekutif  
Bank Jatim telah melaksanakan *assessment* bagi pejabat eksekutif sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) pegawai. *Assessment* ini diperlukan untuk memetakan potensi dari masing-masing pejabat eksekutif dan mengukur *gap* kompetensinya agar Bank dapat merencanakan pengembangan ke depan pejabat eksekutif tersebut.
2. Program Karir pegawai  
Program jenjang karir pegawai pada tahun 2022 untuk pengisian jabatan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pemimpin Divisi Setingkat	5
2.	Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	25
3.	Pemimpin Cabang Pembantu/PBO Setingkat	110
4.	Penyelia/Analisis/Officer Setingkat	90

## Penilaian Kinerja

Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target Bank, maka Bank Jatim telah menerapkan sistem manajemen kinerja berupa metode *Balance Scorecard*. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai yang ada di Bank Jatim. Aplikasi KPI *Scorecard* digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja yang merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perhitungan jasa produksi. Selain untuk perhitungan jasa produksi, KPI juga digunakan untuk program jenjang karir pegawai.

Ada 4 (empat) perspektif di KPI *Scorecard* yaitu:

1. *Financial*
2. *Internal Bussines Proses*
3. *Customer*
4. *Learning and Growth*

Penilaian sistem kinerja didasarkan pada 2 (dua) komponen, yaitu sasaran kinerja utama (KPI) dan *Soft Kompetensi* dengan bobot nilai prosentase untuk masing-masing komponen adalah 100%. Dari bobot nilai persentase selanjutnya didapatkan hasil akhir penilaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Nilai
Sangat Memuaskan ( <i>Outstanding</i> )	4,26 – 5,00
Memuaskan ( <i>Exceed Expectation</i> )	3,51 – 4,25
Mencapai Target Kinerja ( <i>Meet expectation</i> )	3,00 – 3,50
Kurang ( <i>Below Expectation</i> )	1,50 – 2,99
Sangat Kurang ( <i>Poor</i> )	0,00 - 1,49



## Remunerasi

Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi yang digunakan Bank Jatim adalah Sistem *Grading* yaitu remunerasi akan dibagi sesuai dengan *grade* masing-masing jabatan. Penetapan *grading* masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan *level grading* masing-masing jabatan dilakukan dengan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan *job description*. *Grading* masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya.

Divisi Human Capital menggandeng pihak eksternal dalam menentukan *grade* masing-masing jabatan yaitu GML *Performance Consulting* agar lebih independen dalam melakukan penilaian. Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan

secara seimbang antara imbalan yang diberikan dengan *output* yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yakni individu, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem *grading* yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 (dua) faktor yakni kompetensi individu yang dikenal dengan *personal grade* serta jabatan/posisi yang dikenal dengan *job grade*. Sistem *grading* dan remunerasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja Bank akhirnya juga dapat tercapai. Sistem *grading* yang berlaku saat ini di Bank Jatim terdiri dari:

- Tingkatan Eselon
- Personal Grade*
- Job Grade*

Berikut adalah struktur sistem *grading* yang ada di Bank Jatim:

Keterangan	Job Grade	Jabatan	Personal Grade	Corporate Title	
<b>ESELON</b>					
Eselon 1	G1	SEVP	18	Senior Executive Vice President	SEVP
Eselon 1	F3	Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama	17	Executive Vice President	EVP
	F2		16	Senior Vice President	SVP
	F1		15	Vice President	VP
Eselon 2	E3	Pemimpin Cabang Konvensional LJTM1	14	Assistant Vice President	AVP
	E3	Pemimpin Cabang Konvensional Kelas 1, Pemimpin Bidang Cabang Utama, Pemimpin Cabang Kelas 2 dan 3, Pemimpin Cabang LJTM2 dan LJTM3, Pemimpin Cabang 1 dan 2 dan Pemimpin Sub Divisi	13	Senior Executive President	Sr. ExMgr
	E2		12	Senior Manager	Sr. Mgr.
	E1		11	Manager	Mgr.
Eselon 3	D3	Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Bidang Bisnis, Pemimpin Cabang Pembantu, Analis Senior, Senior Relationship Manager, Senior Officer (Konvensional maupun Syariah)	10	Assistant Manager	Ast. Mgr
	D2		9	Sub Manager	Sub. Mgr
	D1		8	Senior Supervisor	Sr. Spv
Eselon 4	C3	Penyelia, Pemimpin Kantor Kas, Analis, Relationship Manager, Officer (Konvensional maupun Syariah)	7	Supervisor	Spv.
	C2		6	Assistant Supervisor	Ast. Spv.
	C1		5	Senior Clerk	Sr. Clerk
Pelaksana	B3	Staf, Analis Junior, Junior Relationship Manager, Junior Officer	4	Assistant Senior Clerk	Ast. Sr. Clerk
	B2		3	Clerk	Clerk
	B1		2	Junior Clerk	Jr. Clerk
	Pegawai Non Karir		1	Karya	-
Pegawai Dasar	A2	Satpam, Pengemudi, Pramubakti	1	Karya	-
	A1				

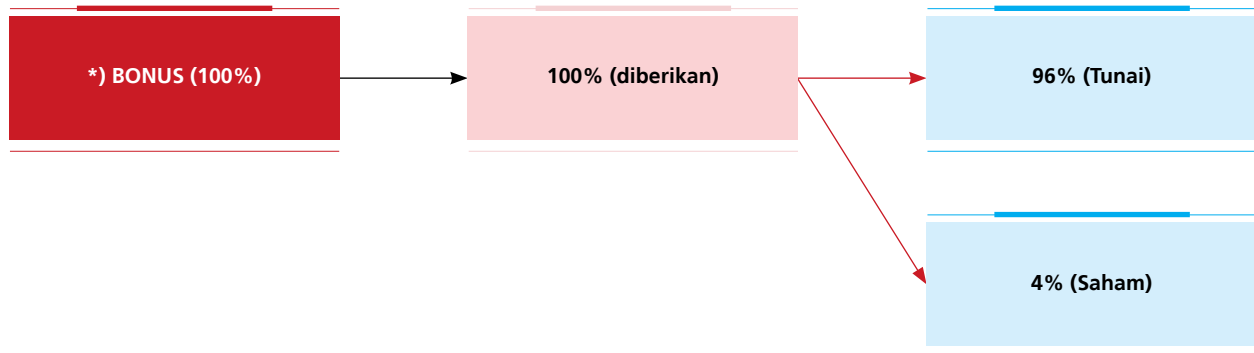
Sebagai dasar penyusunan pedoman tata kelola pemberian remunerasi yang baik bagi Pengurus, Bank mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Pada dasarnya remunerasi dibagi menjadi 2 (dua) remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Sebagai penerapan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Jatim menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Taker* yang terdiri dari:

- Direktur Utama
- Direktur Bidang dibawah Direktur Utama
- Dewan Komisaris

Persentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang tidak termasuk *Material Risk Taker* adalah sebagai berikut:



## Program Pensiun

Bank Jatim mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, baik yang *mandatory* oleh Undang-Undang maupun yang dikelola sendiri oleh Dana Pensiun Pegawai. Program pensiun yang diberikan oleh Bank Jatim antara lain:

1. Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek  
 Karena bersifat *mandatory* maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/*Personal Grade*.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)  
 Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peserta Program adalah seluruh pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 25 Agustus 2012. Adapun besaran iuran pemberi kerja sebesar 21,70% sedangkan iuran pegawai sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
3. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)  
 Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Seluruh Pegawai tetap diikutkan dalam program pensiun ini, yang seluruh iuran menjadi beban pemberi kerja sebesar 10% dari Gaji Pokok/*Personal Grade* pegawai.





# Survei Kepuasan Pegawai

*Employee engagement* telah menjadi salah satu hal penting dalam kajian manajemen sumber daya manusia, karena memberikan banyak manfaat bagi Bank. Tidak hanya membuat pegawai memiliki loyalitas yang tinggi, *employee engagement* juga membuat pegawai memberikan kontribusi lebih bagi Bank melalui peningkatan kinerja.

Tujuan utama program ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat *employee engagement* dari kinerja pegawai yang terjadi, serta untuk mengetahui pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja pegawai di Bank Jatim. Manfaat *Employee Engagement* bagi pegawai antara lain:

- Menciptakan semangat baru bagi pegawai untuk berangkat ke kantor. Pegawai akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta Bank.
- Menciptakan hubungan kuat dengan setiap pegawainya.
- Hubungan ini juga akan membuat pegawai untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerjasama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
- Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh pegawai dalam kehidupannya.

Pendekatan ini dapat membuat pegawai menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di Bank. Manfaat *Employee Engagement* bagi Bank antara lain:

- Bank lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi pegawai sehingga tingkat keterikatan antara pegawai dan Bank semakin meningkat.
- Bank akan memiliki pegawai dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan Bank yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Pegawai akan menjadi loyal kepada Bank karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan

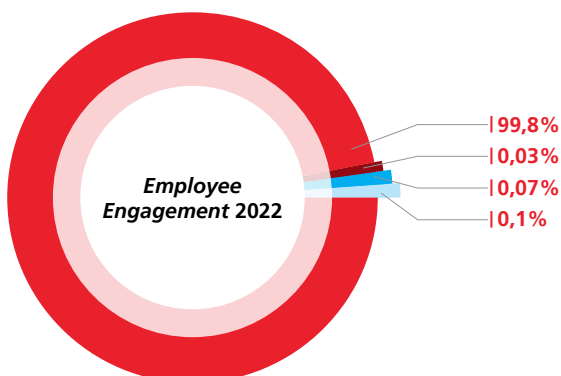
menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh Bank.

*Employee Engagement* menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada Bank. Jumlah absen karena pegawai yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktifitas sepanjang tahun.

Tingkatan keterikatan pegawai atau *Employee Engagement* dibagi menjadi 4 (empat) *Level Engagement* yaitu:

- Actively Engaged** (Komitmen dan Kepuasan Tinggi)  
Pegawai dalam level ini memiliki kepentingan pribadi yang selaras dengan organisasi. Mereka berkontribusi penuh untuk keberhasilan organisasi dan menemukan kepuasan besar dalam pekerjaan.
- Potentially Engaged** (Komitmen Tinggi Tetapi Kepuasan Rendah)  
Pegawai dalam level ini termasuk golongan kontributor penting di organisasi, namun mereka tidak dapat menemukan keterikatan dan kesuksesan pribadi dari dalam organisasi. Mereka akan cenderung menurunkan performa apabila tetap tidak mendapatkan kepuasan dari organisasi.
- Passively Engaged** (Kepuasan Tinggi Tetapi Komitmen rendah)  
Pegawai pada level ini merupakan orang-orang yang merasa nyaman akan kondisi Bank. Mereka bisa merupakan orang baru atau mendapatkan peran baru. Mereka belum berkontribusi secara penuh terhadap kesuksesan perusahaan atau bahkan bersembunyi dibalik kerja keras orang lain.
- Disengaged** (Komitmen dan Kepuasan Rendah)  
Pegawai dalam level ini merupakan sekelompok orang yang paling terputus dari organisasi, seringkali mereka merasa kurang dimanfaatkan, dan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pekerjaan. Mereka dapat menularkan pemikiran-pemikiran negatif kepada pegawai lainnya

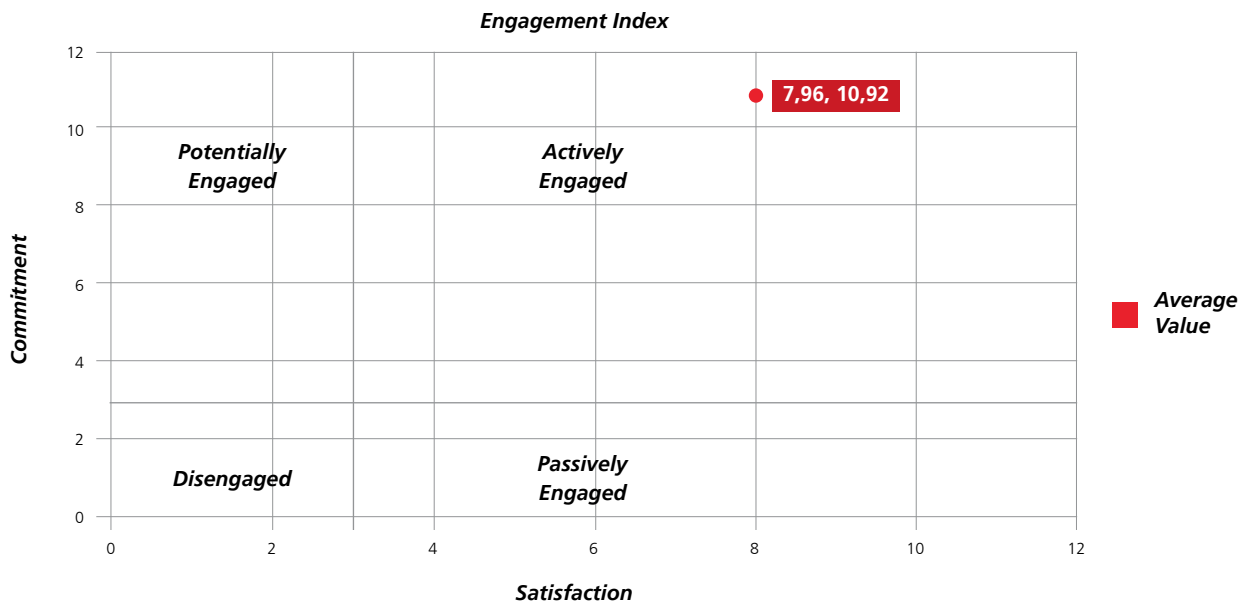
Dari survei yang telah dilaksanakan oleh Bank dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:



Dari Grafik diatas dapat diketahui hasil *employee engagement* tahun 2022 secara keseluruhan yaitu (7,96, 10,92) dengan arti bahwa Tingkat Kepuasan Pegawai sebesar 7,96 dan Tingkat Komitmen Pegawai sebesar 10,92. Adapun Tingkat Keterikatan Pegawai dibagi dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

- Actively Engaged* sebesar 99,8% sebanyak 4.139 Pegawai
- Potentially Engaged* sebesar 0,1% sebanyak 4 Pegawai
- Passively Engaged* sebesar 0,07% sebanyak 2 Pegawai
- Disengaged* sebesar 0,03% sebanyak 1 Pegawai

Adapun *employee engagement matrix* dengan hasil sebagai berikut:



*Matrix* tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap Bank berada pada titik 7,96 (Sangat Puas) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2,38. Dari hasil tersebut dapat dinilai sangat baik (berada di sebelah kanan sumbu *commitment* dan *satisfaction*) karena tidak kurang dari nilai tengah tingkat

kepuasan yang telah ditetapkan. Komitmen pegawai terhadap perusahaan berada pada titik 10,92, dari hasil tersebut dapat dikategorikan baik karena nilai tersebut berada di atas batas nilai tengah komitmen pegawai terhadap Bank.

## Human Capital Information System

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktifitas, melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin memudahkan segala aktifitas manusia ke depannya. Divisi Human Capital telah meluncurkan produk Digital yaitu Portal *Human Capital*. Portal *Human Capital* adalah media informasi digital berbasis *website* yang berguna untuk memastikan komunikasi dan memberikan layanan kepada pegawai antara lain menampung informasi, berita, agenda diklat, informasi kegiatan, *polling*, dan gerbang menuju aplikasi-aplikasi lainnya. *E-Human Capital*/e-HC adalah

sebuah aplikasi berbasis *website* yang dapat di akses melalui internet baik melalui *Personal Computer* maupun *gadget/mobile*. Melalui aplikasi *e-Human Capital* pegawai dapat melakukan *employee self service* antara lain melakukan pengajuan cuti, klaim biaya rawat inap, biaya kacamata, percetakan slip gaji, absensi, perjalanan dinas, uang lembur, melakukan survei/kuesioner, *quiz online*, *e-care*, *e-health* dan data *Curriculum Vitae* pegawai. Pengelolaan *Human Capital* di Bank Jatim yang telah didukung oleh aplikasi Teknologi melalui Portal *Human Capital* Bank Jatim telah mengoptimalkan pengelolaan SDM di Bank. Fitur Portal Bank Jatim digambarkan sebagai berikut:



### Employee Self Service

- Data Pribadi
- Data Keluarga
- Data Riwayat Pangkat dan Jabatan
- Data *Reward Punishment*
- Data Riwayat Kesehatan
- Data Remunerasi (Gaji, Tunjangan, Potongan dan lainnya)
- Data Asuransi
- Data Cuti, Ijin, Sakit
- Data Riwayat Pendidika
- Data Hasil Ujian Sertifikasi
- *Work Life Balance*

#### Implementasi GCG:

- Data BPP SDM
- Data SE/ Peraturan BI
- Data SKSE Direksi tentang SDM
- Data Peraturan Pemerintah tentang SDM



### Feature Application

#### Sistem Payroll dan PPh Terintegrasi

#### Absensi Online

#### SPD Online

#### News:

- Nota/Surat Divisi
- Hari Libur Nasional
- Berita Kegiatan
- Berita Duka
- Informasi Diklat



### Measurement System

#### Otomasi Pengukuran Kinerja *(Performance Measurement)*

#### Otomasi Pengukuran Budaya Layanan *(Service Level Measurement)* (Dalam Pengembangan)

#### Otomasi *Work Load Analysis* (Dalam Pengembangan)

#### *E-Learning* *(Assesment Product)* *Knowledge Management*

KPI-SCORECARD SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN KINERJA UNTUK MEMUDAHKAN PROSES *MONITORING* DAN *REPORTING* KINERJA PEGAWAI

## Internalisasi Budaya

Pengembangan *Corporate Culture* yang bertujuan membangun budaya kerja yang mendorong produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan positif serta menciptakan hubungan yang harmonis antar pegawai. Menjalankan Program internalisasi dan penyalarsan Nilai Utama dan Budaya Bank

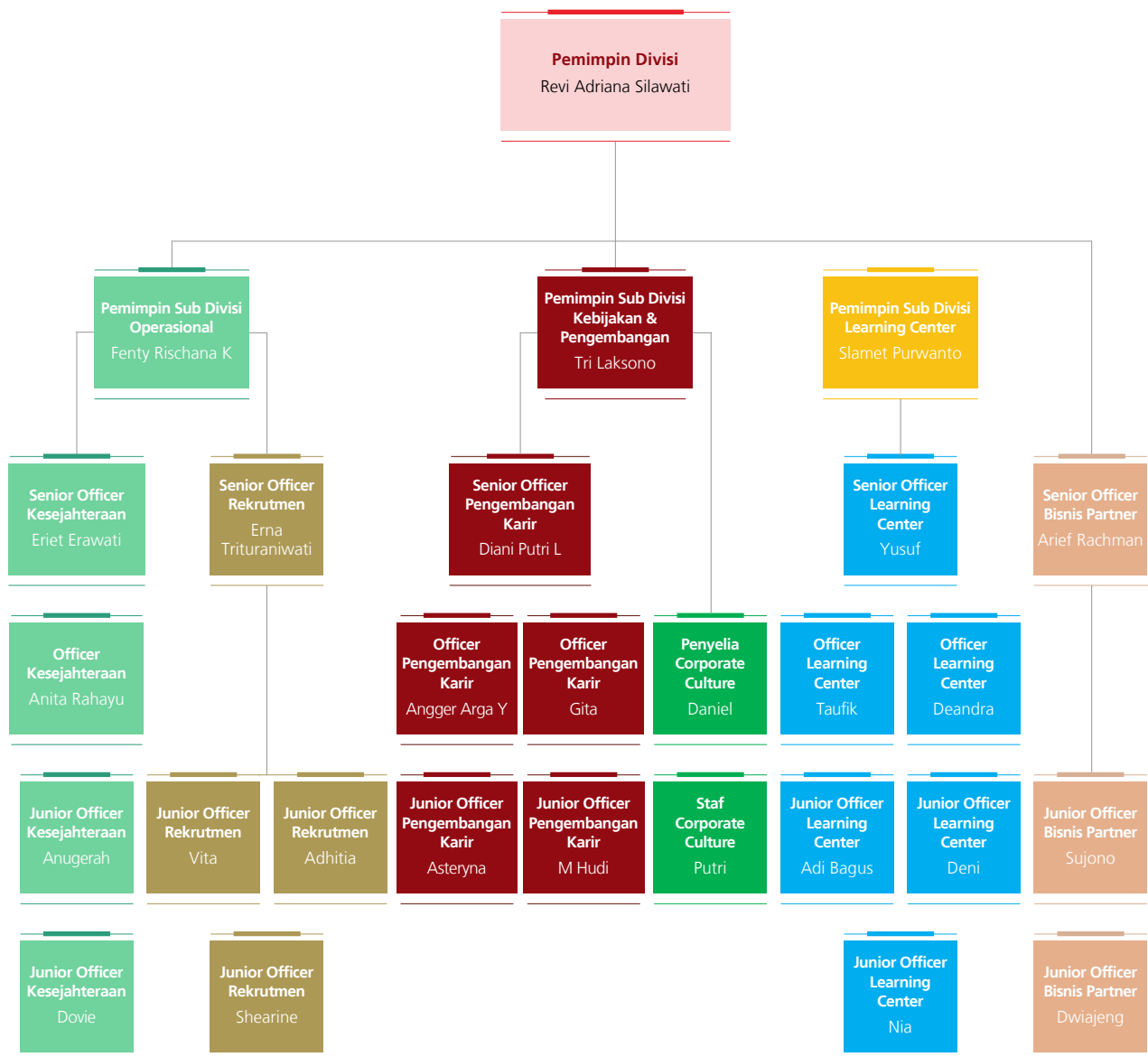
yang berkesinambungan sehingga dapat merespon tantangan dan perubahan yang terjadi dan menjadikan pegawai Bank Jatim dapat menyesuaikan diri dengan cepat, lebih dinamis dan *agile* tanpa meninggalkan aspek profesionalisme dan integritas.

# Struktur Pengelola

## Human Capital

SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama Bank Jatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. Bank Jatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.

Divisi Sumber Daya Manusia di Bank Jatim berada di bawah Direktur Utama yang dipimpin oleh Pemimpin Divisi Human Capital. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi Layanan Human Capital dan Sub Divisi Pengembangan Human Capital yang berperan dalam Operasional layanan, penyusunan kebijakan dan pengembangan *Human Capital* sehingga diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.





# Rencana Kerja

## Human Capital 2023

Divisi Human Capital telah memiliki rencana pengembangan *human capital* untuk tahun 2023 sebagai berikut:

### SUB DIVISI KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

1. *In House Training* terhadap seluruh tim budaya (Cabang dan Kantor Pusat) untuk meningkatkan *engagement* terhadap Bank;
2. *Cultural Identity* yaitu program pemberian identitas berupa atribut kepada tim budaya;
3. Melakukan *Coaching* dan *Mentoring* pada Tim Budaya, serta *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi program kerja *Corporate Culture* pada seluruh unit kerja (Cabang dan Kantor Pusat);
4. Ruang komunikasi antara pekerja dan *Top Management* melalui program *Greeting and Sharing with BOD*;
5. Kegiatan tahunan bagi tim budaya Bank Jatim, yaitu *EXPRESTIVAL* (EXPRESI Festival) untuk memberikan apresiasi terhadap Tim Budaya;
6. Penyusunan Kamus dan Profil Kompetensi;
7. Penyusunan persyaratan jabatan; dan
8. Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai.

### SUB DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL

1. Implementasi pemberian fasilitas MOP bagi *account officer* cabang;
2. Penyusunan ketentuan dan implementasi kewajiban cuti *block leave* sebagai bagian dari mitigasi dan pencegahan kejadian *fraud*;
3. Penyempurnaan ketentuan tentang tunjangan pajak penghasilan bagi pegawai;
4. Penyempurnaan ketentuan CAP;

5. Pemberian *Reward* atas Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kesehatan;
6. Penyempurnaan sistem *grading* melalui *job person match*;
7. Implementasi Pengakhiran bhakti pegawai tahun 2023;
8. *Launching* Program *Jatimers Intership Program* (JIP) mulai dari Perijinan, sarana dan prasarana sampai dengan proses rekrutmen talent JIP;
9. Peningkatan kompetensi calon *assessor* untuk meningkatkan kualitas *assessor*;
10. Digitalisasi tanggungan keluarga untuk pegawai tetap mulai dari proses pembuatan sistem, implementasi program dan sosialisasi; dan
11. Pembentukan *assessment center* rekrutmen *pro hire* Psikolog dan Persiapan tempat *assessment center*.

### SUB DIVISI LEARNING CENTER

1. Penyusunan kurikulum serta silabus pembelajaran terkini disesuaikan dengan visi-misi Bank dan jenjang jabatan;
2. Pemetaan dan penyusunan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kompetensi wajib bagi seluruh pegawai sesuai lingkup dan bidang kerja;
3. Penyusunan kebijakan pendidikan dan pelatihan pegawai;
4. Pengembangan *Learning Management System* (LMS) berbasis digital;
5. Program pendidikan luar negeri;
6. Program Beasiswa S2; dan
7. Optimalisasi peran dan fungsi *Lecturer Internal*.

### GRUP BISNIS PARTNER

1. Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama;
2. Percepatan Proses Pemberian *Punishment*; dan
3. *Survey Employee Engagegement*.

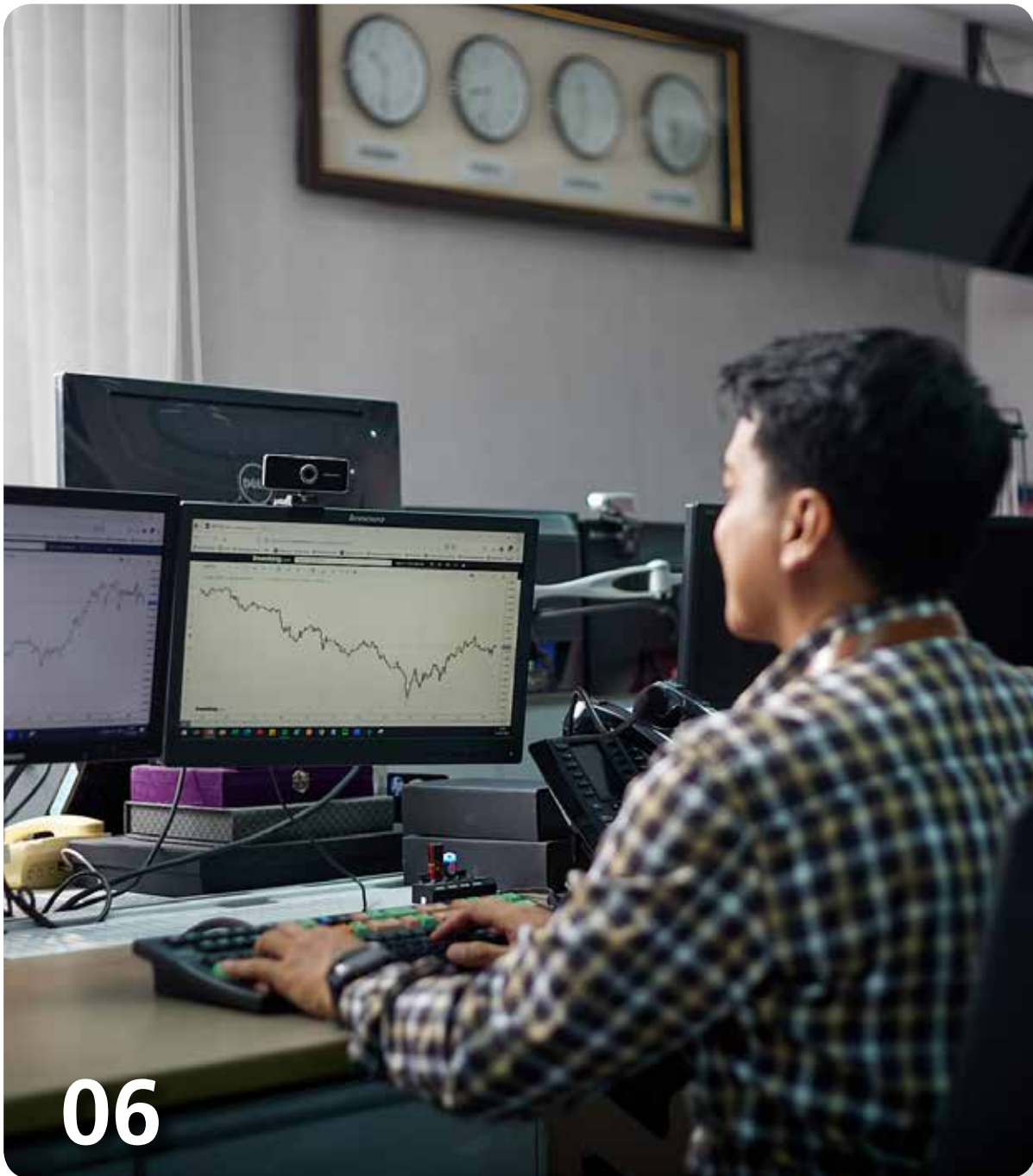




# Teknologi Informasi







06

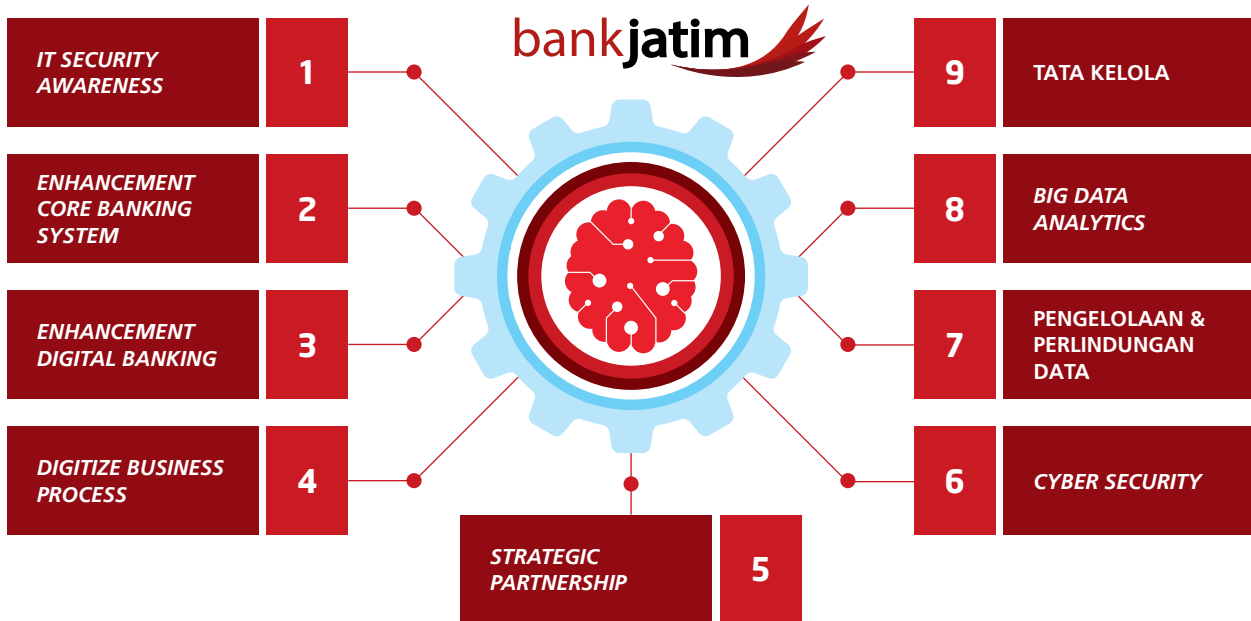




# Strategi Teknologi Informasi

Industri 4.0 mendorong digitalisasi melakukan perkembangan dan perubahan pada semua lini proses bisnis perbankan. Dengan melihat kondisi terkini, Bank Jatim juga perlu melakukan

pengembangan dan perubahan pada teknologi informasi (TI) pada Bank. Berikut strategi TI untuk mengembangkan dan menjawab perkembangan digitalisasi industri 4.0:



Gambar 1. Strategi Teknologi Informasi Bank Jatim (Sumber: Divisi TI Bank Jatim)

**IT SECURITY AWARENESS**

Seiring peningkatan layanan *digital banking*, bank harus menyiapkan strategi keamanan TI untuk pencegahan, *monitoring*, proteksi dan solusi perlindungan informasi dari ancaman *fraud*, *virus*, *malware* yang masuk melalui jaringan, *user*, *email*, maupun *cloud*.

**DIGITIZE BUSINESS PROCESS**

Dengan digitalisasi inovasi pada proses bisnis, membantu meningkatkan efisiensi, integrasi, percepatan SLA, *paperless*, mudah dan adaptif sehingga berdampak positif pada ekspansi bisnis.

**PENGELOLAAN & PERLINDUNGAN DATA**

Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

**ENHANCEMENT CORE BANKING SYSTEM**

Modernisasi *Core Banking System* dengan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan keandalan dan kontinuitas operasional dan layanan, *capacity planning*, tingkat pemrosesan yang cepat, volume transaksi yang tinggi dan *support* terhadap pengembangan *digital banking*.

**STRATEGIC PARTNERSHIP**

Strategi membangun *partnership* dan kolaborasi bank melalui kerja sama *3<sup>rd</sup> parties* dan *ecosystem* dengan lembaga *fintech*/ bank lain dalam hal pemanfaatan teknologi *big data* dan *cloud computing*.

**BIG DATA ANALYTICS**

Pemanfaatan data dalam volume dan kecepatan yang besar untuk analisa pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan peningkatan bisnis didukung dengan teknologi kecerdasan buatan.

**ENHANCEMENT DIGITAL BANKING**

Perkembangan *digital banking* keharusan untuk mendukung bisnis, memenuhi *trend* teknologi perbankan, pemenuhan regulasi perilaku dan kebutuhan konsumen, mengantisipasi tingkat persaingan antar lembaga bank/non-bank.

**CYBER SECURITY**

Serangan siber telah mendorong kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan siber (*cyber resilience*) melalui penguatan keamanan siber (*cyber security*). Penguatan keamanan siber sektor perbankan untuk mengatasi risiko siber (*cyber risk*)

**TATA KELOLA**

Kumpulan kebijakan, proses/aktifitas dan prosedur untuk mendukung pengoperasian TI agar hasilnya sejalan dengan strategi bisnis.

#### 1. IT Security Awareness

Revolusi Industri 4.0 seiring dengan peningkatan layanan *digital banking* di perbankan menuntut kesiapan dan kehandalan *information technology* (IT) *Security* dalam menghadapi penetrasi pengguna internet yang semakin tinggi. Bank harus menyiapkan strategi meningkatkan pengetahuan kepada SDM mengenai IT *Awareness* untuk pencegahan, *monitoring*, proteksi dan solusi perlindungan informasi nasabah dari ancaman *fraud*, virus, *malware* dan kejahatan siber yang masuk melalui jaringan, *user*, *email* maupun *cloud*.

#### 2. Enhancement Core Banking System

Modernisasi *Core Banking System* sekaligus infrastruktur pendukungnya, dapat meningkatkan keandalan dan kontinuitas operasional layanan perbankan, *capacity planning*, tingkat pemrosesan yang lebih cepat, volume transaksi yang semakin tinggi, dan dukungan terhadap pengembangan *digital banking*. *Core Banking System* (CBS) yang digunakan oleh Bank Jatim saat ini adalah Alphabits 4.2 milik Telkomsigma yang selama ini telah memenuhi kebutuhan proses bisnis Bank Jatim. Untuk mempercepat proses *End of Day* (EOD)/*End of Month* (EOM)/*End of Year* (EOY) yang saat ini masih menggunakan *single thread* (belum *multi thread*) serta kebutuhan *digital banking* ke depan, manajemen perlu untuk melakukan *evaluation* dan *enhancement* pada *Core Banking System* (CBS) saat ini.

#### 3. Enhancement Digital Banking

Di era ini, digitalisasi menjadi suatu terobosan baru yang menjanjikan kemudahan dan efektivitas juga efisiensi. Perbankan diharuskan bisa melakukan transaksi, negosiasi, komunikasi digital dengan nasabah. Pengembangan *digital banking* adalah keharusan untuk mendukung bisnis, memenuhi *trend* teknologi perbankan, pemenuhan regulasi, perilaku dan kebutuhan konsumen, mengantisipasi tingkat persaingan antar lembaga bank/non-bank.

Menghadapi era digitalisasi, Bank Jatim melakukan perubahan dan perkembangan pada layanan perbankan bagi nasabah dengan meluncurkan JConnect sebagai *branding digital banking* Bank Jatim untuk memudahkan dan efektivitas nasabah dalam melakukan transaksi dan percepatan proses layanan. Selanjutnya, Bank Jatim tetap memiliki strategi untuk *digital banking* dengan meningkatkan dan memperkuat produk-produk Bank Jatim menjadi lebih digital, di antaranya *Customer Online Boarding*, *Credit Online*, *Customer self-service*, *One Platform* ataupun *Know Your Customer* (KYC). Percepatan transformasi digital perlu diimbangi dengan adanya penguatan di bidang peraturan/kebijakan agar tetap sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku dan tetap dapat diawasi penggunaannya.

Dalam proses pengembangan digitalisasi juga adanya keseimbangan dari sisi SDM. Untuk itu, Bank Jatim perlu melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mempersiapkan, mengembangkan teknologi *banking* dan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

#### 4. Digitize Business Process

Memasuki era digital segala sesuatu sudah ada dalam genggaman dan berlangsung cepat. Revolusi industri 4.0 sudah mengubah tatanan sistem perindustrian dari teknologi yang berkembang pesat menjadi teknologi digital. Mau tidak mau semua sistem bisnis yang masih menerapkan konvensional akan beralih pada digital jika tidak mau tertinggal. Digitalisasi bisnis merupakan proses transformasi bisnis dari konsep konvensional menjadi virtual, meliputi proses transaksi dan penerapan sistem perusahaan dengan tujuan mempercepat efisiensi kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak serta mencakup secara global.

Namun, *digitize business process* tidak berhenti pada otomasi belaka. Saat ini mendigitalkan suatu proses tidak hanya untuk alur kerja yang ada, tetapi untuk membuatnya lebih baik dan lebih efisien. Bagi bank, hal tersebut dapat mengotomatiskan operasi populer seperti layanan pinjaman, layanan kredit, transaksi tunai dan non tunai. Efek ekonomi tersebut sangat penting karena layanan menjadi lebih mudah diakses oleh nasabah serta waktu tunggu yang dapat dipangkas dan menjadi layanan yang dapat diakses selama 24 jam nonstop oleh nasabah. Dengan digitalisasi inovasi pada proses bisnis dapat membantu meningkatkan efisiensi, integrasi percepatan *Service Level Agreement* (SLA), *paperless*, mudah dan adaptif sehingga berdampak positif pada ekspansi bisnis.

#### 5. Strategic Partnership

Merupakan strategi membangun *partnership* dan kolaborasi bank melalui kerja sama dengan 3<sup>rd</sup> *party ecosystem* dengan lembaga *fintech*/Bank lain dalam hal pemanfaatan teknologi *big data* dan *cloud computing*. Strategi melalui kerja sama maupun kolaborasi dengan pihak ketiga akan terus dilanjutkan dan dikembangkan mengingat persaingan di bidang perbankan semakin banyak.

Strategi Bank Jatim untuk mendukung peningkatan *digital banking* dan menghadapi perkembangan lembaga *fintech* adalah melakukan pengembangan *Open Banking*, kerja sama dengan *Fintech* (Gopay, Dana, Ovo) maupun *e-commerce* (Tokopedia). Bank Jatim akan tetap melihat peluang untuk berkolaborasi dengan 3<sup>rd</sup> *Party ecosystem* atau lembaga *fintech*/Bank lain. Bank Jatim juga tetap mendukung unit usaha (dapat dikatakan dengan 3<sup>rd</sup> *party*) baik dari infrastruktur dan pengembangan bisnis syariah Bank Jatim.

#### 6. *Cyber Security*

Perkembangan digitalisasi di sektor perbankan meningkatkan timbulnya risiko terhadap keamanan siber bagi Bank. Maraknya serangan siber telah mendorong kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan siber (*cyber resilience*) melalui penguatan keamanan siber (*cyber security*). Penguatan keamanan siber telah mengarah kepada berbagai inisiatif di berbagai sektor industri tak terkecuali sektor perbankan untuk mengatasi risiko siber (*cyber risk*) oleh para regulator di berbagai negara. Terlebih lagi, sektor keuangan termasuk perbankan merupakan sektor yang menjadi target serangan siber paling tinggi baik secara global maupun di Indonesia. Berdasarkan catatan *Bank for International Settlements* (BIS), regulator perbankan di beberapa negara telah memiliki kebijakan khusus terkait keamanan siber. Adapun strategi Bank Jatim untuk meningkatkan keamanan siber antara lain mencakup kebijakan terkait pengelolaan keamanan siber, kewajiban penilaian risiko siber, kewajiban pengujian kerentanan teknologi informasi Bank, penilaian tingkat maturitas siber, dan pelaksanaan pengujian keamanan siber Bank.

#### 7. Pengelolaan Data dan Perlindungan Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

#### 8. *Big Data Analytics*

*Big data* adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan *database* konvensional karena berjumlah besar, bergerak terlalu cepat, dan tidak sesuai dengan kemampuan struktural dari arsitektur *database* tradisional, sehingga dilakukan suatu proses dengan sistem integrasi yang mampu menangani *big data* yang disebut *big data analytics*. *Big data analytics* adalah keseluruhan proses dari mengumpulkan, merapikan, menganalisis *big data* sehingga diperoleh informasi yang bernilai guna untuk membantu penentuan keputusan atau keberlangsungan suatu sistem

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penerapan *big data analytics* yaitu:

- a. *Data Mining*
- b. *Data Collection*
- c. *Data Storing*
- d. *Data Cleaning*
- e. *Data Analytics*
- f. *Data Consumption*

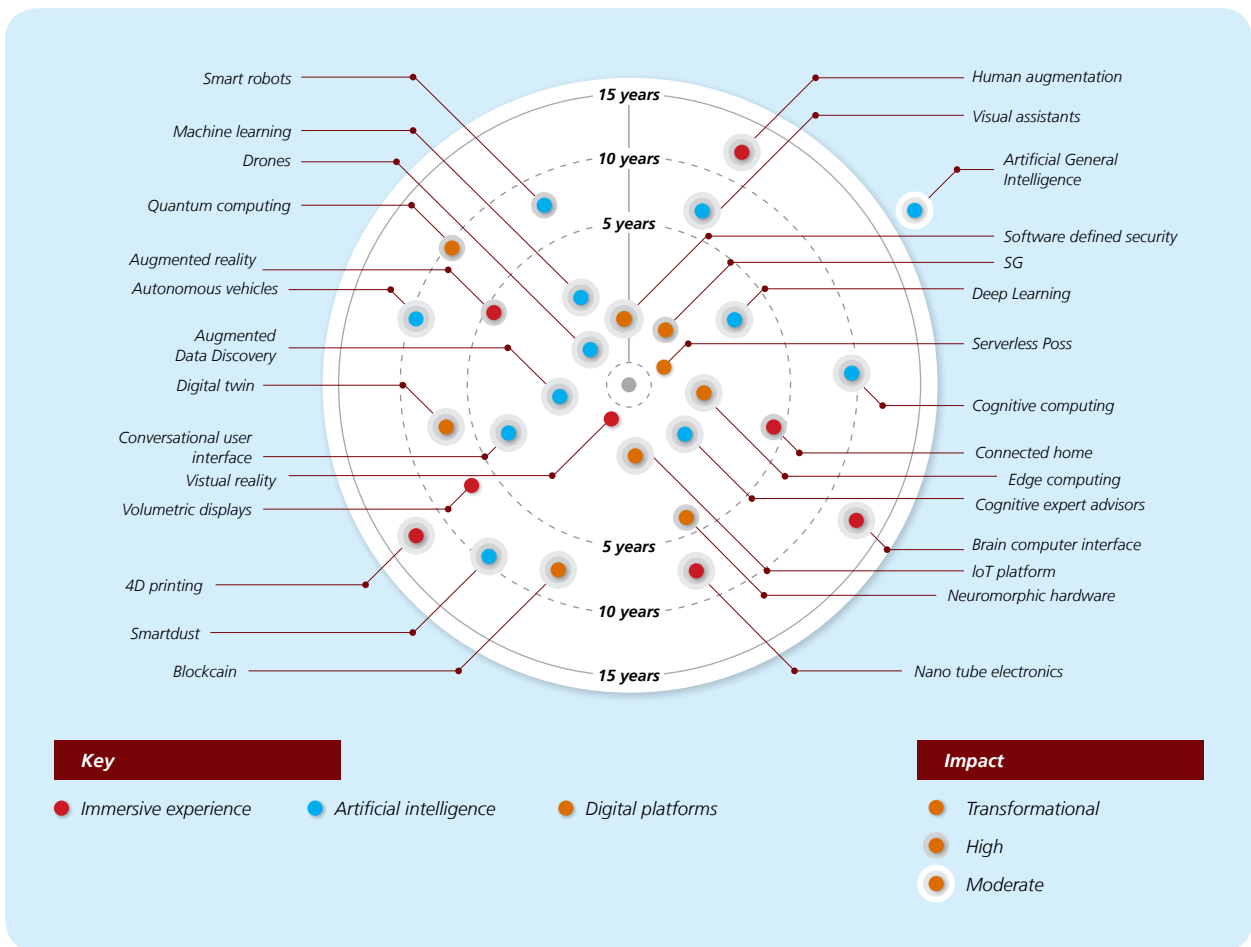
Pemanfaatan data dalam volume dan kecepatan yang besar dilaksanakan untuk analisis dan pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan peningkatan bisnis didukung dengan teknologi kecerdasan buatan. Dalam skala luas, *big data analytics* menyediakan sarana untuk menganalisis kumpulan data dan menarik kesimpulan tentang data tersebut untuk membantu membuat keputusan bisnis yang terinformasi. *Big data analytics* menawarkan berbagai manfaat bisnis yaitu peluang pendapatan baru, pemasaran yang lebih efektif, layanan bagi nasabah yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitor.

# Inovasi

## Teknologi Informasi

Perubahan di *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Sebagian layanan perbankan sekarang berubah menjadi layanan *self-service* berbasis TI. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin tingginya tuntutan dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan bisnis perubahan masa depan.

Menurut OJK perkembangan teknologi digital pada perbankan dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Perkembangan Teknologi Digital Perbankan ke depan menurut OJK. (Sumber: KPMG)

Kemajuan teknologi digital menimbulkan perubahan yang drastis, tidak hanya menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan yang signifikan dalam modalitas kegiatan bisnis, termasuk bisnis jasa keuangan. Di bisnis jasa keuangan, teknologi digital telah mendorong tumbuhnya bisnis *non-bank* yang menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan saluran dan platform teknologi digital sehingga transaksi dapat dilakukan dari mana dan kapan saja.



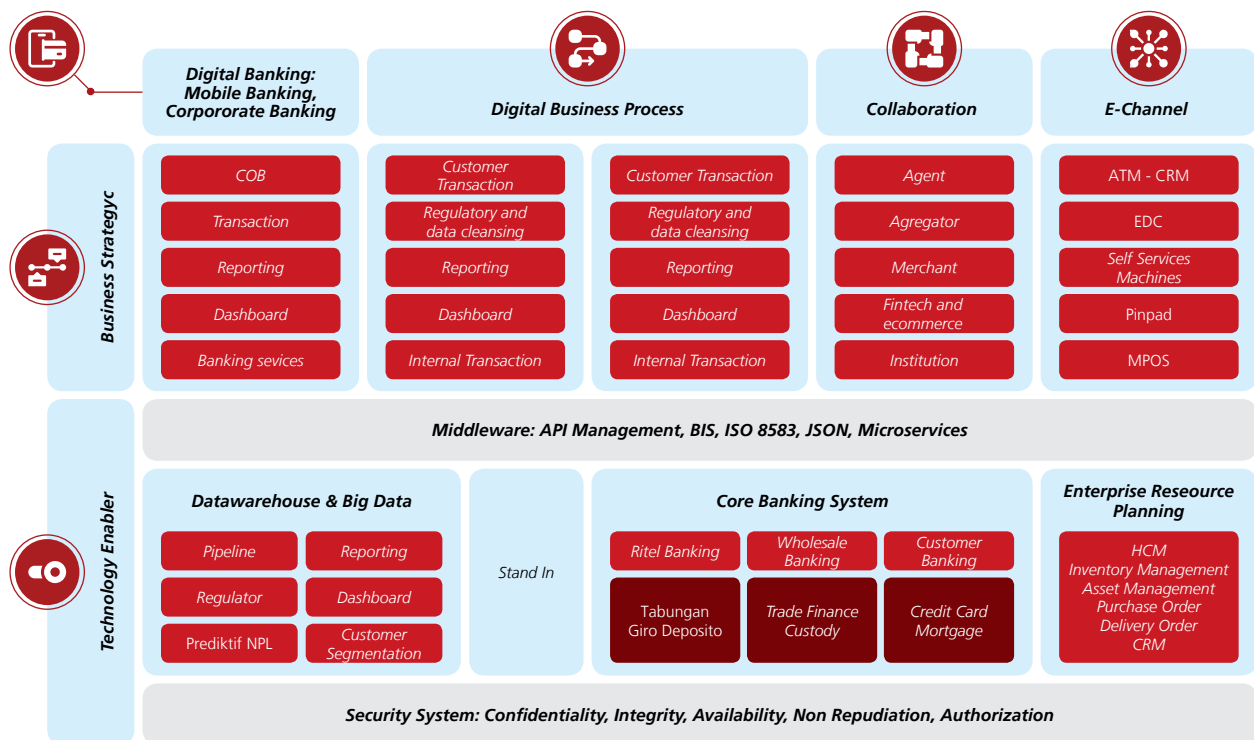
Hingga tahun 2022, Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam perkembangan teknologi digital perbankan. Saat ini, beberapa produk dan layanan yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat yaitu:

1. Untuk memudahkan layanan kepada nasabah:
  - a. JConnect Sipandai
  - b. JConnect EKMG
  - c. JConnect Eloan
  - d. JConnect Mobile Banking
  - e. Jconnect Internet Banking
  - f. SMS Banking
  - g. Jatim Kilat
  - h. Peer to Peer Lending Host To Host With Amarnya Fintech
  - i. ATM-CRM
  - j. EDC
  - k. QRIS, QRIS-Tanpa Tatap Muka
  - l. Virtual Account
  - m. Digital Lounge
  - n. Apps for Government (Aplikasi Monitoring Elektronifikasi Keuangan Daerah (eKD), e-Marketplace, e-Tourism, e-Retribusi, dan e-Bansos)
2. Untuk *optimize* proses bisnis:
  - a. Upgrade Mesin Core Banking System Bank Jatim
  - b. ATM Monitoring
  - c. Virtualisasi server
  - d. Core Switch DC – DRC
  - e. Credit Scoring
3. Untuk Penguatan IT Security
  - a. Application Security Testing
  - b. End Point Security Management
  - c. Email Security Gateway
  - d. Log Management System
  - e. Load Balancer
  - f. Two Factor Authentication dan VPN Concentrator
  - g. Web Application Firewall

# Infrastruktur

## Teknologi Informasi

### Desain Arsitektur High Level



Gambar 3. Desain Arsitektur High Level.  
(Sumber: Divisi TI Bank Jatim)

Desain Arsitektur High Level memperlihatkan komponen-komponen utama pembentuk sistem serta lingkungan para pihak yang berinteraksi dengan sistem. Komponen yang dimaksud mencakup komponen aplikasi, infrastruktur serta komponen pendukung berupa *governance*, kebijakan dan prosedur, serta staf IT sebagai pelaksana utama. Arsitektur ini memperlihatkan bahwa fungsi bisnis ditunjang oleh berbagai aplikasi yang dikelompokkan menjadi:

- Core Banking System;
- Bank Delivery System;
- Reporting System; dan
- Support System

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, disediakan sistem *Data Warehouse*. Untuk mengantisipasi kebutuhan analisis bisnis yang lebih cepat di masa depan, arsitektur memungkinkan untuk dilengkapi dengan fasilitas BI (*Business Intelligence*). Seluruh akses terhadap aplikasi dilewatkan pada *access channel* yang "secure dan reliable", baik akses dari internal maupun eksternal. Seluruh aplikasi dan infrastruktur dikelola oleh divisi TI, ditunjang oleh kecukupan:

- IT Governance dan Information Governance;
- Kebijakan-kebijakan lain;
- Standar;
- Standar Operating Procedure;
- Rencana tahunan dan Capacity Planning, serta *people* atau staf pelaksanaannya.

Pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem dibedakan menjadi:

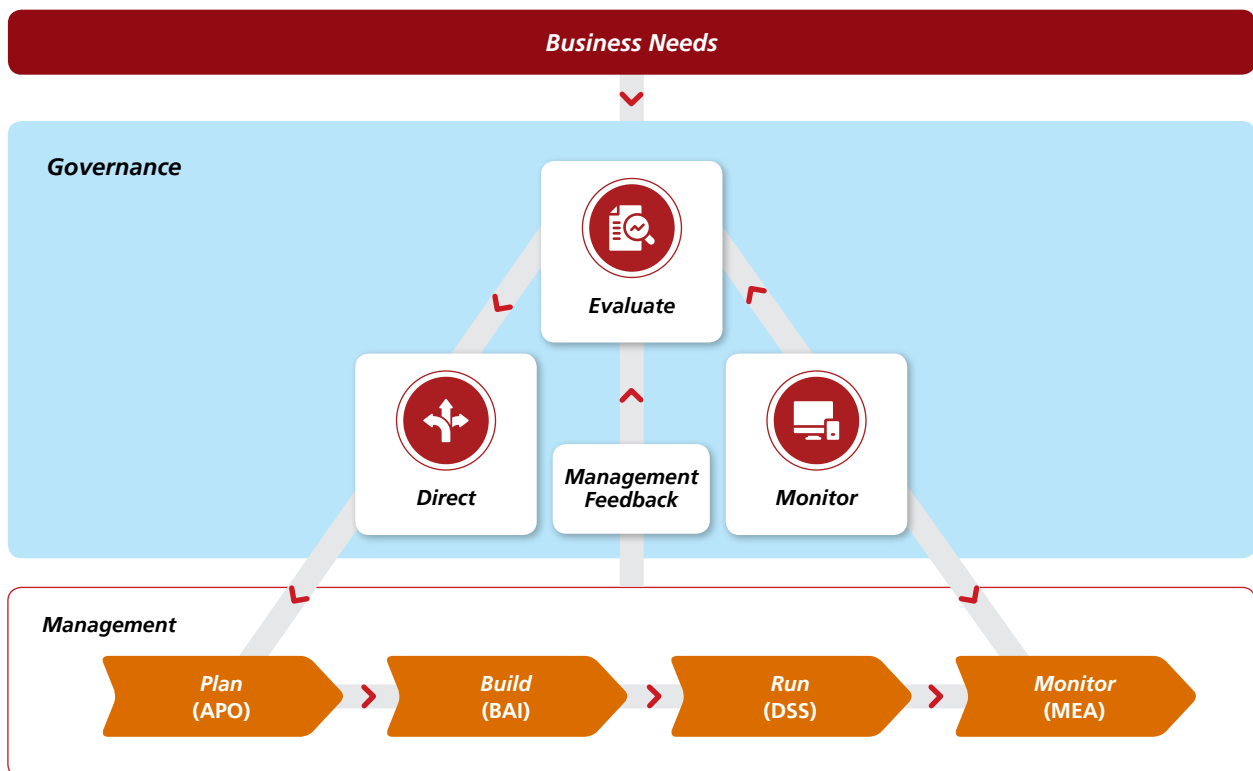
- User (staf internal Bank Jatim);
- Manager (para pengambil keputusan di Bank Jatim dalam berbagai tingkatan);
- Customer (nasabah);
- Koneksi *host-to-host* ke *biz-partner*; serta
- Stakeholders dan regulator yang menerima laporan.

*People* mencakup organisasi, kecukupan jumlah personil, serta kecukupan kompetensi untuk menjalankan sebuah jabatan TI.

# Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata Kelola Teknologi Informasi (Tata Kelola TI) adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan *delivery* dan *value* kepada *stakeholder* Bank. Dengan demikian Tata Kelola TI sangatlah

penting dalam mendukung dan mencapai tujuan perusahaan dalam menyelaraskan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan antara aspek *People*, *Process* dan *Technology*.



Gambar 4. Governance Process of IT.

Gambar tersebut merupakan model Tata Kelola TI Bank Jatim. Penjelasan gambar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi penggunaan Teknologi Informasi pada kondisi saat ini dan masa depan;
2. Melakukan arahan langsung terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana terkait penggunaan Teknologi Informasi serta memastikan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dapat memenuhi tujuan bisnis Bank Jatim;
3. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perencanaan Teknologi Informasi dengan kebijakan dan kinerja Teknologi Informasi.

Terdapat 5 (lima) area yang menjadi fokus area tata Kelola TI, yaitu:

1. **Strategic Alignment**, yaitu Penerapan TI harus benar-benar mendukung pencapaian misi perusahaan dimana strategi TI harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan.
2. **Value Delivery**, yaitu Penerapan TI harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan.
3. **Risk Management**, yaitu Penerapan TI harus disertai dengan identifikasi risiko-risiko TI sehingga dampaknya dapat ditangani.
4. **Resource Management**, yaitu Penerapan TI harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya sedapat mungkin dilakukan secara optimal.
5. **Performance Management**, yaitu Penerapan TI harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas TI sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Penentuan karakteristik tata Kelola TI terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

#### A. COMPLIANCES

Bank mengadopsi *regulatory compliance* dan *best practice* dari regulator dan lingkungan bisnis sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum. Pada peraturan tersebut membahas pengertian dari ketahanan siber, keamanan siber, laporan insiden siber, dan notifikasi awal insiden siber.
2. POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Pada peraturan tersebut POJK mendukung transformasi digital dan resiliensi siber industri perbankan. Pada peraturan tersebut pihak perbankan akan transformasi digital perlu ditingkatkan ketahanan dan keamanan siber.
3. POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Pada Peraturan tersebut pihak perbankan di antaranya wajib memiliki Pemulihan Rencana Bencana (BCP) dan penempatan *Data Center* serta *Disaster Recovery Center* (DRC) di wilayah Indonesia.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Pada peraturan tersebut Bank diatur untuk Standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran (SP) merupakan salah satu upaya untuk mendukung industri SP yang sehat, kompetitif, dan inovatif.
5. POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Pada peraturan tersebut pihak perbankan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga baik Bank maupun non-Bank dalam hal pelayanan digital kepada nasabah.
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast payment (BI-FAST). Pada peraturan tersebut Bank Indonesia sebagai penyelenggara layanan BI-FAST diselaraskan dengan arah kebijakan Bank Indonesia baik di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang *integrated*, *interoperable*, dan *interconnected*.
7. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Pada peraturan tersebut mengatur tentang produk Bank termasuk produk Bank baru dikelompokkan menjadi produk Bank Dasar dan produk Bank Lanjutan.
8. *Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT) sebagai salah satu *framework IT Governance* yang memiliki *IT Strategic Plan* yang selaras (*align*) dengan strategi bisnis.

*Information Technology Information Library* (ITIL) merupakan kerangka kerja standar untuk IT dalam menyelaraskan layanan pendukung TI kepada bisnis. ITIL berfokus pada proses, prosedur, *task* dan *service level* IT untuk mendukung strategi perusahaan, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI.

#### B. HASIL ANALISA VISI, MISI, DAN STRATEGI

1. Mengatasi *weakness* dan *threat* (SWOT)

Strength	Opportunities
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Captive market</i> Pemda &amp; ASN masih melekat kuat.</li> <li>2. Big Data ASN, <i>Micro Retail</i>, dan Wajib Pajak.</li> <li>3. Memiliki layanan <i>e-channel</i> yang cukup luas (ATM, <i>SMS Banking</i>, <i>Internet Banking</i>, <i>Mobile Banking</i>, Laku Pandai, EDC, QRIS).</li> <li>4. Memiliki <i>Digital Lounge</i> yang bertujuan menarik minat dari kalangan millennial.</li> <li>5. Memiliki layanan lengkap pengeluaran dan penerimaan Pemda.</li> <li>6. Jaringan kantor yang sangat luas di wilayah Jawa Timur.</li> <li>7. Memiliki kantor layanan syariah dan produk berbasis syariah.</li> <li>8. <i>Quality of Service e-channel</i> yang tinggi</li> <li>9. Telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan <i>fintech</i> (Paytren, Gopay, OVO, Tokopedia)</li> <li>10. Telah bekerja sama dengan BPR se-Jawa Timur (BPR Apex).</li> <li>11. Telah diluncurkan Jatim Invest, <i>Remittance</i> dan <i>Katepay</i>.</li> <li>12. Telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 dan TTIS BSSN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan dan pengembangan <i>Big Data</i> lebih lanjut.</li> <li>2. Memiliki digital <i>captive market</i>.</li> <li>3. Segmen pasar usia millennial yang mulai dominan.</li> <li>4. Kerja sama dan kolaborasi dengan <i>ecosystem</i>.</li> <li>5. Kerja sama dan kolaborasi dengan perusahaan <i>fintech</i> dalam pemanfaatan <i>Big Data</i> dan <i>Artificial Intelligence</i>.</li> <li>6. Potensi wajib pajak daerah yang masih tinggi.</li> <li>7. <i>Cashless transaction</i> yang terus meningkat.</li> <li>8. Melakukan perubahan <i>E-Channel</i> menjadi <i>one platform</i> (SuperApp).</li> <li>9. <i>Switching</i> BPR Link dapat terus dikembangkan.</li> <li>10. Pengembangan aliansi <i>fintech/e-commerce</i> dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan komunitas di wilayah Jawa Timur.</li> <li>11. Peningkatan <i>Fee Based Income</i>.</li> </ol>



Weakness	Threats
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum efektif dalam sosialisasi, implementasi dan evaluasi ketentuan Internal Divisi Teknologi Informasi.</li> <li>2. Masih terdapat kekurangan jumlah SDM sesuai dengan masing-masing kebutuhan bisnis.</li> <li>3. Perlu peningkatan kemampuan kompetensi secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>4. Produk teknologi yang masih belum mengikuti <i>trend</i> dan model bisnis.</li> <li>5. Strategi <i>digital marketing</i> yang masih tidak maksimal dan kompetitif.</li> <li>6. Data <i>captive market</i> yang belum banyak dimanfaatkan.</li> <li>7. Proses EOD dan EOM untuk proses PSAK masih membutuhkan waktu lebih dikarenakan proses dilakukan pada <i>engine</i> terpisah dari CBS.</li> <li>8. Organisasi TI yang belum optimal.</li> <li>9. Proses bisnis yang belum terdigitalisasi.</li> <li>10. Infrastruktur server HCI masih kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan aplikasi.</li> <li>11. Masih kurangnya ketersediaan <i>lisence</i> Microsoft windows server dan Microsoft SQL.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan dan perubahan teknologi informasi yang semakin cepat dan dinamis (<i>Continual</i>).</li> <li>2. Tuntutan layanan nasabah yang tinggi akan <i>digital service</i>.</li> <li>3. Investasi TI yang membutuhkan anggaran besar tiap tahunnya.</li> <li>4. Pesaing menggarap segmen <i>captive market</i> melalui pendekatan <i>digital service</i>.</li> <li>5. Layanan <i>fintech</i> disrupti perbankan.</li> <li>6. Meningkatnya risiko TI (<i>cyber security</i>) dampak perkembangan teknologi informasi.</li> </ol>

## 2. Visi, Misi, dan Strategi

Dari Visi dan Misi Bank Jatim, arahan bisnis hingga analisis SWOT TI didapatkan Visi dan Misi TI, sebagai berikut:

### Visi TI:

“Memberikan kemudahan layanan berbasis Teknologi Informasi, Komitmen, dan berkolaborasi dengan ekosistem (Pemda dan ASN, UMKM, Masyarakat umum)”

### Misi TI:

- a. Mendorong pertumbuhan bisnis dan peningkatan benefit melalui digitalisasi layanan dan proses.
- b. Menyediakan layanan teknologi dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang terukur dan kompetitif.
- c. Mendorong optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan mitigasi risiko berdasarkan penerapan prinsip tata kelola Teknologi Informasi.

## C. TUNTUTAN CUSTOMER

Perubahan di *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Sebagian layanan perbankan sekarang berubah menjadi layanan *self-service* berbasis TI. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin tingginya tuntutan dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan bisnis perubahan masa depan.

## D. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Dinamika perkembangan Teknologi yang semakin tinggi dengan adanya revolusi industri 4.0 terutama pada jasa keuangan mengharuskan Bank Jatim senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang ada dan sedang berlangsung. Hal ini dilakukan demi memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam berinteraksi dalam layanan perbankan

## E. KEAMANAN TEKNOLOGI DIGITAL PERBANKAN

Transaksi secara digital yang semakin tinggi perlu diikuti dengan keamanan transaksi perbankan yang handal seiring meningkatnya ancaman kejahatan siber perlu dipertimbangkan pada saat menerapkan dan merespon perkembangan teknologi.

## Cyber Security

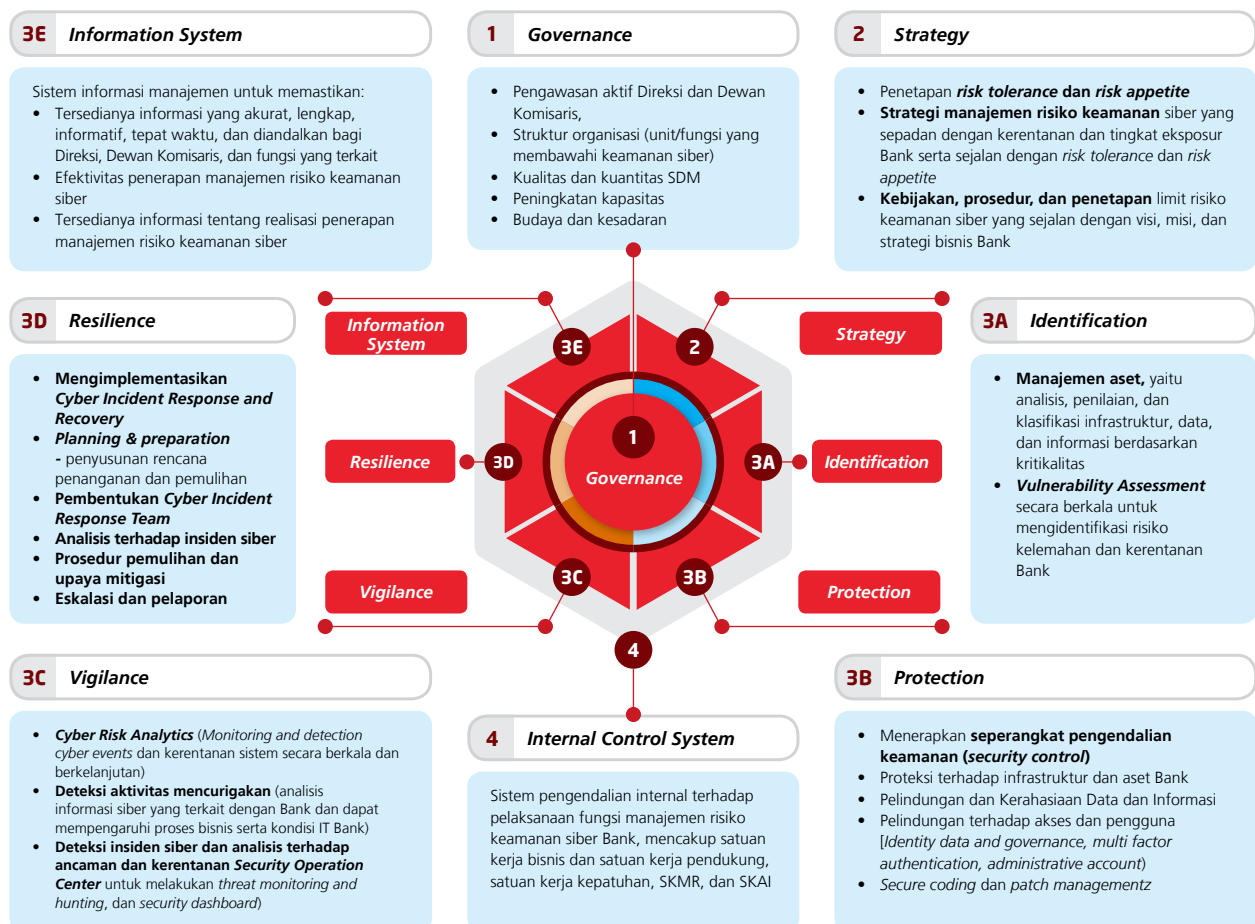
Perkembangan digitalisasi di sektor perbankan meningkatkan timbulnya risiko terhadap keamanan siber bagi Bank. Maraknya serangan siber telah mendorong kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan siber (*cyber resilience*) melalui penguatan keamanan siber (*cyber security*). Penguatan keamanan siber telah mengarah kepada berbagai inisiatif di berbagai sektor industri tak terkecuali sektor perbankan untuk mengatasi risiko siber (*cyber risk*) oleh para regulator di berbagai negara. Terlebih lagi, sektor keuangan termasuk perbankan merupakan sektor yang menjadi target serangan siber paling tinggi baik secara global maupun di Indonesia. Berdasarkan catatan *Bank for International Settlements* (BIS), regulator perbankan di beberapa negara telah memiliki kebijakan khusus terkait keamanan siber.

Beberapa *Best practices* di berbagai negara yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber antara lain mencakup kebijakan terkait pengelolaan keamanan siber, kewajiban penilaian risiko siber, kewajiban pengujian kerentanan teknologi informasi Bank, penilaian tingkat maturitas siber, dan pelaksanaan pengujian keamanan siber Bank. *Best practices* tersebut patut juga dipertimbangkan untuk diimplementasikan pada perbankan Indonesia agar Bank dapat melakukan mitigasi potensi ancaman dan kerentanan siber di era digitalisasi perbankan.

Mengacu pada standar internasional dan *best practices* dari berbagai negara, disusun *framework* penguatan kerangka keamanan siber sektor perbankan yang terdiri atas *Cyber Security Management*, *Cyber Security Exercise*, dan *Cyber Security Reporting*.

### a. Cyber Security Management

*Cyber security management* memberikan gambaran dan panduan bagi Bank dalam mengelola risiko siber yang merujuk pada standar dan *best practices* internasional antara lain *National Institute of Standards and Technology* (NIST) *Framework for Improving Cyber Security*, *NIST Risk Management Framework*, *ISO 27001 – Information Security Management Standard*, *ISO 27032 – Guidelines for cyber security*, dan *Financial Stability Board Cyber Incident Response Recovery Toolkits*. Kerangka pengelolaan risiko siber terdiri dari 4 (empat) pilar yang saling berkesinambungan.



### Cyber Security Management

(Sumber: Cetak Biru Digital Perbankan OJK 2025)

Dalam penerapan *Cyber Security Management*, Bank telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 pada tahun 2022. Standar tersebut diterapkan sebagai kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi yang efektif, khususnya dalam mengamankan transformasi digital yang sedang dilakukan oleh Bank Jatim.



**Serah Terima Sertifikasi ISO27001**

Secara umum, ISO 27001 memiliki manfaat antara lain:

1. Meningkatkan keamanan informasi: ISO 27001 mendukung Bank meningkatkan keamanan informasi dengan menerapkan *security best practices*.
2. Mengurangi risiko: ISO 27001 membantu organisasi mengurangi risiko yang terkait dengan keamanan informasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran data.
3. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder*: dengan menerapkan standar ISO 27001, Bank dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atas tata kelola keamanan Bank.
4. Memenuhi persyaratan hukum dan peraturan: ISO 27001 membantu Bank memenuhi kepatuhan atas persyaratan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keamanan informasi.
5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas: dengan mengurangi risiko keamanan informasi, ISO 27001 dapat membantu Bank meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasi bisnis.

#### b. *Cyber Security Exercise*

*Cyber security exercise* merujuk pada praktek pengujian/tes penetrasi (*penetration testing*) yang bertujuan untuk menguji fungsi penting (*critical function*) Bank serta kemampuan SDM dan infrastruktur yang mendukung fungsi penting tersebut (*people, process and technology*). Hal tersebut mencakup penilaian dari aspek teknis berupa kecukupan dan efektivitas infrastruktur serta keamanan sistem, kemampuan

dan kapasitas SDM dalam merespon insiden atau ancaman, dan juga pelaksanaan proses simulasi secara keseluruhan. Pelaksanaan *cyber security exercise* dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko siber Bank.

Dalam penerapan *Cyber Security Exercise*, Bank telah menerapkan pengamanan sebagai berikut:

1. *Review security* pada jaringan intranet.
2. Melakukan *pentest* pada jaringan intranet dan ekstranet.
3. *Review system security* pada aplikasi internal, dengan menerapkan SSL dan WAF (*Web Application Firewall*).
4. Menerapkan *Single Sign On* atau *Single Identity* untuk setiap aplikasi yang login.
5. Optimalisasi *Active Directory* pada perangkat Server dan PC.
6. Implementasi *Security Information and Event Management* (SIEM) pada perangkat kritikal (F5 WAF, Enforcive, AS400, CISCO, Fortinet, Kaspersky, Server Active Directory).
7. Melakukan pembatasan akses *user* pada *Core Banking System* dengan metode satu *user*, satu IP address, dan satu komputer.
8. Menelaah *security system* khusus *port* yang boleh terbuka atau yang harus tertutup untuk seluruh perangkat di level DC, DRC, Kantor Pusat, dan Unit Kerja.
9. *Remote desktop* menggunakan aplikasi *end point management* untuk mencegah serangan *malware* pada perangkat *endpoint* – PC.
10. Memastikan *patches* terbaru telah ter-*install* pada server dan *endpoint*.
11. Melakukan peremajaan *hardware* dan *software* yang *obsolete*.
12. Sosialisasi *security awareness* ke seluruh pegawai.

#### c. *Cyber Security Reporting*

*Cyber security reporting* bertujuan untuk mendukung penguatan ketahanan dan keamanan siber bank dengan memberikan gambaran mengenai insiden dan ancaman siber yang terjadi kepada otoritas, antara lain terdiri atas laporan insiden siber, laporan hasil penilaian penerapan manajemen risiko keamanan siber Bank, dan laporan hasil pengujian pertahanan keamanan siber. Dalam penerapan *Cyber Security Reporting*, Bank telah memiliki Kebijakan dan *Standart Operating Procedure* mengenai Ketahanan dan Keamanan Siber dimana dalam aturan tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

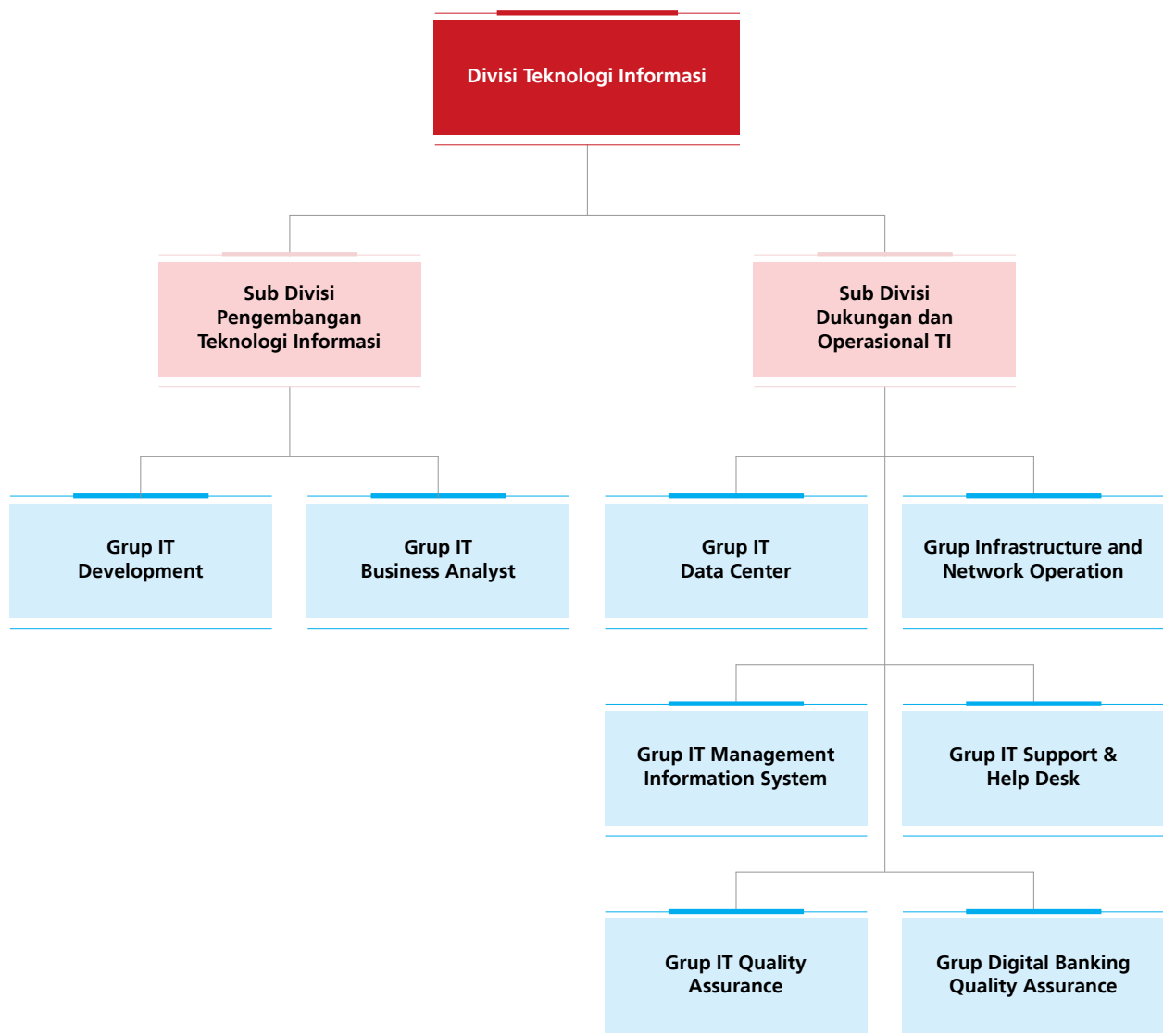
1. Melakukan Uji Ketahanan dan Keamanan Siber minimal 1 (satu) tahun sekali pada aplikasi kritikal.
2. Melakukan Uji Keamanan pada setiap aplikasi sebelum dilakukan *promote to production*.

# Struktur Pengelola Teknologi Informasi

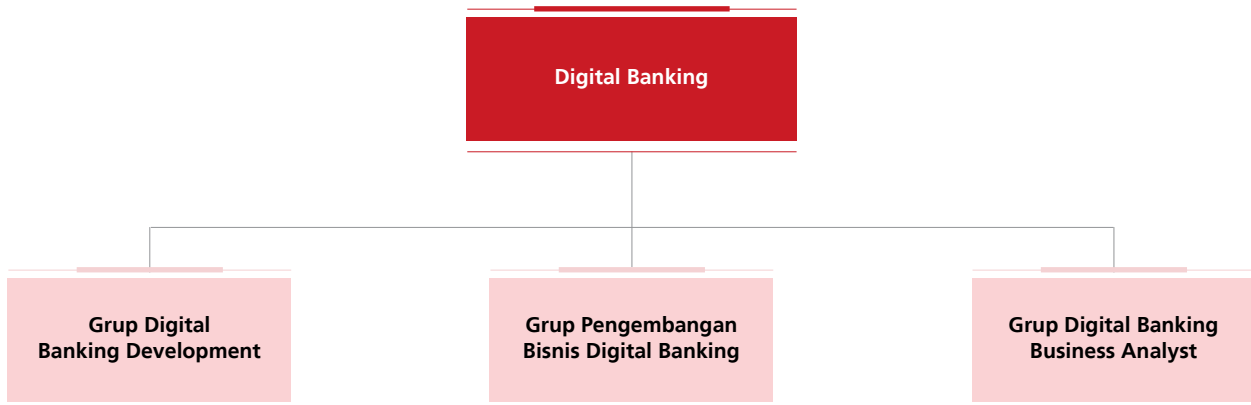
Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) Bank dijalankan oleh Divisi Teknologi Informasi, Unit Security TI, dan Unit Digital Banking yang berada di bawah kewenangan Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (TI), sedangkan Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

(TI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur IT & Digital. Struktur Organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi, mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022), adalah sebagai berikut:

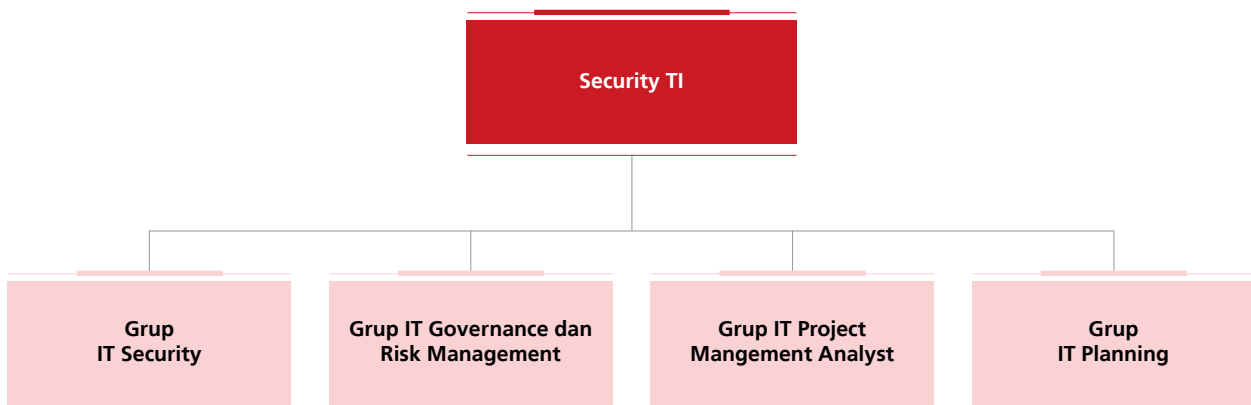
## Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi



### Struktur Organisasi Unit Digital Banking



### Struktur Organisasi Unit Security TI



Adapun ruang lingkup tugas dalam Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Job Description
1.	Pemimpin Divisi TI	Memimpin terselenggaranya perencanaan, pemantauan, pengendalian terhadap strategi, kebijakan, sistem dan kegiatan-kegiatan terkait Teknologi Informasi dan mendukung operasional dan bisnis konvensional maupun syariah di Bank Jatim yang modern, efektif, dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan bisnis.
2.	Pemimpin Unit Security TI	Memantau, <i>monitoring</i> dan menjamin seluruh proses TI patuh dan tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Pemimpin Unit Digital Banking	Mengkoordinasikan dan memastikan penyusunan strategi, <i>blueprint/roadmap</i> dan <i>action plan</i> serta pelaksanaan kajian dan riset terkait pengembangan <i>Digital Banking</i> .
4.	Sub Divisi Pengembangan TI	Memfasilitasi dalam menerjemahkan kebutuhan proses bisnis menjadi solusi teknis berbasis teknologi informasi serta mengusulkan proyek dan inisiatif TI yang sesuai.
5.	Sub Divisi Dukungan dan Operasional TI	Memonitor layanan dan operasional TI yang diterapkan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi yang bebas dari gangguan.

# Rencana Kerja

## Teknologi Informasi 2023



Setelah pada tahun 2022, Bank Jatim memfokuskan pada sisi keamanan penerapan teknologi informasi. Sedangkan pada tahun 2023, Bank Jatim akan berfokus terhadap standar digital dan *extra miles*, meliputi:

1. Standar Digital
  - a. Nyaman  
Aplikasi yang dikembangkan harus dapat digunakan dengan nyaman oleh *user*, sehingga mampu memberikan kesan *user experience* yang baik bagi pengguna aplikasi.
  - b. Dapat digunakan  
Aplikasi yang dikembangkan harus dapat selaras dengan kebutuhan *business requirement* yang diminta, sehingga bermanfaat dan mampu untuk menjadi solusi bagi pengguna aplikasi.
  - c. Dapat diandalkan  
Aplikasi yang dikembangkan harus dapat diandalkan, aplikasi juga mampu untuk digunakan semaksimal mungkin dan tidak mentolerir adanya *down time* (*Zero down time*), sehingga aplikasi tersedia untuk digunakan dan diandalkan kapan saja oleh pengguna aplikasi.
  - d. Fungsionalitas  
Aplikasi yang dikembangkan harus mampu berfungsi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari fitur yang dimiliki mampu untuk digunakan dengan baik.
2. Ekstra Miles:
  - a. Menimbulkan makna  
Diharapkan setelah standar digital dapat terpenuhi, maka pengguna aplikasi akan mendapatkan kesan yang baik dalam pemanfaatan aplikasi, sehingga menimbulkan makna yang baik pada saat menggunakan aplikasi.
  - b. Menimbulkan kesenangan  
Yang terakhir, diharapkan aplikasi yang dikembangkan mampu untuk memberikan kesenangan bagi pengguna aplikasi, sehingga muncul loyalitas dan kesenangan dalam penggunaan aplikasi secara berulang.

Beberapa strategi pengembangan teknologi informasi yang menjadi bagian dari penerapan standar digital dan ekstra miles yang dikembangkan oleh Bank Jatim di antaranya:

  - a. *Integrasi business intelligence tools table*
  - b. *ERP sistem*
  - c. *Banking Custody*
  - d. *Trade Finance*
  - e. *Corporate Loan System*
  - f. *Credit Card*
  - g. *Big data Analytics*



# Tata Kelola Perusahaan







08



09





## Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 05 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. POJK No. 33 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
11. POJK No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
12. POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
13. POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
14. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
15. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
16. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
17. POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
18. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
19. POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
20. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
21. POJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
22. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
23. POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum
24. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
25. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
26. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
27. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. beserta perubahannya.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Perseroan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

# Struktur dan Mekanisme

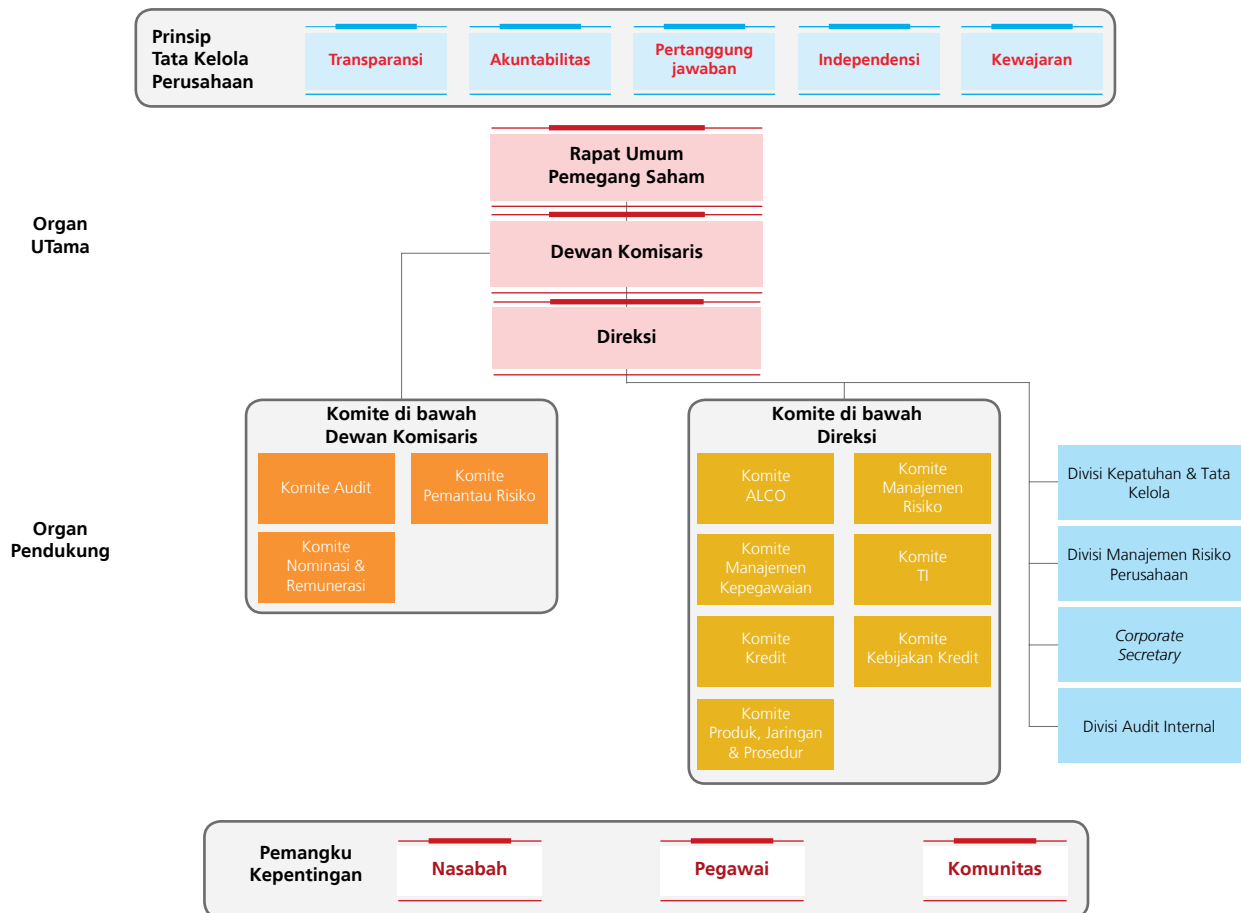
## Tata Kelola Perusahaan

### Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang

jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.



## Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1	Anggaran Dasar	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017	13 Juli 2017
		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018	24 Juli 2018
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 55 Tanggal 22 April 2020 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020	22 April 2020
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto,SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040960.AH.01.02. Tahun 2020 Tanggal 16 Juni 2020	20 Mei 2020
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 95 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0387989 Tanggal 21 Juni 2021.	31 Mei 2021
2	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	059/344/DIR/MJR/KEP	23 Desember 2020
3	Pedoman Kerja Dewan Komisaris	060/01/DK/KEP	15 Januari 2021
4	Pedoman Kerja Direksi	060/044/DIR/CSE/KEP	9 Februari 2021
5	Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris	060/02/DK/KEP	15 Januari 2021
6	Komite Direksi	060/93/DIR/CSE/KEP	16 Maret 2021
7	Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan	059/222/DIR/KPT/KEP	18 Agustus 2020
8	Pedoman Kepatuhan	059/220/DIR/KPT/KEP	14 Agustus 2020
9	Standard Operating Procedure Aktivitas Audit Internal	061/03/60/DIR/AUI/KEP	27 Desember 2022
10	Kebijakan Produk dan Aktivitas Audit Intern	060/02/04/DIR/AUI/KEP	30 November 2021
11	Kebijakan Produk dan Aktivitas Manajemen Risiko	060/02/03/DIR/MJR/KEP	10 September 2021
12	Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (Large Exposures) Kredit Menengah & Korporasi	057/142/DIR/PGP/PMK/KEP	28 Maret 2018
13	Pedoman Rencana Bisnis Bank	059/211/DIR/PRS/KEP	13 Agustus 2020
14	Pedoman Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud	060/22/DIR/AUI/KEP	28 Januari 2021

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
15	Pedoman Pelaksanaan Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis	060/019/DIR/PRS/KEP	26 Januari 2021
16	SOP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	060/03/47/DIR/KPT/KEP	25 November 2021
17	Petunjuk Teknis Pengisian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN)	060/04/54/KPT/SE	15 Desember 2021
18	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank	060/04/56/KPT/SE	20 Desember 2021
19	Pedoman Kode Etik Pasar	057/008/DIR/KEP/TRE	11 Januari 2018
20	Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Pasar Atas Aktivitas Tresuri Syariah	057/316/DIR/BIS/KEP	11 Oktober 2018

## Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

### Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

### Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 95 Tanggal 31 Mei 2021, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut

- Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
  - Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
  - Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
  - Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
  - Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
- Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS.

Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Perseroan juga mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS melalui kegiatan *investor relation*, *one on one meeting* serta *analyst meeting*.

### Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

### Tata Tertib RUPS

- Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- Mata acara RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
  - Kondisi umum Bank secara singkat;
  - Mata acara rapat;
  - Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat melalui metode voting ; dan
  - Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat disampaikan melalui situs web Perseroan.

## Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Form surat kuasa telah tersedia pada situs web Perseroan sejak saat pemanggilan RUPS. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknyanya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik (*poll*). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

## Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: 061/040/DIR/CSE/SRT tanggal 31 Januari 2022	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 08 Februari 2022	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 23 Februari 2022	Dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	Hasil keputusan RUPS menggunakan surat keterangan Notaris disampaikan pada tanggal 17 Maret 2022 pada situs web Perseroan. Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/072/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Maret 2022. Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/083/DIR/CSE/Srt tanggal 05 April 2022

### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

### Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
3.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
4.	Busrul Iman	Direktur Utama, Pgs. Direktur Komersial & Korporasi	Hadir
5.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
6.	Tonny Prasetyo	Direktur TI & Operasi	Hadir
7.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Hadir

## Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

### Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.076.836.318 Saham (99,941%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.142.688.336 Saham Seri B  
 Tidak Setuju : 7.200 saham (0,0000550%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B  
 Abstain : 7.704.976 saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

#### Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan:
  - Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
  - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
  - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material.
- Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

#### Status: Terealisasi

### Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.887.092.412 Saham (98,490%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 952.944.430 Saham Seri B  
 Tidak Setuju : 197.062.282 saham (1,506%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B  
 Abstain : 393.800 saham (0,003%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

#### Keputusan

- Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sebagai berikut:
  - Sebesar Rp782.457.605.053,02 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima puluh tiga koma nol dua sen) atau 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2021 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2021, dengan demikian sejumlah Rp52,11 (lima puluh dua koma sebelas rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2021 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Maret 2022 dan akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2022. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
  - Sebesar Rp740.612.233.364,98 (tujuh ratus empat puluh miliar enam ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) atau 48,63% (empat puluh delapan koma enam puluh tiga persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 dicadangkan sebesar Rp380.767.459.605,00 (tiga ratus delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
  - Bonus pegawai sebesar 85 % (delapan puluh lima persen);
  - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2022 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

#### Status: Terealisasi



### Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.740.945.786 Saham (97,373%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 806.797.804 Saham Seri B  
Tidak Setuju : 343.215.408 saham (2,623%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B  
Abstain : 387.300 saham (0,002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

#### Keputusan

Menyetujui Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

**Status: Terealisasi**

### Mata Acara Rapat Keempat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 orang.

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.610.256.158 Saham (96,375%) terdiri dari 11.893.555.054 Saham Seri A dan 716.701.104 Saham Seri B  
Tidak Setuju : 401.695.608 saham (3,069%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B  
Abstain : 72.596.728 saham (0,554%) terdiri dari 40.592.928 Saham Seri A dan 32.003.800 Saham Seri B

#### Keputusan

- Menyetujui dan mengangkat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, yaitu:  
Komisaris Utama : SUPRAJARTO;  
Komisaris Independen : SUMARYONO;
- Menyetujui dan mengangkat anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, yaitu:  
Direktur Komersial dan Korporasi : EDI MASRIANTO;  
Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah : R. ARIEF WICAKSONO
- Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai direksi, yaitu:  
Direktur Risiko Bisnis : RIZYANA MIRZA ;  
Direktur Keuangan : FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA

Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SUPRAJARTO;  
Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD;  
Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA;  
Komisaris Independen : SUMARYONO;  
Komisaris : HERU TJAHJONO;

#### Direksi

Direktur Utama : BUSRUL IMAN;  
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : ERDIANTO SIGIT CAHYONO;  
Direktur TI dan Operasi : TONNY PRASETYO;  
Direktur Komersial dan Korporasi : EDI MASRIANTO  
Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah : R. ARIEF WICAKSONO;  
Direktur Keuangan : -  
Direktur Risiko Bisnis : -

- Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- Terkait pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas kepada Direktur yang ada.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta Tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Status: Terealisasi**

## Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: 061/315/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Oktober 2022	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 15 November 2022	Dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2022, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/408/DIR/CSE/Srt tanggal 08 Desember 2022 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/432/DIR/CSE/Srt tanggal 27 Desember 2022

### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

### Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Suprajarto	Komisaris Utama	Hadir
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Tonny Prasetyo	Direktur TI & Operasi	Hadir
8.	Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	Hadir
9.	R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	Hadir

### Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Mata Acara Rapat Pertama	
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	
Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 orang.	
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	
Setuju	: 12.197.602.356 Saham (96,21%) terdiri dari 11.651.177.942 Saham Seri A dan 546.424.414 Saham Seri B
Tidak Setuju	: 263.558.908 saham (2,07%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
Abstain	: 215.795.795 saham (1,70%) terdiri dari 215.763.995 Saham Seri A dan 31.800 Saham Seri B



**Keputusan**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Menyetujui dan mengangkat anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya. yaitu:

Direksi:

- Saudara ZULHELFI ABIDIN sebagai Direktur IT dan Digital;
  - Saudara EKO SUSETYONO sebagai Direktur Manajemen Risiko;
2. Memberhentikan dengan hormat Saudara ERDIANTO SIGIT CAHYONO dari jabatannya selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan.

Dengan adanya perubahan di atas, maka susunan Direksi disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Direksi pada Struktur Organisasi Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	: BUSRUL IMAN;
Direktur Mikro, Ritel & Menengah	: R. ARIEF WICAKSONO;
Direktur Kepatuhan	: -
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	: EDI MASRIANTO;
Direktur Operasi	: TONNY PRASETYO;
Direktur IT & Digital	: ZULHELFI ABIDIN;
Direktur Manajemen Risiko	: EKO SUSETYONO.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan, termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Status: Terealisasi**
**Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan Realisasinya**

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: 060/213/DIR/CSE/Srt tanggal 22 Maret 2021 060/252/DIR/CSE/Srt tanggal 9 April 2021	Mengklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Koran Sindo, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Perseroan pada tanggal 27 Maret 2021	Mengklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 11 April 2021	Dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 060/282/DIR CSE/Srt tanggal 5 Mei 2021 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 060/332/DIR CSE/Srt tanggal 7 Juni 2021

**Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

**Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020**

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Akhmad Sukardi	Komisaris Utama	Hadir
2.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
3.	Budi Setiawan	Komisaris	Hadir
4.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
5.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
6.	Rudi Purwono	Komisaris Independen	Hadir
7.	Busrul Iman	Direktur Utama sekaligus merangkap sebagai Pgs. Direktur Komersial & Korporasi	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
8.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Hadir
9.	Tonny Prasetyo	Direktur Ti & Operasi	Hadir
10.	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur Keuangan sekaligus merangkap sebagai Pgs. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	Hadir
11.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Hadir

## Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

### Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama TahunBuku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 13.117.726.384 Saham (99,9447%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham Seri A dan 1.183.578.402 Saham Seri B  
 Tidak Setuju : Nihil  
 Abstain : 7.254.100 saham (0,0552%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

#### Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan:
  - Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2020;
  - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
  - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 9 April 2021, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
- Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

#### Status: Terealisasi

### Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.976.612.714 saham (98,8695%) terdiri dari 11.934.147.982 saham Seri A dan 1.042.464.732 saham Seri B  
 Tidak Setuju : 148.353.070 saham (1,1303%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B  
 Abstain : 14.700 saham (0,0001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

#### Keputusan

- Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut:
  - Sebesar Rp733.507.081.305,70 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh puluh sen) atau 49,26% (empat puluh sembilan koma dua puluh enam persen) dari laba bersih Tahun Buku 2020 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020, dengan demikian sejumlah Rp48,85 (empat puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Mei 2021 dan akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2021. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
  - Sebesar Rp755.454.548.814,30 (tujuh ratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen ) atau 50,74% (lima puluh koma tujuh puluh empat persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 dicadangkan sebesar Rp372.823.445.650,69 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah enam puluh sembilan sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
  - Bonus pegawai sebesar 85 % (delapan puluh lima persen);
  - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term Incentive.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

#### Status: Terealisasi



### Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.758.210.929 saham (97,2055%) terdiri dari 11.934.147.982 Saham seri A dan 824.062.947 Saham seri B  
Tidak Setuju : 366.755.155 saham (2,7943%) yang seluruhnya merupakan Saham seri B  
Abstain : 14.400 saham (0,0001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

#### Keputusan

Menyetujui Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

#### Status: Terealisasi

### Mata Acara Rapat Keempat

Perubahan Anggaran Dasar.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.072.324.556 saham (91,9797%) terdiri dari 11.889.957.156 Saham seri A dan 182.367.400 Saham seri B  
Tidak Setuju : 1.035.243.601 saham (7,8875%) terdiri dari 26.792.899 saham seri A dan 1.008.450.702 saham seri B  
Abstain : 17.412.327 saham (0,1326%) terdiri dari 17.397.927 saham seri A dan 14.400 saham seri B

#### Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
  - Perubahan terkait penyesuaian terhadap:
    - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
    - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.  
Pada:
      - Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham;
      - Pasal 12 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS;
      - Pasal 13 mengenai Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
      - Pasal 14 mengenai Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib RUPS;
  - Perubahan terkait Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Pada:
    - Pasal 15 ayat (4) mengenai Masa Jabatan Direksi;
    - Pasal 18 ayat (6) mengenai Masa Jabatan Dewan Komisaris.
  - Perubahan terkait Persetujuan Struktur Organisasi, Pada Pasal 16 ayat (6) tentang Tugas dan Wewenang Direksi
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan kodifikasi Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada instansi terkait.

#### Status: Terealisasi

### Mata Acara Rapat Kelima

Melakukan Aksi Korporasi Terkait Perusahaan Anak yaitu Pendirian Perusahaan Efek Daerah.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Tidak dilakukan Pemungutan Suara

#### Keputusan

Mata Acara kelima masih memerlukan pendalaman kajian lebih lanjut dan menyesuaikan skala prioritas Perseroan ke depan. Atas hal tersebut belum dapat dibahas serta diputus lebih lanjut pada Rapat tersebut.

#### Status: Terealisasi

### Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.089.721.583 saham (92,1123%) terdiri dari 11.907.355.083 Saham seri A dan 182.366.500 Saham seri B  
Tidak Setuju : 1.008.450.702 saham (7,6834%) yang seluruhnya merupakan Saham seri B  
Abstain : 26.808.199 saham (0,2042%) terdiri dari 26.792.899 saham Seri A dan 15.300 Saham seri B

### Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu:
 

Komisaris Utama	: Akhmad Sukardi
Komisaris	: Budi Setiawan
Komisaris Independen	: Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen	: Rudi Purwono

 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu:
 

Komisaris Independen	: Candra Fajri Ananda
----------------------	-----------------------

 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat). Sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
 

Komisaris Independen	: Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	: Candra Fajri Ananda
Komisaris	: Heru Tjahjono
3. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi Perseroan yang masa jabatannya berakhir serta atas terjadinya kekosongan jabatan.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap pengkinian ketentuan internal Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Status: Terealisasi**

## Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam Buku Pedoman Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.
5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
  - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.

- c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
  - d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
  - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
  9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
  10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

## Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan.

## Persyaratan Direksi

### Struktur dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

### Persyaratan Umum

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Memahami manajemen perusahaan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
6. Berijazah paling rendah Strata I (S-1).
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
12. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Direksi sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Telah memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan yaitu Syarat Formal, Syarat Material, dan Syarat Lain, antara lain:
  - a. Syarat Formal
    - Warga Negara Indonesia yang:
      - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
      - Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
      - Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.
    - Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan yang bersangkutan pernah:
      - Dinyatakan pailit.
      - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  - b. Syarat Material
    - Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
      - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
      - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
      - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.

- Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
  - Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotokopi sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti.
  - Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan yang paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank.
  - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan.
  - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet.
  - Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi calon yang memiliki sertifikat level 4 (empat) dapat mendaftar dan segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan Intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.
- c. Syarat Lain
- Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.
  - Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
14. Calon Direksi dapat berasal dari Internal dan/atau dari eksternal Bank Jatim.
- a. Bagi calon Direksi dari pihak internal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat di bawah Direksi (Pemimpin Divisi setingkat).
  - Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif (Pemimpin Divisi setingkat) yang berbeda.
- b. Bagi calon direksi dari pihak eksternal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki sebagai Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan Bank/Non Bank yang beroperasi secara nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim 5 (lima) tahun terakhir.
  - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

15. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

### Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS;

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
  - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
  - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
  - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Khusus bagi calon Direksi yang diajukan menjadi calon Direktur Utama, merupakan Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur Utama dan masih aktif menjadi Direksi Bank Umum Nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang sampai dengan tahun 2021 diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 09 Februari 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan kepengurusan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.



Isi dari pedoman tata tertib kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

#### Governance Structure

1. Struktur Organisasi Direksi
2. Fungsi Direksi
3. Masa Jabatan Direksi
4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab
5. Independensi dan Kemandirian Direksi

#### Governance Process

1. Etika Jabatan Direksi
2. Deskripsi Tanggung Jawab Direksi
3. Hak Direksi
4. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan Direksi

5. Pendelegasian Wewenang diantara Direktur Perseroan
6. Pembagian Tugas Direksi
7. Prosedur terkait dengan Pembagian Tugas Direksi
8. Rapat Direksi
9. Komite Direksi
10. Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi
11. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas

#### Governance Outcome

1. Laporan
2. Distribusi Dokumen

## Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Periode Menjabat di Tahun 2022	Bidang Tugas
Busrul Iman	Direktur Utama	1 Januari 2022– 14 Juli 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas <i>Corporate Secretary</i> dan Divisi Audit Internal.
		14 Juli 2022 – saat ini	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas <i>Corporate Secretary</i> , Divisi Audit Internal dan Divisi <i>Human Capital</i> .
Rizyana Mirda*	Direktur Risiko Bisnis	1 Januari 2022 – 17 Maret 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Risiko Bisnis serta Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Operasi.
	Direktur Operasi	7 Desember 2022 – 13 Desember 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Umum dan Divisi Operasi.
	Pgs Direktur Kepatuhan	13 Desember 2022 – saat ini	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Hukum dan Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola.
Ferdian Timur Satyagraha**	Direktur Keuangan	1 Januari 2022 – 14 Januari 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas SEVP Perencanaan Strategis dan Pembinaan Cabang, Divisi Pengendalian Keuangan dan Divisi Tresuri.
Erdianto Sigit Cahyono***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Manajemen Risiko Perusahaan, Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola, Divisi Hukum serta Divisi <i>Human Capital</i> .
R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas SEVP Unit Usaha Syariah, Divisi Bisnis Syariah, Divisi Kredit Konsumer dan Divisi Kredit, Mikro, Ritel dan Program.
	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	7 Desember 2022 – saat ini	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Kredit Mikro Ritel dan Menengah, Divisi Kredit Konsumer dan Divisi Bisnis Syariah.
Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi dan Divisi Dana dan Jasa.
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	7 Desember 2022 – saat ini	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi, Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Tresuri, Divisi Dana dan Jasa dan Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja.
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	7 Desember 2022 – saat ini	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Manajemen Risiko, Divisi Risiko Kredit dan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	7 Desember 2022 – saat ini	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Teknologi Informasi.
	Merangkap Pgs. Direktur Operasi	13 Desember 2022 – saat ini	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Divisi Umum dan Divisi Operasi

\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*Mengundurkan diri tanggal 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Desember 2022

## Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sebagai Bank Umum, Bank Jatim juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur diantaranya:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
3. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

**Tabel Rangkap Jabatan Direksi**

Nama	Jabatan	Periode Menjabat di Tahun 2022	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	1 Januari 2022– saat ini	-	-
Rizyana Mirda *	Direktur Risiko Bisnis	1 Januari 2022 – 17 Maret 2022	-	-
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	-	-
	Direktur Operasi	7 Desember 2022 – 13 Desember 2022	-	-
	Pgs Direktur Kepatuhan	13 Desember 2022 – saat ini	-	-
Ferdian Timur Satyagraha**	Direktur Keuangan	1 Januari 2022 – 14 Januari 2022	-	-
Erdianto Sigit Cahyono***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	-	-
R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	-	-
	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	7 Desember 2022 – saat ini	-	-
Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	-	-
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	7 Desember 2022 – saat ini	-	-
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	7 Desember 2022 – saat ini	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	7 Desember 2022 – saat ini	-	-
	Merangkap Pgs. Direktur Operasi	13 Desember 2022 – saat ini	-	-

\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*Mengundurkan diri tanggal 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Desember 2022

## Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengaturan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pengaturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.



Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan. Anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

## Rapat Direksi

### Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 09 Februari 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Rapat Direksi diatur sebagai berikut:

- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu.
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.
- Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan:
  - Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  - Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir.

### Rencana Rapat Direksi

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1	Januari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2	Februari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3	Maret	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4	April	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5	Mei	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6	Juni	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7	Juli	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8	Agustus	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9	September	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10	Oktober	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11	November	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12	Desember	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

### Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

**Tabel Rapat Direksi**

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
1	10 Januari 2022	1. Progress Temuan Audit. 2. Kinerja Keuangan. 3. Perubahan Struktur Organisasi. 4. Pemenuhan Pejabat Eselon 1 & 2.	Busrul Iman Rizyana Mirda Tonny Prasetyo Ferdian Timur Satyagraha Erdianto Sigit Cahyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
2	21 Januari 2022	1. Prosedur Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite Direksi. 2. Tindak Lanjut Evaluasi Rapat Direksi 22 Desember 2021.	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Tidak Hadir	Menghadiri Pra Exit Meeting KAP Tahun 2021
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Tidak Hadir	Mengundurkan diri
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
3	21 Februari 2022	1. Tindak Lanjut Evaluasi Rapat Direksi 21 Januari 2022 (Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite Direksi Tahun 2021) 2. Tindak Lanjut Evaluasi Rapat Direksi Tanggal 10 & 21 Januari 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Tidak Hadir	Mengundurkan diri
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
4	8 Maret 2022	Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021	Busrul Iman	Hadir	
			Rizyana Mirda	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Ferdian Timur Satyagraha	Tidak Hadir	Mengundurkan diri
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
5	12 April 2022	1. Tindak Lanjut Rapat Direksi Tanggal 21 Februari 2022 dan 8 Maret 2022 2. Kinerja Keuangan 3. Pembagian Kantor Cabang Binaan 4. Rencana Penyertaan Modal 5. Penyempurnaan Struktur Organisasi	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
6	19 Mei 2022	Evaluasi Kinerja Bank Jawa Timur	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
7	20 Juni 2022	1. Tindak Lanjut Rapat Direksi Tanggal 12 April 2022 dan 19 Mei 2022 2. Evaluasi Kinerja PT Bank Jawa Timur	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Melaksanakan Ibadah Haji
8	8 Juli 2022	1. Evaluasi Kinerja PT Bank Jawa Timur 2. Perubahan Struktur Organisasi 3. Informasi Program Kerja Direksi 4. Persiapan HUT RI & Bank Jatim Tahun 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Melaksanakan Ibadah Haji
9	15 Agustus 2022	1. Rencana Aksi Korporasi Penyertaan Modal 2. Rencana Aksi Korporasi Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Wilayah Indonesia Timur	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
10	22 Agustus 2022	Pemetaan Jaringan Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim di Surabaya	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Tidak Hadir	Sakit
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
11	5 September 2022	Tindak Lanjut Evaluasi Rapat Direksi Tanggal 20 Juni dan 8 Juli 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Tidak Hadir	Tugas Perjalanan Dinas
			Erdianto Sigit Cahyono	Tidak Hadir	Melaksanakan Ibadah Umroh
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
12	15 September 2022	Tindak Lanjut Evaluasi Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Tanggal 7 September 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Tidak Hadir	Melaksanakan Ibadah Umroh
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
13	22 September 2022	Persiapan RUPSLB	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Izin
14	4 Oktober 2022	Kinerja Keuangan PT Bank Jatim	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
15	7 November 2022	Persiapan RUPSLB Bank Jatim Tahun 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
16	22 November 2022	Tindak Lanjut Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2022 & 17 November 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
17	28 November 2022	1. Tindak Lanjut Rapat Direksi Tanggal 22 November 2022 2. Skenario RUPS LB Bank Jatim Tahun 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Erdianto Sigit Cahyono	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
18	12 Desember 2022	Tindak Lanjut Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Tanggal 29 November 2022	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Tidak Hadir	Izin
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Izin
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
Eko Susetyono	Hadir				

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Periode Menjabat di Tahun 2022	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direktur Bidang			RUPS		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman	Direktur Utama	1 Januari 2022 – saat ini	18	18	100%	15	15	100%	2	2	100%
Rizyana Mirda *	Direktur Risiko Bisnis	1 Januari 2022 – 17 Maret 2022	4	3	75%	3	3	100%	1	1	100%

Nama	Jabatan	Periode Menjabat di Tahun 2022	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direktur Bidang			RUPS		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	18	16	89%	16	16	100%	2	2	100%
	Direktur Operasi	7 Desember 2022 – 13 Desember 2022									
	Pgs Direktur Kepatuhan	13 Desember 2022 – saat ini									
Ferdian Timur Satyagraha**	Direktur Keuangan	1 Januari 2022 – 14 Januari 2022	4	1	25%	-	-	-	-	-	-
Erdianto Sigit Cahyono***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	18	17	94%	16	16	100%	1	1	100%
R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	14	10	71%	13	11	85%	1	1	100%
	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	7 Desember 2022 – saat ini									
Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	14	12	86%	12	12	100%	1	1	100%
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	7 Desember 2022 – saat ini									
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	7 Desember 2022 – saat ini	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	7 Desember 2022 – saat ini	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
	Merangkap Pgs. Direktur Operasi	13 Desember 2022 – saat ini									

\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*Mengundurkan diri tanggal 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Desember 2022

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.



Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Periode Menjabat di Tahun 2022	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Busrul Iman	Direktur Utama	1 Januari 2022 – saat ini	Forum Komunikasi <i>Top Leader</i> dengan Tema <i>Agile - Resilience Motivation and Team Building Program</i>	Probolinggo, 18 Maret 2022	Go Orbit
			Program <i>Refreshment/</i> Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
Rizyana Mirda*	Direktur Risiko Bisnis	1 Januari 2022 – 17 Maret 2022	-	-	-
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	Forum Komunikasi <i>Top Leader</i> dengan Tema <i>Agile - Resilience Motivation and Team Building Program</i>	Probolinggo, 18 Maret 2022	Go Orbit
	Direktur Operasi	7 Desember 2022 – saat ini	Program <i>Refreshment/</i> Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
	Pgs Direktur Kepatuhan	13 Desember 2022 – saat ini	Program <i>Refreshment/</i> Penyegaran Sertifikasi <i>General Banking</i>	Online, 22 April 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Ferdian Timur Satyagraha**	Direktur Keuangan	1 Januari 2022 – 14 Januari 2022	-	-	-
Erdianto Sigit Cahyono***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	Forum Komunikasi <i>Top Leader</i> dengan Tema <i>Agile - Resilience Motivation and Team Building Program</i>	Probolinggo, 13 Januari 2022	Go Orbit
			<i>Becoming Extraordinary Leader</i>	Surabaya, 14 Februari 2022	Remaja Tampubolon
			Program <i>Refreshment/</i> Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 15 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
			Metaverse, <i>Cryptocurrency</i> - Peluang dan Tantangan di Masa Depan	Surabaya, 16 April 2022	Bapak Ery Punta Hendraswara - SEVP PT Telkom
			Workshop Sertifikasi Kepatuhan Level 3 (Eksekutif)	Jakarta, 17 Mei 2022	FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan)
R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	Online <i>Workshop Training Corporate Culture</i> untuk <i>Change Leader</i>	Online, 15 Februari 2022	IBI (Ikatan Bankir Indonesia)
	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	7 Desember 2022 – saat ini	Forum Komunikasi <i>Top Leader</i> dengan Tema <i>Agile - Resilience Motivation and Team Building Program</i>	Probolinggo, 18 Maret 2022	Go Orbit
			<i>Becoming Extraordinary Leader</i>	Surabaya, 21 Maret 2022	Remaja Tampubolon
			Program <i>Refreshment/</i> Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	Forum Komunikasi <i>Top Leader</i> dengan Tema <i>Agile - Resilience Motivation and Team Building Program</i>	Probolinggo, 18 Maret 2022	Go Orbit
	Direktur Keuangan, <i>Treasury &amp; Global Services</i>	7 Desember 2022 – saat ini	<i>Becoming Extraordinary Leader</i>	Surabaya, 21 Maret 2022	Remaja Tampubolon
			Program <i>Refreshment/</i> Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	7 Desember 2022 – saat ini	-	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	7 Desember 2022 – saat ini	-	-	-
	Merangkap Pgs. Direktur Operasi	13 Desember 2022 – saat ini	-	-	-

\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*Mengundurkan diri tanggal 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Desember 2022

## Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2022, terdapat Pengangkatan Direksi baru sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022 mengangkat Direksi baru yaitu:
  - a. R. Arief Wicaksono selaku Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah (terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur Mikro, Ritel dan Menengah pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022)
  - b. Edi Masrianto selaku Direktur Komersial dan Korporasi (menjadi Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services*)

Dilaksanakan program orientasi Direksi baru sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 25 Maret 2022: *Executive Summit* Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan mengusung tema *Good Corporate Governance as the key to healthy and succesfull company* dengan lingkup pembahasan mengenai kiat-kiat agar Bank Jatim dapat memperoleh nilai GCG dengan predikat komposit 2 "baik" atau bahkan memperoleh predikat komposit 1 "sangat baik".
  - 2) Pada tanggal 18-19 Maret 2022: Program Jatim *Improvement Meeting* yang diselenggarakan dalam bentuk Forum Komunikasi *Top Leader* Bank Jatim Tahun 2022 dengan lingkup mencakup kegiatan untuk mencapai visi, misi Bank Jatim dan mempertahankan budaya perusahaan yang ada di Bank Jatim sekaligus penandatanganan komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Divisi.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2022 Tanggal 7 Desember 2022 mengangkat Direksi baru yaitu:
    - a. Eko Susetyono selaku Direktur Manajemen Risiko
    - b. Zuhelfi Abidin selaku Direktur Teknologi Informasi

Dilaksanakan program orientasi Direksi baru pada tanggal 12 Desember 2022 dengan ruang lingkup adanya pemaparan dari *Corporate Secretary*, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja. Pemaparan tersebut diantaranya meliputi pengenalan tentang *company profile*, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Kerja serta Strategi Bisnis 2023.

## Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2022 Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta rencana kerja pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana bisnis bank Perseroan
2. Pelaksanaan proyek penguatan IT dan pengembangan *digital banking*
3. Pengelolaan aset dan keuangan
4. Penyelenggaraan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal
8. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha
9. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* Perseroan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim peduli
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2022, diantaranya yaitu:

1. Asset Liabilities Committee (ALCO)
2. PIC user ID Aplikasi Taspen One Hour Online Service (TOOS)
3. Penyelesaian Rekonstruksi Program Siklus Bunga Plus
4. Limit Kewenangan Pelepasan Aset
5. Penghapusan bukuan kredit macet
6. Kepengurusan Cabang Kegiatan Bank Jatim Club
7. Tim Pengadaan Tanah dan Gedung dari Lingkungan PT Bank Jatim untuk Tahun Anggaran 2022
8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
9. Pedoman portofolio Kredit/Pembiayaan
10. Remunerasi Anggota Komite Dewan Komisaris
11. Limit kewenangan pemutus kredit LSM/Fasilitas
12. Limit Kewenangan Settlement terhadap transaksi melalui ESTIM
13. Penunjukan dan pengangkatan Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa
14. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
15. Penunjukan dan pengangkatan pemimpin proyek dan tim pendukung proyek
16. Stimulus pelunasan terhadap kredit/pembayaran bermasalah ekstrasikomtable
17. Perubahan pedoman pelaksanaan Kredit Ritel
18. Perubahan pedoman pelaksanaan kredit Produktif Mikro dan Kecil
19. SOP Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan
20. SOP *Punishment* Pegawai
21. SOP Rekrutmen dan Seleksi
22. Perubahan SOP Stimulus terhadap Debitur Terdampak Covid-19
23. SOP Program Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana bagi Pegawai
24. SOP Antivirus, *Bandwidth* Jaringan Server
25. Perubahan SOP Kredit Linkage



26. SOP KKPA
27. SOP Kredit *Linkage* BPR
28. SOP Kredit Jatim Mikro
29. SOP Kredit RC BPR
30. SOP Kredit Jatim Ritel
31. SOP Kantor Layanan Syariah *Office Channeling*
32. SOP Produk Investasi nasabah
33. SOP Fasilitas Transaksi Korporasi
34. SOP Pengendalian Internet, Intranet Wireles, Remot Akses, *Patch Management* dan Penggunaan *Power User*
35. SOP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bank Indonesia
36. SOP Perantara Perdagangan efek untuk efek bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)
37. SOP Standar Layanan
38. SOP Laku Pandai
39. SOP Kredit Pemerintah Daerah
40. SOP Kredit Usaha Rakyat
41. SOP Penyedia Jasa Perkreditan atau pembiayaan
42. SOP Operasional Kredit atau Pembiayaan
43. SOP Jaminan Kredit atau Pembiayaan
44. SOP Layanan *Call Center*
45. SOP Total *Reward*
46. SOP Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
47. SOP Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
48. SOP Pelaporan Valas Divisi Operasi
49. SOP Mutasi Pekerjaan
50. SOP Program Pengembangan Karir
51. SOP Tabungan Santri
52. SOP Asset Liabilities Management (ALMA)
53. SOP Kredit BLUD
54. SOP Klasifikasi Pemisahan dan Pembatasan Lingkungan Pengembangan, Uji Coba dan Produksi
55. SOP Ketahanan dan Keamanan Siber
56. SOP Uji Keamanan Aplikasi Sistem dan Jaringan Bank
57. SOP *Open Online Account*
58. SOP Stimulus Terhadap Debitur terdampak Covid-19
59. SOP Pembiayaan Pemilihan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Dana FLPP dan SBUM
60. SOP Komite Manajemen Kepegawaian
61. SOP Standarisasi Kendaraan
62. SOP Kredit Piutang
63. SOP Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas IB Barokah
64. SOP Sistem *Grading* dan Remunerasi
65. SOP Tabungan Rencana IB Barokah
66. SOP Perjalanan Dinas
67. SOP Kredit Mikro Ritel Program
68. SOP Kredit Resi Gudang
69. SOP SNAP
70. Perubahan SOP Kredit Jatim Mikro
71. SOP Kredit Kontraktor
72. SOP Proses Kredit Komersial & Korporasi
73. SOP Laku Pandai Syariah
74. SOP Pembiayaan Emas IB Barokah
75. SOP Rekrutmen & Seleksi
76. SOP Pembiayaan Multiguna IB Barokah
77. SOP Administrasi Penugasan Pejabat Pengganti

78. SOP Aktivitas Audit Internal
79. KPA Tresuri
80. KPA Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
81. KPA Umum, Aktiva & Pengadaan
82. KPA Human Capital

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/93/DIR/CSE/KEP tanggal 16 Maret 2021 tentang Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka Komite Direksi Bank Jatim tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Asset Liability Committee (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Kepegawaian
4. Komite Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee/ITSC)
5. Komite Kredit
  - a. Komite Implementasi Kredit
  - b. Komite Penyelamatan Kredit
  - c. Komite Penyelesaian Kredit
  - d. Komite Hapus Buku Kredit
  - e. Komite *Credit Line*
  - f. Komite *Term Loan Facility*
  - g. Komite Implementasi Pembiayaan
  - h. Komite Penyelamatan Pembiayaan
  - i. Komite Penyelesaian Pembiayaan
  - j. Komite Hapus Buku Pembiayaan
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Produk, Jaringan dan Prosedur:
  - a. Komite PJP Bidang Produk
  - b. Komite PJP Bidang Jaringan
  - c. Komite PJP Bidang Prosedur

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah mencabut Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Terdapat pengaturan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 diantaranya bahwa hal-hal yang dilakukan selama masa transisi diantaranya mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia termasuk *transfer of knowledge* dan pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Pemenuhan dan pengkinian ketentuan internal (KPA, SOP, Juknis, Uraian Jabatan dan ketentuan lainnya yang terkait);

3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (termasuk sistem informasi dan teknologi).

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Direksi Nomor 061/014/DIR/PRS/SE tanggal 7 Desember 2022 perihal Tahap Pra-Transisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Jatim, yang mengatur diantaranya:

1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Divisi pada ketentuan internal (KPA/SOP/Juknis) yang ada dinyatakan tetap berlaku. Apabila terdapat perubahan/ perpindahan nomenklatur divisi untuk disesuaikan dengan Direktur bidang yang membidangi.
2. Atas implementasi struktur organisasi tahap pra transisi yang berdampak pada ketentuan internal, untuk dilakukan pengkinian dengan jangka waktu 2 bulan terhitung sejak Surat Edaran Direksi tentang Struktur Organisasi Tahap Pra Transisi ditetapkan.

Prosedur Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Masing-masing Sekretaris Komite Direksi melakukan penyusunan materi implementasi dan teknis penerapan masing-masing Komite Direksi selama tahun buku 2022.
2. Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilaksanakan melalui Rapat Direksi.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi antara lain:

1. Dasar Pembentukan Komite
2. Struktur dan Keanggotaan Komite
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Pencapaian Pelaksanaan Komite
5. Kesimpulan

Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

#### **Asset Liability Committee (ALCO)**

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2022 berjalan ALCO telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat.

#### **Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2022 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat.

#### **Komite Manajemen Kepegawaian**

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritical di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2022 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat.

#### **Komite Teknologi Informasi**

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2022 berjalan Komite TI telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

#### **Komite Kredit**

Komite Kredit Konvensional

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

#### **Komite Pembiayaan**

Komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

- Komite Implementasi Kredit  
Selama tahun 2022 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kali rapat.
- Komite Penyelamatan Kredit  
Selama tahun 2022 berjalan komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat.
- Komite Penyelesaian Kredit  
Selama tahun 2022 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.
- Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan  
Selama tahun 2022 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat.
- Komite Implementasi Pembiayaan  
Selama tahun 2022 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat.



### Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2022 berjalan komite Kebijakan Perkreditan Konvensional dan Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

### Komite Produk, Jaringan dan Prosedur

Komite PJP Bidang Produk

Komite Bidang Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk melakukan langkah-langkah pengembangan produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam bersaing dan berkembang pada dunia perbankan. Selama tahun 2022 berjalan komite PJP Bidang Produk telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat

### Komite PJP Bidang Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2022 berjalan komite PJP Bidang Jaringan telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.

### Komite PJP Bidang Prosedur

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau update Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan. Selama tahun 2022 berjalan komite PJP Bidang Prosedur telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing unit. Pada tahun 2022, pencapaian KPI Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko mendapatkan predikat *Meet Expectation* atau Baik.

## Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib kerja antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS antara lain:
  - a. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - b. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
  - c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

- d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
  - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
  - g. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
  5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
  6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG.
  7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
    - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
    - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
    - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
    - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
    - e. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepaillitan.
  8. Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  9. Dewan Komisaris berhak Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
  10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
  13. Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance process* tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
  - a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris.
  - b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti.
  - c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif.
  - d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
  - e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

## Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
8. Menunjuk dan mengangkat seorang atau tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban perusahaan.
9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Menyelenggarakan rapat bersama Direksi untuk mengevaluasi kinerja Direksi.
11. Menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
13. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
14. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
15. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
16. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
17. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama.
18. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.
19. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

## Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) bagian Mekanisme Kerja Antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Perubahan Struktur Organisasi.
3. Rencana Bisnis dan Rencana Korporat Bank.
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan Pihak Terkait.
5. *Internal Audit Charter* dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala SKAI terkait penerapan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).
6. Laporan Kepada Bank Indonesia terkait dengan Kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Laporan Semester SKAI.
8. Persetujuan Buku Pedoman Pelaksanaan yang harus disahkan Dewan Komisaris antara lain pedoman untuk transaksi *large exposure* seperti Pedoman Pelepasan Aset, Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih dan lain-lain.
9. Lain-lain sesuai ketentuan.

## Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

## Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Buku Pedoman Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
  - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
  - d. Sehat jasmani dan rohani.
  - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
  - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
8. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

### Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris No. 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

**Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Suprajarto*	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko
Sumaryono*	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Heru Tjahjono	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

\*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022.

Dasar penyusunan Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui 15 Januari 2021. Adapun isi dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

#### A. `Governance Structure

1. Komposisi Dewan Komisaris
2. Kriteria Dewan Komisaris
3. Masa Jabatan
4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab, Larangan
5. Organisasi

#### B. `Governance Process

1. Pembagian Kerja
2. Waktu Kerja
3. Etika Kerja
4. Mekanisme Pengawasan
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Alur dan Mekanisme Kerja

#### C. `Governance Outcome

1. Laporan
2. Sarana Korespondensi
3. Distribusi Surat

### Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

## Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.

**Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Suprajarto*	Komisaris Utama	-	-
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Staf Khusus	Kementerian Keuangan
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Sumaryono*	Komisaris Independen	-	-
Heru Tjahjono	Komisaris	-	-

\*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022.

## Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk tidak boleh terlibat dalam Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading* atau *self-dealing*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
6. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
7. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga Keuangan atau perusahaan Keuangan, baik Bank maupun bukan Bank.

- b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan Keuangan atau perusahaan bukan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2022, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

## Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Dengan kata lain komposisi Komisaris Independen Bank Jatim lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

### Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen		
	Candra Fajri Ananda	Muhammad Mas'ud	Sumaryono
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.





### Pernyataan Komisaris Independen

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Cartha Fajri Ananda**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Langgung, 09 Desember 1980**  
 No. KTP/Paspor : **3170010000000000000**  
 Alamat : **Jl. Diponegoro 0104-0104-0104**  
 Jabatan : **Guru Besar UIB**

Berdasarkan seluruh calon anggota Komisaris Independen Bank Jatim, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

- berkomitmen untuk menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak pernah diadukan karena melakukan tindak pidana berupa:
  - Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijatuhkan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diadukan;
  - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang termasuk dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), demikian yang seperti KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijatuhkan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diadukan; dan/atau
  - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika, pemalsuan, penyelundupan, kecurangan, sengketa, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, di bidang ketertidaksi, di bidang lingkungan hidup, di bidang kesehatan, dan kejahatan, yang pidananya telah selesai dijatuhkan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diadukan;
- tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal.

- tidak menanggung jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain manapun yang dipunarkan dalam ketentuan yang berlaku;
- tidak sedang memiliki hubungan keuangan dengan pihak mana pun termasuk badan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- berkomitmen mengantisipasi operasional Bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak akan melakukan tindakan mengganggu perbuatan pendapat tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang diadukan untuk menjadi Pihak Utama;
- saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penyelesaian kemampuan dan kapasitas, demikian tidak sedang menjalani proses penarikan kembali karena melanggar Etika Perbankan Syariah dan/atau kebijakan / peraturan keuangan pada suatu LJK;
- selainnya menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas dari suatu badan melakukan fungsi atau jabatan tidak pernah melakukan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas yang ditetapkan oleh OJK dan/atau lembaga lain;
- menyatakan tidak pernah terlibat pembi/ bank atau PJP;
- tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan lainnya dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi untuk bertindak independen.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar ketentuan tersebut di atas maka saya bersedia sebagai hukuman OJK dan/atau Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Buatnya,  
  
 (Cartha Fajri Ananda)

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Nur ul**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Langgung, 09 Desember 1980**  
 No. KTP/Paspor : **3170010000000000000**  
 Alamat : **Jl. Diponegoro 0104-0104-0104**

Berdasarkan seluruh calon anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- saya tidak sedang menanggung jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain manapun yang dipunarkan dalam ketentuan yang berlaku;
- tidak sedang memiliki hubungan keuangan dengan pihak mana pun termasuk badan dengan sesama anggota Dewan Komisaris;
- berkomitmen mengantisipasi operasional Bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak akan melakukan tindakan mengganggu perbuatan pendapat tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang diadukan untuk menjadi Pihak Utama;
- saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penyelesaian kemampuan dan kapasitas, demikian tidak sedang menjalani proses penarikan kembali karena melanggar Etika Perbankan Syariah dan/atau kebijakan / peraturan keuangan pada suatu LJK;
- selainnya menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas dari suatu badan melakukan fungsi atau jabatan tidak pernah melakukan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas yang ditetapkan oleh OJK dan/atau lembaga lain;
- menyatakan tidak pernah terlibat pembi/ bank atau PJP;
- tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan lainnya dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi untuk bertindak independen.

- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;

- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;

Buatnya,  
  
 (Muhammad Nur ul)

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Burhanudin**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Blitar, 02 Oktober 1960**  
 No. KTP/Paspor : **3170010000000000000**  
 Alamat : **Jl. Diponegoro 0104-0104-0104**

Berdasarkan seluruh calon anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- Saya tidak sedang menanggung jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain manapun yang dipunarkan dalam ketentuan yang berlaku;
- tidak sedang memiliki hubungan keuangan dengan pihak mana pun termasuk badan dengan sesama anggota Dewan Komisaris;
- berkomitmen mengantisipasi operasional Bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak akan melakukan tindakan mengganggu perbuatan pendapat tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang diadukan untuk menjadi Pihak Utama;
- saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penyelesaian kemampuan dan kapasitas, demikian tidak sedang menjalani proses penarikan kembali karena melanggar Etika Perbankan Syariah dan/atau kebijakan / peraturan keuangan pada suatu LJK;
- selainnya menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas dari suatu badan melakukan fungsi atau jabatan tidak pernah melakukan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas yang ditetapkan oleh OJK dan/atau lembaga lain;
- menyatakan tidak pernah terlibat pembi/ bank atau PJP;
- tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan lainnya dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi untuk bertindak independen.

- Saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- Saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- Saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- Saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- Saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- Saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- Saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- Saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- Saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;
- Saya tidak sedang diadukan untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Pihak Utama;
- Saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah berdasarkan suatu pernyataan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- tidak merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan massal;
- Saya tidak memiliki kredit di/atau pembiayaan massal;

Buatnya, 10 September 2021.  
  
 (Burhanudin)

## Rapat Dewan Komisaris

### Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara berkala, dan menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Rapat internal Dewan Komisaris.
  - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat bersifat tematik sesuai dengan permasalahan yang ada dalam satu kondisi tertentu;
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

## Rapat Internal Dewan Komisaris

### RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyusun rencana penyelenggaraan rapat pada tahun 2022 dalam program kerja Dewan Komisaris. Rencana Rapat Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite maupun rapat bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

#### Triwulan I

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2022 Audited.
- *Review* Triwulanan terhadap Kinerja Bank untuk Tahun 2022.
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
- *Review* program serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite.
- *Review* terhadap kondisi terkini terkait Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis lainnya

#### Triwulan II

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* terhadap kondisi terkini terkait Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya .
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Pembahasan Proses Nominasi calon Pengurus Bank.
- *Review* Kebijakan/peraturan internal Bank (BPP/SOP).

#### Triwulan III

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank
- *Review* terhadap kondisi terkini terkait Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022.
- Pembahasan Proses Nominasi Calon Pengurus Bank.
- Pembahasan proses Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.

#### Triwulan IV

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* terhadap kondisi terkini terkait Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2023, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Pembahasan tindak lanjut hasil Nominasi Calon Pengurus Bank.
- Pembahasan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2023.



**REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS**

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

**Tabel Rapat Dewan Komisaris**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	4 Januari 2022	Pembahasan meliputi: 1. <i>Self Assessment</i> Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021. 2. Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022. 3. Simulasi RUPS Tahunan Buku 2021. 4. Lain-lain.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
2.	21 Februari 2022	Pembahasan meliputi: 1. Penunjukkan Pemimpin RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2021. 2. Tindaklanjut terkait Jabatan Direksi (Direktur Keuangan dan Direktur Risiko Bisnis). 3. Tindaklanjut terkait masa jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris. 4. Lain-lain.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
3.	23 Maret 2022	Pembahasan meliputi: 1. Pembagian Tugas Direksi Pasca Kekosongan Jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Risiko Bisnis. 2. Persiapan Proses Seleksi Calon Direktur Keuangan dan Direktur Risiko Bisnis. 3. Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris.	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
4.	31 Maret 2022 – 01 April 2022	Pembahasan meliputi: Rapat Koordinasi <i>Overview</i> Pendalaman Kondisi terkini Divisi-Divisi (Divisi Human Capital, Konsumer, Ritel Mikro dan Program, Divisi IT dan Corporate Secretary).	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
5.	06 April 2022	Pembahasan meliputi: Rapat Koordinasi <i>Overview</i> Pendalaman Kondisi Terkini Divisi-Divisi (Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja, Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi, Dana & Jasa dan Operasi).	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
6.	07 April 2022	Pembahasan meliputi: 1. Persiapan Pengisian Kekosongan Jabatan Komite Dewan Komisaris. 2. Persiapan Pelaksanaan Proses Seleksi Calon Direksi Bank Jatim oleh Panitia Seleksi. 3. Lain-lain.	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Izin
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
7.	22 April 2022	Pembahasan meliputi: Rapat Koordinasi <i>Overview</i> Pendalaman Kondisi Terkini Divisi-Divisi (Divisi Umum, Unit Syariah).	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
8.	13 Mei 2022	Pembahasan meliputi: Rapat Koordinasi persiapan proses Seleksi Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2022.	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
9.	27 Juni 2022	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi 2. Terkait dengan panitia seleksi 3. Terkait BPP Remunerasi Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) 4. Terkait BPP Perjalanan Dinas Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) 5. Pembahasan Terkait Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dilingkup Dewan Komisaris 6. BPP Dewan Komisaris 7. BPP Mekanisme Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 8. Pembahasan Terkait Kebijakan APU/PPT	Suprajarto	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
10.	18 Agustus 2022	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan terkait Rekomendasi Komite Remunerasi tentang Kebijakan Remunerasi Pengurus. 2. Pembahasan terkait Rekomendasi Komite Remunerasi tentang Kebijakan Perjalanan Dinas Pengurus.	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
11.	06 September 2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi usulan Direksi tentang Struktur Organisasi Bank Jatim. 2. Evaluasi hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Kantor Cabang. 3. <i>Update</i> terkait Proses Seleksi Calon Anggota Direksi Bank Jatim.	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
12.	22 September 2022	Pembahasan meliputi: Pembahasan Terkait Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen).	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Izin
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
13.	25 November 2022	Pembahasan meliputi: Penunjukan Pemimpin RUPSLB	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
14.	07 Desember 2022	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Kekosongan Jabatan Direktur Kepatuhan. 2. Pembagian Tugas Direksi. 3. Lain-lain.	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
15.	23 Desember 2022	Pembahasan meliputi: 1. <i>Review</i> Pelaksanaan Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris Dewan Komisaris 2. Lain-lain	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
16.	30 Desember 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Review</i> Kebijakan Remunerasi Pengurus. 2. Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023. 3. Lain-lain.	Suprajarto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin



## Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Bidang.

### RENCANA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI TAHUN 2023

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1	Januari	Minggu ke-3	Diskusi evaluasi kinerja Bank Jatim
2	Maret	Minggu ke-3	Diskusi evaluasi kinerja Bank Jatim
3	Mei	Minggu ke-3	Diskusi evaluasi kinerja Bank Jatim
4	Juli	Minggu ke-3	Diskusi evaluasi kinerja Bank Jatim
5	September	Minggu ke-3	Diskusi evaluasi kinerja Bank Jatim
6	November	Minggu ke-3	Diskusi evaluasi kinerja Bank Jatim

### REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	27/01/2022	Pembahasan meliputi: <i>Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2021 <i>Audited</i> KAP	Muhammad Mas'ud,	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit	Hadir	
2	27/01/2022	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Pemberitaan Media terkait Proses Seleksi 2. Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021	Muhammad Mas'ud,	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit	Hadir	
3	2/03/2022	Pembahasan meliputi: 1. Persiapan RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2021 2. Usulan Penurunan Suku Bunga Kredit Multiguna Pihak Terkait 3. Persetujuan Bantuan Kepentingan atas Rencana Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Rizyana Mirda	Hadir	
						Tonny Prasetyo	Hadir	
4	18/04/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim 2. Pembahasan Struktur Organisasi Bank Jatim	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit C	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
5	20/05/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim 2. Pembahasan Tindak Lanjut Struktur Organisasi Bank Jatim	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Erdianto Sigit C	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
6	28/06/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Mei 2022 2. Pembahasan terkait Perubahan RBB Bank Jatim Tahun 2022	Suprajarto	Tidak Hadir	Ijin	Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Erdianto Sigit C	Tidak Hadir	Ijin
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin	Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Ijin
7	21/07/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Juni 2022 2. Lain-lain	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Erdianto Sigit C	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Ijin
8	19/08/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Juli 2022, 2. Lain-lain	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit C	Hadir	
9	7/09/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Agustus 2022 2. Pembahasan Usulan Struktur Organisasi 3. Evaluasi Hasil Kunjungan Cabang 4. Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Produk Baru	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin	Erdianto Sigit	Tidak Hadir	Ijin
10	18/10/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi September 2022 2. Pembahasan terkait Rencana Aksi Korporasi 3. Pembahasan terkait persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit	Hadir	
11	10/11/2022	Pembahasan meliputi: Persiapan RUPSLB	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin	Erdianto Sigit	Hadir	



No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
12	17/11/2022	Pembahasan meliputi: Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Oktober 2022	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit	Hadir	
13	29/11/2022	Pembahasan meliputi: Evaluasi dan Tindaklanjut Rapat Dewan Komisaris & Direksi tanggal 18 Oktober dan 17 November 2022	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Ijin	Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Erdianto Sigit	Hadir	
14	2/12/2023	Pembahasan meliputi: Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Ijin	Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Ijin	Erdianto Sigit	Hadir	
15	23/12/2022	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Kinerja dan Prognosa Akhir Desember 2022; 2. Pemaparan oleh Direktur IT & Digital, Direktur Manajemen Risiko, dan Pgs Direktur Kepatuhan tentang Kondisi di Direktorat masing-masing dan rencana akselerasi dalam mendukung kinerja Bank; 3. Lain-lain.	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Zulhelfi Abidin	Hadir	
				Tidak Hadir	Ijin	Eko Susetyono	Hadir	

## RAPAT DEWAN KOMISARIS MENDANGUNG DIREKTUR BIDANG

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Keterangan
1	02/06/2022	Rapat koordinasi dengan Direktur Bidang Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2. Evaluasi Kinerja Direktorat IT dan Operasi	Suprajarto	Hadir		Erdianto Sigit C	Hadir	Rapat khusus Direktur Bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bidang IT & Operasi. Direktur yang lain tidak ikut serta dalam rapat
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir				
			Sumaryono	Hadir				
			Heru Tjahjono	Hadir				
2	3/06/2022	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Direktorat Konsumer Ritel & Usaha Syariah 2. Evaluasi Kinerja Direktorat Komersial, Korporasi dan Keuangan	Suprajarto	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	Rapat khusus Direktur Bidang Konsumer Ritel & Usaha Syariah, dan bidang Komersial, Korporasi dan Keuangan. Direktur yang lain tidak ikut serta dalam rapat
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir				
			Sumaryono	Hadir				
					Ijin			

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Keterangan
3	5/10/2022	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan terkait persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; 2. Pembahasan Terkait perubahan SOP Pemilihan dan/atau Pergantian anggota Direksi	Suprajarto	Hadir		Erdianto Sigit C	Hadir	Rapat khusus Direktur Bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko, Diirektur yang lain tidak ikut serta dalam rapat
			Muhammad Mas'ud	Hadir				
			Candra Fajri Ananda	Hadir				
			Sumaryono	Hadir				
			Heru Tjahjono	Hadir				

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 16 (enam belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali serta rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Bidang sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direktur Bidang			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Suprajarto*	Komisaris Utama	16	13	81.25%	18	14	77.77%	1	1	100%
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	16	13	81.25%	18	18	100%	2	2	100%
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	16	13	81.25%	18	16	88.88%	2	2	100%
Sumaryono*	Komisaris Independen	16	14	87.5%	18	15	83.33%	1	1	100%
Heru Tjahjono	Komisaris	16	7	43.75%	18	12	66.6%	2	2	100%

\*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022.

### Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman kerja Dewan Komisaris No. 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung joleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.



Dewan Komisaris menetapkan untuk program pendidikan/pelatihan ini wajib diikuti oleh Setiap anggota Dewan Komisaris minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Suprajarto*	Komisaris Utama	Forum Komunikasi Top Leader dengan Tema “Agile - Resilience Motivation and Team Building Program”	Probolinggo, 18 Maret 2022	GO ORBIT
		<i>Becoming extraordinary leader</i>	Surabaya, 21 Maret 2022	Remaja Tampubolon
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Forum Komunikasi Top Leader dengan Tema “Agile - Resilience Motivation and Team Building Program”	Probolinggo, 18 Maret 2022	GO ORBIT
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
		Pelatihan Penguatan FKDK BPDSI “Pelatihan Penguatan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris	Lombok, 22 Juni 2022	FKDK BPDSI Wilayah Tengah
		Program Refreshment / Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Muhammad Mas’ud	Komisaris Independen	Seminar Nasional FKDK BPDSI “Recovery Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia	Bali, 10 Maret 2022	FKDK BPDSI FKDK BPDSI Wilayah Tengah
		Forum Komunikasi Top Leader dengan Tema “Agile - Resilience Motivation and Team Building Program”	Probolinggo, 18 Maret 2022	GO ORBIT
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
		Pelatihan Penguatan FKDK BPDSI “Pelatihan Penguatan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris	Lombok, 22 Juni 2022	FKDK BPDSI Wilayah Tengah
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Sumaryono*	Komisaris Independen	Forum Komunikasi Top Leader dengan Tema “Agile - Resilience Motivation and Team Building Program”	Probolinggo, 18 Maret 2022	GO ORBIT
		<i>Becoming extraordinary leader</i>	Surabaya, 21 Maret 2022	Remaja Tampubolon
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 25 Maret 2022	Strategic Development Group (SDG)
		Pelatihan Penguatan FKDK BPDSI “Pelatihan Penguatan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris	Lombok, 22 Juni 2022	FKDK BPDSI Wilayah Tengah
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Heru Tjahjono	Komisaris	Forum Komunikasi Top Leader dengan Tema “Agile - Resilience Motivation and Team Building Program”	Probolinggo, 18 Maret 2022	GO ORBIT
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta, 19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

\*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022.

### Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) orang Komisaris baru yang diangkat oleh RUPS yaitu Suprajarto (Komisaris Utama) dan Sumaryono (Komisaris Independen). Dalam pelaksanaan program pengenalan Perseroan secara umum kepada dua Komisaris baru tersebut, telah dilaksanakan program orientasi dengan penyampaian materi antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, *Corporate Plan*, dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja Bank Jatim, Anggaran Dasar Perseroan, dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
3. *Good Corporate Governance*, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris;
5. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris

## Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rapat internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Di samping kedua rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

## Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak **13 (tiga belas)** surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No	Tanggal Surat	Perihal
1	12 Januari 2022	Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait
2	17 Januari 2022	Persetujuan Rencana Pelaksanaan (Audit Plan) Divisi Audit Internal Periode 2022
3	20 Mei 2022	Penyediaan Fasilitas Kredit Investasi kepada Yayasan TPS-NU Khadijah
4	20 Mei 2022	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2022
5	02 Juni 2022	Persetujuan Usulan Perubahan Remunerasi Anggota Komite (Pihak Independen)
6	30 Juni 2022	Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2022
7	06 Juli 2022	Persetujuan usulan Kebijakan Produk Aktivitas APU PPT
8	13 September 2022	Persetujuan Dewan Pengawas Syariah Mengikuti Perpanjangan Sertifikasi Pengawas Syariah
9	27 September 2022	Penggantian Sementara Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
10	28 Septemebr 2023	Persetujuan dan Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Jatim Tahun Buku 2022
11	10 November 2022	Persetujuan terkait Aksi Korporasi Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sehat.
12	17 November 2022	Persetujuan Dewan Pengawas Syariah Dalam Ijtima' Sanawi DPS Tahun 2022
13	02 Desember 2022	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2023

## Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

### Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

### PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

### KRITERIA EVALUASI KINERJA DIREKSI

Dasar penilaian kinerja Direksi mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2022 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.



**KPI Direktur Utama**

Perspektif	KPI
<b>1 Financial</b>	
Ekspansi Kredit	Pencapaian Kredit
Laba	Pencapaian Laba
NPL GROSS	NPL ( <i>Gross</i> )
Efisiensi	Rasio keuangan BOPO
Giro	Pencapaian Giro Umum
	Pencapaian Giro Pemda
Tabungan	Pencapaian Tabungan
	Pencapaian Deposito Umum
Deposito	Pencapaian Deposito Pemda
	Pencapaian Asset
<i>Fee Based Income</i>	<i>Growth Fee Based Income (FBI)</i>
<b>2 Customer</b>	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan ( <i>Best Overall performance Service Excellent</i> ) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Rapat Umum Pemegang Saham	Pelaksanaan RUPS sesuai dengan <i>timeline</i>
<b>3 Internal Business Process</b>	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
<i>Project</i> Inisiasi	Memastikan <i>Project</i> Inisiasi sesuai dengan <i>timeline</i>
Kebijakan dan Proses	Memastikan penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan <i>timeline</i>
Audit Plan	Memastikan <i>Audit Plan</i> terlaksana sesuai dengan <i>schedule</i>
<b>4 Learning and Growth</b>	
Sosialisasi Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan
Kompetensi Pegawai	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai dengan melaksanakan pelatihan
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

**KPI Direktur Keuangan, Treasury & Global Services**

Perspektif	KPI
<b>1 Financial</b>	
Laba	Pencapaian Laba
NPL GROSS	NPL ( <i>Gross</i> )
Efisiensi	Rasio keuangan BOPO
Giro	Pencapaian Giro Umum
	Pencapaian Giro Pemda
Tabungan	Pencapaian Tabungan
	Pencapaian Deposito Umum
Deposito	Pencapaian Deposito Pemda
	CASA
Fee Based Income	<i>Growth Fee Based Income (FBI)</i>
Transaksi Devisa	Peningkatan jumlah transaksi Devisa Valas
Pendapatan Treasury	Memperoleh pendapatan dari transaksi Tresuri sesuai dengan target ( <i>Dealing Room &amp; Bank Notes</i> )
Trade Finance	Meningkatkan jumlah Transaksi <i>Trade Finance</i>
<b>2 Customer</b>	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan ( <i>Best Overall performance Service Excellent</i> ) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Pelaporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan telah dipublikasikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan
Kerja sama Institusi	Menjaga hubungan baik dan menambah kerja sama dengan institusi
<b>3 Internal Business Process</b>	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
<i>Project</i> Inisiasi	Memastikan <i>Project</i> Inisiasi sesuai dengan <i>timeline</i>
Pembinaan Aktif & Pasif	Melakukan <i>monitoring</i> kepada Cabang setiap 3 (tiga) Bulan
Kebijakan & Proses	Memastikan penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan <i>timeline</i>
Pembinaan Cabang	Meminimalisir kinerja Cabang yang berpredikat Below dan Poor
Rencana Bisnis Bank	Memastikan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tepat waktu

KPI Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	
Perspektif	KPI
<b>4 Learning and Growth</b>	
Sosialisasi Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan
Kompetensi Pegawai	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai dengan melaksanakan pelatihan
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI Direktur Mikro, Ritel & Menengah	
Perspektif	KPI
<b>1 Financial</b>	
Ekspansi Kredit	Ekspansi Kredit Mikro Ritel Menengah
Laba	Pencapaian Laba
Dana Pihak ketiga	Pencapaian Total DPK
NPL Konsumer, Mikro, Ritel	NPL Kredit Konsumer NPL Kredit Mikro Ritel Menengah
NPL Syariah	NPL Kredit Syariah
<i>Fee Based Income</i>	<i>Growth Fee Based Income (FBI)</i>
Kredit Konsumer	Kredit konsumer tumbuh
Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Syariah tumbuh
Dana Pihak Ketiga Syariah	Dana Pihak Ketiga Syariah tumbuh
<b>2 Customer</b>	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan ( <i>Best Overall performance Service Excellent</i> ) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
NOA Mikro Ritel Menengah	Meningkatkan Debitur Mikro Ritel Menengah

<b>3 Internal Business Process</b>	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Resiko pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
Project Inisiasi	Menyelesaikan <i>Project Inisiasi</i> sesuai dengan <i>timeline</i>
Pembinaan Aktif dan Pasif	Melakukan monitoring kepada Cabang setiap 3 (tiga) bulan
Kebijakan & Proses	Memastikan penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>

KPI Direktur Mikro, Ritel & Menengah	
Perspektif	KPI
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan <i>timeline</i>
Implementasi Digital Banking	Penerapan <i>e-Loan</i> dan Produk berbasis <i>digital</i>
<b>4 Learning and Growth</b>	
Sosialisasi Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan
Kompetensi Pegawai	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai dengan melaksanakan pelatihan
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI Direktur Manajemen Risiko	
Perspektif	KPI
<b>1 Financial</b>	
Ekspansi Kredit	Pencapaian Kredit
Laba	Pencapaian Laba
NPL	NPL (Gross)
Penghimpunan DPK	Pencapaian Total DPK
Efisiensi	Rasio keuangan BOPO
Extracomtable	Memperoleh ekstracom
Restrukturisasi	Melakukan Restrukturisasi (3,4,5)
<b>2 Customer</b>	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan ( <i>Best Overall performance Service Excellent</i> ) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Ketepatan pelaporan	Pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan
Tindak lanjut Audit	Memantau penyelesaian Tindak Lanjut Audit yang lebih dari 3 (tiga) bulan
Hukum	<i>Monitoring</i> kegiatan pendapat hukum (Legal Opini) dan surat kuasa sesuai target

<b>3 Internal Business Process</b>	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Resiko pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
Project Inisiasi	Menyelesaikan <i>Project Inisiasi</i> sesuai dengan <i>timeline</i>
Pembinaan Aktif dan Pasif	Melakukan <i>monitoring</i> kepada Cabang setiap 3 bulan



## KPI Direktur Manajemen Risiko

Perspektif	KPI
Kebijakan & Proses	Memastikan penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan <i>timeline</i>
<i>Rules Making Rule</i>	Memastikan penyelenggaraan <i>Rules Making Rule</i> sesuai dengan <i>timeline</i>
<b>4 Learning and Growth</b>	
Sosialisasi Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan
Kompetensi Pegawai	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai dengan melaksanakan pelatihan
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

## KPI Direktur IT &amp; Digital

Perspektif	KPI
Kebijakan dan Proses	Memastikan penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan <i>timeline</i>
Operasional IT	Menjaga Operasional TI agar berjalan pada SLA 97%
<b>4 Learning and Growth</b>	
Sosialisasi Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan
Kompetensi Pegawai	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai dengan melaksanakan pelatihan
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

## KPI Direktur IT &amp; Digital

Perspektif	KPI
<b>1 Financial</b>	
Ekspansi Kredit	Pencapaian Kredit
Laba	Pencapaian Laba
NPL	NPL (Gross)
Penghimpunan DPK	Pencapaian Total DPK
Efisiensi	Rasio keuangan BOPO
Fee Based Income	Growth Fee Based Income (FBI)
Echannel	Growth Pemakaian Echannel
Remittance	Meningkatkan jumlah transaksi <i>Incoming Transfer</i> dan <i>Outgoing Transfer</i>
<b>2 Customer</b>	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan ( <i>Best Overall performance Service Excellent</i> ) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Digitalisasi	Penyempurnaan Digitalisasi J-Connect
<b>3 Internal Bussiness Process</b>	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat risiko "Low to Moderate"
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
Project Inisiasi	Menyelesaikan <i>Project Inisiasi</i> sesuai dengan <i>timeline</i>
Pembinaan Aktif dan Pasif	Melakukan <i>monitoring</i> kepada Cabang setiap 3 (tiga) bulan

## KPI Direktur Operasi

Perspektif	KPI
<b>1 Financial</b>	
Ekspansi Kredit	Pencapaian Kredit
Laba	Pencapaian Laba
NPL	NPL (Gross)
Penghimpunan DPK	Pencapaian Total DPK
Efisiensi	Rasio keuangan BOPO
Fee Based Income	Growth Fee Based Income (FBI)
<b>2 Customer</b>	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan ( <i>Best Overall performance Service Excellent</i> ) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Pengaduan Nasabah	Menindaklanjuti pengaduan nasabah baik dari <i>Contact Center</i> maupun melalui kantor cabang maksimal terselesaikan 14 hari kerja
Standar Layanan	Laporan kinerja layanan cabang berdasarkan rekapitulasi feedback kepuasan nasabah setiap bulan sebanyak 85% tiap bulannya
<b>3 Internal Bussiness Process</b>	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "Low to Moderate"
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
Project Inisiasi	Menyelesaikan <i>Project Inisiasi</i> sesuai dengan <i>timeline</i>

KPI Direktur Operasi	
Perspektif	KPI
Pembinaan Aktif dan Pasif	Melakukan <i>monitoring</i> kepada Cabang setiap 3 (tiga) bulan
Kebijakan & Proses	Memastikan penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan <i>timeline</i>
Card Centre	Memastikan penyelesaian operasional Card Centre tepat waktu
Efisiensi	Melakukan Efisiensi Negoisasi, HPS, Biaya Pengadaan Barang, ATK, Barang Cetak dan aktiva tetap inventaris

4 Learning and Growth	
Sosialisasi Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan
Kompetensi Pegawai	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai dengan melaksanakan pelatihan
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI Direktur Kepatuhan	
Perspektif	KPI
<b>1 Financial</b>	
Ekspansi Kredit	Pencapaian Kredit
Laba	Pencapaian Laba
NPL	NPL (Gross)
Penghimpunan DPK	Pencapaian Total DPK
Efisiensi	Rasio keuangan BOPO
Fee Based Income	Growth Fee Based Income (FBI)
<b>2 Customer</b>	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan ( <i>Best Overall performance Service Excellent</i> ) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Ketepatan pelaporan	Pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan
Tindak lanjut Audit	Memantau penyelesaian Tindak Lanjut Audit yang lebih dari 3 (tiga) bulan
Hukum	Meningkatkan prosentase tentang penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
Fungsi Tata Kelola	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (Triwulan)

KPI Direktur Kepatuhan	
Perspektif	KPI
<b>3 Internal Bussiness Process</b>	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko "Low to Moderate"
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
Project Inisiasi	Menyelesaikan <i>Project</i> Inisiasi sesuai dengan <i>timeline</i>
Pembinaan Aktif dan Pasif	Melakukan <i>monitoring</i> kepada Cabang setiap 3 bulan
Kebijakan & Proses	Memastikan penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan <i>timeline</i>
Rules Making Rule	Memastikan penyelenggaraan Rules Making Rule sesuai dengan timeline
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	<i>Review</i> Ketentuan Internal dan Rekonsiliasi Ketentuan Eksternal
<b>4 Learning and Growth</b>	
Sosialisasi Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan
Kompetensi Pegawai	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai dengan melaksanakan pelatihan
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

## PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

### PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

#### 1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan.

## 2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui penyusunan penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 059/009/DK/KEP Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/005/DK/KEP Tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

### KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris (*self assessment*) antara lain:

1. Pengawasan Pasif Dewan Komisaris, meliputi:
  - a. Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
  - b. Pelaksanaan *review* Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit (Internal/Eksternal).
  - c. Pelaksanaan Hasil Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.
  - d. Pelaksanaan *review* Laporan Profil Risiko, *Review* Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil *Review* Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

- e. Pelaksanaan *review* kebijakan-kebijakan Direksi (kebijakan perkreditan, permodalan, strategi manajemen risiko, remunerasi, dan lainnya).

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, meliputi:
  - a. Jumlah rapat.
  - b. Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank).
  - c. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja.
  - d. Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Pengawasan Kinerja Perseroan
  - a. Rentabilitas
  - b. Likuiditas
  - c. Perkreditan
4. *Learning and Growth*

### PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*. *Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2022 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

## Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Periode Tahun 2022

Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Semester II / 2022 ( <i>Self Assessment</i> )							
No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan pasif Dewan Komisaris	a. Pelaksanaan <i>review</i> dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	<i>Review</i> dan tanggapan atas Rencana Bisnis Bank telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	10	10
		b. Pelaksanaan <i>review</i> Tindak Lanjut Hasil / Temuan Audit (Internal / Eksternal).	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 2x dalam setahun)	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	7,5	7,5
		c. Pelaksanaan Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola.	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun)	Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		d. Pelaksanaan <i>review</i> Laporan Profil Risiko, <i>Review</i> Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil <i>Review</i> Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap Semester sesuai target	1	5	5

**Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Semester II / 2022 (Self Assessment)**

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		e. Pelaksanaan <i>review</i> kebijakan-kebijakan Direksi (kebijakan perkreditan, permodalan, strategi manajemen risiko, remunerasi, dan sebagainya)	Dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x setahun)	Pelaksanaan <i>review</i> kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	7,5	7,5
<b>Sub Total</b>						<b>35,00</b>	<b>35,0</b>
2	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	a. Jumlah Rapat	Rapat Internal Dewan Komisaris minimal 12 kali dalam setahun (tiap semester 6 kali rapat)	Pelaksanaan Rapat internal Dewan Komisaris pada tahun 2022 terlaksana 16 kali	1	12,5	12,5
			Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun (tiap semester 3 kali rapat)	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada Tahun 2022 terlaksana sebanyak 18 Kali	1	10	10
		b. Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha & keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	Dilaksanakan pada setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai target yaitu 2 bln sekali (1 tahun 6 x)	Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha & keuangan Bank padatahun 2022 terlaksana dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai target (9 kali)	1	10	10
		b. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang/unit kerja (Setiap triwulan)	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang / unit kerja terlaksana sesuai target	1	7,5	7,5
		c. Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terlaksana 5 kali	1	5	5
<b>Sub Total</b>						<b>45</b>	<b>45,00</b>
3	Kinerja Perseroan	POS NERACA	TARGET RBB 2022	REALISASI 2022			
		a. Rentabilitas	TARGET	REALISASI			
		- Laba Bersih	1.530.884	1.542.824	1	2,5	2,5
		- Return on Asset (ROA)	1,90%	1,95%	0	2,5	2,5
		b. Likuiditas	TARGET	REALISASI			
		- Dana Pihak Ketiga (DPK)	85.803.143	81.767.383	1	2,5	2,25
		- LDR	52,89%	56,50%	0	2,5	2,25
		c. Perkreditan	TARGET	REALISASI			
		- Ekspansi Kredit	45.487.247	46.196.567	0	2,5	2,5
		- NPL	3,95%	2,83%	1	2,5	2,5
<b>Sub Total</b>						<b>15</b>	<b>14,75</b>
4	Learning & Growth	Programpeningkatan / pengembangan kompetensi ( <i>Workshop</i> , seminar, <i>conference</i> , dan sebagainya)	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan <i>Workshop</i> / seminar Dewan Komisaris pada tahun 2022 terlaksana sesuai target	1	5	5
<b>Sub Total</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>100,00</b>	<b>99,75</b>

## Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Aktif, Pengawasan Pasif dan Pengembangan Kompetensi. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris. Pencapaian masing-masing KPI Komite adalah sebagai berikut.

### Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Audit

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Audit ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan.

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Pelaksanaan Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Intern dan Eksternal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Evaluasi/ <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal & Eksternal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	0,75	5	3,75
		Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & Fraud dari Divisi Audit Internal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & Fraud dari Divisi Audit Internal terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
		Evaluasi Audit Plan dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan Audit Plan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	1	5	5
		Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana 3 kali dalam setahun	0,75	5	3,75
		Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10
		Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan progress report diterima Komite Audit	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan progress report diterima Komite Audit terlaksana 1 kali dalam setahun	0,5	5	2,5
		Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi penerapan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Evaluasi penerapan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
<b>Sub Total</b>						<b>60</b>	<b>55</b>
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Audit	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama Tahun 2022 terlaksana sebanyak 7 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Divisi dan Unit Kerja Terkait	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama Tahun 2022 terlaksana sebanyak 6 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, SKAI, SKMR, dan Akuntan terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Kunjungan ke kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2022; dan melakukan kunjungan serta berkomunikasi dengan Direksi dan Divisi terkait dengan tugas dan tanggungjawab Komite Audit	1	10	10
<b>Sub Total</b>						<b>35</b>	<b>35</b>
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendWiri (self competency development) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (3x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri (self competency development) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern Komite Audit pada tahun 2022 hanya terlaksana 1 kali	0,33	2,5	0,83
		Program peningkatan kompetensi dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, dan atau sertifikasi	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan Workshop / seminar/pelatihan/sertifikasi Komite Audit pada Tahun 2022 terlaksana 2 kali	1	2,5	2,5
<b>Sub Total</b>						<b>5</b>	<b>3,33</b>
<b>Total</b>						<b>100</b>	<b>93,33</b>
<b>Total Penilaian</b>				<b>Keterangan</b>			
<b>Nilai 80 – 100</b>				<b>Sangat Baik</b>			
Nilai 70 - < 80				Baik			
Nilai 55 - < 70				Cukup Baik			
Nilai < 55				Kurang Baik			





### Pencapaian Key Performance Indicator Komite Remunerasi Dan Nominasi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan.

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Menyusun komposisi dan proses Nominasi Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi)	Menyusun <i>Time Table</i> dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi)	menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan	melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai <i>time table</i> yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)	Dilaksanakan Minimal setahun 1 (satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	Dilaksanakan Minimal setahun 1 (satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
<b>Sub Total</b>						<b>60</b>	<b>60</b>
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	20	20
		Rapat Koordinasi dengan pihak terkait	sesuai kebutuhan (minimal 2 kali dalam setahun)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Pembuatan dan penyampaian laporan Komite yang tepat waktu	menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
<b>Sub Total</b>						<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Total</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL PENILAIAN</b>				<b>KETERANGAN</b>			
<b>Nilai 80 – 100</b>				<b>Sangat Baik</b>			
Nilai 70 - < 80				Baik			
Nilai 55 - < 70				Cukup Baik			
Nilai < 55				Kurang Baik			

## PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE PEMANTAU RISIKO

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan.

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) hanya terlaksana 2 kali dalam tahun ini	0,5	5	2,5
		Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko)	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi contingency plan pada Business Continuity Management (BCM)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Pemantauan dan evaluasi contingency plan pada Business Continuity Management (BCM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan terhadap debitur large exposure di atas Rp100 milyar	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan terhadap debitur large eksposur di atas Rp100 milyar hanya terlaksana 1 kali dalam tahun ini	0,5	5	2,5
		Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori large exposure, dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori large eksposur, dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Kebijakan Pokok Bank • Kebijakan Strategis Tata Kelola (KPB KST)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Kebijakan Pokok Bank • Kebijakan Strategis Tata Kelola (KPB KST) sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5



No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Pembiayaan (KPA PAP);	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • Pembiayaan (KPA PAP) sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • KPA APU PPT	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • KPA APU PPT terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	2,5	2,5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • SOP Layanan Nasabah Prima	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • SOP Layanan Nasabah Prima masih belum terlaksana pada tahun ini	0	2,5	0
		Review Corplan, RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Review Corplan, RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
<b>Sub Total</b>						<b>60</b>	<b>52,50</b>
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2022 terlaksana sebanyak 6 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan divisi terkait issues strategis Bank	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2022 terlaksana sebanyak 6 kali	1	10	10
		Kunjungan ke unit kerja dan jaringan kantor dalam rangka: • Pemantauan penerapan manajemen risiko pada aktivitas dan produk Bank; • Pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Kunjungan ke kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2022; dan melakukan kunjungan serta berkomunikasi dengan Direksi dan Divisi terkait dengan tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko	1	10	10
<b>Sub Total</b>						<b>35</b>	<b>35</b>
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (self competency development) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pengembangan kompetensi sendiri ( <i>self competency development</i> ) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022 hanya terlaksana 1 kali	0,5	2,5	1,25
		Program peningkatan kompetensi dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, dan atau sertifikasi	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan <i>Workshop</i> /seminar/pelatihan/sertifikasi Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2022 terlaksana 2 kali	1	2,5	2,5
<b>Sub Total</b>						<b>5</b>	<b>3,75</b>
<b>Total</b>						<b>100</b>	<b>91,25</b>
<b>Total Penilaian</b>				<b>Keterangan</b>			
<b>Nilai 80 – 100</b>				<b>Sangat Baik</b>			
Nilai 70 - < 80		Baik					
Nilai 55 - < 70		Cukup Baik					
Nilai < 55		Kurang Baik					

## Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
  - a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
  - b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
  - d. Meninggal dunia.
  - e. Masa jabatannya telah berakhir.
  - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  - g. Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

## Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

## Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

## Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
  - d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:
  - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah saat ini masih dalam proses pengesahan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.



## Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020

## Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi DPS yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2022, tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah yang baru. Sehingga tidak terdapat program orientasi bagi DPS baru.

## Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
		Wakil	Wakil Rais Aam PBNU 2022 - 2027
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

## Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## Rapat Dewan Pengawas Syariah

### Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

**Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah**

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	6 Januari 2022	FGD Pembiayaan Talangan Haji dan Penggunaan Bank Sponsor Dengan Status Bank Umum Konvensional Untuk BI Fast	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
2	7 Januari 2022	Pembahasan Opini Penggunaan Bank Sponsor Dengan Status Bank Umum Konvensional Untuk BI Fast	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
3	7 Januari 2022	Pembahasan Opini Talangan Haji PT Trihmas Finance Syariah	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
4	24 Maret 2022	Pembahasan Opini Tabungan Santri iB Barokah	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
5	11 April 2022	Pembahasan Opini Co-Branding Kartu Kredit BSI Hasanah Card	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
6	28 Juli 2022	Pembahasan Opini Pengembangan Standar Nasional Open API Pembayaran	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
7	29 Agustus 2022	Pembahasan Opini Penerimaan Setoran Awal dan Pelunasan Haji Melalui E-Channel	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
8	4 Oktober 2022	FGD Pelunasan Sebagian Pembiayaan Pegawai	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
9	4 Oktober 2022	Pembahasan Opini Pelunasan Sebagian Pembiayaan Pegawai	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA
10	1 November 2022	Pembahasan Opini Pembiayaan <i>Cash Collateral Financing</i> (CCF)	- Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag - Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	10	10	100%
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	10	10	100%

### Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat DPS turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2022 DPS telah mengeluarkan sebanyak 8 (delapan) Opini Dewan Pengawas Syariah. DPS telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

1. Opini DPS Terkait Penggunaan Bank Sponsor Dengan Status Bank Umum Konvensional Untuk BI Fast
2. Opini DPS Terkait Talangan Haji PT Trihmas Finance Syariah
3. Opini DPS Terkait Tabungan Santri iB Barokah
4. Opini DPS Terkait Co-Branding Kartu Kredit BSI Hasanah Card
5. Opini DPS Terkait Pengembangan Standar Nasional Open API Pembayaran
6. Opini DPS Terkait Penerimaan Setoran Awal dan Pelunasan Haji Melalui E-Channel
7. Opini DPS Terkait Pelunasan Sebagian Pembiayaan Pegawai
8. Opini DPS Terkait Pembiayaan *Cash Collateral Financing* (CCF)

## Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

### Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS berdasarkan pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2021. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

### Pihak yang Melakukan Assessment

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2021 secara mandiri (*self assessment*).

### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan Bisnis Unit Usaha Syariah.

## Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

### Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi.

Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan *assessment* oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil *assessment*.
5. Wawancara akhir.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS.

### Prosedur Penetapan Remunerasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dapat berkoordinasi dengan Divisi yang membidangi Sumber Daya manusia.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan hasil evaluasi remunerasi kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi remunerasi bagi pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:



## Konsultan Ekstern Terkait Kebijakan Remunerasi

Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:

1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

## Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap
 

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:

  - Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari:
    1. Honorarium.
    2. Tunjangan Perumahan.
    3. Tunjangan Komunikasi.
    4. Tunjangan Hari Raya.
    5. Tunjangan Cuti.
    6. Fasilitas /Biaya Kesehatan.
    7. Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.
2. Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari:
  1. Tantiem.
  2. Fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja.

## Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

**Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	Komisaris Utama 45% dari honorarium Direktur Utama Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama	Direktur Utama 100% Direktur 90% dari honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium	Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium
		Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas
		Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium	Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium
		Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan	Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan
		Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium	Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium





No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
3.	Fasilitas	Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program (COP)</i>	Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program (COP)</i>
		Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 061/03/06/DKM/KEP Tanggal 25 Agustus 2022	Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 061/03/06/DKM/KEP Tanggal 25 Agustus 2022
		Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan	Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	Bonus diberikan secara tunai	Bonus diberikan secara tunai
		Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.	Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

### Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterimakan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah
<b>Remunerasi</b>				
Honorarium	5	3.165	9	6.942
Tunjangan Perumahan	5	1.553	9	1.936
Tunjangan Komunikasi	5	560	9	620
Tantiem	3	7.576	5	27.559
<b>Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura</b>				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Transportasi Program COP (dapat dimiliki)	3	2.800	2	1.800
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	5	180	7	167
<b>Jumlah Remunerasi dalam 1 Tahun</b>				
Di atas Rp2 miliar	3	12.971	7	46.061
Di atas Rp1 Miliar s/d 2 miliar	2	2.915	-	-
Di atas Rp500juta s/d 1 milliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	2	191

### Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
  - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan; dan/atau
  - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan  
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin  
Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 4 (empat) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.
4. Usia  
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi  
Dewan Komisaris
  - a. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
  - b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

#### Direksi

Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi.

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Suprajarto*	Komisaris Utama	66 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Ekonomi</li> <li>• Magister Manajemen</li> <li>• Doktor Ilmu Manajemen</li> </ul>	Berpengalaman sebagai seorang Banker	Manajemen, Perbankan
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	58 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi</li> <li>• Master (MSc.)</li> <li>• Doctor (Ph.D)</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	58 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Administrasi Negara</li> <li>• Magister Manajemen</li> <li>• Doktor Politik Internasional</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Sumaryono*	Komisaris Independen	62 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Administrasi Niaga</li> </ul>	Berpengalaman sebagai seorang Banker	Perbankan
Heru Tjahjono	Komisaris	61 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik</li> <li>• Magister Manajemen</li> <li>• Doktor Lingkungan dan Pembangunan</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Manajemen, Lingkungan dan Pembangunan

\*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022.



## Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Periode Menjabat di Tahun 2022	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman	Direktur Utama	1 Januari 2022– saat ini	58 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi;</li> <li>Master bidang Manajemen;</li> <li>Profesi Akuntan.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen, Akuntansi
Rizyana Mirda*	Direktur Risiko Bisnis	1 Januari 2022 – 17 Maret 2022	53 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Ekonomi Keuangan;</li> <li>Sarjana bidang Bisnis Administrasi;</li> <li>Master bidang Keuangan.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Bisnis Administrasi, Keuangan
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	53 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Pertanian;</li> <li>Master bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
	Direktur Operasi	7 Desember 2022 – 13 Desember 2022					
	Pgs Direktur Kepatuhan	13 Desember 2022 – saat ini					
Ferdian Timur Satyagraha**	Direktur Keuangan	1 Januari 2022 – 14 Januari 2022	40 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foundation Degree;</li> <li>Bachelor of Commerce;</li> <li>Master of Commerce.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Keuangan
Erdianto Sigit Cahyono***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	60 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi;</li> <li>Master bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Akuntansi, Manajemen
R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	52 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Teknologi Industri</li> <li>Magister bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	7 Desember 2022 – saat ini					
Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	58 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Ekonomi Manajemen</li> <li>Magister bidang Manajemen Agribisnis</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	7 Desember 2022 – saat ini					
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	7 Desember 2022 – saat ini	57 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Teknologi Pangan dan Gizi</li> <li>Master bidang Corporate Finance and Investment</li> <li>Doktor bidang Manajemen dan Bisnis</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Finance, Majemen
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	7 Desember 2022 – saat ini	60 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Teknik Informatika</li> <li>Master bidang Computer Science</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Teknik Informatika
	Merangkap Pgs. Direktur Operasi	13 Desember 2022 – saat ini					

\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*Mengundurkan diri tanggal 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Desember 2022

## Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Jabatan	Periode Menjabat di Tahun 2022	Kepemilikan Saham (lembar)			
			Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	1 Januari 2022– saat ini	1.946.500	Nihil	Nihil	Nihil
Rizyana Mirda*	Direktur Risiko Bisnis	1 Januari 2022 – 17 Maret 2022	3.699.333	Nihil	Nihil	Nihil
Tonny Prasetyo	Direktur TI dan Operasi	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	628.500	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Operasi	7 Desember 2022 – 13 Desember 2022				
	Pgs Direktur Kepatuhan	13 Desember 2022 – saat ini				
Ferdian Timur Satyagraha**	Direktur Keuangan	1 Januari 2022 – 14 Januari 2022	2.981.833	Nihil	Nihil	Nihil
Erdianto Sigit Cahyono***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1 Januari 2022 – 7 Desember 2022	588.100	Nihil	Nihil	Nihil
R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	126.300	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	7 Desember 2022 – saat ini				
Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	17 Maret 2022 – 7 Desember 2022	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	7 Desember 2022 – saat ini				
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	7 Desember 2022 – saat ini	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	7 Desember 2022 – saat ini	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Merangkap Pgs. Direktur Operasi	13 Desember 2022 – saat ini				

\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*Mengundurkan diri tanggal 14 Januari 2022 dan berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

\*\*\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Desember 2022

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Suprajarto*	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sumaryono*	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Heru Tjahjono	Komisaris	274.200	Nihil	Nihil	Nihil

\*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022.

### Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Investor Relation Corporate Secretary Bab IV yaitu sebagai berikut:

- Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka  
Pelaporan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) berlaku pada perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

Sedangkan penyampaian informasi oleh Direksi/Dewan Komisaris berlaku pada setiap perubahan kepemilikan. Pelaporan kepada Perusahaan Terbuka dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Laporan yang dilakukan secara mandiri wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. Kewajiban pelaporan juga dapat dilakukan oleh Pihak lain (dalam hal ini *Corporate Secretary*) melalui kuasa tertulis. Penyampaian laporan melalui kuasa wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham dan wajib disertai *copy* surat kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tahun 2022, pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang berlaku. Pembelian/penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Nama Saham	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Jumlah Saham yang dibeli	Tanggal Transaksi	Tujuan dari Transaksi
1	Heru Tjahjono	BJTM	141.400	274.200	132.800	14/06/2022	Program LTI
2	Busrul Iman	BJTM	1.556.400	1.946.500	390.100	14/06/2022	Program LTI
3	R.Arief Wicaksono	BJTM	0	126.300	126.300	27/04/2022	Investasi
4	Tonny Prasetyo	BJTM	346.000	628.500	282.500	14/06/2022	Program LTI
5	Erdianto Sigit Cahyono*	BJTM	305.600	588.100	282.500	14/06/2022	Program LTI

\*Berhenti menjabat sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Desember 2022

## Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

### Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris. Grup Sekretariat Dewan Komisaris Bank Jatim secara struktur berada di bawah *Corporate Secretary*. Grup Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

1. Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggungjawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
5. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
6. Menindak lanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
  - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.

- b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
  - c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
  8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
  9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
  11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
    - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
  12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
  13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.
  6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
  7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
  8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite terkait proses administrasi nominasi calon Pengus Bank.
  9. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

## Komite Audit

### Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 7 Desember 2016.
3. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 17 Maret 2017.
4. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
5. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
6. Anggaran Dasar.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

### Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2022 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor *progress* pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan KAP berdasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan memantau pelaksanaan tindak lanjutnya



6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris yang terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
9. Pemantauan terhadap kecukupan proses pelaporan keuangan seperti laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, laporan publikasi, proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang akan disampaikan ke publik, Bank Indonesia serta institusi otoritas lainnya
10. Penelaahaan terhadap kecukupan fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan anggarannya serta pekerjaan yang telah dilaksanakan
11. Pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh Manajemen dan Satuan Kerja Operasional terkait lainnya
12. Pemantauan dan penilaian terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas fungsi SKAI
13. Evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP meliputi kecukupan program kerja dan penelaahan rencana pemeriksaan (*review audit plan*) KAP termasuk berkaitan dengan struktur pengendalian internal, pos-pos materiil dan manajemen risiko

### Piagam Komite Audit

Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Komite Audit memiliki pedoman kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/04/DKM/KEP tanggal 28 Juni 2022, yang mengatur tentang:

1. Landasan Hukum
2. Struktur Keanggotaan
3. Persyaratan Keanggotaan
4. Tugas dan Tanggungjawab
5. Wewenang
6. Rapat Komite Audit
7. Masa Tugas Anggota Komite Audit
8. Pelaporan
9. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran

### Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Masa Jabatan Komite Audit

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 05 Oktober 2021 – 04 April 2022

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Candra Fajri Ananda	Ketua		Ekonomi	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Administrasi Negara	Komisaris Independen
Akhmad Djauhari*	Anggota	Tbk Periode 2021 - 2022	Ekonomi	Komisaris Independen
Ellen Theresia Sihotang	Anggota		Ekonomi	Pihak Independen

\*masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

#### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 05 April 2022 – 02 Oktober 2022

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Sumaryono	Ketua		Administrasi Niaga	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 061/036/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Administrasi Negara	Komisaris Independen
Candra Fajri Ananda	Anggota	Tbk periode 2022 - 2023	Ekonomi	Komisaris Independen
Ellen Theresia Sihotang*	Anggota		Ekonomi	Pihak Independen

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022

**Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 03 Oktober 2022 – 31 Desember 2022**

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Sumaryono	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 061/200/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Administrasi Niaga	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota		Administrasi Negara	Komisaris Independen
Candra Fajri Ananda	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Kusnadi	Anggota		Ekonomi, Akuntansi	Pihak Independen

**Profil Komite Audit**

Profil Komite Audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

<p style="text-align: center;"><b>Sumaryono</b> Ketua Komite Audit</p> <p style="text-align: center;">Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Candra Fajri Ananda</b> Anggota Komite Audit</p> <p style="text-align: center;">Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Muhammad Mas'ud</b> Anggota Komite Audit</p> <p style="text-align: center;">Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>





## Kusnadi

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Malang
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Cianjur, 18 Juni 1966/56 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, Lulus Tahun 1990</li> <li>• Magister Agribisnis UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 2004</li> </ul>
<b>Sertifikasi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop Perangkat dan Teknik Audit YPIA tahun 2019</li> <li>• IHT Aspek Hukum Perkreditan dan Operasional Tahun 2020</li> <li>• IHT Risk Based Audit Tahun 2020</li> <li>• IHT Teknik Investigasi Kasus Pada Industri Perbankan Tahun 2020</li> <li>• IHT Special Request Root Cause Analysis Tahun 2020</li> <li>• IHT Special Request Fraud Audit Tahun 2020</li> <li>• Sertifikat Kompetensi Audit Intern Bank Dengan Kualifikasi Okupasi Khusus Pada Pekerjaan Audit Supervisor BRI (Lembaga Sertifikasi Profesi BRI) Tahun 2021</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Job Trainer Kanca Muara Bungo (Tahun 1990-1992)</li> <li>• Staf I Kanca Bitung (Tahun 1992-1994)</li> <li>• Staff II Kanca Tegal (Tahun 1994-1997)</li> <li>• MLO Kanca Cilegon (Tahun 1997-1999)</li> <li>• MLO Kanca Jakarta Roxi (Tahun 1999-2002)</li> <li>• Pemimpin Cabang Pembantu Wiradesa Pekalongan (Tahun 2002-2004)</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Luwuk (Tahun 2004-2006)</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Parepare (Tahun 2007-2009)</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Lubuk Pakam (Tahun 2009-2011)</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Nganjuk (Tahun 2011-2012)</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (Tahun 2012-2012)</li> <li>• Staf Khusus BRI (Tahun 2012-2016)</li> <li>• Kabag Logistik BRI Pekanbaru (Tahun 2016-2019)</li> <li>• GH AIW BRI Bandung (Tahun 2019-Juni 2022)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: 061/200/DIR/HCP/KEP
<b>Periode Menjabat</b>	: Periode 2022-2026
<b>Jabatan Rangkap</b>	: Tidak Ada

## Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Sumaryono	Ketua	April – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master Degree (MSc.) di bidang Rural Development Doctor Degree (DR) di bidang Rural Development	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan.
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Akhmad Djauhari*	Anggota	Januari – Maret 2022	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Magister Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Ellen Theresia Sihotang**	Anggota	Januari – Oktober 2022	Sarjana di bidang Akuntansi Magister Management	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, pemasaran, keuangan, dan riset perilaku
Kusnadi	Anggota	Oktober – Desember 2022	Sarjana di Bidang Akuntansi Magister Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja perbankan

\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022

\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022

## Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Sumaryono	Muhammad Mas'ud	Candra Fajri Ananda	Kusnadi	Akhmad Djauhari*	Ellen Theresia Sihotang**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022

\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022

## Rapat Komite Audit

### KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
4. Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan peserta rapat perbedaan tersebut. Risalah rapat ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media digital yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

**AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT**

Sepanjang tahun 2022, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

**Tabel Agenda Rapat Komite Audit**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	11 Januari 2022	Evaluasi Rencana Audit ( <i>Audit Plan</i> ) periode 2022 oleh Divisi Audit Internal	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Akhmad Djauhari Ellen Theresia Sihotang
2	07 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan Rekomendasi Proposal Penawaran Pengadaan Jasa Audit oleh KAP untuk Kaji Ulang Evaluasi Kinerja Fungsi Audit Internal Periode 2022;</li> <li>Program Kerja Komite Audit Periode 2022;</li> <li>Tindak lanjut terhadap Temuan Khusus (<i>fraud</i>) yang masih belum terselesaikan.</li> </ul>	Sumaryono Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono Ellen Theresia Sihotang
3	25 April 2022	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Nexia Kanaka Puradiredja Suhartono (KPS) periode Tahun Buku 2021	Sumaryono Ellen Theresia Sihotang
4	22 Juli 2022	Arahan Persiapan Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) periode Tahun Buku 2022	Sumaryono Candra Fajri Ananda Ellen Theresia Sihotang
5	19 September 2022	Evaluasi Dokumen Penawaran Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) pada dua peserta kompetisi yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Palillingan (PKF Hadiwinata) & Rekan serta KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (KPS) Nexia & Rekan periode Tahun Buku 2022	Sumaryono Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Ellen Theresia Sihotang
6	28 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF);</li> <li>Revitalisasi fungsi SAF berdasarkan hasil studi banding (<i>benchmarking</i>);</li> <li>Pengkinian Standar Operasional dan Prosedur (SOP) SAF;</li> <li>Strategi &amp; Program Pencegahan Internal <i>Fraud</i> (temuan berulang);</li> <li>Kualifikasi petugas pada unit <i>internal control</i> Kantor Cabang.</li> </ul>	Sumaryono Candra Fajri Ananda Ellen Theresia Sihotang
7	28 Desember 2022	Evaluasi <i>Audit Plan</i> 2023	Sumaryono Kusnadi

**FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT**

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

**Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit**

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Komite Audit		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sumaryono	Ketua	April – Desember 2022	6	6	100%
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Desember 2022	7	5	71%
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Desember 2022	7	3	43%
Akhmad Djauhari*	Anggota	Januari – maret 2022	1	1	100%
Ellen Theresia Sihotang**	Anggota	Januari – Oktober 2022	6	6	100%
Kusnadi	Anggota	Oktober – Desember 2022	1	1	100%

\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022

\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022

## Penghasilan Komite Audit

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2022

Nama	Jabatan	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Sumaryono	Ketua	April – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Akhmad Djauhari*	Anggota	Januari – Maret 2022	Pelatihan Evaluasi Implementasi PSAK 71 dalam Pengelolaan Risiko Bank	9-10 Februari 2022 Hotel Le Meridien, Jakarta	Sinergi Indonesia Pintar
Ellen Theresia Sihotang**	Anggota	Januari – Oktober 2022	Diseminasi dengan Bank Indonesia perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris	25 Maret 2022 Ruang Kawi Lantai 2 (Zoom Meeting)	Bank Indonesia
Kusnadi	Anggota	Oktober – Desember 2022	-	-	-

\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022

\*\* Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022

## Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022

### PROGAM KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2022

Komite Audit telah menyusun program kerja pada tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

#### Triwulan I

- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & Fraud dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Pemantauan implementasi Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
- Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan.

#### Triwulan II

- Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik).
- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan progress report diterima Komite Audit.
- Evaluasi penerapan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.

### Triwulan III

- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Pemantauan implementasi Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
- Evaluasi penerapan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.

### Triwulan IV

- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- Evaluasi *Audit Plan* dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan *Audit Plan*.
- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
- Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan *progress report* diterima Komite Audit.

### LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2022

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta BPP Komite Dewan Komisaris. Komite Audit selama periode 2022 telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap sejumlah tindakan kecurangan (*fraud*) selama 2022, dan beberapa hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain laporan Realisasi Rencana Bisnis (RBB), laporan pelaksanaan fungsi audit, penelaahan laporan keuangan perseroan, serta laporan hasil audit internal.
2. Memberikan rekomendasi dan laporan yang berkaitan dengan persetujuan:
  - a. Rencana pemeriksaan audit (*Audit Plan*) dari Divisi Audit Internal
  - b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
  - c. Perubahan rencana pemeriksaan audit.
  - d. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2022.
3. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi Terkait, diantaranya:

#### a. Divisi Audit Internal:

Evaluasi Audit Plan Periode 2022

- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Nexia Kanaka Puradiredja Suhartono (KPS) periode Tahun Buku 2021
- Struktur organisasi Strategi Anti *Fraud* (SAF);
- Revitalisasi fungsi SAF berdasarkan hasil studi banding (*benchmarking*);
- Pengkinian Standar Operasional dan Prosedur (SOP) SAF;
- Strategi & Progam Pencegahan Internal *Fraud* (temuan berulang);
- Kualifikasi petugas pada unit internal *control* Kantor Cabang.
- Evaluasi *Audit Plan* Periode 2023

#### b. Divisi Pengendalian Keuangan

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Nexia Kanaka Puradiredja Suhartono (KPS) periode Tahun Buku 2021

#### c. Divisi Umum

- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Nexia Kanaka Puradiredja Suhartono (KPS) periode Tahun Buku 2021
- Arahan Persiapan Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (Ap) dan/atau Kantor Akuntan Publik (Kap) Periode Tahun Buku 2022

#### d. Divisi Human Capital

- *Standart Level Agreement* (SLA) Proses *Punishment*
- *Matrix Punishment*
- Penetapan *Punishment* sampai dengan Jenjang Organisasi Cabang
- Toleransi Komposisi TAD pada Kantor Cabang
- *Job Requirement unit Quality Assurance* (QA) dan/atau Lini Pertahanan ke dua pada Kantor Cabang

4. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit terkait pada seluruh jenjang organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah mengundang unit kerja terkait yang berkaitan dengan diskusi untuk membahas hal-hal yang sedang menjadi isu terkini di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

### Pernyataan Komite Audit Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Jatim dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

## Komite Remunerasi dan Nominasi

### Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

### Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 060/002/DK/Kep tanggal 15 Januari 2021, yang mengatur mengenai:

1. Peran dan Fungsi
2. Tugas Tanggung Jawab
3. Wewenang
4. Struktur Keanggotaan, Kedudukan dan masa jabatan
5. Tata cara prosedur kerja
6. penyelenggaraan rapat
7. Pelaporan

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
    - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
    - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
    - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*).
    - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.

- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
  - f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
  - g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
  - h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

### 2. Terkait dengan fungsi Nominasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko.
- h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
- j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

## Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

## Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode Januari - April 2022

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2021 - 2022	Komisaris Independen	Economic
Candra Fajri Ananda	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Heru Tjahjono	Anggota		Komisaris	Economic
Revi Adiana S	Anggota		Anggota Ex-Officio (Pemimpin Divisi HC)	Economic

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode April 2022 – 31 Desember 2022

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua		Komisaris Independen	Economic
Suprajarto	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 061/036/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2022 - 2023	Komisaris Independen	Economic
Candra Fajri Ananda	Anggota		Komisaris	Economic
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Haru Tjahjono	Anggota		Komisaris	Economic
Revi Adiana S	Anggota		Anggota Ex- Officio Pemimpin Divisi HC)	Economic

## Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

### Muhammad Mas'ud

Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

### Candra Fajri Ananda

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

### Sumaryono

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

### Heru Tjahjono

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



### Revi Adiana S.

Pemimpin Divisi Human Capital

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Solo pada tahun 1966. Usia 56 tahun per 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi Universitas Wijaya Putra (1996).</li> <li>• Master in Management Program Universita Airlangga (Beasiswa Bank Jatim) (1998).</li> <li>• Financial Budgeting Short Course Program di Australia National University (2002)</li> </ul>
<b>Sertifikasi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</li> <li>• Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun</li> <li>• Sertifikasi Treasury Dealer Level 3 (Advance)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. DR. Soetomo (2001), Pemimpin Cab. Perak (2003), Pemimpin Cab. Bojonegoro (2006), Pemimpin Cab. Kediri (2009), Pemimpin Cab. Malang (2011), Pemimpin Corporate Secretary (2012), Pemimpin Divisi Dana Jasa dan LN (2013), Pemimpin Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (2018).
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak Februari 2021 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 060/59/DIR/HCP/KEP tanggal 15 Februari 2021.
<b>Periode Menjabat</b>	: 15 Februari 2021 – sekarang
<b>Jabatan Rangkap</b>	: Tidak Ada

## Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Suprajarto	Anggota	April 2022 – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana di bidang Manajemen Pemasaran Doctor di bidang Ilmu Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, perbankan
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan <i>Master Degree (MSc.)</i> di bidang <i>Rural Development</i> <i>Doctor Degree (DR)</i> di bidang <i>Rural Development</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan



Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Sumaryono	Anggota	April 2022 – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, perbankan
Heru Tjahjono	Anggota	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang ilmu Teknik Sipil Magister Manajemen Kajian Lingkungan dan Pembangunan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Revi Adiana Silawati	Anggota Ex-officio	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Manajemen Magister Manajemen Teknologi Financial Budgeting Short Course Program	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan Sumber Daya Manusia

### Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	M. Mas'ud	Candra Fajri	Suprajarto	Sumaryono	Heru Tjahjono	Revi Adiana S
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

#### KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	13 Januari 2022	• Pembahasan Tambahan Penghasilan Bonus Kinerja Akhir Tahun 2021	Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda
2	22 April 2022	• Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Komite	Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono
3	27 Mei 2022	• Pembahasan terkait Nomenklatur Jabatan Direksi • Pembahasan terkait proses penjurangan (Pengumuman, Persyaratan, dan sebagainya) • Pembahasan terkait Lembaga Profesional yang akan melaksanakan Uji Kemampuan dan Kepatutan	Suprajarto Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono Sumaryono

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4	30 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Draft Persyaratan Calon Direksi</li> <li>Pembahasan Penetapan Pengumuman Seleksi Direksi</li> </ul>	Suprajarto Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono Sumaryono
5	03 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan kelengkapan organ pendukung Dewan Komisaris khususnya Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum</li> <li>Tindak Lanjut perhatian (<i>concern</i>) Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 04 Jawa Timur terkait keanggotaan Komite Audit dari Pihak Independen non Komisaris yang memiliki latar belakang bidang hukum</li> </ul>	Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Sulam Andjar R Moch. Arifin
6	20 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan Proses Seleksi Calon Direksi Bank Jatim</li> <li>Seleksi Administrasi Calon Direksi Bank Jatim</li> </ul>	Suprajarto Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono Sumaryono
7	27 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Terkait Honorarium Panitia Seleksi</li> <li>Pembahasan Terkait Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) di lingkungan Dewan Komisaris:</li> <li>BPP Remunerasi Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi)</li> <li>BPP Perjalanan Dinas Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi)</li> </ul>	Suprajarto Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono Muhammad Mas'ud Sumaryono Revi Adiana S
8	27 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Pemberian Tunjangan Pendidikan bagi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</li> </ul>	Muhammad Mas'ud Suprajarto Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono Sumaryono Revi Adiana S
9	18 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan terkait Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Remunerasi Pengurus</li> <li>Pembahasan terkait Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Perjalanan Dinas Pengurus</li> </ul>	Suprajarto Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Heru Tjahjono Sumaryono Revi Adiana S
10	30 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Evaluasi Remunerasi Pengurus Bank Jatim</li> <li>Pembahasan <i>Key Performance Indicator</i> Pengurus</li> </ul>	Suprajarto Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Sumaryono Revi Adiana S

#### FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
			Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Muhammad Mas'ud	Ketua	Januari – Desember 2022	10	10	100%
Suprajarto	Anggota	April 2022 – Desember 2022	9	7	77%
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Desember 2022	10	10	100%
Heru Tjahjono	Anggota	Januari – Desember 2022	10	7	70%
Sumaryono	Anggota	April – Desember 2022	9	7	77%
Revi Adiana Silawati	Anggota Ex-Officio	Januari – Desember 2022	10	4	40%



## Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua	Januari – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Suprajarto	Anggota	April 2022 – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Candra Fajri Ananda	Anggota	Januari – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Heru Tjahjono	Anggota	Januari – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono	Anggota	April – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Revi Adiana Silawati	Anggota Ex-Officio	Januari – Desember 2022	Online Workshop Training Corporate Culture untuk Change Leader	15 Februari 2022 / Onlain	IBI (Ikatan Bankir Indonesia)
			Forum Komunikasi Top Leader dengan Tema Agile - Resilience Motivation and Team Building Program	18 Maret 2022 / Propolinggo (Bromo)	Go Orbit
			Becoming extraordinary leader	21 Maret 2022 / Kantor Pusat (Ruang Bromo)	Remaja Tampubolon
			Program Refreshment/penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	25 Maret 2022 / SURABAYA	Strategic Development Group (Sdg)
			Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Dealer Treasury	16 Juli 2022 / Jakarta	Aci fma financial markets association
			Training Program Certified Human Resource Manager (CHRM)	19-22 Juli 2022 / Jakarta	PPM Management
			Ujian Sertifikasi Human Resource - Manager	29 Juli 2022 / Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
			Metaverse, Cryptocurrency - Peluang dan Tantangan di Masa Depan	03 Agustus 2022 / Kantor Pusat (Ruang Bromo)	Bapak Ery Punt Hendraswara - SEVP PT Telkom

## Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 14% dari Gaji Direktur Uama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

## Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

### PROGRAM KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan Sistem serta Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
3. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan
5. Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi).
6. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
7. Melaksanakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya

### PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Komite Remunerasi & Nominasi telah melaksanakan proses nominasi beberapa jabatan pengurus yang lowong antara lain untuk jabatan calon anggota Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan proses seleksi penerimaan calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim bersama Panitia Seleksi yang dibentuk melalui seleksi administrasi sampai dengan *assessment* dengan pihak ketiga (independen).
3. Komite Remunerasi dan Nominasi juga memberikan rekomendasi/ pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam penentuan pihak ketiga yang akan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana *assessment* dalam proses pemilihan calon anggota Komisaris dan Direksi Bank Jatim.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan penilaian/ evaluasi masing-masing kandidat Direksi yang telah disepakati untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diikutkan uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Di samping itu dari sisi kegiatan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga melakukan *review* Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi pengurus beserta fasilitasnya yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.
6. Komite Remunerasi dan Nominasi juga Melakukan beberapa rapat koordinasi terkait pelaksanaan tambahan penghasilan selama tahun 2022.

## Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi telah disajikan pada Sub Judul Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

### Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya

### Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/05/DKM/KEP tanggal 28 Juni 2022, yang mengatur tentang:

1. Landasan Hukum
2. Tujuan Umum
3. Struktur Keanggotaan
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Wewenang
7. Rapat Komite Pemantau Risiko
8. Masa Tugas Anggota Komite Pemantau Risiko
9. Pelaporan

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan tugas pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, serta pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan telaah terhadap kecukupan pengendalian intern Bank secara menyeluruh termasuk kepatuhan terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Melakukan pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen risiko.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap nilai komposit dan predikat hasil *self assessment* kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.
6. Menyampaikan revisi hasil *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang baik Bank secara lengkap kepada regulator.
7. Melakukan telaah atas informasi keuangan dan non keuangan mengenai Bank, rencana bisnis atau rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya terkait manajemen risiko.
8. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup penugasan Komite, dan melaporkan serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

9. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali, dan membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.

### Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite.
4. Bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI) serta unit kerja lain terkait tugas Komite.

### Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa tugas Komite Pemantau Risiko tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 05 Oktober 2021 – 04 April 2022

Nama	Jabatan		Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua	<b>SK Penetapan</b> Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2021 - 2022	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Syafrudin*	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi Akuntansi
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 05 April 2022 – 02 Oktober 2022

Nama	Jabatan		Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua	<b>SK Penetapan</b> Surat Keputusan Direksi Nomor 061/036/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2022 - 2023	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Administrasi Negara
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Administrasi Niaga
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

### Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 03 Oktober 2022 – 31 Desember 2022

Nama	Jabatan		Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua	<b>SK Penetapan</b> Surat Keputusan Direksi Nomor 061/200/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Administrasi Negara
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Administrasi Niaga
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

### Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

<p><b>Candra Fajri Ananda</b> Ketua Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>
<p><b>Muhammad Mas'ud</b> Anggota Komite Pemantau Risiko Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>
<p><b>Sumaryono</b> Anggota Komite Pemantau Risiko Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p>



## Sulam Andjar Rochim

Anggota Komite Pemantau Risiko

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Malang
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Pasuruan, 03 Oktober 1962/60 tahun per 31 Desember 2022
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitas Brawijaya Malang Program Diploma Program Pendidikan Ahli Perusahaan (saat ini Program Vokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (1985)</li> <li>• Universitas Gajayana Malang (1990)</li> <li>• Pusat Pengembangan Manajemen dan Teknologi Terapan (PPMTT) Malang – Program Master Business in Administration (1992)</li> </ul>
<b>Sertifikasi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun – Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP)</li> <li>• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)</li> <li>• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)</li> <li>• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Cabang Bangkalan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Juli 2010 - Juli 2011)</li> <li>• Pemimpin Cabang Jakarta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Juli 2011 - Juli 2012)</li> <li>• Pemimpin Sub Divisi Asset Liability Management dan Financial Institution Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Juli 2012 - Maret 2015)</li> <li>• Pemimpin Sub Divisi di Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Maret 2015 - Mei 2016)</li> <li>• Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Mei 2016 - Maret 2017)</li> <li>• Pemimpin Sub Divisi Komunikasi Internal di Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Maret 2017 - Januari 2019)</li> <li>• Pemimpin Sub Divisi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Divisi Kepatuhan dan Tatakelola PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Januari 2019 - Oktober 2020)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP
<b>Periode Menjabat</b>	: Tahun 2021 – 2025
<b>Jabatan Rangkap</b>	: Komisaris Utama BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)



## Moch. Arifin

Anggota Komite Pemantau Risiko

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Surabaya, 02 Februari 1971/51 tahun per 31 Desember 2022
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: Universitas Bhayangkara Surabaya
<b>Sertifikasi</b>	: 1. Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS) 2. Kartu Tanda Advokat (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
<b>Pengalaman Kerja</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advokat (1996 – Sekarang)</li> <li>• Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang)</li> <li>• Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang)</li> <li>• Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang)</li> <li>• Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang)</li> <li>• Konsultan Hukum Bank Yudha Bhakti (2005 – 2015)</li> <li>• Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, (2012 – 2018)</li> <li>• Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara IX, Surakarta (2014 – 2020)</li> <li>• Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Surat Keputusan Direksi Nomor 061/200/DIR/HCP/KEP
<b>Periode Menjabat</b>	: Tahun 2022 – 2026
<b>Jabatan Rangkap</b>	: Advokat

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Candra Fajri Ananda	Ketua	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan <i>Master Degree (MSc.)</i> di bidang <i>Rural Development</i> <i>Doctor Degree (DR)</i> di bidang <i>Rural Development</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Sumaryono	Anggota	April – Desember 2022	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Syafruddin*	Anggota Pihak Independen	Januari – Maret 2022	Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi Magister Manajemen Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Sulam Andjar Rochim	Anggota Pihak Independen	Januari – Desember 2022	Sarjana di Bidang Ekonomi Akuntansi Master Business in Administration	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Moch. Arifin	Anggota Pihak Independen	Oktober – Desember 2022	Sarjana di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022



## Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

**Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko**

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Candra Fajri Ananda	Syafruddin	Sulam Andjar Rochim	Moch. Arifin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

## Rapat Komite Pemantau Risiko

### KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  - b. hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
  - c. dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
  - d. dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta unit kerja lain dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
2. Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
  - a. musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
  - b. dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
  - c. perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.

### AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2022, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

**Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko**

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	11 Januari 2022	Evaluasi Kinerja dan Profil Risiko Divisi Unit Syariah sampai dengan Desember 2021	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Syafuruddin Sulam Andjar R Achmad Djauhari Ellen Theresia
2	7 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Risk Management Plan</i> tahun 2022</li> <li>• Rencana Kerja Kepatuhan tahun 2022</li> <li>• Portofolio Debitur <i>Large Exposures</i></li> </ul>	Candra Fajri ananda Muhammaad Mas'ud Sumaryono Heru Tjahjono Sulam Andjar Rochim Ellen Theresia
3	28 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divisi Human Capital: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Standart Level Agreement (SLA) Proses Punishment</i></li> <li>• <i>Matrix Punishment</i></li> <li>• Penetapan <i>Punishment</i> sampai dengan Jenjang Organisasi Cabang</li> <li>• Toleransi Komposisi TAD pada Kantor Cabang</li> <li>• <i>Job Requirement</i> unit <i>Quality Assurance (QA dan/atau Lini Pertahanan ke dua</i> pada Kantor Cabang</li> </ul> </li> <li>2. Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil Risiko Kepatuhan Cabang</li> <li>• Tindak Lanjut Temuan Audit</li> <li>• Progam Kerja Pembangunan Budaya Kepatuhan</li> <li>• Akses Portal kepatuhan</li> <li>• Penataan kembali BPP Bidang Perkreditan &amp; Pembiayaan</li> </ul> </li> <li>3. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) &amp; Petunjuk Teknis (Juknis) Aplikasi <i>Loss Event Database (LED)</i></li> <li>• Profil Risiko Cabang</li> <li>• Pengembangan Budaya Risiko</li> </ul> </li> </ol>	Candra Fajri ananda Sumaryono Sulam Andjar Rochim Ellen Theresia
4	8 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan rencana Tindak (<i>Action Plan</i>) Pemenuhan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terbuka <i>Standart</i> Pasar Modal Asean</li> </ul>	Candra Fajri ananda Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin Kusnadi
5	22 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mapping</i> Risiko Hukum dan Reputasi terhadap kasus <i>fraud</i> yang telah ditangani oleh Komite Bidang Hukuman Jabatan.</li> <li>• Mitigasi dan solusi tindakan hukum terhadap kasus <i>fraud</i> yang ada di Bank Jatim.</li> </ul>	Candra Fajri ananda Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin Kusnadi
6	30 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Governance and Compliance Plan</i></li> <li>• <i>Credit Plan 2023 (KKS)</i></li> <li>• <i>Credit Plan 2023 (Konsumer)</i></li> <li>• <i>Credit Plan 2023 (KMRP)</i></li> <li>• Optimalisasi <i>Internal Business Process</i> Sebagai Sarana Pendukung Bisnis Bank</li> <li>• <i>Risk Management Plan 2023</i></li> <li>• <i>Credit Recovery Plan 2023</i></li> <li>• Risiko Bisnis 2023</li> </ul>	Suprajarto Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin Kusnadi

**FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

**Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko**

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
			Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Candra Fajri Ananda	Ketua	Januari – Desember 2022	6	5	83%
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari - Desember 2022	6	2	33%
Sumaryono	Anggota	April – Desember 2022	5	4	80%
Syafruddin*	Anggota	Januari – Maret 2022	1	1	100%
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Januari – Desember 2022	6	6	100%
Moch. Arifin	Anggota	Oktober – Desember 2022	3	3	100%

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

**Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko**

Nama	Jabatan	Periode	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Candra Fajri Ananda	Ketua	Januari – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Januari - Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono	Anggota	April – Desember 2022	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Syafruddin*	Anggota	Januari – Maret 2022	Pelatihan Evaluasi Implementasi PSAK 71 dalam Pengelolaan Risiko Bank	9-10 Februari 2022 Hotel Le Meridien, Jakarta	Sinergi Indonesia Pintar
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Januari – Desember 2022	Diseminasi dengan Bank Indonesia perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris	25 Maret 2022 Ruang Kawi Lantai 2 (Zoom Meeting)	Bank Indonesia
Moch. Arifin	Anggota	Oktober – Desember 2022	-	-	-

\*Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 17 Maret 2022

**Penghasilan Komite Pemantau Risiko**

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

## Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

### PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2022

Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja pada tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

#### Triwulan I

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).

#### Triwulan II

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko.
- Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori *large exposure*, dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait.
- Pemantauan terhadap debitur *large exposure* di atas Rp100 milyar.

#### Triwulan III

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- Pemantauan terhadap debitur *large exposure* di atas Rp100 milyar.
- Pemantauan dan Evaluasi *contingency plan* pada *Business Continuity Management System (BCMS)*.
- *Review* dan Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi Kebijakan Produk Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (KPA APU-PPT).

#### Triwulan IV

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- *Review* Corplan, RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisari.

- *Review* dan Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi Kebijakan Pokok Bank Kebijakan Strategis Tata Kelola (KPB KST).
- *Review* dan Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi Pembiayaan Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPS) Perkreditan atau Pembiayaan (PAP).

### LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2022

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengacu pada BPP Komite Dewan Komisaris serta Piagam Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Komite Pemantau Risiko selama periode 2022 telah melaksanakan rapat sejumlah 6 (enam) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

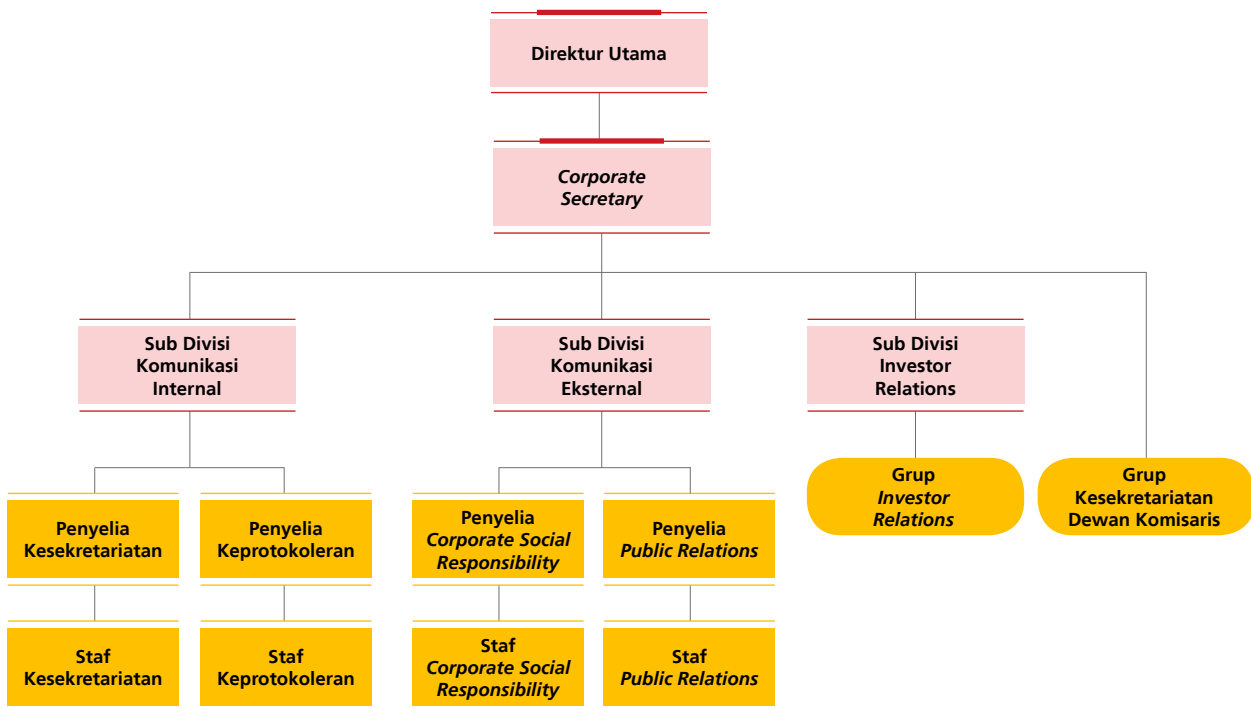
1. Melakukan pembahasan dalam rapat dan menyampaikan nota pemberian pendapat dan saran kepada manajemen yang dilakukan sekali terkait dengan:
  - a. Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank.
  - b. Evaluasi Pencapaian Triwulan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
2. Kunjungan ke Kantor Cabang dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komisaris, terhadap:
  - a. Pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja dan kantor cabang.
  - b. Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Manajemen Risiko baik di unit kerja kantor pusat maupun di kantor cabang.
3. Rapat Koordinasi Dengan Divisi Terkait, diantaranya:
  - a. Unit Usaha Syariah:
    - 1) Evaluasi Kinerja dan Profil Risiko Unit Usaha Syariah
  - b. Divisi Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi
    - 1) Portofolio Debitur *Large Exposures*
  - c. Divisi Human Capital:
    - 1) *Standart Level Agreement (SLA) Proses Punishment*
    - 2) *Matrix Punishment*
    - 3) Penetapan *Punishment* sampai dengan Jenjang Organisasi Cabang
    - 4) Toleransi Komposisi TAD pada Kantor Cabang
    - 5) *Job Requirement* unit *Quality Assurance (QA)* dan/ atau Lini Pertahanan ke dua pada Kantor Cabang
  - d. Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola
    - 1) Rencana Kinerja Kepatuhan Tahun 2022
    - 2) Profil Risiko Kepatuhan Cabang
    - 3) Tindak Lanjut Temuan Audit
    - 4) Program Kerja Pembangunan Budaya Kepatuhan
    - 5) Akses Portal kepatuhan
    - 6) Penataan kembali BPP Bidang Perkreditan & Pembiayaan
  - e. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan
    - 1) *Risk Management Plan* Tahun 2022
    - 2) Revitalisasi *Standart* Operasional Prosedur (SOP) & Petunjuk Teknis (Juknis) Aplikasi *Loss Event Database (LED)*

- 3) Profil Risiko Cabang
- 4) Pengembangan Budaya Risiko
- f. Komite Bidang Hukuman Jabatan (KBHJ)
  - 1) *Mapping* Risiko Hukum dan Reputasi terhadap kasus *fraud* yang telah ditangani oleh Komite Bidang Hukuman Jabatan.
  - 2) Mitigasi dan solusi tindakan hukum terhadap kasus *fraud* yang ada di Bank Jatim.
4. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan fungsi SKMR, SKK, SKL dan SKAI sebagai lini pertahanan kedua dan ketiga dalam penerapan konsep *three line of defence*.
5. Memberikan pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori *large exposures*
6. Memberikan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait
7. Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka:
  - a. Pemantauan dan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
  - b. *Standart Level Agreement* (SLA) Proses *Punishment*
  - c. *Matrix Punishment*
  - d. Penetapan *Punishment* sampai dengan Jenjang Organisasi Cabang
  - e. Revitalisasi fungsi Strategi Anti *Fraud* (SAF) berdasarkan hasil studi banding (*benchmarking*)
  - f. Pengkinian Standar Operasional dan Prosedur (SOP) SAF
  - g. Strategi dan Progam Pencegahan Internal *Fraud* (temuan berulang)
  - h. Kualifikasi petugas pada unit internal *control* Kantor Cabang.
8. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan strategi anti *fraud* pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta intregasi rencana strategis Bank.

## Organ dan Komite di Bawah Direksi

### Sekretaris Perusahaan

#### Struktur Sekretaris Perusahaan



#### Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan pada masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Komunikasi Internal, Sub Divisi Komunikasi Eksternal, dan Sub Divisi *Investor Relation* serta 1 Grup Kesekretariatan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan.
  - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

### Profil Sekretaris Perusahaan



#### Budi Sumarsono

Pemimpin Corporate Secretary

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Madiun pada tahun 1966. Usia 56 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Keuangan dari Universitas Muhammadiyah (1992).</li> <li>• Magister Ilmu Hukum dari Universitas Merdeka (1999)</li> <li>• Magister Manajemen dari Universitas Widyia Jayakarta (2000)</li> </ul>
<b>Sertifikasi</b>	: Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 4
<b>Pengalaman Kerja</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cab. Probolinggo (2014), Pemimpin Cab. Gresik (2015), Pemimpin Bidang Operasional Cab. Utama (2017), Pjs Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi <i>International Banking</i> (2018), Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> (2019), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (2021).
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tanggal 2 Juni 2022 menjabat sebagai Pemimpin Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.

### Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2022, Corporate Secretary Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Webinar	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat	11 Januari 2022, Online	PT Bursa Efek Indonesia
Webinar	<i>Managing Subsidiaries by Holding Co and Current Practices by Group Legal</i>	11 Januari 2022, Online	ICSA

Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Webinar	Peraturan Nomor I-N tentang Penghapusan Pencatatan ( <i>Delisting</i> ) Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan Sukuk dan Pencatatan Kembali ( <i>Relisting</i> ) Saham	19 Januari 2022, Online	PT Bursa Efek Indonesia
Webinar	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021	31 Januari 2022, Online	PT Bursa Efek Indonesia
Webinar	Pendalaman <i>Annual Report</i> (POJK 29/2016 & SEOJK 16/2021) dan <i>Sustainability Report</i> (POJK 51/2017)	3 Februari 2022, Online	ICSA
Webinar	Sosialisasi Peraturan bagi Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham/ Obligasi	17 Februari 2022, Online	Otoritas Jasa Keuangan
Webinar	Sosialisasi POJK Nomor 4 & SEOJK Nomor 4 2022	25 Maret 2022, Online	PT Bursa Efek Indonesia
Webinar	Sosialisasi POJK 4 & SEOJK 4 2022	25 April 2022, Online	PT Bursa Efek Indonesia
Webinar	Sosialisasi Ketentuan Free Float dan Pelaporannya: Perubahan Informasi Format Laporan E009 - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham	24 Juni 2022, Online	PT Bursa Efek Indonesia
Webinar	Kolaborasi Internal Auditor dan Sekretaris Perusahaan untuk Meningkatkan ERM	16 Agustus 2022, Online	ICSA
Webinar	POJK 14 th 2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK 15 th 2022 Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka	22 September 2022, Online	AEI
Sosialisasi	Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	11 Oktober 2022, Online	PT Bursa Efek Indonesia
Workshop	Pendalaman dan Implementasi Terkait Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 dan POJK nomor 34/POJK.04/2014	15 November, Online	AEI

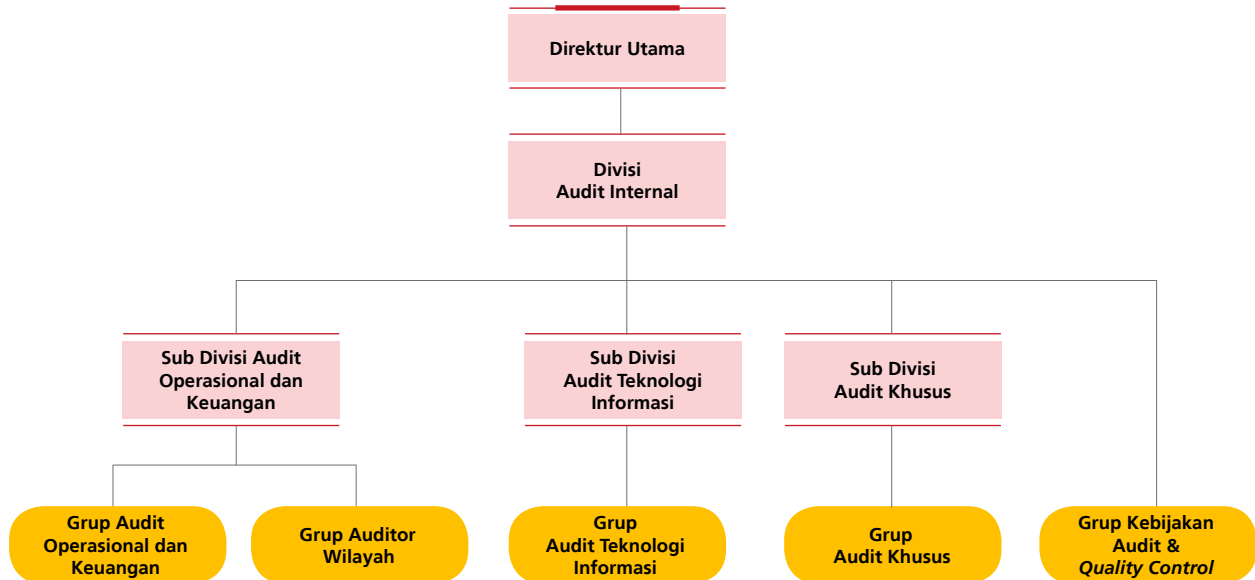
## Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 17 Maret 2021, RUPS LB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan *scan barcode* stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker *barcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
- Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 4 (empat) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manager Investasi Asset Management, Manager Investasi Dana Pensiun, Manager Investasi Perusahaan Asuransi, dan Fund Manager lainnya.
- Melakukan Keikutsertaan *Public Expose Live* yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 September 2022.
- Melakukan keikutsertaan *Capital Market Summit* yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13-15 Oktober 2022.
- Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
- Menyelenggarakan media *gathering* sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
- Melakukan koordinasi penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Direksi dan Komisaris membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
- Mengakomodir permohonan mahasiswa maupun siswa dalam pengajuan Praktik Kerja Lapangan serta penelitian di Bank Jatim.
- Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
- Melakukan koordinasi tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

## Divisi Audit Internal

### Struktur Organisasi Divisi Audit Internal



### Kedudukan Divisi Audit Internal Dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Internal telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang *Internal Audit Charter* Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
3. Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP, tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
4. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. No. 061/03/60/DIR/AUI/KEP tanggal 27 Desember 2022 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Aktivitas Audit Internal.
5. Surat Keputusan Direksi No. 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
6. Surat Keputusan Direksi No. 058/234/DIR/AUI/KEP tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. 060/02/04/DIR/AUI/KEP Tanggal 30 November 2021 tentang Kebijakan Produk dan Aktivitas Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas dan wewenang Divisi Audit Internal termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli 2022 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.



## Profil Pemimpin Divisi Audit Internal



### Ratna Hastutik

Pemimpin Divisi Audit Internal

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Sekardangan
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Bojonegoro pada tahun 1965. Usia 58 tahun per Juni 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Psikologi Universitas Putra Bangsa, Surabaya (1990)</li> <li>• Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2020)</li> </ul>
<b>Riwayat Jabatan</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pjs. Pemimpin Divisi Audit Internal tahun 2021</li> <li>2. Pemimpin Cabang, Cabang Madiun tahun 2017</li> <li>3. Pemimpin Cabang, Cabang Ngawi tahun 2014</li> <li>4. Pjs. Pemimpin Cabang Ngawi, Cabang Ngawi tahun 2013</li> <li>5. Pjs. Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Divisi SDM tahun 2012</li> <li>6. Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sampang tahun 2010</li> <li>7. Pemimpin Cabang Pembantu Krian Cabang Sidoarjo tahun 2009</li> <li>8. Penyelia Umum/SDM Cabang Sidoarjo tahun 2006</li> <li>9. Penyelia Nasabah &amp; Teller Cabang Sidoarjo tahun 2006</li> <li>10. Penyelia Umum/SDM Cabang Sidoarjo tahun 2003</li> <li>11. Pengelola Pendidikan, Pelatihan &amp; Pengembangan Divisi SDM tahun 2002</li> <li>12. Staf Pengel. Pengemb. Pegawai. Pelatihan &amp; Pengembangan Divisi SDM tahun 2001</li> <li>13. Karyawan Si Pengembangan Bag. Bagdiklat Biro Sumber Daya Manusia tahun 1994</li> </ol>
<b>Sertifikasi Internal Audit</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan CPIA (Certified Practitioner of Audit Angkatan Ke-21) "YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)" Tahun 2021</li> <li>2. Public Training Online Pelatihan Guide To CAFM Certification &amp; CAFM Examination Serta Sertifikasi Anti Fraud Unit Internal Bank Tahun 2021 "Asia Anti Fraud" Tahun 2021</li> <li>3. Pelatihan Dasar-Dasar Audit "Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan" Tahun 2021</li> <li>4. Pelatihan Fraud Auditing 1 (Fa-1) "LPFA(Lembaga Pengembangan Fraud Auditing)" Tahun 2021</li> </ol>
<b>Pelatihan</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program <i>Refreshment</i>/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko "BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)" Tahun 2016</li> <li>2. <i>Inhouse Training Risk Culture "One Point Indonesia"</i> Tahun 2016</li> <li>3. Pelatihan Pengembangan <i>Consumer Banking Business &amp; Casa "PT WYR Solusi Inovasi"</i> Tahun 2016</li> <li>4. Pelatihan <i>Trade Finance "One Point Indonesia"</i> Tahun 2016</li> <li>5. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Level-4 "Lembaga Manajemen Surabaya (LMS)" Tahun 2017</li> <li>6. <i>Assessment</i> Pejabat Eksekutif Angkatan 2 "Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)" Tahun 2019</li> <li>7. <i>Breakthrough Workshop Communication, Persuasion, Coaching Skill Improvement &amp; Culture Program Execution" (Corporate Culture)</i> "IBI (Ikatan Bankir Indonesia) – BCC" Tahun 2019</li> <li>8. Pelatihan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pemberian Kredit "PT Media Edutama Indonesia (Mei)" Tahun 2019</li> <li>9. <i>Esq Digi Word Outstanding Mentality</i> - Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian "Esq - Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian" Tahun 2020</li> <li>10. Webinar Ikatan Auditor Intern Bank (Iaib) Dengan Topik "Peran Internal Audit Dalam Penguatan Tata Kelola Pada Industri Perbankan Selama dan Setelah Pandemi Covid-19" Otoritas Jasa Keuangan - OJK" Tahun 2021</li> <li>11. <i>Online Workshop Training Corporate Culture</i> untuk <i>Change Leader</i> "IBI" (Ikatan Bankir Indonesia) Tahun 2022</li> <li>12. Forum Komunikasi <i>Top Leader</i> dengan Tema "<i>Agile-Resilience Motivation and Team Building Program "Go Orbit"</i>" Tahun 2022</li> <li>13. <i>Becoming Extraordinary Leader</i> "Remaja Tampubolon" Tahun 2022</li> <li>14. Virtual Training Kredit Ritel: Risiko Utama &amp; Fokus Audit "IAIB" (Ikatan Auditor Intern Bank) Tahun 2022</li> <li>15. Virtual Training Data Analytic Teknik, Implementasi dan <i>Machine Learning</i>, IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank) Tahun 2022</li> </ol>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Pemimpin Divisi Audit Internal (Sesuai SK. No. 060/319/DIR/HCP/KEP Tanggal 31 Desember 2021)

## Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Internal Audit Charter

Divisi Audit Internal telah memiliki *Internal Audit Charter* yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2022.

*Internal Audit Charter* disusun berdasarkan.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang penerapan strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum sebagaimana perubahan terakhir peraturan otoritas jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2020 tanggal 24 Maret 2020.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal sistem pembayaran.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 23/06/PBI/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal penyedia jasa pembayaran.

*Internal Audit Charter* dibuat untuk memberikan gambaran/ pedoman terkait Visi, Misi, dan fungsi Kedudukan dalam Organisasi, Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pernyataan Kemandirian, Aktivitas Audit Internal dan Investigasi, serta Pelaporan.

## Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai

risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.

2. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Memantau pelaksanaan Internal Audit pada perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.
2. Menyampaikan laporan Internal Audit terintegrasi kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

## Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi bank serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
4. Melakukan akses terhadap seluruh informasi, karyawan dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/ catatan karyawan sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

## Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Divisi Audit Internal terdiri dari Pemimpin Divisi yang membawahi 3 (tiga) Pimpinan Sub Divisi dan Grup Kebijakan Audit & *Quality Control* di bawah koordinasi langsung Pemimpin Divisi Audit Internal. Adapun komposisi personil Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut.

**Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal**

Jabatan	Jumlah
Junior Auditor	44
Auditor	16
Senior Auditor	7
Pemimpin Sub Divisi Audit	3
Pemimpin Divisi Audit Internal	1
<b>Total</b>	<b>71</b>



## Program Peningkatan Kompetensi Divisi Audit Internal

No.	Tanggal Pelatihan/Sertifikasi	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Sertifikasi
1	27 Januari 2022	<i>In House Training</i> Kredit Komersial
2	05 Maret 2022	Pelatihan Perangkat HSM Thales Luna S700
3	26 Maret 2022	Pelatihan Kubernetes
4	21 Mei 2022	Pelatihan Transfer <i>Knowledge</i> Infrastruktur BI-Fast
5	17 Juni 2022	Sertifikasi PIA
6	04 Juli 2022	<i>Workshop Counterparty Credit Line</i>
7	08 September 2022	Pelatihan dan <i>Workshop</i> ISO 27001:2013
8	05 Desember 2022	Sertifikasi CFrA

## Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
BSMR 1	20
BSMR 2	11
BSMR 3	7
BSMR 4	3
CAFM	1
CPIA	17
CBIA	13
CISA	1
TREASURY DEALER	1
IT-IL V3	3
CCNA	1
Perkreditan	1

## Kode Etik Auditor

Divisi Audit Internal harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Internal dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Internal di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit. Divisi Audit Internal tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.

## Independensi

Divisi Audit Internal memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal.
2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.

4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Internal harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Internal.

#### Objektivitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

#### Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

## Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2022

### METODE AUDIT

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasi, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bouwheer*, dan lainnya).

### Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2022

Kegiatan Audit pada tahun 2022 sesuai Rencana Kerja Audit Divisi Audit Internal (*Audit Plan*) Tahun 2022 No. 061/001/AUI/AUDITPLAN tanggal 11 Januari 2022. Telah dilaksanakan pemeriksaan general audit di Kantor Cabang konvensional sebanyak 41 (empat puluh satu), Kantor Cabang Syariah sebanyak 7 (tujuh) dan Kantor Pusat Bank Jatim.

### Pelaksanaan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Divisi Audit Internal dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Selama tahun 2022, Divisi Audit Internal telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Rapat
1.	<i>Kick Off Audit Plan</i>	1
2.	Rapat Komite Audit dan Dewan Komisaris	3
3.	<i>Exit Meeting</i> Cabang dan Divisi	78

## Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Divisi Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut  
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2. Analisis kecukupan tindak lanjut  
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindak lanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.
3. Pelaporan Tindak Lanjut  
Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Pemimpin Divisi Audit internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindasan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.
4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan General Audit.  
Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola, dan secara berkala Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut temuan dengan mengundang Divisi Audit Internal.

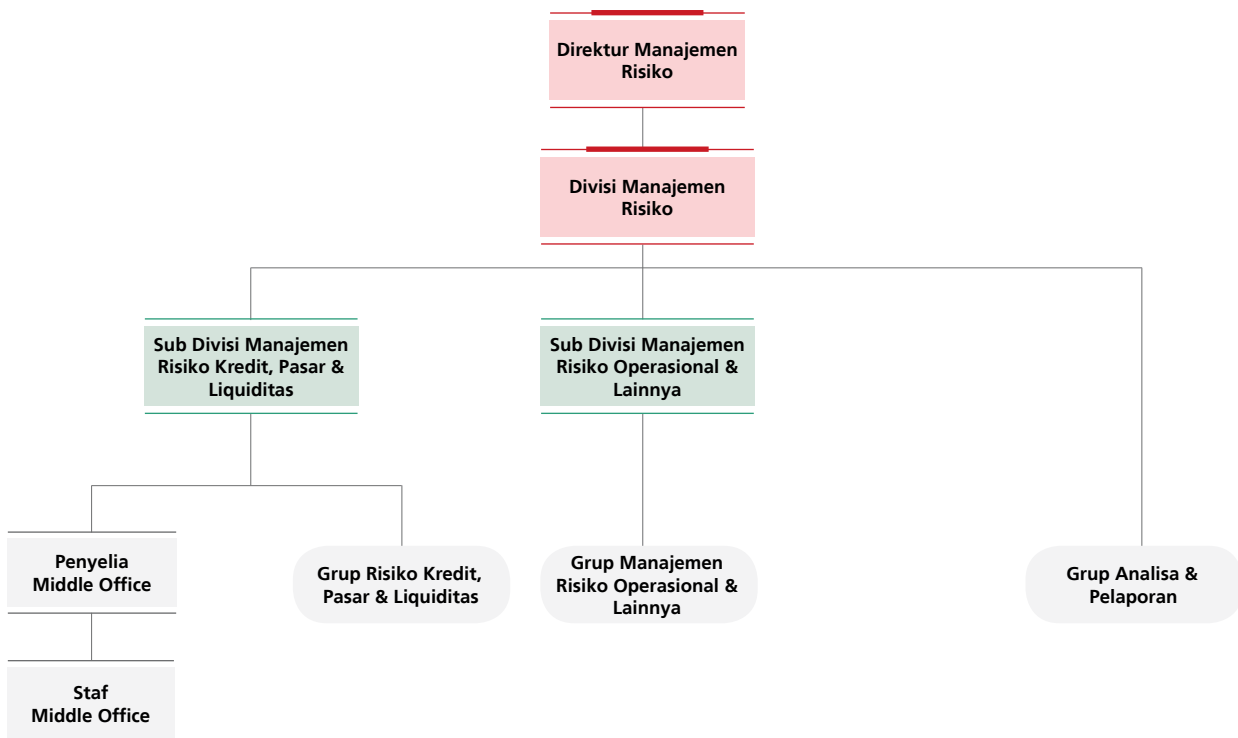
Adapun jumlah temuan dan tindak lanjut hasil audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah Temuan	Selesai Ditindaklanjuti	Proses Pantau
Divisi dan Cabang	7.061	6.771	290

## Divisi Manajemen Risiko

### Struktur Divisi Manajemen Risiko

Struktur Divisi Manajemen Risiko terdiri dari Direktur Manajemen Risiko yang membawahi Divisi Manajemen Risiko yang terdiri dari Subdivisi Manajemen Risiko Kredit, Pasar & Likuiditas serta Subdivisi Manajemen Risiko Operasional & Lainnya.



## Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Mendesaian dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau Eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *Stress Testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan
7. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit kerja termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada *risk-taking unit* dan/atau kepada komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, KPMM sesuai Profil Risiko kepada Direktur utama dan Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses penerapan Manajemen Risiko.

## Profil Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko tahun 2022 dijabat oleh Bapak Wardhana Suryaatmaja.



### Wardhana Suryaatmaja

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Surabaya pada tahun 1967. Usia 55 tahun per Desember 2022
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995).</li> <li>• Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).</li> </ul>
<b>Sertifikasi</b>	: Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
<b>Pengalaman Kerja</b>	: <p>Bergabung di Bank Jatim tahun 1993, sebelum menempati posisi saat ini beliau pernah menjabat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2022 – sekarang)</li> <li>• Pemimpin Divisi Umum ( 2019 – 2022)</li> <li>• Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2018-2019)</li> <li>• Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2017-2018)</li> <li>• Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2015-2017)</li> <li>• Pemimpin Cabang Syariah Madiun (2015-2015)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 bulan Mei tahun 2022.



## Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	Manajemen Risiko Perbankan	Juni 2022
2	Pemahaman <i>Loan Exposure Limit</i> sesuai POJK No 32/POJK.03/2018 bagi Bank Umum	Juli 2022
3	Pengelolaan <i>Liquidity Risk</i> untuk kondisi BAU, <i>stress</i> maupun pemenuhan ketentuan regulator (Basel III – LCR, NFSR dan ILAPP)	Juli 2022
4	<i>Counterparty Credit Line: Managing Credit Risk in Treasury Transactions</i>	Juli 2022
5	<i>Metaverse, Cryptocurrency</i> - Peluang dan Tantangan di Masa Depan	Agustus 2022
6	Public Training “ <i>Metadata Apolo dan Antasena</i> ”	Agustus 2022
7	<i>Market Risk &amp; Bank Marketable Financial Exposure</i>	September 2022
8	Pengelolaan Portofolio Surat Berharga Kategori <i>Available For Sale (AFS)</i> atau <i>Fair Value Through Other Comprehensive Income</i>	November 2022

## Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Sertifikasi	Jabatan	Jumlah
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Direksi	5
		Pemimpin Divisi	11
		Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	1
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	Pemimpin Divisi Setingkat	9
		Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	77
		Senior/Pemimpin Cabang Pembantu Setingkat	1
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	27
		Senior/Pemimpin Cabang Pembantu Setingkat	218
		Officer/Penyelia Setingkat	4
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Staf Setingkat	3
		Komisaris	3
		Senior/Pemimpin Cabang Pembantu Setingkat	44
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Officer/Penyelia Setingkat	750
		Staf Setingkat	17
		Officer/Penyelia Setingkat	82
		Staf Setingkat	248

## Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2022

Selama tahun 2022, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Selaras dengan kebijakan *rule making rule*, Divisi Manajemen Risiko berupaya memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku melalui penyusunan dan *review* kebijakan manajemen risiko baik Kebijakan Pokok dan Aktivitas, *Standard Operating Procedure* maupun Petunjuk Teknis.
- Menyusun Kajian Risiko Produk / Aktivitas Baru maupun *Existing*.
- Melaksanakan Komite Manajemen Risiko.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Pihak Regulator.
- Menyusun *Stress Test*.
- Mereview metodologi dalam penilaian Parameter Tingkat Kesehatan Bank.
- Melakukan Pemantauan Aktivitas Manajemen Risiko.
- Melakukan *review* dan pengkinian Limit Risiko.

9. Pemenuhan ketentuan regulasi terkait perubahan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional.
10. Peningkatan Kualitas SDM melalui program pelatihan baik *Public Training* maupun *In House Training* serta Sertifikasi Manajemen Risiko.
11. Melaksanakan program penguatan budaya risiko dalam rangka meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko yang dihadapi di masing-masing unit kerjanya.

### Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/93/DIR/CSE/KEP tanggal 16 Maret 2021 tentang Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka Komite Direksi Bank Jatim tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Kepegawaian
4. Komite Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee / ITSC*)
5. Komite Kredit
  - Komite Implementasi Kredit;
  - Komite Penyelamatan Kredit;
  - Komite Penyelesaian Kredit;
  - Komite Hapus Buku Kredit;
  - Komite *Credit Line*;
  - Komite *Term Loan Facility*;
  - Komite Implementasi Pembiayaan
  - Komite Penyelamatan Pembiayaan
  - Komite Penyelesaian Pembiayaan
  - Komite Hapus Buku Pembiayaan
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Produk, Jaringan dan Prosedur:
  - a. Komite PJP Bidang Produk
  - b. Komite PJP Bidang Jaringan
  - c. Komite PJP Bidang Prosedur

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah mencabut Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Terdapat pengaturan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 diantaranya bahwa hal-hal yang dilakukan selama masa transisi diantaranya mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia termasuk *transfer of knowledge* dan pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Pemenuhan dan pengkinian ketentuan internal (KPA, SOP, Juknis, Uraian Jabatan dan ketentuan lainnya yang terkait);
3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (termasuk sistem informasi dan teknologi).

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Direksi Nomor 061/014/DIR/PRS/SE tanggal 7 Desember 2022 perihal Tahap Pra-Transisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Jatim, yang mengatur diantaranya:

1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Divisi pada ketentuan internal (KPA/SOP/Juknis) yang ada dinyatakan tetap berlaku. Apabila terdapat perubahan/perpindahan nomenklatur divisi untuk disesuaikan dengan Direktur bidang yang membidangi.
2. Atas implementasi struktur organisasi tahap pra transisi yang berdampak pada ketentuan internal, untuk dilakukan pengkinian dengan jangka waktu 2 bulan terhitung sejak Surat Edaran Direksi tentang Struktur Organisasi Tahap Pra Transisi ditetapkan.

### Asset Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Jabatan	Diisi oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Keuangan	Mempunyai hak suara
Sekretaris Anggota Tetap	Pemimpin Divisi Tresuri Direktur Komersial & Korporasi Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah Direktur Risiko Bisnis Direktur TI & Operasi Seluruh Pemimpin Divisi selain undangan Pemimpin Cabang Utama	Mempunyai hak suara





Jabatan	Diisi oleh	Status Hak Suara
Undangan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Pemimpin <i>Human Capital</i> Pemimpin Divisi Audit Internal Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola Pemimpin Divisi Hukum Narasumber internal maupun eksternal (misalnya Cabang selain anggota, Konsultan)	

#### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Penyusunan strategi dan kebijakan atas pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar.
2. Mereview struktur neraca atas *exposure asset* dan *liabilities* agar sesuai dengan rencana bisnis bank dan limit risiko yang telah ditetapkan.
3. Mereview perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
4. Melakukan kaji ulang/*review* terkait *pricing* suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan/penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan yang ditetapkan.
5. Mengevaluasi, mengembangkan, dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan:
  - a. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*).
  - b. Risiko Suku Bunga (*interest risk*).
  - c. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).
6. Mengevaluasi dan menetapkan strategi portofolio *banking book* berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan sesuai dengan kondisi terkini dengan tetap mempertimbangkan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Nilai Tukar.
7. Mereview dan menetapkan suku bunga pinjaman dan dana serta *list & term of condition*-nya sesuai dengan usulan, kajian dan wewenang masing-masing divisi yang membidangi.
8. Mereview dan menetapkan strategi posisi Cadangan Likuiditas Bank.
9. Mereview dan menetapkan strategi posisi *gap* beserta instrumennya.

10. Mereview dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang.
11. Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang.
12. Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap target/tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
13. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *asset liability management*.

#### PROFIL ANGGOTA ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Profil Anggota Asset Liability Committee (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

#### PERNYATAAN INDEPENDENSI ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

#### RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

##### Kebijakan Rapat

Bank rutin mengadakan Rapat ALCO (Asset & Liability Committee) setiap bulan. Agenda rapat ALCO dipimpin Ketua ALCO dan/atau Ketua pengganti ALCO serta dihadiri oleh anggota ALCO dan undangan. Forum Rapat ALCO telah memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan atau kebijakan manajemen terkait Komite di bawah Direksi. Agenda Rapat ALCO dari masing-masing Divisi Bisnis telah diputuskan dalam forum ALCO serta telah sesuai dengan kebijakan *pricing* serta kebutuhan bisnis Bank.

**Pelaksanaan Rapat**

No	Komite ALCO	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
1	25 Januari 2022	- <i>List of Term &amp; Condition</i> Tabungan	Divisi Operasi	1	Disetujui	85.7%
		- Suku Bunga Skim Kredit Korporasi Suku Bunga pembiayaan umum produktif	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui	85.7%
		- <i>List of Term &amp; Condition E-Money</i> - <i>List of Term &amp; Condition BI-Fast</i>	Divisi Dana & Jasa	2	Disetujui	85.7%
2	21 Februari 2022	- <i>List of Term &amp; Condition</i> Samsat Kampus (syariah mirroring)	Divisi Dana & Jasa	1	Disetujui	100%
		- <i>List of Term &amp; Condition KUR</i>	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program	1	Disetujui	100%
3	14 Maret 2022	- <i>List of Term &amp; Condition</i> QRIS - <i>List of Term &amp; Condition</i> bank notes pada Giro , Tabungan dan Deposito VALAS	Divisi Dana & Jasa	2	Disetujui	90.5%
		- Suku Bunga Kredit Multiguna	Divisi Kredit Konsumer	1	Disetujui	90.5%
		- Ketentuan lain-lain	Divisi Tresuri	1	Disetujui	90.5%
		- Margin KLE ib Barokah	Divisi Syariah	1	Disetujui	90.5%
4	14 April 2022	- Suku Bunga Kredit Linkage BPR	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program	1	Disetujui	85.7%
		- <i>Pricing</i> Pembiayaan Linkage BPRS - Stimulus nasabah terdampak covid	Divisi Syariah	2	Disetujui	85.75
		- <i>Pricing</i> DOC	Divisi Tresuri	1	Disetujui	85.7%
5	25 Mei 2022	- <i>List of Term &amp; Condition BI-Fast</i>	Divisi Dana & Jasa	1	Disetujui	76.2%
		- <i>List of Term &amp; Condition</i> Skim Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi - <i>List of Term &amp; Condition</i> KMK PRK (revolving) & Angsuran (Aplofen) - <i>List of Term &amp; Condition</i> Keppres - <i>List of Term &amp; Condition</i> Standbyloan - <i>List of Term &amp; Condition</i> Pembiayaan Piutang - <i>List of Term &amp; Condition</i> Bank Garansi - <i>List of Term &amp; Condition</i> Cash Collateral Credit	Divisi Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	7	Disetujui	76.2%
		- <i>List of Term &amp; Condition</i> Kredit Multiguna - Suku Bunga KMG Pendidikan - Suku Bunga KKB	Divisi Konsumer	3	Disetujui	76.2%
		- Suku Bunga Kredit Properti - Suku Bunga Kredit KKB	Divisi Kredit Konsumer	2	tidak disetujui	85.7%
		- <i>List of Term &amp; Condition E-Money</i> - Suku Bunga Counter rate Deposito	Divisi Dana & Jasa	2	Disetujui	85.7%
		- <i>Reward</i> dan Referral Kredit Jatim Mikro & Ritel - Suku Bunga & <i>List of term &amp; condition</i> skema subsidi resi gudang (S-SRG)	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program	2	Disetujui	95.2%
7	7 Juli 2022	- Program siklus prioritas suka-suka	Divisi Dana & Jasa	1	Disetujui	95.2%
		- <i>List of Term &amp; Condition</i> Tabungan Santri	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui	90.5%
8	11 Agustus 2022	- Suku Bunga Counter Rate Deposito	Divisi Dana & Jasa	1	Disetujui	90.5%
		- <i>List of Term &amp; Condition</i> J-Connect Remittance	Divisi Dana & Jasa	1	Disetujui	80.9%
9	16 September 2022	- <i>Reward Referral</i> - Suku Bunga Kredit Jatim Mikro & Ritel - <i>List of Term &amp; Condition</i> Kredit DO Gula	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program	3	Disetujui	80.9%



No	Komite ALCO	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
10	12 Oktober 2022	- Standar Penilaian Logam Emas (SPLE) -Logam mulia -Perhiasan - <i>List of Term &amp; Condition</i> Pembiayaan Gadai Emas	Divisi Bisnis Syariah	2	Disetujui	76.2%
		- Suku Bunga Kredit Jatim Mikro	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program	1	Disetujui	76.2%
		- Suku Bunga Kredit KKB Roda 4 (tidak setuju) - Suku Bunga & <i>List of Term &amp; Condition</i> CCC (setuju) - Suku bunga kredit Multiguna (tidak setuju) - Program Pemasaran Kredit Multiguna (setuju) - Suku Bunga Kredit Properti (setuju)	Divisi Konsumer	5		76.2%
		- <i>List of Term &amp; Condition</i> BI-Fast J-Connect Internet Banking - <i>List of Term &amp; Condition</i> KIA Payment E-Katepay - Suku Bunga Deposito Rupiah dan Valas - Suku bunga Tabungan Valas - Suku Bunga Giro Valas	Divisi Dana & Jasa	5	Disetujui	76.2%
11	14 November 2022	- <i>List of Term &amp; Condition</i> Tabungan Santri	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui	80.9%
12	6 Desember 2022	- <i>List of Term &amp; Condition</i> Kartu ATM dan Hard Token - Syariah Mirroring	Divisi Operasi	1	Disetujui	90.5%
13	28 Desember 2022	- <i>Reward Referral</i> khusus KUR kepada petani tebu rakyat binaan PT Sinergi Gula Nusantara	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program	1	Disetujui	100%

### Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Seluruh Direksi	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	Pejabat Eksekutif/Pemimpin Divisi Terkait	Tidak mempunyai hak suara

### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Menyusun kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- Menyampaikan penilaian tingkat kesehatan Bank dan pengukuran peringkat risiko.
- Menetapkan limit risiko, limit bisnis dan limit operasional lainnya serta rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
- Menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Menyampaikan isu-isu strategis yang selaras dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh Divisi yang membidangi.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam rangka penetapan (*justification*) hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti:
  - Keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - Pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya.

### PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

### RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

KOMENKO	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil KOMENKO	Prosentase Kehadiran
13 April 2022	<i>Review Limit</i> Kewenangan Persetujuan Pengelolaan Aset Tetap dan Inventaris (Limit Kewenangan Persetujuan Pelepasan Aset)	Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	2	Disetujui dalam Rapat Komenko	86%
	Pedoman Portofolio Kredit/ Pembiayaan				
20 Juli 2022	<i>Review Limit Unrealized Loss</i> Surat Berharga AFS Divisi Tresuri	Divisi Tresuri	2	Disetujui dalam Rapat Komenko	86%
	<i>Review Limit</i> Kewenangan Dealer ( <i>Limit Dealer</i> ) untuk transaksi di Dealing Room Divisi Tresuri	Divisi Tresuri		Disetujui dalam Rapat Komenko	
10 Agustus 2022	<i>Review Limit</i> Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai	1. Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi 2. Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program 3. Divisi Kredit Konsumer 4. Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 5. Divisi Bisnis Syariah 6. Divisi Operasi 7. Divisi Risiko Bisnis	3	Disetujui dalam Rapat Komenko	100%
	<i>Review Limit</i> Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai dengan Komite atau Tanpa Komite			Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai dengan Komite atau Tanpa Komite yang terdiri dari: 1. Limit Komite Implementasi Kredit/Pembiayaan <b>(disetujui)</b> 2. Limit Komite Penyelamatan Kredit/Pembiayaan <b>(disetujui)</b> 3. Limit Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan <b>(disetujui)</b> 4. Limit Komite Hapus Buku Kredit/Pembiayaan <b>(dilakukan review kembali. Keterangan: Pada Komenko #4 disetujui)</b>	
	<i>Review Limit On The Spot</i> (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan			Disetujui dalam Rapat Komenko	



KOMENKO	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil KOMENKO	Prosentase Kehadiran
01 September 2022	Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai dengan Komite atau Tanpa Komite (Perubahan Limit Komite Hapus Buku Kredit/ Pembiayaan)	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	1	Disetujui dalam Rapat Komenko	Sirkuler
22 September 2022	Limit Kewenangan Persetujuan Alih Pos ( <i>Switching</i> ) dan Pelampauan Anggaran	Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	1	Disetujui dalam Rapat Komenko	71%
22 Desember 2022	Review Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai	Divisi Manajemen Risiko	3	Disetujui dalam Rapat Komenko	86%
	Review Limit On The Spot (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko		Disetujui dalam Rapat Komenko	
	Review Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Serta Biaya Non Produk	Divisi Human Capital		Disetujui dalam Rapat Komenko	

### Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritical di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

#### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama	Memiliki suara
Ketua Pengganti	Direktur Bidang Yang Mendapatkan Penunjukan dari Direktur Utama	Memiliki suara
Anggota	Direktur Bidang yang lainnya dan SEVP yang membawahi Divisi Human Capital	Memiliki suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Human Capital	Tidak Memiliki suara

#### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
  - Bidang Kebijakan
  - Bidang Manajemen Karir
  - Bidang Hukuman disiplin
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang kebijakan meliputi:
  - Memastikan bahwa kebijakan pokok aktifitas terkait *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).
  - Menetapkan dan memutuskan *standard operating procedure* dibidang Human Capital
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang manajemen karir meliputi:
  - Memutuskan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat dengan tingkatan Eselon 1 dan Eselon 2.
  - Mengevaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) individu pejabat dengan tingkatan eselon 1.
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang hukuman disiplin adalah Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan eselon 1 dan 2 serta tingkatan eselon di bawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya.

#### PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

#### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

**RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

No	Komite Direksi	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite Direksi	Kehadiran
1	25 Februari 2022	• Sirkuler-Pemenuhan Jabatan Kosong Pemimpin Cabang Batam	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
2.	08 Maret 2022	• Sirkuler-Pemenuhan Jabatan Kosong Pemimpin Divisi Bisnis Syariah	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
3	28 Maret 2022	• Sirkuler-Pembahasan KPI Individu Pejabat Eselon 1 Untuk Tahun Kinerja 2021	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
4	06 April 2022	• Sirkuler-Pemenuhan Jabatan Kosong	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
5	11 April 2022	• Penetapan Hukuman Jabatan atas Permasalahan Cabang Malang, Cabang Kepanjen, Cabang Syariah Malang	• Divisi Human Capital	3	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
6	09 Mei 2022	• Kenaikan Personal <i>Grade</i>	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
7	10 Mei 2022	• Pengisian Pejabat Eselon 2	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
8	11 Mei 2022	• Sirkuler- Pengisian Pejabat Eselon 2	• Divisi Human Capital	1	Tidak Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
9	18 Mei 2022	• Sirkuler - Pengakhiran Bhakti Pegawai	• Divisi Human Capital	1	Tidak Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
10	06 Juli 2022	• Penyempurnaan Kebijakan SOP Total <i>Reward</i>	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
11	13 Juli 2022	• Pemenuhan Jabatan Kosong	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
12	16 Agustus 2022	• Sirkuler - SOP KMK	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
13	01 September 2022	• Kekosongan Direktur DPP	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
14	05 September 2022	• Kesejahteraan Pegawai	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
15	12 September 2022	• Pemenuhan Jabatan Kosong	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
16	20 September 2022	• Pemenuhan Jabatan Kosong	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
17	29 September 2022	• Sirkuler- Pemenuhan Jabatan Kosong	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
18	17 Oktober 2022	• Punishment Permasalahan Cabang Bawean	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
19	19 Oktober 2022	• Sirkuler – Rekrutmen Pegawai Berpengalaman Eselon 2)	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
20	16 November 2022	• Sirkuler – SOP Rekrutmen & Seleksi dan SOP Administrasi PIt/Pgs	• Divisi Human Capital	2	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
21	18 November 2022	• Sirkuler- Pemenuhan Jabatan Kosong	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler



No	Komite Direksi	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite Direksi	Kehadiran
22	22 November 2022	• Sirkuler – SOP Sistem Grading dan Remunerasi penyesuaian Nomenklatur dengan SO terkini	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
23	28 November 2022	• Sirkuler – SOP Corporate Culture	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
24	01 Desember 2022	• Punishment Permasalahan Cabang Batu • SOP MOP	• Divisi Human Capital	2	Disetujui Forum Komite Direksi	100%
25	14 Desember 2022	• Sirkuler – Pemindahan Tugas Pegawai	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
26	22 Desember 2022	• Sirkuler – Pemindahan Tugas Pegawai	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler
27	23 Desember 2022	• Sirkuler – SOP Program Pengembangan Karir Pegawai	• Divisi Human Capital	1	Disetujui Forum Komite Direksi	Sirkuler

### Information Technology Steering Committee

Peran dan fungsi *Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah:

- Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.
- Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur TI dan Operasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Keuangan</li> <li>Direktur yang membawahkan SKMR</li> <li>Direktur Risiko Bisnis</li> <li>Direktur Komersial dan Korporasi</li> <li>Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah</li> <li>SEVP Perencanaan Strategis &amp; Pembinaan Cabang</li> <li>SEVP Unit Usaha Syariah</li> <li>Pemimpin <i>Corporate Secretary</i></li> <li>Pemimpin Divisi Bisnis Syariah</li> <li>Pemimpin Divisi Manajemen Risiko</li> <li>Seluruh Pemimpin Divisi Kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin Divisi Audit Internal</li> <li>Pemimpin Divisi Hukum</li> <li>Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola</li> </ol> </li> </ol>	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin Divisi Audit Internal</li> <li>Pemimpin Divisi Hukum</li> <li>Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola</li> </ol>	Tidak mempunyai hak suara
Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak Internal Bank Jatim lainnya yang terkait dengan agenda rapat</li> <li>Pihak eksternal Bank Jatim lainnya yang terkait dengan agenda rapat</li> </ol>	Tidak mempunyai hak suara

## TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

ITSC memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi usulan/rekomendasi RSTI.
2. *Mereview*, membahas, dan menetapkan perumusan/rekomendasi/usulan standar operasional TI.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara proyek TI dengan RSTI.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) TI dan *project commitment* pada tahun berjalan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara penyelenggaraan TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi memberikan nilai kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. *Mereview* perkembangan terkini dan proyeksi terkait keamanan TI dari ancaman bahaya siber.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Temuan Audit internal dan eksternal TI.
10. Membahas dan menyelesaikan berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh pengguna teknologi informasi dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.
11. Membahas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

## PROFIL ANGGOTA INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Profil Anggota *Information Technology Steering Committee* dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

## RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

No.	Komite TI	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite TI	Kehadiran (%)
1	29 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian Materi Komite TI</li> <li>• Evaluasi Kinerja Divisi TI Tahun 2022</li> <li>• Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Divisi TI Tahun 2022</li> </ul>	Divisi Teknologi Informasi	3	Disetujui	84%
2.	21 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Progress</i> RBB Divisi TI Tahun 2022</li> <li>b. <i>Progress Project Commitment</i> Tahun 2022</li> <li>c. Realisasi Anggaran TI 2022</li> <li>d. Data Aplikasi yang Terdaftar di TI</li> <li>e. <i>Progress Tindak Lanjut</i> Temuan Audit 2022</li> <li>f. Penguatan Tata Kelola</li> <li>g. Tantangan yang Dihadapi</li> <li>h. Transformasi SO (POJK PTI)</li> <li>i. <i>Review</i> RSTI (2022 – 2026)</li> </ul>	Divisi Teknologi Informasi	9	Disetujui	84%



## Komite Kredit

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

#### 1. Struktur Keanggotaan Implementasi Kredit

Kategori	Komite Implementasi Kredit	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi kredit 3. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi kredit 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A3	1. Direktur yang membidangi kredit sesuai segmentasi 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

#### 2. Struktur Keanggotaan Implementasi Pembiayaan

Kategori	Komite Implementasi Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Pembiayaan 3. Direktur yang membidangi kredit 4. SEVP UUS 5. Pemimpin Divisi yang membidangi Pembiayaan 6. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A2	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur yang membidangi kredit 3. SEVP UUS 4. Pemimpin Divisi yang membidangi Pembiayaan 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. SEVP UUS 3. Pemimpin Divisi yang membidangi Pembiayaan 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan

#### 3. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan Kredit

Kategori	Komite Penyelamatan Kredit	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi kredit 3. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5) 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

Kategori	Komite Penyelamatan Kredit	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
	A2	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit</li> <li>Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi (untuk kolektibilitas 1 dan 2)</li> <li>Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5)</li> <li>Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Risiko Kredit</li> <li>Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit</li> </ol>	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
	A3.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit</li> <li>Pemimpin Divisi Yang Membidangi Kredit sesuai Segmentasi (untuk kolektibilitas 1 dan 2)</li> <li>Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5)</li> <li>Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Risiko Kredit</li> <li>Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit</li> </ol>	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
	A3.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5)</li> <li>Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Risiko Kredit</li> <li>Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit</li> </ol>	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

#### 4. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan Pembiayaan

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur yang membidangi Pembiayaan</li> <li>Direktur yang membidangi kredit</li> <li>SEVP UUS</li> <li>Pemimpin Divisi Yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2)</li> <li>Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Pembiayaan (kolektibilitas 3, 4 dan 5)</li> <li>Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan</li> <li>Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan</li> </ol>	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Pembiayaan</li> <li>Direktur yang membidangi kredit</li> <li>SEVP UUS</li> <li>Pemimpin Divisi Yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2)</li> <li>Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelamatan Pembiayaan (kolektibilitas 3, 4 dan 5)</li> <li>Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan</li> <li>Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan</li> </ol>	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Pembiayaan</li> <li>SEVP UUS</li> <li>Pemimpin Divisi Yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2)</li> <li>Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i></li> </ol>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>SEVP UUS</li> <li>Pemimpin Divisi Yang Membidangi Penyelamatan Pembiayaan (untuk kolektibilitas 3, 4 dan 5)</li> <li>Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan</li> <li>Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan</li> </ol>	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan

**5. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian Kredit**

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit 3. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Penyelesaian Kredit 4. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi bisnis kredit 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Penyelesaian Kredit 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i> 4. 4 dan 5) 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A3.1	1. Direktur yang membidangi Penyelesaian Kredit 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Kredit 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

**6. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian Pembiayaan**

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Pembiayaan 3. Direktur yang membidangi kredit 4. SEVP UUS 5. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Pembiayaan 6. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A2	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur yang membidangi kredit 3. SEVP UUS 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Penyelesaian Pembiayaan 5. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan
		A3	1. SEVP UUS 2. Pemimpin Divisi yang Membidangi Pembiayaan (untuk kolektibilitas 1 dan 2) 3. Pemimpin Cabang Pengusul atau <i>Booking Office</i>	1. Pemimpin Divisi Direktur yang membidangi Risiko Pembiayaan 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi yang membidangi Administrasi Pembiayaan

**7. Struktur Keanggotaan Komite Credit Line Kepada Korporasi**

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Tresuri 3. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Tresuri 5. Pemimpin Divisi yang Membidangi Korporasi	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business
	A2	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 3. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Tresuri 4. Pemimpin Divisi yang Membidangi Korporasi	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
	A3	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Tresuri 3. Pemimpin Divisi yang Membidangi Korporasi	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

### 8. Struktur Keanggotaan Komite Term Loan Facility (TLF)

Kategori	Komite Penyelamatan Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi Tresuri 3. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 4. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Tresuri	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A2	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Direktur yang membidangi bisnis kredit korporasi 3. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Tresuri	1. Direktur yang membidangi Risiko Kredit 2. Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit
		A3	1. Direktur yang membidangi Tresuri 2. Pemimpin Divisi Yang Membidangi Tresuri	Pemimpin Divisi yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Divisi yang membidangi Administrasi Kredit

### 9. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku Kredit

Kategori	Komite	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. 2 (dua) Direktur yang membidangi Kredit 3. Pemimpin Divisi yang membidangi Hapus Buku Kredit	Direktur yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A2	1. 2 (dua) Direktur yang membidangi Kredit 2. Pemimpin divisi yang Membidangi Hapus Buku Kredit	Direktur yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A3	Pemimpin divisi yang membidangi Hapus Buku Kredit	Direktur yang membidangi Risiko Kredit	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku

**10. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku Pembiayaan**

Kategori	Komite	Kelompok Fungsi Business	Kelompok Fungsi Business Risk	Kelompok Fungsi Supporting Business	
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama 2. Direktur yang Membidangi Pembiayaan 3. Direktur yang membidangi kredit 4. SEVP UUS 5. Direktur yang Membidangi Hapus Buku Pembiayaan	Direktur yang membidangi Resiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A2	1. Direktur yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur yang membidangi Kredit 3. SEVP UUS 4. Direktur yang membidangi Hapus Buku Pembiayaan	Direktur yang membidangi Resiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku
		A3	1. SEVP UUS 2. Direktur yang membidangi Hapus Buku Pembiayaan	Direktur yang membidangi Resiko Pembiayaan	Pemimpin Sub Divisi Manajemen Hapus Buku

**Keanggotaan Pada Komite Kredit & Pembiayaan**

Jabatan	Diisi Oleh	Interaksi Hubungan Kerja
Pejabat Pemutus Kredit/Pembiayaan	Kelompok Fungsi Business	Melakukan analisa kredit/pembiayaan, usulan kredit/pembiayaan dan memberikan hak suara dalam proses keputusan kredit
	Kelompok Fungsi Business Risk	Melakukan analisa risiko dan/atau pendapat risiko sesuai bidangnya serta memberikan hak suara dalam proses keputusan kredit
Non Pejabat Pemutus Kredit/Pembiayaan (Non PPK/P)	Kelompok Fungsi Supporting Business	Memberikan pendapat sesuai bidangnya dan tidak memiliki hak suara dalam proses keputusan kredit

**TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT**

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif;
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait namun tidak terbatas pada:
  - Debitur-debitur besar.
  - Industri yang spesifik.
- Melakukan koordinasi dengan *asset & liabilities committee* (ALCO) dalam hal aspek penyediaan dana kredit/pembiayaan dan penyesuaian suku bunga/margin/bagi hasil kredit/pembiayaan apabila diperlukan;
- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan hapus buku kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan *Credit Line* atau *Term Loan* (TLF) sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan rencana kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

**PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT**

Profil Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

**PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT**

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

## RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT

### 1. Komite Implementasi Kredit

No	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1	04/01/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
2	19/04/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
3	22/04/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
4	26/04/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
5	28/04/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
6	13/05/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
7	10/06/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
8	13/06/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
9	15/06/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
10	22/07/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
11	05/08/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
12	16/08/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
13	16/08/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
14	12/09/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
15	12/09/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
16	16/09/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
17	20/09/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
18	26/09/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
19	27/09/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
20	19/10/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
21	01/11/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
22	02/11/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
23	02/11/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
24	02/11/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
25	24/11/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
26	24/11/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
27	19/12/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
28	19/12/2022	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
29	27/12/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Menengah	Disetujui	100%
30	28/12/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Menengah	Disetujui	100%
31	29/12/2022	Implementasi Kredit	Kredit Mikro Ritel & Menengah	Tidak Disetujui	100%

**2. Komite Penyelamatan Kredit**

No	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1	31/03/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
2	31/03/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
3	26/04/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
4	26/04/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
5	13/06/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
6	23/06/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
7	29/06/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	Disetujui	100%
8	16/08/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
9	16/08/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%
10	20/09/2022	Penyelamatan Kredit	Kredit Mikro Ritel & Program	Disetujui	100%

**3. Komite Penyelesaian Kredit**

No	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1	05/10/2022	Penyelesaian Kredit	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%

**4. Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan**

No	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran
1.	27/04/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
2.	31/05/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
3.	30/06/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
4.	29/07/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
5.	31/08/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
6.	30/09/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
7.	31/10/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
8.	30/11/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%
9.	30/12/2022	Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan	Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	Disetujui	100%

## 5. Komite Implementasi Pembiayaan

No.	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiasi	Hasil Komite	Kehadiran
1	06/04/2022	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
2	06/04/2022	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
3	26/04/2022	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
4	08/06/2022	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
5	15/06/2022	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
6	20/09/2022	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%
7	03/11/2022	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	Disetujui	100%

### KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Komite ini dibentuk bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dan memantau dari proses awal pengajuan hingga pelaksanaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Kebijakan Perkreditan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Komite Kebijakan Perkreditan
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Komersial &amp; Korporasi, atau</li> <li>• Direktur Konsumer Ritel &amp; Usaha Syariah</li> </ul>	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Divisi Operasi	Tidak mempunyai hak suara



Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Anggota Tetap	A. Direksi: 1. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah 2. Direktur Keuangan 3. Direktur TI & Operasi 4. Direktur Risiko Bisnis B. Divisi: 1. Divisi Risiko Bisnis 2. Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi 3. Divisi Kredit Konsumer 4. Divisi Kredit Mikro, Ritel & Program 5. Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja 6. Divisi Tresuri 7. Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	A. Direksi: Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko B. Divisi: 1. Divisi Kepatuhan & Tata Kelola 2. Divisi Audit Internal 3. Divisi Hukum 4. Divisi <i>Human Capital</i> 5. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	Tidak mempunyai hak suara

#### TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan KPA Perkreditan atau Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
- Mengawasi agar KPA Perkreditan atau Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPA Perkreditan atau Pembiayaan.
- Melakukan kajian berkala terhadap KPA Perkreditan atau Pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPA Perkreditan atau Pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
- Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi kebijakan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPA Perkreditan atau Pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.
- Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan terkait strategi bisnis perkreditan atau pembiayaan baik segmen ritel maupun korporasi.
- Memimpin dan mengarahkan kerja Tim dan bertanggung jawab atas kinerja dari Tim.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan.
  - Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud poin Tugas dan Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan angka 4 – 10.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris terkait laporan sebagaimana di atas.

#### PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

#### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

## RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

No	Tanggal Komite	Agenda	Divisi Inisiator	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1	28/12/2022	Perubahan Kebijakan Produk & Aktivitas Perkreditan Atau Pembiayaan	TIM KPA - PAP	Disetujui	100%

### Komite Produk, Jaringan dan Prosedur (PJP)

#### KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG PRODUK

Komite PJP Bidang Produk dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank.

#### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Komersial dan Korporasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Dana - Pemimpin Divisi Dana & Jasa Kredit - Pemimpin Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi	Tidak mempunyai hak suara
Anggota	Dana dan Kredit - Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah - Direktur Keuangan - Direktur TI & Operasi - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan - Pemimpin Divisi Teknologi Informasi - Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	Mempunyai hak suara
Undangan	- Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait materi pembahasan - Pemimpin Divisi kelompok pendukung bisnis terkait materi pembahasan - Pemimpin Cabang dan pihak eksternal jika diperlukan	Tidak mempunyai hak suara

#### URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite PJP Bidang Produk meliputi:

1. Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi strategi bisnis melalui produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi termasuk pengembangan produk, proses bisnis, tarif, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis melalui pengujian komprehensif.
3. Melakukan *monitoring* hasil kinerja strategi bisnis dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi Inisiator/Pemilik produk.
4. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis.
5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pengembangan produk/aktivitas secara profesional, optimal, akurat, aman dan bersaing.

6. Memastikan bahwa pengembangan produk/aktivitas beserta kebijakannya telah sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan.

#### PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

#### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

**RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PRODUK**

No	PJP Bidang Produk	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	21 Februari 2022	Pemberhentian Penyaluran Kredit Mikro Laguna & Kredit Si Umi	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program	1	Disetujui Forum PJP Bidang Produk	100%
2	20 Juni 2022	Usulan Standar Operasional Prosedur Tabungan Santri	SEVP Unit Usaha Syariah	1	Disetujui forum PJP Bidang Produk	80%

**KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG JARINGAN**

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektifitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal.

**STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN**

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Keuangan	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur TI dan Operasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko</li> <li>• SEVP Perencanaan Strategis &amp; Pembinaan Cabang</li> <li>• Pemimpin Divisi Umum</li> <li>• Pemimpin Divisi Human Capital</li> <li>• Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan</li> <li>• Pemimpin Divisi Operasi</li> <li>• Pemimpin Divisi Dana dan Jasa</li> <li>• Pemimpin Divisi Teknologi Informasi</li> <li>• Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan</li> <li>• Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola</li> <li>• Pemimpin Divisi Hukum</li> <li>• SEVP Unit Usaha Syariah</li> <li>• Pemimpin Divisi Bisnis Syariah</li> </ul>	Mempunyai hak suara dan dapat diwakilkan
Undangan	Pemimpin Cabang terkait (jika diperlukan)	Tidak mempunyai hak suara

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN**

1. Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan dan memberikan arahan untuk melakukan optimalisasi dan efektivitas kinerja jaringan.
2. Mengarahkan dan mengevaluasi strategi pengembangan jaringan.
3. Memberikan pendapat atau isu-isu terbaru tentang pengembangan jaringan.
4. Memantau hasil Evaluasi dan usulan perubahan status dan/atau penutupan jaringan kantor.
5. Memberikan rekomendasi:
  - a. jenis jaringan yang layak untuk dibuka.
  - b. penarikan pemindahan *human capital* pada rencana penurunan status dan/atau penutupan jaringan kantor.
  - c. kesiapan/ketersediaan pengisian dan penempatan human capital pada rencana pengembangan jaringan kantor.
6. Memantau hasil optimalisasi kinerja jaringan.
7. Memantau hasil Evaluasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan.
8. Memberikan rekomendasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan.
9. Menetapkan dan memutuskan kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan.
10. Memutus jenis dan jumlah jaringan yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank.
11. Memutuskan perubahan status/penutupan jaringan kantor setelah dilakukan evaluasi oleh unit terkait.
12. Menetapkan jumlah investasi dan anggaran biaya pembukaan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan.
13. Menentukan batas pembagian area dan struktur organisasi di jaringan.
14. Memutuskan hasil optimalisasi kinerja jaringan.
15. Memutuskan kelas cabang dan cabang pembantu hasil klasifikasi jaringan.
16. Menentukan sistem klasifikasi dan hasil pemetaan akhir.
17. Bertanggung jawab atas terlaksananya strategi pengembangan jaringan.
18. Bertanggung jawab mengoptimalkan kinerja jaringan.
19. Bertanggung jawab atas implementasi klasifikasi jaringan.

## PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

## PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG JARINGAN

No.	PJP Bidang Jaringan	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil PJP Bidang Jaringan	Kehadiran (%)
1	22 Maret 2022	Pembukaan dan Relokasi Jaringan	Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	30	Persetujuan usulan pembukaan dan relokasi jaringan dengan catatan untuk biaya tidak melebihi ketentuan yang ada	100%
2.	25 Mei 2022 (Bagian 1)	Peningkatan status KF menjadi KCP Tipe C	Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	17	Persetujuan usulan peningkatan status terhadap 1 (satu) jaringan	100%
3.	03 Juni 2022 (Bagian 2)	Peningkatan status KF menjadi KCP Tipe C	Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	16	Persetujuan usulan peningkatan status terhadap 2 (dua) jaringan	100%
4.	07 November 2022	Pembukaan dan Relokasi Jaringan	Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	22	Persetujuan usulan pembukaan dan relokasi dengan tetap memperhatikan potensi bisnis dan mitigasi risiko bencana	100%
5.	30 Desember 2022	Relokasi Jaringan	Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	8	Persetujuan usulan relokasi jaringan KCP, KF, CRM dan ATM	100%

## KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP) BIDANG PROSEDUR

Komite PJP Bidang Prosedur adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau *update* Buku Kebijakan dan Prosedur Bank agar Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR

### Komite A1

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Bidang sesuai dengan pembahasan materi	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemimpin Divisi Hukum</li> <li>– Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan</li> <li>– Pemimpin Divisi sesuai dengan pembahasan materi</li> </ul>	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemimpin Divisi Audit Internal</li> <li>– Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait pembahasan materi</li> <li>– Pemimpin Divisi kelompok pendukung bisnis terkait pembahasan materi</li> </ul>	Mempunyai Hak Suara
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko</li> <li>– Pemimpin Cabang, jika diperlukan</li> <li>– Pihak Eksternal, jika diperlukan</li> </ul>	Mempunyai Hak Suara

**Komite A2**

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemimpin Divisi Hukum</li> <li>- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan</li> <li>- Pemimpin Divisi sesuai dengan pembahasan materi</li> </ul>	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemimpin Divisi Audit Internal</li> <li>- Pemimpin Divisi kelompok bisnis terkait pembahasan materi</li> <li>- Pemimpin Divisi kelompok pendukung bisnis terkait pembahasan materi</li> </ul>	Tidak Mempunyai Hak Suara
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur TI &amp; Operasi</li> <li>- Pemimpin Cabang, jika diperlukan</li> <li>- Pihak Eksternal, jika diperlukan</li> </ul>	Tidak Mempunyai Hak Suara

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR**

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite PJP Bidang Prosedur meliputi:

1. Membahas, mengevaluasi dan merekomendasikan penerbitan atau update kebijakan dan prosedur Bank agar BPP dapat digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan;
2. Menetapkan penerbitan atau *update* kebijakan dan prosedur Bank yang digunakan sebagai pedoman kerja perusahaan.
3. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan penerbitan atau *update* kebijakan dan prosedur Bank;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Bank yang digunakan sebagai pedoman kerja Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal Bank dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

**PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR**

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Prosedur dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pemimpin Divisi dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

**PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR**

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

**RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK, JARINGAN DAN PROSEDUR BIDANG PROSEDUR**

No	PJP Bid. Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil PJP Bid. Prosedur	Kehadiran
1	07 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengelolaan Antivirus</li> <li>• SOP <i>Monitoring Server</i></li> <li>• SOP <i>Monitoring Bandwith</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Teknologi Informasi</li> </ul>	3	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
2	24 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan SOP Standar Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Operasi</li> </ul>	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
3	14 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pencegahan TPPU &amp; TPPT Pada Bank</li> <li>• SOP Pemberantasan TPPU &amp; TPPT Pada Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Kepatuhan &amp; Tata Kelola</li> </ul>	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	75%
4	01 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Akses Internet</li> <li>• SOP Remote Acces</li> <li>• SOP Akses Intranet</li> <li>• SOP Akses Wireless</li> <li>• SOP Patch Management</li> <li>• SOP Pengelolaan Power User</li> <li>• SOP BI-Fast Payment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Teknologi Informasi</li> <li>• Divisi Operasi</li> </ul>	7	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	80%
5	03 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Kredit Pemerintah Daerah</li> <li>• SOP Laku Pandai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Kredit Komesial, Korporasi &amp; Sindikasi</li> <li>• Divisi Dana &amp; Jasa</li> </ul>	2	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%

No	PJP Bid. Prosedur	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil PJP Bid. Prosedur	Kehadiran
6	09 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan SOP Kredit Usaha Rakyat</li> <li>Perubahan SOP Kredit Multiguna</li> <li>Perubahan SOP Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)</li> <li>Perubahan BPP KPR Bersubsidi (SOP KPR Bersubsidi)</li> <li>Perubahan SOP Kredit Pegawai</li> <li>Perubahan SOP Kredit CCC</li> <li>Perubahan SOP Kredit Properti (KPR Reguler)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Kredit Mikro, Ritel &amp; Program</li> <li>Divisi Kredit Konsumer</li> </ul>	7	Untuk Perubahan SOP Kredit Pegawai belum disetujui. Untuk 6 (enam) agenda lain disetujui	100%
7	30 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyedia Jasa Perkreditan atau Pembiayaan</li> <li>SOP Administrasi Kredit atau Pembiayaan</li> <li>SOP Jaminan Kredit atau Pembiayaan</li> <li>SOP Layanan Call Center</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Operasi</li> </ul>	4	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
8	22 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Proses Kredit Komersial &amp; Korporasi</li> <li>SOP Kredit Piutang</li> <li>SOP Kredit BLUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Kredit Komersial, Korporasi &amp; Sindikasi</li> </ul>	3	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
9	01 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Ketahanan &amp; Keamanan Siber</li> <li>SOP Uji Keamanan Aplikasi, Sistem &amp; Jaringan Bank</li> <li>SOP Klasifikasi Pemisahan &amp; Pembatasan</li> <li>SOP Open Online Account</li> <li>Perubahan SOP Stimulus Terhadap Debitur Terdampak COVID-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Teknologi Informasi</li> <li>Divisi Penyelamatan &amp; Penyelesaian Kredit</li> </ul>	5	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
10	21 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Kredit Mikro, Ritel &amp; Program</li> <li>SOP Kredit Resi Gudang</li> <li>SOP Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah</li> <li>SOP Pembiayaan Emas iB Barokah</li> <li>SOP Tabungan Rencana iB Barokah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Kredit Mikro, Ritel &amp; Program</li> <li>SEVP Unit Usaha Syariah</li> </ul>	5	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
11	07 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengembangan Virtual Account Katepay</li> <li>SOP Pengembangan Tabungan Siklus Berjangka</li> <li>SOP Kredit Kontraktor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Dana &amp; Jasa</li> <li>Divisi Kredit Komersial, Korporasi &amp; Sindikasi</li> </ul>	3	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
12	14 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Kredit Jatim Mikro</li> <li>SOP Trade Finance Divisi Tresuri</li> <li>SOP Kode Etik Pasar Atas Aktivitas Tresuri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Kredit Mikro, Ritel &amp; Program</li> <li>Divisi Tresuri</li> </ul>	3	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
13	18 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Aktivitas Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Audit Internal</li> </ul>	1	Disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%
14	25 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Tabungan iB Barokah</li> <li>SOP Deposito iB Barokah</li> <li>SOP Giro iB Barokah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEVP Unit Usaha Syariah</li> </ul>	3	Untuk materi SOP Tabungan iB Barokah belum disetujui Forum PJP Bid. Prosedur dan untuk dijadwalkan kembali, sedangkan untuk materi SOP Deposito iB Barokah dan SOP Giro iB Barokah disetujui Forum PJP Bid. Prosedur	100%

## Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

### Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otorita Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) kepada *Material Risk Taker* dalam kondisi tertentu, yaitu:
  - Bank Mengalami Kerugian.  
Yaitu kondisi saat neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
  - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh *Material Risk Takers* yang merugikan Bank.  
Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan *fraud* melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

### Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.
  - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
  - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 April 2020 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 01 Juli 2020 berkaitan dengan kebijakan remunerasi bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

#### 1. Remunerasi yang bersifat tetap

- Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:

- skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan hari raya, tunjangan cuti dan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

## 2. Remunerasi yang bersifat variabel

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari bonus karena kinerja bagi pegawai dan tantiem bagi pengurus perseroan.

### Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, kenaikan gaji berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Jasa Produksi dan Bonus Kinerja. Bank Jatim juga memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamata serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

### Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa tantiem dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 April 2020.

### Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta

berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
  - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
  - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
  - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan di *peer group*nya. Kecukupan permodalan Bank meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
  - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Bank.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
  - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Bank jangka panjang.

### Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank bekerja sama dengan Wilis Tower Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Bank mengenai kebijakan remunerasi.

### Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### Remunerasi yang Bersifat Variabel

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.





## Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang
Pegawai	4.373 orang

## Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang

## Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Uraian terkait *Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dijelaskan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

## Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Komisaris Utama Utama dengan Komisaris Lainnya	1,11:1
Gaji Direktur Utama dengan Direktur lain	1,11:1
Gaji Direktur Utama dengan Gaji Pegawai tertinggi	2,61:1
Gaji Direktur dengan Gaji Pegawai Tertinggi	2,35:1
Gaji Pegawai Tertinggi dengan Pegawai Terendah	8,20:1

## Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	5 orang	269.100.000,-
Direksi	7 orang	598.000.000,-

## Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Keterangan	Jumlah Pegawai	Pesangon (dalam jutaan Rupiah)
Diberhentikan	39	171.036.641
Meninggal	6	2.376.911.297
Pensiun	74	39.023.415.431
<b>Grand Total</b>	<b>119</b>	<b>41.571.363.370</b>

## Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	5 orang	452.954.393,99
Direksi	7 orang	1.161.734.988,16

## Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Direksi	6 orang	948.901.978,49

## Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam Satu Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	6 orang	8.114.196.627,35
Direksi	5 orang	17.872.038.485,23

## Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	1.542.863.612,63	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	1.554.844.246,23	-	-	-
Jumlah	3.097.707.858,87	-	-	-

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT

## Akuntan Publik

### Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

## Penunjukan Akuntan Publik

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2022 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 061/221/DIR/PKU/PKS dan Nomor Pihak Kedua E082X/ADH/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 kepada KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan biaya audit sebesar Rp1.121.100.000 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

- a. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
- b. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berupa:
  - i. Laporan Posisi Keuangan;
  - ii. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
  - iii. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - iv. Laporan Arus Kas;
  - v. Laporan Publikasi;
  - vi. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;
  - vii. Laporan lain-lain yang sesuai dengan:
    1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-347/BL/2012 Peraturan

VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.

2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Dalam 2 (dua) versi yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (*Bilingual*) sejumlah 1 (satu) asli dan 50 (lima puluh) *hardcopy* termasuk *softcopy*-nya.

- c. *Laporan Management Letter* (ML) dalam Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
- d. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam Bahasa Indonesia, sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.

- e. Hasil pemeriksaan berupa dokumen yang disebutkan dalam ruang lingkup Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Unit Usaha Syariah beserta kertas kerja termasuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan menjadi hak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

## Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit

**Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit.**

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Juta Rupiah)
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	1.121,1
2021	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Periode ke 1	Florus Daeli	Periode ke 1	1.300
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Gideon	Periode ke 2	960
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Gideon	Periode ke 1	940
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	570
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 2	Rita Susilowati	Periode ke 2	840
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 1	Rita Susilowati	Periode ke 1	900
2014	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 5	Sinarta	Periode ke 3	980
2013	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 4	Sinarta	Periode ke 2	900
2012	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 3	Sinarta	Periode ke 1	675

## Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2022, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

## Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal

dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

## Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.

7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

## Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

## Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

## Aktivitas Pengendalian – Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

**Kegiatan kaji ulang** terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi yang telah dilaksanakan pada 26 Oktober 2022 (Kaji Ulang Cawu III 2022). Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman Yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang-bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Internal juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas berdasarkan *sampling* yang meliputi kekosongan posisi jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat *General Audit*.

**Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI** kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations Process* serta *Security Management*.

**Pengendalian Dokumentasi**, menjamin adanya:

- Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit *trail* yang memadai.
- Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen yang memadai.

#### **Pemisahan fungsi**

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi pemasaran kredit, analis kredit dan petugas administrasi kredit dan legal bisnis sudah dipisahkan, dimana petugas pemasaran merupakan bawahan dari penyelia pemasaran, petugas analis kredit bawahan dari penyelia operasional kredit dan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan langsung dari Sub Divisi Administrasi Kredit & Legal Bisnis Divisi *Service Quality Assurance* yang secara hubungan kerja dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja/terkait di Cabang.

#### **Pengendalian Aset Fisik**

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

#### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya antara lain meningkatkan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal*, serta melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.

#### **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independen, objektif, profesional dan mempunyai kompensasi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan system tata kelola untuk melindungi aset bank, organisasi dan reputasi Bank.

#### **Aktivitas Pemonitoran**

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). Mekanisme pemeriksaan *pasif/off-site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Internal dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

## Kesesuaian dengan Oleh Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).
1. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
2. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
3. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
4. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

## Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi  
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.
1. Dewan Komisaris  
Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
2. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)  
SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
3. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank  
Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
4. Pihak-pihak ekstern  
Pihak-pihak ekstern bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*).

## Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa kecukupan sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

## Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

## Rerangka Manajemen Risiko

Rerangka Manajemen Risiko tertuang dalam Bank Jatim *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight, Risk Policy and Management, dan Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

## Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Bank Jatim *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu:

### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan Bank dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.

4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan.
4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko.
8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
9. Memastikan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal.
10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada:
  - a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat.
  - b. Dokumen makalah/*handout* atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta.
11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.



12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan *risk taker unit*.

### Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Penetapan limit tersebut terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit counterparty (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

### Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)*. Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risk*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

#### 1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

#### 2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
  - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
  - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
  - Faktor risiko secara individual.
  - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per-risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
  - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
- c. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
- d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
- f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan *me-review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

#### 3. Pemantauan Risiko

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taker unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko.



- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

#### 4. Pengendalian Risiko

- a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

#### 5. Sistem Manajemen Risiko

- a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
- b. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
- d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem manajemen risiko di-review secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- e. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh divisi manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- f. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
- h. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.

- i. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
- j. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

### Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal, Direktur Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

### Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko

yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing- masing risiko tersebut sebagai berikut

### Risiko Kredit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Pengelolaan risiko kredit di Bank Jatim sampai bulan Desember 2022 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan Desember 2022 adalah *moderate*. Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga penilaian umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit adalah *fair*, sehingga peringkat komposit untuk risiko kredit adalah peringkat 3.

Dari sisi kebijakan, Bank Jatim selalu melakukan *review* dan memperbaharui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Divisi Manajemen Risiko memberikan *review* dan penentuan level risiko dalam penentuan fasilitas transaksi (*Limit Counterparty*), serta pemantauan atas *Risk Appetite* dan Limit Risiko Kredit secara rutin. Dalam hal penguatan manajemen risiko kredit, bank juga membentuk unit/Divisi Risiko Kredit yang secara khusus berkonsentrasi dalam bidang perkreditan.

### Potensi Risiko

Potensi Risiko atas aktivitas penyaluran kredit Bank dapat muncul akibat Sumber Daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit, maupun atas aktivitas *placement* ataupun pembelian surat berharga pada perusahaan yang dinilai kurang bonafide sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian bank karena harus membentuk CKPN, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul karena proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumber daya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit. Selain itu kerugian atas kredit juga dapat diakibatkan karena kegagalan dalam proses *settlement*.

### Mitigasi Risiko Kredit

Dalam upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko kredit adalah meningkatkan pengetahuan analis kredit dibidang perkreditan agar lebih profesional dan menguasai bidang tugasnya dengan baik, perbaikan sistem dan prosedur dalam bidang perkreditan, pembinaan dan *monitoring* atas kredit yang telah direalisasikan, upaya penagihan yang lebih intensif terhadap nasabah-nasabah yang Dalam Perhatian Khusus (DPK) agar tidak menjadi memburuk kolektibilitasnya, peningkatan fungsi supervisi kredit, menerapkan prinsip *Prudential Banking* dalam ekspansi kredit, melakukan pengawasan sistem dan

prosedur yang telah dimiliki, dan juga analisa *Counterparty* secara cermat dan baik.

### Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan risiko pasar Bank Jatim yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar pada bulan Desember 2022 adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *Satisfactory* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit yaitu peringkat 2.

### Potensi Risiko

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko pasar dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya perubahan suku bunga Bank yang berdampak pada portofolio Bank (selisih terhadap portofolio *Rate Sensitif Asset/RSA & Rate Sensitif Liability/RSL*), perubahan nilai tukar atas valuta asing. Bank mengalami kerugian atas selisih nilai tukar yang timbul, perubahan harga atas portofolio Bank, perubahan rating ataupun performa keuangan obligor yaitu turunnya nilai suatu portofolio Bank (atas surat berharga ataupun obligasi), kondisi pasar yang tidak efisien sehingga mempengaruhi akurasi penilaian dalam bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian saat itu (baik pada pasar uang maupun pasar saham), serta kerugian lain yang ditimbulkan oleh situasi politik yang memburuk.

### Mitigasi Risiko Pasar

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko pasar adalah penerapan *floating interest rate*, *monitoring* PDN sesuai ketentuan regulator, analisa *counterparty* dengan baik dan akurat, pertimbangan atas rating *counterparty*, penetapan dan *monitoring* atas *Limit Dealer*, *Stop Loss* dan *Cut Loss*, pemantauan atas transaksi *off market*, penyediaan yang baik atas data *historical* dan potensi pasar, penerapan analisis teknikal dan fundamental pada transaksi yang terekspos risiko pasar, dan juga implementasi atas Limit IRRBB atas *Asset* maupun *Liability* yang sensitif terhadap perubahan suku bunga (RSA & RSL).

### Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas pada bulan Desember 2022 adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko likuiditas.

### Potensi Risiko

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko likuiditas dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya penarikan besar-besaran di luar *behavior* perusahaan, adanya *rush* pengaruh faktor eksternal,

kegiatan *funding* atas dana pihak ketiga yang mengalami stagnasi, pembayaran angsuran atas debitur kredit yang tidak lancar atau macet, *gap liquidity* dan *maturity profile* yang kurang baik sehingga membawa kecenderungan pada penyediaan dana mahal, terbatas atau berkurangnya potensi untuk ekspansi kredit, ataupun dampak kerugian bank lainnya yang lebih luas, yang timbul akibat risiko reputasi.

### Mitigasi Risiko Likuiditas

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko likuiditas adalah melaksanakan antisipasi dan *monitoring* atas penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai atas semua dana masuk baik melalui *incoming* transfer maupun setoran tunai nasabah (*behavior* nasabah), membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana terbesar yang pernah terjadi, meningkatkan akses kepada sumber-sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain menjaga *primary reserves*, Bank Jatim juga menjaga *secondary reserves* dan membuat proyeksi arus kas terinci dalam mata uang rupiah terhadap gejala tingkat bunga. Melakukan *management gap* sehingga terhindar atau meminimumkan gejala tingkat bunga sehingga dapat dicapai keuntungan stabil dan berkembang. Bank juga senantiasa meningkatkan jumlah *Counterparty* yang baik dan menjalin hubungan yang baik terutama dalam bidang penyediaan likuiditas serta senantiasa menyusun berbagai bentuk *Contingency Funding Plan* (CFP) pada berbagai situasi baik normal maupun krisis.

### Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional secara inheren/melekat pada setiap produk/aktivitas/proses operasional Bank. Dalam mengukur risiko operasional, Bank melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID). Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan Bank yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam. Agar aktivitas fungsional, produk atau layanan Bank dapat berjalan dengan optimal, maka penerapan manajemen risiko operasional dilakukan secara efektif. Selanjutnya Unit Audit Internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional adalah melalui penentuan strategi mitigasi yang paling tepat guna mendapatkan keseimbangan yang optimal antara pemaparan risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang diterima oleh Bank. Adapun pengelolaan risiko operasional didukung dengan keterlibatan:

#### 1. Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)

Direksi menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengelolaan risiko antara lain penetapan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko, limit bisnis dan limit operasional dan pemantauan profil risiko.

2. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional  
Satuan kerja manajemen risiko operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan perangkat kerja manajemen risiko operasional.
3. Unit Kerja Pemilik Risiko (*Risk Taking Unit*)  
Unit kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan risiko operasional dan memastikan kontrol pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan.
4. Unit kerja Kepatuhan  
Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan pada aturan internal dan eksternal.
5. Unit Kerja Audit Internal  
Unit kerja yang melaksanakan efektivitas internal kontrol pada aktivitas Bank.

Sampai bulan Desember 2022, pengelolaan risiko operasional Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko operasional adalah berpredikat *moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 3 untuk risiko operasional.

### Potensi Risiko

Dengan adanya eksposur risiko operasional maka dapat meningkatkan eksposur risiko lainnya diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategik dan risiko reputasi, hal ini dapat mengakibatkan Potensi Risiko finansial maupun non finansial, dampak lainnya dari risiko operasional Bank adalah turunnya Tingkat Kesehatan Bank sehingga Bank tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor serta bank berada dalam status pengawasan insentif dari regulator.

### Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka mitigasi risiko operasional bank telah memiliki aplikasi *Lost Event Database (LED)* yang terkoneksi ke seluruh unit kerja sehingga unit kerja dapat menginput *risk event* yang terjadi secara *online* melalui media *web (web based)*. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilakukan mitigasi terhadap *risk event* tersebut. Bank juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment (RA)* untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.

### Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat apapun yang terkait dengan produk dan layanan. Sampai bulan

Desember 2022 pengelolaan risiko hukum Bank Jatim tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko hukum.

### Potensi Risiko

Potensi Risiko dari risiko hukum yaitu adanya tuntutan hukum sebagai akibat dari kelemahan aspek legal atau yuridis, atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial seperti:

- a. Pengeluaran biaya atas timbulnya ganti rugi dari Nasabah.
- b. Pengenaan denda/sanksi atas terjadinya tuntutan hukum.
- c. Kehilangan Jaminan Kredit.
- d. Klaim Bank Garansi
- e. Tertundanya Jaminan lelang (yang dapat mempengaruhi NPL).

### Mitigasi Risiko Hukum

Dengan melakukan *review* kajian yuridis terhadap segala kemungkinan masalah hukum yang akan timbul antara pihak penjamin, terjamin dan dijamin dapat meminimalisir tuntutan terhadap:

- a. Kelengkapan pemenuhan dokumen dan persyaratan Bank Garansi.
- b. Prosedur realisasi Bank Garansi
- c. Terkait dengan akad/perjanjian yang terdapat dalam Berkas Bank Garansi.

### Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil *actual*, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan dengan melakukan kaji ulang yang diselenggarakan setiap triwulan untuk setiap divisi dan caturwulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang. Sampai bulan Desember 2022 pengelolaan risiko strategik Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko strategik adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *satisfactory* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko strategik.

### Potensi Risiko

Potensi risiko yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan/ penetapan strategi bisnis, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan
2. Peluncuran produk baru tanpa dilakukan *Feasibility Study* analisis terhadap rencana penerapan produk baru sebagai pencegahan potensi gagalnya produk baru tersebut sehingga target penjualan produk tidak dapat optimal.
3. Peluncuran produk baru harus ada ljin prinsip, jika tidak dilaksanakan produk tersebut tidak akan dapat dijalankan sehingga akan kehilangan kesempatan menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

### Mitigasi Risiko Strategik

Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan pengendalian risiko serta melakukan *Feasibility Study (FS)* yang mencakup analisis *Cost and benefit*. Apabila akan mengadakan program atau produk baru Bank Jatim harus:

1. Produk baru atau program telah dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank.
2. Ada ljin prinsip terhadap Produk yang akan di terbitkan.
3. Melakukan berdasarkan SLA yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait biaya dan risiko apa yang akan terjadi kepada Debitur atau Nasabah jika akan melakukan realisasi kredit maupun peluncuran produk baru dan memantau pencapaian total kredit dari target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya jika program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Regulator dan pihak eksternal lainnya yang berlaku.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan ini termasuk mereview hasil temuan audit internal maupun eksternal yang belum terselesaikan serta mengukur frekuensi dan besaran nominal denda/penalti. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar.

Sampai bulan Desember 2022, pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko kepatuhan adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan *fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko kepatuhan.

### Potensi Risiko

Ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan regulator maupun peraturan internal lainnya Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Sanksi kewajiban membayar denda.
3. Penurunan peringkat tingkat kesehatan Bank.
4. Larangan pembukaan jaringan kantor.
5. Pembekuan usaha tertentu.
6. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau Pemegang Saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
7. Pemberhentian pengurus Bank.

### Mitigasi Risiko Kepatuhan

Untuk meminimalisir risiko kepatuhan bank melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun ketentuan eksternal baik dari Bank Indonesia, OJK dan peraturan yang berlaku lainnya. Di samping itu Bank juga melakukan analisa kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dengan cara:

1. Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan peraturan baru internal sebelum disahkan oleh Direksi.
2. Melakukan *compliance checklist* pada aktivitas operasional tertentu.
3. Melakukan kajian terhadap peraturan internal.
4. Melakukan sosialisasi peraturan eksternal kepada divisi dan kantor cabang.

### Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank.

Pengukuran risiko reputasi bulan Desember 2022 memiliki peringkat *Low to Moderate* untuk risiko inheren. Sedangkan upaya penerapan manajemen risiko reputasi sendiri berpredikat *satisfactory* dengan melakukan upaya dalam meningkatkan reputasi Bank sehingga didapatkan peringkat komposit 2.

Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan dan edukasi perbankan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

### Potensi Risiko

Risiko Reputasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

1. Pelanggaran etika bisnis, kualitas pemberitaan suatu Bank dan pengaduan nasabah. Pada parameter pelanggaran etika bisnis dapat dilihat dari berbagai kriteria transparansi informasi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran produk dan jasa, kerjasama bisnis dengan *stakeholder* lainnya yang berpotensi mengalami kerugian terhadap risiko reputasi.
2. Dalam suatu Bank ujung tombak perusahaan adalah sumber daya manusia yang handal, dimana dalam pelayanan terhadap nasabah harus melibatkan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia tidak berkualitas maka berpotensi kerugian risiko reputasi terhadap nasabah, terutama terhadap pelayanan nasabah harus sesuai dengan standar layanan yang telah ketentuan yang berlaku.
3. Potensi Risiko yang paling krusial adalah pemberitaan negatif di media masa yang sudah diketahui oleh Nasabah dan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan di Bank yang tidak dapat ditangani dengan baik.

### Mitigasi Risiko Reputasi

Selalu menjaga kredibilitas Bank dihadapan *shareholder* dan *stakeholder*, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank, memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap *service level* yang dilakukan oleh *frontliner* di setiap kantor cabang.

Pada setiap pengaduan nasabah seminimal mungkin dapat diselesaikan sesegera mungkin, dengan cara diinformasikan kepada nasabah agar tidak melakukan komplain melalui media sosial.

### Proses Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Internal untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko untuk memitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

## Upaya Untuk Mengelola Risiko

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.

3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

## Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan).

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, peringkat risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren, Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2022 adalah peringkat 2 (*PK-2*) dengan peringkat risiko inheren *low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Satisfactory*.

Jenis risiko	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Komposit
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

## Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank Jatim selama tahun 2022 cukup memadai. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke berbagai jenjang manajemen serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

## Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

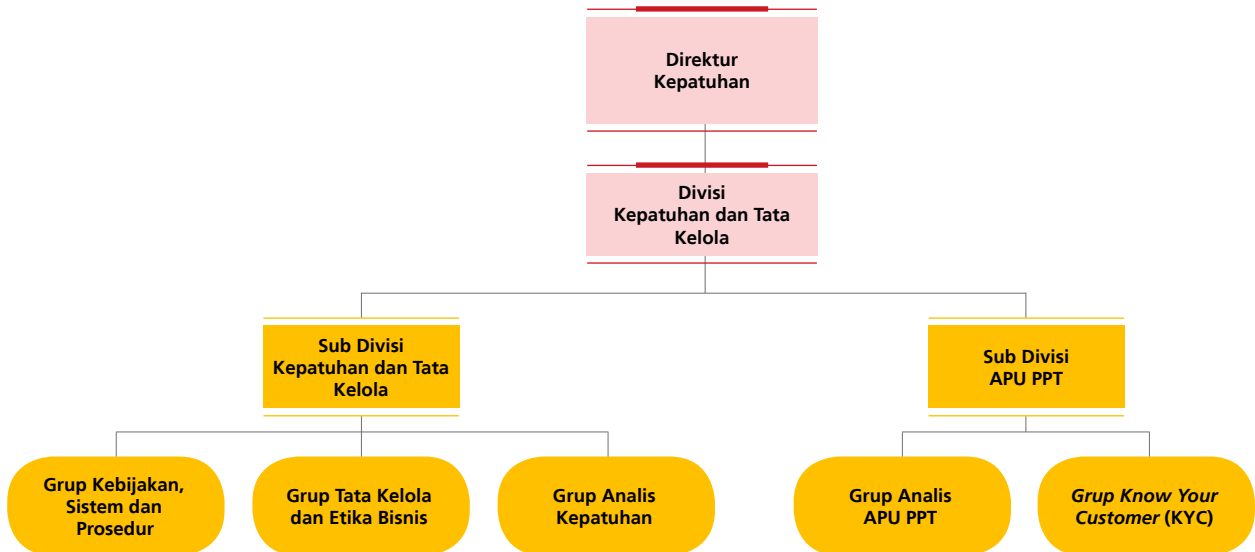
1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko yang efektif yang memuat antara lain:
  - a. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko
  - b. penentuan dan penetapan limit Risiko
  - c. penetapan penilaian peringkat Risiko
  - d. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
  - e. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.





## Fungsi Kepatuhan

### Struktur Organisasi



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

### Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola



#### Glemboh Priambodo

Pemimpin Divisi  
Kepatuhan & Tata Kelola

<b>Kewarganegaraan</b>	: Warga Negara Indonesia
<b>Domisili</b>	: Surabaya
<b>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</b>	: Lahir di Malang pada tahun 1970. Usia 52 tahun per Desember 2022.
<b>Riwayat Pendidikan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Surabaya (1997).</li> <li>• Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (2001).</li> <li>• Magister Manajemen dari STIE ABI Surabaya (2003).</li> <li>• Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (2022).</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	: Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022.
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015), Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015), Pjs. Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2016), Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017), Pemimpin Corporate Secretary (2018), Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama (2021).

## Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

## Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pelatihan <i>Service Leadership to Create Super Service Team</i>	8 Januari 2022
2.	<i>Development Program For Sub Branch Manager</i>	24 Januari 2022
3.	<i>Online Workshop Training Corporate Culture</i> untuk <i>Change Leader</i>	15 Februari 2022
4.	Pelatihan Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Level 1	9 Maret 2022 12 Oktober 2022
5.	Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 1 – <i>Officer</i>	12 Maret 2022 15 Oktober 2022
6.	Program <i>Refreshment/</i> Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	12 Maret 2022
7.	<i>Becoming Extraordinary Leader</i>	21 Maret 2022
8.	Pelatihan <i>Training Design From The Ground Up</i>	31 Mei 2022
9.	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Era Digital	21 Juli 2022
10.	<i>Metaverse, Cryptocurrency</i> – Peluang dan Tantangan di Masa Depan	3 Agustus 2022
11.	Webinar dengan Tema “Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan <i>Market Conduct</i> dan Penerapan Bagi Perbankan	31 Agustus 2022
12.	Pelatihan Publik dengan Topik “Pelaksanaan Kajian Kepatuhan dalam Rangka Pemberian Opini Kepatuhan (disertai contoh Laporan Hasil Kajian Kepatuhan)	21 September 2022



## Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan selama tahun 2022 ada sebagai berikut:

1. Meningkatkan program perwujudan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemantauan secara aktif dan membangun komunikasi dengan unit kerja terkait atas ketentuan eksternal baru yang diterbitkan regulator sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
3. Melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan melalui pemantauan terhadap parameter yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.
5. Pengembangan aplikasi *monitoring* laporan (monilap) khususnya untuk fitur pemantauan temuan Audit Intern dan Eksternal.
6. Melakukan penyempurnaan *Rule Making Rules* yang meliputi pengkinian Kebijakan Pokok Bank, Kebijakan Produk dan Aktivitas, SOP, serta Juknis.

## Perkara Hukum

Selama tahun 2022 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara penting berupa permasalahan hukum perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i> )	15	-	1
2.	Pencabutan Gugatan	2	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	27	2	1

## Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operasinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Penerapan APU & PPT yang telah dijalankan antara lain:

1. Implementasi program APU & PPT dibawah pengawasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, telah memiliki kebijakan dan prosedur didukung sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen yang memadai, dan sumber daya manusia yang cukup kompeten.
2. Optimalisasi penerapan APU & PPT pada semua transaksi keuangan dan operasional bank di seluruh jenjang organisasi.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen penerapan APU & PPT, serta meningkatkan kualitas data nasabah yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelaporan sebagai tugas Pelapor dalam rezim APU PPT.
4. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi pencegahan dan pemberantasan program APUPPT melalui Laporan Go-AML (LTKT,LTKM,LTKL), SIGAP, SIPENDAR, SIPESAT, PEDAL.
5. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating on ML/TF* yang diselenggarakan oleh PPATK.

## Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 (tujuh) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

**Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan**

No	Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
1.	Perkara Nomor 584/ Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 antara PT Hikmah Surya Jaya dengan Bank Jatim	Dimenangkan oleh Bank Jatim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.	Risiko Hukum	Bank Jatim melakukan konfirmasi tertulis kepada Pengadilan terkait status <i>inkracht</i> atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.	Tidak Ada	Rp3.000,-
2.	Perkara Nomor 13/ Pdt.G/2018/PN.BJN tanggal 18 Mei 2018 antara Hj.Ani Rufa'ida, Drs.H.Mahruhin Irfan M.Si dengan Bank Jatim	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra memori kasasi untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp4.032,-
3.	Perkara Kepailitan Nomor 40/Pdt.Sus/ PKPU/2019/PN.Niaga Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama (dalam pailit)	Proses verifikasi berkas kreditur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim telah melakukan verifikasi hutang terhadap PT Citra Gading Asritama/ debitur Bank Jatim (dalam pailit).	Tidak Ada	Rp31.103,-
4.	Perkara Nomor 1048/ Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2019 antara PT Pan Pacific Insurance, PT Waskita Karya dan PT Duta Cipta Pakar Perkasa (dalam pailit) dengan Bank Jatim	Proses kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra memori kasasi untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp109.254,-
5.	Perkara Nomor 61/ Pdt.G/2021/PN.Kdr tanggal 8 November 2021 antara H. Bambang Sumadji HS dengan Bank Jatim	Proses kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra memori kasasi untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp3.967,-
6.	Perkara Nomor 6/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/ PN.Niaga Sby juncto 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga Sby tanggal 17 Februari 2022 antara Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) dengan Bank Jatim	Proses kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra memori kasasi untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp27.823,-
7.	Perkara Nomor 34/ Pdt.G/2022/PN.Bjn tanggal 29 Agustus 2022 antara H. Mudjiono dengan Bank Jatim	Proses persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab- jinawab dan bukti di persidangan untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp3.000,-



## Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

## Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Selama tahun 2022, Bank Jatim belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

## Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan penanganan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Selama tahun 2022 tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

## Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

## Komunikasi Internal

Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi intern antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal.
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS.
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan *Company profile*.
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

## Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id) yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook	: bank jatim
Twitter	: @bank_jatim
Instagram	: bankjatim
Youtube	: bank jatim

## Investor Relation

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim *Investor Relation* Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact* Investor Relation Bank Jatim yaitu:

**Derry Widya Ariyanta**  
**Corporate Secretary Kantor Pusat**  
**Bank Jatim**  
**Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya**  
**Email: [iru@bankjatim.co.id](mailto:iru@bankjatim.co.id)**

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.
2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
  - a. *One on One Meeting*  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.

- b. *Analyst Meeting*  
Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
  - c. *Conference Call*  
Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
  - d. *Site Visit*  
Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
  - e. *Roadshow*  
Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

## Kinerja Investor Relation

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Investor Relation selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. kegiatan *Analyst Meeting*, tahun 2022 dilangsungkan 4 (empat) kali dalam setahun

No	Tanggal	Lokasi	Topik
1	22/02/2022	Bank Jatim Headquarter	<i>Analyst Meeting FY 2021 Audited</i>
2	20/04/2022	Hotel Raffles, Jakarta	<i>Analyst Meeting 3M22</i>
3	25/07/2022	Ritz Carlton, Jakarta	<i>Analyst Meeting 1H22</i>
4	28/10/2022	Ritz Carlton, Jakarta	<i>Analyst Meeting 9M22</i>

2. Komunikasi dengan para analis yakni *One on One Meeting* dan *Conference Call/Online Meeting*.

No	Tanggal	Lokasi	Investor/sekuritas
1	18/11/2022	Bank Jatim Headquarter	Daiwa Asset Management
2	22/11/2022	Benedict Café Pacific Place, Jakarta & Monsieur Spoon Pacific Place, Jakarta	PT Mandiri Sekuritas & PT Trimegah Sekuritas
3	23/11/2022	Café Kitsune ASHTA , Jakarta & Grand Indonesia, Jakarta	PT RHB Sekuritas & Edgbaston Investment partners
4	15/12/2022 & 16/12/2022	Sakana Japanese Restaurant, Jakarta & Paul Pacific Place, Jakarta	PT BNI Sekuritas & PT BRI Danareksa

3. Keikutsertaan *Public Expose Live* yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 September 2022;  
 4. Keikutsertaan CMSE (*Capital market Summit & Expo*) yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia tanggal 13-15 Oktober 2022;  
 5. Sosialisasi Saham dalam rangka turut serta dalam kegiatan PT Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Timur dengan tema "Jelajah Pesisir" pada tanggal 24 Agustus – 19 Oktober 2022.

## Siaran Pers

Tanggal	Siaran Pers
28 Januari 2022	Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman Hadiri Langsung Perjanjian Kerjasama dengan DIKNAS Provinsi Jawa Timur
19 Februari 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
22 Februari 2022	Busrul Iman Paparkan Kinerja Keuangan 2021 Total Aset Tembus 100 Triliun, Bank Jatim Cetak Sejarah
08 Maret 2022	Busrul Iman Serahkan CSR Bank Jatim Peduli Kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan
10 Maret 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemerintah Kota Madiun
10 Maret 2022	Kinerja JConnect Meningkat, Bank Jatim Terus Kembangkan Layanan Digital Banking
10 Maret 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemerintah Kota Madiun
17 Maret 2022	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2021
20 April 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemerintah Kota Surabaya
20 April 2022	Bank Jatim Terus Tunjukkan Pertumbuhan Positif di Triwulan Satu



Tanggal	Siaran Pers
19 Mei 2022	Bank Jatim Raih TOP BUMD 2022
19 Mei 2022	Bank Jatim Bantu Tingkatkan Kualitas UMKM di Kabupaten Kediri
30 Mei 2022	Bank Jatim Raih Penghargaan Bank Terbaik 2022
31 Mei 2022	Direktur Utama Bank Jatim Raih Indonesia Financial Top Leader Awards
09 Juni 2022	Permudah Pembayaran Pajak, Bank Jatim bersama Pemkab Lamongan Launching E-BPHTB dan E-SPTPD
10 Juni 2022	Bank Jatim Bantu Renovasi Pasar Bululawang Melalui Program CSR
14 Juni 2022	Kerjasama dengan Bank Jatim, Pemkot Surabaya Launching KatePay
15 Juni 2022	Bank Jatim Salurkan CSR kepada Pemkab Gresik
16 Juni 2022	Bank Jatim Support Pemprov Jatim Dalam Penyediaan Mesin ADM Kota/Kabupaten di Seluruh Jawa Timur
01 Juli 2022	Bank Jatim Borong Penghargaan di Pengujung Triwulan II 2022
24 Juli 2022	BI-FAST Lengkapi Fitur JConnect Mobile Bank Jatim
25 Juli 2022	Bank Jatim Terus Tunjukkan Pertumbuhan Positif di Triwulan Dua
29 Juli 2022	Bank Jatim Raih Penghargaan Corporate Reputation Awards 2022
31 Juli 2022	Bank Jatim Support Kegiatan Gowes Bareng Gubernur Jatim
20 Agustus 2022	61 Tahun Bank Jatim Sat Set Wat Wet
20 Agustus 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
25 Agustus 2022	Bank Jatim Raih Indonesia Best Bank 2022
29 Agustus 2022	Sinergi Bank Jatim Dengan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Mensukseskan Program GN Lingkaran
29 Agustus 2022	Bank Jatim Dukung Kementerian Pertanian Melalui Program TANI AKUR
06 September 2022	Bank Jatim Borong Dua Penghargaan Top GRC Awards 2022
08 September 2022	Bank Jatim Gelar Treasury BPD Talk 2022
08 September 2022	Bank Jatim Raih Indonesia Top Bank Awards 2022
13 September 2022	Bank Jatim Gelar <i>Public Expose</i> , Terus Tunjukkan Kinerja Positif Pasca Pandemi
14 September 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur
16 September 2022	Bank Jatim Lakukan Kerjasama dengan BKPSDM Lamongan
25 September 2022	Manjakan Nasabah, Bank Jatim Gelar Konser Westlife
25 September 2022	Peringati 2 Dekade Gerakan APUPPT, Bank Jatim Tanam Pohon bersama Pemkot Surabaya
26 September 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemkab Jombang
02 Oktober 2022	Solidaritas Bank Jatim untuk Aremania, Bank Jatim Siap Bantu Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan
06 Oktober 2022	Bank Jatim Serahkan Bantuan Kepada Keluarga Korban Kanjuruhan
09 Oktober 2022	Bank Jatim Juara Umum Turnamen Olahraga Antar BUMD Jawa Timur
12 Oktober 2022	Peringati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Dirut Bank Jatim Menerima Piala Bergilir Gubernur Jawa Timur
21 Oktober 2022	Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Finance Award 2022
26 Oktober 2022	Bank Jatim Raih Penghargaan Inews Indonesia Awards 2022
27 Oktober 2022	Bank Jatim Raih Paritran Award
28 Oktober 2022	Kinerja Moncer, Bank Jatim Catat Laba Bersih Rp1,2 T di Triwulan III
30 Oktober 2022	Bank Jatim Bantu Perbaiki 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bondowoso
01 November 2022	Bank Jatim Perkuat Sinergi dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Timur
05 November 2022	Gemerlap Hadiah Undian SIMPEDA 2022
06 November 2022	Gelar Festival Budaya, Bank Jatim Ajak Masyarakat Mengenang Indahnya Djaman Doeloe
10 November 2022	Bank Jatim Tingkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional Melalui ISO 27001
11 November 2022	Bank Jatim Raih Penghargaan CNBC Indonesia Awards 2022
14 November 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemerintah Kota Malang

Tanggal	Siaran Pers
21 November 2022	Bank Jatim Jalin Kerjasama dengan PT Sinergi Gula Nusantara
27 November 2022	Kolaborasi Bank Jatim dan BNI Tingkatkan Layanan Perbankan Digital
01 Desember 2022	Bank Jatim Raih Indonesia Best Digital Finance Awards 2022
07 Desember 2022	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2022
07 Desember 2022	Bank Jatim Salurkan Bantuan Kepada Pengungsi dan Relawan Erupsi Semeru
09 Desember 2022	Sukseskan Hari Anti Korupsi Sedunia, Bank Jatim Raih Penghargaan LHKPN 2022
15 Desember 2022	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
15 Desember 2022	Sukses Dalam Transformasi Digital, Bank Jatim Raih Top Digital Awards 2022
15 Desember 2022	Bank Jatim Dinobatkan Sebagai Peringkat I Penyalur KUR Terbaik
18 Desember 2022	Pemkab Banyuwangi Apresiasi Penyaluran CSR Bank Jatim
24 Desember 2022	Pemkot Batu dan Pemkab Jember Apresiasi Penyaluran CSR Bank Jatim
27 Desember 2022	Bank Jatim Raih Paritrana Award 2022 Provinsi Jawa Timur
29 Desember 2022	Jelang Akhir Tahun Bank Jatim Terus Tunjukkan Kepedulianya Terhadap Masyarakat Jawa Timur

## Buletin

Volume	Tema Buletin
Edisi 22	Ekonomi Bangkit, Kredit Perbankan Tumbuh Positif
Edisi 23	Menyongsong Laju Ekonomi Di Masa Transisi Pandemi
Edisi 24	Optimisme Dunia Usaha Dorong Penyaluran Kredit Perbankan

## Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil. Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1.	Laporan Registrasi Pemegang Efek	OJK	Bulanan	12
2.	Laporan Hutang Valuta Asing	OJK	Bulanan	12
3.	Laporan Tahunan	BEI dan OJK	Tahunan	1

### Laporan Insidentil

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
1.	04/01/2022	061/01/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
2.	12/01/2022	061/17/CSE/IVR/Srt	BEI	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
3.	18/01/2022	061/013/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
4.	31/01/2022	061/040/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
5.	04/02/2022	061/64/CSE/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
6.	08/02/2022	061/048/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pengumuman RUPS



No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
7.	08/02/2022	061/04/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
8.	23/02/2022	061/055/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
9.	23/02/2022	061/054/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
10.	23/02/2022	061/05/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
11.	23/02/2022	061/056/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Berkelanjutan
12.	24/02/2022	061/49/PKU/AKP/GPL/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
13.	04/03/2022	061/130/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
14.	21/03/2022	061/072/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
15.	21/03/2022	061/09/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti hasil RUPS
16.	21/03/2022	061/08/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Keterbukaan Informasi Terkait Aksi Korporasi
17.	21/03/2022	061/10/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Pengurus
18.	23/03/2022	061/169/CSE/IVR/Srt	BEI	Penyelenggaraan Event Bank Jatim Tahun 2022
19.	04/04/2022	061/200/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
20.	05/04/2022	061/083/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
21.	11/04/2022	061/12/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
22.	11/04/2022	061/235/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Audit
23.	27/04/2022	061/418/PKU/AKP/GPL/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
24.	28/04/2022	061/139/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
25.	10/05/2022	061/293/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
26.	02/06/2022	061/335/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Corporate Secretary
27.	03/06/2022	061/336/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
28.	14/06/2022	061/173/DKM/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
29.	14/06/2022	061/168/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
30.	14/06/2022	061/169/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
31.	15/06/2022	061/170/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
32.	30/06/2022	061/400/CSE/IVR/Srt	BEI	Penyelenggaraan Event Bank Jatim tahun 2022
33.	05/07/2022	061/405/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
34.	28/07/2022	061/534/PKU/AKP/GPL/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
35.	04/08/2022	061/478/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik lainnya
36.	30/08/2022	061/16/CSE/IVR/Srt	BEI	Rencana Penyelenggaraan Public Expose-Tahunan
37.	02/09/2022	061/605/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
38.	08/09/2022	061/19/CSE/IVR/Srt	BEI	Penyampaian Materi Public Expose-Tahunan

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
39.	15/09/2022	061/20/CSE/IVR/Srt	BEI	Laporan hasil <i>Public Expose</i> -Tahunan
40.	30/09/2022	061/21/CSE/IVR/Srt	OJK	Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
41.	05/10/2022	061/681/CSE/IVR/Srt	OJK	Perubahan Komite Audit
42.	05/10/2022	061/680/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
43.	21/10/2022	061/315/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
44.	28/10/2022	061/322/DIR/CSE/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
45.	31/10/2022	061/323/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
46.	31/10/2022	061/770/PKU/AKP/GPLSrt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
47.	31/10/2022	061/23/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
48.	02/11/2022	061/769/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
49.	11/11/2022	061/378/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
50.	15/11/2022	061/376/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
51.	15/11/2022	061/25/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
52.	05/12/2022	061/841/CSE/IVR/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
53.	08/12/2022	061/408/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
54.	09/12/2022	061/27/CSE/IVR/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
55.	27/12/2022	061/432/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

## Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

## Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam buku pedoman No. 058/116/DIR/PRS/KEP tentang pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis (*code of conduct*) tanggal 14 Mei 2019. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja dan bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Etika Kerja
2. Etika Bisnis





## Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja dan etika bisnis mencakup aspek sebagai berikut:

### ETIKA KERJA

Penanganan Benturan Kepentingan	Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka Bank wajib melakukan pengelolaan terhadap terjadinya benturan kepentingan ( <i>Conflict of Interest</i> ). Pengelolaan benturan kepentingan ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengedepankan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi serta meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Penanganan benturan kepentingan untuk mengacu kepada ketentuan internal yang berlaku.
Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;</li><li>Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki;</li><li>Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung;</li><li>Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam ketentuan yang berlaku.</li></ol>
Kegiatan Politik	<ol style="list-style-type: none"><li>Bank menjamin dan menghargai hak pengurus dan pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya;</li><li>Pengurusnya dan pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>Aktivitas yang dilarang:<ol style="list-style-type: none"><li>Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;</li><li>Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu;</li><li>Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan saran dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif;</li><li>Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.</li></ol></li><li>Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik/dan/atau menjadi calon/anggota legislative diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.</li></ol>

### ETIKA BISNIS

Etika Bank dengan Pegawai	Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank;</li><li>Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank;</li><li>Larangan Keterlibatan Pegawai Dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank;</li><li>Kedisiplinan Pegawai;</li><li>Lingkungan Kerja;</li><li>Saluran Aspirasi Pegawai;</li></ol>
Etika Bank dengan Nasabah	<ol style="list-style-type: none"><li>Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;</li><li>Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi;</li><li>Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.</li></ol>

Etika Bank dengan Penyedia Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok;</li> <li>b. Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank;</li> <li>c. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang <i>invoice</i> yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati;</li> <li>d. Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran;</li> <li>e. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan;</li> <li>f. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai <i>market intelligent</i> dan <i>competitor intelligent</i>;</li> <li>g. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini;</li> <li>h. Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara <i>financial</i> dan maupun non <i>financial</i> untuk kepentingan pribadi;</li> <li>i. Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak ekstern;</li> <li>j. Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.</li> </ul>
Etika Bank dengan Pesaing	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli;</li> <li>b. Melakukan <i>market research</i> untuk mengetahui posisi pesaing;</li> <li>c. Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.</li> </ul>
Etika Bank dengan Mitra Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja;</li> <li>b. Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati;</li> <li>c. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik;</li> <li>d. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.</li> </ul>
Etika Bank dengan Pemerintah dan Regulator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya;</li> <li>b. Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum;</li> <li>c. Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku;</li> <li>d. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya;</li> <li>e. Menerapkan standar terbaik (<i>best practices</i>) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan;</li> <li>f. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.</li> </ul>
Etika Bank dengan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial;</li> <li>b. Mendukung upaya pelestarian lingkungan;</li> <li>c. Pengembangan ekonomi masyarakat;</li> <li>d. Kegiatan yang bersifat insidental.</li> </ul>
Etika Bank dengan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif;</li> <li>b. Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama dan Direktur;</li> <li>2. Corporate Secretary;</li> <li>3. Pimpinan Cabang.</li> </ul> </li> <li>c. Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari <i>press conference</i>, <i>press release</i>, <i>interview</i> dan <i>media inquiry</i>;</li> <li>d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.</li> </ul>
Etika Bank Dengan Organisasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi;</li> <li>b. Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.</li> </ul>

## Kepatuhan Terhadap Kode Etik

*Code of Conduct* berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai. Bank mewajibkan Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

## Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

1. Portal *Human Capital*
2. Portal Kepatuhan
3. Pakta Integritas
4. *Campaign Program*, meliputi:
  - a. *Printed advertising* (poster, banner, hanging banner, stiker, dan standing mika)
  - b. *Campaign* lainnya berupa agenda, mouse pad, flashdisk, kipas kertas, davung, tumbler, powerbank, dan pin baju



Pic 1.1

1.1 Salah satu bentuk kampanye *risk culture* adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

- c. Portal dan Identitas Perusahaan
- d. Kuis
- e. Media Sosial
  - *Employee Involvement Campaign* di antaranya Lomba cipta lagu Expressi
  - Leaders Talks Values

## Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

## Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 061/03/02/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Januari 2022 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Punishment Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
  - a. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
    - Teguran Lisan
    - Surat Peringatan
  - b. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
    - Sanksi Atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank Serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
    - Sanksi Atas Indisipliner
    - Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
  - a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
  - b. Kesengajaan
  - c. Finansial
3. Kategori Pelanggaran Disiplin
  - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
  - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
  - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
  - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
    - Teguran Tertulis
    - Pernyataan Tidak Puas
  - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
    - Penundaan Kenaikan Gaji
    - Penurunan Personal Grade
  - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
    - Demosi 1 (satu) Tingkat
    - Demosi 2 (dua) Tingkat
    - Pencabutan Mandat Untuk Pemegang Jabatan
    - Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

## Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah Pihak yang Terlibat	Sanksi
1.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	2	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Indisipliner)
2.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Pernyataan Tidak Puas
4.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
5.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Penurunan Personal Grade
6.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	5	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
7.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
8.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
9.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	12	Demosi 1 Tingkat
10.				Teguran Tertulis
11.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
12.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
13.				Pernyataan Tidak Puas
14.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
15.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
16.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
17.				Demosi 1 Tingkat
18.				Teguran Tertulis
19.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
20.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
21.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	9	Pernyataan Tidak Puas
22.				Teguran Tertulis
23.				Pernyataan Tidak Puas
24.				Pernyataan Tidak Puas
25.				Pencabutan Mandat
26.				Penurunan Personal Grade
27.				Penurunan Personal Grade
28.				Penurunan Personal Grade
29.				Teguran Tertulis



No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah Pihak yang Terlibat	Sanksi
30.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	5	Teguran Tertulis
31.				Teguran Tertulis
32.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
33.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
34.				Keputusan Tidak Bersalah, namun diberikan Surat Peringatan
35.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	2	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Dipenjara Lebih dari 6 bulan)
36.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Dipenjara Lebih dari 6 bulan)
37.	Divisi	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Dipenjara Lebih dari 6 bulan)
38.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Dipenjara Lebih dari 6 bulan)
39.	Divisi	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (Dipenjara Lebih dari 6 bulan)
40.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	2	Penutusan Hubungan Kerja
41.				Teguran Tertulis
42.	Divisi Audit & Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	2	Penurunan Personal Grade
43.				Penurunan Personal Grade
44.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Pernyataan Tidak Puas
45.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	4	Penurunan Personal Grade
46.				Pernyataan Tidak Puas
47.				Pernyataan Tidak Puas
48.				Pernyataan Tidak Puas
49.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	3	Pernyataan Tidak Puas
50.				Pernyataan Tidak Puas
51.				Surat Peringatan 1
52.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
53.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	21	Penurunan Personal Grade
54.				Penurunan Personal Grade
55.				Penurunan Personal Grade
56.				Penurunan Personal Grade
57.				Penurunan Personal Grade
58.				Penurunan Personal Grade
59.				Pernyataan Tidak Puas
60.				Pernyataan Tidak Puas
61.				Pernyataan Tidak Puas
62.				Pernyataan Tidak Puas
63.				Penurunan Personal Grade
64.				Penurunan Personal Grade

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah Pihak yang Terlibat	Sanksi
65.				Penurunan Personal Grade
66.				Penurunan Personal Grade
67.				Penurunan Personal Grade
68.				Pernyataan Tidak Puas
69.				Pernyataan Tidak Puas
70.				Pernyataan Tidak Puas
71.				Pernyataan Tidak Puas
72.				Pernyataan Tidak Puas
73.				Pernyataan Tidak Puas
74.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Penurunan Personal Grade
75.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
76.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
77.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
78.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	8	Demosi 1 Tingkat
79.				Demosi 1 Tingkat
80.				Teguran Tertulis
81.				Teguran Tertulis
82.				Teguran Tertulis
83.				Teguran Tertulis
84.				Teguran Tertulis
85.				Teguran Tertulis
86.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	1	Teguran Tertulis
87.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pernyataan Tidak Puas
88.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
89.	Divisi	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Teguran Tertulis
90.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	2	Penurunan Personal Grade
91.				Penurunan Personal Grade
92.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	2	Pernyataan Tidak Puas
93.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	2	Teguran Tertulis
94.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
95.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	2	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
96.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
97.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
98.	Cabang	Pelanggaran Operasional Dana	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

## Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

### Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 25 April 2012.

### Tujuan *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Management Employee Stock Option Plans (MESOP)*

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

### Jumlah Saham dan/atau Opsi

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation (ESA)* dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans (MESOP)* sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

### Jangka Waktu Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

#### **EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)**

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam program ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Program ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)*. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
  - a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Bank Jatim.
  - b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatangkan di Bursa Efek Indonesia.
  - c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
  - d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
    - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
    - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*
    - Alokasi berdasarkan jabatan
    - Saham Penghargaan dikenakan "*Lockup*" selama 2 (dua) tahun
    - Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
2. Saham Jatah Pasti
  - a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
  - b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
  - c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.
  - d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
    - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
    - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
    - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
    - Saham Jatah Pasti dikenakan "*Lockup*" selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga

secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

### MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS (MESOP)

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (*di-exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan/atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

**Tabel Hak Opsi Program MESOP**

<b>Tahap I</b>	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
<b>Tahap II</b>	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
<b>Tahap III</b>	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

### Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Bank Jatim melakukan program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sejak tahun 2016 dan berakhir di

tahun 2020 dengan harga penawaran Rp450, Rp409 dan Rp599. Jumlah saham yang diterbitkan dengan harga Rp409 sebanyak 3.163.900 lembar saham dan saham dengan harga Rp599 sebanyak 9.963.600 lembar saham. Sehingga total modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham. Pada tahun 2022, Bank Jatim tidak melakukan program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sehingga tidak terdapat pembagian saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

## Whistleblowing System

### Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
  - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Internal Bank Jatim (Jalan Basuki Rahmat No.98 – 104, Surabaya).
  - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Perlindungan Bagi Whistleblower

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
  - Pemecatan.
  - Demosi.
  - Diskriminatif.



- Intimidasi.
- perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

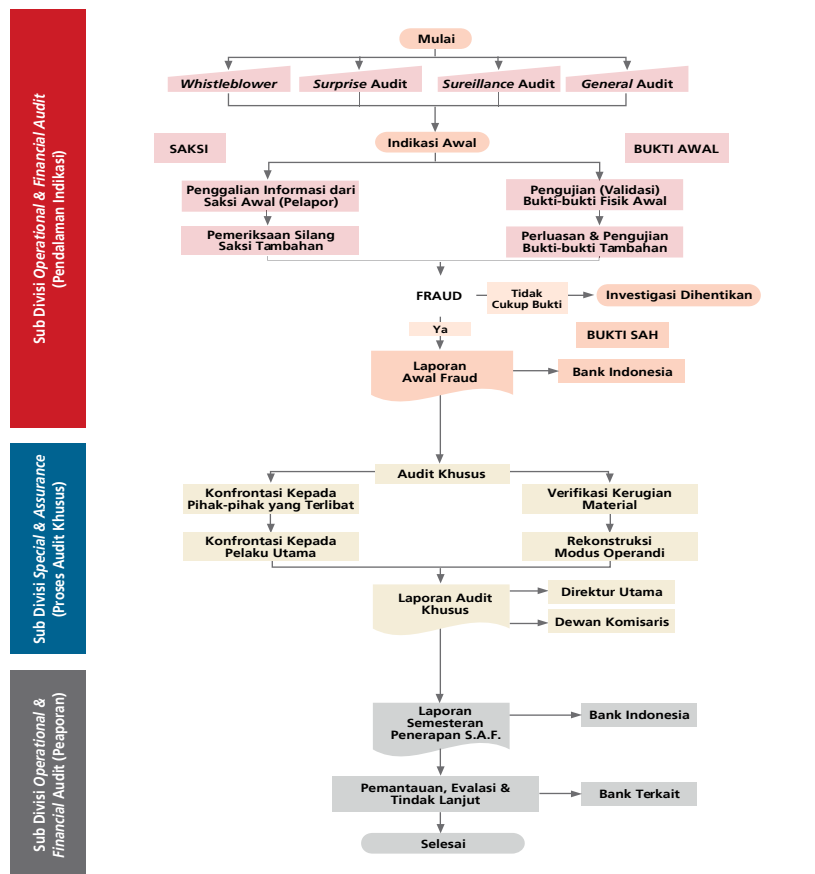
1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Intern Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan
3. jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai *Standard Operating Procedure (SOP) Punishment Pegawai Bank Jatim* yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud (SAF)*, antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

## Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud



Sub Divisi Operational & Financial Audit (Pendalaman Indikasi)

Sub Divisi Special & Assurance (Proses Audit Khusus)

Sub Divisi Operational & Financial Audit (Peaporan)

## Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

## Pengelola Laporan Pelanggaran

*Database* pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Internal serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Audit Operational & Keuangan.

## Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

## Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2022 terdapat 10 (sepuluh) laporan melalui sarana *whistleblower* dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Pengaduan Tahun 2022	10 Pengaduan
2	Jumlah Pengaduan yang Diproses	10 Pengaduan
3	Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	8 Pengaduan
4	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	2 Pengaduan

## Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2022

Pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam *Standard Operating Procedure (SOP) Punishment* Pegawai Bank Jatim.

Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Tahun 2021	Jumlah	Sanksi/Tindak Lanjut
Terbukti	10	10
Tidak Terbukti	0	0

## Program Anti Korupsi

### Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, *Suap* dan/atau *Gratifikasi*

#### Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti fraud* Bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti *fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Internal.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti *fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi Pelaporan dan Sanksi, Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

### Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know your employee*

### Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan untuk memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance system*.

### Investigasi Pelaporan dan Sanksi

Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

### Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut atas *fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan empat pilar tersebut dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal Bank
2. Kompleksitas kegiatan usaha
3. Potensi, jenis dan risiko *fraud*

### 4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

### Kebijakan Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi, Bank membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 058/092/DIR/KPT/KEP tanggal 11 Maret 2019. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Bank. Adapun susunan organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Bank Jatim sebagai berikut:

Jabatan	Jabatan dalam Tim
Direktur Utama	Pembina/Pengarah
Direktur Kepatuhan dan Human Capital	Penanggung Jawab
Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola	Ketua
Pemimpin Divisi Human Capital	Wakil Ketua
Pemimpin Sub Divisi Tata Kelola	Sekretaris
Corporate Secretary	Anggota
Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota

Sebagai upaya dalam mencegah praktik korupsi, Bank Jatim melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi yang mengacu pada ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:

- 1) Diseminasi Internal dan Eksternal
  - a. Diseminasi media sosialisasi Pesan Antigratifikasi
  - b. Sosialisasi gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal
  - c. Keikutsertaan pelaksanaan e-learning gratifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  - d. Keikutsertaan pelaksanaan bimbingan teknis gratifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 2) Identifikasi dan Mitigasi Risiko Titik Rawan Gratifikasi
  - a. Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi dan/atau memahami risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas Bank, dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal.
  - b. Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan gratifikasi.
- 3) Inovasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- 4) Penanganan Pelaporan Gratifikasi

Secara berkala dilakukan pemantauan oleh Divisi Kepatuhan & Tata Kelola selaku Koordinator Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atas penerimaan gratifikasi yang terjadi di seluruh unit kerja. Selanjutnya, apabila terdapat penerimaan gratifikasi maka Divisi Kepatuhan & Tata Kelola meneruskan laporan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dilaporkan secara berkala oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui website [www.gol.kpk.go.id](http://www.gol.kpk.go.id). Atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Bank Jatim memperoleh nilai sebesar 92,91 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai
<b>Implementasi (45%)</b>		
1	<b>Diseminasi Gratifikasi (30%)</b>	
	- Diseminasi Internal	100
	- Diseminasi Eksternal	75
Total Nilai Indikator: 25,5		
2	<b>Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko (30%)</b>	
	- Identifikasi Risiko/ Titik Rawan Gratifikasi	85
	- Mitigasi Risiko	80
Total Nilai Indikator: 24,75		
3	<b>Inovasi (40%)</b>	85
Total Nilai Indikator: 34		
<b>Pelaporan (55%)</b>		
4	<b>Penanganan Pelaporan Gratifikasi (100%)</b>	100
Total Nilai Indikator: 100		
<b>Total Nilai Implementasi PPG 2022: 92,91</b>		

### Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Sebagaimana ketentuan tersebut telah dicabut dan diatur pada SK Direksi No. 060/03/47/DIR/KPT/KEP tanggal 25 November 2021 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Selain itu, Bank Jatim juga memiliki Unit Pengelolaan LHKPN (UPL) yang ditetapkan melalui SK Direksi No. 059/258/DIR/KPT/KEP tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelolaan Aplikasi E-LHKPN di Lingkungan Bank Jatim.

Dalam rangka kepatuhan Bank atas komitmen penyelesaian LHKPN tahun pelaporan 2022 kepada KPK, UPL melaksanakan pelatihan LHKPN kepada 72 (tujuh puluh dua) Wajib Laporan meliputi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang. Atas hal tersebut, Bank Jatim memperoleh penghargaan dari KPK dalam hal pengelolaan LHKPN dengan kategori keaktifan dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua KPK kepada Direktur Utama Bank Jatim pada saat acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 9 Desember 2022.

### Benturan Kepentingan

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur pada SK Direksi No. 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020. Adapun yang termasuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Gratifikasi
2. Penyalagunaan Aset
3. Penyalagunaan informasi rahasia/penting
4. Perangkapan Jabatan
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur
6. Pengawasan yang tidak profesional
7. Penilaian subjektif dan tidak independen
8. Putusan perijinan, alokasi/budget, investasi
9. Penentuan rekanan (*procurement*)
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja
11. Penggunaan informasi
12. Komersialisasi pelayanan Publik

Dalam penerapannya, seluruh Kantor Cabang dan Divisi melakukan pelaporan Benturan Kepentingan kepada Divisi Kepatuhan & Tata Kelola setiap triwulan maupun insidental, melalui proses pengungkapan dan mekanisme pelaporan sebagai berikut:

1. Pengungkapan Benturan Kepentingan
  - a. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam

pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.

- b. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan
  - c. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
  - d. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank
  - e. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.
2. Mekanisme Laporan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
- a. Pegawai yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui atasannya secara berjenjang, wajib melaporkan tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan;
  - b. Pengungkapan laporan benturan kepentingan secara insidental, dituangkan secara tertulis dalam bentuk

surat yang dilampirkan dengan risalah rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas keputusan yang diambil dan dialamatkan ke Kantor Pusat Cq. Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola.

- c. Laporan benturan kepentingan Divisi sebagaimana dimaksud dalam poin b, dikoordinir oleh Pemimpin Divisi
- d. Laporan benturan kepentingan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam poin b, setelah mendapat data dari seluruh jaringan kantor di wilayah kerja cabang, dikoordinir oleh Pemimpin Bidang Operasional
- e. Terkait dengan laporan benturan kepentingan yang diterima Divisi Kepatuhan & Tata Kelola, maka untuk selanjutnya Divisi Kepatuhan & Tata Kelola melakukan analisa. Apabila dari hasil analisa yang dilakukan tersebut diduga benar terjadi Benturan Kepentingan, maka Divisi Kepatuhan & Tata Kelola berkoordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran atas transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dimaksud
- f. Hasil analisa dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c dan d selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktur Utama secara triwulan melalui Laporan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dengan adanya pengungkapan dan pelaporan Benturan Kepentingan tersebut, maka Bank dapat melakukan mitigasi sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang terindikasi Benturan Kepentingan.

## Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

No.	Pelatihan/Sosialisasi	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pelatihan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2022	10, 12, 14, 17, 18, 22 dan 24 Januari 2022
2.	Sosialisasi Gratifikasi	13 Juni 2022

## Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2021)	Tahun Berjalan (2022)	Tahun Sebelumnya (2021)	Tahun Berjalan (2022)	Tahun Sebelumnya (2021)	Tahun Berjalan (2022)
<b>Total Fraud</b>	-	-	21	14	4	2
Telah Diselesaikan	-	-	11	14	4	2
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	11	1	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	3	-	1	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	2	-	1

## Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada Laporan Berkelanjutan tahun 2022. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2022 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

## Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Uraian terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

## Rencana Strategis Bank

Uraian terkait Rencana Strategis Bank disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

## Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2022, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

## Perselisihan Internal

Selama tahun 2022 tidak terdapat perselisihan internal yang disebabkan karena kebijakan remunerasi.

## Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab V yaitu sebagai berikut:

### KRITERIA *INSIDER TRADING*

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan pada sub-bab "dasar hukum" di atas, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai kasus *Insider trading*, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik.  
Yang dimaksud "orang dalam" berdasarkan penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal adalah:

- a. Komisaris, Direktur atau Pegawai Emiten;
  - b. Pemegang saham utama emiten;
  - c. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
  - d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.
2. Mempunyai informasi orang dalam  
Yang dimaksud dengan "informasi atau fakta material" berdasar Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Pasar Modal adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum.

Selama tahun 2022 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
  - a. Visi dan Misi Perseroan
  - b. Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
  - c. Pedoman dan Tata Tertib Komite
  - d. Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti *e-form* kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.



# Penerapan Pedoman

## Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	<b>Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.</b>	
A.1.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan: Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta nomor 95 tanggal 31 Mei 2021.</p> <p>Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme "mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara".</p> <p>Atau dengan melakukan <i>electronic voting</i> melalui eASY.KSEI</p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan: Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Pada RUPS Tahun Buku 2021, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.</p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs Web dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2021 dan RUPSLB tahun 2022.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.2.	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan: Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau <i>investor</i> sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 056/209/DIR/CSE/KEP tentang BPP <i>Investor Relation</i>.</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Kebijakan Komunikasi dengan <i>Investor</i> seperti yang dijelaskan pada rekomendasi 4 dapat diakses masyarakat melalui <i>website</i> Bank Jatim pada link berikut: <a href="https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan">https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan</a></p>
<b>B.</b>	<b>Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b>	
B.1.	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	Komisaris
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, visi misi dan sasaran serta arah strategi, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.</p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Mengacu pada Akta Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, "Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan penjurangan calon internal Bank Jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut: integritas, kompetensi, pemahaman perbankan dan ekonomi makro, pemahaman tentang ekonomi Jawa Timur, ketentuan internal dan eksternal perbankan".</p>
B.2.	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolejal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/005/DK/KEP tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p><b>Explain</b></p> <p>Kebijakan pengunduran diri bagi Dewan Komisaris hanya jika yang bersangkutan adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan, yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka.</p>
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Dalam menjalankan fungsi Nominasi Calon Direksi, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 maka Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DKM/KEP Tanggal 03 Oktober 2022.</p>
<b>C.</b>	<b>Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi</b>	
C.1.	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan: Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) Direksi dengan komposisi saat ini berjumlah 6 (enam) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta efektivitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank yang saat ini berjumlah 5 (lima) orang.</p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolejal.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Anggota Direksi yang diangkat pada RUPS telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, diantaranya yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Anggota Direksi juga telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan.</p>
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan: Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Profil Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan</p> <p>1. Nama: Ferdian Timur Satyagraha (2017-2022)</p> <p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor's Degree, Finance, Deakin University Tahun 2003</li> <li>- Master's Degree, Business/Commerce Deakin University Tahun 2006</li> </ul> <p>2. Nama: Edi Masrianto (2022-saat ini)</p> <p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Jember, 1989</li> <li>- S2 Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gajah Mada, 2004</li> </ul> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Direksi telah menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS Tahunan dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegiat. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegiat, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 059/229/DIR/PRS/KEP tanggal 07 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi. Pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi juga diatur ketentuan terkait berakhirnya jabatan Anggota Direksi dan pemberhentian Anggota Direksi.</p> <p>Kebijakan Budaya Beretika telah diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 21 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.	<b>Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan</b>	
D.1.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Penjelasan: Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Bank memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading dituangkan pada Keputusan Direksi Nomor 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang diatur dalam SK Direksi nomor 057/008/DIR/KEP/TRE tanggal 11 Januari 2018 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri.</p>
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Bank memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti Fraud, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (<i>Code of Conduct</i>), Pedoman Benturan Kepentingan, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi. Selain memiliki kebijakan tersebut, Bank Jatim juga melakukan implementasi pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi</p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam SK Direksi nomor 060/03/34/DIR/UMM/KEP tanggal 04 Oktober 2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur, salah satunya terkait Perjanjian Kredit terdapat pada SK Direksi Nomor 061/03/26/DIR/OPR/KEP tanggal 01 Juli 2022 tentang Standart Operating Procedure Operasional Kredit atau Pembiayaan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Perjanjian Kredit atau Akad Pembiayaan (PK/AP) adalah Perikatan pinjam-meminjam uang secara tertulis antara Bank (sebagai Kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitur) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang. Isi Perjanjian Kredit atau Pembiayaan mencakup ketentuan dan persyaratan (<i>term &amp; condition</i>) yang merupakan kehendak para pihak mengenai hak dan kewajibannya.</p>
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p><b>Comply</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</li> <li>2. Berdasarkan SK Direksi Nomor 061/03/60/DIR/AUI/KEP tanggal 27 Desember 2022 tentang SOP Aktivitas Audit Internal.</li> </ol>
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan: Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka Panjang kepada Direksi yang diungkapkan dalam SK Dewan Komisaris No. 061/03/06/DKM/KEP tanggal 25 Agustus 2022 tentang Standart Operating Procedure Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Pengurus beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka Panjang kepada Karyawan yang diungkapkan dalam SK Direksi No. 061/03/29/DIR/HCP/KEP tanggal 18 Juli 2022 tentang Standart Operating Procedure Total Reward PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
E.	<b>Aspek 5: Keterbukaan Informasi</b>	
E.1.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan: Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instagram @Bank Jatim</li> <li>• Facebook @Bank Jatim</li> <li>• Twitter @Bank Jatim</li> <li>• Youtube @Bank Jatim</li> </ul> <p>SK Media Sosial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor 060/256/DIR/CSE/KEP tanggal 31 Agustus 2021 dan BPP <i>Public Realition</i> Nomor 059/148/DIR/CSE/KEP tanggal 8 Juni 2020</p>
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan: Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p><b>Comply</b></p> <p>Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>

## Governance Principles for Banks yang Diterbitkan Oleh Committee In Banking Supervision

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris</li> <li>- SK Dewan Komisaris Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</li> </ul> <p>Salah satunya yakni Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan.</p>

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	Dewan Komisaris Bank Jatim telah memenuhi kualifikasi dan komposisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan internal Bank SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Salah satu komponen yang telah dipenuhi yakni Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan keuangan, Hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Hal ini juga telah terakomodir dalam ketentuan internal Bank Jatim SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana tercermin pada Struktur Tata Kelola Bank Jatim SK Direksi Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal tersebut diatur pada ketentuan internal Bank Jatim: - SK Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 9 Februari 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bank Jatim senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Serta mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Jatim telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko, menyusun profil risiko. Pengukuran dan penilaian risiko sesuai Kebijakan yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Jatim.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penyampaian profil risiko disampaikan setiap triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (Komenko) serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control, risk management</i> dan <i>governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.



Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Landasan Hukum remunerasi Bank Jatim merujuk pada SK Dewan Komisaris No. 061/03/06/DKM/KEP tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Jatim senantiasa meng- <i>update</i> website Perseroan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi <i>stakeholder</i> seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

## Good Corporate Governance Assessment

### Self Assessment

#### Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian adalah kertas kerja SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

#### Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan *assessment* adalah divisi-divisi terkait meliputi:

1. Dewan Komisaris
2. Komite Dewan Komisaris
3. Corporate Secretary
4. Divisi Audit Internal
5. Divisi Kepatuhan & Tata Kelola
6. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan
7. Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi
8. Divisi Operasi
9. Divisi Dana & Jasa
10. Divisi Teknologi Informasi
11. Divisi Pengendalian Keuangan
12. Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja

#### Skor Penilaian

Tabel Hasil GCG Assessment

Parameter	Bobot (%)	Jun 2021	Des 2021	Jun 2022	Des 2022
		Skor x Bobot			
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10	0.26	0.3	0.2	0.2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0.6	0.6	0.6	0.6
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10	0.3	0.3	0.3	0.2
Penanganan Benturan Kepentingan	10	0.21	0.3	0.3	0.21
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5	0.15	0.15	0.1	0.15
Penerapan Fungsi Audit Intern	5	0.15	0.15	0.15	0.15
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5	0.09	0.09	0.1	0.1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.5	0.19	0.19	0.19	0.225

Parameter	Bobot (%)	Jun 2021	Des 2021	Jun 2022	Des 2022
		Skor x Bobot			
Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan debitur besar ( <i>Large Exposure</i> )	7.5	0.15	0.12	0.15	0.225
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15	0.25	0.23	0.23	0.3
Rencana Strategis Bank	5	0.1	0.15	0.15	0.15
<b>Total Skor</b>		<b>2.45</b>	<b>2.58</b>	<b>2.47</b>	<b>2.51</b>
<b>Peringkat</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

## Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2022, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

## ASEAN Corporate Governance Scorecard

Penilaian atas penerapan good corporate governance (GCG) juga dilaksanakan berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

### Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Hak-hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

## Praktik

### Bad Corporate Governance

Perseroan menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Perseroan. Oleh karena itu, selama tahun 2022, Perseroan tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Keterangan	Praktik
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> .	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara LT <i>hardcopy</i> dengan LT <i>softcopy</i> .	Nihil

## Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) melalui *Domestic Ranking Body (DRB)* sebagai perwakilan di setiap negara peserta untuk melakukan penilaian di skala nasional dan ditunjuk oleh regulator masing-masing negara.

### Skor Penilaian

Bank Jatim telah dinilai oleh ACMF untuk tahun 2017 dan 2021. Hasil penilaian tingkat praktik GCG sesuai kriteria ACGS di tahun 2017, Bank Jatim memperoleh penghargaan dengan kategori 2 *Most Improved PLCs*. Selanjutnya pada tahun 2021, Bank Jatim memperoleh penghargaan dengan kategori *ASEAN Asset Class PLCs*.

## Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Berdasarkan hasil penilaian ACGS Bank Jatim Tahun 2021, terdapat rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola di Bank Jatim. Rekomendasi perbaikan tersebut menjadi dasar dalam melakukan *continues improvement*.

# Tanggung Jawab Sosial Perusahaan







Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam proses dan pada tingkat pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat mendorong keberhasilan Bank dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk memastikan integritas lingkungan serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai lembaga jasa keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Jatim mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar internasional yaitu ISO 26000. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

# Kriteria OJK dan SK-16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
<b>UMUM</b>			
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.		√	
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.		√	SK-16
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di:		
	1. Sampul muka.	√	SK-16
	2. Samping.	√	
	3. Sampul belakang.	√	
	4. Setiap halaman.	√	
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan.		√	SK-16
<b>KILAS KINERJA</b>			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	17	SEOJK 16 SK-16
	2. Laba bruto.	18	
	3. Laba Operasional.	18	
	4. Laba sebelum pajak.	18	SEOJK 9 SK-16
	5. Laba bersih.	18	
	6. Laba (rugi).	18	SEOJK 16 SK-16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	18	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	N/A	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	N/A	
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	N/A	SEOJK 16
	11. Laba (rugi) per saham.	18	
	12. Jumlah aset.	16	SEOJK 9 SEOJK 16 SK-16
	13. Investasi pada entitas asosiasi.	N/A	
	14. Jumlah liabilitas.	17	
	15. Jumlah ekuitas.	17	
	16. Dana pihak ketiga.	17	SEOJK 9
	17. Pinjaman yang diterima.	17	
	18. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	20	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	20	
	20. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	19	SEOJK 16
	21. Rasio lancar.	20	
22. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	19		



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	23. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	19	
	24. Rasio KPMM.	19	
	25. Aset produktif.	19	
	26. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL).	19	
	27. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	20	SEOJK 9
	28. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR).	20	
	29. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM).	20	
	30. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	20	
	31. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	20	
	32. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	20	
	33. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	20	SEOJK 9 SEOJK 16 SK-16
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:		
	a. Jumlah saham yang beredar.	21	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	21	SEOJK 16 SK-16
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	21	
	d. <i>Volume</i> perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	21	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham ( <i>stock split</i> ), penggabungan saham ( <i>reverse stock</i> ), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:		
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.	23	SEOJK 16
	b. Rasio pemecahan saham ( <i>stock split</i> ), penggabungan saham ( <i>reverse stock</i> ), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham ( <i>suspension</i> ) dan/atau pembatalan pencatatan saham ( <i>delisting</i> ) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham ( <i>suspension</i> ) dan/atau pembatalan pencatatan saham ( <i>delisting</i> ) tersebut.	23	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham ( <i>suspension</i> ) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham ( <i>delisting</i> ) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham ( <i>suspension</i> ) dan/atau pembatalan pencatatan saham ( <i>delisting</i> ) tersebut.	23	SEOJK 16
Informasi Saham			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Informasi memuat:		
	1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar ( <i>outstanding</i> ).		
	2. Tingkat bunga/imbalan.		
	3. Tanggal jatuh tempo.	23	SK-16
	4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2021 dan 2022.		
<b>LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</b>			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	37	SEOJK 9 SEOJK 16 SK-16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	37	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	37	SEOJK 16
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	38	SEOJK 9 SEOJK 16 SK-16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	38	
	f. Struktur organisasi.	32	
	g. Aktivitas utama.	32	
	h. Teknologi informasi.	38	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	31-32	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	33-37	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	32-33	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	32	SEOJK 9
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	32	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	32	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	N/A	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	39-40	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	32	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	39-40	SEOJK 9 SEOJK 16 SK-16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	40-42	SEOJK 9 SK-16
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	43-44	SEOJK 9 SK-16





Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	47-49	SEOJK 16 SEOJK 9 SK-16
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	49	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	49-52	
	4. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut	51-52	
	5. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	52	SEOJK 9 SEOJK 16
	6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	47	SEOJK 9
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	7. Penilaian kinerja Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	52	SK-16
	Memuat hal-hal sebagai berikut:		
	1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri.		
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan.		
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya.	54-55	SK-16	
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.			
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:		
	1. Alamat	58	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
4. Alamat situs web			
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:		
	1. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi:	59-60	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
	a. Alamat		
	b. Nomor telepon		
c. Alamat surat elektronik			
d. Alamat situs web			
<b>Catatan:</b> apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.			
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	62-63	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
	<b>Catatan:</b> apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		
	1. Visi Perusahaan	64	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
	2. Misi Perusahaan	65	
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku.	64	
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan ( <i>corporate culture</i> ) yang dimiliki Perusahaan.	66-68		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	69-70	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	70	
Wilayah Operasional	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	70-81	
	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	82-83	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	84-85	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	124	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
b. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.			
c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	86-96		
d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.			
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut.		SEOJK 9 SEOJK 16	
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.			
8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16	



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
c. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.			
d. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	97-102		
e. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.			
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 SK 16	
8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.			
9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16	
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	106-115	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	116-117	SEOJK 9 SEOJK 16
	Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan serta adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan.	253-256	SK 16
	Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	256	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komposisi pemegang saham	<p>Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</li> <li>Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya).</li> <li>Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepemilikan institusi lokal.</li> <li>Kepemilikan institusi asing.</li> <li>Kepemilikan individu lokal.</li> <li>Kepemilikan individu asing.</li> </ol> </li> <li>Rincian Nama Pemegang Saham yang meliputi 20 Pemegang Saham Terbesar dan Persentase Kepemilikannya</li> </ol> <p>Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	118-123	<p>SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16</p> <p>SEOJK 16</p> <p>SEOJK 16</p>
Pemegang saham utama dan pengendali	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.</p> <p><b>Catatan:</b> yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p>	123	<p>SEOJK 9 SEOJK 16</p>
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	<p>Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.</p>	123	<p>SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16</p>



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	<p>Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:</p> <p>Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i>.</li> <li>Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.</li> <li>Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.</li> </ol>	N/A	SEOJK 9
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	124	SEOJK 16 SK 16
Kronologis pencatatan saham (termasuk <i>private placement</i> ) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi ( <i>corporate action</i> ), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham ( <i>stock split</i> ), penggabungan saham ( <i>reverse stock</i> ), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	125-126	SEOJK 16 SK 16
Kronologis penerbitan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, jenis tindakan perusahaan ( <i>corporate action</i> ) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek (jika ada).	126	SEOJK 16 SK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	<p>Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat.</li> <li>Periode penugasan.</li> <li>Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.</li> <li>Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.</li> <li>Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.</li> </ol> <p>Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	127	SEOJK 16 SK 16
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	127-128	SEOJK 16 SK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).</li> <li>Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.</li> <li>Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.</li> <li>Masa berlaku (untuk sertifikasi).</li> </ol>	129-134	SEOJK 9 SK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi	
Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan.	Meliputi paling kurang:			
	1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu.			
	2. Isi Kode Etik.			
	3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan.		135	
	4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir).			
	5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.			
	6. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.			
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN</b>				
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang ( <i>corporate plan</i> ). 2. Rencana jangka menengah dan pendek ( <i>business plan</i> ).	142	SEOJK 13	
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:			
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	147-174		
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:			
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	147-174	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	147-174		
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	163-164, 174-175		
	d. Profitabilitas.	163-164, 174-175		
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:			
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	176-177, 179-186		
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	177, 186-189	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan).	183-184		
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	187		
	5. Ekuitas.	178, 189-191		
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	191-198		
	7. Arus kas.	198-200		
	8. Suku bunga dasar kredit.	207	SEOJK 9	
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		208-215	SEOJK 9	
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:			
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	201-202	SEOJK 16 SK 16	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	202-203		
Bahasan tentang struktur modal ( <i>capital structure</i> ) dan kebijakan manajemen atas struktur modal ( <i>capital structure policy</i> ).	Penjelasan atas:			
	1. Rincian struktur modal ( <i>capital structure</i> ) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	216	SEOJK 16 SK 16	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal ( <i>capital structure policies</i> ).	214-215		
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	214-215		



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama pihak yang melakukan ikatan.</li> <li>Tujuan dari ikatan tersebut.</li> <li>Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut.</li> <li>Mata uang yang menjadi denominasi.</li> <li>Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p>	230	SEOJK 16 SK 16
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis investasi barang modal.</li> <li>Tujuan investasi barang modal.</li> <li>Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p>	230	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p><b>Catatan:</b> apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.</p>	232	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	<p>Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p>	232-233	SEOJK 16 SK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	<p>Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:</p>		
	1. Pendapatan/penjualan.	234	SEOJK 16
	2. Laba (rugi).	234	
	3. Struktur modal ( <i>capital structure</i> ).	235	SEOJK 16
	4. Pemasaran.	235	
	5. Pengembangan SDM.	235	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	234	SEOJK 16
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	236	SEOJK 16
	2. Laba (rugi).	236	
	3. Struktur modal ( <i>capital structure</i> ).	237	SEOJK 16
	4. Kebijakan dividen.	237	
	5. Pemasaran.	237	
	6. Pengembangan SDM.	237	
7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	236	SEOJK 16	
Uraian tentang aspek pemasaran.	<p>Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p>	143-146	SEOJK 9 SEOJK 16 SK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	<p>Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.</li> <li>2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.</li> <li>3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).</li> <li>4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p>	238	SEOJK 16 SK 16
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total perolehan dana.</li> <li>2. Rencana penggunaan dana.</li> <li>3. Rincian penggunaan dana.</li> <li>4. Saldo dana.</li> <li>5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.</li> <li>b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Catatan:</b> apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p>	239	SEOJK 16 SK 16
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.</li> <li>b. Nama pihak yang melakukan transaksi.</li> <li>c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).</li> <li>d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.</li> <li>e. Pemenuhan ketentuan terkait.</li> <li>f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>).</li> <li>2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms length principle</i>).</li> </ol> </li> <li>g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.</li> </ol>	239-241	SEOJK 16 SK 16





Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	<p>h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.</p> <p>i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>		SEOJK 16 SEOJK 13 SK 16
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.</li> <li>Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	242-244	SEOJK 16 SK 16
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan kebijakan akuntansi.</li> <li>Alasan perubahan kebijakan akuntansi.</li> <li>Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	244	SEOJK 16 SK 16
Informasi kelangsungan usaha.	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</li> <li><i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1.</li> <li>Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> Apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	245	
Adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.		N/A	SEOJK 9
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	216-230	SEOJK 9
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN</b>			
RUPS	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.</li> <li>Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.</li> </ol> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	288-292 292-295	SEOJK 16
Direksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.</li> </ol>	298	SEOJK 13 SEOJK 16 SK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) Direksi.	297-298	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal Rapat.</li> <li>Peserta Rapat.</li> <li>Agenda Rapat.</li> </ol>	300-303	SEOJK 16 SK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).</li> <li>Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).</li> </ol>	303-305	SEOJK 16 SK 16
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur penilaian kinerja.</li> <li>Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.</li> </ol> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	306-308	SEOJK 16
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bank yang bersangkutan..</li> <li>Bank lain.</li> <li>Lembaga keuangan bukan bank.</li> <li>Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.</li> </ol>	343	SEOJK 13
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	308-309	SEOJK 13 SEOJK 16 SK 16
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) Dewan Komisaris.	311	SEOJK 16 ARA
	3. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kriteria penentuan Komisaris Independen.</li> <li>Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.</li> </ol>	313-314	
	4. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal Rapat.</li> <li>Peserta Rapat.</li> <li>Agenda Rapat.</li> </ol>	315-321	SEOJK 13 SEOJK 16 SK 16



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	321-323	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	6. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	323-329	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
c. Pihak yang melakukan penilaian.			
	7. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	330-334	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.			
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	<b>Catatan:</b> apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	340-342	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	338	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	338	
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	339	
c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan <b>Catatan:</b> apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	339-340	SEOJK 16 SK 16	
d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	340		
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:		
	a. Nama.		
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.	336	
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		SEOJK 16
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	335	
e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	337		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		SEOJK 16 SK 16
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		SEOJK 16
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	347-348	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		SEOJK 16 SK 16
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		SEOJK 16 SK 16
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	345-346	SEOJK 13 SK 16
	8. Pernyataan independensi komite audit.	349	SEOJK 16 SK 16
9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	351	SEOJK 16	
10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	349-350	SEOJK 13 SEOJK 16	
11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) komite audit.	351-352	SEOJK 13 SK 16	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	354-355	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		SEOJK 16 SK 16
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	356	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	358	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	353	
10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ).	353		
11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	356-357		
12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	359		
13. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	359		



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		
	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		361-363
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
6. Periode dan masa jabatan anggota komite.			
7. Pernyataan independensi komite.		364	
8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).		366	
9. Uraian tugas dan tanggung jawab.		359-360	
10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) komite.		359	
11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.		364-366	
12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.		367-368	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.		
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		369
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.		369-370	
6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.		370	
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.		
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		372
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.		373
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.		374
6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.		371	
7. Uraian tugas dan tanggung jawab.		373	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam ( <i>charter</i> ) unit audit internal.	373	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	375	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	405-406	
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	<b>Catatan:</b> apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal ( <i>internal Control</i> ) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	406-408	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i> ).	409	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	409	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	410	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	410-412	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	412-416	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	417	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	417	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	418-420	SEOJK 13
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	420-422	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan.		
	4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.		SK 16
	5. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</li> <li>b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.</li> </ul> <b>Catatan:</b> dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		SEOJK 13
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		422	SEOJK 16



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.		422-427	
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	428-429	
	2. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi.	430	
	3. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	430	
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif).	430	SEOJK 16
	5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	431-433	
	<b>Catatan:</b> Apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
	6. Pernyataan mengenai budaya perusahaan ( <i>corporate culture</i> ) yang dimiliki perusahaan.	N/A	SK 16
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	402	POJK 45
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	403	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	402-403	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama ( <i>key risk</i> ) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	403	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	403	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya ( <i>malus</i> ), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan ( <i>clawback</i> ).	403	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	403	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	403	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	403	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	404	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material <i>risk takers</i> .	404	
	12. <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	404	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	404	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	404	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	404	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	404	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	405	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	405	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	405	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen ( <i>management stock ownership program/MSOP</i> ) dan/ atau Program kepemilikan saham oleh karyawan ( <i>employee Stock ownership program/ESOP</i> ).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen ( <i>management stock Ownership program/MSOP</i> ) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan ( <i>employee stock Ownership program/ESOP</i> ). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: 1. Jumlah saham dan/atau opsi. 2. Jangka waktu pelaksanaan. 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. 4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	434-435	SEOJK 16
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka. 2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	343-344	SEOJK 16





Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	435	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	435-436	
	3. Penanganan pengaduan.	436	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	437	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:		
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.	437	
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa ( <i>kickbacks</i> ), <i>Fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	437-440	SEOJK 16
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	440	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan penyediaan dana besar ( <i>large exposure</i> ).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	441	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		441	SEOJK 13
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		441	SEOJK 13
Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ).	Pengungkapan mengenai penyimpangan ( <i>internal fraud</i> ) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan ( <i>internal fraud</i> ) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan ( <i>internal fraud</i> ) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan ( <i>internal fraud</i> ) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan ( <i>internal fraud</i> ) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	440	
Pembelian Kembali ( <i>Buy Back</i> ) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	441	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	441	SEOJK 13
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	442-450	SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2021 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi.	Memuat uraian mengenai:		452-453
	1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian		
	2. Pihak yang melakukan penilaian		
	3. Skor penilaian masing-masing kriteria		
	4. Rekomendasi hasil penilaian		
	5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan		SEOJK 16
<b>INFORMASI KEUANGAN</b>			
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggungjawab atas Laporan Keuangan.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan Halaman Surat Pernyataan Direksi	
Opini auditor independen atas laporan keuangan.		Laporan Keuangan Halaman Opini	
Deskripsi Auditor Independen di Opini.	Deskripsi memuat tentang:		
	1. Nama dan tanda tangan.	Laporan Keuangan Halaman Opini	
	2. Tanggal Laporan Audit	Laporan Keuangan Halaman Opini	
Laporan keuangan yang lengkap.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		
	1. Laporan posisi keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 1-2	
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.	Laporan Keuangan Halaman 3	
	3. Laporan perubahan ekuitas.	Laporan Keuangan Halaman 4	
	4. Laporan arus kas.	Laporan Keuangan Halaman 5-6	
	5. Catatan atas laporan keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 7-194	
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya.	Laporan Keuangan Halaman 1-194	
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	N/A	
Perbandingan tingkat profitabilitas.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Laporan Keuangan Halaman 3	



Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Laporan Arus Kas.	<p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan.</li> <li>Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.</li> <li>Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.</li> <li>Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 5-6, 14	
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.	<p>Meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan kepatuhan terhadap SAK.</li> <li>Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.</li> <li>Pajak penghasilan.</li> <li>Imbalan kerja.</li> <li>Instrumen Keuangan.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 13-14, 46-47, 47-51, 16-23	
Pengungkapan transaksi pihak berelasi.	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi.</li> <li>Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait.</li> <li>Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 23, 130-132	
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini.</li> <li>Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi.</li> <li>Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.</li> <li>Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan.</li> <li>Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 46-47, 103-110	
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penyusutan yang digunakan.</li> <li>Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya.</li> <li>Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya).</li> <li>Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan reklasifikasi.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 37-38, 88-92	
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan.</li> <li>Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan.</li> <li>Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas.</li> <li>Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.</li> </ol>	Laporan Keuangan Halaman 52-53, 132-133	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan.	Hal-hal yang harus diungkapkan:		
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya.	Laporan Keuangan Halaman 16-23	
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan.	Laporan Keuangan Halaman 21-22, 54, 168-170	
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.	Laporan Keuangan Halaman 133-162	
	4. Kebijakan manajemen risiko.	Laporan Keuangan Halaman 133	
Penerbitan laporan keuangan.	5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Laporan Keuangan Halaman 133-162	
	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.	Laporan Keuangan Halaman Surat Pernyataan Direksi	
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.		

#### KETERANGAN

- SEOJK 16** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SEOJK 9** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SEOJK 13** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK 45** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- ARA** : Kriteria *Annual Report Award*
- SK 16** : Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2021 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.



Laporan Keuangan  
31 Desember 2022 dan 2021  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/  
*Financial Statements*  
*as of December 31, 2022 and 2021*  
*and for the years then ended with independent auditor's report*

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan untuk tahun yang berakhir  
pada tanggal-tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
FINANCIAL STATEMENT  
As of December 31, 2022 and 2021  
and for the years  
then ended  
with independent auditor's report  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

---

**Daftar Isi/ Table of Contents**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Director's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan .....	1 - 2 .....	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3 .....	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4 .....	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas .....	5 - 6 .....	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan .....	7 - 194 .....	<i>Notes to the Financial Statements</i>

\*\*\*\*\*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENT  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : R. Arief Wicaksono  
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya  
Alamat domisili : Jl. Anggur No. 2 Sidoarjo  
Nomor telepon : (031) 5310090 ext. 242  
Jabatan : Pgs. Direktur Utama
2. Nama : Zuhelfi Abidin  
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya  
Alamat domisili : Jl. Durian Blok E3 Jakarta Selatan  
Nomor telepon : (031) 5310090 ext. 231  
Jabatan : Pgs. Direktur Utama
3. Nama : Edi Masrianto  
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya  
Alamat domisili : Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 8 No. 28 Surabaya  
Nomor telepon : (031) 5310090 ext. 208  
Jabatan : Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

1. Name : R. Arief Wicaksono  
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya  
Residential address : Jl. Anggur No. 2 Sidoarjo  
Telephone : (031) 5310090 ext. 242  
Position : Temporary Replacement of President Director
2. Name : Zuhelfi Abidin  
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya  
Residential address : Jl. Durian Blok E3 South Jakarta  
Telephone : (031) 5310090 ext. 231  
Position : Temporary Replacement of President Director
3. Name : Edi Masrianto  
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya  
Residential address : Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 8 No. 28 Surabaya  
Telephone : (031) 5310090 ext. 208  
Position : Director of Finance, Treasury and Global Services

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;  
b. The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk internal control system.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors  
Surabaya, 13 Februari 2023 / February 13, 2023

  
**R. Arief Wicaksono**  
 Pgs. Direktur Utama / Temporary Replacement of President Director

  
**Zuhelfi Abidin**  
 Pgs. Direktur Utama / Temporary Replacement of President Director

  
**Edi Masrianto**  
 Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services / Director of Finance, Treasury and Global Services



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 856/KM.1/2017

No : 00051/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/II/2023

## Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

## Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Independent Auditors' Report

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors*

***PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk***

## *Opinion*

*We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as at December 31, 2022 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

## *Basis for opinion*

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

## Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang dapat teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan dibawah ini.

### **Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") – cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan**

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2m (ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan – identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai) dan Catatan 12 (kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah) atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2022, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan Bank adalah sebesar Rp1.235.403 juta. Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 71").

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan, yang mewakili 42,99% dari total aset Bank, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas kredit tersebut yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang nilainya signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut penentuan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subyektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Bank menghitung KKE untuk kredit yang diberikan yang tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk. Untuk kredit yang diberikan tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara kolektif menggunakan parameter risiko yang menggunakan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan data eksternal lainnya.

## Key audit matters

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

*The key audit matter identified in our audit is outlined below.*

### **Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans**

*As described in Note 2m (summary of significant accounting policies – identification and measurement of impairment losses) and Note 12 (loans and sharia financing) to the financial statements, as at December 31, 2022, the allowance for impairment losses for loans of the Bank was Rp1,235,403 million. These allowance for impairment losses for loans measured at amortised cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under PSAK 71, "Financial Instruments" ("PSAK 71").*

*We focused on this area due to the size of the carrying value of loans, which represented 42.99% of total assets of the Bank, and the respective allowance for impairment losses provided against the loans measured at amortised cost, which are significant to the Bank's financial statements. In addition, determining ECL involves subjective management judgement and is subject to high degree of estimation uncertainty.*

*The Bank calculates ECL for both non-credit-impaired and credit-impaired loans. For non-credit-impaired loans and or credit-impaired loans which are not considered individually significant, the Bank assesses collective ECL using the risk parameter modeling approach that incorporates key parameters, including probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate, after considering forward looking factors and other external information.*



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Untuk kredit yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan. Bank menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;
- Mengidentifikasi kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi makro masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian overlay KKE yang dibuat.

## **Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama**

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti obyektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan rating internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen perjanjian. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, debitur di industri berisiko tinggi yang terkena dampak COVID-19 dan membuat penilaian independen kami terhadap peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti obyektif penurunan nilai.
- Ketika bukti obyektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji

*For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Bank assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the loans. The Bank uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortised cost.*

*The significant judgements involved in determining the ECL include the following:*

- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgement is applied in determining the models.*
- *Identification of loans measured at amortised cost that have experienced a significant increase in credit risk, and*
- *Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios and ECL overlay adjustments made.*

## **How our audit addressed the Key Audit Matters**

*We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:*

- *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining the credit files on sampling basis. We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, debtors in high-risk industries impacted by COVID-19 and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*
- *Where objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation, challenging the probability-weighted*



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan menggunakan faktor diskonto dengan perjanjian kredit.

- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 71, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan *input* data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Bank.
- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.

## Hal lain

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Januari 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

## Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

*outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the loan agreement.*

- *We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of PSAK 71, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Bank.*
- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecasts assumptions.*
- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio.*

## Other matter

*The financial statements of the Bank as of December 31, 2021 which are presented as corresponding figures to the financial statements as at December 31, 2022 and for the year then ended, were audited by other independent auditor, whose report dated January 31, 2022 expressed an unmodified opinion on those financial statements.*

## Other information

*Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.*

*Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.*



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

## **Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

*In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.*

*When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.*

## **Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.*



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

## **Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

## **Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak

*- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank continue as a going concern.*

*- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse*

# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



00051

**Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak., CA, CPA, SAS**  
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No.AP.0354  
13 Februari 2023 / February 13, 2023

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 Desember 2022 dan 2021**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
December 31, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
Kas	2b, 2d, 2f, 3, 44, 45	1.988.262	2.023.077	2.511.548	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b, 2d, 2g, 4, 43, 44, 45	10.786.740	8.805.300	3.659.968	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2b, 2c, 2d, 2g, 5, 42, 43, 44	303.129	211.681	237.715	Current accounts with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 5, 42e	(441)	(238)	(53)	Allowance for impairment losses
		<u>302.688</u>	<u>211.443</u>	<u>237.662</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2b, 2c, 2d, 2h, 6, 43, 44, 45	6.916.329	9.917.695	6.884.658	Placements with Bank Indonesia and other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 6, 43e	(3.154)	(1.763)	(795)	Allowance for impairment losses
		<u>6.913.175</u>	<u>9.915.932</u>	<u>6.883.863</u>	
Tagihan spot dan derivatif	7	361	-	-	Receivables of spot and derivatif
Surat berharga	2b, 2c, 2d, 2i, 8, 43, 44, 45	23.217.671	32.388.966	14.666.737	Marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 8, 43e	(400)	(5.943)	(8.118)	Allowance for impairment losses
		<u>23.217.271</u>	<u>32.383.023</u>	<u>14.658.619</u>	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2d, 2j, 9	4.095.066	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2d, 10, 43, 45	7.822.847	3.420.685	12.573.044	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	2d, 2k, 11, 43, 44	286.147	230.019	131.932	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					Loans and sharia financing
- Pihak berelasi	2c, 2d, 2e, 24, 12, 40, 43, 44,	134.871	182.889	285.595	Related parties -
- Pihak ketiga	45	46.061.786	42.566.670	41.195.171	Third parties -
Jumlah		<u>46.196.657</u>	<u>42.749.559</u>	<u>41.480.766</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 12, 43e	(1.318.612)	(1.831.417)	(1.454.721)	Allowance for impairment losses
		<u>44.878.045</u>	<u>40.918.142</u>	<u>40.026.045</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2b, 2d, 13, 43, 44, 45	646.125	793.900	555.020	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka	2n, 14	166.661	134.200	227.932	Prepaid expenses
Aset tetap					Fixed assets
Biaya perolehan	2p, 2o, 15	2.109.260	1.906.263	1.882.572	Cost
Akumulasi penyusutan		(825.010)	(762.052)	(676.592)	Accumulated depreciation
Nilai buku		<u>1.284.250</u>	<u>1.144.211</u>	<u>1.205.980</u>	Net book value
Aset pajak tangguhan, neto	2x, 22g	502.238	627.211	591.676	Deferred tax assets, net
Piutang pajak	22a	493	412	65	Tax receivables
Aset lain-lain, neto	16	140.998	115.775	356.098	Other assets, net
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><b>103.031.367</b></u>	<u><b>100.723.330</b></u>	<u><b>83.619.452</b></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 Desember 2022 dan 2021**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
December 31, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>	
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas segera	2q, 17, 44, 45	872.514	593.875	484.834	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah					Deposits from customers
- Pihak berelasi	2b, 2d, 2e	15.295.405	17.719.735	14.373.446	Related parties -
- Pihak ketiga	2r, 18, 40, 44, 45	64.630.285	63.668.950	52.412.975	Third parties -
		<u>79.925.690</u>	<u>81.388.685</u>	<u>66.786.421</u>	
Simpanan dari bank lain					Deposits from other banks
- Pihak berelasi	2d, 2e, 2s	141.996	360.169	238.860	Related parties -
- Pihak ketiga	19, 40, 44, 45	3.168.842	3.775.548	2.576.134	Third parties -
		<u>3.310.838</u>	<u>4.135.717</u>	<u>2.814.994</u>	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2d, 20	3.891.346	-	-	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Pinjaman yang diterima	2d, 2t, 21, 44, 45	631.464	655.288	631.355	Borrowings
Utang pajak	2x, 22b	90.783	165.476	93.135	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	2d, 23, 44, 45	520.840	478.647	484.666	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	2b, 2d, 2z, 2ad, 24, 44, 45	472.054	529.738	596.630	Other liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>89.715.529</u></b>	<b><u>87.947.426</u></b>	<b><u>71.892.035</u></b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>					<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
Simpanan dari nasabah	2u, 25				Deposits from customers
- Pihak berelasi		2.302	3.021	1.686	Related parties -
- Pihak ketiga		1.839.390	1.810.161	1.680.173	Third parties -
		<u>1.841.692</u>	<u>1.813.182</u>	<u>1.681.859</u>	
Simpanan dari bank lain					Deposits from other banks
- Pihak ketiga	2u, 25	28.285	52.183	40.610	Third parties -
		<u>28.285</u>	<u>52.183</u>	<u>40.610</u>	
<b>TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		<b><u>1.869.977</u></b>	<b><u>1.865.365</u></b>	<b><u>1.722.469</u></b>	<b>TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham:					Share capital:
- Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					Series A : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
- Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					Series B : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
Modal dasar:					Authorized:
- Seri A : 24.000.000.000 saham					Series A : 24,000,000,000 shares -
- Seri B : 12.000.000.000 saham					Series B : 12,000,000,000 shares -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					Issued and fully paid:
- Seri A - 11.934.147.982 saham					Series A - 11,934,147,982 shares -
- Seri B - 3.081.350.100 saham	26	3.753.875	3.753.875	3.753.875	Series B - 3,081,350,100 shares -
Tambahan modal disetor - neto	2aa, 27	532.734	532.734	532.734	Paid-in capital - net
Surplus revaluasi aset tetap		789.998	749.717	754.382	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan		(100.912)	(163.811)	(197.081)	Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		(115.048)	213.177	125.753	Unrealized gain (loss) financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax
Saldo laba					Retained earnings
Cadangan umum		5.042.390	4.301.777	3.546.323	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya		1.542.824	1.523.070	1.488.962	Unappropriated
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b><u>11.445.861</u></b>	<b><u>10.910.539</u></b>	<b><u>10.004.948</u></b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>		<b><u>103.031.367</u></b>	<b><u>100.723.330</u></b>	<b><u>83.619.452</u></b>	<b>TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY</b>

<sup>1)</sup> Reklasifikasi akun (Catatan 60)

Reclassification of accounts (Note 60) <sup>1)</sup>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
LAPORAN LABA RUGI  
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
Untuk tahun yang berakhir pada  
tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
For the years then ended  
December 31, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Pendapatan bunga dan syariah	2e, 2v, 2x, 30, 40	6.882.651	6.655.168	Interest and sharia income
Beban bunga dan syariah	2e, 2v, 31, 40	(1.965.595)	(1.977.487)	Interest and sharia expense
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO</b>		<b>4.917.056</b>	<b>4.677.681</b>	<b>INTEREST AND SHARIA INCOME, NET</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				<b>OTHER OPERATING INCOME</b>
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	32	-	361.666	Reversal for impairment losses on financial assets
Administrasi giro, tabungan dan deposito	32	184.480	172.779	Current accounts, savings and deposits administration fees
Penerimaan kembali kredit hapus buku	32	56.653	55.003	Collection of loans written-off
Administrasi kredit	32	42.511	34.055	Loan administration fees
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	2w, 34	11.105	5.225	Fees and commissions from other than loans
Lainnya	35	238.820	177.629	Others
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>533.569</b>	<b>806.357</b>	<b>TOTAL OTHER OPERATING INCOME</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				<b>OTHER OPERATING EXPENSES</b>
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	2z, 34	(1.674.698)	(1.644.897)	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	35	(1.229.388)	(1.078.820)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	2m, 33	(404.659)	(819.201)	Provision for impairment losses on financial assets
Beban lainnya	36	(201.054)	(150.020)	Other expenses
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA LABA OPERASIONAL</b>		<b>(3.509.799)</b>	<b>(3.692.938)</b>	<b>TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES INCOME FROM OPERATIONS</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL</b>				<b>NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)</b>
Fee jasa pelayanan pajak	37	6.084	4.684	Tax service fees
Keuntungan atas penjualan aset tetap	37	5.274	3.952	Gain on sale of fixed asset - net
Keuntungan penjualan efek-efek neto	37	2.757	131	Gain on sale of securities - net
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	2b, 37	-	3.497	Gain (loss) on foreign exchange
Pendapatan non-operasional lainnya	37	158.513	404.119	Non-operating income others
Beban non-operasional	37	(83.405)	(269.509)	Non-operating expenses
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>		<b>89.223</b>	<b>146.874</b>	<b>TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				<b>INCOME BEFORE TAX EXPENSE</b>
Kini	2x, 22c, 22e	(307.452)	(474.145)	Current
Tangguhan		(179.773)	59.241	Deferred
		(487.225)	(414.904)	
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>1.542.824</b>	<b>1.523.070</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				<b>Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:</b>
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap		40.281	(4.665)	Revaluation surplus (deficit) of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		100.163	41.074	Remeasurement of employee benefit liability
Penyesuaian saldo awal		(19.678)	-	Beginning balance adjustment
Pajak penghasilan terkait		(17.586)	(7.804)	Related income taxes
		103.180	28.605	
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				<b>Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:</b>
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(400.611)	103.326	Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Penyesuaian saldo awal		(3.730)	-	Beginning balance adjustment
Pajak penghasilan terkait		76.116	(15.902)	Related income taxes
		(328.225)	87.424	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK</b>		<b>(225.045)</b>	<b>116.029</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>1.317.779</b>	<b>1.639.099</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)</b>	2ab, 39	<b>102,75</b>	<b>101,43</b>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE (IN FULL AMOUNT)</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk tahun yang berakhir pada  
tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
For the years then ended  
December 31, 2022 and 2021  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahannya modal disetor- neto/ Other paid-in capital-net	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed asset	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan/ Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax	Saldo laba/ Retained earnings		Total ekuitas/ Total equity	
						Cadangan umum/ General reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
<b>31 Desember 2020</b>	<b>3.753.875</b>	<b>532.734</b>	<b>754.382</b>	<b>(197.081)</b>	<b>125.753</b>	<b>3.546.323</b>	<b>1.488.962</b>	<b>10.004.948</b>	<b>December 31, 2020</b>
Pembentukan cadangan umum	26e	-	-	-	-	755.454	(755.454)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	2ac, 26e	-	-	-	-	-	(733.508)	(733.508)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(4.665)	33.270	87.424	-	1.523.070	1.639.099	Total comprehensive income for the year
<b>31 Desember 2021</b>	<b>3.753.875</b>	<b>532.734</b>	<b>749.717</b>	<b>(163.811)</b>	<b>213.177</b>	<b>4.301.777</b>	<b>1.523.070</b>	<b>10.910.539</b>	<b>December 31, 2021</b>
Pembentukan cadangan umum	26e	-	-	-	-	740.613	(740.613)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	2ab, 26e	-	-	-	-	-	(782.457)	(782.457)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	40.281	62.899	(328.225)	-	1.542.824	1.317.779	Total comprehensive income for the year
<b>31 Desember 2022</b>	<b>3.753.875</b>	<b>532.734</b>	<b>789.998</b>	<b>(100.912)</b>	<b>(115.048)</b>	<b>5.042.390</b>	<b>1.542.824</b>	<b>11.445.861</b>	<b>December 31, 2022</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2022 dan 2021**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
STATEMENT OF CASH FLOWS  
For the years then ended  
December 31, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>				<b>Cash flows from operating activities</b>
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi		7.030.426	6.421.514	Receipts of interest, sharia, fees and commissions
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi		(1.931.344)	(1.983.506)	Payments of interest, sharia, fees and commissions
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		476.364	384.463	Receipts of other operating income
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku		56.653	55.003	Collection of loans written-off
Penerimaan dari pendapatan non-operasional		172.136	416.380	Receipts from non-operating income
Pembayaran untuk biaya non-operasional		(82.913)	(269.509)	Payments for non-operating expenses
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan		(1.659.597)	(1.644.897)	Payments of salaries and employee benefits
Pembayaran beban umum dan administrasi		(1.296.665)	(1.211.045)	Payments of general and administrative expenses
Pembayaran pajak		(389.372)	(378.098)	Payment of taxes
<b>Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>		<b>2.375.688</b>	<b>1.790.305</b>	<b>Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities</b>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		(7.000)	-	Placement with Bank Indonesia and other bank
Kredit yang diberikan		(4.347.656)	(1.268.793)	Loans
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		(4.095.066)	-	Marketable securities sold under repurchase agreement
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		(4.402.162)	9.152.359	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Aset lain-lain dan tagihan lainnya		(117.044)	235.620	Other assets and other receivables
Liabilitas segera		278.638	109.040	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		(1.434.484)	14.733.587	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		(848.777)	1.332.296	Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		3.891.346	-	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Liabilitas lain-lain		(39.476)	77.535	Other liabilities
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>		<b>(8.745.993)</b>	<b>26.161.949</b>	<b>Net cash flows provided by (used in) operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>				<b>Cash flows from investing activities</b>
Penjualan (pembelian) surat berharga		8.846.760	(17.722.229)	Proceed (purchase) of marketable securities
Perolehan aset tetap	15	(248.269)	(70.838)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	15	5.274	4.556	Fixed asset sold
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>		<b>8.603.765</b>	<b>(17.788.511)</b>	<b>Net cash flows provided by (used in) investing activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>				<b>Cash flows from financing activities</b>
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima		(23.824)	23.933	Proceeds (payments) of from borrowings
Pembayaran dividen kas	26e	(782.458)	(733.508)	Payments of cash dividends
Pembayaran liabilitas sewa		(21.111)	-	Payments of lease liabilities
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<b>(827.393)</b>	<b>(709.575)</b>	<b>Net cash flows used in financing activities</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2022 dan 2021**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)  
For the years then ended  
December 31, 2022 and 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas		(969.621)	7.663.863	<i>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada awal tahun		20.957.752	13.293.890	<i>Cash and cash equivalents at beginning of year</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u>19.988.131</u>	<u>20.957.753</u>	<i>Cash and cash equivalents at end of year</i>
Kas dan setara kas terdiri dari:				<i>Cash and cash equivalents consist of:</i>
Kas	3	1.988.262	2.023.077	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	4	10.786.740	8.805.300	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	5	303.129	211.681	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan)	6	6.910.000	9.917.695	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks (maturity within three months or less since the acquisition date)</i>
Jumlah kas dan setara kas		<u>19.988.131</u>	<u>20.957.753</u>	<i>Total cash and cash equivalents</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian Bank dan informasi umum**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

**1. GENERAL**

**a. Establishment of the Bank and general information**

*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank") was established under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur based on the notarial deed No.91 dated August 17, 1961 of Anwar Mahajudin. Pursuant to Law No.13 year 1962 regarding the Basic Terms for Regional Development Banks, which require that the establishment of Regional Development Banks be based on Municipal District Regulations, therefore the Municipal District I of East Java issued Municipal District Regulation No.2 year 1976. Based on such Municipal District Regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.*

*Such Municipal District Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs under Decision Letter No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Municipal Gazette District I Province of East Java Year 1977 Series C No.I/c dated February 1, 1977. This Regulation has been amended several times, with the latest amendment being Municipal District Regulation No.11 year 1996, dated December 30, 1996, which was approved by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-280 dated April 21, 1997. Pursuant to the approval of Municipal District Regulation No.1 year 1999 by the Regional Legislative Assembly of East Java dated March 20, 1999 and by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal status of the Bank was changed from a Regional Corporation to a Limited Liability Company.*

*This change in status of legal form was based on the notarial deed No.1 dated May 1, 1999 of R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2.8227.HT.01.01. TH.99 dated May 5, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.42, dated May 25, 1999 in Supplement of the Republic of Indonesia No.3008/1999.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)**

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan melalui akta No.23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 tanggal 27 April 2015. Perubahan selanjutnya melalui akta No.55 tanggal 22 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020. Perubahan terakhir melalui akta No.95 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0387989 tanggal 21 Juni 2021.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment of the Bank and general information (continued)**

*In line with the economic growth and to comply with the requirement to be Regional Champion BPD, with one of the indicators is to strengthen the capital structure, an amendment of Article of Associations was taken based on Extraordinary General Meetings of Shareholders Decision Deeds No.89 dated April 25, 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and granted approval from Ministry of Law and Human Rights based on decree No.AHU-22728.AH.01.02. Year 2012 dated April 30, 2012, registered on the Company list according to Limited Company Law with registration No.AHU-0038044.AH.01.09 Year 2012 dated April 30, 2012, as well as by Decision Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 that declared effective registration statement to become a public company and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*

*Hereinafter, the Articles of Associations has been amended No.23 dated April 8, 2015 made by Bambang Heru Djuwito, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 dated April 27, 2015. The next deed No.55 dated April 22, 2020 made by Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-AH.01.03-0197642 dated April 23, 2020. The latest deed No.95 dated May 31, 2021 made by Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-AH.01.03-0387989 dated June 21, 2021.*

*The Bank started its commercial operations in accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. The Sharia Operating Unit started its commercial operations on August 21, 2007 in accordance with the approval letter from Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb dated April 4, 2007 for the establishment of the Bank's Sharia Operating Unit.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)**

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

**b. Penawaran umum perdana saham**

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment of the Bank and general information (continued)**

*The ultimate parent of the Bank is the Government of East Java Province.*

*The Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the decision letter No.23/28/KEP/DIR of the Board of Director of Bank Indonesia (BI) dated August 2, 1990.*

*In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services, including banking activities based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.*

*The main role of the Bank is to participate in developing regional economic growth by providing facilities to small and medium scale businesses to achieve appropriate profit levels. Its main activities involve collecting and lending funds and rendering other banking services.*

**b. Initial public offering (IPO)**

*Based on letter No.S-8143/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares at Rp250 (full Rupiah) per share with selling price of Rp430 (full Rupiah) per share became effective on November 29, 2012. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the share offer price over the par value per share was recognized as "Other paid-in capital - net of share issuance cost", which is presented under the Equity section of the Statement of Financial Position.*

*In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank will implement Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating maximum of 10% of the newly issued shares and issued Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program with maximum of 0.71% of the issued and paid-up shares after Initial Public Offering.*



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Penawaran umum perdana saham (lanjutan)**

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

**c. Manajemen eksekutif**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.51 tanggal 17 Maret 2022 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.23 tanggal 7 Desember 2022 dari notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**b. Initial public offering (IPO) (continued)**

The MESOP Program Period 2016 Phase I has been implemented from August 1, 2016 to November 13, 2016, February 1, 2017 to March 13, 2017, August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Period 2017 Phase II has been implemented from August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 to September 14, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019.

**c. Executive management**

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the General Meeting of Shareholders No.51 dated March 17, 2022 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.23 dated December 7, 2022 of notary Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. are as follows:

**2022**

<b><u>Dewan Komisaris</u></b>		<b><u>Board of Commissioners</u></b>
Komisaris Utama	Suprajarto	President Commissioner
Komisaris	-	Commissioner
Komisaris	Heru Tjahjono	Commissioner
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Sumaryono	Independent Commissioner
<b><u>Direksi</u></b>		<b><u>Board of Directors</u></b>
Direktur Utama	Busrul Iman	President Director
Direktur Operasi	Tonny Prasetyo <sup>*)</sup>	Operation Director
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	R. Arief Wicaksono	Micro, Retail and Medium Director
Direktur Teknologi Informasi dan Digital	Zulhelfi Abidin <sup>**)</sup>	Information Technology and Digital Director
Direktur Kepatuhan	-	Compliance Director
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono	Risk Management Director
Direktur Keuangan, Treasury dan Global Service	Edi Masrianto	Finance, Treasury and Global Service Director

<sup>\*)</sup> ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

<sup>\*\*)</sup> ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022 dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No.S-4/KR.0413/2023 tanggal 4 Januari 2023.

<sup>\*)</sup> appointed as a temporary substitute Compliance Director, so that the position of Operation Director was temporarily released to fulfill the independence aspect.

<sup>\*\*)</sup> appointed concurrently as the Operation Director.

This is in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No.061/10/DKM/KEP dated December 13, 2022 and has been recorded in the OJK supervision administration based on letter No.S-4/KR.0413/2023 dated January 4, 2023.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Manajemen eksekutif (lanjutan)**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.96 tanggal 31 Mei 2021 dari notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H. adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**c. Executive management (continued)**

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the General Meeting of Shareholders No.96 dated May 31, 2021 of notary Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H. are as follows:

**2021**

<b><u>Dewan Komisaris</u></b>		<b><u>Board of Commissioners</u></b>
Komisaris Utama	-	President Commissioner
Komisaris	-	Commissioner
Komisaris	Heru Tjahjono	Commissioner
Komisaris Independen	-	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	Independent Commissioner
<b><u>Direksi</u></b>		<b><u>Board of Directors</u></b>
Direktur Utama	Busrul Iman	President Director
Direktur Komersial dan Korporasi	-	Commercial and Corporation Director
Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	-	Consumer Retail and Sharia Business Director
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Tonny Prasetyo	Information Technology and Operation Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono	Compliance and Risk Management Director
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda	Business Risk Director
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha	Finance Director

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee are as follows:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ketua	Sumaryono	Candra Fajri Ananda	Chairman
Anggota	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Member
Anggota	Candra Fajri Ananda	Akhmad Djauhari	Member
Anggota	Kusnadi	Ellen Theresia Sihotang	Member

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Monitoring Committee are as follows:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ketua	Candra Fajri Ananda	Candra Fajri Ananda	Chairman
Anggota	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Member
Anggota	Sumaryono	Syafrudin	Member
Anggota	Sulam Andjar Rochim	Sulam Andjar Rochim	Member
Anggota	Moch. Arifin	-	Member

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ketua	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Chairman
Anggota	Suprajarto	Candra Fajri Ananda	Member
Anggota	Candra Fajri Ananda	Heru Tjahjono	Member
Anggota	Sumaryono	Revi Adiana S.	Member
Anggota	Heru Tjahyono	-	Member
Anggota	Revi Adiana S.	-	Member

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Keputusan No.061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 3 Oktober 2022 tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee accordance to Decision Letter No.061/200/DIR/HCP/KEP dated October 3, 2022 regarding Changes in the Composition of the PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Manajemen eksekutif (lanjutan)**

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>
Pemimpin Divisi	Ratna Hastutik
Pemimpin Sub Divisi	M. Muad
Pemimpin Sub Divisi	R. Sonny Soelaksono
Pemimpin Sub Divisi	-

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>
Pemimpin Divisi	Budi Sumarsono
Pemimpin Sub Divisi	Bambang Supriadi
Pemimpin Sub Divisi	Derry Widya Ariyata
Pemimpin Sub Divisi	Lestari Nur Imani

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>
Ketua	Afifuddin Muhajir
Anggota	Sa'ad Ibrahim

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 4.385 dan 4.007 orang (tidak diaudit).

**d. Jaringan kantor**

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 212 kantor fungsional konvensional, 3 kantor fungsional Syariah, 195 kantor layanan Syariah, 815 ATM (Automated Teller Machine), 26 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 58 CRM (Cash Recycling Machine) konvensional, 7 CRM (Cash Recycling Machine) Syariah di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 211 kantor kas konvensional, 2 kantor kas Syariah, 248 payment point konvensional, 8 payment point Syariah, 195 kantor layanan Syariah, 780 ATM (Automated Teller Machine), 25 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 51 CRM (Cash Recycling Machine) konvensional, 7 CRM (Cash Recycling Machine) Syariah, 97 kas mobil konvensional dan 7 kas mobil Syariah di Indonesia.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Executive management (continued)**

The composition of the Internal Audit as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	<b>2021</b>	
	Ratna Hastutik	Division Head
	Purwoko Dekrit Yulianto	Sub Division Head
	M. Muad	Sub Division Head
	R. Sonny Soelaksono	Sub Division Head

The Corporate Secretary as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	<b>2021</b>	
	Umi Rodyah	Division Head
	Lestari Nur Imani	Sub Division Head
	Muhammad Fahmi	Sub Division Head
	-	Sub Division Head

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	<b>2021</b>	
	Afifuddin Muhajir	Division Head
	Sa'ad Ibrahim	Sub Division Head

As of December 31, 2022 and 2021, the Bank has 4,385 and 4,007 permanent employees, respectively (unaudited).

**d. Office network**

As of December 31, 2022, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 212 conventional functional offices, 3 Sharia functional office, 195 Sharia service offices, 815 ATMs (Automated Teller Machines), 26 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 58 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 7 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia located in Indonesia.

As of December 31, 2021, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 211 conventional cash offices, 2 Sharia cash office, 248 conventional payment points, 8 Sharia payment point, 195 Sharia service offices, 780 ATMs (Automated Teller Machines), 25 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 51 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 7 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia, 97 Cash ATM vehicles conventional and 7 Cash ATM vehicles Sharia located in Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Jaringan kantor (lanjutan)**

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau *payment point*.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**a. Basis penyusunan laporan keuangan**

**Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Informasi keuangan UUS Bank disajikan sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK 103, "Akuntansi Salam", PSAK 104, "Akuntansi Istishna", PSAK 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107, "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK 110 "Akuntansi Sukuk", PSAK 111 "Akuntansi Wa'd" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan IAI.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

**1. GENERAL (continued)**

**d. Office network (continued)**

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or *payment points*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below:

**a. Basis of preparation of the financial statements**

**Statement of compliance**

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2022 and 2021 have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisor Board (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 in the Decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company".

The financial information of UUS have been prepared in conformity with PSAK 101, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 102, "Accounting for Murabahah", PSAK 103, "Accounting for Salam", PSAK 104, "Accounting for Istishna", PSAK 105, "Accounting for Mudharabah", PSAK 106, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 107, "Accounting for Ijarah" which replaces PSAK 59, "Accounting for Sharia Banking", associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, PSAK 110 "Accounting for Sukuk", PSAK 111 "Accounting for Wa'd" and other PSAK, as long as not contradict with sharia principles and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) issued by Bank Indonesia and IAI.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**a. Basis penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

**Pernyataan kepatuhan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

**Mata uang fungsional dan penyajian**

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

**b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial  
statements (continued)**

**Statement of compliance (continued)**

The statements of cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

**Functional and presentation currency**

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

**b. Transaction and balances in foreign currency**

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing  
(lanjutan)**

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan *Reuters* (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
1 Poundsterling Inggris Raya	18.786	19.251	Great Britain Poundsterling 1/Rp
1 Euro	16.582	16.112	Euro 1/Rp
1 Dolar Amerika Serikat	15.568	14.253	United States Dollar 1/Rp
1 Dolar Singapura	11.593	10.555	Singapore Dollar 1/Rp
1 Dolar Australia	10.558	10.347	Australian Dollar 1/Rp
1 Riyal Saudi Arabia	4.139	3.796	Saudi Arabian Riyal 1/Rp
1 Ringgit Malaysia	3.534	3.418	Malaysian Ringgit 1/Rp
1 Yuan China Renminbi	2.239	2.236	Chinese Yuan Renminbi 1/Rp
1 Dolar Hong Kong	1.997	1.828	Hong Kong Dollar 1/Rp
100 Yen Jepang	11.800	12.400	Japanese Yen 100/Rp

**c. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Pada tanggal 1 Januari 2022, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual". Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan;
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Transaction and balances in foreign currency (continued)**

Below are the major exchange rates used for translation into rupiah as of December 31, 2022 and 2021 using the middle rates based on *Reuters* (at 16.00 hours Western Indonesian Time) (in full amount).

**c. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard**

On 1 January, 2022 there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

- Amendment of PSAK 22, "Business Combinations to a Reference Conceptual Framework" This amendment clarifies the interaction between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and Financial Reporting Conceptual Framework;
- Amendment of PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets regarding to Onerous Contracts-Cost of Fulfilling the Contracts". This amendment clarifies the cost to fulfill a contract in order to determine whether a contract is onerous contract;
- Annual Adjustment 2020 – PSAK 71, "Financial Instrument – Fee under test "10 percent" for for derecognition of a financial liability". The amendments clarify the costs included in the entity when assessing whether the terms of the new or modified financial liabilities are substantially different from the terms of the original financial liabilities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**c. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73, "Sewa". Penyesuaian ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**d. Aset dan liabilitas keuangan**

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Sesuai PSAK 71, terdapat 3 (tiga) klasifikasi pengukuran aset keuangan yaitu biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard**

- Annual Adjustment 2020 – PSAK 73 "Lease". This amendment clarifies the measurement by the lease and the recording of changes in the lease term regarding "rental properties repair".

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial periods.

**d. Financial assets and liabilities**

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), other receivables, loans and sharia financing and interest receivables.

In accordance with PSAK 71, there are 3 (three) measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve particular business objective.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

1) Klasifikasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI jika memenuhi kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan tidak boleh direklasifikasi setelah pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Financial assets and liabilities (continued)**

1) Classification

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to hold the asset to obtain contractual cash flows; and
- Its contractual terms of the financial assets provide rights on a specified date for cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Financial assets are classified as FVOCI if they meet the following condition:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to obtain contractual cash flows and sell the financial asset; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or FVOCI, are classified as FVTPL.

Financial assets are not permitted to be reclassified subsequently to their initial recognition.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities mandatorily classified as fair value through profit or loss; and
- Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**2) Pengakuan dan pengukuran awal**

Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*), diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada; (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Financial assets and liabilities (continued)**

**2) Recognition and initial measurement**

*All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.*

*Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.*

*All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.*

*Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.*

*Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities. After initial recognition, the Bank measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.*

*Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**2) Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)**

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

**3) Penghentian pengakuan**

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Financial assets and liabilities (continued)**

**2) Recognition and initial measurement  
(continued)**

*Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.*

*Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:*

- a) *financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.*
- b) *financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.*

*After initial recognition, the Bank measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss.*

*For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.*

*After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.*

**3) Derecognition**

*The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**3) Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Bank yang ditentukan dengan seberapa jauh Bank terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

**4) Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Financial assets and liabilities (continued)**

**3) Derecognition (continued)**

*Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability.*

*The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.*

*In transaction in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.*

*The Bank writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Bank determines that those financial assets are uncollectible. The decision is reached after Bank had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.*

**4) Offsetting**

*Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.*

*Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**5) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**6) Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Financial assets and liabilities (continued)**

**5) Amortized cost measurement**

*The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.*

*The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.*

*The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.*

**6) Fair value measurement**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**6) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan jangka panjang berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan jangka pendek berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Financial assets and liabilities (continued)**

**6) Fair value measurement (continued)**

*When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.*

*If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.*

*The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.*

*If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.*

*Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**6) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
  - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
  - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
  - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial assets and liabilities (continued)**

**6) Fair value measurement (continued)**

Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

**e. Transactions with related parties**

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  - a) has control or joint control over the reporting entity;
  - b) has significant influence over the reporting entity; or
  - c) a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- ii. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
  - a) The entity and the reporting entity are members of the same Bank and its subsidiaries (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  - b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank and its subsidiaries of which the other entity is a member);
  - c) Both entities are joint ventures of the same third party;
  - d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
  - e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;
  - f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi  
(lanjutan)**

- g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya disajikan dalam (Catatan 40).

**f. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

**g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain**

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

**h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain**

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Transactions with related parties (continued)**

- g) A person identified in (a). (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- h) The entity or any members of a Bank and its subsidiaries of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in (Note 40).

**f. Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

**g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks**

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

**h. Placements with Bank Indonesia and other banks**

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), *call money* and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**i. Surat berharga**

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, sukuk, surat utang negara, surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat utang negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasarkan nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
- 2) Surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 3) Surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**Aset Keuangan Sukuk**

Bank menerapkan PSAK No.110 "Investasi Sukuk" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Marketable securities**

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposits of Bank Indonesia (SDBI), corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, sukuk, government bonds, other money market and capital market securities.

Government bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

- 1) Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.
- 2) Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.
- 3) Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**Sukuk Financial Assets**

The Bank applies PSAK No.110 "Sukuk Investment" which regulate about recognition, measurement, presentation, and disclosure transaction of sukuk ijarah and sukuk mudharabah.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**i. Surat berharga (lanjutan)**

1) Diukur pada biaya perolehan

- a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- b) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- c) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- d) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.

2) Diukur pada nilai wajar

- a) Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
  - Kuotasi harga di pasar aktif.
  - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
  - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
- b) Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
- c) Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

**j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)**

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Marketable securities (continued)**

1) Measured at cost

- a) The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual term in determining the specific date of principal payments and or the results.
- b) Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
- c) The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight line basis over the period of the sukuk.
- d) Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the profit or loss.

2) Measured at fair value

- a) The fair value is determined with reference to the following order:
  - Price quotation in active market.
  - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market.
  - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
- b) Sukuk acquisition cost does not include transaction cost.
- c) The difference between fair value and carrying value is presented in profit or loss.

**j. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)**

Marketable securities sold under repurchased agreements (*repo*) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements (*reverse repo*) are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) (lanjutan)**

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

**k. Tagihan lainnya**

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan transaksi ATM antar bank. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

**l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah**

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan mudharabah dan musyarakah serta piutang qardh.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "marjin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**j. Marketable securities sold under repurchase agreement (*repo*) and marketable securities purchased under resale agreement (*reverse repo*) (continued)**

Marketable securities purchased under resale agreement (*reverse repo*) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (*reverse repo*) are classified as amortized cost.

**k. Other receivables**

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM transaction. This account is classified as amortized cost.

**l. Loans and sharia financing**

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, mudharabah and musyarakah financing and qardh receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on murabahah agreements.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**I. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah  
(lanjutan)**

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan manajer pendanaan (mudharib) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**I. Loans and sharia financing (continued)**

*Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (shahibul maal) and fund managers (mudharib) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. Murabahah receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.*

*Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.*

*Musarakah is an agreement between the investors (musarakah partners) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.*

*Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.*

*Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.*

*Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position date.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian  
penurunan nilai**

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*), surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss ECL*) 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bank mengakui cadangan kerugian untuk *ECL* pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada *FVTPL*:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah *ECL 12 bulan* yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment  
losses**

*Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under purchased agreement (repo), marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), loans, other receivable and commitments and contingencies.*

*Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.*

*Impairment of financial assets*

*PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12 month Expected Credit Loss or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.*

*The Bank recognizes loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured at FVTPL:*

- *Financial assets that are debt instruments;*
- *Financial guarantee contracts issued; and*
- *Loan commitments issued.*

*At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:*

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 71 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari ECL 12 bulan disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 1".

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 2".

Pengukuran ECL

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment losses (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

The impairment requirements of PSAK 71 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and
- Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.

The Bank considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as "Stage 1 financial instruments".

Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as "Stage 2 financial instruments".

Measurement of ECL

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive);
- Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian  
penurunan nilai (lanjutan)**

Pengukuran ECL (lanjutan)

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut (lanjutan):

- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Bank.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai "aset keuangan tahap 3"). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of  
impairment losses (continued)**

Measurement of ECL (continued)

*ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows (continued):*

- *Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive; and*
- *Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Bank expects to recover.*

Credit impaired financial assets

*At each reporting date, the Bank assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as "Stage 3 financial assets"). A financial asset is "credit-impaired" when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.*

*Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:*

- *Significant financial difficulty of the borrower or issuer;*
- *A breach of contract such as a default or past due event;*
- *The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;*
- *It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- *The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.*

*A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidence that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian  
penurunan nilai (lanjutan)**

Penyajian cadangan ECL dalam laporan posisi  
keuangan

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan: umumnya, sebagai provisi;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada cadangan kerugian diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar. Namun, cadangan kerugian kredit diakui sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan

Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini biasanya terjadi ketika Bank memastikan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman yang akan dihapusbukkan. Penilaian ini dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang sebelumnya dihapusbukkan termasuk dalam "pendapatan lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang dihapusbukkan masih diusahakan penagihannya sesuai prosedur Bank untuk pemulihan jumlah yang terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment  
losses (continued)**

Presentation of allowance for ECL in the statement  
of financial position

Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position as follows:

- Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;
- Loan commitments and financial guarantee contracts: generally, as a provision;
- Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as a provision; and
- Debt instruments measured at FVOCI: no loss allowance is recognized as deduction to the carrying amount of the financial asset due to the carrying amount of these assets is their fair value. However, the credit loss allowance is recognized as part of fair value reserve in other comprehensive income.

Write-off

Loans and debt securities are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Bank determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are included in "other income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financial assets that are written-off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Bank's procedures for recovery of amounts due.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian  
penurunan nilai (lanjutan)**

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam PSAK 71, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank akan mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Bank, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking*.

Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Bank telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Bank. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 71, Bank menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); dan
- *Exposure At Default* (EAD).

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eskposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of  
impairment losses (continued)**

Significant increase in credit risk

*Under PSAK 71, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Bank will consider reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Bank historical experience, credit assessment and forward-looking information.*

*Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.*

*The Bank has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Bank's internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.*

*As a backstop, and as required by PSAK 71, the Bank consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.*

Input into measurement of ECLs

*The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:*

- *Probability of Default* (PD);
- *Loss Given Default* (LGD); and
- *Exposure At Default* (EAD).

*Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Bank will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.*



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL (lanjutan)

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Bank akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Penurunan nilai atas aset non-produktif

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah

Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (BI *checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment losses (continued)**

Input into measurement of ECLs (continued)

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Bank from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Bank will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

Impairment of non-productive assets

Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product

The Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Bank Indonesia audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank (BI *checking*) and availability of debtor's audited financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 102 (revisi 2013) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 102 (revisi 2013) dan PAPSI 2013. Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang murabahah dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Piutang murabahah yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang murabahah yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan margin) yang didiskonto menggunakan margin efektif.

Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default* (PD) dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default* (LGD).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment losses (continued)**

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 102 (revised 2013) and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 102 (revised 2013) and PAPSI 2013. The Bank applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is done periodically on every financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. Murabahah receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (*discounted value*) and not based on net book value, because the amount of murabahah receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Bank uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Bank uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)**

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan Bank *Wide* pembiayaan murabahah dan dilakukan evaluasi (*loan review*) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang murabahah) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Persentase minimum penyisihan kerugian/  
*Minimum percentage of allowance for impairment losses*

Lancar *)	Minimum 1%	Current *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

\*) Di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah aset produktif dengan agunan tunai.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

**n. Biaya dibayar dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment losses (continued)**

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank *Wide* murabahah financing and is evaluated every 1 (one) year.

In determining the allowance for losses (except murabahah receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

\*) Excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

**n. Prepaid expenses**

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**o. Aset tetap**

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

<b>Jenis/ Classification</b>	<b>Metode/ Method</b>	<b>Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years</b>	<b>Tarif penyusutan/ Depreciation rate</b>
Bangunan/ Buildings	Garis lurus/ Straight-line	20	5%
Kendaraan/ Vehicles	Saldo menurun ganda/ Double declining balance	4-8	25%-50%
Peralatan kantor/ Office equipment	Saldo menurun ganda/ Double declining balance	4-8	25%-50%

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 15).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Fixed assets**

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Fixed assets, except land are depreciated using the methods and over their estimated useful lives of fixed assets as follows:

<b>Jenis/ Classification</b>	<b>Metode/ Method</b>	<b>Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years</b>	<b>Tarif penyusutan/ Depreciation rate</b>
Bangunan/ Buildings	Garis lurus/ Straight-line	20	5%
Kendaraan/ Vehicles	Saldo menurun ganda/ Double declining balance	4-8	25%-50%
Peralatan kantor/ Office equipment	Saldo menurun ganda/ Double declining balance	4-8	25%-50%

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. Assessment of the land is done by assessors who have professional qualifications, and are conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 15).

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**o. Aset tetap (lanjutan)**

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Fixed assets (continued)**

*Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.*

*Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.*

*At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence.*

*Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.*

*All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**p. Aset hak guna dan liabilitas sewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

- a) Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
- b) Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Right of use assets and lease liabilities**

*At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:*

- Short term lease; and*
- Low value asset.*

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:*

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*

- a) The Bank has the right to operate the asset;*
- b) The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

*The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**p. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)**

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**Modifikasi sewa**

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Right of use assets and lease liabilities  
(continued)**

*The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.*

*Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.*

*If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.*

**Leases modification**

*The Bank account for a leases modification as a separate leases if both:*

- *the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**q. Liabilitas segera**

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

**r. Simpanan dari nasabah**

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Obligations due immediately**

*Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Bank measured at their amortized cost.*

**r. Deposits from customers**

*Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.*

*Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.*

*Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.*

*Time deposits represent deposits from customers with the Bank that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Bank.*

*Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.*



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**r. Simpanan dari nasabah (lanjutan)**

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

- 1) Simpanan syariah berupa giro wadiah yad-adhamanah, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan
- 2) Investasi tidak terikat syariah, berupa:
  - a) Tabungan mudharabah mutlaqah, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (nisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah; dan
  - b) Deposito mudharabah mutlaqah, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (nisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah.

**s. Simpanan dari bank lain**

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito berjangka mudharabah.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Deposits from customers (continued)**

*Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.*

*Deposits from customers under sharia principles as follows:*

- 1) *Sharia deposits in the form of wadiah yad-adhamanah, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Bank's policy; and*
- 2) *Sharia non-binding investments in the form of:*
  - a) *Mudharabah mutlaqah savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and*
  - b) *Mudharabah mutlaqah deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.*

**s. Deposits from other banks**

*Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, mudharabah savings and time deposits.*

*Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**t. Pinjaman yang diterima**

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

**u. Dana syirkah temporer**

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan dengan kewajiban. Hal ini karena bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. Borrowings**

*Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.*

*Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.*

**u. Temporary syirkah funds**

*Temporary syirkah funds represent investment from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds grant freedom to the fund manager in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current account, mudharabah saving deposits, and mudharabah time deposits.*

*Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's savings deposits balance in bank.*

*Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the bank.*

*Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was because bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to bank management's negligence or when default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investmet account.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**u. Dana syirkah temporer (lanjutan)**

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana bank, seluruhnya menjadi milik bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

**v. Pendapatan dan beban bunga**

**Konvensional**

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**u. Temporary syirkah funds (continued)**

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on predetermined ratio.

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents customer's share on the bank's income derived from the management of their funds by the bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (*cash basis*) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the bank as mudharib based on a predetermined ratio (*nisbah*). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the bank's funds, are entirely shared for the bank, including income from the bank's fee-based transactions.

**v. Interest income and expenses**

**Conventional**

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)**

**Konvensional (lanjutan)**

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

**Syariah**

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari murabahah, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan pendapatan lainnya.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (*margin* efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**v. Interest income and expenses (continued)**

**Conventional (continued)**

*When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.*

*If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.*

*Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.*

**Sharia**

*The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.*

*Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.*

*Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)**

**Syariah (lanjutan)**

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

**w. Pendapatan - provisi dan komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

**x. Pajak penghasilan badan**

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**v. Interest income and expenses (continued)**

**Sharia (continued)**

*Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and sharia financing and other earning assets classified as non-performing, which is recognized only when such interest is received in cash. Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non-performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.*

**w. Revenue - commissions and fees**

*Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.*

*Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.*

*Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.*

**x. Corporate income tax**

*Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 46 (revised 2014), "Income Tax".*

*Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**x. Pajak penghasilan badan (lanjutan)**

Bank menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Bank mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

**y. Laba per saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**z. Program imbalan kerja**

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010): "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**x. Corporate income tax (continued)**

The Bank applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

**y. Basic earnings per share**

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

**z. Employee benefit plan**

The Bank implement PSAK 24 (revised 2013), "Employee benefit", effective January 1, 2015, change of PSAK 24 (revised 2010): "Employee Benefit". The applied PSAK 24 (revised 2013), Bank which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Program imbalan kerja (lanjutan)**

Program imbalan pasti

Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020. Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuarial. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested*.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun manfaat pasti

Pada tahun 2019, Bank melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**z. Employee benefit plan (continued)**

Defined benefits plans

The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No.11 year 2020 dated 2 November 2020. The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the higher of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or 10% of the fair value of plan assets at that date. Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit pension plan

In 2019, the Bank has modified the Pension Fund Policy in accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated on March 12, 2019. The Pension Fund Policy was approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-24/NB.1/2019 dated on June 14, 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**z. Program imbalan kerja (lanjutan)**

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Peraturan Dana Pensiun tersebut merubah Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta telah diangkat menjadi pegawai tetap sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Program pensiun iuran pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM tanggal 20 April 2012, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 23 April 2012 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai Bank.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Program asuransi tunjangan hari tua

- 1) Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 November 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**z. Employee benefit plan (continued)**

Defined benefit pension plan (continued)

The Policy superseded the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK dated on May 22, 2017, as approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-56/NB.1/2017 dated November 8, 2017. The Policy applies to all employees who are registered in Financial Institutions Fund Pension of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and has been appointed as permanent employee of the Bank before and on August 24, 2012. The contribution paid by the employees is 5% of employees' basic pension salaries and the remaining amount is paid by the Bank.

Defined contribution pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM dated April 20, 2012, the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia" dated April 23, 2012 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

Pension insurance plan

- 1) Directors' decision No.KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No.KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated November 3, 1993 with Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 for insurance under a program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**z. Program imbalan kerja (lanjutan)**

Program asuransi tunjangan hari tua (lanjutan)

- 1) Keputusan Direksi No.046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamendemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar dimuka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.  
Sesuai dengan Keputusan Direksi No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM tanggal 30 Maret 2012 terkait addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua dengan Asuransi Jiwasraya bahwa disepakati adanya kenaikan uang asuransi dan premi.
- 2) Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.
- 3) Sesuai dengan persetujuan melalui Keputusan Direksi No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP tanggal 18 Juli 2022, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan hormat dan mengundurkan diri karena mengikuti program pengakhiran bakti pegawai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**z. Employee benefit plan (continued)**

Pension insurance plan (continued)

- 1) Directors' decision No.046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No.048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.  
Pursuant with Director's decision No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM dated March 30, 2012 about added for agreement for management insurance program pension with Insurance Jiwasraya (Corporate) was acceptable increase premiums insurance.
- 2) Pursuant to the Board of Commissioners' decision No.040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan. Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.
- 3) Pursuant to the the approval through the Decree of the Board of Directors No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP dated July 18, 2022, the Bank also organizes a defined benefit program in the form of pension benefits through the pension Benefit Insurance Program for all employees through a cooperation agreement held on June 13, 2022 with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, regarding the Management of the endowment Insurance Program. Based on this program, when entering retirement age, he dies, resigns with honor and resigns due to participating in the employee service termination program.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**z. Program imbalan kerja (lanjutan)**

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa jabatannya secara proporsional.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**z. Employee benefit plan (continued)**

Other post employee benefits program and long-term employee benefits program

The Bank also provides post benefits program and long term benefit plan that includes death benefits to employees who has passed away and gratuity.

Liabilities and employees gratuity funding is calculated by an independent actuary in projected unit credit method.

Bonuses

The Bank also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

End of service awards program for the Boards of Commissioners and Directors

The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No.046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No. 55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No.28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No.26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya.

Premiums paid are charged proportionally to statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**aa. Biaya emisi saham**

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan.

**ab. Dividen**

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

**ac. Provisi**

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**ad. Liabilitas dan aset kontinjensi**

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

**ae. Informasi segmen**

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**aa. Shares issuance costs**

*The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the statements of financial position.*

**ab. Dividend**

*Dividend distribution to the Bank's shareholders is recognized as a liability in the Bank financial statements in the year in which the dividends are approved by the Bank's shareholders.*

**ac. Provisions**

*Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

**ad. Contingent liabilities and assets**

*Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.*

**ae. Segment information**

*The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.*

*The Bank defines an operating segment as a component of an entity:*

- 1) *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**ae. Informasi segmen (lanjutan)**

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas (lanjutan):

- 2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan selain Jawa Timur.

**af. Peristiwa setelah periode pelaporan**

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan**

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**ae. Segment information (continued)**

The Bank defines an operating segment as a component of an entity (continued):

- 2) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- 3) for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are East Java and other than East Java.

**af. Subsequent event**

Any post-year-end event that provides additional information about the Bank's financial position (*adjusting event*) is reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not *adjusting events*, if any, are disclosed when material to the financial statements.

**ag. Use of significant accounting estimates and judgments**

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan  
akuntansi signifikan (lanjutan)**

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan usaha

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada (Catatan 2d).

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and  
judgments (continued)**

**Judgments**

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in (Note 2d).

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- Level 1: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan  
akuntansi signifikan (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan  
diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

Kontinjensi

Bank saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Bank dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Bank saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and  
judgments (continued)**

**Judgments (continued)**

Classification to amortized cost investments

*The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its business model and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.*

Financial assets not quoted in an active market

*The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regular occurring market transactions on an arm's length basis.*

Contingencies

*Bank is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Bank's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Bank currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan  
akuntansi signifikan (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Penilaian mata uang fungsional

Manajemen telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
- 2) mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- 3) mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Sewa operasi

Bank, sebagai *lessee*, telah mengadakan perjanjian sewa untuk bangunan yang digunakannya untuk operasi. Bank telah menentukan bahwa semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan properti yang disewa dalam sewa operasi tersebut tidak dapat dialihkan kepada Bank.

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Bank. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and  
judgments (continued)**

**Judgments (continued)**

Assessment of functional currency

The management has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank has considered the following:

- 1) the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
- 2) the currency in which funds from financing activities are generated; and
- 3) the currency in which funds from operating are usually retained.

Operating leases

The Bank, as a lessee, has entered into lease on premises used for its operations. The Bank has determined that all significant risk and rewards of ownership of the properties it leases on operating lease are not transferrable to the Bank.

**Estimates and assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan  
akuntansi signifikan (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 22g).

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 53).

Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan diamortisasi

Bank mereview surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 8 dan 43e).

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut (Catatan 43e):

- 1) Kinerja di bawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan; di masa yang akan datang;
- 2) Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- 3) Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and  
judgments (continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies (Note 22g).

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 53).

Impairment of amortized cost marketable securities

Bank reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Bank evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 8 and 43e).

Impairment of non-productive assets

Bank assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the followings (Note 43e):

- 1) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- 2) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- 3) Significant negative industry or economic trends.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan  
akuntansi signifikan (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Pengukuran penyisihan kerugian kredit  
ekspektasian (ECL)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang input, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di (Catatan 2m), yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario *forward-looking* untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 12).

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 15).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and  
judgments (continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Measurement of expected credit loss (ECL)  
allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in (Note 2m), which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- Determining criteria for significant increase in credit risk;
- Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;
- Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and
- Establishing Banks of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 12).

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Bank's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and therefore future depreciation changes could be revised (Note 15).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. KAS**

	2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
Rupiah		1.946.513
<b>Mata uang asing</b>		
Dolar Amerika Serikat	1.338.167	20.832
Riyal Saudi Arabia	1.749.592	7.242
Dolar Singapura	536.709	6.222
Ringgit Malaysia	967.717	3.420
Euro	122.970	2.039
Dolar Australia	84.290	890
Dolar Hong Kong	215.120	429
Yen Jepang	2.560.000	302
Yuan China Renminbi	124.248	277
Poundsterling Inggris Raya	5.100	96
<b>Jumlah mata uang asing</b>		<b>41.749</b>
<b>Jumlah kas</b>		<b>1.988.262</b>

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *Cash Recycle Machine* (CRM) sejumlah Rp295.380 dan Rp357.687.

**4. GIRO PADA BANK INDONESIA**

	2022	
	Jumlah nosional mata uang asing / <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
Rupiah		10.774.286
Dolar Amerika Serikat	800.000	12.454
<b>Jumlah</b>		<b>10.786.740</b>

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp184.549 dan Rp129.529 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**3. CASH**

	2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	
		1.986.107	Rupiah
			<b>Foreign currencies</b>
	1.244.946	17.743	United States Dollar
	2.248.193	8.534	Saudi Arabian Riyal
	260.809	2.753	Singapore Dollar
	1.022.096	3.493	Malaysian Ringgit
	124.875	2.012	Euro
	72.685	752	Australian Dollar
	200.150	366	Hong Kong Dollar
	3.526.000	436	Japanese Yen
	115.908	259	Chinese Yuan Renminbi
	32.285	622	Great Britain Poundsterling
		<b>36.970</b>	<b>Total foreign currencies</b>
		<b>2.023.077</b>	<b>Total cash</b>

Cash in Rupiah as of December 31, 2022 and 2021, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and *Cash Recycle Machine* (CRM) amounting to Rp295,380 and Rp357,687 respectively.

**4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA**

	2021		
	Jumlah nosional mata uang asing / <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	
		8.796.748	Rupiah
	600.000	8.552	United States Dollar
		<b>8.805.300</b>	<b>Total</b>

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp 184,549 and Rp129,529 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)**

Rasio (GWM) Bank adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
GWM Primer			Primary Statutory Reserve
Harian	4,75%	5,73%	Daily
Rata-rata	7,40%	3,11%	Average
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	36,38%	35,07%	Macroprudential Liquidity Buffer
Mata uang asing	7,39%	7,36%	Foreign currencies
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Rupiah	6,54%	5,96%	Rupiah

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.24/228/DKMP/Srt/B tanggal 28 November 2022 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022, pada tanggal 31 Desember 2022, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM sebesar 1,7%.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/03/PBI/2018 sebagaimana diubah sebanyak tiga kali dengan PBI No.23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/10/PADG/2018 sebagaimana diubah tujuh kali dengan PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

**4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)**

The (statutory reserve) of the Bank was as follows:

The statutory reserves ratio as of December 31, 2022 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 which have been amended with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No.24/228/DKMP/Srt/B dated November 28, 2022 and referring to Bank Indonesia Regulation Number 24/5/PBI/2022, as of December 31, 2022, Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 1.7%.

The statutory reserves ratio as of December 31, 2021 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/03/PBI/2018 which have been amended three times with PBI No.23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021 and explained with PADG No.20/10/PADG/2018 which have been amended seven times with PADG No.23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The PLM ratio as of December 31, 2022 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 with PADG No.24/14/PADG/2022 dated October 31, 2022 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)**

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/04/PBI/2018 sebagaimana diubah sebanyak tiga kali dengan PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/11/PADG/2018 sebagaimana diubah tiga kali dengan PADG No.23/07/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 9% dan 3,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4%. Untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah sebesar 6% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 7,5% dan 3,5%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan (Catatan 45).

**4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)**

*The macroprudential liquidity buffer ratio as of December 31, 2021 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/04/PBI/2018 which have been amended three times with PBI No.23/17/PBI/2021 dated December 17, 2021 and explained with PADG No. 20/11/PADG/2018 which have been amended three times with PADG No.23/07/PADG/2021 dated April 26, 2021 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks, and Sharia Business Units..*

*As of December 31, 2022 and 2021, based on the above Bank Indonesia regulations, The Bank is required to maintain primary statutory reserve in Rupiah amounting to 9% and 3.5%, respectively, while statutory reserve for foreign currency amounting to 4%, respectively. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) amounting to 6% in Rupiah as of December 31, 2022 and 2021.*

*As of December 31, 2022 and 2021, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, the Bank is required to maintain statutory reserve in Rupiah amounting 7.5% and 3.5%, respectively.*

*The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2022 and 2021.*

*The remaining period of current amount with Bank Indonesia is categorized as less than 1 (one) month (Note 45).*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK LAIN**

**a. Berdasarkan bank**

	2022	2021
<b>Rupiah</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	146.326	81.264
PT Bank Central Asia Tbk	37.629	65.787
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.440	-
PT Bank Mandiri Taspen	1.691	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	371	112
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.659
	<u>190.457</u>	<u>148.822</u>
<b>Mata uang asing</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70.647	36.323
PT Bank Central Asia Tbk	26.777	13.341
DBS Singapore Ltd	6.241	1.215
PT Bank Mandiri Taspen	5.748	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.365	5.129
PT Bank ICBC Indonesia	894	503
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	6.348
	<u>112.672</u>	<u>62.859</u>
<b>Jumlah</b>	303.129	211.681
Cadangan kerugian penurunan nilai	(441)	(238)
<b>Neto</b>	<u>302.688</u>	<u>211.443</u>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada giro pada bank lain yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

**b. Berdasarkan mata uang**

	2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
<b>Rupiah</b>		190.456
<b>Mata uang asing</b>		
Dolar Amerika Serikat	5.665.585	96.313
Dolar Singapura	538.334	6.241
Dolar Australia	493.256	5.208
Euro	141.924	2.353
Poundsterling Inggris Raya	52.645	989
Yuan China Renminbi	399.403	894
Dolar Hong Kong	208.023	415
Yen Jepang	2.205.651	260
		<u>112.673</u>
<b>Jumlah mata uang asing</b>		303.129
Cadangan kerugian penurunan nilai		(441)
<b>Neto</b>		<u>302.688</u>

**c. Tingkat suku bunga per tahun**

	2022	2021
Rupiah	0.16%	0.03%
Mata uang asing	0.29%	0.02%

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS**

**a. By bank**

	2022	2021
<b>Rupiah</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	81.264	81.264
PT Bank Central Asia Tbk	65.787	65.787
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	112	112
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.659	1.659
	<u>148.822</u>	<u>148.822</u>
<b>Foreign currencies</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.323	36.323
PT Bank Central Asia Tbk	13.341	13.341
DBS Singapore Ltd	1.215	1.215
PT Bank Mandiri Taspen	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.129	5.129
PT Bank ICBC Indonesia	503	503
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.348	6.348
	<u>62.859</u>	<u>62.859</u>
<b>Total</b>	211.681	211.681
Allowance for impairment losses	(238)	(238)
<b>Net</b>	<u>211.443</u>	<u>211.443</u>

As of December 31, 2022 and 2021, there was no current accounts with other banks based on sharia banking principles.

**b. By currency**

	2022		2021	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
<b>Rupiah</b>		190.456		148.822
<b>Foreign currencies</b>				
United States Dollar	5.665.585	96.313	4.002.601	57.046
Singapore Dollar	538.334	6.241	114.991	1.214
Australian Dollar	493.256	5.208	99.552	1.030
Euro	141.924	2.353	59.367	957
Great Britain Poundsterling	52.645	989	72.028	1.387
Chinese Yuan Renminbi	399.403	894	224.993	503
Hong Kong Dollar	208.023	415	208.273	381
Japanese Yen	2.205.651	260	2.753.527	341
		<u>112.673</u>		<u>62.859</u>
<b>Total foreign currencies</b>		303.129		211.681
Allowance for impairment losses		(441)		(238)
<b>Net</b>		<u>302.688</u>		<u>211.443</u>

**c. Interest rates per annum**

Rupiah  
Foreign Currencies

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)**

**d. Berdasarkan hubungan**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada giro pada bank lain pada pihak berelasi.

**e. Berdasarkan kolektibilitas**

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

**f. Nilai tercatat bruto**

2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Rupiah	190.456	-	-	190.456
Mata uang asing	112.673	-	-	112.673
Jumlah	303.129	-	-	303.129
Cadangan kerugian penurunan nilai	(441)	-	-	(441)
<b>Neto</b>	<b>302.688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302.688</b>

2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Rupiah	148.822	-	-	148.822
Mata uang asing	62.859	-	-	62.859
Jumlah	211.681	-	-	211.681
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(238)	-	-	(238)
<b>Neto</b>	<b>211.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.443</b>

**g. Cadangan kerugian penurunan nilai**

	2022	2021
Saldo awal tahun	238	53
Penyisihan tahun berjalan	203	185
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>441</b>	<b>238</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya giro pada bank lain adalah memadai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain diungkapkan pada (Catatan 43e).

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)**

**d. By relationship**

As of December 31, 2022 and 2021, no current accounts in related parties.

**e. By collectability**

Current accounts with other banks as of December 31, 2022 and 2021 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

**f. Gross carrying amount**

2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Rupiah	190.456	-	-	190.456
Foreign currencies	112.673	-	-	112.673
Jumlah	303.129	-	-	303.129
Allowance for impairment losses	(441)	-	-	(441)
<b>Net</b>	<b>302.688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302.688</b>

2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Rupiah	148.822	-	-	148.822
Foreign currencies	62.859	-	-	62.859
Jumlah	211.681	-	-	211.681
Allowance for impairment losses	(238)	-	-	(238)
<b>Net</b>	<b>211.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.443</b>

**g. Allowance for impairment losses**

	2022	2021
Balance at beginning of year	238	53
Provision during the year	203	185
<b>Balance at end of year</b>	<b>441</b>	<b>238</b>

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of current accounts with other bank are disclosed in (Note 43e).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN**

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang**

	2022	2021
<b>Rupiah</b>		
Deposito berjangka:		
PT Bank ICBC Indonesia	-	400.000
Lain-lain (Bank Perkreditan Rakyat)	7.000	10.000
	<u>7.000</u>	<u>410.000</u>
Pasar Uang Antar Bank:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	600.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	400.000	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	400.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	300.000	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	240.000	145.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	200.000	100.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	200.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	175.000	160.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	150.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	140.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	140.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	125.000	22.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	120.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	115.000	-
PT Bank National Nobu Tbk	110.000	-
PT Bank Sahabat Sampoerna	100.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	100.000	-
PT Bank Mestika Dharma Tbk	100.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	100.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	100.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	75.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	75.000	-
PT Bank Ina Perdana Tbk	50.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	50.000	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	480.000
PT Bank Resona Perdania	-	140.000
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	-	135.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-	100.000
	<u>4.165.000</u>	<u>1.482.000</u>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Term Deposit	745.000	5.027.000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	2.000.000	3.000.000
	<u>(671)</u>	<u>(1.305)</u>
	<u>2.744.329</u>	<u>8.025.695</u>
Jumlah	6.916.329	9.917.695
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	(1.763)
<b>Neto</b>	<u><b>6.913.175</b></u>	<u><b>9.915.932</b></u>

**6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS**

**a. By type and currency**

	Rupiah
Time deposits:	
PT Bank ICBC Indonesia	400.000
Lain-lain (Bank Perkreditan Rakyat)	10.000
	<u>410.000</u>
Interbank call money:	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	145.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	160.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	-
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	-
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	22.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	-
PT Bank National Nobu Tbk	-
PT Bank Sahabat Sampoerna	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-
PT Bank Mestika Dharma Tbk	-
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	-
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	-
PT Bank Ina Perdana Tbk	-
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	480.000
PT Bank Resona Perdania	140.000
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	135.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	100.000
	<u>1.482.000</u>
Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI) Term Deposit	5.027.000
Less: Unamortized interest	(1.305)
	<u>8.025.695</u>
Total	9.917.695
Allowance for impairment losses	(1.763)
<b>Net</b>	<u><b>9.915.932</b></u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp145.228 dan Rp1.130.000.

**b. Berdasarkan jangka waktu**

	<u>2022</u>
Kurang dari 1 bulan	6.306.520
1 - 3 bulan	599.673
3 - 6 bulan	6.982
6 - 12 bulan	-
	<u>6.913.175</u>

**c. Berdasarkan kolektibilitas**

Semua penempatan Bank pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 digolongkan lancar.

**d. Berdasarkan hubungan**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

**e. Tingkat suku bunga per tahun**

	<u>2022</u>
Rupiah	
Interbank call money	3,55%
Term deposit	3,25%
Deposit Facility	3,08%
Deposito berjangka	3,49%
Mata uang asing	
Interbank call money	1,47%

**f. Nilai tercatat bruto**

	<u>2022</u>			
	<u>Tahap 1/ Stage 1</u>	<u>Tahap 2/ Stage 2</u>	<u>Tahap 3/ Stage 3</u>	<u>Total/ Total</u>
Rupiah:				
Penempatan pada Bank Indonesia	2.744.329	-	-	2.744.329
Pasar uang antar Bank	4.165.000	-	-	4.165.000
Deposito berjangka	7.000	-	-	7.000
Jumlah	6.916.329	-	-	6.916.329
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	-	-	(3.154)
<b>Neto</b>	<u>6.913.175</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.913.175</u>

**6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)**

**a. By type and currency (continued)**

As of December 31, 2022 and 2021, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp145,228 and Rp1,130,000 respectively.

**b. By maturity**

	<u>2021</u>	
	9.312.590	Less than 1 month
	290.723	1 - 3 months
	252.645	3 - 6 months
	59.974	6 - 12 months
	<u>9.915.932</u>	

**c. By collectability**

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2022 and 2021 were classified as current.

**d. By relationship**

As of December 31, 2022 and 2021, the Bank had no funds placed with related parties.

**e. Interest rates per annum**

	<u>2021</u>	
		Rupiah
	3,20%	Interbank call money
	2,84%	Term deposit
	2,75%	Deposit Facility
	5,23%	Deposito berjangka
		Foreign Currencies
	0,03%	Interbank call money

**f. Gross carrying amount**

		Rupiah:
		Placements with Bank Indonesia
		Interbank call money
		Time deposits
		Total
		Allowance for impairment losses
		Net



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN  
BANK LAIN (lanjutan)**

**f. Nilai tercatat bruto (lanjutan)**

	2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Rupiah:					Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia	8.025.695	-	-	8.025.695	Placements with Bank Indonesia
Pasar uang antar Bank	1.482.000	-	-	1.482.000	Interbank call money
Deposito berjangka	410.000	-	-	410.000	Time deposits
Jumlah	9.917.695	-	-	9.917.695	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.763)	-	-	(1.763)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>9.915.932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.915.932</b>	<b>Net</b>

**g. Cadangan kerugian penurunan nilai**

	2022	2021	
Saldo awal tahun	1.763	795	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	1.391	968	Provision during the year
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>3.154</b>	<b>1.763</b>	<b>Balance at end of year</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah memadai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain diungkapkan pada (Catatan 43e).

**h. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan**

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND  
OTHER BANKS (continued)**

**f. Gross carrying amount (continued)**

**g. Allowance for impairment losses**

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks is adequate.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of placement with other bank are disclosed in (Note 43e).

**h. Placements with other banks pledged as collateral**

There were no placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2022 and 2021.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**7. TAGIHAN SPOT DAN DERIVATIF**

Tagihan spot dan derivatif per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Instrumen	Jenis valuta	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/in full amount)	Nilai wajar/ Fair values		Instruments
			Tagihan derivatif/ Derivative receivable	Liabilitas derivatif/ Derivative payable	
			dalam Rupiah/in Rupiah		
Terkait nilai tukar					<i>Exchange rate related</i>
Kontrak swap - jual	USD	10.000.000	361	-	Swap contract - sell
			<u>361</u>	<u>-</u>	

**7. SPOT AND DERIVATIF RECEIVABLES**

Spot and derivative receivables as of December 31, 2022 are as follows:

**8. SURAT-SURAT BERHARGA**

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang**

	2022	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>Rupiah:</b>		
<b>Biaya perolehan dimortisasi</b>		
Surat Utang Negara	11.798.009	12.025.332
Obligasi	1.841.700	1.851.074
Sukuk Bank Indonesia	400.000	400.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	325.000	325.000
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	50.000	47.238
Reksadana	90.000	90.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	2.056	2.056
Wesel	-	-
	<u>14.506.765</u>	<u>14.740.700</u>
<b>Mata uang asing:</b>		
Wesel	362	362
	<u>362</u>	<u>362</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(400)
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	<u>14.507.127</u>	<u>14.740.662</u>
<b>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</b>		
Surat Utang Negara	8.574.841	8.476.609
	<u>8.574.841</u>	<u>8.476.609</u>
<b>Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</b>		
	<u>8.574.841</u>	<u>8.476.609</u>
<b>Jumlah biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</b>		
	<u>23.081.968</u>	<u>23.217.271</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Jumlah surat berharga	<u>23.081.968</u>	<u>23.217.271</u>

**8. MARKETABLE SECURITIES**

**a. By type and currency**

	2021	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>Rupiah:</b>		
<b>Amortised cost</b>		
Government bonds	15.126.108	15.530.273
Bonds	2.058.900	2.071.699
Sukuk of Bank Indonesia	541.392	541.392
Interbank Mudarabah Investment Certificate	139.000	139.000
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	210.000	206.095
Reksadana	2.339.000	2.339.000
Domestic L/C	-	-
Bill	6.747	6.747
	<u>20.421.147</u>	<u>20.834.206</u>
<b>Foreign currencies:</b>		
Bill	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Allowance for impairment losses	-	-
Total amortized cost	<u>20.421.147</u>	<u>20.834.206</u>
<b>Fair value through other comprehensive income</b>		
Government bonds	11.242.058	11.554.760
	<u>11.242.058</u>	<u>11.554.760</u>
<b>Total fair value through other comprehensive income</b>		
	<u>11.242.058</u>	<u>11.554.760</u>
<b>Total amortized cost and fair value through other comprehensive income</b>		
	<u>31.663.205</u>	<u>32.388.966</u>
Allowance for impairment losses	-	(5.943)
Total marketable securities	<u>31.663.205</u>	<u>32.383.023</u>

**b. Berdasarkan hubungan**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

**b. By relationship**

As of December 31, 2022 and 2021, there were no marketable securities transactions with related parties.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**

**c. Berdasarkan penerbit**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pemerintah Republik Indonesia	20.501.941	27.085.033
Bank Indonesia	400.000	541.392
Perbankan :		
PT Bank Aceh Syariah	225.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	146.035	157.788
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	127.610	30.270
PT Bank Sinarmas Tbk	100.000	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	33.032	48.993
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	32.003	30.218
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.343	27.430
PT Bank Mandiri Taspen	24.011	54.148
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Barat dan Banten Tbk	12.219	40.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	11.538	10.057
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-	99.281
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	99.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	49.307
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Barat dan Banten Tbk	-	41.950
PT Bank DKI	-	39.226
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	30.209
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	28.765
	<u>738.790</u>	<u>786.642</u>
Korporasi		
PT Pegadaian (Persero)	480.000	255.018
PT Pupuk Indonesia (Persero)	192.250	337.948
PT Astra Sedaya Finance	152.966	50.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	140.000	689.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	135.454	193.994
PT Federal International Finance	99.615	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	91.519	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	69.861	110.209
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	63.243	55.000
PT XL Axiata Tbk	60.000	-
PT Indonesia Infrastructure Finance	30.148	30.323
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	26.000	246.253
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	24.803	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5.454	37.519
PT Mandiri Tunas Finance	5.265	31.247
Wesel	362	6.747
PT Trimegah Securities	-	900.000
PT Avrist Asset Management	-	300.000
PT Bahana Sekuritas	-	300.000
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	190.131
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	100.000
PT Utama Karya	-	50.873
PT Setiabudi Investment Management	-	50.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	41.637
	<u>1.576.940</u>	<u>3.975.899</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(400)</u>	<u>(5.943)</u>
<b>Jumlah surat-surat berharga</b>	<b><u>23.217.271</u></b>	<b><u>32.383.023</u></b>

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)**

**c. By issuers**

Government of the Republic of Indonesia
Bank Indonesia
Banking:
PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd
PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Corporate:
PT Pegadaian (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Astra Sedaya Finance
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Federal International Finance
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Indonesia Infrastructure Finance
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Mandiri Tunas Finance
Bill
PT Trimegah Securities
PT Avrist Asset Management
PT Bahana Sekuritas
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
PT Utama Karya
PT Setiabudi Investment Management
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Allowance for impairment losses
<b>Total marketable securities</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**

**d. Berdasarkan peringkat**

Peringkat surat berharga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)**

**d. By rating**

The ratings of marketable securities as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022			
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value		Rupiah: Government Bonds
Rupiah:				
Surat Utang Negara	-	20.501.941		Government Bonds
Bank Indonesia	-	400.000		Certificates of Bank Indonesia
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo idAAA	480.000		PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo A	225.000		PT Bank Aceh Syariah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia AAA(idn)	192.250		PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo idAAA	152.966		PT Astra Sedaya Finance
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	146.035		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	140.000		PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero)	Pefindo idAA+	135.454		PT Semen Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	127.610		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	Fitch Indonesia A-	100.000		PT Bank Sinarmas Tbk
PT Federal International Finance	Fitch Indonesia AAA(idn)	99.615		PT Federal International Finance
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	91.519		PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo idAAA	69.861		PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo idAA-	63.243		PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT XL Axiata	Fitch Indonesia AAA(idn)	60.000		PT XL Axiata
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo idAAA	33.032		PT Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo idAA+	32.003		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Indonesia Infrastructure Finance	Pefindo idAAA	30.148		PT Indonesia Infrastructure Finance
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	27.343		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo idAAA	26.000		PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo idAAA	24.803		PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia AA(idn)	24.011		PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo idAA-	12.219		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Panin Tbk	Pefindo idAA	11.538		PT Bank Panin Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo idAAA	5.454		PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo idAA+	5.265		PT Mandiri Tunas Finance
PT Bahana Sekuritas	-	-		PT Bahana Sekuritas
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo idA	-		PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Hutama Karya	Fitch Indonesia AA+(idn)	-		PT Hutama Karya
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo idAAA	-		PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Fitch Indonesia A(idn)	-		PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Wesel	-	-		Bill
Jumlah Rupiah		<b>23.217.309</b>		Total Rupiah
<b>Mata uang asing:</b>				<b>Foreign currency:</b>
Wesel ekspor		362		Export bill
		23.217.671		
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(400)		Allowance for impairment losses
<b>Jumlah surat-surat berharga</b>		<b>23.217.271</b>		<b>Total marketable securities</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**

**d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)**

	2021		Nilai tercatat/ Carrying value
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	
Rupiah:			
Surat Utang Negara	-	-	27.085.033
PT Trimegah Securities	-	-	900.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	-	689.000
Bank Indonesia	-	-	541.392
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	337.948
PT Avrist Asset Management	-	-	300.000
PT Bahana Sekuritas	-	-	300.000
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	255.018
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	246.253
PT Semen Indonesia (Persero)	Pefindo	idAA+	193.994
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	190.131
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	157.788
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	110.209
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	100.000
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	Fitch Global	A-	99.281
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	99.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	55.000
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia	AA(idn)	54.148
PT Hutama Karya	Fitch Indonesia	AA+(idn)	50.873
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	50.000
PT Setiabudi Investment Management	-	-	50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	idAAA	49.307
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	48.993
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA-	41.950
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Pefindo	idAA+	41.637
PT BJB Syariah	Pefindo	idAA-	40.000
PT Bank DKI	Pefindo	idAA-	39.226
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	37.519
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAA+	31.247
PT Indonesia Infrastructure Finance	Pefindo	idAAA	30.323
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	30.270
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	30.218
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	30.209
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Fitch Indonesia	A(idn)	28.765
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	27.430
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	10.057
Wesel	-	-	6.747
Jumlah Rupiah			<b>32.388.966</b>
<b>Mata uang asing:</b>			
Wesel ekspor			-
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(5.943)
<b>Jumlah surat-surat berharga</b>			<b>32.383.023</b>

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)**

**d. By rating (continued)**

		Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:		
Government Bonds		
PT Trimegah Securities		
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)		
Certificates of Bank Indonesia		
PT Pupuk Indonesia (Persero)		
PT Avrist Asset Management		
PT Bahana Sekuritas		
PT Pegadaian (Persero)		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		
PT Semen Indonesia (Persero)		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi		
PT Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd		
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		
PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
PT Bank Mandiri Taspen		
PT Hutama Karya		
PT Astra Sedaya Finance		
PT Setiabudi Investment Management		
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
PT Maybank Indonesia Tbk		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		
PT Indofood Sukses Makmur Tbk		
PT BJB Syariah		
PT Bank DKI		
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		
PT Mandiri Tunas Finance		
PT Indonesia Infrastructure Finance		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
PT Bank Pan Indonesia Tbk		
Bill		
Total Rupiah		
<b>Foreign currency:</b>		
Export bill		
Allowance for impairment losses		
<b>Total marketable securities</b>		

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**

**e. Jangka waktu dan tingkat bunga**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kurang dari 1 tahun	986.769	20.095.803
1 - 5 tahun	22.230.902	12.293.164
	<u>23.217.671</u>	<u>32.388.966</u>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(400)	(5.943)
<b>Jumlah surat-surat berharga</b>	<b><u>23.217.271</u></b>	<b><u>32.383.023</u></b>

Tingkat bunga per tahun:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Rupiah		
Surat Utang Negara	6,01%	6,00%
Obligasi	7,11%	7,72%
Sukuk Bank Indonesia	3,85%	3,50%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	3,56%	2,92%
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	5,15%	4,83%
Reksadana	4,94%	4,18%

**f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi**

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga untuk tujuan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo awal	<b>258.577</b>	155.251
Penambahan laba (rugi) yang belum direalisasi selama periode berjalan	(400.611)	103.326
<b>Jumlah sebelum pajak tangguhan</b>	<b>(142.034)</b>	<b>258.577</b>
Pajak tangguhan	26.986	(45.400)
<b>Saldo akhir bersih</b>	<b>(115.048)</b>	<b>213.177</b>

**g. Kolektibilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

**h. Nilai tercatat bruto**

	<b>2022</b>				
	<b>Tahap 1/ Stage 1</b>	<b>Tahap 2/ Stage 2</b>	<b>Tahap 3/ Stage 3</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	
Rupiah:					Rupiah:
Surat Utang Negara	20.501.941	-	-	20.501.941	Government bonds
Obligasi	1.851.074	-	-	1.851.074	Bonds
Sukuk Bank Indonesia	400.000	-	-	400.000	Bank Indonesia Sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	-	-	325.000	Interbank Mudharabah Investment Certificate
Reksadana	90.000	-	-	90.000	Mutual funds
Negotiable Certificate of Deposit	47.237	-	-	47.237	Negotiable Certificate of Deposit
Surat Berharga Jangka Menengah	2.056	-	-	2.056	Medium Term Notes
<b>Mata uang asing</b>					Foreign currency
Wesel	362	-	-	362	Bill
Jumlah surat berharga	23.217.671	-	-	23.217.671	Total marketable securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(400)	-	-	(400)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>23.217.271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.217.271</b>	<b>Net</b>

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)**

**e. By maturity and interest rates**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Kurang dari 1 tahun	986.769	20.095.803	Less than 1 year
1 - 5 tahun	22.230.902	12.293.164	1 - 5 years
	<u>23.217.671</u>	<u>32.388.966</u>	
Dikurangi: Allowance for impairment losses	(400)	(5.943)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Total marketable securities</b>	<b><u>23.217.271</u></b>	<b><u>32.383.023</u></b>	<b>Total marketable securities</b>

Interest rates per annum:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Rupiah			Rupiah
Surat Utang Negara	6,01%	6,00%	Government Bonds
Obligasi	7,11%	7,72%	Bond
Sukuk Bank Indonesia	3,85%	3,50%	Bank Indonesia Sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	3,56%	2,92%	Interbank Mudharabah investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	5,15%	4,83%	Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
Reksadana	4,94%	4,18%	Mutual funds

**f. The movement of unrealized gains (losses)**

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Saldo awal	<b>258.577</b>	155.251	Beginning balance
Penambahan laba (rugi) yang belum direalisasi selama periode berjalan	(400.611)	103.326	Addition of unrealized gains (loss) during the period
<b>Jumlah sebelum pajak tangguhan</b>	<b>(142.034)</b>	<b>258.577</b>	<b>Total before deferred tax</b>
Pajak tangguhan	26.986	(45.400)	Deferred tax
<b>Saldo akhir bersih</b>	<b>(115.048)</b>	<b>213.177</b>	<b>Ending balance net</b>

**g. Collectibility**

As of December 31, 2022 and 2021, the collectibility of securities are classified as current.

**h. Gross carrying amount**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**

**h. Nilai tercatat bruto (lanjutan)**

	2021				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah:					Rupiah:
Surat Utang Negara	27.085.033	-	-	27.085.033	Government bonds
Obligasi	2.071.699	-	-	2.071.699	Bonds
Sukuk Bank Indonesia	541.392	-	-	541.392	Bank Indonesia Sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	139.000	-	-	139.000	Interbank Mudarabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit	206.095	-	-	206.095	Negotiable Certificate of Deposit
Surat Berharga Jangka Menengah	-	-	-	-	Medium Term Notes
Reksadana	2.339.000	-	-	2.339.000	Mutual funds
Wesel	6.747	-	-	6.747	Bill
Jumlah surat berharga	32.388.966	-	-	32.388.966	Total marketable securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.943)	-	-	(5.943)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>32.383.023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.383.023</b>	<b>Net</b>

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga**

	2022
Saldo awal	5.944
Pemulihan tahun berjalan	(5.544)
<b>Saldo akhir</b>	<b>400</b>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga adalah sebagai berikut:

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp23.157 dan Rp47.625.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya surat berharga adalah memadai.

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)**

**h. Gross carrying amount (continued)**

**i. Allowance for impairment losses for marketable securities**

	2022	2021	
Saldo awal	5.944	8.118	Beginning balance
Pemulihan tahun berjalan	(5.544)	(2.174)	Recovery during the year
<b>Saldo akhir</b>	<b>400</b>	<b>5.944</b>	<b>Ending balance</b>

Allowance for impairment losses for marketable securities are as follows:

Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp23,157 and Rp47,625, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI  
DIBELI KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal Rp4.050.000 telah dijual dengan janji untuk dibeli kembali hingga paling lambat 28 Februari 2023 (Catatan 20).

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH  
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT**

As of December 31, 2022, Government Bonds with total nominal amount of Rp 4,050,000 were sold under repurchase agreements until February 28, 2023 (Note 20).

2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
<b>Surat Utang Negara/Government Debt</b>						
<b>Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost</b>						
FR0070	50.000	25 Februari/ February 25, 2021	15 Maret/ March 15, 2024	1.724	-	51.724
FR0070	50.000	26 Februari/ February 26, 2021	15 Maret/ March 15, 2024	1.726	-	51.726
FR0070	50.000	12 Maret/ March 12, 2021	15 September/ September 15, 2024	1.478	-	51.478
FR0070	50.000	15 Maret/ March 15, 2021	15 Maret/ March 15, 2024	1.586	-	51.586
FR0081	30.000	23 Maret/ March 23, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	368	-	30.368
FR0081	50.000	15 Juni/ June 15, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.529	-	51.529
FR0081	50.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.625	-	51.625
FR0059	100.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	4.885	-	104.885
FR0059	100.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	4.577	-	104.577
FR0081	50.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.581	-	51.581
FR0081	50.000	5 Juli/ July 5, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.554	-	51.554
FR0081	50.000	13 Juli/ July 13, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.610	-	51.610
FR0059	50.000	15 Juli/ July 15, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.509	-	52.509
FR0059	100.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	5.284	-	105.284
FR0081	20.000	30 Juli/ July 30, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	702	-	20.702
FR0081	200.000	2 Agustus/ August 2, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	7.165	-	207.165
FR0081	50.000	3 Agustus/ August 3, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.793	-	51.793
FR0059	50.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.984	-	52.984
FR0081	20.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	714	-	20.714
<b>Dipindahkan/Brought forward</b>				<b>45.394</b>	<b>-</b>	<b>1.215.394</b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJİ  
DİBELİ KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH  
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT  
(continued)**

2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
<b>Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)</b>						
<b>Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)</b>						
<b>Pindahan/Carry forward</b>				<b>45.394</b>	<b>-</b>	<b>1.215.394</b>
FR0059	60.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	3.597	-	63.597
FR0081	80.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	2.857	-	82.857
FR0059	30.000	13 Agustus/ August 13, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.640	-	31.640
FR0059	20.000	18 Agustus/ August 18, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.088	-	21.088
FR0059	130.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	7.189	-	137.189
FR0059	50.000	17 November/ November 17, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.983	-	52.983
FR0059	60.000	19 November/ November 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	3.659	-	63.659
FR0081	50.000	12 Januari/ January 12, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.762	-	51.762
FR0081	50.000	21 Januari/ January 21, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.805	-	51.805
FR0081	40.000	28 April/ April 28, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	800	-	40.800
FR0081	50.000	11 Mei/ May 11, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	407	-	50.407
FR0081	25.000	25 Mei/ May 25, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	287	-	25.287
FR0081	65.000	27 Mei/ May 27, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	710	-	65.710
FR0081	90.000	13 Juni/ June 13, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.649	-	91.649
FR0081	60.000	20 Juni/ June 20, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	901	-	60.901
FR0081	20.000	22 Juni/ June 22, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	268	-	20.268
FR0081	50.000	29 Juni/ June 29, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.111	-	51.111
FR0081	10.000	18 Juli/ July 18, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	154	-	10.154
FR0081	50.000	19 Juli/ July 19, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	601	-	50.601
FR0081	40.000	20 Juli/ July 20, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	430	-	40.430
FR0081	50.000	26 Juli/ July 26, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	154	-	50.154
<b>Subjumlah/Subtotal</b>				<b>79.447</b>	<b>-</b>	<b>2.329.447</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI  
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH  
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT  
(continued)**

2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
<b>Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)</b>						
<b>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Fair value through other comprehensive income</b>						
FR0086	50.000	21 Januari/ January 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	448	(1.403)	49.045
FR0086	75.000	4 Februari/ February 4, 2021	15 April/ April 15, 2026	754	(2.187)	73.567
FR0086	75.000	18 Februari/ February 18, 2021	15 April/ April 15, 2026	477	(1.909)	73.568
FR0086	70.000	19 Februari/ February 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	168	(1.504)	68.663
FR0086	30.000	22 Februari/ February 22, 2021	15 April/ April 15, 2026	-	(573)	29.427
FR0086	250.000	10 Juni/ June 10, 2021	15 April/ April 15, 2026	282	(5.056)	245.226
FR0086	40.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 April/ April 15, 2026	229	(992)	39.236
FR0086	40.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	244	(1.008)	39.236
FR0086	170.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	879	(4.126)	166.753
FR0086	10.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 April/ April 15, 2026	40	(231)	9.809
FR0086	10.000	2 Juli/ July 2, 2021	15 April/ April 15, 2026	36	(227)	9.809
FR0086	90.000	5 Juli/ July 5, 2021	15 April/ April 15, 2026	313	(2.032)	88.281
FR0086	10.000	6 Juli/ July 6, 2021	15 April/ April 15, 2026	29	(220)	9.809
FR0086	100.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	653	(2.563)	98.090
FR0086	40.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	262	(1.026)	39.236
FR0086	20.000	7 Oktober/ October 7, 2021	15 April/ April 15, 2026	195	(577)	19.618
FR0086	25.000	8 Oktober/ October 8, 2021	15 April/ April 15, 2026	244	(721)	24.522
FR0086	40.000	12 Oktober/ October 12, 2021	15 April/ April 15, 2026	376	(1.140)	39.236
FR0086	40.000	13 Oktober/ October 13, 2021	15 April/ April 15, 2026	346	(1.110)	39.236
<b>Dipindahkan/Brought forward</b>				<b>5.973</b>	<b>(28.604)</b>	<b>1.162.369</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI  
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH  
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT  
(continued)**

2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
<b>Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)</b>						
<b>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Fair value through other comprehensive income (lanjutan)/(continued)</b>						
<b>Pindahan/Carry forward</b>				<b>5.973</b>	<b>(28.604)</b>	<b>1.162.369</b>
FR0086	60.000	14 Oktober/ October 14, 2021	15 April/ April 15, 2026	564	(1.710)	58.854
FR0086	20.000	26 Oktober/ October 26, 2021	15 April/ April 15, 2026	246	(628)	19.618
FR0086	80.000	29 Oktober/ October 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	1.062	(2.590)	78.472
FR0086	75.000	2 November/ November 2, 2021	15 April/ April 15, 2026	973	(2.406)	73.567
FR0086	70.000	11 November/ November 11, 2021	15 April/ April 15, 2026	961	(2.298)	68.663
FR0086	40.000	12 November/ November 12, 2021	15 April/ April 15, 2026	536	(1.300)	39.236
FR0086	70.000	22 November/ November 22, 2021	15 April/ April 15, 2026	1.017	(2.354)	68.663
FR0086	40.000	23 November/ November 23, 2021	15 April/ April 15, 2026	585	(1.349)	39.236
FR0086	30.000	24 November/ November 24, 2021	15 April/ April 15, 2026	439	(1.012)	29.427
FR0086	70.000	25 November/ November 25, 2021	15 April/ April 15, 2026	1.025	(2.363)	68.663
FR0086	60.000	30 November/ November 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	895	(2.042)	58.854
<b>Subjumlah/Subtotal</b>				<b>14.276</b>	<b>(48.657)</b>	<b>1.765.619</b>
<b>Jumlah/Total</b>				<b>93.723</b>	<b>(48.657)</b>	<b>4.095.066</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI  
DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Bank memiliki tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sejumlah Rp7.822.847 dan Rp3.420.685 dengan rincian sebagai berikut:

**10. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER  
RESALE AGREEMENT**

As of December 31, 2022 and 2021 Bank has a number of marketable securities purchased under resale agreement Rp7,822,847 and Rp3,420,685, with details as follows:

2022

Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara							
FR0087	367.130	1 Desember/ December 1, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,86%	369.043	60	368.983
FR0081	148.341	2 Desember/ December 2, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,88%	149.092	24	149.068
FR0084	99.477	2 Desember/ December 2, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,88%	99.981	16	99.964
FR0083	191.662	2 Desember/ December 2, 2022	1 Desember/ December 1, 2023	6,66%	204.569	11.843	192.726
FR0088	42.352	5 Desember/ December 5, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,90%	42.561	21	42.540
FR0065	115.692	5 Desember/ December 5, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,90%	116.261	57	116.204
VR0078	285.505	9 Desember/ December 9, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,79%	286.790	230	286.561
VR0037	139.585	23 Desember/ December 23, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,95%	139.908	115	139.793
VR0072	46.831	23 Desember/ December 23, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,95%	46.939	39	46.900
VR0068	381.224	26 Desember/ December 26, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,80%	381.654	61	381.593
VR0077	140.534	27 Desember/ December 27, 2022	10 Januari/ January 10, 2023	6,00%	140.862	211	140.651
FR0096	28.650	27 Desember/ December 27, 2022	10 Januari/ January 10, 2023	6,00%	28.717	43	28.674
VR0053	116.745	28 Desember/ December 28, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,80%	116.876	56	116.820
VR0037	931.166	28 Desember/ December 28, 2022	11 Januari/ January 11, 2023	6,00%	933.339	1.552	931.787
VR0046	192.083	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,50%	192.288	117	192.171
VR0050	1.004.411	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,50%	1.005.485	614	1.004.871
VR0062	906.457	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,50%	907.426	554	906.872
VR0075	234.299	29 Desember/ December 29, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,85%	234.604	190	234.413
VR0045	924.263	29 Desember/ December 29, 2022	12 Januari/ January 12, 2023	5,77%	926.337	1.630	924.708
VR0034	382.616	30 Desember/ December 30, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,50%	383.025	292	382.733
VR0036	573.923	30 Desember/ December 30, 2022	13 Januari/ January 13, 2023	5,77%	575.211	1.104	574.107
VR0065	370.622	30 Desember/ December 30, 2022	27 Januari/ January 27, 2023	6,03%	372.361	1.614	370.747
VR0044	189.891	30 Desember/ December 30, 2022	29 Januari/ January 29, 2023	6,66%	202.678	12.717	189.961
<b>Jumlah/Total</b>					<b>7.856.007</b>	<b>33.160</b>	<b>7.822.847</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI  
DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)**

**10. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER  
RESALE AGREEMENT (continued)**

2021

Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
<b>Surat Utang Negara</b>						
FR0070	309.285	28 Desember/ December 28, 2021	4 Januari/ January 4, 2022	309.495	120	309.405
VR0062	469.488	29 Desember/ December 29, 2021	5 Januari/ January 5, 2022	469.807	137	469.625
FR0043	742.045	30 Desember/ December 30, 2021	6 Januari/ January 6, 2022	742.550	144	742.189
FR0070	316.797	30 Desember/ December 30, 2021	6 Januari/ January 6, 2022	317.013	62	316.859
FR0056	165.599	31 Desember/ December 31, 2021	7 Januari/ January 7, 2022	165.712	16	165.615
FR0077	1.416.854	31 Desember/ December 31, 2021	7 Januari/ January 7, 2022	1.417.818	138	1.416.992
<b>Jumlah/Total</b>				<b>3.422.395</b>	<b>617</b>	<b>3.420.685</b>

**11. TAGIHAN LAINNYA**

**11. OTHER RECEIVABLES**

	2022	2021	
Tagihan transfer dan ATM	194.150	116.119	Transfer receivables and ATM
Lainnya	91.997	113.900	Others
<b>Jumlah</b>	<b>286.147</b>	<b>230.019</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2022 and 2021, there were no other receivables from related parties.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah lancar.

The collectibility of all other receivables as of December 31, 2022 and 2021 was classified as current.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat bank garansi tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible bank guarantee is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank adalah dalam Rupiah.

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING**

All loans provided by the Bank are in Rupiah.

a. By type and collectibility of loans

2022							
	Jumlah/ <i>Total</i>	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam perhatian khusus/ <i>Special mention</i>	Kurang lancar/ <i>Sub-standard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	
Modal kerja	10.968.010	9.802.144	457.228	20.906	37.479	650.253	<i>Working capital</i>
Investasi	6.570.658	6.296.351	151.931	3.855	3.343	115.178	<i>Investment</i>
Konsumsi	28.657.989	27.883.864	295.970	26.323	37.043	414.789	<i>Consumption</i>
<b>Jumlah</b>	<b>46.196.657</b>	<b>43.982.359</b>	<b>905.129</b>	<b>51.084</b>	<b>77.865</b>	<b>1.180.220</b>	<b><i>Total</i></b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>44.878.045</b>	<b>43.586.406</b>	<b>826.579</b>	<b>32.105</b>	<b>49.370</b>	<b>383.585</b>	<b><i>Total loans, net</i></b>
2021							
	Jumlah/ <i>Total</i>	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam perhatian khusus/ <i>Special mention</i>	Kurang lancar/ <i>Sub-standard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	
Modal kerja	9.668.644	8.079.285	441.640	21.042	30.559	1.096.118	<i>Working capital</i>
Investasi	5.825.776	5.523.597	61.653	6.491	1.614	232.421	<i>Investment</i>
Konsumsi	27.255.139	26.446.749	280.263	35.331	59.364	433.432	<i>Consumption</i>
<b>Jumlah</b>	<b>42.749.559</b>	<b>40.049.631</b>	<b>783.556</b>	<b>62.864</b>	<b>91.537</b>	<b>1.761.971</b>	<b><i>Total</i></b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>40.918.142</b>	<b>39.787.241</b>	<b>721.953</b>	<b>38.271</b>	<b>54.641</b>	<b>316.036</b>	<b><i>Total loans, net</i></b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)**

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas

b. By economic sector of loans and collectibility

	2022						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	28.626.074	27.853.074	294.934	26.323	37.043	414.700	Household
Perdagangan besar dan eceran	5.770.630	5.035.105	315.445	14.955	21.580	383.545	Wholesale and retail trade
Konstruksi	3.598.479	3.466.058	15.856	1.066	-	115.499	Construction
Industri pengolahan	2.319.103	2.198.171	40.870	2.073	3.118	74.871	Processing industry
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	1.901.379	1.853.941	18.868	345	2.635	25.590	Public and social culture services
Pertanian perburuan dan kehutanan	1.579.975	1.331.024	157.290	4.177	6.645	80.839	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	1.187.332	1.127.892	27.999	1.359	5.764	24.318	Financial intermediaries
Akomodasi makanan dan minuman	321.695	296.561	12.186	692	49	12.207	Accommodation, food and beverage
Jasa pendidikan	104.662	104.475	-	-	-	187	Education services
Transportasi pergudangan dan komunikasi	173.033	160.565	3.563	-	-	8.905	Transportation, warehousing and communications
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	135.295	124.066	810	-	-	10.419	Health services and social activities
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	123.042	98.683	3.336	91	41	20.891	Real estate, business services and business ownership
Listrik gas dan air	29.627	29.256	349	-	-	22	Electricity, gas and water
Perikanan	75.092	63.749	8.055	3	878	2.407	Fishery
Pertambangan dan penggalian	24.244	15.370	3.833	-	-	5.041	Mining and quarrying
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	13.872	12.374	697	-	112	689	Individual services which serve households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	6.484	6.484	-	-	-	-	Activity is still undefined
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	174.195	174.195	-	-	-	-	Government Administration, Defense and Mandatory Social Security
Lainnya	32.444	31.316	1.038	-	-	90	Other
<b>Jumlah</b>	<b>46.196.657</b>	<b>43.982.359</b>	<b>905.129</b>	<b>51.084</b>	<b>77.865</b>	<b>1.180.220</b>	<b>Total</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>44.878.045</b>	<b>43.586.406</b>	<b>826.579</b>	<b>32.105</b>	<b>49.370</b>	<b>383.585</b>	<b>Total loans, net</b>

	2021						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	27.231.621	26.423.279	280.261	35.332	59.363	433.386	Household
Perdagangan besar dan eceran	5.182.583	4.148.550	312.423	14.324	19.525	687.761	Wholesale and retail trade
Konstruksi	3.927.187	3.677.795	17.865	172	-	231.355	Construction
Industri pengolahan	1.498.975	1.333.379	42.014	5.344	4.263	113.975	Processing industry
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	1.608.671	1.540.341	15.817	1.064	780	50.669	Public and social culture services
Pertanian perburuan dan kehutanan	1.145.814	1.014.438	47.551	4.903	4.456	74.466	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	1.028.472	977.010	19.064	1.290	2.280	28.828	Financial intermediaries
Akomodasi makanan dan minuman	259.225	226.905	19.987	257	183	11.893	Accommodation, food and beverage
Jasa pendidikan	167.426	164.053	1.100	-	-	2.273	Education services
Transportasi pergudangan dan komunikasi	165.041	143.317	5.539	-	-	16.185	Transportation, warehousing and communications
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	162.544	156.800	1.356	-	633	3.755	Health services and social activities
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	133.945	107.057	5.409	-	-	21.479	Real estate, business services and business ownership
Listrik gas dan air	81.950	32.472	137	-	-	49.341	Electricity, gas and water
Perikanan	69.820	61.741	2.208	178	27	5.666	Fishery
Pertambangan dan penggalian	58.021	15.512	12.047	-	27	30.435	Mining and quarrying
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	4.748	3.512	778	-	-	458	Individual services which serve households
Lainnya	23.516	23.470	-	-	-	46	Other
<b>Jumlah</b>	<b>42.749.559</b>	<b>40.049.631</b>	<b>783.556</b>	<b>62.864</b>	<b>91.537</b>	<b>1.761.971</b>	<b>Total</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>40.918.142</b>	<b>39.787.241</b>	<b>721.953</b>	<b>38.271</b>	<b>54.641</b>	<b>316.036</b>	<b>Total loans, net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)**

c. Berdasarkan sisa umur kredit

c. *Maturity of loans*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Kurang dari 1 tahun	5.289.294	5.928.361	<i>Less than 1 year</i>
1 - 2 tahun	3.476.781	2.508.611	<i>1 - 2 years</i>
Lebih dari 2 - 5 tahun	12.888.940	11.203.641	<i>More than 2 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	<u>24.541.642</u>	<u>23.108.946</u>	<i>Over 5 years</i>
	46.196.657	42.749.559	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(1.831.417)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b><u>44.878.045</u></b>	<b><u>40.918.142</u></b>	<b><i>Total loans, net</i></b>

d. Berdasarkan hubungan

d. *By relationship*

	<b>2022</b>						
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>Lancar/ Current</b>	<b>Dalam perhatian khusus/ Special mention</b>	<b>Kurang lancar/ Sub-standard</b>	<b>Diragukan/ Doubtful</b>	<b>Macet/ Loss</b>	
Pihak berelasi (Catatan 40)	134.871	132.025	2.846	-	-	-	<i>Related party (Note 40)</i>
Pihak ketiga	<u>46.061.786</u>	<u>43.850.334</u>	<u>902.283</u>	<u>51.084</u>	<u>77.865</u>	<u>1.180.220</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	46.196.657	43.982.359	905.129	51.084	77.865	1.180.220	<i>Total</i>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Pihak berelasi	(284)	(127)	(157)	-	-	-	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	<u>(1.318.328)</u>	<u>(395.826)</u>	<u>(78.393)</u>	<u>(18.979)</u>	<u>(28.495)</u>	<u>(796.635)</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)	<i>Total</i>
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b><u>44.878.045</u></b>	<b><u>43.586.406</u></b>	<b><u>826.579</u></b>	<b><u>32.105</u></b>	<b><u>49.370</u></b>	<b><u>383.585</u></b>	<b><i>Total loans, net</i></b>
	<b>2021</b>						
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>Lancar/ Current</b>	<b>Dalam perhatian khusus/ Special mention</b>	<b>Kurang lancar/ Sub-standard</b>	<b>Diragukan/ Doubtful</b>	<b>Macet/ Loss</b>	
Pihak berelasi (Catatan 40)	182.889	180.241	2.648	-	-	-	<i>Related party (Note 40)</i>
Pihak ketiga	<u>42.566.670</u>	<u>39.869.390</u>	<u>780.908</u>	<u>62.864</u>	<u>91.537</u>	<u>1.761.971</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	42.749.559	40.049.631	783.556	62.864	91.537	1.761.971	<i>Total</i>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	<u>(1.831.417)</u>	<u>(262.390)</u>	<u>(61.603)</u>	<u>(24.593)</u>	<u>(36.896)</u>	<u>(1.445.935)</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	(1.831.417)	(262.390)	(61.603)	(24.593)	(36.896)	(1.445.935)	<i>Total</i>
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b><u>40.918.142</u></b>	<b><u>39.787.241</u></b>	<b><u>721.953</u></b>	<b><u>38.271</u></b>	<b><u>54.641</u></b>	<b><u>316.036</u></b>	<b><i>Total loans, net</i></b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

d. Berdasarkan hubungan (lanjutan)

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp104.192 dan Rp112.529 (Catatan 40) merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4,60% per tahun.

e. Tingkat bunga tahunan

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar 10,50%-12,75%.

f. Kredit sindikasi

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing berkisar antara 2,64%-63,89% dari total pinjaman sindikasi.

g. Kredit yang direstrukturisasi

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah masing-masing sebesar Rp3.937.602 dan Rp3.301.445.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Perpanjangan waktu kredit	215.738	334.513
Perpanjangan waktu kredit dan penyesuaian suku bunga	13.846	443.783
Perpanjangan waktu kredit dan skema lain	<u>3.708.018</u>	<u>2.523.148</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.937.602</u></b>	<b><u>3.301.445</u></b>

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah memenuhi ketentuan BMPK.

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)**

d. *By relationship (continued)*

*Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp104,192 and Rp112,529, respectively (Note 40), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4.60% per annum.*

e. *Annual interest rates*

*The annual interest rates of loans in Rupiah as of December 31, 2022 and 2021 are 10.50%-12.75% respectively.*

f. *Syndicated loans*

*The share of the Bank in syndicated loans as of December 31, 2022 and 2021 ranged from 2.64% - 63.89%, respectively, from total of syndication loan.*

g. *Restructured loans*

*The restructured loans as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp3,937,602 and Rp3,301,445.*

*Exsistension of loan period  
Exsistension of loan period and interest rate adjusment  
Exsistension of loan period and other schemes  
Total*

*The Bank has restructured loan for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 13, 2020 regarding National Economic Stimulus as Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease Spread 2019.*

h. *Legal Lending Limits (BMPK)*

*As of December 31, 2022 and 2021, the Bank was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

- i. Dalam pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip Syariah dari unit usaha Syariah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Murabahah	874.944	864.013
Musyarakah	767.912	689.141
Mudharabah	223.915	184.224
Qardh	36.423	24.972
Ijarah	277	18
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.903.471</u></b>	<b><u>1.762.368</u></b>

- j. Kredit tidak lancar

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Jumlah NPL	1.309.169	1.916.372
Rasio NPL bruto	2,83%	4,48%
Rasio NPL neto	1,01%	0,96%

- k. Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dijamin pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp303.930 dan Rp177.300 dengan jaminan berupa deposito berjangka masing-masing sebesar Rp127.942 dan Rp87.191. (Catatan 18c).

- l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah yang dihapusbukkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing adalah sebesar Rp900.559 dan Rp60.568.

- m. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>				
<b>Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ Allowance for impairment losses - loans</b>	<b>Tahap/ Stage 1</b>	<b>Tahap/ Stage 2</b>	<b>Tahap/ Stage 3</b>	<b>Pembiayaan syariah/ Sharia financing</b>	<b>Jumlah/ Total</b>
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	15.807	73.110	1.659.071	83.429	1.831.417
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	137.683	(22.598)	(115.085)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(1.493)	11.190	(9.697)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(2.649)	(34.464)	37.113	-	-
Penghapusbukkan/Writte-off	(58.773)	(25.414)	(800.922)	(15.450)	(900.559)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charge to statement of profit or loss	172.483	59.479	140.562	15.230	387.754
<b>Saldo 31 Desember 2022/ Balance at December 31, 2022</b>	<b>263.058</b>	<b>61.303</b>	<b>911.042</b>	<b>83.209</b>	<b>1.318.612</b>

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)**

- i. The amounts of loans including financing provided based on Sharia principles from Sharia unit as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Murabahah	874.944	864.013	Murabahah
Musyarakah	767.912	689.141	Musyarakah
Mudharabah	223.915	184.224	Mudharabah
Qardh	36.423	24.972	Qardh
Ijarah	277	18	Ijarah
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.903.471</u></b>	<b><u>1.762.368</u></b>	<b>Total</b>

- j. Non-performing loans (NPL)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jumlah NPL	1.309.169	1.916.372	Total NPL
Rasio NPL bruto	2,83%	4,48%	Ratio of gross NPL
Rasio NPL neto	1,01%	0,96%	Ratio of net NPL

- k. Total loans and sharia financing pledged as collateral as of December 31, 2022 and 2021 were Rp303,930 and Rp177,300, respectively with collateral of time deposit amounting Rp127,942 and Rp87,191. (Note 18c).

- l. Loans and sharia financing written-off for the year ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp900.559 and Rp60.568 respectively.

- m. The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)**

m. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

m. The changes in the allowance for impairment losses are as follows (continued):

2021					
Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ Allowance for impairment losses - loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	64.096	69.520	1.272.262	48.843	1.454.721
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	101.862	(27.402)	(74.460)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(2.490)	8.945	(6.455)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(5.834)	(22.321)	28.155	-	-
Penghapusbukuan/Writte-off	(19.912)	(10.652)	(22.186)	(3.671)	(56.421)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charge to statement of profit or loss	(121.915)	55.020	461.755	38.257	433.117
<b>Saldo 31 Desember 2021/ Balance at December 31, 2021</b>	<b>15.807</b>	<b>73.110</b>	<b>1.659.071</b>	<b>83.429</b>	<b>1.831.417</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans and sharia financing is adequate.

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp866.893 (individual) dan Rp451.719 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp1.762.015 (individual) dan Rp69.402 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2021.

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp866,893 (individual) and Rp451,719 (collective) as of December 31, 2022 and Rp1,762,015 (individual) and Rp69,402 (collective) as of December 31, 2021.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp387.754 dan Rp433.117 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 33).

Provision for impairment losses amounted to Rp387,754 and Rp433,117 as of December 31, 2022 and 2021 (Note 33).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans and sharia financing.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)**

n. Mutasi nilai tercatat bruto kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

n. Changes in the gross carrying amount of loans and sharia financing:

2022					
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	38.319.178	549.722	2.118.291	1.762.368	42.749.559
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	332.412	(192.277)	(140.135)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(473.300)	492.701	(19.401)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(539.528)	(216.055)	755.583	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	19.942.656	170.525	65.829	-	20.179.010
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	(3.169.533)	(34.190)	(380.246)	-	(3.583.968)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali/ Net change in exposure and remeasurement	(12.258.559)	(146.354)	976	156.553	(12.247.385)
Penghapusbukuan/Writte-off	(58.773)	(25.414)	(800.922)	(15.450)	(900.559)
<b>Saldo 31 Desember 2022/ Balance at December 31, 2022</b>	<b>42.094.553</b>	<b>598.658</b>	<b>1.599.975</b>	<b>1.903.471</b>	<b>46.196.657</b>
2021					
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	37.795.946	455.354	1.622.107	1.607.359	41.480.766
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	277.337	(181.068)	(96.269)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(361.628)	377.740	(16.112)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(577.581)	(140.620)	718.201	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	15.627.968	215.232	165.558	158.680	16.167.438
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	(2.475.943)	(88.778)	(364.306)	-	(2.929.027)
Perubahan akrual bunga/Change in interest accrual	(11.947.009)	(77.486)	111.297	-	(11.913.198)
Penghapusbukuan/Writte-off	(19.912)	(10.652)	(22.185)	(3.671)	(56.420)
<b>Saldo 31 Desember 2021/ Balance at December 31, 2021</b>	<b>38.319.178</b>	<b>549.722</b>	<b>2.118.291</b>	<b>1.762.368</b>	<b>42.749.559</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)**

- o. Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing adalah sebesar 22,81% dan 24,70%.
- p. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya Bank, dalam bentuk deposito dengan tenor 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai 10 Februari 2021. Dana pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp8.092.192 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya dana akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari Pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan PMK No.85/PMK.05/2020 untuk periode Mei 2020.

Besaran subsidi bunga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp500, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya.
2. Plafon kredit lebih dari Rp500 sampai dengan Rp10.000, subsidi bunga yang diberikan sebesar 3% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Bank telah menerima subsidi bunga dari Pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp2.778.

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)**

- o. Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at December 31, 2022 and 2021 were 22.81% and 24.70% respectively.
- p. In order to accelerate National Economic Recovery Program (PEN) based on PMK No. 70/PMK.05/2020, Government place their funds in banks, which the Bank is one of them, in time deposit with 6 (six) months tenor contract amounted to Rp2,000,000 on August 14, 2020 until February 10, 2021. The Government fund has been distributed in form of loan amounted to Rp8,092,192 until February 10, 2021 and the fund will be returned to Government.

Bank also participate in channeling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise (SME) debtors and additional interest subsidy for Kredit Usaha Rakyat (KUR) program based on PMK No.85/PMK.05/2020 for period May, 2020.

The interest subsidies will cover loan interest are as follows:

1. The credit limit is less than or equal to Rp500, the interest subsidy is 6% for the first 3 (three) months and 3% for the following three months.
2. The credit limit is more than Rp500 to Rp10,000, the interest subsidy is 3% for the first (three) months and 2% for the following three months.

Until December 31, 2022, the Bank has distributed interest subsidies for SME debtors amounted to Rp2,778.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA**

	2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
Rupiah:		
Kredit yang diberikan		340.021
Lain-lain		306.091
Mata uang asing:		
Dolar Amerika Serikat	835	13
<b>Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima</b>		<b>646.125</b>

**13. ACCRUED INTEREST INCOME**

	2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i> )	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	
			Rupiah:
		426.995	Loans
		366.895	Others
			Foreign currencies:
	702	10	United States Dollar
<b>Total accrued interest income</b>		<b>793.900</b>	

**14. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

	2022
Asuransi tunjangan hari tua	88.765
Asuransi lainnya	37.924
Sewa dibayar dimuka	6.216
Lainnya	33.756
<b>Jumlah</b>	<b>166.661</b>

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

**14. PREPAID EXPENSES**

	2021	
	82.296	<i>Mutual aid pension insurance</i>
	10.816	<i>Other insurance</i>
	1.152	<i>Prepaid rent</i>
	39.936	<i>Others</i>
<b>Total</b>	<b>134.200</b>	<b>Total</b>

*Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET TETAP**

**15. FIXED ASSETS**

		2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Biaya perolehan</b>							<b>Cost</b>	
Tanah	856.993	47.736	-	-	40.281	945.010	Land	
Bangunan	203.366	36	-	-	-	203.402	Buildings	
Peralatan kantor	546.324	98.090	234	34.239	-	678.419	Office equipment	
Kendaraan bermotor	33.754	28.840	12.078	-	-	50.516	Motor vehicles	
	<b>1.640.437</b>	<b>174.702</b>	<b>12.312</b>	<b>34.239</b>	<b>40.281</b>	<b>1.877.347</b>		
Aset dalam penyelesaian	591	90	-	-	-	681	Construction in progress	
Aset hak guna	265.235	73.477	107.480	-	-	231.232	Right of use assets	
	<b>1.906.263</b>	<b>248.269</b>	<b>119.792</b>	<b>34.239</b>	<b>40.281</b>	<b>2.109.260</b>		
<b>Akumulasi penyusutan</b>							<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	107.086	9.210	-	-	-	116.296	Buildings	
Peralatan kantor	492.081	64.921	234	17.870	-	574.638	Office equipment	
Kendaraan bermotor	33.090	3.604	12.078	-	-	24.616	Motor vehicles	
	632.257	77.735	12.312	17.870	-	715.550		
Aset hak guna	129.795	87.145	107.480	-	-	109.460	Right of use assets	
	<b>762.052</b>	<b>164.880</b>	<b>119.792</b>	<b>17.870</b>	-	<b>825.010</b>		
<b>Nilai buku neto</b>	<b>1.144.211</b>					<b>1.284.250</b>	<b>Net book value</b>	
		2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Biaya perolehan</b>							<b>Cost</b>	
Tanah	861.658	-	-	-	(4.665)	856.993	Land	
Bangunan	203.052	314	-	-	-	203.366	Buildings	
Peralatan kantor	515.595	30.729	-	-	-	546.324	Office equipment	
Kendaraan bermotor	46.573	-	12.819	-	-	33.754	Motor vehicles	
	<b>1.626.878</b>	<b>31.043</b>	<b>12.819</b>	-	<b>(4.665)</b>	<b>1.640.437</b>		
Aset dalam penyelesaian	176	415	-	-	-	591	Construction in progress	
Aset hak guna	255.518	39.380	1.916	(27.747)	-	265.235	Right of use assets	
	<b>1.882.572</b>	<b>70.838</b>	<b>14.735</b>	<b>(27.747)</b>	<b>(4.665)</b>	<b>1.906.263</b>		
<b>Akumulasi penyusutan</b>							<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	97.695	9.391	-	-	-	107.086	Buildings	
Peralatan kantor	463.680	28.401	-	-	-	492.081	Office equipment	
Kendaraan bermotor	45.305	-	12.215	-	-	33.090	Motor vehicles	
	606.680	37.792	12.215	-	-	632.257		
Aset hak guna	69.912	76.143	1.916	(14.344)	-	129.795	Right of use assets	
	<b>676.592</b>	<b>113.935</b>	<b>14.131</b>	<b>(14.344)</b>	-	<b>762.052</b>		
<b>Nilai buku neto</b>	<b>1.205.980</b>					<b>1.144.211</b>	<b>Net book value</b>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

Aset hak guna per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
<b>Biaya perolehan</b>					
<b>Aset Hak Guna</b>					
Bangunan	159.663	53.474	25.072	-	188.066
Peralatan Kantor	25.778	9.222	24.263	-	10.737
Kendaraan	79.794	10.781	58.145	-	32.430
<b>Total Biaya Perolehan</b>	<b>265.235</b>	<b>73.477</b>	<b>107.480</b>	<b>-</b>	<b>231.232</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
<b>Aset Hak Guna</b>					
Bangunan	69.492	41.660	25.072	-	86.080
Peralatan Kantor	15.563	14.690	24.263	-	5.990
Kendaraan	44.740	30.795	58.145	-	17.390
<b>Total Akumulasi Penyusutan</b>	<b>129.795</b>	<b>87.145</b>	<b>107.480</b>	<b>-</b>	<b>109.460</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>135.440</b>				<b>121.772</b>

**15. FIXED ASSETS (continued)**

Right of use assets as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

		Cost
<b>Right of use assets</b>		
Buildings		
Office Equipment		
Motor Vehicles		
<b>Total Cost</b>		
<b>Accumulated depreciation</b>		
<b>Right of use assets</b>		
Buildings		
Office Equipment		
Motor Vehicles		
<b>Total Accumulated depreciation</b>		
<b>Net book value</b>		

	2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
<b>Biaya perolehan</b>					
<b>Aset Hak Guna</b>					
Bangunan	107.042	31.588	667	21.700	159.663
Peralatan Kantor	53.722	1.184	588	28.540	25.778
Kendaraan	94.754	6.608	661	20.907	79.794
<b>Total Biaya Perolehan</b>	<b>255.518</b>	<b>39.380</b>	<b>1.916</b>	<b>(27.747)</b>	<b>265.235</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
<b>Aset Hak Guna</b>					
Bangunan	25.500	40.775	667	3.884	69.492
Peralatan Kantor	14.520	9.113	588	7.482	15.563
Kendaraan	29.892	26.255	661	10.746	44.740
<b>Total Akumulasi Penyusutan</b>	<b>69.912</b>	<b>76.143</b>	<b>1.916</b>	<b>(14.344)</b>	<b>129.795</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>185.606</b>				<b>135.440</b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 106.820 m<sup>2</sup>. SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp164.880 dan Rp113.934 (Catatan 35).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi, Bank telah mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya. Kenaikan nilai tercatat aset tetap tanah sebesar Rp40.281. Pada tanggal 31 Desember 2021, Bank mencatat penurunan dari revaluasi aset tetap sebesar Rp7.351. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

**15. FIXED ASSETS (continued)**

*Land represents Building Rights Title (SHGB), Strata Title (SHMASRS) and Freehold Title (SHM) of 106,820 m<sup>2</sup>. SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.*

*Depreciation expense for years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp164,880 and Rp113,934 respectively (Note 35).*

*On December 31, 2022, the Bank conducted a revaluation (revaluation) of land fixed assets for accounting purposes. For accounting purposes, the Bank has changed its accounting policy for land measurement to a revaluation model from the previous cost model. The increase in the carrying value of land fixed assets amounted to Rp40,281. As of December 31, 2021, the Bank recorded decrease from revaluation amounting to Rp7,351. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income*

*Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and Regulation No. VIII.C.4 concerning the Guidance on Valuation and Presentation for the Appraisal Report on the Capital Market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.*

*In fair value measurement of land, the Independent Appraisers counts market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan tanggal 5 Januari 2023 dan KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan tanggal 14 Januari 2022 nilai wajar atas aset tetap yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.483.367 dan Rp1.261.746

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp133.768 dan Rp86.033.

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.113.426 dan Rp3.337.543. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 (Revisi 2014) selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

	Jenis aset/ Type of asset	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated Cost	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
31 Desember/ December 31, 2022	Bangunan/ <i>Buildings</i>	11%	681	2024
31 Desember/ December 31, 2021	Bangunan/ <i>Buildings</i>	7%	591	2022

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Bangunan	19.264	17.546	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor	399.176	359.866	<i>Office equipment</i>
Kendaraan bermotor	31.539	40.396	<i>Motor vehicle</i>
<b>Jumlah</b>	<b>449.980</b>	<b>417.808</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

**15. FIXED ASSETS (continued)**

Based on appraisal report of "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo and Partner dated January 5, 2023 and KJPP Satria Iskandar Setiawan and Partner dated January 14, 2022 the valuation of fixed assets owned by the Banks as of December 31, 2022 and 2021 amounted Rp1,483,367 and Rp1,261,746, respectively.

On December 31, 2022 and 2021, if land is measured by cost method, its carrying value is Rp133,768 and Rp86,033.

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of December 31, 2022 and 2021 for insurance coverage amounting to Rp1,113,426 and Rp3,337,543, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets for insured risks.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year as described in PSAK 48 (Revised 2014), because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

The details of construction in progress are as follows:

The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations are as follows:

As of December 31, 2022 and 2021, there were no fixed assets pledged as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

Aset tetap yang telah dihapusbuku, kemudian dilakukan penjualan melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Harga jual	5.274	4.556
Nilai buku	-	604
<b>Laba penjualan aset tetap</b>	<b><u>5.274</u></b>	<b><u>3.952</u></b>

*Proceed  
Book Value  
Gain from sale of fixed assets*

**16. ASET LAIN-LAIN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban yang ditangguhkan	110.112	109.324
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	19.812	21.891
Lainnya, neto	54.486	10.020
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	<u>(43.412)</u>	<u>(25.460)</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>140.998</u></b>	<b><u>115.775</u></b>

*Deferred charges  
Office stationery and printed form  
Others, net  
Allowance for decline in net realizable value  
Total*

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

*Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deferred charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.*

Lainnya termasuk biaya perpanjangan hak atas tanah yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah dengan menggunakan metode garis lurus.

*Others included deferred cost related to the extension of the landright and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat aset lain-lain tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

*Management believes that there is no impairment in the value of other assets do not exceed the estimated recoverable amount.*

Perubahan penyisihan penurunan nilai realisasi bersih adalah sebagai berikut:

*The movements in the allowance for decline in net realizable value are as follows:*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	25.460	25.460
Penyisihan selama tahun berjalan	17.952	-
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>43.412</u></b>	<b><u>25.460</u></b>

*Beginning balance  
Provision for the current year  
Ending balance*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. LIABILITAS SEGERA**

	<u>2022</u>
Transfer, inkaso, kliring	319.871
Penerimaan yang akan diperhitungkan	122.431
Beban sudah efektif harus dibayar	91.760
ATM Bersama	12.779
Lain-lain	325.673
<b>Jumlah</b>	<b><u>872.514</u></b>

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line*, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah dalam mata uang Rupiah.

**18. SIMPANAN DARI NASABAH**

a. Berdasarkan segmen

	<u>2022</u>
<b>Rupiah Konvensional</b>	
Tabungan	
- Simpeda	16.468.574
- Tabunganku	3.904.029
- Siklus	2.606.393
- Siklus Prioritas	2.563.553
- Simpanan Pelajar	71.323
- Haji	18.428
- Siklus Nelayan	295
	<u>25.632.595</u>
Giro	
- Pemerintah Daerah	14.593.208
- Umum	8.877.147
	<u>23.470.355</u>
Deposito berjangka	
- 1 bulan	5.874.726
- 2 bulan	271.709
- 3 bulan	16.276.952
- 6 bulan	325.605
- 12 bulan	7.648.875
- 18 bulan	25.594
- 24 bulan	10.643
- Jatuh tempo	560
- Deposito <i>on call</i>	40.300
	<u>30.474.964</u>
<b>Jumlah konvensional</b>	<b><u>79.577.914</u></b>

**17. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY**

	<u>2021</u>	
	172.987	<i>Transfer and cheques pending collection and clearing</i>
	116.659	<i>Acceptance pending settlement</i>
	103.364	<i>Amount involving expenses payable</i>
	-	<i>ATM Bersama</i>
	200.865	<i>Others</i>
	<b><u>593.875</u></b>	<b>Total</b>

*Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of telephone, payment of land and building tax and others.*

*Amounts involving expenses payable represent accrued expenses of electricity, telephone, social security ("BPJS") and others.*

*Other liabilities include control account, purchase payable and others.*

*All of obligations due immediately as of December 31, 2022 and 2021 are in Rupiah currency.*

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS**

a. Based on segment

	<u>2021</u>	
<b>Rupiah Konvensional</b>		<b>Rupiah Conventional</b>
Tabungan		<i>Savings</i>
- Simpeda	16.010.311	<i>Simpeda -</i>
- Tabunganku	3.469.603	<i>Tabunganku -</i>
- Siklus	4.659.197	<i>Siklus -</i>
- Siklus Prioritas	-	<i>Siklus Prioritas -</i>
- Simpanan Pelajar	61.275	<i>Simpanan Pelajar -</i>
- Haji	20.942	<i>Haji -</i>
- Siklus Nelayan	469	<i>Siklus Nelayan -</i>
	<u>24.221.797</u>	
Giro		<i>Current accounts</i>
- Pemerintah Daerah	16.440.199	<i>Municipal District -</i>
- Umum	9.416.895	<i>Public -</i>
	<u>25.857.094</u>	
Deposito berjangka		<i>Time deposits</i>
- 1 bulan	8.528.304	<i>1 month -</i>
- 2 bulan	175.702	<i>2 months -</i>
- 3 bulan	13.500.564	<i>3 months -</i>
- 6 bulan	286.438	<i>6 months -</i>
- 12 bulan	8.233.273	<i>12 months -</i>
- 18 bulan	130	<i>18 months -</i>
- 24 bulan	4.477	<i>24 months -</i>
- Jatuh tempo	892	<i>Due Date -</i>
- Deposito <i>on call</i>	288.190	<i>Deposits on call -</i>
	<u>31.017.970</u>	
<b>Jumlah konvensional</b>	<b><u>81.096.861</u></b>	<b>Total conventional</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

a. Berdasarkan segmen (lanjutan)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Syariah</b>		
Tabungan		
- Tabunganku	56.222	52.767
- Simpanan Pelajar	7.083	5.076
- Umroh Amanah	4.002	4.153
- Tabungan Laku Pandai	15	-
- Tabungan Santri	13	-
	<u>67.335</u>	<u>61.996</u>
Giro		
- Wadiah Pemerintah	2.410	1.525
- Wadiah swasta	152.820	108.252
- Wadiah perorangan	860	839
	<u>156.090</u>	<u>110.616</u>
Jumlah syariah	<u>223.425</u>	<u>172.612</u>
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b><u>79.801.339</u></b>	<b><u>81.269.473</u></b>
<b>Mata uang asing</b>		
<b>Konvensional</b>		
Giro		
- Umum	6.692	5.779
Tabungan		
- Siklus	49.288	42.827
	<u>55.980</u>	<u>48.606</u>
Deposito berjangka		
- 1 bulan	62.703	65.383
- 3 bulan	4.627	4.429
- 6 bulan	697	744
- 12 bulan	344	50
	<u>68.371</u>	<u>70.606</u>
<b>Jumlah mata uang asing</b>	<b><u>124.351</u></b>	<b><u>119.212</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>79.925.690</u></b>	<b><u>81.388.685</u></b>

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

a. Based on segment (continued)

<b>Sharia</b>
Savings
Tabunganku -
Simpanan Pelajar -
Umroh Amanah -
Laku Pandai Saving -
Current accounts
Government wadiah -
Private wadiah -
Individual wadiah -
Total sharia
<b>Total Rupiah</b>
<b>Foreign currencies</b>
<b>Conventional</b>
Current accounts
Public -
Savings
Siklus -
Time deposits
1 month -
3 months -
6 months -
12 months -
<b>Total foreign currencies</b>
<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang

	2022		2021	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
<b>Pihak berelasi</b>				
<u>Rupiah</u>				
Konvensional				
Giro		14.897.111		17.271.753
Tabungan		55.619		60.918
Deposito berjangka		339.868		384.574
Syariah				
Tabungan		14		14
<u>Mata uang asing</u>				
Konvensional				
Giro	43.231	673	43.289	619
Tabungan	81.709	1.272	35.571	507
Deposito berjangka dan deposito on call	54.472	848	94.787	1.351
Jumlah pihak berelasi (Catatan 40)		<u>15.295.405</u>		<u>17.719.736</u>
<b>Pihak ketiga</b>				
<u>Rupiah</u>				
Konvensional				
Giro		8.573.244		8.585.341
Tabungan		25.576.976		24.160.877
Deposito berjangka dan deposito on call		30.135.096		30.633.396
Syariah				
Giro		156.089		110.616
Tabungan		67.322		61.981
<u>Mata uang asing</u>				
Giro	386.639	6.019	362.169	5.162
Tabungan	3.084.374	48.016	2.969.270	42.321
Deposito berjangka dan deposito on call	4.337.434	67.523	4.858.977	69.255
Jumlah pihak ketiga		<u>64.630.285</u>		<u>63.668.949</u>
<b>Total</b>		<u><b>79.925.690</b></u>		<u><b>81.388.685</b></u>

Simpanan dari pihak berelasi tersebut merupakan simpanan dari Pemerintah Daerah dan manajemen kunci.

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

b. Based on relationship and currencies

	2022		2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	
<b>Related parties</b>					
<u>Rupiah</u>					
Conventional					
					Current accounts
					Savings
					Time deposits
Sharia					
					Savings
<u>Foreign currencies</u>					
Conventional					
					Current accounts
					Saving accounts
					Time deposits and deposits on call
Total related parties (Note 40)					
<b>Third parties</b>					
<u>Rupiah</u>					
Conventional					
					Current accounts
					Savings
					Time deposits and deposits on call
Sharia					
					Current accounts
					Savings
<u>Foreign currencies</u>					
Conventional					
					Current accounts
					Savings
					Time deposits and deposits on call
Total third parties					
<b>Total</b>					

These deposits from related parties represent deposits from Regional Governments and key management personnel.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)

1) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah	0.89%	0.86%
Mata uang asing	0.14%	0.17%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dari adalah sama antara pihak berelasi dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

2) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun tabungan terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tabungan		
- Simpeda	0.96%	1.08%
- Siklus	1.65%	1.71%
- Haji	0.76%	0.77%
- Tabunganku	0.91%	0.87%

Tingkat bunga rata-rata per tahun tabungan untuk pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

b. Based on relationship and currencies (continued)

1) The average interest rates per annum on current accounts consist of:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah	0.89%	0.86%
Foreign currencies	0.14%	0.17%

The average interest rates per annum on current accounts with related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2022 and 2021, there were no current accounts held under liens and used as security.

2) The average interest rates per annum on savings consist of:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Savings		
- Simpeda	0.96%	1.08%
- Siklus	1.65%	1.71%
- Haji	0.76%	0.77%
- Tabunganku	0.91%	0.87%

The average interest rates per annum on savings for related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2022 and 2021, there were no savings held under liens and used as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

- b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)
- 3). Rincian deposito berjangka dan deposito *on call*:

Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah		
- 1 bulan	5.874.726	8.438.601
- 2 bulan	271.709	175.702
- 3 bulan	16.276.952	13.586.137
- 6 bulan	325.605	284.675
- 12 bulan	7.648.875	8.239.166
- 18 bulan	25.594	130
- 24 bulan	10.643	4.477
- Jatuh tempo	560	892
- Deposito <i>on call</i>	40.300	288.190
	<u>30.474.964</u>	<u>31.017.970</u>
Mata uang asing		
- 1 bulan	62.703	65.383
- 3 bulan	4.627	4.429
- 6 bulan	697	744
- 12 bulan	344	50
	<u>68.371</u>	<u>70.606</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>30.543.335</u></b>	<b><u>31.088.576</u></b>

Klasifikasi deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah		
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	5.874.726	9.055.199
- Lebih dari 1 - 3 bulan	16.548.661	13.145.742
- Lebih dari 3 - 6 bulan	325.605	284.174
- Lebih dari 6 - 12 bulan	7.648.875	8.239.166
- Lebih dari 12 - 18 bulan	25.594	130
- Lebih dari 18 - 24 bulan	10.643	4.477
- Jatuh tempo	560	892
- Deposito <i>on call</i>	40.300	288.190
	<u>30.474.964</u>	<u>31.017.970</u>
Mata uang asing		
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	62.703	65.383
- Lebih dari 1 - 3 bulan	4.627	4.429
- Lebih dari 3 - 6 bulan	697	744
- Lebih dari 6 - 12 bulan	344	50
	<u>68.371</u>	<u>70.606</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>30.543.335</u></b>	<b><u>31.088.576</u></b>

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

- b. Based on relationship and currencies (continued)

- 3). Detail of time deposits and deposits on call:

The details of time deposits based on maturities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah		
1 month -	8.438.601	8.438.601
2 months -	175.702	175.702
3 months -	13.586.137	13.586.137
6 months -	284.675	284.675
12 months -	8.239.166	8.239.166
18 months -	130	130
24 months -	4.477	4.477
Matured -	892	892
Deposits on call -	288.190	288.190
	<u>31.017.970</u>	<u>31.017.970</u>
Foreign currencies		
1 month -	65.383	65.383
3 months -	4.429	4.429
6 months -	744	744
12 months -	50	50
	<u>70.606</u>	<u>70.606</u>
<b>Total</b>	<b><u>31.088.576</u></b>	<b><u>31.088.576</u></b>

The details of time deposits based on remaining period until maturity:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah		
Less than or until 1 month -	5.874.726	9.055.199
More than 1 - 3 months -	16.548.661	13.145.742
More than 3 - 6 months -	325.605	284.174
More than 6 - 12 months -	7.648.875	8.239.166
More than 12 - 18 months -	25.594	130
More than 18 - 24 months -	10.643	4.477
Matured -	560	892
Deposits on call -	40.300	288.190
	<u>30.474.964</u>	<u>31.017.970</u>
Foreign currencies		
Less than or until 1 month -	62.703	65.383
More than 1 - 3 months -	4.627	4.429
More than 3 - 6 months -	697	744
More than 6 - 12 months -	344	50
	<u>68.371</u>	<u>70.606</u>
<b>Total</b>	<b><u>30.543.335</u></b>	<b><u>31.088.576</u></b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

c. Tingkat bunga rata-rata deposito per tahun:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah		
- 1 bulan	2.63%	2.98%
- 2 bulan	2.68%	3.00%
- 3 bulan	2.78%	3.00%
- 6 bulan	2.90%	3.00%
- 12 bulan	2.95%	3.00%
- 18 bulan	3.00%	3.00%
- 24 bulan	3.00%	3.00%
- Deposito <i>on call</i>	2.01%	2.93%
Mata uang asing:		
- 1 dan 3 bulan	0.18%	0.18%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit, masing-masing sebesar Rp127.942 dan Rp87.191 (Catatan 12k).

**19. SIMPANAN DARI BANK LAIN**

a. Berdasarkan segmen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Konvensional</b>		
Tabungan		
- Siklus	217.121	210.980
- Simpeda	307.176	308.338
	<u>524.297</u>	<u>519.318</u>
Giro		
- Giro Bank Swasta	49.982	55.685
- Giro BPD-SI	3.900	2.613
- Giro Bank Pemerintah	2.406	191
- Giro BPR	780	135
- Giro BPR Jets	30.887	12.318
	<u>87.955</u>	<u>70.942</u>
Deposito berjangka		
- 1 bulan	178.937	409.666
- 2 bulan	2.000	-
- 3 bulan	106.750	202.950
- 6 bulan	60	11.660
- 12 bulan	4.500	1.000
	<u>292.247</u>	<u>625.276</u>
<i>Interbank call money</i>	2.395.000	2.055.000
Total konvensional	<u>3.299.499</u>	<u>3.270.536</u>
<b>Syariah</b>		
- Giro <i>wadiah</i>	11.339	19.181
Total syariah	<u>11.339</u>	<u>19.181</u>
<b>Total</b>	<u>3.310.838</u>	<u>3.289.717</u>

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

c. Average interest rates of deposits per annum:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah		
1 month -	2.63%	2.98%
2 months -	2.68%	3.00%
3 months -	2.78%	3.00%
6 months -	2.90%	3.00%
12 months -	2.95%	3.00%
18 months -	3.00%	3.00%
24 months -	3.00%	3.00%
Deposits on call	2.01%	2.93%
Foreign currencies		
1 and 3 months -	0.18%	0.18%

The average interest rates per annum on time deposits from related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2022 and 2021, time deposits held under liens and used as security were Rp127,942 and Rp87,191, respectively (Note 12k).

**19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS**

a. Based on segment

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Conventional</b>		
Savings		
Siklus -	217.121	210.980
Simpeda -	307.176	308.338
	<u>524.297</u>	<u>519.318</u>
Current accounts		
Private bank current accounts -		
BPD-SI current accounts -	49.982	55.685
Government bank current accounts -	3.900	2.613
BPR current accounts -	2.406	191
BPR Jets current accounts -	780	135
	<u>30.887</u>	<u>12.318</u>
	<u>87.955</u>	<u>70.942</u>
Time deposits		
1 month -	178.937	409.666
2 months -	2.000	-
3 months -	106.750	202.950
6 months -	60	11.660
12 months -	4.500	1.000
	<u>292.247</u>	<u>625.276</u>
Interbank call money	2.395.000	2.055.000
Total conventional	<u>3.299.499</u>	<u>3.270.536</u>
<b>Sharia</b>		
Wadiah current account -	11.339	19.181
Total sharia	<u>11.339</u>	<u>19.181</u>
<b>Total</b>	<u>3.310.838</u>	<u>3.289.717</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)**

b. Berdasarkan hubungan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi		
- Giro	920	913
- Tabungan	64.046	40.226
- Deposito berjangka	77.030	319.030
	<u>141.996</u>	<u>360.169</u>
Pihak ketiga		
- Giro	98.374	89.210
- Tabungan	460.251	479.092
- Deposito berjangka	215.217	306.246
- SIMA	-	846.000
- Interbank call money	2.395.000	2.055.000
	<u>3.168.842</u>	<u>3.775.548</u>
<b>Total</b>	<b><u>3.310.838</u></b>	<b><u>4.135.717</u></b>

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah.

c. Deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah		
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	178.437	409.666
- Lebih dari 1 - 3 bulan	109.250	202.950
- Lebih dari 3 - 6 bulan	60	11.660
- Lebih dari 6 - 12 bulan	4.500	1.000
	<u>292.247</u>	<u>625.276</u>
- Interbank call money	2.395.000	2.055.000
<b>Total</b>	<b><u>2.687.247</u></b>	<b><u>2.680.276</u></b>

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Konvensional</b>		
Giro	0,46%	0,65%
Tabungan	1,16%	1,23%
Deposito	4,00%	2,90%
Interbank call money	5,67%	2,95%
<b>Syariah</b>		
Giro	0,07%	0,36%
Tabungan	0,60%	0,31%
Deposito	2,40%	2,89%
SIMA	2,80%	3,22%

**19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)**

b. Based on relationship

Related parties
Current accounts -
Savings -
Time deposits -
Third parties
Current accounts -
Savings -
Time deposits -
SIMA
Interbank call money -
<b>Total</b>

All deposits from other banks are in Rupiah.

c. Deposits by remaining period to maturity

Rupiah
Less than or until 1 month -
More than 1 - 3 months -
More than 3 - 6 months -
More than 6 - 12 months -
Interbank call money -
<b>Total</b>

d. Average interest rates per annum

<b>Conventional</b>
Current accounts
Savings
Time deposits
Interbank call money
<b>Sharia</b>
Current accounts
Savings
Time deposits
SIMA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**20. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank memiliki liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sejumlah Rp3.891.346 dan RpNihil dengan rincian sebagai berikut:

**20. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT**

As of December 31, 2022 and 2021, Bank has a number of liability for repo securities Rp3,891,346 and RpNihil with details as follows:

2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Nilai beli kembali/ Buy back value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai bersih/ Net value
<b>Sertifikat Bank Indonesia</b>							
FR0081	400.000	15 November/ November 15, 2022	14 Februari/ February 14, 2023	5,73%	394.481	2.723	391.758
FR0070	200.000	29 November/ November 29, 2022	28 Februari/ February 28, 2023	6,23%	202.166	1.998	200.168
FR0081	200.000	19 Desember/ December 19, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,75%	96.086	15	96.070
FR0086	500.000	20 Desember/ December 20, 2022	3 Januari/ January 3, 2023	5,80%	470.847	151	470.696
FR0059	350.000	22 Desember/ December 22, 2022	1 Februari/ February 1, 2023	5,65%	346.111	1.673	344.437
FR0059	200.000	23 Desember/ December 23, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,80%	196.492	32	196.460
FR0086	550.000	23 Desember/ December 23, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,80%	471.288	76	471.212
FR0086	150.000	26 Desember/ December 26, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,75%	188.488	30	188.458
FR0059	200.000	26 Desember/ December 26, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,75%	196.435	31	196.404
FR0081	700.000	28 Desember/ December 28, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,80%	771.068	372	770.696
FR0086	600.000	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,75%	565.348	361	564.987
<b>Jumlah/Total</b>					<b>3.898.809</b>	<b>7.463</b>	<b>3.891.346</b>

**21. PINJAMAN YANG DITERIMA**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia  
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)  
PT Sarana Multigriya Financial  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi)  
**Total**

2022

481.532

76.698

71.867

1.367

**631.464**

**21. BORROWINGS**

2021

457.034

120.394

76.493

1.367

**655.288**

Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia  
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)  
PT Sarana Multigriya Financial  
Government of East Java Province (related party)  
**Total**

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are from third parties and in Rupiah.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

a. Kementerian PUPR

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan sebagaimana perubahan terakhir telah diperpanjang mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Bank wajib menyampaikan rekening koran atas rekening Dana Kelolaan dan Rekening Operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya. Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp194.934 dan Rp184.774.

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Sesuai Perjanjian Pinjaman No.26 tanggal 13 September 2019, Bank menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang berupa fasilitas pembiayaan maksimal Rp200.000, untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah kerja Bank dan telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Bank sebesar 5% dan suku bunga dari Bank ke Usaha Mikro dan menengah maksimal 7% pertahun.

Penyaluran pembiayaan yang diberikan adalah pola *executing* dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dihitung sejak pencairan.

Bank harus menyerahkan daftar piutang sehat yang dimiliki Bank yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 bulan minimal 100% dari *outstanding* pinjaman.

Bank menjaminkan kreditnya kepada LPDB-KUMKM dengan nilai minimal 100% dari *outstanding* pinjaman yang menjadi jaminan fidusia. Pada 31 Desember 2022 dan 2021 bank memiliki sisa pinjaman sebesar Rp76.500 dan Rp120.251. Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijamin maka bank wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat.

**21. BORROWINGS (continued)**

a. Ministry of Public Works and Housing

*Fund Management Center of Housing Financing (PPDPP) from the Ministry of General Works and Public Housing of the Republic of Indonesia in collaboration with the Bank disburse the Liquidity Facility of Housing Financing (FLPP) through loan/financing of housing for sharia prosperous house for low-income communities with an interest rate maximum of 0.5% for KPR Sejahtera FLPP provision fee. KPR Sejahtera FLPP has a maximum term of 20 (twenty) years. The term of the operational cooperation agreement is starting from January 1, 2021 until December 31, 2021 and as the latest amendment has been extended from January 1, 2022 until December 31, 2022.*

*The Bank are required to submit a checking account for The Managed Fund account and The Operational Account no later than the 5th and 16th of each month. On December 31, 2022 and 2021, the Bank has disbursed FLPP to debtors amounting to Rp194,934 and Rp184,774, respectively.*

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

*According to Credit Agreement No.26 dated September 13, 2019, Bank received borrowing facilities from LPDB-KUMKM represents revolving funds financing facility in the form of a maximum of Rp200,000. to be distributed to Small and Medium Enterprises (SMEs) which scattered in the work area of the Bank and has been determined in accordance with the definitive list. The interest rate given from LPDB h for Bank is 5% and from Bank for micro, small and medium bussines is a maximum 7% for annum.*

*The distributing patterns of financing provided is executing a pattern with a period of 60 (sixty) months or 5 (five) years from the disbursement.*

*The Bank must submit a list of healthy receivables owned by the Bank which is a fiduciary guarantee every 6 months at least 100% of the outstanding loan.*

*The Bank pledged its loan as collateral to LPDB-KUMKM with a minimum value of 100% of the outstanding loan which is a fiduciary guarantee. As of December 31, 2022 and 2021 the bank has outstanding loan of Rp76,500 and Rp120,251. If during the loan period there is a decrease in the quality of the collateralized loan, the bank is obliged to replace it with new, performing loans.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

c. PT Sarana Multigriya Financial (Persero)

Dana Multigriya Financial merupakan fasilitas pembiayaan dengan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multigriya Financial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 25 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Bank harus menyerahkan Laporan Keuangan Audited selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Bank tidak boleh mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Jatim diantaranya adalah:

- 1) Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur No.900/8176/122.5/2020 dan No.059/161/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Mitra Pokmas Anti Poverty Program (APP) tanggal 21 September 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun.
- 2) Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur No.523/14609/120.2/2020 dan No.059/155.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Mitra Pokmas Anti-Poverty Program (APP) Bidang Perikanan Budidaya tanggal 04 September 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No.530/4310/125.3/2020 dan No.059/190.1/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Indutri Mikro, Kecil, Menengah tanggal 19 Oktober 2020 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun.

**21. BORROWINGS (continued)**

c. PT Sarana Multigriya Financial (Persero)

*Sarana Multigriya Financial Funds is 25% portion of financing facility which received from PT Sarana Multigriya Financial (Persero) to disbursing on housing procurement program through Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera for low income society with 4.45% margin. Portion financing facility period start from February 25, 2021 to December 31, 2021.*

*Banks must submit the Audited Financial Statements no later than 120 days after the closing of the financial year. The Bank may not transfer/hand over to other parties, partially or entirely of the rights and obligations arising in connection with this loan agreement.*

d. Government of East Java Province

*An Agreements between the East Java Provincial Government and Bank Jatim include the details are as follow:*

- 1) *Cooperation Agreement with the Livestock Service (Dinas Peternakan) of East Java Province No.900/8176/122.5/2020 and No.059/161/SP/DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Community Group of Anti-Poverty Program (APP) on 21 September 2020 with the term of agreement in 3 (three) years.*
- 2) *Cooperation Agreement with the Office of Marine Affairs and Fisheries of East Java Province No.523/14609/120.2/2020 and No.059/155.1/SP/DIR/KRD.AGR.RTL concerning on Management of Revolving Fund in East Java Province for Community Group of Anti-Poverty Program (APP) Partners in Aquaculture sector on September 4, 2020 with an agreement period in 3 (three) years.*
- 3) *Cooperation Agreement with the Department of Industry and Trade of East Java Province No.530/4310/125.3/2020 and No.059/190.1/SP/DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Micro, Small, and Medium Industries on October 19, 2020 with an agreement period of 5 (five) years.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

- 4). Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No.932/8216/110.2/2020 dan No.059/224/SP/DIR/KMRP tentang Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Indutri Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), Serta Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam Program Hulu Hilir Agro Maritim/Tanam Petik Olah Kemas dan Jual tanggal 30 Desember 2020 dengan jangka waktu pinjaman untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha maksimal 3 (tiga) tahun, kredit investasi maksimal lima tahun dapat diberikan *grace period* angsuran pokok maksimal selama 3 (tiga) bulan.

**22. PERPAJAKAN**

- a. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo piutang pajak atas pajak lainnya masing-masing sebesar Rp493 dan Rp412.
- b. Utang pajak:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak penghasilan pasal 25	43.577	-
Pajak penghasilan pasal 21	30.453	20.291
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	10.489	13.492
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 22f)	5.803	131.299
Lain-lain	461	394
<b>Total</b>	<b><u>90.783</u></b>	<b><u>165.476</u></b>

- c. Beban pajak penghasilan badan:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak kini	412.330	474.145
Penyesuaian beban pajak		
Pajak kini tahun 2019	(104.878)	-
<b>Total</b>	<b><u>307.452</u></b>	<b><u>474.145</u></b>
Pajak tangguhan		
Koreksi pajak tangguhan	36.036	(59.241)
Pajak tangguhan 2019	102.543	-
Penyesuaian saldo awal		
aset pajak tangguhan	41.194	-
<b>Total</b>	<b><u>179.773</u></b>	<b><u>(59.241)</u></b>
<b>Beban pajak</b>	<b><u>487.225</u></b>	<b><u>414.904</u></b>

**21. BORROWINGS (continued)**

- 4). Cooperation Agreement with the Department of Agriculture and Food Security of East Java Province No.932/8216/110.2/2020 and No.059/224/SP/ DIR/KMRP concerning on Management of Revolving Funds in East Java Province for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK), as well as Farmers, Farmer Groups and Farmer Group Associations in the Upstream Downstream Argo Maritime Program / Planting Picking Process and Selling on December 30, 2020, with a loan term for working capital loans adjusted to a maximum business cycle of 3 (three) years, maximum agreement period for investment credit be held in five years, with a maximum principal installment *grace period* of 3 (three) months.

**22. TAXATION**

- a. As of December 31, 2022 and 2021, the balance of tax receivable on other tax amounted Rp493 and Rp412, respectively.
- b. Taxes payable:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	-	-	Corporate income tax - article 25
	-	-	Employees' income tax - article 21
	-	-	Withholding income tax articles 23/4 (2)
	-	-	Corporate income tax - article 29 (Note 22f)
	-	-	Others
	-	-	<b>Total</b>

- c. Corporate income tax expense:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	-	-	Current tax
	-	-	Adjustment on tax expense
	-	-	Current tax year 2019
	-	-	<b>Total</b>
	-	-	Deferred Tax
	-	-	Deferred Tax Correction
	-	-	Deferred Tax year 2019
	-	-	Beginning balance adjustment on
	-	-	deferred tax assets
	-	-	<b>Total</b>
	-	-	<b>Income tax expense</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- d. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Laba sebelum beban pajak	2.030.049	1.937.974
Perbedaan tetap:		
Pajak	87.828	69.549
Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu dan lainnya	98.188	76.754
Penyisihan kerugian penurunan nilai non kredit	51.173	26.629
Lain-lain	92.580	72.796
	<u>329.769</u>	<u>245.728</u>
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(205.927)	252.702
Cadangan jasa produksi	385.706	380.767
Cadangan imbalan kerja	31.918	5.869
Cadangan lainnya	(5.900)	41.072
Sewa	(14.689)	4.210
Pembayaran jasa produksi	(380.767)	(372.823)
	<u>(189.659)</u>	<u>311.797</u>
Total	<u>140.110</u>	<u>557.525</u>
<b>Taksiran laba kena pajak</b>	<b><u>2.170.159</u></b>	<b><u>2.495.499</u></b>

**22. TAXATION (continued)**

- d. The reconciliation between income before tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

<i>Income before tax expense</i>
<i>Permanent differences:</i>
<i>Taxes</i>
<i>Social and environment responsibility, donation, promotion, meetings and entertainment and others</i>
<i>Non loan provision for impairment losses</i>
<i>Others</i>
<i>Temporary differences:</i>
<i>Provision for impairment losses</i>
<i>Provision for employee bonuses</i>
<i>Provision for employee benefit</i>
<i>Others provision</i>
<i>Lease</i>
<i>Payment for employee bonuses</i>
<i>Total</i>
<b><i>Estimated taxable income</i></b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pajak kini</b> (Pajak dengan tarif efektif atas taksiran laba kena pajak tahun berjalan)	412.330	474.145
	<u>412.330</u>	<u>474.145</u>
Beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan atas pengaruh beda temporer temporer pada tarif pajak maksimum:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	39.126	(48.013)
Cadangan jasa produksi	(73.284)	(72.345)
Koreksi fiskal PSAK 73	2.790	(800)
Cadangan imbalan kerja	(6.064)	(1.115)
Cadangan lainnya	1.121	(7.804)
Penerimaan hapusbuku	-	-
Pembayaran jasa produksi	72.346	70.836
Manfaat pajak tangguhan	<u>36.035</u>	<u>(59.241)</u>
Laba sebelum beban pajak	448.365	414.904
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	385.710	368.215
Pengaruh pajak atas beda tetap	62.656	46.689
Pajak kini hasil pemeriksaan tahun 2019	(104.878)	-
<b>Pajak penghasilan tahun berjalan</b>	<b>343.488</b>	<b>414.904</b>
Hasil Pemeriksaan Tahun 2019	102.543	-
Penyesuaian aset pajak tangguhan saldo awal	41.194	-
<b>Beban pajak, neto</b>	<u><b>487.225</b></u>	<u><b>414.904</b></u>

f. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban pajak tahun berjalan	412.330	474.145
Dikurangi: Pajak penghasilan badan dibayar dimuka - pajak penghasilan - pasal 25	406.527	342.846
<b>Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 22b)</b>	<u><b>(5.803)</b></u>	<u><b>(131.299)</b></u>

**22. TAXATION (continued)**

e. The computation of tax expense is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Current tax</b> (At the effective tax rate on estimated taxable income for the current year)	412.330	474.145
Deferred tax expense (benefit) of temporary differences at the maximum tax rate:		
Provision for impairment losses	39.126	(48.013)
Provision for employee bonuses	(73.284)	(72.345)
PSAK 73 Fiscal Correction	2.790	(800)
Provision for employee benefit	(6.064)	(1.115)
Others provision	1.121	(7.804)
Write off credit income	-	-
Payment for employee bonuses	72.346	70.836
Deferred tax benefit	<u>36.035</u>	<u>(59.241)</u>
Income before tax expense	448.365	414.904
Estimated income tax at applicable tax rate	385.710	368.215
Tax effect on permanent differences	62.656	46.689
Inspection current tax year 2019	(104.878)	-
<b>Corporate income tax current year</b>	<b>343.488</b>	<b>414.904</b>
Inspection result year 2019	102.543	-
Adjustment deferred tax assets	41.194	-
Beginning balance	-	-
<b>Tax expense, net</b>	<u><b>487.225</b></u>	<u><b>414.904</b></u>

f. The analysis of corporate income tax payable is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Current year tax expense	412.330	474.145
Less: Prepaid corporate income tax - article 25	406.527	342.846
<b>Under payment of corporate income tax (Note 22b)</b>	<u><b>(5.803)</b></u>	<u><b>(131.299)</b></u>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. PERPAJAKAN (lanjutan)**

g. Aset pajak tangguhan:

	31 Desember/ December 31, 2021	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charged to statement of profit or loss	Penyesuaian saldo awal/ Beginning balance adjustment	31 Desember/ December 31, 2022	
Cadangan jasa produksi	72.346	-	938	-	73.284	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	523.599	-	(141.669)	(41.194)	340.736	Provision for losses on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(45.400)	76.116	-	(3.730)	26.986	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Cadangan lainnya	14.502	-	(1.121)	-	13.381	Others provision
Sewa	1.777	-	(2.791)	-	(1.014)	Lease
Cadangan imbalan kerja	60.387	(21.945)	6.064	4.359	48.865	Provision for employee benefit
<b>Aset pajak tangguhan</b>	<b>627.211</b>	<b>54.171</b>	<b>(138.579)</b>	<b>(40.565)</b>	<b>502.238</b>	<b>Deferred tax assets</b>

**22. TAXATION (continued)**

g. Deferred tax assets:

	31 Desember/ December 31, 2020	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	31 Desember/ December 31, 2021	
Cadangan jasa produksi	70.837	-	1.509	72.346	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian aset produktif	475.586	-	48.013	523.599	Provision for losses on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(29.498)	(15.902)	-	(45.400)	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Cadangan lainnya	6.698	-	7.804	14.502	Others provision
Sewa	977	-	800	1.777	Lease
Cadangan imbalan kerja	67.076	(7.804)	1.115	60.387	Provision for employee benefit
<b>Aset pajak tangguhan</b>	<b>591.676</b>	<b>(23.706)</b>	<b>59.241</b>	<b>627.211</b>	<b>Deferred tax assets</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. PERPAJAKAN (lanjutan)**

h. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka", yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

**22. TAXATION (continued)**

h. Changes in tax rate

*Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".*

*At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies", which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met: (a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the Government Regulation.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. PERPAJAKAN (lanjutan)**

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Desember 2021 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

Tahun 2022, Bank menyampaikan pembetulan SPT ke-1 SPT PPh Badan tahun pajak 2019 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena pembetulan saldo awal PPAP tahun pajak 2019 akibat hasil pemeriksaan tahun pajak 2018. Dalam pembetulan SPT tersebut, Bank menyatakan lebih bayar sebesar Rp119.311 (2019). Atas lebih bayar tersebut, Bank melakukan permohonan restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Berlandaskan pasal 29 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2015 melalui Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Januari 2022 nomor PEMB-00001/WPJ.07/KP.0804/RIK.SIS/2022, Surat Perintah Pemeriksaan tanggal 28 Juli 2022 nomor PRIN-00001/WPJ.07/KP.0804/RIK.SIS/2022 atas permohonan restitusi lebih bayar di atas dengan hasil pemeriksaan melalui Risalah Pembahasan nomor SP2: PRIN-00001/WPJ.07/KP.0804/RIK.SIS/2022 tanggal 06 Oktober 2022 atas hasil pemeriksaan tersebut, Bank dinyatakan Rp104.878 (2019) serta melalui surat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) nomor S-REK-469/WPJ.07/KP.0803/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permintaan Rekening Dalam Negeri maka selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tanggal 21 Oktober 2022 atas PPh Badan Tahun Pajak 2019.

**22. TAXATION (continued)**

h. Changes in tax rate (continued)

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of December 31, 2021 has been calculated using a tax rate of 19%.

In 2022, the Bank submitted first revision of Annual Corporate Income Tax Return for fiscal year 2019 to tax authority because of the correction of the initial balance of PPAP for fiscal year 2019 due to the results of the 2018 tax year inspection. In the revision of Annual Corporate Income Tax Return, the Bank declared an overpayment of Rp119.311 (2019). Due to the overpayment, the Bank is undertaking the process of filling a restitution request.

Based on subsection 29 of Law number 6 in 1983 concerning on General Provisions and Tax Procedures as amended several times, most recently by Law number 16 of 2009 in conjunction with Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 concerning in Audit Procedures as amended with Regulation of the Minister of Finance number 184/PMK.03/2015 through n Audit Warrant dated 4 January 2022 number PEMB-00001/WPJ.07/KP.0804/RIK.SIS/2022, Field Inspection Notification Letter number PRIN-00001/WPJ.07/KP.0804/RIK.SIS/2022 dated 28 July 2022 on the request for overpayment restitution above and with the results of the examination through the Discussion number SP2: PRIN-00001/WPJ.07/KP.0804/RIK.SIS/2022 dated October 6, 2022 on the results of the examination, the Bank was declared an overpayment of Rp104.878 (2019) in accordance with the Tax Service Office (KPP) letter number S-REK-469/WPJ.07/KP.0803/2022 dated October 12, 2022 regarding Domestic Account Requests, then the Tax Service Office (KPP) will carry out disbursement of tax overpayment returns on October 21, 2022 for Corporate Income Tax in 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)**

Pada 18 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang pasal 5 menyebutkan bahwa adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi (a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian berubah menjadi (b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada pasal 5 ayat 2 bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang dimaksud pada huruf (a) dan (b).

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud. Terkait hal tersebut, diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa tarif pajak penghasilan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar (a) 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan (b) 22% yang mulai berlaku pada Tahun pajak 2022 (sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

**22. TAXATION (continued)**

**h. Changes in tax rate (continued)**

*On May 18, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/ or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become Law. Article 5 states that there is an adjustment in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments to become (a) 22% (twenty two percent) which applies in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year. Then it changes to (b) 20 % (twenty percent) which will take effect in the 2022 Fiscal Year. In article 5 paragraph 2 for domestic Taxpayers in the form of Public Companies with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent), and fulfilling certain requirements may obtain a tariff of 3% (three percent) lower than the rate referred to in letters (a) and (b).*

*On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations with a tax rate for domestic entities and permanent establishments of 22% which will take effect in the 2022 fiscal year. Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) the total number of paid-up shares is traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate referred to. In this regard, it is regulated by Government Regulation (PP) Number 55 of 2022 concerning Adjustment of Arrangements in the Income Tax Sector which states that the domestic income tax rate and permanent establishment is (a) 22% which applies in the 2020 and 2021 Fiscal Years and (b) 22% which will take effect in the 2022 tax year (in accordance with the provisions of Law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations).*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)**

Wajib pajak badan dalam negeri adalah berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud diatas. Persyaratan tertentu yang dimaksud adalah (a) saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (b) masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, (c) ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/II/2023-0190 tanggal 4 Januari 2023 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Lampiran POJK Nomor 10/POJK.04/2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2022, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah dipenuhi.

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Desember 2022 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

**22. TAXATION (continued)**

**h. Changes in tax rate (continued)**

Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at a minimum of 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate stipulated as referred to above. The specific requirements referred to are (a) shares must be owned by at least 300 parties, (b) each party can only own shares of less than 5% of the total issued and fully paid shares, (c) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

Based on Letter No.DE/II/2023-0190 dated January 4, 2023 regarding the monthly report of shares ownerships, form of Attachment to POJK Number 10/POJK.04/2020 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2022, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2022 were fulfilled by Bank.

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of December 31, 2022 has been calculated using a tax rate of 19%.

**23. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	<u>2022</u>
Cadangan jasa produksi	385.706
Bunga	135.134
<b>Jumlah</b>	<b><u>520.840</u></b>

**23. ACCRUED EXPENSES**

	<u>2021</u>
	380.767
Employee bonuses	97.880
Interest	
<b>Total</b>	<b><u>478.647</u></b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS LAIN-LAIN**

**24. OTHER LIABILITIES**

	2022		2021		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah/ equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah/ equivalent	
<b>Rupiah</b>					<b>Rupiah</b>
Cadangan imbalan kerja		257.184		317.828	Provision of employee benefit
Setoran jaminan		132.236		117.527	Security deposits
Liabilitas sewa		23.322		44.433	Lease liabilities
Pokok kredit penerusan yang diterima		7.683		8.643	Principal - channeling loans received
Bunga kredit penerusan yang diterima		3.592		3.522	Interest - channeling loans received
Provisi dan administrasi kredit		-		8.971	Provision and credit administration
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		3.020		117	Estimated losses on commitments and contingencies
Lainnya		1.390		26.689	Others
		<u>428.427</u>		<u>527.730</u>	
<b>Mata uang asing</b>					<b>Foreign currencies</b>
Lainnya					Other
Dolar Amerika Serikat	2.526.096	39.325	100.400	1.431	United States Dollar
Dolar Singapore	305.187	3.538	51.729	546	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	10.017	20	10.394	19	Hong Kong Dollar
Yen Jepang	-	-	96.774	12	Japanese Yen
Euro	44.869	744	-	-	Euro
		<u>43.627</u>		<u>2.008</u>	
<b>Jumlah</b>		<u>472.054</u>		<u>529.738</u>	<b>Total</b>

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

Estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	117	4.280	Balance at beginning of year
Pembentukan (pemulihan) tahun berjalan	2.903	(4.163)	Allowance (recovery) during the year
<b>Saldo akhir tahun</b>	<u>3.020</u>	<u>117</u>	<b>Balance at end of year</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. DANA SYIRKAH TEMPORER**

**25. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS**

a. Giro Mudharabah  
1) Berdasarkan jenis produk

a. *Mudharabah Current Accounts*  
1) *By product*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Bukan Bank Giro iB Hasanah (Mudharabah)	1.637	2.920	Non-Bank iB Hasanah (Mudharabah) current accounts
	1.637	2.920	
Bank Giro iB Hasanah (Mudharabah)	-	-	Bank iB Hasanah (Mudharabah) current accounts
<b>Total</b>	<u>1.637</u>	<u>2.920</u>	<b>Total</b>

2) Berdasarkan hubungan

2) *By relationship*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Bukan Bank Pihak ketiga	1.637	2.920	Non-Bank Third parties
	1.637	2.920	
Bank Pihak ketiga	-	-	Bank Third parties
<b>Total</b>	<u>1.637</u>	<u>2.920</u>	<b>Total</b>

3) Nisbah dan tingkat bagi hasil  
Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata giro mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

3) *Ratio and profit sharing rate*  
*The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2022 are as follows:*

	<u>2022</u>		
	Nisbah/ <i>Ratio</i>	Tingkat bagi hasil/ <i>Profit sharing rate</i>	
Giro Mudharabah	5,00%	0,47%	<i>Mudharabah current accounts</i>

b. Tabungan Mudharabah  
1) Berdasarkan jenis produk

b. *Mudharabah Savings Deposits*  
1) *By product*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Bukan Bank Tabungan iB Hasanah (Mudharabah)	594,597	572,158	Non-Bank iB Hasanah (Mudharabah) savings deposits
	594,597	572,158	
Bank Tabungan iB Hasanah (Mudharabah)	19,285	45,783	Bank iB Hasanah (Mudharabah) savings deposits
<b>Total</b>	<u>613,882</u>	<u>617,941</u>	<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)**

b. Tabungan Mudharabah (lanjutan)  
2) Berdasarkan jenis produk

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bukan Bank		
Pihak berelasi	972	924
Pihak ketiga	593.625	571.234
	<u>594.597</u>	<u>572.158</u>
Bank		
Pihak ketiga	19.285	45.783
<b>Total</b>	<u><u>613.882</u></u>	<u><u>617.941</u></u>

3) Nisbah dan tingkat bagi hasil  
Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata tabungan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	
	Nisbah/Ratio	Tingkat bagi hasil/Profit
Tabungan Barokah Sejahtera	4.00%	0.38%
Tabungan Pensiun IB Barokah	15.00%	1.42%
Tabungan Rencana IB Barokah	25.00%	2.37%
Tabungan Haji Amanah	10.00%	0.95%
Tabungan Mudh Bank Lain	8.00%	0.76%
Tabungan Barokah	12.50%	1.19%

**25. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)**

b. Mudharabah Savings Deposits (continued)  
2) By product

Non-Bank
Related parties
Third parties
Bank
Third parties
<b>Total</b>

3) Ratio and profit sharing rate  
The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah savings deposits for the year ended December 31, 2022 are as follows:

Barokah Sejahtera savings deposits
Pensiun IB Barokah saving deposits
Rencana IB Barokah savings deposits
Haji Amanah savings deposits
Mudh Other Bank savings deposits
Barokah savings deposits

c. Deposito Mudharabah  
1) Berdasarkan hubungan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bukan Bank		
Pihak berelasi	1.330	2.097
Pihak ketiga	1.244.128	1.236.007
	<u>1.245.458</u>	<u>1.238.104</u>
Bank		
Pihak ketiga	9.000	6.400
<b>Total</b>	<u><u>1.254.458</u></u>	<u><u>1.244.504</u></u>

2) Berdasarkan jangka waktu kontrak

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bukan Bank		
<1 bulan	1.057.791	1.148.667
1 - <3 bulan	75.331	35.191
3 - <6 bulan	18.479	6.387
6 - 12 bulan	93.857	47.859
	<u>1.245.458</u>	<u>1.238.104</u>
Bank		
<1 bulan	6.500	5.400
1 - <3 bulan	2.500	1.000
<b>Total</b>	<u><u>1.254.458</u></u>	<u><u>1.244.504</u></u>

c. Mudharabah Time Deposits  
1) By relationship

Non-Bank
Related parties
Third parties
Bank
Third parties
<b>Total</b>

2) By contractual period

Non-Bank
<1 month
1 - <3 months
3 - <6 months
6 - 12 months
Bank
<1 month
1 - <3 months
<b>Total</b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)**

- c. Deposito Mudharabah (lanjutan)  
3) Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Bukan Bank	
<1 bulan	
1 - <3 bulan	
3 - <6 bulan	
6 - 12 bulan	
Bank	
<1 bulan	
1 - <3 bulan	
<b>Total</b>	

**25. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)**

- c. Mudharabah Time Deposits (continued)  
3) By remaining period to maturity

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
			<i>Non-Bank</i>
			<i>&lt;1 month</i>
			<i>1 - &lt;3 months</i>
			<i>3 - &lt;6 months</i>
			<i>6 - 12 months</i>
			<i>Bank</i>
			<i>&lt;1 month</i>
			<i>1 - &lt;3 months</i>
			<b>Total</b>

- 4) Nisbah dan tingkat bagi hasil  
Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- 4) *Ratio and profit sharing rate*  
*The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the year ended December 31, 2022 are as follows:*

	<u>2022</u>		
	<u>Nisbah/Ratio</u>	<u>Tingkat bagi hasil/Profit</u>	
1 bulan	36,00%	3,42%	<i>1 month</i>
3 bulan	38,00%	3,61%	<i>3 months</i>
6 bulan	41,00%	3,89%	<i>6 months</i>
12 bulan	42,50%	4,03%	<i>12 months</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MODAL SAHAM**

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

Modal dasar Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Number of shares	Rupiah/ Rupiah	
Saham Seri A	24.000.000.000	6.000.000	Series A Shares
Saham Seri B	12.000.000.000	3.000.000	Series B Shares
<b>Jumlah</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>Total</b>

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.

**26. SHARE CAPITAL**

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2022 and 2021 were as follows:

a. Authorized capital

The Bank's authorized capital as of December 31, 2022 and 2021 were as follows:

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No. 56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend the Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MODAL SAHAM (lanjutan)**

a. Modal dasar

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.
- Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut (Rupiah penuh):

Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp250 per saham	6.694.148.000
Konversi cadangan umum	5.239.999.982
<b>Jumlah saham pada akhir tahun</b>	<b><u>11.934.147.982</u></b>

c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah 3.081.350.100 lembar saham (Rupiah penuh).

**26. SHARE CAPITAL (continued)**

a. Authorized capital

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- Based on minutes of Extraordinary Meeting Shareholders' No. 19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No. 19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares held by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to esach shareholders.

- On July 12, 2012 Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No.29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.

b. Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of December 31, 2022 and 2021, are as follows (full Rupiah):

Stock split from Rp1,000,000 per share to be Rp250 per saham	6.694.148.000
General reserve conversion	5.239.999.982
<b>Shares at year end</b>	<b><u>11.934.147.982</u></b>

c. Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of December 31, 2022 and 2021 are 3,081,350,100 shares (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MODAL SAHAM (lanjutan)**

## d. Susunan pemegang saham

**26. SHARE CAPITAL (continued)**

## d. Composition of shareholders

Pemegang saham	2022			Shareholders
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	
<b>Seri A</b>				<b>Series A</b>
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	<b>11.934.147.982</b>	<b>79,48%</b>	<b>2.983.537</b>	
<b>Seri B</b>				<b>Series B</b>
Komisaris:				Commissioner:
- Heru Tjahjono	274.200	0,00%	69	Heru Tjahjono -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	1.946.500	0,01%	487	Busrul Iman -
- Tonny Prasetyo	628.500	0,00%	157	Tonny Prasetyo -
- R Arief Wicaksono	126.300	0,00%	32	R Arief Wicaksono -
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.078.374.600	20,50%	769.594	Public (ownership less than 5% each)
	<b>3.081.350.100</b>	<b>20,52%</b>	<b>770.338</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>15.015.498.082</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.753.875</b>	<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MODAL SAHAM (lanjutan)**

**26. SHARE CAPITAL (continued)**

d. Susunan pemegang saham (lanjutan)

d. Composition of shareholders (continued)

Pemegang saham	2021			Shareholders
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	
<b>Seri A</b>				<b>Series A</b>
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	<b>11.934.147.982</b>	<b>79,48%</b>	<b>2.983.537</b>	
<b>Seri B</b>				<b>Series B</b>
Komisaris:				Commissioner:
- Heru Tjahjono	141.400	0,00%	35	Heru Tjahjono -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	1.556.400	0,01%	389	Busrul Iman -
- Tonny Prasetyo	346.000	0,00%	87	Tonny Prasetyo -
- Erdianto Sigit Cahyono	305.600	0,00%	76	Erdianto Sigit Cahyono -
- Ferdian Timur Satyagraha	2.581.833	0,02%	645	Ferdian Timur Satyagraha -
- Rizyana Mirda	3.699.333	0,02%	925	Rizyana Mirda -
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.072.719.534	20,46%	768.180	Public (ownership less than 5% each)
	<b>3.081.350.100</b>	<b>20,52%</b>	<b>770.338</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>15.015.498.082</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.753.875</b>	<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. MODAL SAHAM (lanjutan)**

e. Pembagian saldo laba

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam akta No. 51 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. dan akta No. 01 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	<u>Laba tahun/ Net income year 2021</u>	<u>Laba tahun/ Net income year 2020</u>	
Dividen tunai	782.457	733.508	Cash dividends
Cadangan umum	740.613	755.454	General reserve

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial deeds No.51 dated March 17, 2022 of Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. And No.01 dated May 03, 2021 of Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. the shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2021 and 2020 as follows:

Bank established the general reserve to strengthen capital.

**27. TAMBAHAN MODAL DISETOR – NETO**

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	509.369	Share premium from Initial Public Offering (IPO)
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)</i>	23.365	23.365	Stock option for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program
<b>Jumlah</b>	<b><u>532.734</u></b>	<b><u>532.734</u></b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537.037	Share premium Rp180 (full Rupiah) per share
Biaya emisi saham	(27.668)	Share issuance cost
<b>Agio saham dari IPO</b>	<b><u>509.369</u></b>	<b>Share premium from IPO</b>

**26. SHARE CAPITAL (continued)**

e. Distribution of retained earnings

**27. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET**

Details of other paid in capital as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

On July 12, 2012, the Bank has made it first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27. TAMBAHAN MODAL DISETOR – NETO (lanjutan)**

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 97.813.100 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Program MESOP Tahap I Rp200 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 31.774.500 lembar	6.355
Agio saham Program MESOP Tahap II Rp159 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 31.774.500 lembar	5.052
Agio saham Program MESOP Tahap III Rp349 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 34.264.100 lembar	11.958
<b>Agio saham dari Program MESOP</b>	<b><u>23.365</u></b>

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp12.995.770.500 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Pebruari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 34.264.100 lembar saham atau 80,88% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp20.524.195.900 (Rupiah penuh).

**27. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET (continued)**

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 97,813,100 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

Share Agio MESOP Program Phase I Rp200 (Rupiah) per share executed 31,774,500 shares.
Share Agio MESOP Program Phase II Rp159 (Rupiah) per share executed 31,774,500 shares
Share Agio MESOP Program Phase III Rp349 (Rupiah) per share executed 34,264,100 shares
<b>Share Agio MESOP Program</b>

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14,298,525,000 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp 409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp 12,995,770,500 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 34.264.100 shares or 80,88% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp20,524,195,900 (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. PENERUSAN KREDIT**

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

a. Bank Indonesia

Pada tanggal 26 November 1998, 21 November 1999 dan 11 Agustus 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia, masing-masing dalam bentuk "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) dan "Kredit Usaha Tani" (KUT).

b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian No.518/6533/021/2016 dan No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 18 April 2016, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pinjaman.

c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Bank sebagai penyalur dana bergulir yang bersumber dari dana APBN mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil, melalui:

- Penguatan modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sektor agribisnis untuk mensukseskan program Pemerintah yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha agribisnis anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan perjanjian tanggal 19 Januari 2004 dengan jangka waktu 25 tahun.

**28. CHANNELING LOANS**

*The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.*

a. Bank Indonesia

*On November 26, 1998, November 21, 1999 and August 11, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with Bank Indonesia to distribute liquidity credits on behalf of Bank Indonesia in the form of "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) and "Kredit Usaha Tani" (KUT).*

b. Government of East Java Province

*Based on an amendment agreement No.518/6533/021/2016 and No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL, dated April 18, 2016, the Bank entered into a 5 (five) years cooperation agreement with the Government of East Java Province to distribute revolving funds for additional working capital for Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives in order to assist the Government of East Java Province's program involving the improvement of Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives and currently in processing for loan period extension.*

c. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises

*Bank as a channeling of revolving funds sourced from APBN funds with Cooperation Agreement with Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises for Small and Micro Entrepreneur Development Program, through:*

- *Strengthening the capital of cooperatives in the agribusiness sector in order to successfully implement the improvement programs for the members of cooperatives and society based on agreement dated January 19, 2004 for a period of 25 years.*



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (lanjutan)
- Program Penyediaan Modal dan Padanan (MAP) Awal bagi usaha kecil, menengah dan koperasi melalui KSP/USP koperasi dengan tujuan mengembangkan usaha UKM pada sentra yang belum tersedia pembiayaan secara memadai berdasarkan perjanjian tanggal 8 November 2003 dan perjanjian ini berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Pada tanggal 4 Agustus 1993, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk meneruskan pinjaman Pemerintah dari *Islamic Development Bank* (IDB) dalam rangka membiayai proyek Rumah Sakit Islam Surabaya.
- e. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
- Pada tanggal 19 Juli 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan para pihak, yaitu:
- 1) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Pertanian dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha agribisnis dengan Kredit Taskin Agribisnis.
  - 2) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan Kredit Taskin UKMK.
  - 3) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat dengan kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

**28. CHANNELING LOANS (continued)**

- c. *Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises (continued)*
- *Initial capital and matching fund program for small and medium enterprise and cooperative through KSP/USP cooperative with the goal of developing UKM in the area that have not been adequately provided financing under the agreement dated November 8, 2003 and its expiration based on agreement of both parties.*
- d. *Finance Ministry of the Republic of Indonesia*
- On August 4, 1993, the Bank entered into a cooperation agreement with the Finance Department of the Republic of Indonesia. Under this agreement, the Bank will distribute Government loans from the Islamic Development Bank (IDB) to finance the development of the Surabaya Islamic Hospital.*
- e. *Dana Sejahtera Mandiri Foundation*
- On July 19, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with the following parties:*
- 1) *The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Agriculture Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through agribusiness development involving loans in the form of Kredit Taskin Agribisnis.*
  - 2) *The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division and the Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi-UKMK) involving loans in the form of Kredit Taskin UKMK.*
  - 3) *The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Industrial and Trading Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through small scale industry and home industry development involving loans in the form of Kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

- f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 tahun dengan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran kredit dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi. Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 6 Desember 2013, perjanjian jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2016. Pada tanggal 10 Agustus 2016, telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan perjanjian No.518/15709/108.5/2016 dan No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

Pada tanggal 18 Oktober 2019 telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan perjanjian No.518/19535/115.5/2019 dan 058/245/PKS/DIR/KMRP.

- g. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 1999, Bank mengadakan kerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagai penyalur Kredit Usaha Hutan Rakyat yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Hutan Rakyat.

- h. Yayasan Abadi Karya Bhakti

Pada tanggal 9 Januari 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Abadi Karya Bhakti dan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin serta Departemen Pertanian untuk menyelenggarakan Kredit Taskin Agribisnis. Jangka waktu kerjasama terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang disalurkan dilunasi.

**28. CHANNELING LOANS (continued)**

- f. Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province

*Bank entered into a cooperation agreement for a period of 5 years with the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province to distribute revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - APBD) of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province's programs for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by cooperatives (Koperasi). Based on the amendment agreement on December 6, 2013, the agreement was matured on December 16, 2016. On August 10, 2016, the agreement has been extended for a period of 3 (three) years based on agreement No.518/15709/108.5/2016 and No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.*

*On October 18, 2019, the agreement has been extended for a period of 5 (five) years based on agreement No.518/19535/115.5/2019 and 058/245/PKS/DIR/KMRP.*

- g. Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia

*On July 23, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia for distribution of loans for the purpose of the People's Forestry Business Development activities.*

- h. Abadi Karya Bhakti Foundation

*On January 9, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Abadi Karya Bhakti Foundation and the Coordinating State Minister of People's Welfare and Poverty Eradication Division and the Agriculture Department to manage loans involving Kredit Taskin Agribisnis for the period from the signing of the agreement until repayment of all loans.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

i. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perjanjian No. 900/8176/122.5/2020 dan No.059/161/SP/DIR/KMRP tanggal 21 September 2020, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran pinjaman dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi Unit Desa (KUD) untuk Koperasi Persusuan dalam rangka pengadaan peralatan peternakan guna perbaikan kualitas susu sapi perah rakyat. Dalam perjanjian tersebut, Bank sebagai penyalur dana bergulir modal pengadaan peralatan peternakan untuk perbaikan kualitas susu bagi KUD untuk Koperasi Persusuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sub sektor peternakan.

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Bank Indonesia	402.524	402.599
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	129.443	89.591
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	55.301	55.529
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.942	15.942
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.326	15.326
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	13.031	13.976
Departemen Keuangan Republik Indonesia	8.606	61.041
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6.038	6.038
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	2.108	2.126
<b>Jumlah</b>	<b>648.319</b>	<b>662.168</b>

**28. CHANNELING LOANS (continued)**

i. Livestock Division of East Java Province (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur)

Based on an agreement No.900/8176/122.5/2020 and No.059/161/SP/DIR/KMRP dated September 21, 2020, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 (three) years with the Livestock Division of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province in its program for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds by Village Union - KUD for Milk Union in connection with the procurement of equipment to improve the quality of milk produced by farmers. In accordance with this agreement, the Bank acts as agent for revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget of the East Java Province Livestock Sector Division.

The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Bank Indonesia	402.524	402.599
Government of East Java Province	129.443	89.591
The Ministry of Cooperatives	55.301	55.529
Small and Medium Scale Enterprises	15.942	15.942
Dana Sejahtera Mandiri Foundation	15.326	15.326
Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia	15.326	15.326
Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises	13.031	13.976
Department of Finance of the Republic of Indonesia	8.606	61.041
Abadi Karya Bhakti Foundation	6.038	6.038
Livestock Division of East Java Province	2.108	2.126
<b>Total</b>	<b>648.319</b>	<b>662.168</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	526.533	476.206
Pertanian, perburuan dan kehutanan	44.020	48.491
Perdagangan besar dan eceran	36.861	40.285
Penyediaan akomodasi makan dan minum	9.198	9.361
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8.701	61.041
Industri pengolahan	6.679	8.551
Perikanan	6.367	7.050
Kegiatan yang belum jelas batasannya	5.941	6.158
Perantara keuangan	3.308	4.159
Jasa perorangan melayani rumah tangga	415	528
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	210	252
<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa	51	51
Konstruksi	27	27
Pertambangan dan penggalian	8	8
<b>Jumlah</b>	<b>648.319</b>	<b>662.168</b>

**28. CHANNELING LOANS (continued)**

The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

<i>Social culture and community services</i>
<i>Agriculture, hunting and forestry</i>
<i>Wholesale and retail</i>
<i>Provision of food and drink accommodation</i>
<i>Health service and social activities</i>
<i>Processing industry</i>
<i>Fishery</i>
<i>Undefined activities</i>
<i>Financial intermediary</i>
<i>Individual service which serve households</i>
<i>Transportation, trading and communication</i>
<i>Real estate, rental and business services</i>
<i>Construction</i>
<i>Mining and quarrying</i>
<b>Total</b>

**29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
<b>KOMITMEN</b>		
<b>Tagihan komitmen</b>		
Rupiah:		
Pembelian spot & derivatif	156.070	-
Lainnya	1.974.389	908.956
	<b>2.130.459</b>	<b>908.956</b>
Mata uang asing:		
Pembelian spot & derivatif	-	-
	-	-
<b>Liabilitas komitmen</b>		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.399.512	3.181.980
Total liabilitas komitmen, neto	<b>1.269.053</b>	<b>2.273.024</b>
<b>KONTINJENSI</b>		
<b>Tagihan kontinjensi</b>		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	119.108	195.337
Lainnya	13	13
	<b>119.121</b>	<b>195.350</b>
<b>Liabilitas kontinjensi</b>		
Rupiah:		
Bank garansi yang diberikan	973.063	1.118.753
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diberikan	46.703	42.758
	<b>1.019.766</b>	<b>1.161.511</b>
Total liabilitas kontinjensi, neto	<b>900.645</b>	<b>966.161</b>
<b>Total liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto</b>	<b>2.169.698</b>	<b>3.239.185</b>

**29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

The Bank has receivables and liabilities involving commitments and contingencies as follows:

<b>COMMITMENTS</b>
<b>Commitment receivables</b>
Rupiah:
Purchase of spot and derivatif
Others
Foreign currencies:
Purchase of spot and derivatif
<b>Commitment liability</b>
Rupiah:
Unused loan commitments granted to debtors
Total commitment liabilities, net
<b>CONTINGENCIES</b>
<b>Contingent receivables</b>
Rupiah:
Interest income on past due accounts
Others
<b>Contingent liabilities</b>
Rupiah
Bank guarantees issued
Foreign currencies:
Bank guarantees issued
Total contingent liabilities, net
<b>Total commitment and contingent liabilities, net</b>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2022 and 2021, the Bank has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak berelasi (Catatan 40)</b>		
Kredit yang diberikan	7.926	11.501
Margin dan pendapatan bagi hasil	126	439
<b>Pihak ketiga</b>		
Kredit yang diberikan	4.261.412	4.429.281
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	932.818	783.576
Surat berharga		
Biaya perolehan diamortisasi	1.392.992	1.189.657
Margin dan pendapatan bagi hasil	135.829	126.018
Provisi	110.971	76.906
Sertifikat Bank Indonesia	17.442	19.077
Lainnya	23.135	18.713
<b>Jumlah</b>	<b><u>6.882.651</u></b>	<b><u>6.655.168</u></b>

<b>Related parties (Note 40)</b>
Loans
Margin and profit-sharing revenue
<b>Third parties</b>
Loans
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Amortised cost
Margin and profit-sharing revenue
Provision
Certificates of Bank Indonesia
Others
<b>Total</b>

**31. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Deposito berjangka	1.431.257	1.501.177
Tabungan	264.782	260.600
Giro	221.779	194.966
Repo	30.291	-
Pinjaman yang diterima	10.357	16.129
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	5.580	3.952
Beban bunga kredit	1.549	181
Premium surat berharga	-	482
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.965.595</u></b>	<b><u>1.977.487</u></b>

**31. INTEREST AND SHARIA EXPENSE**

Time deposits
Savings accounts
Current accounts
Repo
Borrowings
Mudharabah profit-sharing expense
Loan interest expense
Premium on marketable securities
<b>Total</b>

Beban bunga kepada pihak berelasi diungkapkan pada (Catatan 40).

Interest expense involving related parties is disclosed in (Note 40).

**32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	-	361.666
Administrasi giro, tabungan dan deposito	184.480	172.779
Penerimaan kembali kredit hapus buku	56.653	55.003
Administrasi kredit	42.511	34.055
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	11.105	5.225
Lainnya	238.820	177.629
<b>Jumlah</b>	<b><u>533.569</u></b>	<b><u>806.357</u></b>

Reversal for impairment losses on financial assets
Current accounts, savings and deposits administration fees
Collection of loans written-off
Loan administration fees
Fees and commissions from other than loans
Others
<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI  
ATAS ASET KEUANGAN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kredit yang diberikan		
Modal kerja	267.675	261.450
Konsumsi	52.364	149.514
Investasi	67.715	22.153
	<u>387.754</u>	<u>433.117</u>
Aset keuangan lainnya		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.391	185
Giro pada bank lain	203	968
Surat berharga	(5.544)	(2.174)
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2.903	(16)
Aset lain-lain	17.952	25.460
<b>Jumlah</b>	<u><b>404.659</b></u>	<u><b>457.540</b></u>

**33. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON  
FINANCIAL ASSETS**

<i>Loans</i>
<i>Working capital</i>
<i>Consumption</i>
<i>Investment</i>
<i>Other financial assets</i>
<i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
<i>Current accounts with other banks</i>
<i>Marketable securities</i>
<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>
<i>Other assets</i>
<b>Total</b>

**34. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN  
KARYAWAN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gaji pegawai	496.631	476.380
Bonus pegawai	385.706	380.767
Tambahan penghasilan pegawai	220.933	250.455
Asuransi dan iuran dana pensiun	143.663	216.652
Sewa tenaga kerja	139.896	121.035
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	85.344	68.180
Imbalan kerja	55.532	41.916
Pengobatan	26.241	27.412
Pendidikan dan latihan	76.883	24.826
Gaji Direksi	8.894	8.407
Honorarium Dewan Komisaris	6.098	7.186
Tambahan penghasilan Direksi	4.171	3.918
Rekreasi dan olahraga	5.808	2.974
Tambahan penghasilan Komisaris	2.217	1.726
Perumahan Direksi	1.976	1.656
Lainnya	14.705	11.407
<b>Jumlah</b>	<u><b>1.674.698</b></u>	<u><b>1.644.897</b></u>

**34. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS  
EXPENSES**

<i>Employee salaries</i>
<i>Employee bonuses</i>
<i>Additional income for employees</i>
<i>Insurance and pension fund contributions</i>
<i>Outsourcing</i>
<i>Tax allowances - employees' salaries</i>
<i>Employee benefit</i>
<i>Medical</i>
<i>Education and training</i>
<i>Directors' salaries</i>
<i>Commissioners' honoraria</i>
<i>Additional compensation for Directors</i>
<i>Recreation and sport</i>
<i>Additional compensation for Commissioners</i>
<i>Housing for Directors</i>
<i>Others</i>
<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Amortisasi beban ditangguhkan	239.247	209.653
Premi asuransi pertanggungan lainnya	220.083	201.506
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	164.880	113.934
Jasa otomasi	142.764	97.937
Sewa	77.950	128.757
Perjalanan dinas	62.796	40.424
Pemeliharaan	56.922	63.022
Promosi	49.292	23.227
Alat tulis dan barang cetak	48.889	42.333
Listrik, air dan telekomunikasi	35.337	36.274
Sumbangan	31.568	19.684
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	20.273	23.771
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	20.135	18.092
Pajak lainnya	18.126	14.584
Keamanan	9.610	9.466
Surat dinas	3.599	3.459
Pajak reklame	1.531	1.208
Penagihan	1.329	1.143
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.169	1.192
Pajak kendaraan bermotor	656	526
Koran dan majalah	430	550
Bursa Efek	275	275
Pajak penghasilan	112	924
Lainnya	22.415	26.879
<b>Jumlah</b>	<b>1.229.388</b>	<b>1.078.820</b>

**35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

<i>Amortization of deferred charges</i>
<i>Other insurance premiums</i>
<i>Depreciation of fixed assets (Note 15)</i>
<i>Automation services</i>
<i>Rental</i>
<i>Official/business travel</i>
<i>Maintenance</i>
<i>Promotion</i>
<i>Stationery and printed materials</i>
<i>Electrical, water and telecommunications</i>
<i>Donations</i>
<i>Supervision, audit and professional services</i>
<i>Social and environment responsibility</i>
<i>Other taxes</i>
<i>Security</i>
<i>Mail service</i>
<i>Advertising tax</i>
<i>Collection</i>
<i>Land and building tax fees (PBB)</i>
<i>Motor vehicle tax</i>
<i>Newspaper and magazine</i>
<i>Stock Exchange</i>
<i>Income tax</i>
<i>Others</i>
<b>Total</b>

**36. BEBAN LAINNYA**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Tanda mata, hadiah dan umum	86.316	78.369
Kliring dan <i>transfer</i>	59.476	47.224
Rapat dan jamuan tamu	15.423	9.862
Penelitian dan pengembangan	9.833	7.115
Kegiatan keagamaan	3.009	1.849
Provisi, komisi dan <i>fee</i>	10	25
Lainnya	26.987	5.576
<b>Jumlah</b>	<b>201.054</b>	<b>150.020</b>

**36. OTHER EXPENSES**

<i>Souvenirs, gifts and general</i>
<i>Clearing and transfers</i>
<i>Meetings and entertainment</i>
<i>Research and development</i>
<i>Religious activities</i>
<i>Provision, commission and fee</i>
<i>Others</i>
<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**37. PENDAPATAN NON OPERASIONAL**

	<u>2022</u>
Fee jasa pelayanan pajak	6.084
Keuntungan atas penjualan aset tetap	5.274
Keuntungan penjualan efek-efek neto	6.084
Keuntungan selisih kurs	-
Lainnya	158.513
	<u>175.955</u>

**38. BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo beban non operasional lainnya masing-masing sebesar Rp83.405 dan Rp269.509.

**39. LABA PER SAHAM DASAR**

	<u>2022</u>
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.542.824
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15.015.498.082
<b>Laba per saham dasar</b> (dalam Rupiah penuh)	<u>102,75</u>

**37. NON OPERATING INCOME**

	<u>2021</u>	
	4.684	<i>Tax service fees</i>
	3.952	<i>Gain on sale of fixed asset - net</i>
	4.684	<i>Gain on sale of securities - net</i>
	3.497	<i>Gain on foreign exchange</i>
	404.119	<i>Others</i>
	<u>420.936</u>	

**38. NON OPERATING EXPENSE**

As of December 31, 2022 and 2021, the balance of non operating expense amounted Rp83,405 and Rp269,509, respectively

**39. BASIC EARNINGS PER SHARE**

	<u>2021</u>	
	1.523.070	<i>Income for computation of basic earnings per share</i>
	15.015.498.082	<i>Weighted average number of shares</i>
	<u>101,43</u>	<b>Basic earnings per share</b> (in full Rupiah)



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

<b>Pihak berelasi</b>	<b>Sifat dari hubungan/ Nature of relationship</b>	<b>Sifat dari transaksi/ Nature of transactions</b>	<b>Related parties</b>
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of East Java Province
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Surabaya City
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang Regency
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Jember Regency
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan City
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Banyuwangi Regency
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo Regency
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bondowoso Regency
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sidoarjo Regency
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Tuban Regency
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Situbondo Regency
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri Regency
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Lumajang Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Nganjuk Regency
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto Regency
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sampang Regency
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang City
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan Regency
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bangkalan Regency
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Gresik Regency
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto City
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pacitan Regency
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Batu City
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ngawi Regency
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Jombang Regency
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun Regency
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pamekasan Regency
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Tulungagung Regency
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar Regency
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ponorogo Regency
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Trenggalek Regency
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Magetan Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo City
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar City
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun City
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri City
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sumenep Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Malang Regency
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans Penempatan dana/Fund placement	PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/Key management personnel Pengurus/Management	Simpanan nasabah/Deposits from customers Beban tenaga kerja/ Personnel expenses	Board of Commissioners. Board of Directors and executive officers

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ASET</b>		
<b>Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 12)</b>		
Pinjaman manajemen kunci	104.192	112.529
PT BPR Jawa Timur	24.851	29.851
RSUD Dr. Soedono Madiun	-	34.840
Lain-lain	5.828	5.669
<b>Jumlah</b>	<b>134.871</b>	<b>182.889</b>
Persentase terhadap jumlah aset	0,13%	0,18%
<b>LIABILITAS</b>		
Simpanan dari nasabah (Catatan 18)	<b>15.295.405</b>	<b>17.722.756</b>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	17,05%	19,73%
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)		
PT BPR Jawa Timur	141.996	360.169
<b>Jumlah</b>	<b>141.996</b>	<b>360.169</b>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,16%	0,40%
<b>LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Pendapatan bunga (Catatan 30)	<b>8.052</b>	<b>11.940</b>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,12%	0,18%
Beban bunga dan syariah	<b>471.882</b>	<b>143.778</b>
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	24,01%	7,27%

**Komitmen dan kontinjensi**

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ASSETS</b>		
<b>Loans and sharia financing (Note 12)</b>		
Loans to key managements	104.192	112.529
PT BPR Jawa Timur	24.851	29.851
RSUD Dr. Soedono Madiun	-	34.840
Others	5.828	5.669
<b>Total</b>	<b>134.871</b>	<b>182.889</b>
Percentage to total assets	0,13%	0,18%
<b>LIABILITIES</b>		
Deposits from customers (Note 18)	<b>15.295.405</b>	<b>17.722.756</b>
Percentage to total liabilities	17,05%	19,73%
Deposits from other banks (Note 19)		
PT BPR Jawa Timur	141.996	360.169
<b>Total</b>	<b>141.996</b>	<b>360.169</b>
Percentage to total liabilities	0,16%	0,40%
<b>PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>		
Interest income (Note 30)	<b>8.052</b>	<b>11.940</b>
Percentage to total interest and sharia income	0,12%	0,18%
Interest and sharia expenses	<b>471.882</b>	<b>143.778</b>
Percentage to total interest and sharia expenses	24,01%	7,27%

**Commitments and contingencies**

There were no commitments and contingencies involving related parties as of December 31, 2022 and 2021.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**Kompensasi manajemen kunci**

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (di luar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gaji	22.995	20.820
Jasa produksi	12.053	11.492
Tunjangan	10.520	10.401
<b>Jumlah</b>	<b><u>45.569</u></b>	<b><u>42.713</u></b>

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp12.990 dan Rp20.458 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp39.310 dan Rp35.164.

**41. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

	<u>2022</u>			
	<u>Konvensional/ Conventional</u>	<u>Syariah/ Sharia</u>	<u>Eliminasi/ Elimination</u>	<u>Jumlah/ Total</u>
Pendapatan segmen	8.253.562	175.839	1.654.764	6.774.637
Beban segmen	(3.567.963)	(55.082)	(1.654.764)	(1.968.281)
Pendapatan segmen - neto	<u>4.685.598</u>	<u>120.757</u>	<u>-</u>	<u>4.806.356</u>
Pendapatan operasional lainnya	1.356.857	21.038	-	1.377.895
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(1.085.401)	(22.795)	-	(1.108.196)
Beban operasional lainnya	(3.050.773)	(80.210)	-	(3.130.983)
Laba operasional	1.906.281	38.790	-	1.945.072
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	83.097	1.880	-	84.977
Beban pajak - neto	(487.225)	-	-	(487.225)
<b>Laba (rugi) periode berjalan</b>	<b><u>1.502.153</u></b>	<b><u>40.670</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1.542.824</u></b>
<b>Jumlah aset</b>	<b><u>100.470.606</u></b>	<b><u>3.071.458</u></b>	<b><u>(510.697)</u></b>	<b><u>103.031.367</u></b>

**40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

**Compensation of key management personnel**

The compensation of key management personnel of the Bank (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Gaji	22.995	20.820	Salary
Jasa produksi	12.053	11.492	Production bonus
Tunjangan	10.520	10.401	Allowance
<b>Jumlah</b>	<b><u>45.569</u></b>	<b><u>42.713</u></b>	<b>Total</b>

Total remuneration paid and payable for the years ended December 31, 2022 and 2021 to the Board of Commissioners were Rp12,990 and Rp20,458, respectively, and to the Board of Directors were Rp39,310 and Rp35,164 respectively.

**41. SEGMENT INFORMATION**

Information concerning the operating segment information of the Bank is set out in the table below:

	<u>2022</u>			
	<u>Konvensional/ Conventional</u>	<u>Syariah/ Sharia</u>	<u>Eliminasi/ Elimination</u>	<u>Jumlah/ Total</u>
Pendapatan segmen	8.253.562	175.839	1.654.764	6.774.637
Beban segmen	(3.567.963)	(55.082)	(1.654.764)	(1.968.281)
Pendapatan segmen - neto	<u>4.685.598</u>	<u>120.757</u>	<u>-</u>	<u>4.806.356</u>
Pendapatan operasional lainnya	1.356.857	21.038	-	1.377.895
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(1.085.401)	(22.795)	-	(1.108.196)
Beban operasional lainnya	(3.050.773)	(80.210)	-	(3.130.983)
Laba operasional	1.906.281	38.790	-	1.945.072
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	83.097	1.880	-	84.977
Beban pajak - neto	(487.225)	-	-	(487.225)
<b>Laba (rugi) periode berjalan</b>	<b><u>1.502.153</u></b>	<b><u>40.670</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1.542.824</u></b>
<b>Jumlah aset</b>	<b><u>100.470.606</u></b>	<b><u>3.071.458</u></b>	<b><u>(510.697)</u></b>	<b><u>103.031.367</u></b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini (lanjutan):

	2021				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan segmen	8.101.453	171.729	1.618.014	6.655.168	Segment income
Beban segmen	(3.606.519)	(62.704)	(1.691.736)	(1.977.487)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	4.494.934	109.025	(73.722)	4.677.681	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	864.901	19.993	78.537	806.357	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(746.094)	(47.646)	25.461	(819.201)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Beban operasional lainnya	(2.831.764)	(67.433)	(25.460)	(2.873.737)	Other operating expenses
Laba operasional	1.781.977	13.939	4.816	1.791.100	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	141.646	410	(4.818)	146.874	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak - neto	(414.904)	-	-	(414.904)	Tax expense - net
<b>Laba (rugi) periode berjalan</b>	<b>1.508.719</b>	<b>14.349</b>	<b>(2)</b>	<b>1.523.070</b>	<b>Profit (loss) for the period</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>97.403.604</b>	<b>3.836.795</b>	<b>(517.069)</b>	<b>100.723.330</b>	<b>Total assets</b>

**42. MANAJEMEN RISIKO**

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Bank selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

**41. SEGMENT INFORMATION (continued)**

Information concerning the operating segment information of the Bank is set out in the table below (continued):

**42. RISK MANAGEMENT**

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management.

Implementation of Bank risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

The Bank continuously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT**

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

**Kerangka manajemen risiko**

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

**43. CREDIT RISK**

*In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.*

*In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.*

**Risk management framework**

*The Bank's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Bank. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank.*

*The Bank's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.*

*The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.*

*The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Bank. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

**a. Risiko kredit maksimum**

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

**43. CREDIT RISK (continued)**

*Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Bank. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Bank separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Bank has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.*

*Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Bank continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.*

*Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.*

*The Bank identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.*

**a. Maximum credit risk**

*For financial assets recognized in the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank has to pay if the obligations under the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.*

*The Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**b. Risiko konsentrasi kredit**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian master netting adalah sebagai berikut:

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

**43. CREDIT RISK (continued)**

**b. Credit concentration risk**

As of December 31, 2022 and 2021, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

Concentration of credit risk by geography

	2022					Jumlah/ Total	
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others		
<b>Posisi keuangan</b>							<b>Financial position</b>
Giro pada Bank Indonesia	-	10.786.740	-	-	-	10.786.740	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	302.688	-	-	-	302.688	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.000	2.702.379	538.000	449.000	2.071.796	6.913.175	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan spot dan derivatif	361	-	-	-	-	361	Spot and derivative receivables
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	14.740.662	-	-	-	14.740.662	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	8.476.609	-	-	-	8.476.609	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	4.095.066	-	-	-	4.095.066	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	7.822.847	-	-	-	7.822.847	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	-	286.147	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	8.483.137	1.014.245	677.316	-	-	10.174.698	Working capital
Investasi	3.359.791	2.161.406	370.368	479.607	-	6.371.172	Investment
Konsumsi	28.151.362	143.306	37.289	70	148	28.332.175	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	629.389	13.694	2.288	752	2	646.125	Interest receivables
<b>Jumlah</b>	<b>42.062.187</b>	<b>52.259.642</b>	<b>1.625.261</b>	<b>929.429</b>	<b>2.071.946</b>	<b>98.948.465</b>	<b>Total</b>
<b>Rekening administratif</b>							<b>Administrative accounts</b>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.412.262	971.071	610	15.569	-	3.399.512	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	1.019.766	-	-	-	-	1.019.766	Bank guarantees issued
<b>Jumlah</b>	<b>3.432.028</b>	<b>971.071</b>	<b>610</b>	<b>15.569</b>	<b>-</b>	<b>4.419.278</b>	<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis  
(lanjutan)

**43. CREDIT RISK (continued)**

**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by geography  
(continued)

	2021					Jumlah/ Total	
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others		
<b><u>Posisi keuangan</u></b>							<b><u>Financial position</u></b>
Giro pada Bank Indonesia	-	8.805.300	-	-	-	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	211.443	-	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.001	5.705.135	538.000	449.000	2.071.796	9.915.932	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	-	20.828.263	-	-	-	20.828.263	Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	20.828.263	-	-	-	20.828.263	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	11.554.760	-	-	-	11.554.760	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3.420.685	-	-	-	3.420.685	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	-	230.019	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	7.404.378	987.389	71.261	996	12.400	8.476.424	Working capital
Investasi	2.715.972	2.267.500	110.798	473.626	-	5.567.896	Investment
Konsumsi	26.695.730	145.689	32.238	-	165	26.873.822	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	771.149	20.119	1.128	744	760	793.900	Interest receivables
<b>Jumlah</b>	<b>38.969.249</b>	<b>53.946.283</b>	<b>753.425</b>	<b>924.366</b>	<b>2.085.121</b>	<b>96.678.444</b>	<b>Total</b>
<b><u>Rekening administratif</u></b>							<b><u>Administrative accounts</u></b>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.370.071	784.709	2.784	24.416	-	3.181.980	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	1.161.510	-	-	-	-	1.161.510	Bank guarantees issued
<b>Jumlah</b>	<b>3.531.581</b>	<b>784.709</b>	<b>2.784</b>	<b>24.416</b>	<b>-</b>	<b>4.343.490</b>	<b>Total</b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

**43. CREDIT RISK (continued)**

**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by industry sector

	2022						
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Bank/Banks	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
<b>Posisi keuangan</b>							<b>Financial position</b>
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	-	10.786.740	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	302.688	-	-	302.688	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	-	6.913.175	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan spot dan derivatif	-	-	361	-	-	361	Spot and derivative receivables
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	12.425.335	-	327.018	1.988.309	-	14.740.662	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	7.822.847	-	-	7.822.847	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	-	286.147	286.147	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	177.813	327.211	315.826	2.937.209	6.416.639	10.174.698	Working capital
Investasi	5.662	1.436	-	4.828.916	1.535.158	6.371.172	Investment
Konsumsi	-	1.000	3.897	14.773	28.312.505	28.332.175	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	433	2.025	535	41.024	602.108	646.125	Interest receivables
<b>Jumlah</b>	<b>42.880.833</b>	<b>331.672</b>	<b>8.773.172</b>	<b>9.810.231</b>	<b>37.152.557</b>	<b>98.948.465</b>	<b>Total</b>
<b>Rekening administratif</b>							<b>Administrative accounts</b>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	132.932	-	3.266.580	3.399.512	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.019.766	1.019.766	Bank guarantees issued
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.932</b>	<b>-</b>	<b>4.286.346</b>	<b>4.419.278</b>	<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri (lanjutan)

	2021					Jumlah/ Total	
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Bank/Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals		
<b>Posisi keuangan</b>							<b>Financial position</b>
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	211.443	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.932	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	16.071.667	-	139.804	4.616.792	-	20.828.263	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	-	-	-	-	11.554.760	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	3.420.685	-	-	3.420.685	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	-	-	-	-	230.019	230.019	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	29.929	169.092	384.779	2.726.787	5.165.837	8.476.424	Working capital
Investasi	40.080	291	-	4.425.534	1.101.991	5.567.896	Investment
Konsumsi	-	-	-	10.593	26.863.229	26.873.822	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	732	1.155	721	128.463	662.829	793.900	Interest receivables
<b>Jumlah</b>	<b>46.418.400</b>	<b>170.538</b>	<b>4.157.432</b>	<b>11.908.169</b>	<b>34.023.905</b>	<b>96.678.444</b>	<b>Total</b>
<b>Rekening administratif</b>							<b>Administrative accounts</b>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	271.800	-	2.910.180	3.181.980	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.161.510	1.161.510	Bank guarantees issued
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271.800</b>	<b>-</b>	<b>4.071.690</b>	<b>4.343.490</b>	<b>Total</b>

**c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya**

Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Bank juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by industry sector (continued)

**c. Collateral and other credit enhancements**

The Bank has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Bank also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**d. Kualitas aset keuangan**

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

**e. Evaluasi penurunan nilai**

**Pengukuran risiko kredit**

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

**Pengukuran kerugian kredit ekspektasian**

PSAK 71 mengikhtisarkan model "tiga tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam "Tahap 1" dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Bank.
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3".
- Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**d. Quality of financial assets**

The Bank has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Bank Indonesia's rating guidance.

**e. Impairment assessment**

**Credit risk measurement**

The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss Given Default* (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under PSAK 71.

**Expected credit loss measurement**

PSAK 71 outlines a "three-stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in 'Stage 1' and has its credit risk continuously monitored by the Bank.
- If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to 'Stage 2' but is not yet deemed to be credit-impaired.
- If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".
- Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Pengukuran kerugian kredit ekspektasian  
(lanjutan)**

PSAK 71 mengikhtisarkan model “tiga tahap” untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini (lanjutan):

- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 71 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.
- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (Tahap 3).

**Peningkatan signifikan pada risiko kredit  
(SICR)**

Bank mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

**Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami  
penurunan nilai kredit**

Bank mendefinisikan instrumen keuangan sebagai gagal bayar, yang sepenuhnya sesuai dengan definisi kredit yang mengalami penurunan nilai, ketika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

Kriteria kuantitatif

Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif

Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2m.

Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Bank dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Bank.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Expected credit loss measurement  
(continued)**

PSAK 71 outlines a “three-stage” model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below (continued):

- A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 71 is that it should consider forward-looking information.
- Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).

**Significant increase in credit risk (SICR)**

The Bank consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

**Definition of default and credit-impaired  
assets**

The Bank defines a financial instrument as in default, which is fully aligned with the definition of credit-impaired, when it meets one or more of the following criteria:

Quantitative criteria

The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria

The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in (Note 2m).

The criteria have been applied to all financial instruments held by the Bank and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss given Default* (LGD) throughout the Bank’s expected loss calculations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit (lanjutan)**

Kriteria kualitatif (lanjutan)

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

**Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi**

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umurnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD, dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi default dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Definition of default and credit-impaired assets (continued)**

Qualitative criteria (continued)

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Bank evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Bank determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

**Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques**

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD, and LGD, defined as follows:

- The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)**

- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Bank pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (*lifetime EAD*). Misalnya, untuk komitmen *revolving*, Bank memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.
- (LGD) mewakili ekspektasi Bank tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

PD sepanjang umurnya dikembangkan dengan menerapkan profil jatuh tempo ke PD 12 bulan saat ini. Profil jatuh tempo melihat bagaimana gagal bayar muncul pada portofolio dari titik pengakuan awal sepanjang masa umur pinjaman. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama pada semua aset dalam portofolio dan peringkat kredit. Hal ini telah didukung oleh analisis historis.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)**

- EAD is based on the amounts the Bank expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (*lifetime EAD*). For example, for a revolving commitment, the Bank includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.
- (LGD) represents the Bank's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The Lifetime PD is developed by applying a maturity profile to the current 12 months PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a portfolio from the point of initial recognition throughout the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio and credit grade band. This is supported by historical analysis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)**

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.
- Untuk produk *revolving*, eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Bank.

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

Perkiraan informasi ekonomi masa depan (*forward-looking*) juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL seperti bagaimana profil PD dan lain-lain dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

**Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL**

Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Bank telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)**

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.
- For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Bank's recent default data.

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation- such as how the maturities profile of the PDs and others – are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

**Forward-looking information incorporated in the ECL models**

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Bank has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Informasi perkiraan masa depan yang  
tergabung dalam model ECL (lanjutan)**

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini (skenario ekonomi dasar) disediakan oleh Bank setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Bank juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Bank mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (Tahap 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (Tahap 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Forward-looking information incorporated in  
the ECL models (continued)**

*These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the base economic scenario) are provided by the Bank on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next 3 (three) years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.*

*In addition to the base economic scenario, the Bank's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.*

*The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Bank measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.*



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Asumsi variabel ekonomi**

Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual memungkinkan berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Bank menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Bank yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang memungkinkan.

**Penyisihan kerugian**

Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara Tahap 1 dan Tahap 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya "peningkatan" (atau "penurunan") antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan input secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukkan selama periode berjalan.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Economic variable assumptions**

*As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Bank considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Bank's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.*

**Loss allowance**

*The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:*

- *Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent "step up" (or "step down") between 12-month and Lifetime ECL;*
- *Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments de-recognized in the period;*
- *Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;*
- *Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and*
- *Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Kebijakan penghapusbukuan**

Bank menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Bank adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Bank dapat menghapusbukuan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity*. Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp900.559 Bank masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

**Modifikasi aset keuangan**

Bank dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Write-off policy**

*The Bank writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Bank's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.*

*The Bank may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the year ended December 31, 2022 was Rp900,559 The Bank still seeks to recover amounts it is legally owed in full.*

**Modification of financial assets**

*The Bank sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.*

*Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Modifikasi aset keuangan (lanjutan)**

Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Bank memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Bank dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari Tahap 3 atau Tahap 2 (ECL sepanjang umurnya) ke Tahap 1 (ECL 12 bulan).

Bank terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

**Pemetaan risiko kredit – Treasury**

Untuk instrumen utang dalam portofolio Treasury, peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Metode pemeringkatan Bank terdiri dari 25 tingkat peringkat. Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Modification of financial assets (continued)**

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Bank monitors the subsequent performance of modified assets. The Bank may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL).

The Bank continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

**Credit risk grading – Treasury**

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

The Bank's rating method comprises 25 rating levels. The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Kredit multiguna	23.578.636	37.542	181.718	23.797.896	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2.400.068	104.398	293.573	2.798.039	Working capital loan
Restrukturisasi Covid	3.160.896	33.974	337.404	3.532.274	Covid Restructurisation
Perdagangan besar dan eceran	1.654.813	91.337	200.612	1.946.762	Wholesale and retail
Kredit pegawai	2.050.789	3.144	23.193	2.077.126	Employee loans
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	1.220.386	11.991	119.168	1.351.545	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit kepemilikan rumah	1.222.011	116.132	241.184	1.579.327	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	747.574	8.375	25.022	780.971	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	748.259	117.445	67.375	933.079	Agriculture, hunting and forestry
Industri pengolahan	1.614.145	20.003	51.057	1.685.205	Processing industry
Kredit usaha rakyat	2.393.551	29.099	12.857	2.435.507	People's business credit
Perantara keuangan	604.442	18.758	24.849	648.049	Financial intermediaries
Linkage program	216.994	-	-	216.994	Linkage program
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	129.987	4.617	8.080	142.684	Accommodation, food and beverages
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	147.980	914	328	149.222	Other business and households
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	18.096	635	10.566	29.297	Real estate, business rental and services
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	2.142	2.142	Cattle Breeding Business Loan
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	8.773	294	499	9.566	Individual service which serve households
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	317	317	Energy and Food Stability Loan
Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.989	-	-	2.989	Limit activities that are not yet clear
Lain-lain	174.194	-	-	174.194	Others
	<b>42.094.583</b>	<b>598.658</b>	<b>1.599.944</b>	<b>44.293.185</b>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(263.059)	(61.303)	(911.041)	(1.235.403)	Allowance for impairment losses
<b>Konvensional - Neto</b>	<b>41.831.524</b>	<b>537.355</b>	<b>688.903</b>	<b>43.057.782</b>	<b>Conventional - Net</b>
	<b>Mengalami penurunan nilai/ Impaired</b>				
	<b>Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired</b>	<b>Individu/ Individual</b>	<b>Kolektif/ Collective</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	
Syariah	1.802.438	101.034	-	1.903.472	Sharia
Cadangan kerugian penurunan nilai	(33.308)	(49.901)	-	(83.209)	Allowance for impairment losses
<b>Syariah - Neto</b>	<b>1.769.130</b>	<b>51.133</b>	<b>-</b>	<b>1.820.263</b>	<b>Sharia - Net</b>
<b>Jumlah, neto</b>	<b>43.600.654</b>	<b>588.488</b>	<b>688.903</b>	<b>44.878.045</b>	<b>Total, net</b>

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

Loans and sharia financing

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2022 and 2021:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

Loans and sharia financing (continued)

		2021				
		Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Kredit multiguna	22.065.382	44.080	189.543	22.299.005		Multiguna loan
Kredit modal kerja	2.335.341	100.375	628.283	3.063.999		Working capital loan
Restrukturisasi Covid	2.440.353	80.778	160.161	2.681.292		Covid Restructurisation
Perdagangan besar dan eceran	1.809.681	127.280	257.577	2.194.538		Wholesale and retail
Kredit pegawai	2.096.595	4.227	23.497	2.124.319		Employee loans
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	1.496.205	9.299	362.719	1.868.223		Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit kepemilikan rumah	1.316.894	106.379	286.119	1.709.392		Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.580.845	7.783	40.464	1.629.092		Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	897.087	29.202	69.892	996.181		Agriculture, hunting and forestry
Industri pengolahan	818.883	19.370	54.050	892.303		Processing industry
Kredit usaha rakyat	576.342	262	-	576.604		People's business credit
Perantara keuangan	417.828	11.948	20.970	450.746		Financial intermediaries
Linkage program	267.732	-	267	267.999		Linkage program
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	116.664	7.941	8.706	133.311		Accommodation, food and beverages
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	64.873	13	-	64.886		Other business and households
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	15.743	402	11.116	27.261		Real estate, business rental and services
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	4.036	4.036		Cattle Breeding Business Loan
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.398	382	93	2.873		Individual service which serve households
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	770	770		Energy and Food Stability Loan
Lain-lain	361	-	-	361		Others
	<b>38.319.207</b>	<b>549.721</b>	<b>2.118.263</b>	<b>40.987.191</b>		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.807)	(73.110)	(1.659.070)	(1.747.987)		Allowance for impairment losses
<b>Konvensional - Neto</b>	<b>38.303.400</b>	<b>476.611</b>	<b>459.193</b>	<b>39.239.204</b>		<b>Conventional - Net</b>
		<b>Mengalami penurunan nilai</b>				
		<b>Impaired</b>				
		Individu/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total		
Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	1.670.823	91.545	-	1.762.368		Sharia
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.476)	(47.954)	-	(83.430)		Allowance for impairment losses
<b>Syariah - Neto</b>	<b>1.635.347</b>	<b>43.591</b>	<b>-</b>	<b>1.678.938</b>		<b>Sharia - Net</b>
<b>Jumlah, neto</b>	<b>39.938.747</b>	<b>520.202</b>	<b>459.193</b>	<b>40.918.142</b>		<b>Total, net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)**

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan jenis kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

2022					
	Modal kerja/ <i>Working capital</i>	Investasi/ <i>Investment</i>	Konsumsi/ <i>Consumption</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Saldo awal tahun	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyisihan tahun berjalan	267.676	52.363	67.715	387.754	<i>Provision during the year</i>
Penghapusan tahun berjalan	(666.582)	(110.757)	(123.220)	(900.559)	<i>Written-off during the year</i>
Saldo 31 Desember 2022	<b>793.315</b>	<b>199.485</b>	<b>325.812</b>	<b>1.318.612</b>	<i>Balance at December 31, 2022</i>
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	570.537	92.889	203.467	866.893	<i>Individual impairment</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	222.778	106.596	122.345	451.719	<i>Collective impairment for non impaired loans</i>
Saldo 31 Desember 2022	<b>793.315</b>	<b>199.485</b>	<b>325.812</b>	<b>1.318.612</b>	<i>Balance at December 31, 2022</i>
2021					
	Modal kerja/ <i>Working capital</i>	Investasi/ <i>Investment</i>	Konsumsi/ <i>Consumption</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Saldo awal tahun	960.358	239.533	254.830	1.454.721	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyisihan tahun berjalan	261.450	22.153	149.514	433.117	<i>Provision during the year</i>
Penghapusan tahun berjalan	(29.587)	(3.807)	(23.027)	(56.421)	<i>Written-off during the year</i>
Saldo 31 Desember 2021	<b>1.192.221</b>	<b>257.879</b>	<b>381.317</b>	<b>1.831.417</b>	<i>Balance at December 31, 2021</i>
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	1.179.676	249.657	332.682	1.762.015	<i>Individual impairment</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	12.545	8.222	48.635	69.402	<i>Collective impairment for non impaired loans</i>
Saldo 31 Desember 2021	<b>1.192.221</b>	<b>257.879</b>	<b>381.317</b>	<b>1.831.417</b>	<i>Balance at December 31, 2021</i>

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Credit risk grading – Treasury (continued)**

Loans and sharia financing (continued)

*Movement of allowance for impairment losses by type of loans and sharia financing:*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (di luar cadangan kerugian penurunan nilai):

	2022					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	-	-		
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>					<b>Amortized cost</b>	
Surat Utang Negara	12.025.332	-	-	12.025.332	Government's bonds	
Reksadana	90.000	-	-	90.000	Mutual Funds	
Obligasi	1.851.074	-	-	1.851.074	Bonds	
Sukuk Bank Indonesia	400.000	-	-	400.000	Sukuk of Bank Indonesia	
Negotiable Certificate of Deposit	47.237	-	-	47.237	Negotiable Certificate of Deposit	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	-	-	325.000	Interbank Mudarabah	
Wesel	2.418	-	-	2.418	Investment Certificate	
	<b>14.741.062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.741.062</b>	<b>Bill</b>	
<b>Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain</b>					<b>Fair value through other comprehensive income</b>	
Surat Utang Negara	8.476.609	-	-	8.476.609	Government's bonds	
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>					<b>Amortized cost</b>	
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	10.786.740	Currents account with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	303.129	-	-	303.129	Currents account with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	-	-	6.916.329	Placement with bank Indonesia and other banks	
Tagihan spot dan derivatif	361	-	-	361	Spot and derivative receivables	
Tagihan reverse repo	7.822.847	-	-	7.822.847	Reverse repo receivables	
Tagihan lainnya	286.147	-	-	286.147	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					Loans and sharia financing	
Modal kerja	-	10.259.372	-	708.638	Working capital	
Investasi	-	6.448.282	-	122.376	Investment	
Konsumsi	-	28.179.834	-	478.155	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	646.125	-	646.125	Interest receivables	
<b>Jumlah</b>	<b>49.333.224</b>	<b>45.533.613</b>	<b>-</b>	<b>1.309.169</b>	<b>96.176.006</b>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(499.126)	-	(823.481)	(1.322.607)	
<b>Neto</b>	<b>49.333.224</b>	<b>45.034.487</b>	<b>-</b>	<b>485.688</b>	<b>94.853.399</b>	
					<b>Allowances for impairment losses</b>	
					<b>Net</b>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

	2021				Jumlah/ Total
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>					
Surat Utang Negara	15.530.273	-	-	-	15.530.273
Reksadana	2.339.000	-	-	-	2.339.000
Obligasi	2.071.699	-	-	-	2.071.699
Sukuk Bank Indonesia	541.392	-	-	-	541.392
Negotiable Certificate of Deposit	206.095	-	-	-	206.095
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	139.000	-	-	-	139.000
Wesel	6.747	-	-	-	6.747
	<b>20.834.206</b>	-	-	-	<b>20.834.206</b>
<b>Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain</b>					
Surat Utang Negara	11.554.760	-	-	-	11.554.760
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>					
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	8.805.300
Giro pada Bank lain	211.681	-	-	-	211.681
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.917.695	-	-	-	9.917.695
Tagihan reverse repo	3.420.685	-	-	-	3.420.685
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	230.019
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					
Modal kerja	-	8.520.925	-	1.147.719	9.668.644
Investasi	-	5.585.250	-	240.526	5.825.776
Konsumsi	-	26.727.012	-	528.127	27.255.139
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	793.900	-	-	793.900
<b>Jumlah</b>	<b>54.974.345</b>	<b>41.627.087</b>	-	<b>1.916.372</b>	<b>98.517.805</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(77.347)	-	(1.787.474)	(1.864.821)
<b>Neto</b>	<b>54.974.346</b>	<b>41.549.740</b>	-	<b>128.898</b>	<b>96.652.984</b>

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

Loans and sharia financing (continued)

<i>Amortized cost</i>
<i>Government's bonds</i>
<i>Mutual Funds</i>
<i>Bonds</i>
<i>Sukuk of Bank Indonesia</i>
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>
<i>Interbank Mudarabah</i>
<i>Investment Certificate</i>
<i>Bill</i>
<i>Fair value through other comprehensive income</i>
<i>Government's bonds</i>
<i>Amortized cost</i>
<i>Currents account with Bank Indonesia</i>
<i>Currents account with other bank</i>
<i>Placement with bank Indonesia and other bank</i>
<i>Reverse repo receivables</i>
<i>Other receivables</i>
<i>Loans and sharia financing</i>
<i>Working capital</i>
<i>Investment</i>
<i>Consumption</i>
<i>Interest receivables</i>
<b>Total</b>
<i>Allowances for impairment losses</i>
<b>Net</b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)**

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio posisi keuangan yang konservatif.
- iii. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baaa3 (Moody's).

Tingkat standar

- i. Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- iii. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

**43. CREDIT RISK (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Credit risk grading – Treasury (continued)**

The credit quality are defined as follows:

High grade

- i. Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the governmental institutions, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.
- ii. Loans and sharia financing, interest receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative financial position ratios.
- iii. Securities and Government bonds are Sovereign securities; investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baaa3 (Moody's).

Standard grade

- i. Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- ii. Loans and sharia financing, interest receivable and third party receivables who are borrowers with an average track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due for 90 days and over, small corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.
- iii. Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. RISIKO PASAR**

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Giro pada Bank Indonesia	0.00%	0.00%	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0.02%	0.04%	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.33%	0.47%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	7.99%	0.00%	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.38%	0.00%	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.80%	0.00%	Marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10.50%-12.75%	0.00%	Loans and sharia financing
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
Simpanan dari nasabah	0.00% - 2.74%	0.00% - 0.16%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.00% - 2.27%	-	Deposits from other banks

**44. MARKET RISK**

Market risk is the risks on the statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Bank's operational activities involving the banking books and the trading books.

Management of market risk is performed in accordance with the Bank's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Management of interest rate risk is performed on the banking book exposure by considering the gap position of the Bank's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Bank's profitability level.

The tables below summarize the average of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2022 and 2021:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. RISIKO PASAR (lanjutan)**

**44. MARKET RISK (continued)**

	2021		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Giro pada Bank Indonesia	0.00%	0.00%	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0.03%	0.02%	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.00%	0.03%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	7.67%	0.00%	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	0.00%	0.00%	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.50%	0.00%	Marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10.50%-12.75%	0.00%	Loans and sharia financing
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
Simpanan dari nasabah	0.00% - 3.00%	0.00% - 0.25%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.31% - 3.22%	-	Deposits from other banks

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (*gross*) which may affect the future cash flows as of December 31, 2022 and 2021:

	2022					Total/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Kas	1.988.262	-	-	-	-	1.988.262	Cash
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	-	10.786.740	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	302.688	-	-	-	-	302.688	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	-	6.913.175	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	1.578.463	4.995.096	8.167.102	-	-	14.740.661	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	8.476.609	-	-	8.476.609	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	-	-	-	-	7.822.847	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	-	286.147	Other receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	-	-	-	10.968.010	-	10.968.010	Working capital
Investasi	-	-	-	6.570.658	-	6.570.658	Investment
Konsumsi	-	-	-	28.657.989	-	28.657.989	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74.213	14.396	557.516	-	-	646.125	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	33.847.601	5.009.492	17.201.227	46.196.657	-	102.254.977	Total financial assets
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Liabilitas segera	872.514	-	-	-	-	872.514	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	23.634.773	-	-	-	-	23.634.773	Current accounts
Tabungan	26.343.817	-	-	-	-	26.343.817	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	31.788.793	-	31.788.793	Time deposits
Simpanan dari bank lain	3.334.563	4.560	-	-	-	3.339.123	Deposits from other banks
Kewajiban spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	Liabilities of spot and derivatif
Pinjaman yang diterima	-	481.532	-	-	71.867	553.399	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	520.840	-	-	-	-	520.840	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	550.119	-	-	-	-	550.119	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	55.256.626	486.092	-	31.788.793	71.867	87.603.378	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	(21.409.025)	4.523.400	17.201.227	14.407.864	(71.867)	14.651.599	Net interest repricing gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. RISIKO PASAR (lanjutan)**

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

**44. MARKET RISK (continued)**

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (*gross*) which may affect the future cash flows as of December 31, 2022 and 2021 (continued):

	2021					Total/ Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate						
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Kas	2.023.077	-	-	-	-	2.023.077	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	-	-	-	-	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	211.443	-	-	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	-	-	-	-	9.915.932	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	6.022.859	2.579.296	12.226.108	-	-	20.828.263	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	-	-	-	-	11.554.760	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	230.019	-	-	-	-	230.019	Other receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	-	-	-	9.668.644	-	9.668.644	Working capital
Investasi	-	-	-	5.825.776	-	5.825.776	Investment
Konsumsi	-	-	-	27.255.139	-	27.255.139	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.497	35.352	744.051	-	-	793.900	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	<u>42.198.572</u>	<u>2.614.648</u>	<u>12.970.159</u>	<u>42.749.559</u>	<u>-</u>	<u>100.532.938</u>	Total financial assets
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Liabilitas segera	593.875	-	-	-	-	593.875	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	25.976.409	-	-	-	-	25.976.409	Current accounts
Tabungan	24.898.778	-	-	-	-	24.898.778	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	32.326.680	-	32.326.680	Time deposits
Simpanan dari bank lain	4.186.840	1.060	-	-	-	4.187.900	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	578.795	-	-	76.493	655.288	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	478.647	-	-	-	-	478.647	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	529.738	-	-	-	-	529.738	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	<u>56.664.287</u>	<u>579.855</u>	<u>-</u>	<u>32.326.680</u>	<u>76.493</u>	<u>89.647.315</u>	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	<u>(14.465.715)</u>	<u>2.034.793</u>	<u>12.970.159</u>	<u>10.422.879</u>	<u>(76.493)</u>	<u>10.885.623</u>	Net interest repricing gap

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin presentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable possible change one percentage point in interest rates, with all other variables held constant, of the Bank's statements of profit or loss and other comprehensive income. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the statement of comprehensive income for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

	31 Desember 2022/December 31, 2022		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	23.798	(23.798)	Impact to statement of profit or loss and other comprehensive income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**44. RISIKO PASAR (lanjutan)**

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

**45. RISIKO LIKUIDITAS**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit Treasury dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*.

**44. MARKET RISK (continued)**

*The Bank has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.*

*Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.*

*Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).*

*As of December 31, 2022 and 2021, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Bank.*

**45. LIQUIDITY RISK**

*Liquidity risk is the risk which is caused by the Bank's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Bank's activities and financial condition.*

*The Bank measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)**

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kas dan setara kas	19.994.460	20.957.753
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-
Tagihan reverse repo	7.822.847	3.420.685
Simpanan dari bank lain	3.339.123	4.187.900
<b>Jumlah</b>	<b>35.251.496</b>	<b>28.566.338</b>
Simpanan dari nasabah	81.767.383	83.201.867
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	43,11%	34,33%

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

**45. LIQUIDITY RISK (continued)**

The ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

Cash and cash equivalent
Marketable securities sold under purchased agreement
Reverse repo receivables
Deposits from other banks
<b>Total</b>
Deposits from customers
Ratio of net liquid assets to deposit from customers

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2022 and 2021:

	<b>2022</b>						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Kas	1.988.262	1.988.262	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	230.541	-	-	-	10.556.199	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	302.688	302.688	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	6.306.518	606.657	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	14.740.661	725.515	852.948	2.367.794	2.627.302	8.167.102	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	4.095.066	-	-	-	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	7.440.160	-	-	192.726	189.961	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	286.147	286.147	-	-	-	-	Other receivable
Kredit yang diberikan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	10.174.698	474.092	591.709	1.027.046	1.904.233	6.177.618	Working capital
Investasi	6.371.172	35.082	2.414	7.284	32.541	6.293.851	Investment
Konsumsi	28.332.175	16.380	25.106	68.179	320.447	27.902.063	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	25.795	48.418	9.901	4.495	557.516	Interest receivable
<b>Jumlah</b>	<b>100.936.365</b>	<b>21.926.246</b>	<b>2.127.252</b>	<b>3.480.204</b>	<b>5.081.744</b>	<b>68.320.919</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Liabilitas segera	916.091	916.091	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	81.767.383	11.214.472	16.200.878	1.699.788	10.878.340	41.773.905	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	3.339.123	3.287.933	46.630	60	4.500	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	553.399	150.517	-	-	-	402.882	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	520.840	520.840	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	550.119	550.119	-	-	-	-	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>87.646.955</b>	<b>16.639.972</b>	<b>16.247.508</b>	<b>1.699.848</b>	<b>10.882.840</b>	<b>42.176.787</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>13.289.410</b>	<b>5.286.274</b>	<b>(14.120.256)</b>	<b>1.780.356</b>	<b>(5.801.096)</b>	<b>26.144.132</b>	<b>Maturity gap</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)**

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (lanjutan):

	2021						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Kas	2.023.077	2.023.077	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8.805.300	1.781.878	-	-	-	7.023.422	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	211.443	211.443	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.915.932	9.313.829	290.619	252.644	39.861	18.979	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	20.828.263	3.404.795	2.618.064	1.668.261	911.035	12.226.108	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	11.554.760	10.536.388	1.018.372	-	-	-	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	3.420.685	3.420.685	-	-	-	-	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	230.019	230.019	-	-	-	-	Other receivable
Kredit yang diberikan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	8.476.424	969.980	624.357	1.344.396	1.894.283	3.643.408	Working capital
Investasi	5.567.896	115.976	3.395	7.582	23.170	5.417.773	Investment
Konsumsi	26.873.822	21.785	16.361	53.678	238.264	26.543.734	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	793.900	2.628	11.869	17.399	17.953	744.051	Interest receivable
<b>Jumlah</b>	<b>98.701.521</b>	<b>32.032.483</b>	<b>4.583.037</b>	<b>3.343.960</b>	<b>3.124.566</b>	<b>55.617.475</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Liabilitas segera	593.875	593.875	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	83.201.867	12.511.223	19.267.011	4.511.689	3.899.151	43.012.793	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	4.187.900	4.043.920	142.920	60	1.000	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	655.288	257.993	-	7.410	-	389.885	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	478.647	478.647	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	529.738	529.738	-	-	-	-	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>89.647.315</b>	<b>18.415.396</b>	<b>19.409.931</b>	<b>4.519.159</b>	<b>3.900.151</b>	<b>43.402.678</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>9.054.206</b>	<b>13.617.087</b>	<b>(14.826.894)</b>	<b>(1.175.199)</b>	<b>(775.585)</b>	<b>12.214.797</b>	<b>Maturity gap</b>

**46. RISIKO OPERASIONAL**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

**45. LIQUIDITY RISK (continued)**

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2022 and 2021 (continued):

**46. OPERATIONAL RISK**

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Bank's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Bank's overall policies and operational procedures in each unit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)**

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

- i. Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
- ii. Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- iii. Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit; dan
- iv. Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Bank.

**47. RISIKO HUKUM**

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

**48. RISIKO REPUTASI**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

**46. OPERATIONAL RISK (continued)**

*The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:*

- i. Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;*
- ii. Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;*
- iii. Implementing corrective actions based on audit results; and*
- iv. Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Bank's activities.*

**47. LEGAL RISK**

*Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.*

*Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.*

**48. REPUTATION RISK**

*Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Bank.*

*Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.*



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**49. RISIKO KEPATUHAN**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- i. Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- ii. Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN); dan
- iii. Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges*.

**50. RISIKO STRATEJIK**

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. Pengendalian risiko strategik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

**51. MANAJEMEN MODAL**

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

**49. COMPLIANCE RISK**

*Compliance risk is the risk incurred because the Bank has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Bank's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:*

- i. Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;*
- ii. Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations; and*
- iii. Other risks related to external and internal regulations.*

*Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.*

**50. STRATEGIC RISK**

*Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.*

**51. CAPITAL MANAGEMENT**

*The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank has a strong capital to support the Bank's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Bank's capital structure.*

*Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank's capital and liquidity requirements.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 November 2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (tier 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.

**51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

*The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.*

*Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.*

*Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.*

*Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).*

*Bank calculates its capital requirements in accordance with POJK No.34/POJK.03/2016 dated November 22, 2016 about "Changes of Financial Service Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 about Minimum Capital Reserve for Commercial Bank" and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:*

- *Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

- Modal pelengkap (tier 2) antara lain meliputi instrumen modal, agio atau disagio, cadangan umum aset produktif dan cadangan tujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (tier 1) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara dengan entitas anak.

- Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal tier 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal tier 1; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal tier 1; dan modal tier 2 tidak boleh melebihi modal tier 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

ATMR Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan BI, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditor dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan *gearing* yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

**51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

- *Supplementary capital (tier 2), which includes capital instruments, agio or disagio, general reserves of productive assets and purpose reserves according to Bank Indonesia guideline.*

*Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as Banks are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and level with subsidiary.*

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

*The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.*

*Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.*

*ATMR are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on BI regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.*

*The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.*

*Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the Bank's risk profile with the available capital. The Bank is required to provide minimum capital based on the risk profile.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko; dan
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Modal inti (Tier 1)		
Modal inti utama (CET 1)	10.346.392	9.297.192
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-
	<u>10.346.392</u>	<u>9.297.192</u>
Modal pelengkap (Tier 2)	437.563	415.071
Jumlah modal	<u>10.783.955</u>	<u>9.712.263</u>
Aset Tertimbang Menurut Risiko		
Risiko kredit	34.567.488	32.790.641
Risiko operasional	8.917.841	8.397.351
Risiko pasar	108.144	98.936
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	<u>43.593.473</u>	<u>41.286.928</u>
Rasio kecukupan modal		
Rasio CET 1	23,73%	22,52%
Rasio tier 1	23,73%	22,52%
Rasio tier 2	1,00%	1,01%
Rasio modal terhadap ATMR	24,74%	23,52%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	24,80%	23,58%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	24,74%	23,52%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%	9% - <10%

**51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset; and
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Core capital (Tier 1)
Common equity tier (CET 1)
Additional equity tier (AT 1)
Supplementary capital (Tier 2)
Total capital
Risk Weighted Asset
Credit risk
Operational risk
Market risk
Total Risk Weighted Asset
Capital Adequacy Ratio
CET 1 ratio
Tier 1 ratio
Tier 2 ratio
Ratio of capital to ATMR
Capital adequacy ratio with credit and operational risk
Capital adequacy ratio with credit, market and operational risk
Minimum capital adequacy ratio required

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Berdasarkan *self-assessment* Bank, pada tanggal 31 Desember 2022 profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat *Low to Moderat* (PK-2). Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 24,74%.

**52. POSISI DEvisa NETO**

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Mata uang	2022			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value
<b>POSISI KEUANGAN</b>				
Dolar Amerika Serikat	278.741	157.121	121.620	121.620
Riyal Saudi Arabia	7.242	-	7.242	7.242
Dolar Singapura	12.463	9.240	3.223	3.223
Euro	4.392	1.609	2.783	2.783
Ringgit Malaysia	3.420	-	3.420	3.420
Poundsterling Inggris Raya	1.464	-	1.464	1.464
Dolar Australia	6.176	-	6.176	6.176
Yuan China Renminbi	1.375	-	1.375	1.375
Yen Jepang	563	15	548	548
Dolar Hong Kong	845	20	825	825
	<b>316.681</b>	<b>168.005</b>	<b>148.676</b>	<b>148.676</b>
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>				
Dolar Amerika Serikat	-	202.378	(202.378)	202.378
<b>Jumlah</b>	<b>316.681</b>	<b>370.383</b>	<b>(53.702)</b>	<b>351.054</b>
Total modal (Catatan 50)				10.783.955
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				1,38%
Rasio Posisi Devisa Neto				3,26%

**51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

OJK is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Based on its *self-assessment*, as of December 31, 2022 the Bank risk profile is assessed to be in rating *Low to Moderat* (PK-2). Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Bank Capital Adequate Ratio was 24.74%, which was higher than the required minimum provision of capital.

**52. NET OPEN POSITION**

The Net Open Position (NOP) was calculated based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Bank is required to maintain overall and statement of financial position Net Open Position at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Currencies
<b>FINANCIAL POSITION</b>
United States Dollar
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
Euro
Malaysian Ringgit
Great Britain Poundsterling
Australian Dollar
Chinese Yuan Renminbi
Japanese Yen
Hong Kong Dollar
<b>ADMINISTRATIVE ACCOUNTS</b>
United States Dollar
<b>Total</b>
Total capital (Note 50)
Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Net Open Position as a percentage of capital

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**52. POSISI DEvisa NETO (lanjutan)**

**52. NET OPEN POSITION (continued)**

Mata uang	2021				Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	
<b>POSISI KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL POSITION</b>
Dolar Amerika Serikat	83.352	98.371	(15.019)	15.019	United States Dollar
Riyal Saudi Arabia	8.534	-	8.534	8.534	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	3.966	5.265	(1.299)	1.299	Singapore Dollar
Euro	3.959	388	3.571	3.571	Saudi Arabian Riyal
Ringgit Malaysia	3.493	-	3.493	3.493	Euro
Poundsterling Inggris Raya	2.028	-	2.028	2.028	Japanese Yen
Dolar Australia	1.795	-	1.795	1.795	Australian Dollar
Yuan China Renminbi	1.348	-	1.348	1.348	Great Britain Poundsterling
Yen Jepang	777	20	757	757	Chinese Yuan Renminbi
Dolar Hong Kong	747	19	728	728	Hong Kong Dollar
	<b>109.999</b>	<b>104.063</b>	<b>5.936</b>	<b>38.572</b>	
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>					<b>ADMINISTRATIVE ACCOUNTS</b>
Dolar Amerika Serikat	-	42.758	(42.758)	42.758	United States Dollar
<b>Jumlah</b>	<b>109.999</b>	<b>146.821</b>	<b>(36.822)</b>	<b>81.330</b>	<b>Total</b>
Total modal (Catatan 50)				9.712.263	Total capital (Note 50)
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0,40%	Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Rasio Posisi Devisa Neto				0,84%	Net Open Position as a percentage of capital

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**53. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022		2021	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
<b>Aset Keuangan</b>				
<b>Kas</b>	<b>1.988.262</b>	<b>1.988.262</b>	<b>2.023.077</b>	<b>2.023.077</b>
<b>Surat Berharga</b>				
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain				
Surat Utang Negara	8.476.609	8.476.609	11.554.760	11.554.760
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>				
<b>Surat Utang Negara</b>	<b>12.025.332</b>	<b>12.025.332</b>	<b>15.530.273</b>	<b>15.530.273</b>
<b>Obligasi:</b>				
PT Pegadaian (Persero)	480.000	480.000	255.018	255.018
PT Bank Aceh	225.000	225.000	-	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)	192.250	192.250	337.948	337.948
PT Astra Sedaya Finance	152.966	152.966	50.000	50.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	146.035	146.035	157.788	157.788
PT Semen Indonesia Persero	135.454	135.454	193.994	193.994
PT Bank Sinarmas Tbk	100.000	100.000	-	-
PT Federal International Finance Tbk	99.615	99.615	-	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	91.519	91.519	-	-
PT Bank Negara Indonesia Tbk	80.000	80.000	30.270	30.270
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	69.861	69.861	110.209	110.209
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	63.243	63.243	55.000	55.000
PT XL Axiata	60.000	60.000	-	-
PT Permodalan Nasional Madani	50.000	50.000	-	-
PT Maybank Indonesia Tbk	33.032	33.032	10.170	10.170
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	32.003	32.003	30.218	30.218
PT Indonesia Infrastructure Finance	30.148	30.148	30.323	30.323
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.189	27.189	27.430	27.430
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	26.000	26.000	246.253	246.253
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	24.803	24.803	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	24.011	24.011	54.148	54.148
PT Bank Pembangunan Daerah				
Jawa Barat dan Banten Tbk	12.219	12.219	41.950	41.950
PT Bank Pan Indonesia	10.008	10.008	10.057	10.057
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5.454	5.454	37.519	37.519
PT Mandiri Tunas Finance Tbk	5.265	5.265	31.247	31.247
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	-	190.131	190.131
PT Hutama Karya	-	-	50.873	50.873
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	49.307	49.307
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	-	41.637	41.637
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	30.209	30.209
Sukuk Bank Indonesia	400.000	400.000	541.392	541.392
<b>Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA):</b>				
PT Bank Pembangunan Daerah				
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-	99.000	99.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Syariah)	-	-	40.000	40.000
PT Bank Sinarmas Tbk	100.000	100.000	-	-
PT Bank Aceh	225.000	225.000	-	-
<b>Negotiable Certificate of Deposit (NCD):</b>				
PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-	-	99.281	99.281
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	-	-	39.226	39.226
PT Bank Maybank Indonesia	-	-	38.823	38.823
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	-	28.765	28.765
PT Bank Negara Indonesia Tbk	47.237	47.237	-	-
<b>Reksadana:</b>				
PT Trimegah Asset Management	-	-	900.000	900.000
PT Permodalan Nasional Madani	90.000	90.000	689.000	689.000
PT Avrist Asset Management	-	-	300.000	300.000
PT Bahana TCW Investment Management	-	-	300.000	300.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	100.000	100.000
PT Setiabudi Investment Management	-	-	50.000	50.000
Wesel	2.418	2.418	6.747	6.747
	<b>23.542.670</b>	<b>23.542.670</b>	<b>32.388.966</b>	<b>32.388.966</b>
	<b>25.530.932</b>	<b>25.530.932</b>	<b>34.412.043</b>	<b>34.412.043</b>

**53. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES**

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the dates of the statements of financial position.

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of December 31, 2022 and 2021:

	2022		2021	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
<b>Aset Keuangan</b>				
<b>Kas</b>	<b>1.988.262</b>	<b>1.988.262</b>	<b>2.023.077</b>	<b>2.023.077</b>
<b>Surat Berharga</b>				
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain				
Surat Utang Negara	8.476.609	8.476.609	11.554.760	11.554.760
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>				
<b>Surat Utang Negara</b>	<b>12.025.332</b>	<b>12.025.332</b>	<b>15.530.273</b>	<b>15.530.273</b>
<b>Obligasi:</b>				
PT Pegadaian (Persero)	480.000	480.000	255.018	255.018
PT Bank Aceh	225.000	225.000	-	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)	192.250	192.250	337.948	337.948
PT Astra Sedaya Finance	152.966	152.966	50.000	50.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	146.035	146.035	157.788	157.788
PT Semen Indonesia Persero	135.454	135.454	193.994	193.994
PT Bank Sinarmas Tbk	100.000	100.000	-	-
PT Federal International Finance Tbk	99.615	99.615	-	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	91.519	91.519	-	-
PT Bank Negara Indonesia Tbk	80.000	80.000	30.270	30.270
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	69.861	69.861	110.209	110.209
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	63.243	63.243	55.000	55.000
PT XL Axiata	60.000	60.000	-	-
PT Permodalan Nasional Madani	50.000	50.000	-	-
PT Maybank Indonesia Tbk	33.032	33.032	10.170	10.170
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	32.003	32.003	30.218	30.218
PT Indonesia Infrastructure Finance	30.148	30.148	30.323	30.323
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.189	27.189	27.430	27.430
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	26.000	26.000	246.253	246.253
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	24.803	24.803	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	24.011	24.011	54.148	54.148
PT Bank Pembangunan Daerah				
Jawa Barat dan Banten Tbk	12.219	12.219	41.950	41.950
PT Bank Pan Indonesia	10.008	10.008	10.057	10.057
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5.454	5.454	37.519	37.519
PT Mandiri Tunas Finance Tbk	5.265	5.265	31.247	31.247
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	-	190.131	190.131
PT Hutama Karya	-	-	50.873	50.873
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	49.307	49.307
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	-	41.637	41.637
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	30.209	30.209
Sukuk Bank Indonesia	400.000	400.000	541.392	541.392
<b>Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA):</b>				
PT Bank Pembangunan Daerah				
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-	99.000	99.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Syariah)	-	-	40.000	40.000
PT Bank Sinarmas Tbk	100.000	100.000	-	-
PT Bank Aceh	225.000	225.000	-	-
<b>Negotiable Certificate of Deposit (NCD):</b>				
PT Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd	-	-	99.281	99.281
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	-	-	39.226	39.226
PT Bank Maybank Indonesia	-	-	38.823	38.823
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	-	28.765	28.765
PT Bank Negara Indonesia Tbk	47.237	47.237	-	-
<b>Reksadana:</b>				
PT Trimegah Asset Management	-	-	900.000	900.000
PT Permodalan Nasional Madani	90.000	90.000	689.000	689.000
PT Avrist Asset Management	-	-	300.000	300.000
PT Bahana TCW Investment Management	-	-	300.000	300.000
PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	-	-	100.000	100.000
PT Setiabudi Investment Management	-	-	50.000	50.000
Wesel	2.418	2.418	6.747	6.747
	<b>23.542.670</b>	<b>23.542.670</b>	<b>32.388.966</b>	<b>32.388.966</b>
	<b>25.530.932</b>	<b>25.530.932</b>	<b>34.412.043</b>	<b>34.412.043</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**53. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

**53. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES  
(continued)**

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>					<b>Amortised cost</b>
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	10.786.740	8.805.300	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	303.129	303.129	211.681	211.681	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	6.916.329	9.917.695	9.917.695	Placement with Bank Indonesia and other banks
Tagihan reverse repo	7.822.847	7.822.847	3.420.685	3.420.685	Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	286.147	286.147	230.019	230.019	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					Loans and sharia financing
Modal kerja	10.968.010	10.968.010	9.668.644	9.668.644	Working capital
Investasi	6.570.658	6.570.658	5.825.776	5.825.776	Investment
Konsumsi	28.657.989	28.657.989	27.255.139	27.255.139	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	646.125	793.900	793.900	Interest receivables
<b>Jumlah</b>	<b>96.500.644</b>	<b>96.500.644</b>	<b>98.517.805</b>	<b>98.517.805</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Liabilitas lain-lain					Other liabilities
Liabilitas segera	872.514	872.514	593.875	593.875	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	81.767.383	81.767.383	83.201.867	83.201.867	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	3.339.123	3.339.123	4.187.900	4.187.900	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	553.399	553.399	655.288	655.288	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	520.840	520.840	478.647	478.647	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	550.119	550.119	529.738	529.738	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>87.603.378</b>	<b>87.603.378</b>	<b>89.647.315</b>	<b>89.647.315</b>	<b>Total</b>

- i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya

- i. Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below 1 (one) year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**53. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Portofolio kredit Bank terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

iv. Surat berharga

Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa. Surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

v. Pinjaman yang diterima

Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

**53. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

ii. Loans and sharia financing

The Bank credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

iii. Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

iv. Marketable securities

The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (*brokers*)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

v. Borrowings

The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI**

**Program pensiun manfaat pasti**

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Dapen Bank Jatim). Dalam program ini, manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dapen Bank Jatim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pension sebesar 5% dari penghasilan dasar pension pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.

- i. Penilaian aktuaria atas beban pensiun per 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 24 Januari 2023 dan 21 Januari 2022 telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Asumsi ekonomi</b>			<b>Economic assumptions</b>
Tingkat diskonto	7.40%	7.50%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0.00%	0.00%	<i>Pension basic income growth</i>
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7.40%	7.50%	<i>Investment yield of plan aset</i>
<b>Asumsi lainnya</b>			<b>Other assumptions</b>
Tingkat mortalita	GAM-1971		<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal	58 tahun/years		<i>Normal retirement age</i>
Tingkat cacat	10% Mortalita		<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			<i>Retirement rate per year for ages:</i>
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old		<i>18-45 years old</i>
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		<i>46-55 years old</i>

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES**

**Defined benefit pension plan**

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk" (Dapen Bank Jatim).. Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by Dapen Bank Jatim. Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

- i. The actuarial valuation of pension expense as of December 31, 2022 and 2021 were made by Konsultan Aktuaria Agus Susanto, an independent actuarial firm, based on their report dated January 24, 2022 and January 21, 2022 conform with the PSAK 24 (revised 2013) with use calculated method *Projected Unit Credit* also considers assumptions are as follows :

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

ii. Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	Corporate Bonds
Properti	7,00%	7,00%	Property
Lainnya	6,70%	6,70%	Others

iii. Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Nilai kini kewajiban	912.082	986.872	868.937	738.556	335.681	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(800.814)	(763.453)	(662.634)	(533.439)	(429.961)	Fair value of assets program
Status pendanaan	111.268	223.419	206.303	205.117	(94.280)	Funded status
Perubahan dampak batas atas aset	-	-	-	-	(45.092)	Impact changes on assets upper threshold
<b>Liabilitas (aset) imbalan pasti - neto</b>	<b>111.268</b>	<b>223.419</b>	<b>206.303</b>	<b>205.117</b>	<b>(139.372)</b>	<b>Liabilities (assets) defined benefit - net</b>

iv. Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Aset imbalan pasti neto awal tahun	223.419	206.303	Asset defined benefit net at beginning of year
Biaya imbalan pasti:			Expenses for the year:
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	31.586	33.507	Amount recognized in the profit and losses
Pengkukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	(95.355)	(230)	Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
Pembayaran iuran dari pendiri	(48.383)	(16.161)	Paid of contribution from employer
<b>Liabilitas imbalan pasti neto</b>	<b>111.267</b>	<b>223.419</b>	<b>Liabilities defined benefit - net</b>

v. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya jasa kini	14.830	22.379	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested			Past service cost - vested
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian			Gain/losses on settlement
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:			Net interest on liabilities (asset) defined:
Biaya bunga	74.015	62.563	Interest cost
Pendapatan bunga dari aset	(57.259)	(47.710)	Interest income from assets
Bunga atas dampak batasan aset iuran peserta	-	-	Interest of the asset ceiling
Pembayaran kontribusi dari karyawan	-	(3.725)	Paid of contribution from employee
<b>Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi</b>	<b>31.586</b>	<b>33.507</b>	<b>Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss</b>

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined benefit pension plan (continued)**

ii. Pension plan assets primarily consists of:

iii. The calculation of defined benefit pension plan obligations recognized in the statement of financial position are as follows:

iv. The calculation movement of defined benefit pension plan obligations are as follows:

v. The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the statement of profit or loss are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

- vi. Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Saldo awal	763.453
Hasil pengembangan riil	57.259
Imbalan hasil atas aset program	(22.775)
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	44.919
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	3.463
Pembayaran imbalan kerja	(45.505)
	-
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>800.814</u></b>

- vii. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(118.130)
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset	22.775
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	-
<b>Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain</b>	<b><u>(95.355)</u></b>

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined benefit pension plan (continued)**

- vi. The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	<u>2022</u>	
	662.634	Beginning balance
	47.710	Actual investment result
	72.742	Return on plan assets
	12.310	Contribution paid – employer's
	3.851	Contribution paid – employee plan
	(39.520)	Actual benefit paid
	3.726	
	<b><u>763.453</u></b>	<b>Ending balance</b>

- vii. The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	<u>2022</u>	
	72.512	Actuarial gain (losses) on obligation
	(72.742)	Actuarial gain (losses) on asset
	-	Amandement of impact on assets exclude interest
	-	Recognized cost in other comprehensive income
	<b><u>(230)</u></b>	

Post-employment benefits from other programs on pension funds

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, the Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated March 12, 2019 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-24/NB.1/2019 dated June 14, 2019. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting from ratified by the Financial Service Authority.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

- i. Penilaian aktuarial atas beban pensiun dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto untuk tanggal valuasi per 31 Desember 2022 dan 2021. Penilaian aktuarial telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2016) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Asumsi ekonomi</b>			<b>Economic assumptions</b>
Tingkat diskonto	7,40%	7,50%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,40%	7,50%	Investment yield of plan asset
<b>Asumsi lainnya</b>			<b>Other assumptions</b>
Tingkat mortalita		GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal		58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat		10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia: Usia 18-45 tahun		3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old	Retirement rate per year for ages: 18-45 years old
Usia 46-55 tahun		5% per tahun/per year	46-55 years old

- ii. Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	Corporate Bonds
Properti	7,00%	7,00%	Property
Lainnya	6,70%	6,70%	Others

- iii. Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai kini kewajiban	204.612	198.552	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(259.207)	(221.492)	Fair value of assets program
Defisit liabilitas	-	-	Loss of liabilities
Cadangan (Biaya dibayar dimuka)	<u>(54.595)</u>	<u>(22.940)</u>	Allowance (prepaid expenses)

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined benefit pension plan (continued)**

- i. Actuarial valuation on pension expense is calculated by Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto for the valuation date as of December 31, 2022 and 2021. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 24 (revised 2016) using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

- ii. Composition of pension fund assets, consisting of:

- iii. Calculation of other benefit pension plan obligations recognized in the financial position report are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

- iv. Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Liabilitas (aset) imbalan pasti neto awal tahun	22.940
Biaya imbalan pasti:	
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(4.433)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	16.317
Pembayaran iuran dari pendiri	19.771
<b>Liabilitas imbalan pasti neto</b>	<b><u>54.595</u></b>

- v. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Biaya jasa kini	4.433
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:	
Biaya bunga	14.891
Pendapatan bunga dari aset	(16.611)
Bunga atas dampak batasan aset	1.720
<b>Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi</b>	<b><u>4.433</u></b>

- vi. Mutasi atas nilai wajar aset program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Saldo awal	221.492
Hasil yang diharapkan dari aset	16.611
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	19.772
Pembayaran imbalan kerja	(6.777)
Laba (rugi) aktuarial pada aset	8.109
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>259.207</u></b>

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined benefit pension plan (continued)**

- iv. The mutations of the defined benefit pension plan obligations are as follows:

	<u>2021</u>	
Liabilities (asset) defined benefit net at beginning of year	(7.645)	
Expenses for the year:		
Amount recognized in the profit and losses	(5.030)	
Remeasurement of liabilities (assets) in the current year	19.850	
Paid of contribution from employee	15.765	
<b>Liabilities defined benefit - net</b>	<b><u>22.940</u></b>	

- v. The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in the Income Statement is as follows:

	<u>2021</u>	
Current service cost	4.480	
Net interest on liabilities (asset) defined:		
Interest cost	14.560	
Interest income from assets	(14.010)	
Interest of the asset ceiling	-	
<b>Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss</b>	<b><u>5.030</u></b>	

- vi. The movement in the fair value of a defined benefit pension asset are as follows:

	<u>2021</u>	
Beginning balance	194.588	
Results expected from assets	14.010	
Payment of contributions - employers	15.765	
Payment of employee benefits	(6.349)	
Actuarial gain (loss) on assets	3.478	
<b>Ending balance</b>	<b><u>221.492</u></b>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

- vii. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	(6.487)
Keuntungan aktuarial pada aset	(8.109)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	(1.720)
<b>Diakui di penghasilan komprehensif lain</b>	<b><u>(16.316)</u></b>

- viii. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Saldo awal	(17.169)
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada kewajiban	(6.487)
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada aset	(8.109)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	47.104
<b>Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti neto</b>	<b><u>15.339</u></b>

**Program pensiun iuran pasti**

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined benefit pension plan (continued)**

- vii. The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in other comprehensive income is as follows:

	<u>2021</u>	
	(16.373)	Actuarial gains (losses) on liabilities
	(3.477)	Actuarial gains on assets
	-	Changes to the impact of asset limits exclude interest
	<b><u>(19.850)</u></b>	<b>Recognised in other comprehensive income</b>

- viii. Measurement of return on liabilities (assets) defined benefit pension plans is as follows:

	<u>2021</u>	
	(20.259)	Beginning balance
	(16.373)	Actuarial (gains) losses on liabilities
	(3.477)	Actuarial (gains) losses on assets
	22.940	Changes to the impact of asset limits exclude interest
	<b><u>(17.169)</u></b>	<b>Amount of re-measurement of net defined benefit assets</b>

**Defined contribution pension plan**

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun iuran pasti (lanjutan)**

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di luar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

- i. Penilaian aktuarial atas program pensiun iuran pasti selisih dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuarial pada tanggal 24 Januari 2023 dan 21 Januari 2022 yaitu sebagai berikut:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Asumsi ekonomi</b>			<b>Economic assumptions</b>
Tingkat diskonto	7.40%	7.50%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5.00%	5.00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0.00%	0.00%	Investment yield of plan asset
<b>Asumsi lainnya</b>			<b>Other assumptions</b>
Tingkat mortalita	GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

- ii. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya jasa kini	2.653	(36.598)	Current service cost
Biaya bunga neto	4.348	7.833	Interest cost net
<b>Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi</b>	<b>7.001</b>	<b>(28.765)</b>	<b>Expense recognized in statement of profit or loss</b>

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined contribution pension plan (continued)**

In year 2016, the Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calculated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

- i. The actuarial calculations of difference defined contribution pension plan Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended 31 Desember 2022 and 2021 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, using the "Projected Unit Credit" method as discussed an independent actuary report dated January January 24, 2023 and January 21, 2022, are as follows:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

- ii. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun iuran pasti (lanjutan)**

- iii. Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Saldo awal	57.968
Beban tahun berjalan	7.001
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(14.558)
Pembayaran imbalan	-
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>50.411</u></b>

- iv. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Saldo awal	57.968
Biaya jasa kini	2.653
Biaya bunga	4.348
Biaya jasa lalu	-
Pembayaran imbalan	-
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(14.558)
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>50.411</u></b>

- v. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

	<u>2022</u>
Saldo pada awal tahun	59.185
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(14.558)
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>44.627</u></b>

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.

Imbalans jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined contribution pension plan (continued)**

- iii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:

	<u>2021</u>	
	108.797	<i>Beginning balance</i>
	(28.765)	<i>Current service cost</i>
	(20.998)	<i>Remeasurement of employee benefit - net</i>
	(1.066)	<i>Actual benefit paid</i>
	<b><u>57.968</u></b>	<b><i>Ending balance</i></b>

- iv. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	<u>2021</u>	
	108.797	<i>Beginning balance</i>
	7.833	<i>Current service cost</i>
	2.379	<i>Interest cost</i>
	(38.977)	<i>Past service cost</i>
	(1.066)	<i>Actual benefit paid</i>
	(20.998)	<i>Actuarial gain on obligation</i>
	<b><u>57.968</u></b>	<b><i>Ending balance</i></b>

- v. Remeasurement of net employee benefit (aset) liabilities:

	<u>2021</u>	
	80.184	<i>Balance at beginning of year</i>
	(20.998)	<i>Actuarial gain on obligation</i>
	<b><u>59.186</u></b>	<b><i>Ending balance</i></b>

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.

Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self – managed by the Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun iuran pasti (lanjutan)**

Penilaian aktuarial atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 24 Januari 2023 dan 21 Januari 2022.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Asumsi ekonomi</b>			<b>Economic assumptions</b>
Tingkat diskonto	7.40%	7.50%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5.00%	5.00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0.00%	0.00%	Investment yield of plan aset
<b>Asumsi lainnya</b>			<b>Other assumptions</b>
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

i. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

i. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	
Biaya jasa kini	265	4,358	664	5,604	Current service cost
Biaya bunga neto	162	3,104	116	2,064	Oterest cost net
Rugi aktuarial	-	11,355	-	7,863	Actuarial loss
<b>Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi</b>	<b>427</b>	<b>18,817</b>	<b>781</b>	<b>15,531</b>	<b>Expenses recognized in statement of profit or loss</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program pensiun iuran pasti (lanjutan)**

- ii. Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Graduity for service program</i>
Saldo awal	(2.164)	(41.384)
Beban tahun berjalan	(427)	(18.817)
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	28	-
Pembayaran imbalan kerja	162	6.655
<b>Liabilitas imbalan pasti neto</b>	<b>(2.401)</b>	<b>(53.546)</b>

- iii. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2022	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Graduity for service program</i>
Saldo awal	(2.165)	(41.384)
Biaya jasa kini	(265)	(4.358)
Biaya bunga	(162)	(3.104)
Biaya jasa lalu	-	-
Pembayaran imbalan	162	6.655
Kerugian aktuarial pada kewajiban	28	(11.355)
<b>Liabilitas imbalan pasti neto</b>	<b>(2.402)</b>	<b>(53.546)</b>

- iv. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto:

	2022	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service devotion</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Graduity for service program</i>
Saldo pada awal tahun	529	-
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(28)	-
<b>Pendapatan komprehensif lain</b>	<b>501</b>	<b>-</b>

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**Defined contribution pension plan (continued)**

- ii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

	2021		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Graduity for service program</i>	
	(1.616)	(28.673)	<i>Beginning balance</i>
	(781)	(15.531)	<i>Current year expenses</i>
	(4)	-	<i>Remeasurement of employee benefits - net</i>
	237	2.821	<i>Actual benefit paid</i>
	<b>(2.164)</b>	<b>(41.384)</b>	<b><i>Liabilities defined benefit - net</i></b>

- iii. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2021		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Graduity for service program</i>	
	(1.616)	(28.673)	<i>Beginning balance</i>
	(116)	(2.064)	<i>Current service cost</i>
	(235)	(5.604)	<i>Interest cost net</i>
	(429)	-	<i>Past service cost</i>
	236	2.821	<i>Actual benefit paid</i>
	(4)	(7.863)	<i>Actuarial losses on obligation</i>
	<b>(2.165)</b>	<b>(41.384)</b>	<b><i>Liabilities defined benefit - net</i></b>

- i. Remeasurement of net employee benefit liabilities:

	2021		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ <i>Death benefit as employee service</i>	Program penghargaan masa kerja/ <i>Graduity for service program</i>	
	525	-	<i>Balance at beginning of year</i>
	4	-	<i>Actuarial losses on obligation</i>
	<b>529</b>	<b>-</b>	<b><i>Other comprehensive income</i></b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program penghargaan purna tugas**

Penilaian aktuarial atas program penghargaan purna tugas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 24 Januari 2023 dan 21 Januari 2022.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	2022	2021	
Asumsi ekonomi			<i>Economic assumptions</i>
Tingkat diskonto	7.40%	7.60%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	5.00%	5.00%	<i>Annual salary growth rate</i>
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0.00%	0.00%	<i>Investment yield of plan aset</i>
Asumsi lainnya			<i>Other assumptions</i>
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	<i>Normal retirement age</i>
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			<i>Retirement rate per year for ages:</i>
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	<i>18-45 years old</i>
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	<i>46-55 years old</i>

**After duty award program**

The actuarial valuation of afterduty award program for the year ended December 31, 2022 and 2021, were performed by Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its report dated January 24, 2023 and January 21, 2022.

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

i. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Biaya jasa kini	3.810	15.832	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga neto	1.203	-	<i>Interest cost net</i>
<b>Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi</b>	<b>5.013</b>	<b>15.832</b>	<b><i>Expense recognized in statement of profit or loss</i></b>

i. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

ii. Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Saldo awal	15.832	-	<i>Beginning balance</i>
Beban tahun berjalan	5.013	15.832	<i>Current service cost</i>
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(5.560)	-	<i>Actuarial gain on obligation</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>15.285</b>	<b>15.832</b>	<b><i>Ending balance</i></b>

ii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program penghargaan purna tugas (lanjutan)**

- iii. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	15.832	-	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	3.810	3.833	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	-	11.999	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga neto	1.203	-	<i>Interest cost net</i>
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(5.560)	-	<i>Actuarial gain on obligation</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>15.285</u></b>	<b><u>15.832</u></b>	<b><i>Ending balance</i></b>

- iv. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	-	-	<i>Beginning balance</i>
Laba aktuarial	5.561	-	<i>Actuarial gain</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>5.561</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><i>Ending balance</i></b>

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

**After duty award program (continued)**

- iii. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

- iv. Remeasurement of net employee benefit liabilities:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program  
Cuti Besar**

Penilaian aktuarial atas program pensiun dwiguna dan cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 24 Januari 2023.

Program Imbalan cuti besar adalah program penggantian hak cuti karyawan. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja selama 6 tahun berturut – turut dan kelipatannya sejak diangkat sebagai pegawai tetap. Penggantian hak cuti besar diberikan sebesar 2 (dua) kali upah pokok.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES  
(continued)**

**Endowment Insurance Pension Program and  
Long Service Leave Program**

The actuarial valuation of endowment insurance pension program and long service leave program for the year ended December 31, 2022, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its report dated January 24, 2023.

Long service leave program are employee leave entitlement replacement programs. The benefits are given to permanent employees who have worked for 6 consecutive years and multiples since being appointed as permanent employees. Replacement for grand leave is given at 2 (two) times the basic salary

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	2022		
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,40%	7,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia: Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	Retirement rate per year for ages: 18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	46-55 years old

i. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

i. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	2022		
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Biaya jasa kini	568	5.729	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested	5.618	12.359	Past service cost - vested
<b>Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi</b>	<b>6.186</b>	<b>18.088</b>	<b>Expenses recognized in statement of profit or loss</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)**

**Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program  
Cuti Besar (lanjutan)**

- ii. Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program
Saldo awal	-	-
Beban tahun berjalan	6.186	18.088
<b>Liabilitas imbalan pasti neto</b>	<b>6.186</b>	<b>18.088</b>

- iii. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2022	
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program
Saldo awal	-	-
Biaya jasa kini	568	5.729
Biaya jasa lalu	5.618	12.359
<b>Liabilitas imbalan pasti neto</b>	<b>6.186</b>	<b>18.088</b>

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES  
(continued)**

**Endowment Insurance Pension Program and  
Long Service Leave Program (continued)**

- ii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

*Beginning balance*  
*Current year expenses*  
**Liabilities defined benefit - net**

- iii. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

*Beginning balance*  
*Current service cost*  
*Past service cost*  
**Liabilities defined benefit - net**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**55. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin LPS, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 3,75% dan 1,75% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan sama dengan atau di bawah 3,50% dan 0,25% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp188.454 dan Rp164.449.

**55. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS  
OF PRIVATE BANKS**

*Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fulfilled.*

*Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposits Guaranteed by LPS, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank. Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 3.75% and 1.75% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2022 and equal to or below 3.50% and 0.25% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2021.*

*On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.*

*The Government guarantee premiums paid by the Bank for years ended December 31, 2022 and 2021, amounted to Rp188,454 and Rp164,449 respectively.*



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**56. PELAPORAN JATUH TEMPO**

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

**56. MATURITY PROFILE**

- a. The maturity of the Bank's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:

	2022						Total/ Total	
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
<b>ASET</b>							<b>ASSETS</b>	
Kas	-	1.988.262	-	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	-	230.541	-	-	-	10.556.199	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	302.688	-	-	-	302.688	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	6.306.518	606.657	-	-	-	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	-	725.515	852.948	2.367.794	2.627.302	8.167.102	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	8.476.609	fair value through other comprehensive income	
Surat berharga Repo	-	4.095.066	-	-	-	4.095.066	Repo marketable securities	
Tagihan reverse repo	-	7.440.160	-	-	192.726	189.961	Reverse repo receivables	
Tagihan lainnya	-	286.147	-	-	-	286.147	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-	724.598	716.337	3.197.406	12.525.044	27.714.660	Loans and sharia financing interest income	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	25.795	48.418	9.901	4.495	557.516	that will still be received	
Beban dibayar dimuka	166.661	-	-	-	-	-	Prepaid expense	
Aset tetap - neto	1.284.250	-	-	-	-	-	Fixed assets - net	
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	502.238	Deferred tax assets - net	
Aset lain-lain	141.492	-	-	-	-	-	Other assets	
<b>Jumlah</b>	<b>1.592.403</b>	<b>22.125.290</b>	<b>2.224.360</b>	<b>5.575.101</b>	<b>15.349.567</b>	<b>56.164.285</b>	<b>103.031.006</b>	
<b>LIABILITAS</b>							<b>LIABILITIES</b>	
Liabilitas segera	-	872.514	-	-	-	-	liability immediately	
Simpanan dari nasabah	-	11.214.472	16.200.878	1.699.788	10.878.340	41.773.905	Deposits from customer	
Simpanan dari bank lain	-	3.287.933	46.630	60	4.500	-	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	-	150.517	-	-	-	402.882	Borrowings	
Utang pajak	47.205	-	-	-	-	-	Taxes payables	
Beban yang masih harus dibayar	-	520.840	-	-	-	-	Accrued expense	
Liabilitas lain-lain	-	550.119	-	-	-	-	Other liabilities	
<b>Jumlah</b>	<b>47.205</b>	<b>16.596.395</b>	<b>16.247.508</b>	<b>1.699.848</b>	<b>10.882.840</b>	<b>42.176.787</b>	<b>87.650.583</b>	
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>1.545.198</b>	<b>5.528.895</b>	<b>(14.023.148)</b>	<b>3.875.253</b>	<b>4.466.727</b>	<b>13.987.498</b>	<b>15.380.423</b>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**56. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan)**

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2021						Total/ Total	
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
<b>ASET</b>								<b>ASSETS</b>
Kas	-	2.023.077	-	-	-	-	2.023.077	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	1.781.878	-	-	-	7.023.422	8.805.300	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	211.443	-	-	-	-	211.443	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	9.313.828	290.619	252.644	39.861	18.980	9.915.932	Placement with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	-	3.404.795	2.618.064	1.668.261	911.035	12.226.108	20.828.263	Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	10.536.388	1.018.372	-	-	-	11.554.760	Amortized cost fair value through other comprehensive income
Surat berharga Repo	-	-	-	-	-	-	-	Repo marketable securities
Tagihan reverse repo	-	3.420.685	-	-	-	-	3.420.685	Reverse repo receivables
Tagihan lainnya	-	230.019	-	-	-	-	230.019	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-	274.918	682.573	1.671.580	2.254.216	37.866.272	42.749.559	Loans and sharia financing
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	2.628	11.869	17.399	17.953	744.051	793.900	Interest income that will still be received
Beban dibayar dimuka	134.200	-	-	-	-	-	134.200	Prepaid expense
Aset tetap - neto	1.144.211	-	-	-	-	-	1.144.211	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	627.211	627.211	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	115.775	-	-	-	-	-	115.775	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>1.394.186</b>	<b>31.199.659</b>	<b>4.621.497</b>	<b>3.609.884</b>	<b>3.223.065</b>	<b>58.506.044</b>	<b>102.554.335</b>	<b>Total</b>
<b>LIABILITAS</b>								<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas segera	-	593.875	-	-	-	-	593.875	liability immediately
Simpanan dari nasabah	-	12.511.223	19.267.011	4.511.689	3.899.151	43.012.793	83.201.867	Deposits from customer
Simpanan dari bank lain	-	4.043.920	142.920	60	1.000	-	4.187.900	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	257.993	-	7.410	-	389.885	655.288	Borrowings
Utang pajak	165.476	-	-	-	-	-	165.476	Taxes payables
Beban yang masih harus dibayar	-	478.647	-	-	-	-	478.647	Accrued expense
Liabilitas lain-lain	-	529.738	-	-	-	-	529.738	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>165.476</b>	<b>18.415.396</b>	<b>19.409.931</b>	<b>4.519.159</b>	<b>3.900.151</b>	<b>43.402.678</b>	<b>89.812.791</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>1.228.710</b>	<b>12.784.263</b>	<b>(14.788.434)</b>	<b>(909.275)</b>	<b>(677.086)</b>	<b>15.103.366</b>	<b>12.741.544</b>	<b>Maturity Gap</b>

- b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing adalah sebesar 2,55% dan 3,39%.

- b. The ratio of classified earning assets to total productive assets as of December 31, 2022 and 2021 is 2.55% and 3.39% respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**57. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ASET</b>		
Kas	24.827	23.530
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	329.777	1.259.529
Surat berharga	852.935	834.752
Piutang:		
- Murabahah	874.944	864.013
- Qardh	36.423	24.972
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(55.246)	(55.969)
Piutang, neto	856.121	833.016
Pembiayaan:		
- Musyarakah	767.912	689.141
- Mudharabah	223.915	184.224
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(27.963)	(27.460)
Pembiayaan, neto	963.864	845.905
Aset ijarah	277	12
Aset tetap	62.414	54.367
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(28.450)	(24.031)
Nilai buku neto	33.964	30.336
Aset lain-lain	9.693	9.715
<b>JUMLAH ASET</b>	<b><u>3.071.458</u></b>	<b><u>3.836.795</u></b>
<b>LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
Giro wadiah	156.090	110.616
Tabungan wadiah	-	-
Liabilitas segera	8.889	854.640
Liabilitas lainnya	1.024.117	1.044.008
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b><u>1.189.096</u></b>	<b><u>2.009.264</u></b>
<b>INVESTASI TIDAK TERIKAT</b>		
Giro mudharabah	1.637	2.920
Tabungan mudharabah	594.597	572.158
Deposito berjangka mudharabah	1.245.458	1.238.104
<b>JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT</b>	<b><u>1.841.692</u></b>	<b><u>1.813.182</u></b>
<b>Laba Tahun Lalu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Laba neto	40.670	14.349
<b>JUMLAH LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS</b>	<b><u>3.071.458</u></b>	<b><u>3.836.795</u></b>

**57. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ASSETS</b>		
Cash	24.827	23.530
Placements with Bank Indonesia and other banks	329.777	1.259.529
Marketable securities	852.935	834.752
Receivables:		
Murabahah -	874.944	864.013
Qardh -	36.423	24.972
Less: Allowance for impairment losses	(55.246)	(55.969)
Receivables, net	856.121	833.016
Financing:		
Musyarakah -	767.912	689.141
Mudharabah -	223.915	184.224
Less: Allowance for impairment losses	(27.963)	(27.460)
Financing, net	963.864	845.905
Ijarah assets	277	12
Fixed assets	62.414	54.367
Less: Accumulated depreciation	(28.450)	(24.031)
Net book value	33.964	30.336
Other assets	9.693	9.715
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b><u>3.071.458</u></b>	<b><u>3.836.795</u></b>
<b>LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY</b>		
<b>LIABILITIES</b>		
Wadiah current accounts	156.090	110.616
Wadiah savings	-	-
Obligations due immediately	8.889	854.640
Other liabilities	1.024.117	1.044.008
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b><u>1.189.096</u></b>	<b><u>2.009.264</u></b>
<b>UNCOMMITTED INVESTMENT</b>		
Mudharabah current account	1.637	2.920
Mudharabah savings	594.597	572.158
Mudharabah time deposits	1.245.458	1.238.104
<b>TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT</b>	<b><u>1.841.692</u></b>	<b><u>1.813.182</u></b>
<b>Retained earnings</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Net income	40.670	14.349
<b>TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY</b>	<b><u>3.071.458</u></b>	<b><u>3.836.795</u></b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**57. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH  
(lanjutan)**

**57. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION  
(continued)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>			<b>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS</b>
Pendapatan operasional			Operating income
- Margin	59.747	59.972	Margin -
- Bagi hasil	75.242	67.376	Profit sharing -
- Sewa	44	44	Rents -
- Operasional Lainnya	61.845	64.330	Other operating -
<b>Pendapatan operasional</b>	<b>196.878</b>	<b>191.722</b>	<b>Operating income</b>
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat			Profit sharing expenses to non-restricted investors fund
- Bank	(578)	(1.005)	Bank -
- Bukan bank	(54.338)	(61.557)	Non bank -
<b>Bagi hasil</b>	<b>(54.916)</b>	<b>(62.562)</b>	<b>Profit sharing</b>
Beban operasional lainnya			Other operating expenses
- Bonus	(166)	(142)	Bonuses -
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(22.794)	(47.643)	Allowance for impairment losses -
- Beban administrasi dan umum	(40.456)	(31.296)	General and administratif expenses -
- Beban personalia	(28.022)	(27.225)	Personnel expenses -
- Beban lainnya	(11.734)	(8.915)	Others -
	<b>(103.172)</b>	<b>(115.221)</b>	
<b>Pendapatan operasional bersih</b>	<b>38.790</b>	<b>13.939</b>	<b>Net operating income</b>
Pendapatan non operasional bersih	1.880	410	Non-operating income - net
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>40.670</b>	<b>14.349</b>	<b>Profit during the year</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**58. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI**

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

1. Perkara perdata No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir sebesar Rp3.000. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) memutuskan pihak Bank menang. Bank telah mengirimkan surat No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT tanggal 3 Juli 2018 dan diterima PN tanggal 6 Juli 2018. Masih menunggu jawaban surat dari PN untuk kepastian inkraht putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
2. Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.BJN tanggal 18 Mei 2018 tentang gugatan Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, kepada Bank dengan tuntutan kerugian material sebesar Rp.4.032, Penggugat mengajukan gugatan untuk memberhentikan proses lelang. Saat ini dalam proses persidangan Kasasi di Mahkamah Agung.
3. Perkara Kepailitan No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV. Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama. Bank sebagai kreditur mengajukan tagihan kepada Kurator atas kredit PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp31.103 saat ini dalam proses verifikasi berkas kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Perkara Perdata No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY tanggal 23 Oktober 2019 gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Bank melawan PT Pan Pacific Insurance dengan tuntutan kerugian sebesar Rp109.254 atas klaim kontra bank garansi jaminan uang muka. Saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2021/PN.Kdr tanggal 8 November 2021 gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh H. Bambang Sumadji HS melawan PT Bank Jatim dengan tuntutan kerugian sebesar Rp3.967 Penggugat mengajukan gugatan untuk pembukaan blokir rekening agar dana bisa diambil. Saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

**58. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES**

*The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:*

1. *Case No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby dated November 21, 2007 about the lawsuit of PT Hikmah Surya Jaya towards Bank, demanding compensation to the amount of Rp3,000 regarding revolving credit. The District Court's and the Apellate Court's decide that Bank won. Bank Jatim has sent a letter number 057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT on July 3, 2018 and received by the District Court on July 6, 2018. Still waiting for a response from the District Court's for the inkraht decision of the High Court.*
2. *Case No.13 / Pdat.G / 2018 / PN.BJN dated May 18, 2018 regarding the lawsuit Hj. Ani Rufa`ida, Drs. H Mahruhin Irfan MSi, to Bank with the demands of material loss amounting to Rp.4.032, Plaintiff filed a lawsuit to dismiss the auction process. Currently in the Cassation trial process at The Supreme Court*
3. *Bankruptcy Case No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby with the pleader PT Fatma Lestari Abadi Mix and CV. Azka Pelangi Bersaudara towards PT Citra Gading Asritama. Bank as a creditor submits a bill to the Curator for the credit of PT Citra Gading Asritama (in bankruptcy) of Rp31,103 currently in the process of creditor file verification at the Surabaya Commercial Court at the Surabaya District Court.*
4. *Civil Case No. 1048/Pdt.G/2019/PN.SBY dated October 23, 2019 a breach of contract filed by the Bank against PT Pan Pacific Insurance with a loss claim Rp109,254 for claims of Bank advance payment counter guarantee currently in the appeals trial at the Supreme Court.*
5. *Civil Case No. 61/Pdt.G/2021/PN.Kdr dated November 8, 2021, a lawsuit against the law was filed by H. Bambang Sumadji HS against PT Bank Jatim with a claim for loss of Rp. 3,967. The plaintiff filed a lawsuit for the opening of a blocked account so that the funds could be retrieved. Currently in the appeal process at the Surabaya High Court.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**58. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)**

6. Perkara Perdata No. 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Niaga.Sby 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2022 gugatan yang diajukan oleh Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) melawan PT Bank Jatim dengan tuntutan kerugian sebesar Rp27.823 Penggugat mengajukan gugatan agar jaminan yang ada di Bank Jatim diserahkan kepada Tim Kurator PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) Saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Bjn tanggal 29 Agustus 2022 tentang gugatan H. Mudjiono, kepada Bank dengan potensi kerugian material sebesar Rp.3.000, Penggugat sebagai Penjamin mengajukan gugatan kepada Bank agar mengembalikan objek jaminan kepada Penggugat. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro
8. Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp9.853.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak mengganggu kinerja Bank.

**59. BANK KUSTODIAN**

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK nomor: S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana Jasa, Sub Divisi *Priority Banking & Kustodian*, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*);
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek; dan
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

**58. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES (continued)**

6. Civil Case No. 6/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2022/PN.Niaga.Sby 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby in the Commercial Court At the Surabaya District Court on February 17, 2022 a lawsuit filed by the Curator Team of PT Citra Gading Asritama (in bankruptcy) against PT Bank Jatim with a claim for loss of Rp27,823 The plaintiff filed a lawsuit so that the collateral in Bank Jatim was submitted to Curator Team of PT Citra Gading Asritama (in bankruptcy) Currently in the process of cassation at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
7. Civil Case Number 34/Pdt.G/2022/PN.Bjn dated August 29, 2022 regarding the claim of H. Mudjiono, to the Bank with a potential material loss of Rp.3,000, the Plaintiff as Guarantor filed a lawsuit to the Bank to return the object of collateral to the Plaintiff. Currently in the trial process at the Bojonegoro District Court
8. Other civil cases with a value of each lawsuit demands under Rp3,000 amount to Rp9,853.

The Bank's management believes that the above cases doesn't interfere to the Bank performances.

**59. BANK CUSTODY**

Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK number: S-4/PM.2/2019 date Januari 29, 2019. Bank's Custodian, which is part of the Service and Fund Divisions, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

1. Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;
2. Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;
3. Corporate action services related to the rights of the marketable securities;
4. Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;
5. Sub-Registry service provider for securities settlement and investment; and
6. Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank Jatim's Custodian Unit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)**  
**As of December 31, 2022 dan 2021**  
**and for the years then ended**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**60. REKLASIFIKASI AKUN**

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022.

**60. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS**

Certain account in the statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020 have been reclassified to conform with the presentation of the statements of financial position as of December 31, 2022.

	<b>Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Setelah reklasifikasi/ After reclassification</b>	
<b>31 Desember 2021</b>				<b>December 31, 2021</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>				<b>Statements of Financial Position</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Simpanan dari nasabah				<i>Deposits from customers</i>
- Pihak berelasi	17.722.756	(3.021)	17.719.735	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	65.479.111	(1.810.161)	63.668.950	<i>Third parties -</i>
Simpanan dari bank lain				<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak berelasi	360.169	-	360.169	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	3.827.731	(52.183)	3.775.548	<i>Third parties -</i>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>				<b>Temporary Syirkah Funds</b>
Simpanan dari nasabah				<i>Deposits from customers</i>
- Pihak berelasi	-	3.021	3.021	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	-	1.810.161	1.810.161	<i>Third parties -</i>
Simpanan dari bank lain				<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak ketiga	-	52.183	52.183	<i>Third parties -</i>
	<b>Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Setelah reklasifikasi/ After reclassification</b>	
<b>31 Desember 2020</b>				<b>December 31, 2020</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>				<b>Statements of Financial Position</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Simpanan dari nasabah				<i>Deposits from customers</i>
- Pihak berelasi	14.375.132	(1.686)	14.373.446	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	54.093.148	(1.680.173)	52.412.975	<i>Third parties -</i>
Simpanan dari bank lain				<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak berelasi	238.860	-	238.860	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	2.616.744	(40.610)	2.576.134	<i>Third parties -</i>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>				<b>Temporary Syirkah Funds</b>
Simpanan dari nasabah				<i>Deposits from customers</i>
- Pihak berelasi	-	1.686	1.686	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	-	1.680.173	1.680.173	<i>Third parties -</i>
Simpanan dari bank lain				<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak ketiga	-	40.610	40.610	<i>Third parties -</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**61. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen PSAK 25 memberi definisi baru dari estimasi akuntansi dan penjelasannya.
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal, penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen PSAK 46 ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tanggahan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

**62. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

**61. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

The following summarizes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Financial Accounting Standards Board and are relevant to the Bank, but is not yet effective for financial statements ended December 31, 2022:

Effective on or after January 1, 2023:

- Amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements concerning Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term", earlier application is permitted. The amendments specify the requirement to classify liabilities as current or non-current.
- Amendment to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error", earlier application is permitted. Amendments to PSAK 25 provide a new definition of accounting estimate and an explanation.
- Amendments to PSAK 46, "Income Taxes" regarding Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction, earlier application is permitted. This amendment to PSAK 46 proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities upon initial recognition, for example from lease transactions, to eliminate differences in practice in the field for such transactions and similar transactions.

Effective on or after January 1, 2025:

- PSAK 74, "Insurance Contracts", adopted from IFRS 17, early application is permitted for entities that have also applied PSAK 71 and PSAK 72.

The Bank is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the financial statement of the Bank.

**62. SUBSEQUENT EVENTS**

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
As of December 31, 2022 dan 2021  
and for the years then ended  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**62. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(lanjutan)**

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

**63. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 13 Februari 2023.

**62. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

*The resolution of Indonesia's economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders. The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.*

**63. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

*The financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on February 13, 2023.*



**Alamat Kantor Pusat**

Jalan Basuki Rachmad 98 – 104, Surabaya 60271

Telp : (62-31) 5310090-5310099

Fax. : (62-31) 5310838

Email: [info@bankjatim.co.id](mailto:info@bankjatim.co.id)

**Laporan Tahunan**

**2022**